



FORUM RISET EKONOMI DAN SOSIAL

IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA CABANG SEMARANG

ISBN 978-979-3649-60-3



PROSIDING

Seminar Nasional & Call for Papers ke-1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia “Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan”

Diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Bank Indonesia

Semarang, 10 Oktober 2017



PROSIDING

FORUM RISET EKONOMI DAN SOSIAL KE – 1 SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER KETAHANAN PANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang

Bekerjasama dengan

Bank Indonesia Semarang

ISBN: 978 – 979 – 3649 – 60 – 3

Editor:

**Firmansyah (Universitas Diponegoro)
Shanty Oktavilia (Universitas Negeri Semarang)
Fafurida (Universitas Negeri Semarang)**

Penyunting:

**Dr. Rahmat Dwisaputra (Bank Indonesia)
Dr. Suharnomo, S.E., M.Si (Universitas Diponegoro)
Firmansyah, SE, M.Si, Ph.D (Universitas Diponegoro)
Dr. Harjum Muharam, SE, ME (Universitas Diponegoro)
Dr. Indira Yanuarti, S.E., M.Si., Akt (Universitas Diponegoro)
Dr. Suchatiningasih DWP, M.Si (Universitas Negeri Semarang)
Dr. Ngatindriatun, MP (Universitas Bina Nusantara)
Dr. Alimuddin Rizal Riva'i, S.E., M.M (Universitas Stikubank)**

**Desain Sampul dan Tata Letak:
Guruh Taufan**

**Penerbit:
ISEI Cabang Semarang**

**Redaksi: ISEI Semarang, Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang, Telp. 024
e-mail: semarangisei@gmail.com**

OKTOBER 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Sambutan Ketua ISEI Semarang Ambutan	viii
Sambutan Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah	x
Susunan Acara Seminar	xii

JUDUL	PENULIS	HLM
Model Penguatan Internasionalisasi Produk Unggulan Daerah dengan Strategi <i>Push</i> dan <i>Pull</i> Marketing	Sri Supriyati dan Daryono	2
Stabilitas Harga Pangan dan Kemiskinan: Pendekatan Keynesian Theory dan <i>Monetary Approach</i>	Rusiadi dan Ade Novalina	23
Strategi Dasar dan Strategi Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar	Elpisah	48
Budaya Kerja, Motivasi dan Peningkatan <i>Quality of Work Life</i> (QWL) dalam Mempengaruhi Kinerja Pengrajin pada Industri Kecil Kluster Lurik di Kabupaten Klaten	Rismawati	68
Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Rasio Pemerintah Kota Medan	Oktarini Khamilah Siregar dan Yunita Sari Rioni	90
Regulasi dan Kebijakan Pangan Satu Upaya Membangun Bangsa yang Sehat dan Produktif	Budi Arsih dan Widihartati Setiasih	115
Analysis of Effect Labor Absorption in Micro, Small and Medium Enterprises to Poverty in Indonesia	Lia Amaliawiati, Farida Nursjanti	141

Dampak Strategi Pemasaran terhadap Keputusan Berkunjung dan Kepuasan Wisatawan ke Bumi Perkemahan Sibolangit	Miftah El Fikri dan Husni Muharram Ritonga	162
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Pendekatan Pembelajaran pada Prestasi Akademik Mahasiswa	Suhana, Lie Liana, Askar Yunianto, dan Desy Herma Fauza	177
Pengaruh Iklim Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior (OCB)</i> dengan Variabel Intervening Kepuasan Kerja (Studi Kasus pada SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang)	Frans Sudirjo	198
Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dalam Mendukung Pembangunan dan Menurunkan Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Batu Bara	Annisa Ilmi Faried Lubis dan Rahmad Sembiring	216
Dampak Budaya Sosial Ekonomi dalam Mempengaruhi Kesejahteraan dan Kemiskinan Keluarga Nelayan Kabupaten Batubara	Rahmad Sembiring dan Annisa Ilmi Faried Lubis	245
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pemerintah Kota Semarang: Tinjauan Relokasi Pasar Johar	Saifudin dan Inarotul Ulya	265
Relevansi Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, dan Amnesti Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Ine Novanty, Ahmad Nurkhin dan Sumiadji	281
The Effect Achievement Motivation, Leadership Character and Internal Culture Towards Employee's Performance	Joko Utomo, Marthin Nanere, Sutono	299
Pengaruh <i>Job Stress</i> Terhadap Loyalitas dan Kinerja Pada PT. Adira Finance Medan	Kholilul Kholik	319
Motivasi dan Situasi Terhadap Pembelian Benih Pada PT. Sang Hyang Seri Medan	Kholilul Kholik dan Renny Maisyarah	345

Bagaimana Strategi Bisnis UMKM Kota Semarang Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ?	Indarto, Joko Santosa, Aprih Santosa	367
Volatilitas di Pasar Saham dan Pasar Valuta	Agung Nusantara dan Sri Nawatmi	387
Pengaruh Komponen Arus Kas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Abnormal Return</i> dengan <i>Earning Per Share (Eps)</i> sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2012 – 2016)	Diana Puspitasari, Herwening Sindu Lestari, Zulaika Putri Rokhimah, dan Ardiani Ika S	406
Aktivitas <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Perusahaan dalam Pengembangan <i>Social Entrepreneurship</i> (Studi Kasus Program Daur Ulang Limbah Kemasan PT. Marimas Putera Kencana Pada Mitra Binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang)	Hani Sirine dan Barnabas Theodore Pistos Utomo Kaya	425
Model ICT Sektor Pertanian: Ditinjau dari Karakter Adopter dan Social Learning	Tutuk Ari Arsanti	453
Pengaruh Kepemilikan Manjerial, Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Informasi Geografis dan <i>Chart Priority</i>	Zulaika Putri R, Nurul Juwariyah, Rosyati	468
	Mohammad Muktiali	490
Kausalitas Ketahanan Pangan dan Kemiskinan: Review Literatur dan Studi Empiris	Florentinus Nugro Hardianto	514
Model Teoretik Ketahanan Pangan: Identifikasi Antecedent dan Konsekuen	Florentinus Nugro Hardianto	523
Model Teoretik Dimensi Ketahanan Pangan	Florentinus Nugro Hardianto	535
Pendekatan Institusional terhadap Permasalahan Ketahanan Pangan	Florentinus Nugro Hardianto	544
Pengaruh Kebijakan Pertanian Terpadu terhadap Pendapatan Petani Lahan Agroforestri di Kabupaten Boyolali	Utami Ari Kusuma W, Darsono, Joko Sutrisno	555

Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA Studi Emiris pada Lima Klaster Unggulan UMKM di Kota Semarang	Wyati Saddewisasi	575
Pengaruh Kepemilikan Manjerial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2015)	Denny Nor Rohman, Titiek Suwarti	591
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat bligasi Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di BEI [Periode 2012-2015]	Anggana Lisiantara	609
Kepuasan Pelanggan dan Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan Listrik Pra Bayar	Rully Fatmawati dan Euis Soliha	638
Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kredit Usaha Produktif (Sistem Pembiayaan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus)	Musthofa ¹⁾ , Alimuddin Rizal Riva'i ²⁾ , Teguh Hadi Prayitno ³⁾	667
Analisis Kesiapan Desa terhadap Permendes No 4 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Desa	Penta Widyartati	684
Pengaruh Kepemilikan Institusi, <i>Board Independent</i> , <i>Board Size</i> dan Nilai Perusahaan di Indonesia	Eka Handriani	701
Peran Kewirausahaan <i>Champion</i> dalam Pengembangan Klaster Pertanian	Sri Sulandjari	720

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan ke Hadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga acara Forum Riset Ekonomi dan Sosial (FOREKS) ke-1 dapat terselenggara. Seminar Nasional dan *Call for Papers* ini diselenggarakan oleh ISEI Cabang Semarang bekerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

FOREKS ke-1 ini bertema “Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan.” Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa hal yang dapat teridentifikasi dari permasalahan ketahanan pangan berkaitan dengan aspek stok/ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan kemiskinan. Permasalahan ketersediaan meliputi, jumlah penduduk; kapasitas produksi semakin terbatas (konversi lahan, kualitas dan kesuburan lahan, penyediaan air, prasarana pengairan); tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan. Permasalahan distribusi meliputi, permasalahan sistem distribusi; prasarana distribusi belum memadai; sistem logistik pangan belum optimal; stabilitas pasokan dan harga; permasalahan spekulasi harga; dan keamanan jalur distribusi. Permasalahan konsumsi pangan meliputi konsumsi pangan yang belum beragam dan pola gizi seimbang (tingginya konsumsi beras perkapita dan industri, diversifikasi pangan karbohidrat non-beras belum optimal, dan ketergantungan pada pangan impor).

Permasalahan ketahanan pangan juga berkaitan dengan permasalahan kemiskinan yang meliputi jumlah penduduk miskin, kerentanan, dan kerawanan pangan. Akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, keuangan, dan informasi serta sarana dan prasarana di perdesaan yang terbatas menjadi bagian dari permasalahan kemiskinan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan sebagai pelaksanaan program kerja ISEI untuk dapat berkontribusi kepada perekonomian daerah, maka ISEI Cabang Semarang menyelenggarakan Forum Riset Ekonomi dan Sosial (FOREKS) ke-1 Tahun 2017.

Adapun peserta Seminar Nasional dan *Call for Papers* adalah para akademisi dan praktisi dari berbagai daerah. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia khususnya Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh rekan-rekan panitia baik dari ISEI Cabang Semarang maupun BI Provinsi Jawa Tengah yang telah menyiapkan segala sesuatunya hingga acara ini terselenggara. Terimakasih pula kepada Narasumber acara Seminar maupun pada peserta *Call for Papers* yang telah mengirimkan artikelnnya untuk kegiatan ini.

Semarang, 10 Oktober 2017
Ketua Panitia

Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si

SAMBUTAN KETUA ISEI SEMARANG



Bismillahirrahmanirrahim,
Yang saya hormati Mentan RI atau yang Mewakili
Yang saya hormati Deputi Gubernur BI dan Segenap
Pimpinan Bank Indonesia;
Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah dan Segenap
Pimpinan SKPD Provinsi Jawa Tengah
Yang saya hormati Pimpinan OJK, dan Perbankan di Jawa
Tengah
Yang saya hormati Rekan-rekan Pengurus dan Anggota
ISEI Semarang Jawa Tengah, serta hadirin sekalian yang
saya muliakan;

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya
atas nikmat dan karunia-Nya lah, hari ini kita dapat bersama berkumpul di Gedung Bank
Indonesia Semarang, dalam rangka kegiatan **Seminar dan Call for Papers Forum Riset
Ekonomi dan Sosial (FOREKS) ke-1** dengan tema **"Ketahanan Pangan dan
Pengentasan Kemiskinan"**.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Kegiatan ini merupakan program kerja ISEI Semarang yang ditopang oleh Bank
Indonesia secara penuh, baik sarana maupun prasarana kegiatan. Oleh karena itu kami
selaku Ketua ISEI Semarang mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
Bank Indonesia khususnya Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tak lupa saya ucapkan
terimakasih pula kepada seluruh rekan-rekan panitia baik dari ISEI Semarang maupun
BI Provinsi Jawa Tengah yang telah menyiapkan segala sesuatunya hingga acara ini
terselenggara. Terimakasih pula pada para Narasumber baik pada acara Seminar
maupun pada peserta Call for papers yang telah mengirimkan naskah ilmiahnya untuk
kegiatan ini.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Secara definisi kedaulatan pangan terkait dengan pihak yang menguasai sumber dan
persediaan pangan, kemandirian pangan terkait dengan proporsi kemampuan dalam
memproduksi pangan, sedangkan ketahanan pangan, menunjukkan kecukupan
persediaan bagi setiap orang baik kualitas maupun kuantitas pada setiap saat, dan ini
merupakan kewajiban negara.

Hal yang terpenting, dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri, harus dapat memberikan jaminan pendistribusian hak pangan bagi rakyat, sehingga pada gilirannya rakyat mampu memproduksi pangan sendiri serta menjamin keberlanjutan produksinya lepas dari berbagai bias dan distorsi.

Salah satu peran pemerintah untuk mengupayakan Program Kedaulatan Pangan agar dapat optimal adalah dengan fokus pada basis keunikan dan kekuatan sumber daya lokal, tentu saja termasuk sumber daya manusianya. Dengan demikian, Insyaa Allah akan terwujud kedaulatan pangan, yang ditekankan pada kecukupan kebutuhan pangan bagi individu dan rumah tangga, tanpa ketergantungan pihak lain melalui impor.

Kedaulatan pangan tidak terlepas dari makna ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Hal ini berimplikasi pada partisipasi aktif segenap unsur masyarakat untuk berkontribusi pada kecukupan kebutuhan pangan.

Walaupun pangan merupakan industri-basis unggulan Indonesia, namun kedaulatan itu tidak akan terwujud jika tidak digali dan dikembangkan dengan teknologi. Teknologi lah yang akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, bahkan menciptakan nilai tambah tinggi pada produk yang dimiliki. Untuk itu, perlu diperjelas fokus terkait politik pertanian kedepan khususnya di bidang pangan, sehingga semua program terkait dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

ISEI Semarang bekerjasama dengan BI menyelenggarakan Forum ini untuk mengkaji dan mengeksplorasi keterkaitan Ketahanan pangan dan Pengentasan Kemiskinan baik secara Teoretik dan Konseptual maupun secara Empirikal yang di kaji dari berbagai sudut pandang ekonomi, bisnis dan sosial. Semoga dengan adanya acara ini, dapat diperoleh masukan-masukan baru untuk Program Ketahanan pangan maupun Kedaulatan Pangan yang dapat mensejahterakan Rakyat Indonesia khususnya Jawa Tengah.

Demikianlah sambutan dari saya, Selamat mengikuti Seminar dan Call for Papers-Foreks ke-1 yang diselenggarakan oleh ISEI Semarang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu-alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 10 Oktober 2017

Ketua Umum ISEI Semarang

Prof. Mohamad Nasir, S.E., M.Si., Ph.D., Akt.

SAMBUTAN PIMPINAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Ketahanan pangan menjadi permasalahan menarik untuk dibahas utamanya mengingat Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Isu ini menjadi strategis mengingat ketahanan pangan berhubungan erat dengan permasalahan sosial ekonomi lain seperti tingkat kestabilan dan keterjangkauan harga komoditas. Apabila tidak tertangani dengan baik, permasalahan tersebut akan semakin membebani tingkat kemiskinan masyarakat. Sumbangan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan yang jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan menunjukkan bahwa salah satu upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah adalah melalui ketahanan pangan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan meskipun masih cukup tinggi, namun jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada Maret 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2017 mencapai 4,45 juta orang (13,01%), atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4,49 juta orang (13,27%).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak pernah berhenti berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan tersebut. Berbagai solusi hadir sebagai kerjasama Bank Indonesia dengan stakeholder terkait. Kestabilan dan keterjangkauan harga komoditas berhasil dijaga dengan baik dalam beberapa periode terakhir. Hal ini tercermin dari capaian inflasi Jawa Tengah sampai dengan September 2017 yang tetap terkendali, yaitu sebesar 2,73% (ytd) dan secara tahunan sebesar 3,58% (yoy), atau masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2017, yaitu $4\pm 1\%$. Inflasi yang terkendali tersebut dicapai dengan dukungan inovasi berbasis teknologi berwujud aplikasi SiHati (Sistem Informasi Harga dan Produksi) mampu membantu para pemangku kebijakan dalam memantau dan merumuskan kebijakan terkait kestabilan harga.

Inisiasi Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan TPID Provinsi Jawa Tengah tersebut mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Selain itu, Bank Indonesia juga berinisiasi melakukan bantuan teknologi dengan memanfaatkan ozon untuk menjaga tingkat kualitas komoditas pasca panen. Hasil riset telah membuktikan secara sah penggunaan ozon mampu menjaga komoditas pasca panen baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut berujung pada kesejahteraan petani dapat

terjaga karena harga komoditas tidak terpuruk pada saat musim panen tiba. Kenyataan pahit harus diterima kaum petani yaitu ketika panen tiba, nilai tukar petani justru mencatatkan nilai defisit. Definisi atas angka tersebut adalah harga yang diterima petani relatif lebih rendah dibandingkan nilai yang dibayarkan. Namun demikian, kesejahteraan petani di Jawa Tengah yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 102,56; lebih tinggi dibanding triwulan II 2017 yang mencapai 99,55, maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 100,88. Fakta tersebut merupakan salah satu potret kemiskinan di Jawa Tengah yang utamanya terjadi di pedesaan dan mayoritas bekerja di lapangan usaha pertanian.

Upaya Bank Indonesia terkait ketahanan pangan juga dilakukan melalui Program Pengembangan UMKM dalam rangka pengendalian inflasi dan peningkatan kapasitas ekonomi secara berkesinambungan. Beberapa program pengendalian inflasi komoditas ketahanan pangan (klaster) yang diinisiasi Bank Indonesia di wilayah Jawa Tengah antara lain klaster sapi perah terintegrasi hortikultura di Kabupaten Magelang, klaster cabai terintegrasi sapi potong di Kab. Blora, klaster jagung terintegrasi peternakan di Kab. Grobogan, serta klaster bawang putih di Kab. Temanggung dan Magelang. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan program UMKM unggulan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan/menciptakan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru secara berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya lokal. Dalam program tersebut, Bank Indonesia memberikan bantuan melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) serta pendampingan dan pemberian bantuan teknis seperti pelatihan, seminar, *workshop*, dan forum klaster.

Upaya Bank Indonesia terkait ketahanan pangan dilakukan secara menyeluruh yang didukung oleh riset yang mencakup berbagai aspek meliputi logistik pangan tanpa mengabaikan kesejahteraan petani. Namun tak ada gading yang tak retak. Kami membuka ruang untuk berdiskusi untuk perbaikan upaya yang kami lakukan. Hadirin dan rekan peneliti sekalian, melalui seminar nasional ini mari kita saling bertukar pikiran dalam tataran ilmiah agar dapat diperoleh berbagai rekomendasi positif untuk kemajuan dan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, 10 Oktober 2017

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dr. Rahmat Dwisaputra, MBA
Direktur

SUSUNAN ACARA

SUSUNAN ACARA SEMINAR DAN *CALL FOR PAPERS*
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-1
Semarang, 10 Oktober 2017
Diselenggarakan di Gedung Bank Indonesia (BI)
Jl. Imam Bardjo no. 4, Pleburan, Semarang

Waktu	Kegiatan	Tempat
08.00 – 08.30	Registrasi	Ruang Lokapala Lantai 8
08.30 – 08.40	Pembukaan oleh MC	
08.40 – 08.50	Sambutan : Pimpinan Kantor Perwakilan BI Prov. Jateng dan DI Yogyakarta	
08.50 – 09.00	Sambutan : Ketua Harian ISEI Semarang	
09.00 – 09.10	Doa	
09.10 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> : Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo	
09.40 – 09.45	Pembukaan oleh Moderator	
09.45 – 11.00	Paparan Narasumber	
11.00 – 12.00	Diskusi	
12.00 – 13.00	Ishoma	Ruang Lokapala Lantai 8 Mushola ada di lantai 7
13.00 – 15.00	Paparan paper sesi I	Ruang rapat lantai 5 Ruang rapat lantai 4 Ruang rapat lantai 2
15.00 – 15.30	<i>Coffee Break</i>	Ruang Lokapala Lantai 8
15.30 – 16.30	Paparan paper sesi II	Ruang rapat lantai 5 Ruang rapat lantai 4 Ruang rapat lantai 2
16.30 – 17.00	Penutupan	Ruang Lokapala Lantai 8

Jadwal Sesi I
Pukul 13.00-15.00 WIB

No	Judul	Pemakalah	Ruangan
1	STABILITAS HARGA PANGAN DAN KEMISKINAN: PENDEKATAN KEYNESIAN THEORY DAN MONETARY APPROACH	RUSIADI, ADE NOVALINA	Lantai 2
2	TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER NEGARA EMERGING MARKET: EFEKTIFKAH MENJAGA STABILITAS HARGA DAN KEMISKINAN?	RUSIADI, ADE NOVALINA	Lantai 2
3	STRATEGI DASAR DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR	ELPISAH	Lantai 2
4	PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS RASIO PEMERINTAH KOTA MEDAN	YUNITA SARI RIONI, OKTARINI KHAMILAH SIREGAR	Lantai 2
5	ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BATU BARA	ANNISA ILMI FARIED LUBIS, RAHMAD SEMBIRING	Lantai 2
6	DAMPAK BUDAYA SOSIAL EKONOMI DALAM MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN KELUARGA NELAYAN KABUPATEN BATUBARA	RAHMAD SEMBIRING, ANNISA ILMI FARIED LUBIS	Lantai 2
7	PERAN KEWIRAUSAHAAN CHAMPION DALAM PENGEMBANGAN KLASTER PERTANIAN	SRI SULANDJARI	Lantai 2
8	THE EFFECT ACHIEVEMENT MOTIVATION, LEADERSHIP CHARACTER AND INTERNAL CULTURE TOWARDS EMPLOYEE'S PERFORMANCE	JOKO UTOMO, MARTHIN NANERE, SUTONO	Lantai 4
9	BUDAYA KERJA, MOTIVASI DAN PENINGKATAN QUALITY OF WORK LIFE (QWL) DALAM MEMPENGARUHI KINERJA PENGRAJIN PADA INDUSTRI KECIL KLASTER LURIK DI KABUPATEN KLATEN	RISMAWATI	Lantai 4
10	DAMPAK STRATEGI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG DAN KEPUASAN WISATAWAN KE BUMI PERKEMAHAN SIBOLANGIT	MIFTAH EL FIKRI, HUSNI MUHARRAM RITONGA	Lantai 4
11	STRATEGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) STUDI EMIRIS PADA LIMA KLASTER UNGGULAN UMKM DI KOTA SEMARANG	WYATI SADDEWISASI	Lantai 4
12	PENGARUH JOB STRESS TERHADAP LOYALITAS DAN KINERJA PADA PT. ADIRA FINANCE MEDAN	KHOLILUL KHOLIK	Lantai 4

No	Judul	Pemakalah	Ruangan
13	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI KREDIT USAHA PRODUKTIF (SISTEM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KUDUS)	MUSTHOFA, ALIMUDDIN RIZAL RIVA'I, TEGUH HADI PRAYITNO	Lantai 4
14	ANALYSIS OF EFFECT LABOR ABSORPTION IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES TO POVERTY IN INDONESIA	LIA AMALIWIATI, FARIDA NURSJANTI	Lantai 4
15	MOTIVASI DAN SITUASI TERHADAP PEMBELIAN BENIH PADA PT. SANG HYANG SERI MEDAN	KHOLILUL KHOLIK, RENNY MAISYARAH	Lantai 5
16	MODEL ICT SEKTOR PERTANIAN: DITINJAU DARI KARAKTER ADOPTER DAN SOCIAL LEARNING	TUTUK ARI ARSANTI	Lantai 5
17	KAUSALITAS KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN: REVIEW LITERATUR DAN STUDI EMPIRIS	FLORENTINUS NUGRO HARDIANTO	Lantai 5
18	MODEL TEORETIK KETAHANAN PANGAN: IDENTIFIKASI ANTESEDEN DAN KONSEKUEN	FLORENTINUS NUGRO HARDIANTO	Lantai 5
19	MODEL TEORETIK DIMENSI KETAHANAN PANGAN	FLORENTINUS NUGRO HARDIANTO	Lantai 5
20	PENDEKATAN INSTITUSIONAL TERHADAP PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN	FLORENTINUS NUGRO HARDIANTO	Lantai 5
21	PENGARUH KEBIJAKAN PERTANIAN TERPADU TERHADAP PENDAPATAN PETANI LAHAN AGROFORESTRI DI KABUPATEN BOYOLALI	UTAMI ARI KUSUMA W, DARSONO, JOKO SUTRISNO	Lantai 5

Jadwal Sesi II
Pukul 15.30-16.30

No	Judul	Pemakalah	Ruangan
1	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG: TINJAUAN RELOKASI PASAR JOHAR	SAIFUDIN, INAROTUL ULYA	Lantai 2
2	PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DENGAN EARNING PER SHARE (EPS) SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2012 - 2016)	DIANA PUSPITASARI, HERWENING SINDU LESTARI, ZULAIKA PUTRI ROKHIMAH, ARDIANI IKA S	Lantai 2
3	RELEVANSI PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN AMNESTI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	AHMAD NURKHIN, SUMIADJI, INE NOVANTY	Lantai 2
4	AKTIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (STUDI KASUS PROGRAM DAUR ULANG LIMBAH KEMASAN PT. MARIMAS PUTERA KENCANA PADA MITRA BINAAN DI DESA KINIBALU BARAT SEMARANG)	HANI SIRINE, BARNABAS THEODORE PISTOS UTOMO KAYA	Lantai 2
5	PENGARUH KEPEMILIKAN MANJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING	ZULAIKA PUTRI ROKHIMAH, NURUL JUWARIYAH, ROSYATI	Lantai 2
6	PENGARUH KEPEMILIKAN MANJERIAL, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2012-2015)	DENNY NOR ROHMAN, TITIEK SUWARTI	Lantai 2
7	KARAKTERISTIK PERSONAL DAN KEMAMPUAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS KARYAWAN KOPERASI DI KOTAMADIA SEMARANG)	INDIRA JANUARTI	Lantai 2
8	MODEL PENGUATAN INTERNASIONALISASI PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN STRATEGI PUSH DAN PULL MARKETING	SRI SUPRIYATI, DARYONO	Lantai 4
9	BAGAIMANA STRATEGI BISNIS UMKM KOTA SEMARANG DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ?	INDARTO, JOKO SANTOSA, APRIH SANTOSA	Lantai 4

No	Judul	Pemakalah	Ruangan
10	PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH STRUKTUR ASSET DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL	CEACILIA SRIMINDARTI, PANCAWATI HARDININGSIH, RACHMAWATI MIETA OCTAVIANI	Lantai 4
11	KEPUASAN PELANGGAN DAN DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN LISTRIK PRA BAYAR	RULLY FATMAWATI, EUIS SOLIHA	Lantai 4
12	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI [PERIODE 2012-2015]	ANGGANA LISIANTARA	Lantai 4
13	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN PADA PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA	SUHANA , LIE LIANNA, DESY HERMA FAUZA, ASKAR YUNianto	Lantai 4
14	PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSI, BOARD INDEPENDENT, BOARD SIZE DAN NILAI PERUSAHAAN DI INDONESIA	EKA HANDRIANI	Lantai 4
15	REGULASI DAN KEBIJAKAN PANGAN SATU UPAYA MEMBANGUN BANGSA YANG SEHAT DAN PRODUKTIF	BUDI ARSIH, WIDIHARTATI SETIASIH	Lantai 5
16	VOLATILITAS DI PASAR SAHAM DAN PASAR VALUTA	AGUNG NUSANTARA, SRI NAWATMI	Lantai 5
17	ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN CHART PRIORITY	MOHAMMAD MUKTIALI	Lantai 5
18	ANALISIS EFISIENSI TEKNIS USAHA TANI SAYUR ORGANIK (STUDI KASUS DI KECAMATAN GETASAN)	EFRIYANI SUMASTUTI, BAMBANG SUPRIYADI, HIMAWAN ARIF SUTANTO	Lantai 5
19	IMPLEMENTASI KARTU TANI DI DESA KALISALAK DAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	ISMI AZIDA, SUCIHATININGSIH DIAN WISIKA PRAJANTI	Lantai 5
20	AKSELERASI KAPABILITAS PEREMPUAN MISKIN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA MELALUI KREDIT MIKRO BERBASIS SELF HELP GROUP	CHATARINA YEKTI PRAWIHATMI	Lantai 5

No	Judul	Pemakalah	Ruangan
21	ANALISIS KESIAPAN DESA TERHADAP PERMENDES NO 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA	PENTA WIDYARTATI	Lantai 5
22	PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DENGAN VARIABEL INTERVENING KEPUASAN KERJA (STUDI KASUS PADA SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SEMARANG)	FRANS SUDIRJO	Lantai 5

ARTIKEL

MODEL PENGUATAN INTERNASIONALISASI PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN STRATEGI *PUSH* DAN *PULL* MARKETING

Sri Supriyati, Daryono

Surel: daryono_jvc@yahoo.com

Mahasiswa S3 Program Doktor, Ilmu Ekonomi, Undip

ABSTRAK

Kompleksitas fenomena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin banyak menarik perhatian banyak kalangan. Skala usaha kecil dan menengah tidak bisa dimaknai bahwa UMKM hanyalah merupakan format kecil dari perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Karakteristik aktivitas UMKM yang tidak terstruktur dibanding perusahaan besar justru menawarkan tantangan dan kompleksitas yang tinggi. Proses internasionalisasi produk merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh UMKM dalam rangka melakukan perluasan pasar. Proses internasionalisasi melalui 3 fase: basic phase, planning phase, execution phase. Dalam hybrid model fase basic, adalah anteseden internal dan eksternal sebagai driver internasionalisasi pasar. Planning phase kolaborasi antara berbagai stakeholder, yaitu UMKM, CV exportir, pemerintah daerah, perguruan tinggi, bank Indonesia, serta LSM yang menangani bidang terkait. Fase eksekusi menjadi bagian yang integral dengan fase planning, peran lembaga-lembaga seperti Pemerintah (daerah), Bank Indonesia, perguruan tinggi, dan LSM melakukan strategi push dan pull marketing.

Kata kunci: *UMKM, Internasionalisasi Produk, Industri Keuangan, Push & Pull Marketing*

Latar Belakang

Kompleksitas fenomena Usaha Kecil Menengah (UKM) semakin banyak menarik perhatian kalangan peneliti. Skala usaha kecil dan menengah tidak bisa dimaknai bahwa UKM hanyalah merupakan format kecil dari perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Menurut Currant dan Blackburn (2001), karakteristik aktivitas UKM yang relatif tidak terstruktur dibanding perusahaan besar justru menawarkan tantangan dan kompleksitas yang tinggi dalam riset.

Setiap perusahaan, termasuk di dalamnya UKM, yang beroperasi di pasar internasional akan berusaha mencari keunggulan kompetitif. Untuk itu perlu dipahami tentang apa yang menentukan kesuksesan dan kegagalan upaya internasionalisasi

perusahaan khususnya dalam setting UKM. Keunggulan kompetitif merupakan intisari manajemen strategik dan issue yang menarik perhatian peneliti yang fokus pada masalah internasionalisasi perusahaan. Internasionalisasi itu sendiri merupakan dimensi penting yang utama dari proses strategi bagi kebanyakan perusahaan (Melin, 1992). Keberhasilan internasionalisasi menjadi tidak berarti banyak jika internasionalisasi tersebut tidak dapat memberi kontribusi dalam pencapaian kinerja strategik yang lebih besar.

Ekspansi internasional saat ini sudah bukan lagi eksklusif domain bagi perusahaan-perusahaan multinasional (Wright and Ricks 1994; Zahra 2005). Meskipun riset-riset yang menggali fenomena internasionalisasi sejauh ini memang masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar (multinasional), namun dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai studi yang mempelajari proses internasionalisasi untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya lebih kecil, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang berada dalam *knowledge-intensive industries* (Etemad and Wright 2003; Peng 2001).

Wright and Ricks (1994: 699) menyatakan bahwa kecenderungan yang semakin kuat di lingkungan yang semakin mengglobal adalah masuknya perusahaan-perusahaan kecil dalam bisnis internasional. Globalisasi menawarkan banyak peluang bagi sektor UKM, salah satu diantaranya adalah semakin tipisnya hambatan perdagangan lintas negara. Fenomena tersebut mendorong perusahaan-perusahaan kecil yang sebelumnya hanya beroperasi pada tingkat lokal untuk memasuki pasar asing sehingga selanjutnya mendorong pertumbuhan bisnis itu sendiri (Lenihan et al. 2010). Beberapa dampak signifikan yang lain yang pernah dikaji beberapa peneliti misalnya akses ke *niche market* baru, peluang untuk menyerap kelebihan kapasitas produksi atau output, memperoleh *insight* praktek-praktek terbaik dalam bisnis internasional, mencapai *economies of scale*, sebagai alat untuk mendiversifikasi resiko bisnis, minimasi *cost*, dan mengoptimalkan segmentasi pasar (Davenport and Bibby, 1999; Lenihan et al., 2010).

Studi Young (1987) merupakan salah satu riset yang paling awal menekankan pentingnya mempelajari proses internasionalisasi bagi perusahaan kecil (UKM), yang kemudian ide ini berkembang cukup pesat dalam ruang lingkup manajemen strategik dan bisnis internasional. Para pakar yang merintis agenda riset pada bidang strategi

dan *entrepreneurship* menyatakan bahwa internasionalisasi perusahaan kecil merupakan topik yang akan banyak memberikan pengetahuan dari sisi perspektif strategik. Hitt et al. (2001) menyatakan bahwa studi internasionalisasi merupakan suatu kajian yang muncul secara natural dalam domain *strategic entrepreneurship*. Beberapa peneliti lain (Schwens dan Kabst, 2009; Keupp dan Gassmann, 2009) mengklasifikasi studi internasionalisasi bisnis ini ke dalam bidang riset *international entrepreneurship*. Secara teoritis, bidang riset *international entrepreneurship* menunjukkan heterogenitas yang tinggi (Schwens dan Kabst, 2009), yang bersumber dari kurangnya kemapanan fondasi teoritis. Banyak sekali rerangka teoritis mapan yang diadopsi dan dijadikan fondasi dalam bidang riset ini, seperti *the resource-based view* (Bloodgood et al. 1996; Zahra et al. 2003), *the internationalization process theories* (Johanson and Vahlne 1977), dan *the international new venture theory* (Oviatt and McDougall 1994). Kaarna (2010) menyatakan beberapa rerangka lain seperti *social network theory*, *organizational learning*, *interfirm network theory*, dan *social cognition* sebagai rerangka yang juga banyak dijadikan fondasi riset internasionalisasi bisnis.

Karakteristik utama UKM adalah keterbatasan kepemilikan sumberdayanya relatif dibanding perusahaan besar. Namun hal ini tidak selalu berdampak kurangnya kapabilitas perusahaan dalam meluaskan jangkauannya di luar pasar domestiknya. Banyak perusahaan kecil/menengah yang memiliki keunggulan karena memiliki keahlian, produk, dan keahlian unik yang berhasil diterapkan pada pasar asing (Calof, 1993). Sejalan dengan temuan ini, Hitt et al. (2001) menyatakan, bahwa banyak juga perusahaan kecil yang mampu dan berhasil me-*leverage* sumber dayanya yang terbatas tersebut sehingga mencapai posisi yang kuat di pasar. Untuk itu, Hitt et al. (2001) menyatakan pentingnya mempelajari internasionalisasi pada perusahaan kecil dengan perspektif strategik dan *entrepreneurship*.

Proses internasionalisasi produk merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam rangka melakukan perluasan pasar. Cara ini di satu sisi dapat menjadi solusi efektif guna memperoleh kejelasan tempat di mana serinkali UMKM sering merasa kesulitan mencari tempat bagi terserapnya produk tetapi di sisi yang lain juga dapat mendatangkan kesulitan jika tidak ada pihak yang mendukung tersedianya

sarana yang dibutuhkan misalnya dalam hal permodalan, networking dan sumber daya manusia.

Sarana permodalan yang menjadi bagian integral dari UMKM, tampaknya Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menjadi pihak yang dapat mendukung terwujudnya UMKM yang berdaya saing. Melalui IKNB karena skala bisnis yang tidak begitu besar maka persoalan pembiayaan dapat ter-cover. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, terdapat peningkatan porsi aset industri keuangan non-bank (IKNB) terhadap sektor jasa keuangan sepanjang 2016. Tercatat, hingga akhir 2016, aset IKNB tembus di angka Rp 1.845 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 20,8 persen dari total aset sektor jasa keuangan (www.kompas.com).

Model Teoritis Internasionalisasi UMKM

Studi-studi empiris yang ditujukan untuk membangun model internasionalisasi secara universal mayoritas dilakukan pada setting perusahaan-perusahaan besar. Dalam literatur yang berkaitan dengan studi internasionalisasi bisnis, dapat dibedakan beberapa model teoritis berikut:

a. *Experiential (empiric) learning models.*

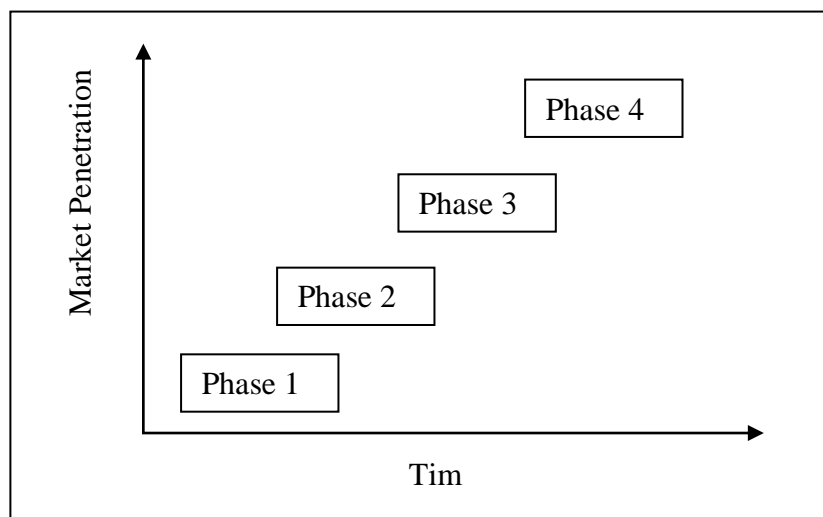
Model ini didasarkan atas perilaku dan pertumbuhan perusahaan yang disebut sebagai “*incremental internationalization model*” atau *the Uppsala model*. Model ini menjelaskan cara dimana pengetahuan yang ada berkaitan dengan pasar asing menentukan strategi masuk ke pasar dan merubah praktek bisnis yang dilakukan saat ini. Perusahaan melakukan internasionalisasi secara gradual dan dalam beberapa tahap dan pada saat bersamaan memperoleh pengetahuan spesifik pada setiap tahapan tersebut. Penekanannya adalah pada pengetahuan spesifik tentang pasar yang diperoleh dengan melakukan bisnis pada pasar tersebut, dan berpengaruh langsung dalam menentukan untuk bergerak ke tahap berikutnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan melakukan bisnis dalam pasar domestik dan kontak dengan pasar asing pertama kali terjadi melalui pemesanan langsung. Keputusan ekspor tidak serta merta diambil atau ekspor mungkin dilakukan secara tidak teratur (*irregular*) dan dalam kuantitas terbatas. Ketika pesanan meningkat, perusahaan mulai memenuhi permintaan melalui agen internasionalnya. Pada kasus dimana pasar asing menunjukkan kondisi yang memuaskan, manajemen perusahaan mungkin akan bergerak ke tahap berikutnya.

Tahap ketiga merepresentasikan pembentukan cabang di luar negeri (pasar asing tersebut). Jika hasilnya tetap memuaskan, perusahaan bisa bergerak ke tahap akhir internasionalisasi dan membuka fasilitas manufaktur di negara tersebut.

Sebagai hasil riset yang dilakukan di Skandinavia, Johanson dan Vahlne menciptakan model ini dan mempublikasikannya pada tahun 1977 dengan menyebutnya sebagai model “*Internationalization Process of the Firm*”. Munculnya *Uppsala Model* mendapat dukungan signifikan karena mendorong banyak publikasi sejumlah studi lain. Namun model tersebut tidak lepas dari banyak kritik, dengan alasan-alasan berikut:

- Kesimpulan diambil dari sejumlah studi yang dilakukan di negara-negara Skandinavia dan kurangnya validasi empiris di kondisi pasar yang lain.
- Model tidak memprediksi seberapa cepat perusahaan bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya.
- Model tidak memberikan penjelasan untuk perusahaan yang melompati suatu tahapan tertentu atau perusahaan yang melakukan internasionalisasi secara simultan di beberapa pasar.

Teori internasionalisasi menurut Model Uppsala digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Teori Internasionalisasi Bisnis Model Uppsala

Keterangan:

Phase 1: tidak ada aktifitas ekspor

Phase 2: ekspor dibantu oleh agen

Phase 3: pembentukan cabang di pasar luar negeri

Phase 4: pembentukan fasilitas manufaktur di pasar luar negeri

b. *Systematic Planning Model.*

Model ini melihat internasionalisasi sebagai proses yang secara dilakukan secara sistematis dan terencana, terjadi secara gradual dan menggunakan *market research* yang kuat untuk meningkatkan kinerja pemasaran di pasar internasionalnya. Yip (2000) menyebut modelnya dengan “Way Station Model” internasionalisasi SME, meliputi 6 tahap: motivasi dan perencanaan strategik, riset pasar, pemilihan pasar, pemilihan strategi masuk, *problem planning* dan *post-entry behavior*.

Karakteristik dari seluruh *Systematic Planning Model* adalah pada rasionalitasnya dan secara ketat proses terjadi secara bertahap, dan kedua hal tersebut merupakan karakteristik yang paling mendapat sorotan dan kritik. Diantaranya adalah bagaimana menjelaskan *rapid entry* SME pada situasi bisnis yang turbulen seperti saat ini. Model ini juga tidak menjelaskan fakta bahwa banyak keputusan saat ini dibuat secara simultan, bukan berurutan/bertahap.

c. *Accidental Perspective Models.*

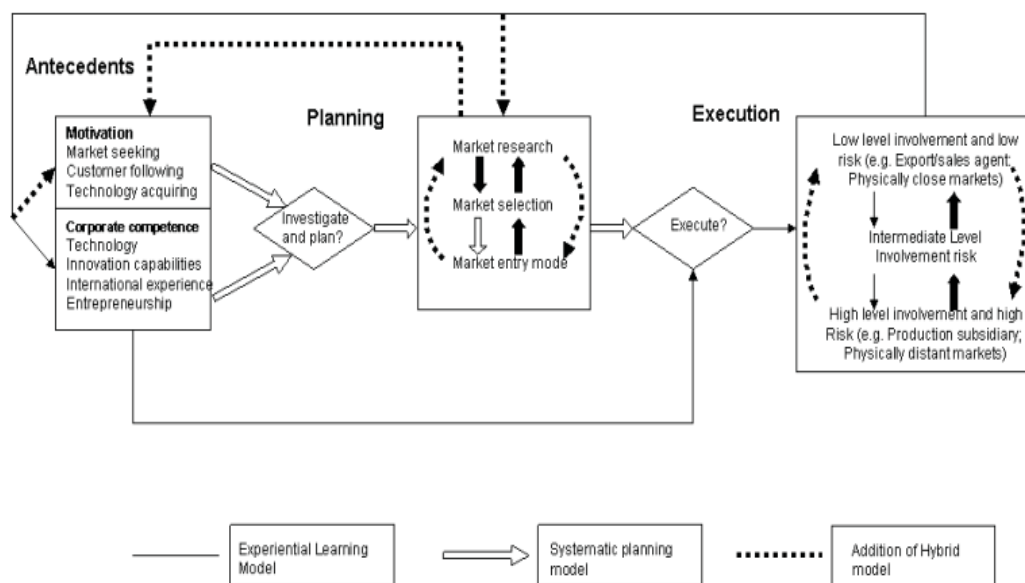
Model ini menyatakan bahwa proses internasionalisasi bergantung pada situasi saat ini dimana perusahaan berada. Bagaimana proses tersebut akan dilakukan ditentukan oleh lingkungan, struktur industri dimana perusahaan tersebut merupakan bagian dari struktur tersebut dan strategi pemasarannya. Boter and Holmquist (1996) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM), yang melakukan bisnis dalam sektor ekonomi tradisional, menginternasionalisasi bisnisnya dalam jangka panjang, sedangkan perusahaan yang berasal dari sektor berteknologi tinggi mengadopsi model internasionalisasi yang diakselerasi karena berhubungan dengan pengembangan produk yang tidak dapat diprediksi dan fungsi produk baru. Model ini menekankan pada sifat proses internasionalisasi UKM yang tidak dapat diprediksi dan kritik yang ada ditujukan pada ketidakmampuannya dalam memberikan kerangka yang koheren untuk studi-studi yang terbaru.

d. *The Hybrid Model.*

Model ini diciptakan dengan mengintegrasikan *experiential learning model* dan *systematic planning model*, dengan elemen-elemen *contingency model*. Model ini disebut sebagai model yang terbaik dibanding masing-masing pendekatan teoritis sebelumnya. Model ini memberikan gambaran holistik tentang proses internasionalisasi tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan model-model

sebelumnya. Model ini berlaku untuk meng-*upgrade* riset teoritis yang ada saat ini. Ada tiga aspek terpenting yang membedakan *hybrid model* dengan semua model lainnya. Dengan mengintegrasikan *systematic planning model* dan *experiential learning model*, maka tercapai suatu gambaran yang lebih proporsional tentang proses internasionalisasi, dan pengkombinasian kedua model tersebut membuatnya menjadi lebih kuat argumentasinya. Proses internasionalisasi UKM saat ini sesungguhnya tidak dapat diprediksi, itulah kenapa suatu model tidak bisa menjelaskan semua fenomena tersebut. Proses internasionalisasi menurut model ini dilakukan melalui 3 fase: *basic (antecedent) phase, planning phase, execution phase*.

Gambar 2 menunjukkan hubungan dinamis *experiential learning model* dan bagian-bagian *systematic learning models* yang digambarkan oleh garis single dan ganda. Tanda panah hitam digunakan untuk mengkomplemen beberapa elemen dan menunjukkan bagaimana setiap model adalah merupakan bagian integral dari gambaran yang lebih besar (contoh *feedback* dari *execution* ke motivasi dan perencanaan, kemudian *alternative sequences* antara perencanaan dan phase eksekusi). Jika faktor motivasi dan kemampuan perusahaan (pada *antecedent phase*) dipandang sebagai elemen dasar proses internasionalisasi, maka elemen *contingency model* dimasukkan pada pembahasan.



Sumber: Li, L., Li, D., Dalgic, T. 2004.

Gambar 2. Hybrid Model Internationalization Process

Beberapa keunggulan *hybrid model* khususnya bagi pengelola UMKM adalah:

- *Hybrid model* memberikan cara bagaimana menyiapkan cara untuk masuk ke pasar asing, menginvestigasi motivasi dan kemampuan perusahaan secara hati-hati, mengidentifikasi dan fokus pada langkah-langkah kunci dalam proses internasionalisasi dan mendistribusikan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya secara hati-hati.
- Model ini tidak secara ketat bersifat linier *sequential*. Fleksibilitas model membantu manager membuat penilaian selama proses internasionalisasi dan membantu manager mempelajari strategi yang dilakukan pesaing.
- Model ini menyajikan internasionalisasi sebagai proses berulang (*iterative process*). Masing-masing fase mendapat umpan balik dan manager memilih berbagai opsi dan mengenali keterbatasan-keterbatasannya dalam melalui masing-masing fase, dan model ini membantu manager untuk menghindari kesalahan-kesalahan serius.

e. ***Born Global Model.***

Banyak perusahaan-perusahaan kecil dalam waktu relatif singkat berhasil menjadi pemain global. Contohnya banyak terjadi di lingkungan perusahaan pembuat perangkat lunak dan *knowledge-based industry* (contoh Amazon, Google, E-Bay, Skype, YouTube, Facebook). Perusahaan-perusahaan yang '*born global*' menggunakan aktifitas pemasaran yang ditujukan pada pasar global, kebanyakan karena sifat produknya atau mereka ingin melakukan bisnis di ceruk pasar tertentu pada pasar domestik yang permintaannya menjanjikan. Reid (1981) menyatakan bahwa banyak perusahaan '*born global*' melakukan bisnis pada industri dimana pengetahuan menjadi faktor kuncinya (*knowledge-intensive industries*), dan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan proses internasionalisasi dalam lima tahun awal dari perusahaan tersebut didirikan.

Berdasar pengalaman-pengalaman internasionalisasi perusahaan kecil dan menengah (UKM) di beberapa negara sejauh ini, beberapa kesimpulan umum dapat ditarik sebagai berikut:

- Negara-negara kecil dengan pasar domestik yang kecil lebih banyak melakukan internasionalisasi, dengan kata lain, ukuran pasar domestik merupakan faktor penting.

- Menemukan partner bisnis baru di pasar asing merupakan cara yang dipandang paling mudah dan paling umum dilakukan dalam proses internasionalisasi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di banyak negara.
- Ukuran perusahaan adalah penting. Perusahaan yang berskala menengah umumnya lebih banyak yang melakukan internasionalisasi dibanding perusahaan yang ukurannya mikro atau kecil.
- Perbedaan sektor industri juga menentukan tahapan internasionalisasi. Contoh, sektor ritel secara tradisional berorientasi lokal dan sangat sedikit yang berorientasi pasar asing. Sektor transportasi dan telekomunikasi bisaanya akan masuk pada pasar asing dengan ukuran yang lebih besar.
- Perusahaan kecil dan menengah yang sudah melakukan internasionalisasi cenderung untuk masuk ke bentuk kerjasama informal atau formal yang berbeda.

Deskripsi Ide

Proses globalisasi memiliki dampak yang kuat terhadap filosofi bisnis UMKM. Beberapa pengusaha UMKM memandang fenomena ini sebagai peluang untuk berekspansi dan melihat bahwa dengan mengandalkan semata-mata pada pasar domestik akan merugikan dalam jangka panjang dan pertumbuhan bisnis itu sendiri.

Internasionalisasi bisnis didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis di luar batas negara yang mendasarkan pada prinsip pemasaran internasional. Proses ini seringkali terjadi dengan cepat dan dalam beberapa tahapan yang mengarah pada perubahan-perubahan signifikan pada bisnis (perusahaan) itu sendiri dan aktifitas ekonominya.

Ketika UMKM memutuskan untuk terlibat dalam aktivitas internasional, UMKM cenderung mengikuti pola-pola aktivitas yang bisa disebut strategi pengembangan internasionalisasi. Luostarinen memodifikasi konsep pengambilan keputusan strategic berbasis product-market yang dikemukakan Ansoff (1965) untuk merefleksikan strategi internasionalisasi ini. Dalam model ini, konsep produk diperluas hingga meliputi cara beroperasinya. Paunovic dan Prebezac (2010) menyatakan bahwa keputusan perusahaan untuk internasionalisasi bergantung pada beberapa kondisi, seperti ukuran pasar domestik, posisi pasar dan fleksibilitas perusahaan, keterbukaan pasar domestik, kapabilitas manajemen dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan

adalah proses internasionalisasi sangat berkaitan erat dengan aplikasi strategi pemasaran yang baik. Tidak ada perusahaan yang bisa menginternasionalisasi bisnisnya tanpa penerimaan konsep pemasaran.

Dalam perekonomian dunia, UKM memegang peran yang dominan dalam aktifitas bisnis karena lebih dari 95% aktifitas bisnis di seluruh negara berasal dari sektor tersebut. Menjadi perusahaan kecil (UKM) bisa menjadi keuntungan tersendiri, karena berarti memiliki fleksibilitas, keterbukaan, dinamika, inovasi, tetapi juga memiliki hambatan-hambatan yang sebagian besar berkaitan dengan finansial. Untuk menghadapi tantangan dan ancaman baru dengan berhasil, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal yang bisa mendorong nilai-nilai kompetitif. Perbedaan dalam kondisi pemanufakturan, inovasi, penerimaan teknologi baru, pengetahuan pasar dan akses pendanaan adalah kategori dasar yang manajemen (UMKM) perlu pahami.

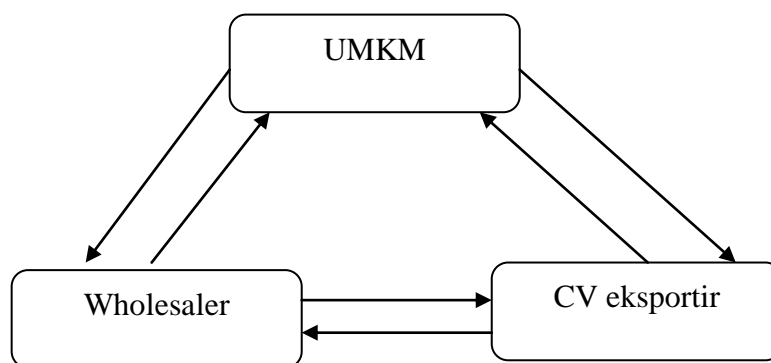
Keuntungan sektor ini dibanding perusahaan besar adalah kurangnya hambatan dalam hirarki, fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, periode yang lebih pendek dalam merespon kebutuhan konsumen dan pasar, penentuan partner yang lebih mudah untuk mencapai sinergi bisnis.

Bartlett and Ghoshal (2000) mengidentifikasi dua motivasi mengapa perusahaan melakukan internasionalisasi, motivasi tradisional dan motivasi yang berkembang (*emerging*). Motivasi paling awal yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri adalah untuk mengamankan bahan baku penting khususnya mineral, energi, dan sumberdaya material mentah yang langka. Pemicu internasionalisasi yang lain bisa dideskripsikan sebagai *market seeking behavior*. Motivasi ini kuat terutama pada perusahaan yang memiliki keunggulan intrinsik, khususnya yang berkaitan dengan teknologi atau merek yang memberikan keunggulan kompetitif. Pemicu lain adalah keinginan untuk mengakses faktor produksi berbiaya rendah. Misalnya, ketersediaan biaya modal yang lebih rendah juga menjadi pendorong yang kuat terhadap proses internasionalisasi.

Koneksitas UMKM dan stakeholder

Realisasi terhadap internasionalisasi produk UMKM membutuhkan koneksitas antara UMKM dengan stakeholder terkait. Perusahaan ekspor tidak hanya melakukan

ekspor, tetapi juga berkepentingan menjaga kualitas produk dan melakukan pembinaan kepada UMKM. Ada interdependensi yang tinggi antara CV eksportir dan UMKM untuk bersama-sama menjaga kualitas. Pada masing-masing UMKM, harus ada *trust* yang tinggi dan saling mendukung. Pada masa lalu pedagang besar hanya mengejar jumlah tanpa memperhatikan kualitas, tetapi jika ingin tetap bisa menjangkau pasar asing, pedagang besar (*wholesaler*) juga harus ikut berperan aktif menjaga kualitas produk yang diperolehnya. Sistem interaksi yang tercipta dengan sendirinya saling menjaga masing-masing pihak untuk tidak berperilaku oportunistik yang hanya mementingkan diri/kelompoknya. Untuk menjaga kualitas, kelompok UMKM melakukan pertemuan rutin anggota untuk membicarakan isu-isu bisnis serta mempererat komunikasi dan *trust* antar anggota. Forum ini sebagaimana diakui beberapa informan cukup efektif dengan indikasi semakin meningkatnya kesadaran anggota untuk menjaga kualitas produk. Bentuk interaksi dan saling interdependensi diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Diolah untuk paper ini

Gambar 3 Koneksitas UMKM

Permasalahan terbesar dalam proses internasionalisasi pasar berada pada *supply side* di mana pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan bisa mengisi gap ini dengan menstandarkan perlakuan dalam penggunaan laru dan proses lainnya.

Pemerintah, perguruan tinggi, Bank Indonesia, dan LSM selama ini berjalan dengan programnya masing-masing, sehingga asistensi atau bantuan yang diberikan tumpang tindih dengan program dari lembaga lain. Belum ada grand design yang bisa menggambarkan alur kerjasama kelembagaan beserta program-programnya. Sisi ini

menjadi mendesak diperbaiki mengingat permasalahan tidak hanya berasal dari sisi internal.

Li et al. (2004) menyatakan bahwa proses internasionalisasi UKM saat ini sesungguhnya tidak dapat diprediksi, itulah kenapa suatu model tidak bisa menjelaskan semua fenomena tersebut. Proses internasionalisasi yang dijelaskan melalui Uppsala Model (yang dikembangkan oleh Uppsala University) tidak bisa digunakan untuk menjelaskan proses internasionalisasi pada case di atas, karena Uppsala Model mengasumsikan adanya 4 fase, dari mulai tidak adanya fasilitas ekspor hingga fase pembentukan fasilitas manufaktur di pasar luar negeri. Nampaknya penerapan model Uppsala terbatas hanya pada industri manufaktur yang berbasis teknologi. Sedangkan Yip (2000) menyebut modelnya dengan “*Way Station Model*”, internasionalisasi UMKM, meliputi 6 tahap: motivasi dan perencanaan strategik, riset pasar, pemilihan pasar, pemilihan strategi masuk, problem planning dan post-entry behavior. Model tersebut termasuk Systematic Planning Model yang menekankan pada rasionalitasnya dan secara ketat proses terjadi secara bertahap, dan kedua hal tersebut merupakan karakteristik yang paling mendapat sorotan dan kritik. Di antaranya adalah bagaimana menjelaskan rapid entry UMKM pada situasi bisnis yang turbulen seperti saat ini. Model ini juga tidak menjelaskan fakta bahwa banyak keputusan saat ini dibuat secara simultan, bukan berurutan/bertahap.

Penggunaan model hybrid dalam internasionalisasi produk UMKM

Kami berpendapat bahwa model hybrid lebih mampu memberikan gambaran yang holistik tentang proses internasionalisasi. Proses internasionalisasi menurut model ini dilakukan melalui 3 fase: *basic phase*, *planning phase*, *execution phase*. Untuk menggambarkan proses internasionalisasi kami memodifikasi hybrid model sebagaimana diilustrasikan pada halaman selanjutnya. Pada gambar tersebut, sebagai fase basic, adalah anteseden internal dan eksternal sebagai driver internasionalisasi pasar. Planning phase digambarkan dalam kolaborasi antara berbagai stakeholder, yaitu UMKM, CV exportir, pemerintah daerah, perguruan tinggi, bank Indonesia, serta LSM yang menangani bidang terkait. Fase eksekusi menjadi bagian yang integral dengan fase planning, karena untuk internasionalisasi, peran CV exportir yang tersertifikasi sangat diperlukan. Pada gambar tersebut, peneliti mengilustrasikan

bagaimana lembaga-lembaga seperti Pemerintah (daerah), Bank Indonesia, perguruan tinggi, dan LSM melakukan strategi push dan pull marketing.

Pada sisi push marketing, ada dua anteseden yang perlu diperhatikan oleh keempat lembaga tersebut, yaitu anteseden eksternal dan anteseden internal. Factor endowment berkaitan dengan karakteristik alamiah wilayah. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut juga merupakan yang terbanyak relative dibanding daerah lain. Peran lembaga, khususnya pemerintah daerah dan perguruan tinggi adalah bagaimana memelihara keunggulan komparatif ini, bagaimana menjaga keberlangsungan dan kualitas sehingga bisa menghasilkan bahan baku yang berkualitas melalui riset dan pendampingan-pendampingan. Untuk masalah tenaga kerja, walaupun saat ini jumlah yang tersedia masih cukup banyak, namun dikhawatirkan jumlahnya akan menyusut di beberapa tahun ke depan.

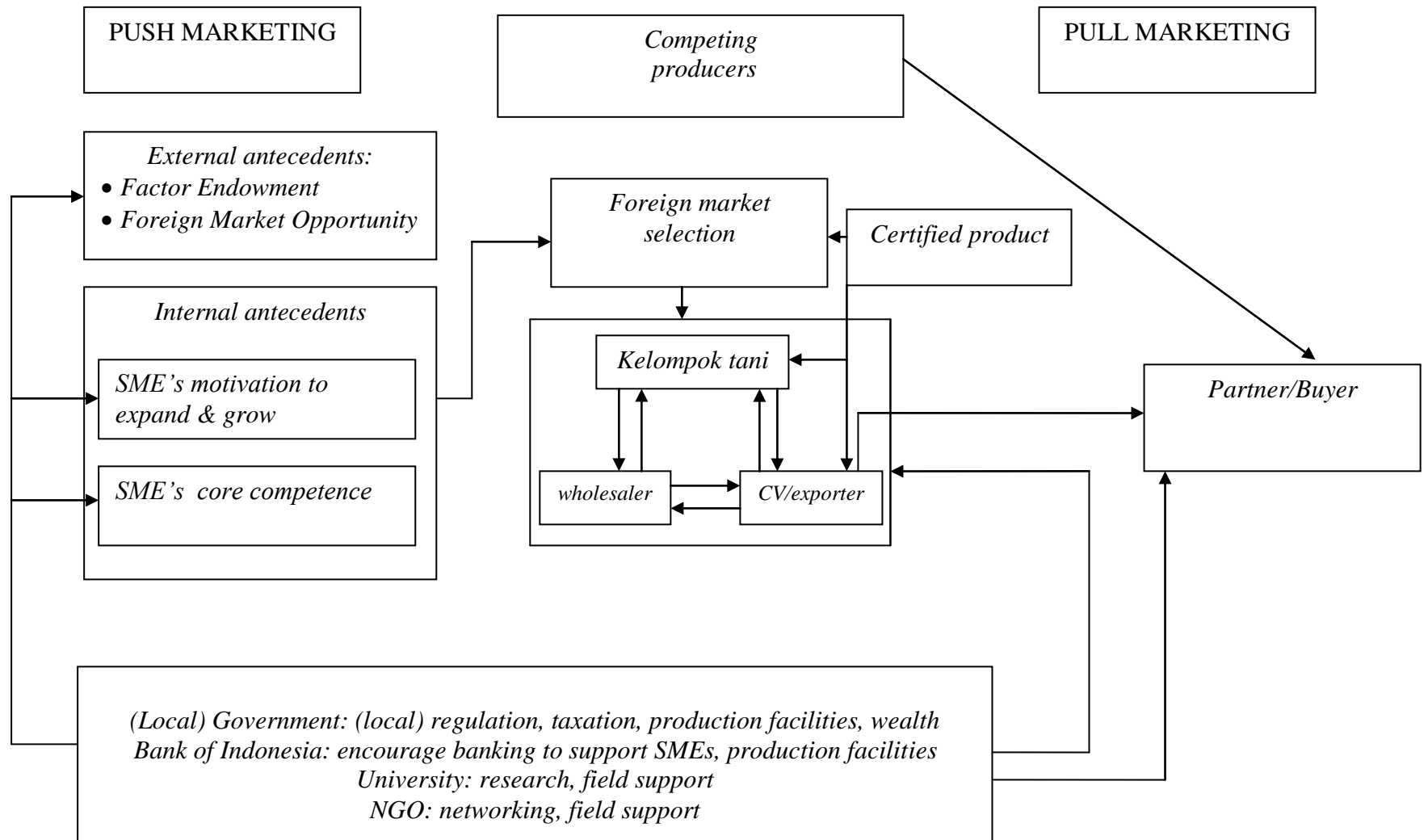
Mencari peluang pasar baru khususnya luar negeri juga penting diperhatikan pemerintah yang tentu memiliki akses yang lebih baik dan lebih luas dibanding petani. Diskusi dengan beberapa pengusaha UMKM menunjukkan adanya harapan yang besar agar pemerintah membantu dalam hal pemasaran dan informasi pasar-pasar baru. Informan menyatakan bahwa peran pemerintah daerah sejauh ini masih dominan di aspek produksi, belum banyak menyentuh ke aspek pasar padahal aspek tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Anteseden internal berkaitan dengan motivasi UMKM untuk berekspansi dan tumbuh. Motivasi ini ada dan semakin kuat mengingat lebih menariknya harga yang mampu dibayarkan pasar asing atas produk UMKM-nya. Adanya peningkatan kesejahteraan ini nantinya diharapkan mampu mengurangi ketergantungan UMKM dan sekaligus meningkatkan posisi tawarnya. Anteseden internal lainnya berkaitan dengan kompetensi inti yang dimiliki UMKM. Meskipun memiliki kompetensi yang tinggi dalam hal produksi, namun tidak berarti hal tersebut tidak memerlukan pembinaan. Pemerintah daerah perlu selalu memikirkan metode-metode pembinaan dan pendampingan yang sesuai dan dibutuhkan. Salah satu yang diusulkan adalah bagaimana menanamkan mindset yang berorientasi pada kualitas dan bisnis jangka panjang. Seringkali pengelola UMKM terjebak pada pemikiran jangka pendek karena terdesak kebutuhan.

Untuk menangani berbagai elemen-elemen anteseden ini, pemerintah daerah tidak bisa sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan lembaga lain yang juga concern. Lembaga-lembaga tersebut adalah perguruan tinggi yang menawarkan keahlian dari berbagai disiplin ilmu, misalnya Fakultas Ekonomi yang bisa membantu dalam hal manajemen pemasaran serta aspek-aspek keperilakuannya, Fakultas Pertanian yang bisa membantu dalam penentuan standar-standar produksi yang berkualitas tinggi. Bank Indonesia yang saat ini *concern* terhadap sektor riil juga penting perannya khususnya dalam hal regulasi perbankan. Diharapkan Bank Indonesia ke depan semakin mendorong perbankan untuk turut serta berkontribusi terhadap pengembangan UMKM, apalagi mengingat karakteristik UMKM yang secara umum tidak bankable. Lembaga Swadaya Masyarakat, juga penting dilibatkan mengingat perannya yang cukup signifikan selama ini dalam membina UMKM.

Kondisi yang saat ini terjadi adalah masing-masing lembaga tadi sebenarnya memiliki perhatian yang sama besarnya di sektor UMKM. Tetapi masalahnya adalah tidak ada sinkronisasi program kegiatan di antara lembaga-lembaga tersebut, dengan kata lain, masing-masing lembaga jalan sendiri-sendiri tanpa ada dialog. Sehingga yang terjadi adalah adanya tumpang tindih kegiatan yang sama, duplikasi dalam hal pemberian bantuan, pemberian bantuan yang kurang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, tidak adanya sinergi kegiatan, serta tidak adanya kesinambungan program. Ke depan, jika ingin memajukan sektor ini, hal-hal seperti di atas harus sesegera mungkin ditangani, karena jika tidak, produk UMKM akan sulit bersaing di pasar global.

Sistem interdependensi antara kelompok UMKM, wholesaler, dan eksportir juga penting untuk dilaksanakan, sehingga masing-masing tidak bisa mengambil keuntungan dari posisi pihak lain. Pendampingan dari keempat lembaga, khususnya pemerintah daerah dan perguruan tinggi penting untuk merubah mindset bisnis untuk ketiga unsur di atas. Perguruan tinggi penting perannya dalam upaya merubah kultur dan perilaku-perilaku bisnis yang kurang kondusif, sehingga kepentingan bersama yang lebih luas diposisikan di atas kepentingan individu.



Gambar 4. Proses dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internasionalisasi Produk UMKM

Dampak Inovasi

Internasionalisasi produk UMKM yang melibatkan IKNB yang dijelaskan dalam paper ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada beberapa pihak terkait, antara lain:

1) Dampak inovasi bagi OJK.

Manfaat praktis program ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk pembinaan UKM yang berorientasi pasar luar negeri. Pemahaman holistik atas proses internasionalisasi bisnis membantu pengambil kebijakan dalam memfasilitasi mulai dari pembinaan, permodalan yang sesuai hingga ke pemasaran produk.

2) Dampak inovasi bagi pengusaha UMKM

Dampak inovasi dari pelaksanaan internasionalisasi produk UMKM diharapkan memberi pengetahuan bagi pengusaha yang berminat melakukan internasionalisasi produknya agar tidak terjebak pada kesulitan pemasaran lokal/dalam negeri.

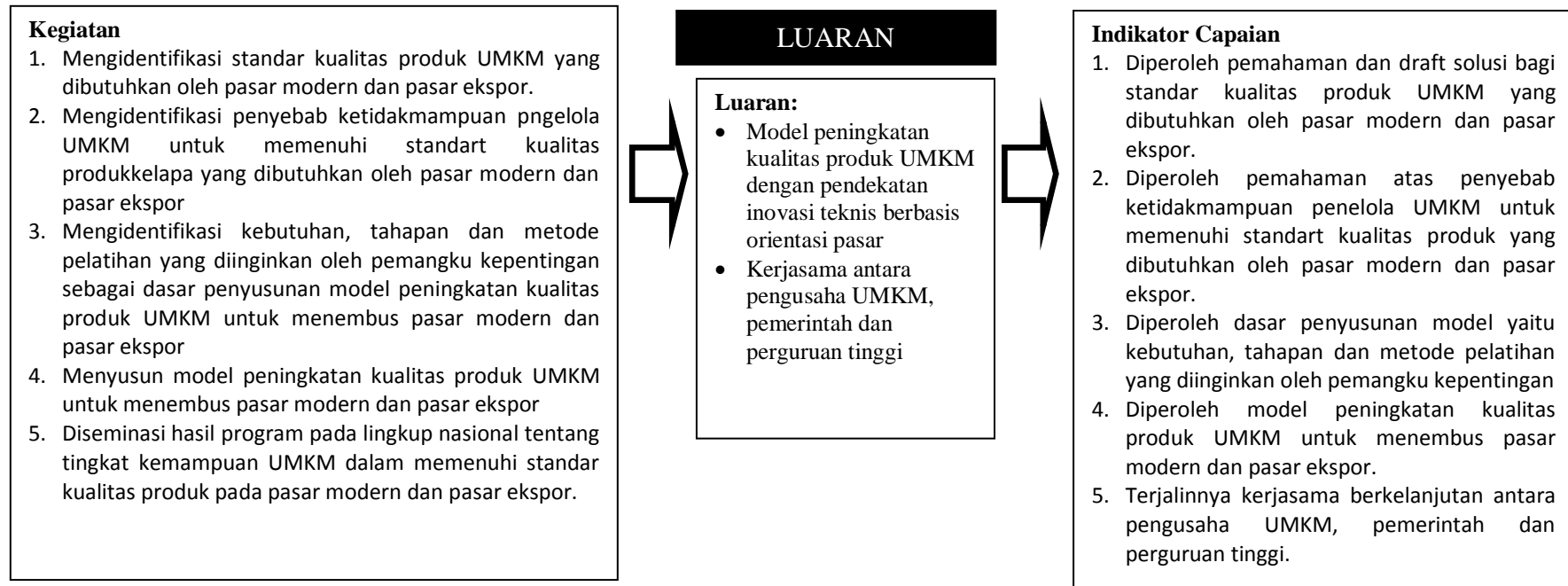
3) Dampak inovasi bagi perkembangan bidang UMKM di Indonesia

Internasionalisasi produk UMKM sesungguhnya dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di mata dunia. Sudah saatnya produk-produk indonesia dikenal di mancanegara.

Peluang Aplikatif

Produk-produk UMKM yang bervariasi dan memiliki keunikan tersendiri menjadikan produk ini layak untuk diberikan fasilitas pendanaan yang maksimal dari dunia perbankan termasuk program yang ditawarkan oleh OJK. Apalagi program strategis dari OJK yakni mendorong peran LPEI dalam meningkatkan pembiayaan, khususnya pada sektor industri kreatif dan UMKM menjadikan internasionalisasi produk UMKM menjadi alternatif yang layak untuk dipilih dalam implementasinya.

Adapun ilustrasi dari peluang aplikatif dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 5. Peluang Aplikatif Penerapan Internasionalisasi Produk UMKM Unggulan Daerah

Luaran dari program ini antara lain:

1. Identifikasi produk UMKM yang dibutuhkan dalam menembus pasar ekspor.
2. Terbentuknya sistem dan implementasi model internasionalisasi produk UMKM yang mampu bersaing di kawasan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan global.
3. Sinkronisasi fungsi stakeholder terkait.
4. Terciptanya jaringan sistem informasi yang melayani industri, perbankan, pemerintah dan konsumen.
5. Mengevaluasi dan menyempurnakan model.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartlett, C.A., & Ghoshal, S. 2000. *Transition Management: Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management*. 3rd ed. Singapore: Irwin McGraw-Hill.
- Beaver G and C Prince. 2002. Innovation, Entrepreneurship and Competitive Advantage in the Entrepreneurial Venture. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 9 (1), pp.28–37.
- Berg, B.L. 2004. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 5th edition, New York: Pearson Education.
- Bloodgood J, Sapienza HJ, Almeida JG. 1996. The Internationalization of New High-Potential U.S. Ventures: Antecedents and Outcomes. *Entrepreneurship Theory & Practice*, 20(4), pp.61–76.
- Boter, H., Holmquist, C. 1996. Industry Characteristics and Internationalization Processes in Small Firms. *Journal of Business Venturing*, Vol. 11, No. 6, pp. 471-487.
- Calof, J.L. 1993. The Impact of Size on Internationalisation. *Journal of Small Business Management*, 31(4), pp.60–69.
- Chetty S and Blankenburg Holm D, 2000. Internationalisation of Small to Medium-sized Manufacturing Firms: A Network Approach. *International Business Review*, 9, pp.77–93.
- Creswell, J.W. 2002. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Curran, J., & R.A. Blackburn. 2001. *Researching the Small Enterprise*. SAGE Publication Ltd, London.
- Davenport, S. and D. Bibby. 1999. Rethinking a National Innovation System: the Small Country as “SME”. *Technology Analysis and Strategic Management*, 11 (3), pp.431–62.
- Etemad, H. and Wright, R.W. 2003. Internationalization of SMEs: Toward a New Paradigm. *Small Business Economics*, 20, pp.1–4.

- Hancock, D.R., & B. Algozzine. *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*. New York: Teachers College Press.
- Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M. and Sexton, D.L. 2001. Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation. *Strategic Management Journal*, 22, pp.479–491.
- Johanson, J., Vahlne, J.E. 1977. The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. *Journal of International Business Studies*, Vol. 8, 1977, pp. 23-32.
- Kaarna, K. 2010. Understanding Accelerated Internationalization: Integrating Theories for Analyzing Internationalization Paths. *Economics and Management*, 15, pp.556-561.
- Keupp MM, Gassmann O. 2009. The Past and the Future of International Entrepreneurship: a Review and Suggestions for Developing the Field. *Journal of Management*, (35), pp.600–633.
- Li, L., Li, D., Dalgic, T. 2004. Internationalization Process of Small and Medium-sized Enterprises: Toward a Hybrid Model of Experiential Learning and Planning. *Management International Review*, Vol. 44, No. 1, 2004, pp.93-116.
- Lenihan, H., B.A. O’Callaghan., M. Hart. 2010. *SMEs in a Globalised World: Survival and Growth Strategies on Europe’s Geographical Periphery*. Edward Elgar Publishing Limited, UK.
- Paunovic, Z., & D. Prebezac. 2010. Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises. Vol. XXII
- Peng, M.W. 2001. The Resource-Based View and International Business. *Journal of Management*, 27, pp.803–829.
- Reid, S.D. 1981. The Decision-Maker and Export-Entry and Expansion. *Journal of International Business Studies*. Vol. 12, No. 2, pp.101-112.
- Schwens, C., & R. Kabst. 2009. Early Internationalization: A Transaction Cost Economics and Structural Embeddedness Perspective. *Journal of International Entrepreneurship*, Vol.7, pp.323-340.
- McDougall, P. P. & Oviatt, B. M. 2000. International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths. *Academy of Management Journal*, 43, pp.902–908.
- Oviatt BM, McDougall PP. 1994. Toward a Theory of International New Ventures. *Journal of International Bussiness Studies*, 3, pp.30–44.
- Melin, L. 1992. Internationalization as a strategy process. *Strategic Management Journal*, 13, pp.99–118.
- Miller, M.M. 1993. Executive Insights: The 10 Step Roadmap to Success in Foreign Markets, *Journal of International Marketing*, Vol. 1, No. 2, pp.89-106.
- Wright, R.W. and Ricks, D.A. 1994. Trends in International Business Research: Twenty-Five Years Later. *Journal of International Business Studies*, 25, pp.687–701.

- Yin RK, 1994. *Case Study Research: Design and methods*, Beverly Hills, CA: Sage.
- Yip, G.S., Biscarri, G., Monti, J.A. 2000. The Role of the Internationalization Process in the Performance of Newly Internationalizing Firms. *Journal of International Marketing*, Vol. 8, No. 3, pp.10-35.
- Young, S. 1987. Business strategy and the internationalization of business: recent approaches. *Managerial and Decision Economics*, 8, pp.31–40.
- Zahra, S.A. 2005. A Theory of International New Ventures: A Decade of Research. *Journal of International Business Studies*, 36, pp.20–28.
- Zahra SA, Matherne BP, Carleton JM. 2003. Technological Resource Leveraging and the Internationalisation of New Ventures. *Journal of International Entrepreneur*, 1, pp.163–186.

STABILITAS HARGA PANGAN DAN KEMISKINAN: PENDEKATAN KEYNESIAN THEORY DAN MONETARY APPROACH

Rusiadi dan Ade Novalina

Surel:

rusiadi@dosen.pancabudi.ac.id

adenovalina@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Gatot Subroto Km 4,5 Medan

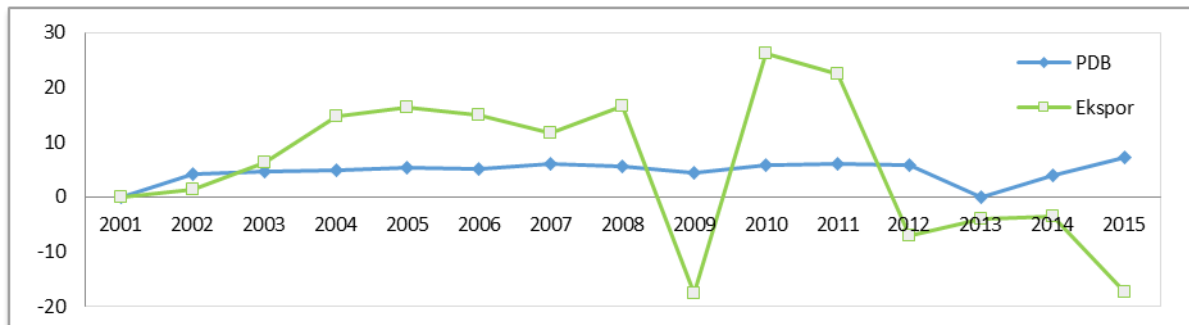
ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh simultan kurs, tingkat suku bunga, PDB dan kredit domestik terhadap cadangan devisa, harga pangan dan kemiskinan. Menganalisis efektivitas teori keynesian dan monetaris dalam memprediksi jangka panjang cadangan devisa, harga pangan dan kemiskinan di Indonesia. Masalah yang selama ini ada yaitu kurang tepatnya kedua teori tersebut dalam memprediksi sekaligus cadangan devisa, stabilitas harga pangan dan kemiskinan, namun penelitian ini mampu memprediksi dengan dua teori dan dua model analisis berbeda. Data penelitian selama 16 tahun yaitu 2000 sd 2015. Analisis data prediksi jangka pendek menggunakan regresi simultan dengan pendekatan 3TLS. Analisis data untuk prediksi jangka panjang menggunakan Structural Factor Augmented Vector Autoregression (SFAVAR). Hasil simultan yang paling berpengaruh terhadap persamaan cadangan devisa adalah PDB dan kurs. Variabel yang paling mempengaruhi persamaan stabilitas harga pangan yaitu tingkat bunga dan ekspor. Variabel yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yaitu PDB dan kredit domestik. Hasil VAR menyebutkan Kontribusi terbesar terhadap stabilitas harga pangan sangat ditentukan oleh ekspor dan PDB, sedangkan jumlah penduduk miskin dikontribusikan oleh ekspor dan PDB. Hasil SFAVAR yaitu pengendalian laju stabilitas harga pangan dilakukan melalui variabel inflasi dan ekspor dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Kebijakan untuk mengendalikan penduduk miskin dalam jangka pendek melalui ekspor dan inflasi, dalam jangka menengah cadangan devisa dan ekspor dan jangka panjang dikendalikan oleh PDB dan ekspor. Ternyata ekspor sangat dominan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

Kata kunci: *Kurs, Suku Bunga, PDB, Kredit Domestik, Ekspor, Cadangan Devisa, Harga Pangan, Kemiskinan*

Pendahuluan

Pendekatan *Monetaris Approach To The Balance Of Payment Theory (MABP)* mengasumsikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi riil, kurs valuta asing dan tingkat bunga ditemukan oleh factor-faktor yang saling berinteraksi dalam model makro yang lengkap (Masdjojo,2010). Menurut *Kavous* (2016) bahwa melalui analisis keseimbangan pasar uang kelompok *Monetaris Approach To The Balance of Payment Theory (MABP)* menyatakan bahwa cadangan devisa dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, kredit domestik, kurs valuta asing, dan tingkat bunga. data pertumbuhan cadangan devisa yang berfluktuatif dari tahun 2001 sampai 2015. Pertumbuhan cadangan devisa pada tahun 2005 mengalami penurunan sampai 4% dikarenakan laju inflasi yang tinggi, laju inflasi yang tinggi disebabkan kenaikan harga BBM (dilihat penelitian Hervita:2015). Dan pada tahun 2008 pertumbuhan cadangan devisa mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 43% disebabkan oleh krisis global yang melanda dunia. Dan pada tahun-tahun selanjutnya cadangan devisa mengalami perbaikan, namun pada tahun 2013 pertumbuhan cadangan devisa mengalami defisit sebesar 14,29% ini disebabkan oleh inflasi.

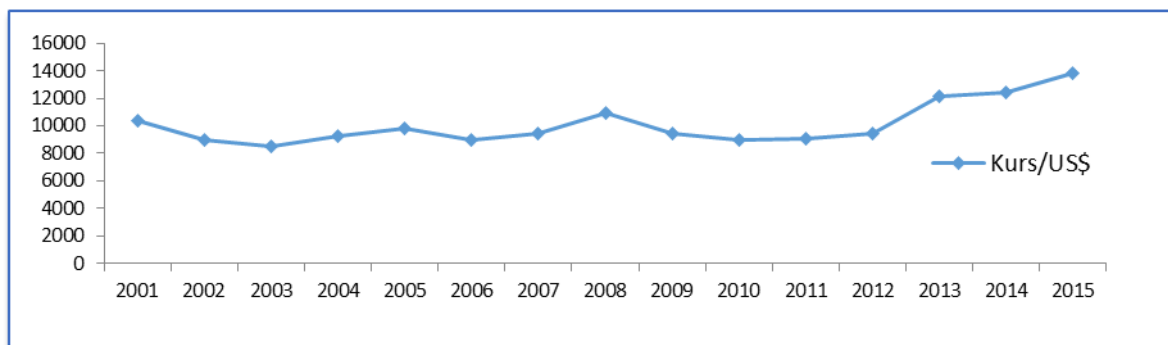


Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1. Perkembangan Ekspor dan PDB Indonesia

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa adanya penurunan PDB terjadi pada tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia turun 8,27% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan dari krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Eropa terutama Amerika. Krisis ekonomi Amerika tersebut yang semakin lama semakin merambat menjadi krisis ekonomi global kerana sebenarnya perekonomian di dunia saling terhubung satu sama lainnya. Grafik diatas melihat pertumbuhan ekonomi PDB dan ekspor. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDB dan ekspor dari tahun 2001-2006 meningkat, tapi nilainya tidak begitu besar. Dan pada tahun 2009 ekspor mengalami penurunan yang sangat besar hingga

mencapai 17,60% yang disebabkan oleh dampak dari krisis ekonomi global (Hervita:2015). Begitu juga pertumbuhan PDB yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pertumbuhan PDB pada tahun 2009 mencapai 4,42%. Dan pada tahun 2013 PDB mengalami penurunan yang cukup besar yaitu hampir 6% dari tahun sebelumnya.

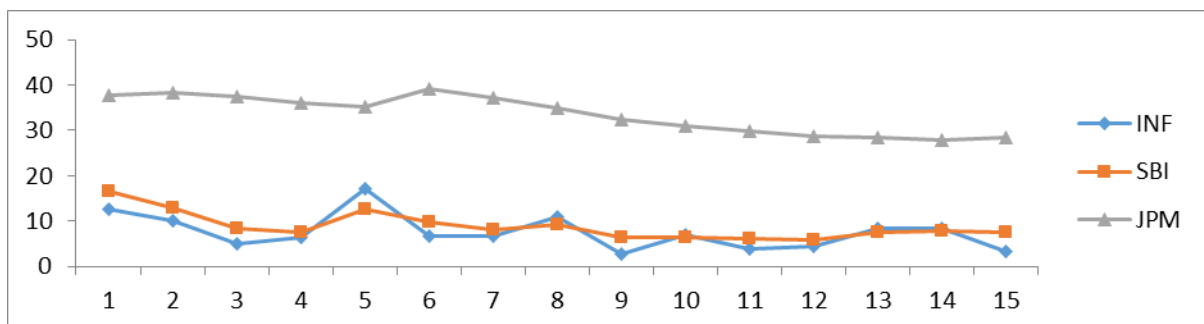


Sumber : Bank Indonesia

Gambar 2. Perkembangan Kurs Indonesia

Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa nilai tukar rupiah mengalami depresiasi pada tahun 2008 dan 2013, yang berkisar pada 10950 dan 12189 rupiah/USD. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah dikarenakan adanya kenaikan jumlah uang beredar, turunnya suku bunga dan permintaan masyarakat akan barang juga meningkat.

Pertumbuhan cadangan devisa pada tahun 2005 mengalami penurunan sampai 4% dikarenakan laju inflasi yang tinggi, laju inflasi yang tinggi disebabkan kenaikan harga BBM (pernyataan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Hervita:2015). Dan pada tahun 2008 pertumbuhan cadangan devisa mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 43% disebabkan oleh krisis global yang melanda dunia. Dan pada tahun-tahun selanjutnya cadangan devisa mengalami perbaikan, namun pada tahun 2013 pertumbuhan cadangan devisa mengalami defisit sebesar 14,29% ini disebabkan oleh kenaikan harga.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 3. Perkembangan Bunga (%), Stabilitas Harga Pangan (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) di Indonesia

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan inflasi dan tingkat suku bunga selama periode 2001 sampai 2015 yang mengalami fluktuasi yang beragam, inflasi tertinggi terjadi pada periode 2005 sebesar 17.11% diikuti juga dengan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 12,75% kemudian inflasi dan tingkat suku bunga pada periode 2006 bergerak turun hingga berada di posisi 6.60% dan 9.75%. Pada tahun 2008 naik ke posisi 11.06% dan 9,25% dikarenakan pada saat itu terjadi krisis global yang melanda dunia sehingga berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. Selama periode 2001-2015 inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2.78% sedangkan tingkat suku bunga terendah yaitu pada tahun 2012 sebesar 5,75% namun kemudian mengalami kenaikan pada periode tahun selanjutnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan inflasi di Indonesia yaitu suku bunga acuan Bank Indonesia atau dengan kata lain BI Rate yang menjadi signal bagi perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunganya seperti tabungan, deposito dan kredit. Menurut Yodiatmaja (2012), perubahan BI *Rate* akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada inflasi.

Permasalahan

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan inflasi di Indonesia yaitu suku bunga acuan Bank Indonesia atau dengan kata lain BI Rate yang menjadi signal bagi perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunganya seperti tabungan, deposito dan kredit. Menurut Yodiatmaja (2012), perubahan BI *Rate* akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada inflasi. Perubahan berupa peningkatan level BI *Rate* bertujuan untuk mengurangi laju aktifitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level BI *Rate* naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan harga pangan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Model Statis Keynesian

Secara umum pendekatan keynesian berasumsi bahwa cadangan devisa suatu negara tidak otomatis mencapai keseimbangannya, namun perlu intervensi atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai keseimbangannya. Hal ini didukung pula oleh asumsi bahwa tingkat upah dan harga bersifat kaku (*rigid*), sehingga harus ada intervensi atau tindakan kebijakan dari pemerintah untuk mengubahnya. (Gregorius Nasiansenus Masdjojo:2010). Menurut *Keynesian Balance Of Payment Theory* (KBPT) bahwa untuk menjaga keseimbangan cadangan devisa dapat dilakukan melalui nilai tukar (kurs), tingkat suku bunga, PDB dan kredit domestik, (lihat juga *Ackcay, et al.*, 2001 dan *Agbola, et al.*, 2004).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan cadangan devisa dapat dijelaskan melalui transmisi *multiplier effect*. Menurut *Keynessian Balance Of Payment Theory* (KBPT) bahwa apabila karena sesuatu hal pendapatan agregat suatu negara meningkat, maka melalui proses multiplier hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya impor. Apabila peningkatan impor lebih besar dari peningkatan ekspor, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya defisit NPI. Selanjutnya dapat mengurangi cadangan devisa negara tersebut. Demikian sebaliknya. Oleh karena itu menurut *Keynessian Balance Of Payment Theory* (KBPT), dengan asumsi *ceteris paribus*, hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan posisi cadangan devisa adalah negatif. Menurut Keynes upah nominal disesuaikan secara lambat sampai besaran tertentu sehingga tingkat upah nominal bukan variabel eksogen. Jika W variabel eksogen maka W tidak dapat menyesuaikan keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja [n^S] dan permintaan tenaga kerja [n^D] dapat berbeda, sehingga pasar tenaga kerja menjadi:

$$f'(n^D) = \frac{W}{P}, \quad (n^S) = h\left(\frac{W}{P}\right) \quad \text{dan} \quad W = \bar{W}$$

dimana \bar{W} = nilai W yang ditentukan periode sebelumnya. Model Keynesian menyatakan bahwa penggunaan tenaga kerja adalah permintaan tenaga kerja [$n = n^D$], sehingga jumlah tenaga kerja ditentukan oleh permintaan tenaga kerja bukan antara mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja. Persamaan (1.15) berubah menjadi:

$$f'(n) = \frac{\bar{W}}{P}$$

Pada Gambar 1.5 ditunjukkan tingkat harga umum berhubungan dengan kuantitas tenaga kerja yang digunakan pada tingkat upah nominal tertentu. Fungsi produksi berhubungan dengan tingkat harga berdasarkan $y = f(n)$ dan $f'(n)$. Fungsi $f'(n)$ menurun terhadap jumlah tenaga kerja sehingga hubungan output riil agregat [y] dengan tingkat harga umum [P] merupakan hubungan positif. Artinya peningkatan tingkat harga akan menurunkan upah riil sehingga penggunaan tenaga kerja naik dan kemudian meningkatkan produksi agregat. Penggabungan persamaan (1.6), (1.9), (1.11) dan (1.16) akan menghasilkan model penawaran agregat Keynesian sebagai berikut:

$$\text{Model IS} \quad : y = C[(y - \tau), R] + I(y, R) + g$$

$$\text{Model LM} \quad : \frac{M}{P} = L(y, R)$$

$$\text{Fungsi Produksi} \quad : y = f(n)$$

$$\text{Produktivitas Marginal} \quad : f'(n) = \frac{\bar{W}}{P}$$

$$\text{Permintaan Tenaga Kerja} \quad : n = h \left(\frac{\bar{W}}{P} \right)$$

Sistem persamaan di atas akan menentukan lima variabel, yaitu variabel y, R, n, P, dan W, dan konsumsi riil rumah tangga dan konsumsi riil perusahaan atau investasi ditentukan pada tingkat P, y, R, n dan W tertentu. Bagaimana perubahan variabel eksogen M, g, dan τ mempengaruhi keseimbangan P, y, R, n, c, i dan W? Pada skedul AS yang tetap, peningkatan stok uang akan meningkatkan skedul LM sehingga skedul AD naik.

Moneteris Approach

Monetary Approach to the Balance of Payment (MABP) menganalisis cadangan devisa sebagai fenomena moneter. (Masdjojo:2010). Pendekatan *Monetary Approach to the Balance of Payment* (MABP) mengasumsikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi riil, Kurs Valuta Asing dan Tingkat Bunga ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi dalam model makro yang lengkap. Menurut Kavous (2005) bahwa melalui analisis keseimbangan pasar uang Kelompok *Monetary Approach to the Balance of*

Payment (MABP) menyatakan bahwa Cadangan Devisa dapat dipengaruhi oleh PDB, Kurs dan Tingkat Bunga. Menurut *Monetary Approach to the Balance of Payment* (MABP) bahwa mekanisme pengaruh faktor-faktor pengaruh Cadangan Devisa adalah bekerja melalui perubahan stok uang. Apabila terjadi surplus maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga stok uang di dalam negeri bertambah. Apabila terjadi defisit maka uang akan mengalir keluar negeri, sehingga stok uang dalam negeri menurun. Perubahan stok uang ini selanjutnya mengakibatkan perubahan tingkat harga melalui perubahan pengeluaran agregat negara itu. Kenaikan/penurunan pengeluaran agregat akan mempengaruhi tingkat harga.

Open Economics Model

Analisis ekonomi moneter terbuka dengan ekspektasi rasional adalah mencakup penentuan nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Hubungan perdagangan dengan negara tertentu menganut sistem uang kertas atau fiat money, artinya uang kertas yang dijual oleh otoritas moneter merupakan alat transaksi internal. Harga satu unit matauang terhadap matauang lainnya ditentukan oleh pasar matauang luar negeri atau foreign exchange market, yang disebut dengan nilai tukar. Penggunaan model agregasi ekonomi makro merupakan alat analisis dalam penentuan nilai tukar matauang. Masuknya perdagangan internasional dalam Model IS menjelaskan model ekonomi terbuka, yaitu:

$$y = c + i + g + x$$

Dimana :

y = output riil agregat ,

c = konsumsi riil rumah tangga,

i = investasi atau konsumsi riil perusahaan,

g = konsumsi riil pemerintah, dan

x = adalah ekspor riil netto.

Jika ekspor riil netto positif maka produksi domestik lebih besar dari penjumlahan konsumsi, investasi dan konsumsi pemerintah. Konsumsi riil rumah tangga ditentukan oleh output riil agregat dan tingkat bunga riil, yaitu $c = C(y, r)$. Konsumsi riil perusahaan juga ditentukan oleh output riil agregat dan tingkat bunga riil, yaitu $i = I(y, r)$. Ekspor riil netto

merupakan fungsi negatif terhadap harga relatif ekspor dengan impor [Q] dan output relatif domestik dengan luar negeri [y^*], yaitu:

$$x = x\left(Q, \frac{y}{y^*}\right)$$

Substitusi ke (1.8) akan menghasilkan model IS dalam perekonomian terbuka, yaitu:

$$y = C(y, r) + I(y, r) + G + x\left(Q, \frac{y}{y^*}\right)$$

$$y = D(r, Q, y^*, g)$$

dimana $D_r, D_Q < 0$ dan $D_{YF}, D_G > 0$. Formulasi persamaan (1.10) dalam bentuk fungsi eksplisit memisalkan output agregat $\ln(Y_t) = y_t$ dan harga relatif adalah $\ln(Q_t) = q_t$. Model IS ekonomi terbuka dalam bentuk linier dapat diformulasikan dengan tiga persamaan, yaitu:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 r_t + \beta_2 q_t + v_t$$

dimana $\beta_1, \beta_2 < 0$. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal dikurang ekspektasi inflasi, yaitu:

$$r_t = R_t - E_t(p_{t+1} - p_t)$$

Harga relatif produk domestik terhadap produk luar negeri tergantung pada nilai tukar matauang. Misalkan tingkat harga domestik adalah $\ln(P_t) = p_t$, tingkat harga luar negeri adalah $\ln(P_t^*) = p_t^*$ dan nilai tukar matauang domestik adalah $\ln(E_t) = e_t$, sehingga harga relatif adalah :

$$Q_t = \frac{P_t}{E \times P_t^*} \text{ atau } q_t = p_t - (e_t + p_t^*)$$

Model LM ekonomi terbuka terdiri dari dua persamaan, yaitu permintaan uang dan kondisi paritas tingkat bunga. Tingkat bunga domestik [R] adalah tingkat bunga luar negeri [R^*] ditambah ekspektasi depresiasi nilai tukar matauang domestik. Permintaan stok uang dan kondisi paritas tingkat bunga adalah :

$$m_t - p_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_t + \alpha_2 R_t + \varepsilon_t$$

$$R_t = R_t^* + E_t(e_{t+1} - e_t)$$

Dari persamaan (1.11-1.14) diketahui bahwa tingkat harga dan tingkat bunga luar negeri merupakan variabel eksogen. Tingkat bunga dan nilai tukar matauang domestik merupakan variabel endogen, sedangkan penentuan harga relatif, output riil agregat dan tingkat bunga riil disesuaikan dengan model Klasik atau model Keynes.

Model Klasik dari perekonomian menyatakan bahwa harga dan tingkat upah adalah fleksibel sehingga output ditentukan secara eksogen, yaitu $y_t = y$. Stok uang, tingkat harga dan tingkat bunga luar negeri ditentukan secara eksogen sehingga variabel tingkat harga domestik, tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil domestik, harga relatif dan nilai tukar matauang domestik ditentukan secara endogen. Formulasi model IS ekonomi terbuka dapat dirumuskan dengan mensubstitusi persamaan (1.12) dan (1.13) ke (1.11), yaitu:

$$y = \beta_0 + \beta_1[R_t - E_t(p_{t+1} - p_t)] + \beta_2[p_t - (e_t + p_t^*)] + v_t$$

Paritas tingkat bunga (1.14B) dapat digunakan dalam model IS dan model LM untuk mengeliminasi tingkat bunga nominal. Oleh sebab itu model IS dan model LM masing-masing adalah :

$$y = \beta_0 + \beta_1[R_t^* + E_t(e_{t+1} - e_t) - E_t(p_{t+1} - p_t)] + \beta_2[p_t - (e_t + p_t^*)] + v_t \quad (1.16A)$$

$$m_t - p_t = \alpha_0 + \alpha_1 y + \alpha_2[R_t^* + E_t(e_{t+1} - e_t)] + \varepsilon_t$$

Dari (1.16A) dan (1.16B) diketahui bahwa variabel endogen adalah tingkat harga dan nilai tukar matauang. Pergerakan nilai p_t dan e_t ditentukan oleh variabel eksogen, kejutan atau shock pada pengeluaran pemerintah dan pendapatan luar negeri [v_t] serta kejutan atau shock pada permintaan uang [ε_t]. Analisis model Klasik pada steady-state variabel eksogen dan kejutan perekonomian menjelaskan bahwa nilai $v_t = 0$ dan $\varepsilon_t = 0$, $\Delta m_t = \Theta$, $\Delta y_t = 0$ dan $\Delta p_t^* = \Theta^*$. Demikian juga $R^* = r^* + \Theta^*$ dan steady-state dari ekspektasi nilai tukar $E_t(e_{t+1} - e_t) = e_{t+1} - e_t$ adalah konstan. First-differenced dari persamaan (1.16A) dan (1.16B) masing-masing adalah

$$y = \beta_0 + \beta_1[R_t^* + E_t(e_{t+1} - e_t) - E_t(p_{t+1} - p_t)] + \beta_2[p_t - (e_t + p_t^*)] + v_t$$

$$0 = \beta_1[0 + 0] + \beta_2[\Delta p - \Delta e - \Theta^*]$$

$$m_t - p_t = \alpha_0 + \alpha_1 y + \alpha_2[R_t^* + E_t(e_{t+1} - e_t)] + \varepsilon_t$$

$$\Theta - \Delta p = \alpha_2 [0]$$

Dari (1.17B) ditunjukkan bahwa tingkat inflasi domestik sama dengan tingkat pertumbuhan stok uang domestik. Persamaan (1.17A) menjelaskan bahwa $0 = \Delta p - \Delta e - \Theta^*$ sehingga $\Delta e = \Theta - \Theta^*$, artinya tingkat perubahan nilai tukar matauang domestik adalah selisih tingkat pertumbuhan stok uang domestik dengan tingkat pertumbuhan stok uang luar negeri. Jika $[\Theta > \Theta^*]$ maka harga atau nilai tukar matauang luar negeri apresiasi atau nilai tukar matauang domestik depresiasi. Jika $[\Theta = \Theta^*]$ maka harga atau nilai tukar matauang domestik dan luar negeri stabil, dan jika $[\Theta < \Theta^*]$ maka harga atau nilai tukar matauang luar negeri depresiasi atau nilai tukar matauang domestik apresiasi.

First differenced dari $q_t = p_t - (e_t + p_t^*)$ adalah $\Delta q = \Delta p - \Delta e - \Theta^* = 0$, artinya harga relatif impor dalam matauang domestik konstan pada kondisi steady-state. Karakteristik ini sesuai dengan teori paritas daya beli, dimana pergerakan nilai tukar matauang merupakan perbedaan tingkat inflasi domestik dengan tingkat inflasi luar negeri atau $\Delta e = \Delta p - \Delta p^*$. Prediksi dari teori paritas daya beli menyatakan bahwa ekspansi moneter domestik akan proporsional dengan peningkatan harga dan depresiasi nilai tukar matauang, tanpa merubah nilai riil dari harga relatif. Oleh sebab itu perubahan nilai tukar riil disebabkan oleh pengaruh kebijakan moneter. Pengaruh kejutan terhadap nilai tukar matauang dan tingkat harga didasarkan pada asumsi bahwa nilai p_t^* , R_t^* dan m_t konstan dalam jangka panjang sehingga persamaan (1.16A) dan (1.16B) dapat dituliskan dalam bentuk:

$$B_t = \beta_1 [E_t(e_{t+1} - e_t) - E_t(p_{t+1} - p_t)] + \beta_2 [p_t - e_t] + v_t$$

$$- p_t = C + \alpha_2 [E_t(e_{t+1} - e_t)] + \varepsilon_t$$

dimana B dan C masing-masing adalah konstanta seluruh variabel dan parameter yang terdapat pada masing-masing persamaan. Dari (1.18A) dan (1.18B) ditunjukkan bahwa nilai tukar matauang dan tingkat harga domestik ditentukan oleh kejutan konsumsi pemerintah dan output luar negeri serta permintaan uang, yaitu:

$$p_t = \theta_{10} + \theta_{11} v_t + \theta_{12} \varepsilon_t$$

$$e_t = \theta_{20} + \theta_{21} v_t + \theta_{22} \varepsilon_t$$

dimana $E_t p_{t+1} = \theta_{10}$ dan $E_t e_{t+1} = \theta_{20}$. Substitusi (1.19A) dan (1.19B) ke (1.18A) dan (1.18B) akan menghasilkan persamaan:

$$B_t = \beta_1[-\theta_{21}v_t - \theta_{22}\varepsilon_t + \theta_{11}v_t + \theta_{12}\varepsilon_t] + \beta_2[\theta_{10} + \theta_{11}v_t + \theta_{12}\varepsilon_t - \theta_{20} - \theta_{21}v_t - \theta_{22}\varepsilon_t] + v_t \quad (1.20A)$$

$$-(\theta_{10} + \theta_{11}v_t + \theta_{12}\varepsilon_t = C + \alpha_2[-\theta_{21}v_t - \theta_{22}\varepsilon_t] + \varepsilon_t$$

Ada enam parameter yang nilainya ditentukan dalam sistem persamaan (1.20A) dan (1.20B) akan tetapi terdapat dua parameter yang nilainya sudah ditentukan, yaitu θ_{10} dan θ_{20} . Dari kedua persamaan ini diketahui bahwa sistem persamaan terpenuhi dengan empat syarat parameter atau koefisien, yaitu:

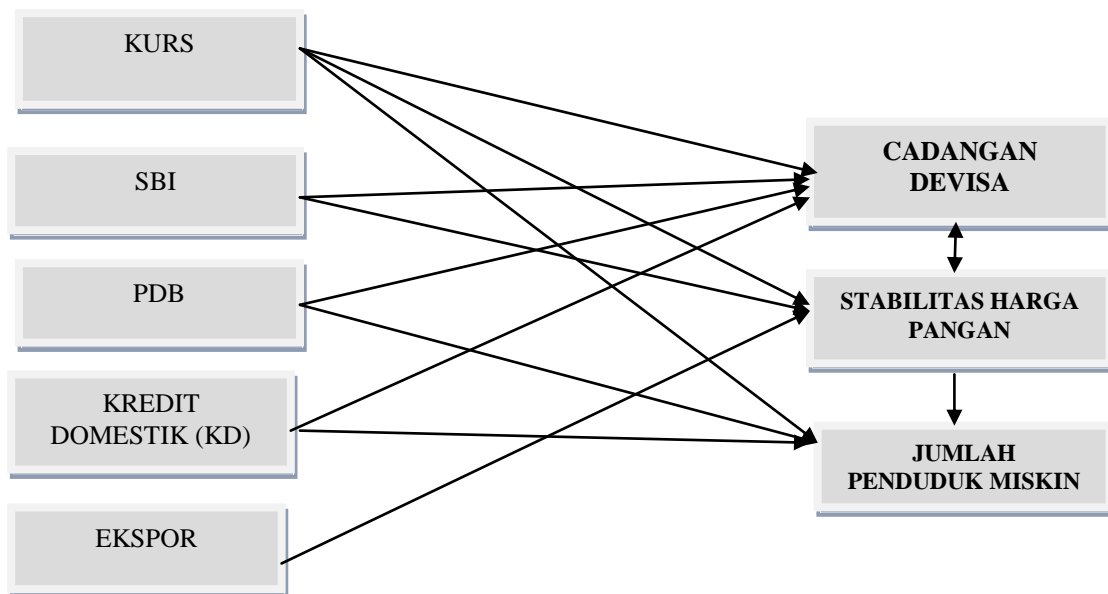
1. $0 = \beta_1[-\theta_{21} + \theta_{11}] + \beta_2[\theta_{11} - \theta_{21}] + 1$,
2. $0 = \beta_1[-\theta_{22} + \theta_{12}] + \beta_2[\theta_{12} - \theta_{22}]$,
3. $-\theta_{11} = -\alpha_2\theta_{21}$ dan
4. $-\theta_{12} = -\alpha_2\theta_{22} + 1$.

Dari empat parameter ini diperoleh solusi koefisien $[\theta]$ dengan cara substitusi masing-masing nilai parameter, yaitu:

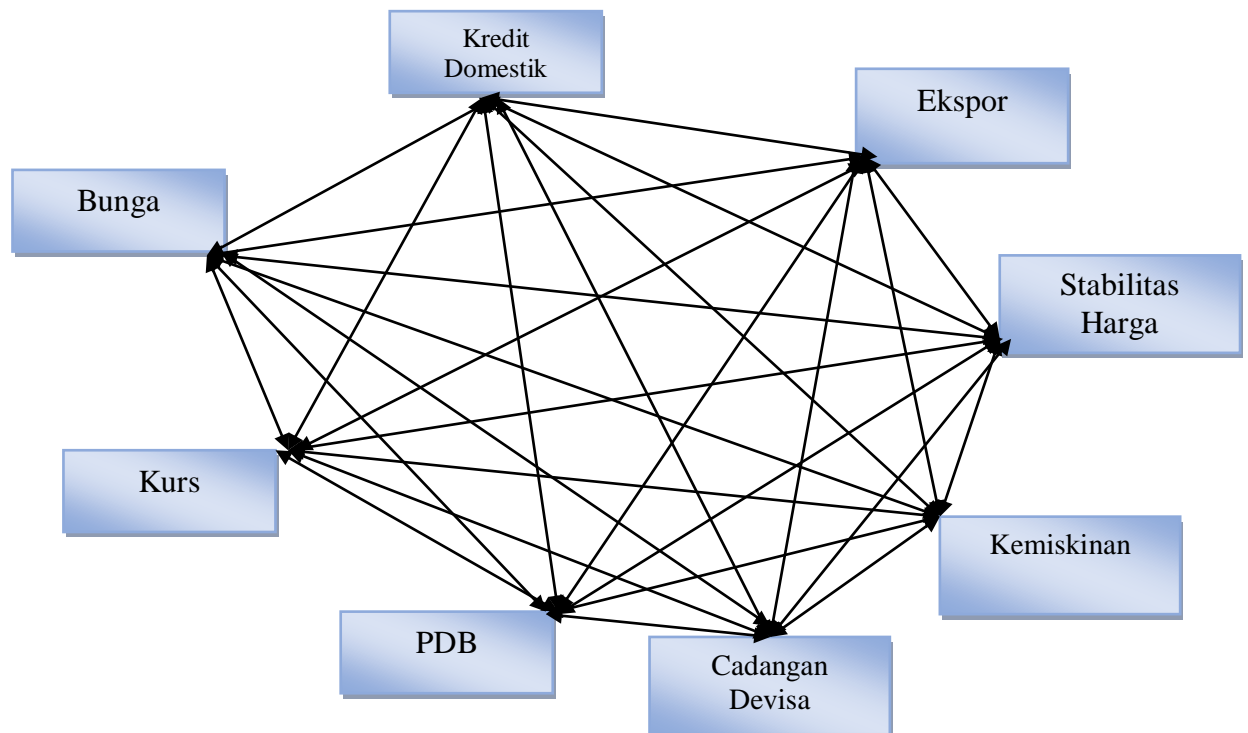
1. $\theta_{11} = \alpha_2 / [(1 - \alpha_2)(\beta_1 + \beta_2)]$,
2. $\theta_{21} = 1 / [(1 - \alpha_2)(\beta_1 + \beta_2)]$,
3. $\theta_{22} = 1 / (\alpha_2 - 1)$, dan
4. $\theta_{12} = 1 / (\alpha_2 - 1)$.

Nilai $\beta_1, \beta_2 < 0$ dan $\alpha_2 < 0$, sehingga nilai koefisien $\theta_{11} > 0$ dan $\theta_{12}, \theta_{21}, \theta_{22} < 0$. Artinya respons tingkat harga terhadap kejutan konsumsi pemerintah dan output luar negeri $[v_t]$ adalah positif dan respons tingkat harga terhadap kejutan stok uang domestik $[\varepsilon_t]$ adalah negatif. Demikian juga respons nilai tukar matauang domestik terhadap kejutan konsumsi pemerintah dan output luar negeri $[v_t]$ dan kejutan stok uang domestik $[\varepsilon_t]$ adalah negatif. Nilai stok uang adalah $m_t = m - \varepsilon_t$, yaitu penjelasan bahwa tingkat harga akan turun dan nilai tukar matauang domestik akan apresiasi jika terjadi penurunan stok uang yang tidak diharapkan $[m_t]$. Tingkat harga luar negeri $[p_t^*]$ diasumsikan konstan sehingga besar respons harga relatif $[q_t = p_t - (e_t + p_t^*)]$ terhadap kejutan $[v_t]$ dan $[\varepsilon_t]$ masing-

masing adalah $\theta_{11} - \theta_{21} = -1/(\beta_1 + \beta_2)$ dan $\theta_{12} - \theta_{22} = 0$. Diketahui nilai $\beta_1 + \beta_2 < 0$, sehingga respons $[q_t]$ terhadap kejutan $[v_t]$ adalah positif atau harga relatif $[q_t]$ akan naik jika kejutan konsumsi pemerintah dan output luar negeri $[v_t]$ positif. Sebaliknya respons $[q_t]$ terhadap kejutan $[\varepsilon_t]$ adalah nol atau kejutan dari stok uang tidak berpengaruh terhadap harga relatif $[q_t]$. Dengan kata lain harga relatif domestik tidak respons terhadap kejutan stok uang, yang disebut netralitas uang atau neutrality of money dari model klasik. Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara simultan.



Gambar 4. Kerangka Prediksi Jangka Pendek Model Simultan Regression



Gambar 5. Kerangka Prediksi Jangka Panjang Model Structural Factor Augmented Vector Autoregression (SFAVAR)

Metode Penelitian

Model analisis data menggunakan analisis simultan regression dengan 3TLS dan analisis jangka panjang *Structural Factor Augmented Vector Autoregression/SFAVAR*. Menurut Rusiadi (2016) jika sebagian besar atau seluruh variabel memiliki hubungan yang simultanitas maka lebih baik menggunakan analisis jangka panjang, salah satunya adalah SFAVAR.

Model analisis yang digunakan adalah sistem persamaan simultan sebagai berikut:

$$\text{LOG(CDEV)} = C(11) * \text{LOG(KURS)} + C(12) * \text{LOG(INF)} + C(13) * \text{LOG(SBI)} + \\ C(14) * \text{LOG(PDB)} + C(15) * \text{LOG(KD)} + \varepsilon_1$$

Dimana :

- CDEV = Cadangan Devisa (Milyar Rupiah)
- INF = Inflasi (Persen)
- KURS = Nilai Tukar Mata Uang (Rp/US\$)
- SBI = Suku Bunga Sertifikat Bank (Persen)

PDB = Produk Domestik Bruto (Milyar Rupiah)

KD = Kredit Domestik (Milyar Rupiah)

C(11), C(12), (13) = konstanta

α_0, α_3 = koefisien regresi

ε_1 = term error

$$\text{LOG(INF)} = \text{C}(21) * \text{LOG(KURS)} + \text{C}(22) * \text{LOG(SBI)} + \text{C}(23) * \text{LOG(EKS)} + \text{C}(24) * \text{LOG(CDEV)} + \varepsilon_2$$

Dimana :

INF = INFLASI (Persen)

KURS = Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika (Rupiah)

SBI = Suku Bunga Sertifikat Bank (persen)

EKS = Ekspor (Juta US\$)

CDEV = Cadangan Devisa (Milyar Rupiah)

C(21), C(22), (23), (24) = konstanta

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_3$ = koefisien regresi

ε_2 = term error

$$\text{LOG(JPM)} = \text{C}(21) * \text{LOG(KURS)} + \text{C}(22) * \text{LOG(SBI)} + \text{C}(23) * \text{LOG(EKS)} + \text{C}(24) * \text{LOG(CDEV)} + \varepsilon_2$$

Dimana :

JPM = Jumlah Penduduk Miksin (Juta jiwa)

KURS = Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika (Rupiah)

SBI = Suku Bunga Sertifikat Bank (persen)

EKS = Ekspor (Juta US\$)

CDEV = Cadangan Devisa (Milyar Rupiah)

C(21), C(22), (23), (24) = konstanta

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_3$ = koefisien regresi

ε_2 = term error

Sebelum memasuki tahap analisis 3SLS, setiap persamaan harus memenuhi persyaratan identifikasi. Suatu persamaan dikatakan *identified* hanya jika persamaan tersebut dinyatakan dalam bentuk statistik unik, dan menghasilkan taksiran parameter yang

unik. Berdasarkan hal ini Gujarati, (2015) mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat tersebut maka suatu variabel pada persamaan satu harus tidak konsisten dengan persamaan lain. Dalam hal ini identifikasi persamaan dapat dilakukan dengan memasukkan atau menambah, atau mengeluarkan beberapa variabel eksogen (atau endogen) ke dalam persamaan. Kondisi *identified* dibagi menjadi dua yaitu: *exactly identified* dan *over identified*. Penentuan kondisi *exactly identified* maupun *over identified* dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$K-k < m-1$: disebut *under identification*

$K-k = m-1$: disebut *exact identification*

$K-k > m-1$: disebut *over identification*

Berdasarkan kriteria diatas maka identifikasi persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{LOG(CDEV)} = C(11)*\text{LOG(KURS)} + C(12)*\text{LOG(INF)} + C(13)*\text{LOG(SBI)} + \\ C(14)*\text{LOG(PDB)} + C(15)*\text{LOG(KD)} + \varepsilon_1$$

$K= 5, k = 2, \text{ dan } m = 3$

$$\text{LOG(INF)} = C(21)*\text{LOG(KURS)} + C(22)*\text{LOG(SBI)} + C(23)*\text{LOG(EKS)} + C(24)*\text{LOG(CDE)} \\ + \varepsilon_2$$

$K= 3, k = 2, \text{ dan } m = 1$

Tabel 1. Uji identifikasi persamaan

Persamaan	K-k	m-1	Hasil	Identifikasi
Cadangan Devisa	5-2	2-1	3>1	<i>Over identification</i>
Stabilitas Harga Pangan	4-2	2-1	2>1	<i>Over identification</i>
Kemiskinan	4-2	2-1	2>1	<i>Over identification</i>

Sumber : Penulis, 2017

Metode analisis menggunakan Three-Stage Least Squares atau model regresi dua tahap, yaitu :

Stage 1 : Persamaan *Reduce Form*

$$\text{LOG(CDEV)} = C(11)*\text{LOG(KURS)} + C(12)*\text{LOG(INF)} + C(13)*\text{LOG(SBI)} + \\ C(14)*\text{LOG(PDB)} + C(15)*\text{LOG(KD)} + \varepsilon_1$$

Stage 2 : Memasukan nilai estimasi Inflasi dari persamaan reduce form ke persamaan awal, yaitu :

$$\text{LOG(INF)} = C(21) * \text{LOG(KURS)} + C(22) * \text{LOG(SBI)} + C(23) * \text{LOG(EKS)} + C(24) * \text{LOG(CDEV)} \\) + \varepsilon_2$$

Stage 3 : Memasukan nilai estimasi Inflasi dari persamaan reduce form ke persamaan awal, yaitu :

$$\text{LOG(JPM)} = C(21) * \text{LOG(KURS)} + C(22) * \text{LOG(SBI)} + C(23) * \text{LOG(EKS)} + C(24) * \text{LOG(CDEV)} \\) + \varepsilon_2$$

Structural Factor Augmented Vector Autoregression

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan simultan (Saling terkait) antara variabel, sebagai variabel eksogen dan variabel endogen dengan memasukkan unsur waktu (*lag*). Model ini mampu membuat pola prediksi integrasi pasar keuangan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dari efek simultanitas antar variabel.

Pengujian SFAVAR dengan rumus :

$$\text{KURS}_t = \beta_{10}\text{KURS}_{t-p} + \beta_{11}\text{PDB}_{t-p} + \beta_{12}\text{EKS}_{t-p} + \beta_{13}\text{CDEV}_{t-p} + \beta_{14}\text{INF}_{t-p} + e_1$$

$$\text{PDB}_t = \beta_{15}\text{PDB}_{t-p} + \beta_{16}\text{EKS}_{t-p} + \beta_{17}\text{CDEV}_{t-p} + \beta_{18}\text{INF}_{t-p} + \beta_{19}\text{KURS}_{t-p} + e_2$$

$$\text{EKS}_t = \beta_{20}\text{EKS}_{t-p} + \beta_{21}\text{CDEV}_{t-p} + \beta_{22}\text{INF}_{t-p} + \beta_{23}\text{KURS}_{t-p} + \beta_{24}\text{PDB}_{t-p} + e_3$$

$$\text{CDEV}_t = \beta_{25}\text{CDEV}_{t-p} + \beta_{26}\text{INF}_{t-p} + \beta_{27}\text{KURS}_{t-p} + \beta_{28}\text{PDB}_{t-p} + \beta_{29}\text{EKS}_{t-p} + e_4$$

$$\text{INF}_t = \beta_{30}\text{INF}_{t-p} + \beta_{31}\text{KURS}_{t-p} + \beta_{32}\text{PDB}_{t-p} + \beta_{33}\text{EKS}_{t-p} + \beta_{34}\text{CDEV}_{t-p} + e_5$$

Dimana:

KURS = Nilai Tukar Rupiah (Rupiah/Dollar)

PDB = Produk Domestik Bruto (Milyar Rupiah)

EKS = Ekspor (Juta US\$)

INF = Inflasi (Persen)

CDEV = Cadangan Devisa (Milyar US\$)

Uji stasioneritas dengan *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). menyarankan untuk melakukan regresi model-model berikut ini :

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \sum_{t-1}^n \beta \Delta Y_{t-1+1} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{t-1}^n \beta \Delta Y_{t-1+1} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma Y_{t-1} + \sum_{t-1}^n \beta \Delta Y_{t-1+1} + e_t$$

Dimana :

Y : variabel yang diamati

Y_t : $Y_t - Y_{t-1}$

T : Trend waktu

N : lag

Model FAVAR memiliki X_t mewakili vektor $N \times 1$ dari *time series* variabel ekonomi, Y_t mewakili vektor $M \times 1$ dari variabel makroekonomi yang *observable* yang merupakan bagian dari X_t , dan F_t mewakili vektor $K \times 1$ dari faktor *unobserved* yang menangkap sebagian besar informasi pada X_t . Menurut Bernanke *et al.* (2005), hubungan dinamis (F_t, Y_t) dapat diwakili pada persamaan di bawah ini:

$$\begin{bmatrix} F_t \\ Y_t \end{bmatrix} = \Phi^*(L) \begin{bmatrix} F_{t-1} \\ Y_{t-1} \end{bmatrix} + v_t, \leftrightarrow \Phi(L) \begin{bmatrix} F_t \\ Y_t \end{bmatrix} = v_t$$

dengan keterangan $\Phi(L) = I - \Phi_1 L - \dots - \Phi_d L^d$ adalah lag polinomial dari order *finite* d pada operator lag L , $\Phi_j (j=1, \dots, d)$ adalah matriks koefisien, dan v_t adalah *error term* dengan *mean zero* dan kovarian matriks Q . Persamaan (1) disebut oleh Bernanke *et al.* (2005) sebagai *factor-augmented vector autoregression* atau FAVAR. Karena faktor *unobserved*, maka persamaan (1) tidak dapat diestimasi secara langsung. Namun, faktor bersama variabel *observable* dapat diinterpretasikan sebagai kekuatan yang sama (*common forces*) yang mendorong dinamika perekonomian, sehingga hubungan *time series* variabel informasi X_t , variabel *observable* Y_t dan faktor F_t dapat dirangkum dalam model dinamis faktor sebagai berikut: $X_t = \Lambda_f F_t + \Lambda_y Y_t + \epsilon_t$

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Simultan Regression

Persamaan simultan diperlukan jika beberapa variabel secara simultan berpengaruh. Berikut hasil 3 persamaan secara simultan :

Tabel 2. Hasil Simultan regression

Determinant residual covariance	8.80E-07
Equation: LOG (CDEV) = C(10)+C(11)*LOG(KURS)+C(12)*LOG(SBI)+C(13)*LOG(PDB)+C(14)*LOG(KD)+C(15)*LOG(INF)	
Instruments: C KURS SBI PDB KD EKS	
Observations: 15	
R-squared	0.960922
Mean dependent var	11.00323

FORUM EKONOMI DAN SOSIAL KE-1 2017
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA CABANG SEMARANG
Semarang, 10 Oktober 2017

Adjusted R-squared	0.939211	S.D. dependent var	0.526852
S.E. of regression	0.129897	Sum squared resid	0.151859
Durbin-Watson stat	2.099043		
Equation: LOG (INF) = C(20)+C(21)*LOG(KURS)+C(22)*LOG(SBI)+C(23)*LOG(EKS)+C(24)*LOG(CDEV)			
Instruments: C KURS SBI PDB KD EKS			
Observations: 15			
R-squared	0.706850	Mean dependent var	1.902698
Adjusted R-squared	0.589590	S.D. dependent var	0.510209
S.E. of regression	0.326856	Sum squared resid	1.068350
Durbin-Watson stat	2.570343		
Equation: LOG (JPM) = C(30)+C(31)*LOG(KURS)+C(32)*LOG(PDB)+C(33)*LOG(KD)+C(34)*LOG(INF)			
Instruments: C KURS SBI PDB KD EKS			
Observations: 15			
R-squared	0.807273	Mean dependent var	3.505376
Adjusted R-squared	0.730183	S.D. dependent var	0.126240
S.E. of regression	0.065574	Sum squared resid	0.042999
Durbin-Watson stat	1.605654		

Estimasi untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan 2 persamaan dilakukan dengan menggunakan model *Three-Stage Least Squares*. Hasil estimasi sistem persamaan dengan *Three-Stage Least Square*, berikut diketahui tiga persamaan, yaitu :

Substituted Coefficients:

$$\begin{aligned}
 \text{LOG (CDEV)} &= 66.0509526864 - 1.31148894814*\text{LOG(KURS)} + \\
 &0.25234170042*\text{LOG(SBI)} - 5.45317273675*\text{LOG(PDB)} + \\
 &2.49049132647*\text{LOG(KD)} - 0.185720390613*\text{LOG(INF)} \\
 \text{LOG (INF)} &= -5.6665207949 + 0.0462661538717*\text{LOG(KURS)} + \\
 &1.37952233875*\text{LOG(SBI)} + 1.17953020295*\text{LOG(EKS)} - \\
 &0.865693681986*\text{LOG(CDEV)} \\
 \text{LOG (JPM)} &= -17.4361085677 + 0.0482480207775*\text{LOG(KURS)} + \\
 &2.22312561574*\text{LOG(PDB)} - 0.821232338315*\text{LOG(KD)} + \\
 &0.0470191412437*\text{LOG(INF)}
 \end{aligned}$$

Hasil ketiga persamaan menunjukkan bahwa model persamaan cadangan devisa memiliki model yang lebih baik yaitu 94%, kemudian model persamaan Jumlah penduduk miskin sebesar 73% serta model stabilitas harga pangan sebesar 71%. Variabel yang paling berpengaruh terhadap persamaan cadangan devisa adalah PDB dan kurs. Variabel yang paling mempengaruhi persamaan stabilitas harga pangan yaitu tingkat bunga dan ekspor.

Variabel yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yaitu PDB dan kredit domestik.

Factor Augmented Vector Autoregression (FAVAR)

Analisis Favar berguna untuk menyaring faktor yang layak dianalisis dalam VAR. berikut hasil analisisnya.

Tabel 3. Hasil FAVAR

Factor Method: Maximum Likelihood					
Date: 09/24/17 Time: 13:07					
Covariance Analysis: Ordinary Correlation					
Sample: 2001 2015					
Included observations: 15					
	Unrotated Loadings		Communality	Uniqueness	
	F1	F2			
SBI	-0.810804	-0.037751	0.658829	0.341171	
PDB	0.752178	0.641833	0.977722	0.022278	
KURS	-1.02E-14	1.000000	1.000000	0.000000	
JPM	-0.758906	-0.576642	0.908454	0.091546	
INF	-0.620154	0.046858	0.386787	0.613213	
CDEV	0.877846	0.462846	0.984840	0.015160	
EKS	0.859655	0.391175	0.892024	0.107976	
KD	0.655441	0.747882	0.988930	0.011070	
Factor	Variance	Cumulative	Difference	Proportion	Cumulative
F1	4.122928	4.122928	1.448271	0.606528	0.606528
F2	2.674657	6.797585	---	0.393472	1.000000
Total	6.797585	10.92051		1.000000	

Sumber : Analisis Data, 2017

Hasil Favar menyebutkan bahwa variabel yang layak dianalisis selanjutnya adalah SBI, ekspor, PDB, Cadangan Devisa, stabilitas harga pangan dan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai uniqueness yang paling tinggi. Kemudian dilakukan uji asumsi, yaitu uji stasioneritas, uji kointegrasi, uji stabilitas lag struktur dan penetapan tingkat lag optimal, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa VAR. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan simultan (saling terkait atau saling kontribusi) antara variabel, sebagai variabel eksogen dan variabel endogen dengan memasukkan unsur waktu (*lag*). Berikut hasil analisa tabel VAR :

Tabel 4. Hasil Structural VAR

Structural VAR Estimates
Date: 09/24/17 Time: 14:03
Sample (adjusted): 2002 2015
Included observations: 14 after adjustments
Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
Failure to improve after 1 iterations
Structural VAR is just-identified

Model: $Ae = Bu$ where $E[uu'] = I$
Restriction Type: short-run text form
 $@e1 = C(1)*@u1$
 $@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2$
 $@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3$
 $@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4$
 $@e5 = C(11)*@e1 + C(12)*@e2 + C(13)*@e3 + C(14)*@e4 + C(15)*@u5$
 $@e6 = C(16)*@e1 + C(17)*@e2 + C(18)*@e3 + C(19)*@e4 + C(20)*@e5 + C(21)*@u6$
where
@e1 represents CDEV residuals
@e2 represents EKS residuals
@e3 represents INF residuals
@e4 represents JPM residuals
@e5 represents PDB residuals
@e6 represents SBI residuals

	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C(1)	0.100000	0.018898	5.291503	0.0000
C(3)	0.100000	0.018898	5.291503	0.0000
C(6)	0.100000	0.018898	5.291503	0.0000
C(10)	0.100000	0.018898	5.291503	0.0000
C(15)	0.100000	0.018898	5.291503	0.0000
C(21)	0.100000	0.018898	5.291503	0.0000

Sumber : Analisis Data, 2017

Estimation Proc:

=====
LS 1 1 CDEV EKS INF JPM PDB SBI @ C
VAR Model - Substituted Coefficients:

=====

$$\text{CDEV} = -0.0361440054087 * \text{CDEV}(-1) + 0.222392397719 * \text{EKS}(-1) - 1909.61544246 * \text{INF}(-1) - 2392.00599739 * \text{JPM}(-1) + 0.0291258881434 * \text{PDB}(-1) + 1646.97416103 * \text{SBI}(-1) + 67693.9106172$$

$$\text{EKS} = 0.733478626543 * \text{CDEV}(-1) + 0.457919859731 * \text{EKS}(-1) + 1538.62461681 * \text{INF}(-1) + 2324.76512894 * \text{JPM}(-1) - 0.00783804131747 * \text{PDB}(-1) - 5486.58990158 * \text{SBI}(-1) - 814.087596557$$

$$\text{INF} = -7.38626841056e-05 * \text{CDEV}(-1) - 1.29604949841e-05 * \text{EKS}(-1) - 0.236666367619 * \text{INF}(-1) - 0.632999432998 * \text{JPM}(-1) - 3.85069742952e-06 * \text{PDB}(-1) - 0.291589699414 * \text{SBI}(-1) + 47.4361124066$$

$$\text{JPM} = 4.10688561001\text{e-}05 * \text{CDEV}(-1) - 3.09128222468\text{e-}05 * \text{EKS}(-1) + 0.366175944747 * \text{INF}(-1) + 0.628570530254 * \text{JPM}(-1) - 1.94994097616\text{e-}06 * \text{PDB}(-1) - 0.0725497005242 * \text{SBI}(-1) + 14.7902258703$$

$$\text{PDB} = 1.40201909684 * \text{CDEV}(-1) - 1.12649372767 * \text{EKS}(-1) + 5030.18761402 * \text{INF}(-1) + 9981.61914328 * \text{JPM}(-1) + 1.14815871145 * \text{PDB}(-1) - 5051.99673219 * \text{SBI}(-1) - 483745.513021$$

$$\text{SBI} = -5.56345989762\text{e-}06 * \text{CDEV}(-1) - 2.03540251107\text{e-}05 * \text{EKS}(-1) + 0.00989907896717 * \text{INF}(-1) - 0.28146725305 * \text{JPM}(-1) - 1.75788824129\text{e-}06 * \text{PDB}(-1) + 0.196061115082 * \text{SBI}(-1) + 22.4526846297$$

Tabel 5. Berikut rangkuman hasil analisis VAR

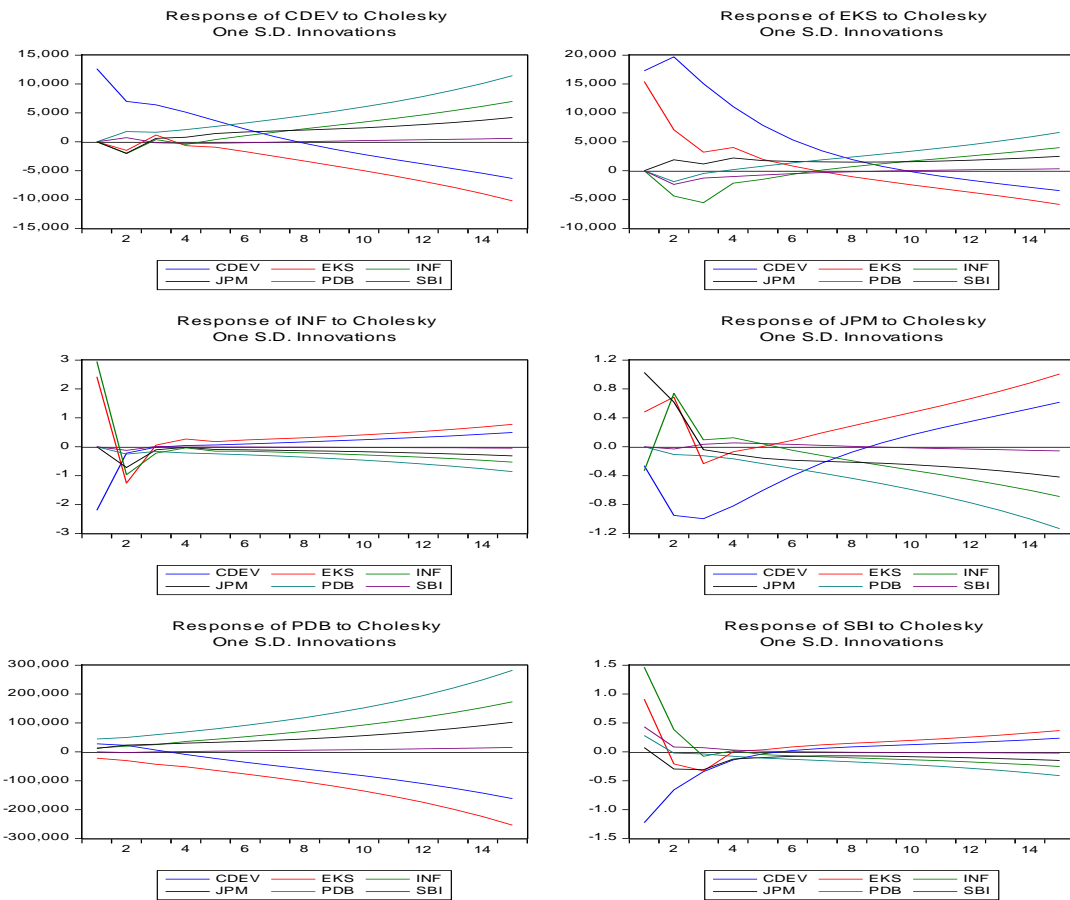
Persamaan	Kontribusi terbesar 1	Kontribusi terbesar 1
CDEV	Ekspor	Stabilitas Harga
Ekspor	Inflasi	Cadangan devisa
Stabilitas Harga Pangan	Ekspor	PDB
Jumlah penduduk miskin	Inflasi	PDB
PDB	Inflasi	Jumlah penduduk miskin
SBI	Cadangan devisa	PDB

Sumber : Analisis penulis, 2017

Hasil tabel di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar terhadap stabilitas harga pangan sangat ditentukan oleh ekspor dan PDB, sedangkan jumlah penduduk miskin dikontribusikan oleh ekspor dan PDB juga.

Analisis *Impulse Response Function* (IRF)

Analisis *Impulse response function* ini digunakan untuk melihat respons variable lain terhadap perubahan satu variable dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Estimasi yang dilakukan untuk IRF ini dititikberatkan pada respons suatu variabel pada perubahan satu standar deviasi dari variabel itu sendiri maupun dari variabel lainnya yang terdapat dalam model.



Gambar 6. Impulse Response Function

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa kenaikan

Tabel 4. Respon Seluruh Variabel Terhadap Variabel Lainnya

Rekomendasi Kebijakan	INF			JPM		
	1	5	15	1	5	15
CDEV	-	+	+	-	-	+
EKS	+	+	+	+	+	+
INF	+	-	-	-	+	-
JPM	0	-	-	+	-	-
PDB	0	-	-	0	-	-
SBI	0	-	-	0	+	-

Sumber : Tabel 6, data diolah oleh penulis

Ket : * (Prioritas Pertama), ** (Prioritas kedua)

1 (jangka pendek), 5 (jangka menengah), 15 (jangka panjang)

Berdasarkan tabel 4 diketahui stabilitas harga pangan sangat mengalami kenaikan dalam jangka pendek direspon positif oleh ekspor dan inflasi sedangkan cadangan devisa merespon negatif. Dalam jangka menengah cadangan devisa dan ekspor merespon positif

sedangkan variabel lainnya merespon negatif. Jangka panjang masih tetap tidak ada perubahan responnya. Jumlah penduduk miskin yang meningkat akan direspon positif oleh ekspor dan direspon negatif oleh cadangan devisa dan inflasi dalam jangka pendek, jangka menengah kenaikan jumlah penduduk miskin direspon positif oleh ekspor, inflasi dan SBI dan jangka panjang direspon positif oleh cadangan devisa dan ekspor dan direspon negatif oleh inflasi, PDB dan SBI.

Analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Variance Decomposition bertujuan untuk mengetahui presentasi kontribusi masing-masing variabel terhadap suatu variabel baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan untuk pengendalian variabel tersebut. Dengan menggunakan metode *variance decomposition* dalam Eviews diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Variance Decomposition of Stabilitas Harga Pangan

Period	CDEV	EKS	INF	JPM	PDB	SBI
1	24.88422	30.23695	44.87883	0.000000	0.000000	0.000000
5	21.31529	32.99904	42.40635	2.345434	0.862019	0.071870
15	18.74660	32.35719	35.06615	3.088267	10.66210	0.079688

Sumber : Analisis Data, 2017

Tabel 6. Rekomendasi Kebijakan Untuk Stabilitas Harga Pangan

Periode	Terbesar 1	Terbesar 2
Jangka Pendek (Periode 1)	INF 44,87%	EKS 30,24%
Jangka Menengah (Periode 5)	INF 42,41%	EKS 32,99%
Jangka Panjang (Periode 15)	INF 35,17%	EKS 332,36%

Sumber : diolah penulis,2017

Berdasarkan tabel 6 diketahui untuk pengendalian laju stabilitas harga pangan dilakukan melalui variabel inflasi dan ekspor dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Tabel 7. Variance Decomposition of Jumlah penduduk Miskin

Period	CDEV	EKS	INF	JPM	PDB	SBI
1	4.688898	15.71530	7.543757	72.05205	0.000000	0.000000
5	49.62501	12.65801	11.31783	24.47411	1.808308	0.116718
15	22.94357	23.67016	12.77412	12.33158	28.18505	0.095523

Sumber : Analisis Data, 2017

Tabel 8. Rekomendasi Kebijakan Jumlah Penduduk Miskin

Periode	Terbesar 1	Terbesar 2
Jangka Pendek (Periode 1)	EKS 15,54%	INF 7,54%
Jangka Menengah (Periode 12)	CDEV 49,62%	EKS 12,56%
Jangka Panjang (Periode 24)	PDB 2818	EKS 23,67%

Sumber : diolah penulis, 2017

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa kebijakan untuk mengendalikan penduduk miskin dalam jangka pendek melalui ekspor dan inflasi, dalam jangka menengah cadangan devisa dan ekspor dan jangka panjang dikendalikan oleh PDB dan ekspor. Ternyata ekspor sangat dominan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin. (Kuncoro, 2014) dan Agustina (2016) terdapat hubungan negative dan sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang artinya ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh, kemiskinan berkurang. Prasetyo (2010), Putra (2014) menyatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Hambarsari (2016) dan Alfian (2011) juga memperkuat pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat kuat dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Kemudian Adila (2010) dan Aswani (2015) menyatakan pertumbuhan ekonomi dan ekspor mempengaruhi penduduk miskin.

Penutup

Hasil ketiga persamaan menunjukkan bahwa model persamaan cadangan devisa memiliki model yang lebih baik yaitu 94%, kemudian model persamaan Jumlah penduduk miskin sebesar 73% serta model stabilitas harga pangan sebesar 71%. Variabel yang paling berpengaruh terhadap persamaan cadangan devisa adalah PDB dan kurs. Variabel yang paling mempengaruhi persamaan stabilitas harga pangan yaitu tingkat bunga dan ekspor. Variabel yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yaitu PDB dan kredit

domestik. Kontribusi terbesar terhadap stabilitas harga pangan sangat ditentukan oleh ekspor dan PDB, sedangkan jumlah penduduk miskin dikontribusikan oleh ekspor dan PDB juga.

Stabilitas harga pangan sangat mengalami kenaikan dalam jangka pendek direspon positif oleh ekspor dan inflasi sedangkan cadangan devisa merespon negatif. Dalam jangka menengah cadangan devisa dan ekspor merespon positif sedangkan variabel lainnya merespon negatif. Jangka panjang masih tetap tidak ada perubahan responnya. Jumlah penduduk miskin yang meningkat akan direspon positif oleh ekspor dan direspon negatif oleh cadangan devisa dan inflasi dalam jangka pendek, jangka menengah kenaikan jumlah penduduk miskin direspon positif oleh ekspor, inflasi dan SBI dan jangka panjang direspon positif oleh cadangan devisa dan ekspor dan direspon negatif oleh inflasi, PDB dan SBI. Pengendalian laju stabilitas harga pangan dilakukan melalui variabel inflasi dan ekspor dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Kebijakan untuk mengendalikan penduduk miskin dalam jangka pendek melalui ekspor dan inflasi, dalam jangka menengah cadangan devisa dan ekspor dan jangka panjang dikendalikan oleh PDB dan ekspor. Ternyata ekspor sangat dominan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila Adisti, (2010) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ekspor Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Tahun 1999-2008)*. Other Thesis, Fakultas Ekonomi.
- Agustina, Ira (2016) *Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Saluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tesis. Universitas Jambi.
- Alfian, Muhammad (2011) *Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Pada Jalur Suku Bunga*. *Jurnal Media Ekonomi Vol. 19, No. 2, Agustus 2011*.
- Aswani Hervita dan, J. (2015). *Analyzing The Impact Of Global Financial Crisis On The Interconnectedness Of Asian Stock Markets Using Network Science*. *Indira Gandhi Institute Of Development Reseach, Mumbai*. Wp-2015-020
- Kavous, Bittencourt, M, Mwabutwa C.N, Nicola (2016) *Evolution Of Monetary Policy Transmission Mechanism In Malawi: A Tvp-Var Approach*. *Pakistan Economic And Social Review Volume 52, No. 1 (Summer 2014)*, Pp. 1-14
- Yodiatmaj.B (2012) *Hubungan Antara Bi Rate Dan Inflasi Pendekatan Kausalitas Toda – Yamamoto*. *Journal Of Economics And Policy*. 5 (2): 127-229
- Gujarati, D. N. (2012). *Ekonomika Dasar*. (Edisi Alih Bahasa Terjemahan). Jakarta: Erlangga.

- Hambarsari, Dwi Puspa, Kunto Inggit (2016) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, hal 257-282 Volume 1, Nomor 2, September 2016.
- Kuncoro, Sri. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 2009 - 2011. *Jurnal Ilmiah. Fe Muhammadiyah Surakarta*
- Masdjoko, Gregorius. (2010). *Kajian Pendekatan Keynesian dan Moneteris Terhadap Cadangan Devisa Melalui Penelusuran Neraca Pembayaran Internasional : Studi Empiris Di Indonesia Periode 1983-2008*. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Prasetyo, A.A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003 – 2007 (Analysis Of Factors Influencing Poverty Rate: Case Study, 35 Districts/Municipalities In Central Java Years 2003 - 2007). (Unpublished Thesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Putra, M.M.D. (2014). Determinan Kemiskinan Di Kabupaten /Kota Propinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2012 (Determinants Of Poverty In Districts/Municipalities In West Java Years 2008-2012). (Unpublished Thesis). Depok: Universitas Indonesia.
- Rusiadi, et al. (2016). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.

STRATEGI DASAR DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR

Elpisah

Surel: Elpisah77.amir@gmail.com

STIKIP Pembangunan Indonesia, Jl. Inspeksi Kanal Citraland No. 10, Makassar

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Strategi Dasar terhadap Pengentasan Kemiskinan, untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Strategi Operasional terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk miskin Kota Makassar yang berada di bawah bimbingan PNPM Mandiri Perkotaan Makassar yang terdiri dari 78.125 jiwa. Penarikan sample dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan dan kriteria penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan 100 responden dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS versi 22,0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Dasar PNPM ternyata tidak mampu mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar secara signifikan, hasil analisis pada Strategi Operasional PNPM mampu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Sedangkan besarnya pengaruh secara bersama-sama Strategi Dasar dan Strategi Operasional dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar sebesar 90.8 persen.

Kata kunci: Strategi Dasar, Strategi Operasional PNPM dan Pengentasan Kemiskinan

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan nasional diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses terencana dan sistematis menuju situasi nasional yang lebih baik (Kartasasmita: 1994). Tujuan dari pembangunan nasional adalah menuju ke arah yang lebih baik pada seluruh aspek yang ada dalam sebuah negara. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi mencakup 3 unsur antara lain perubahan

ekonomi yang berkelanjutan, usaha meningkatkan pendapatan perkapita dan kenaikan pendapatan perkapita berlangsung dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk secara langsung akan bertambahnya konsumsi kebutuhan sehari-hari setiap tahunnya. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun dalam menekan angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi. Kemiskinan pada dasarnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2009 :16).

Kondisi di atas menunjukkan, bahwa permasalahan kemiskinan selalu ada setiap tahunnya, sehingga ketika pemerintah berniat untuk mengatasinya, maka butuh kemauan (*political will*) dan kerja ekstra keras dari berbagai komponen bangsa. Sehingga, program-program yang digulirkan beserta alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tidak berjalan di tempat, dan menjadi kesia-siaan karena ternyata masih banyak kekurangan di sana-sini. Dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat menjadi tersendat.

Tabel 1. Garis Kemiskinan di Sulsel

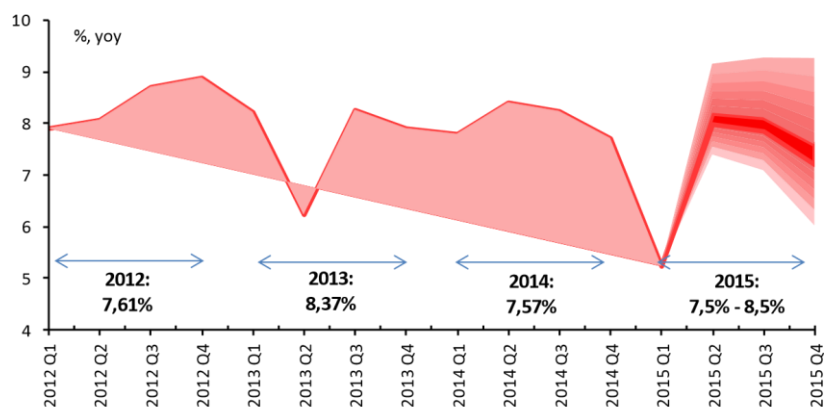
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)					Pertumbuhan YoY			Inflasi YoY		
	Sep-12	Mar-13	Sep-13	Mar-14	Sep-14	Sep-13	Mar-14	Sep-14	Sep-13	Mar-14	Sep-14
Kota	215.790	221.892	235.488	240.276	246.416	9,13%	8,29%	4,64%	7,24%	5,88%	3,72%
Desa	183.959	192.161	207.023	211.271	219.109	12,54%	9,94%	5,84%			

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan relatif cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain seSulampua. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan berada pada urutan ketiga terendah (9,5%) setelah Provinsi Maluku Utara (7,4%) dan Sulawesi Utara (8,3%) (Grafik 6.4). Urutan Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara tersebut juga tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi pada Maret 2014.

Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulampua tercatat sebesar 27,8% dan masih terdapat di Provinsi Papua.

Perekonomian Sulsel di triwulan II 2015 diperkirakan akan kembali meningkat, didorong oleh aktivitas semua komponen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2015 diperkirakan kembali dalam arah meningkat dalam kisaran 7,9% - 8,9% (yoy). Dari sisi permintaan, permintaan konsumsi rumah tangga tetap kuat, yang terpantau dari optimisme ekspektasi konsumen dan pedagang (hasil survei penjualan eceran). Investasi meningkat, terutama investasi yang dibiayai pemerintah dan komersial. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan di tahun 2015 akan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, terutama untuk sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan penyediaan akomodasi. Faktor pendorong sisi sektoral adalah kebijakan pemerintah dan faktor musiman.



Gambar 1. Perkembangan PDRB dan Proyeksinya

Pertumbuhan ekonomi 2015, diperkirakan masih diwarnai dengan perlambatan permintaan komoditas dari negara mitra dagang yang menyebabkan pelemahan ekspor. Ekonomi global sudah mulai membaik namun tidak secepat prakiraan sebelumnya. Perbaikan berasal dari ekonomi negara maju (Amerika Serikat dan Kawasan Eropa), sementara ekonomi negara berkembang (Asia dan ASEAN) melambat. Dari sisi domestik, kategori utama yang diperkirakan menopang pertumbuhan antara lain pertambangan, konstruksi, perdagangan besar/eceran, transportasi, penyediaan akomodasi, informasi/komunikasi, real estate, dan jasa-jasa. Peningkatan beberapa sektor tersebut

terkait beroperasinya tambahan *smelter* dan kegiatan pendukungnya, mulai beroperasinya hotel di Makassar, serta pembangunan infrastruktur transportasi dan distribusi.

Khususnya di Kota Makassar, indikator makro ekonomi Kota Makassar pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 9,20% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 9,88%. Produk Domestik bruto (PDRB) mengalami peningkatan signifikan dari Rp 31,26 triliun menjadi Rp 58,54 triliun pada tahun 2013. (Laporan BPS tahun 2014).

Angka pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dan PDRB yang tinggi seharusnya memberikan gambaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kondisi yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi dan angka PDRB disertai dengan tingginya angka kemiskinan di Kota Makassar. Data tahun 2013 menunjukkan sebanyak 44.217 kepala keluarga (KK) dari total penduduk kota Makassar dan sekitar 1,4 juta orang menetap dalam kawasan pemukiman kumuh. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2014, pemukiman kumuh yang tersebar di seluruh kecamatan menempati area seluas 47,62 kilometer (km) persegi. Jumlah ini sekitar 1/4 dari total luas Kota Makassar yang mencapai 195 km².

Data mengenai pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Kota Makassar tahun 2010-2014 pada tabel 2

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kota Makassar tahun 2010-2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	KK Miskin
2010	9,2	70.160
2011	9,83	68.356
2012	9,65	62.192
2013	9,48	46.355
2014	9,88	44.217

Sumber: Laporan Bappeda Makassar, 2015

Laporan Bappeda dan BPS menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun akan tetapi angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kota Makassar. Hal ini berarti perbandingan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan masih jauh. Mengeluarkan masyarakat dari perangkap kemiskinan, memperkecil ketimpangan diantara penduduk yang tidak miskin tetaplah harus menjadi prioritas semua pihak terutama pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Implementasinya, program-program tersebut acapkali tidak bisa berjalan sesuai target dan tujuan. Sebenarnya bukan tidak berhasil dalam menjalankan program-program tersebut, namun paradigma yang ada program tersebut berhasil apabila program tersebut masih berlangsung, tetapi apabila program tersebut selesai maka pemerintah juga berhenti untuk menjalankan program tersebut. Kondisi yang ada menyebabkan program pengentasan kemiskinan menjadi tidak efektif atau tidak berkelanjutan.

Ketidakefektifan program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama penduduk miskin tidak responsif dengan perubahan, dia tidak yakin benar bahwa perubahan tersebut dapat meningkatkan pendapatan keluarganya. kedua bias birokrat, artinya bahwa birokrat yang cenderung memilih penduduk dari luar sasaran yang tidak responsif terhadap perubahan. Ketiga adalah pemilihan program itu sendiri. Ketidakterlibatan kelompok sasaran program menjadikan program tersebut tidak terselesaikan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang sebelumnya bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang berupaya dalam menanggulangi kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. (Dikutip dari : Buku Pedoman Umum PNPM MAndiri, Edisi 2013).

PNPM Mandiri Perkotaan khususnya di Kota Makassar memiliki dua strategi yaitu strategi dasar dan strategi operasional yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan guna mengubah sikap mental ketergantungan serta menumbuhkembangkan etos kerja, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan memunculkan kesadaran untuk menanggulangi kemiskinan dengan usaha yang produktif yang dilakukan oleh mereka sendiri.

Penelitian ini menyoroti kekurangan dari Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota

Makassar, penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru dalam dunia penelitian dengan memerangi kemiskinan.

Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat diangkat dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Apakah Strategi Dasar pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dapat berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar dan Apakah Strategi Operasional pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dapat berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar.

Kajian Pustaka

Sejak tahun 1999 pemerintah tengah berupaya untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, pada saat itu program ini dinamakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Setelah itu pada tahun 2007 program tersebut dirintis kembali yang mengadopsi dari program yang telah ada yaitu P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kemudian tepatnya tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

PNPM Mandiri Perkotaan, selanjutnya disebut PNPM MP berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/ perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal, melalui kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat.

Sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan antara lain untuk memperkuat dan melembagakan BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif, representatif serta bertanggung

jawab untuk mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan lingkungan pemukiman yang lebih komprehensif, pengelolaan resiko bencana dan pengembangan tata penghidupan masyarakat. Lokasi sasaran PNPM MP dengan kriteria lokasi dan alokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan yang tertuang pada penjelasan surat penetapan lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan oleh Menkokesra.

Strategi PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari Strategi Dasar antara lain mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersamasama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

Yang kedua adalah Strategi Operasional Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis, Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel, Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas, Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

Prinsip PNPM Mandiri Perkotaan antara lain Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya, Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola, Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya, Berorientasi pada

masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan, Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya, Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini, Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs, Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. . Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

Kemiskinan adalah suatu konsep yang selalu berubah dan bersifat multidimensional, sangat terbuka, dipengaruhi oleh interpretasi subjek yang mendefinisikan, karenanya mendefinisikan kemiskinan tidak akan pernah mendapatkan definisi tunggal. Kemiskinan biasanya Nampak dalam dampak kemiskinan itu sendiri seperti busung lapar, tingginya tingkat kematian bayi, berjangkitnya penyakit polio, banyaknya tuna wisma, hunian kumuh, dan lain-lain. Ala (1996) meninjau kemiskinan dari aspek kebutuhan pokok. Mereka membedakan atas kemiskinan relatif dan kemiskinan

absolut. Jika ditinjau dari aspek penyebabnya kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

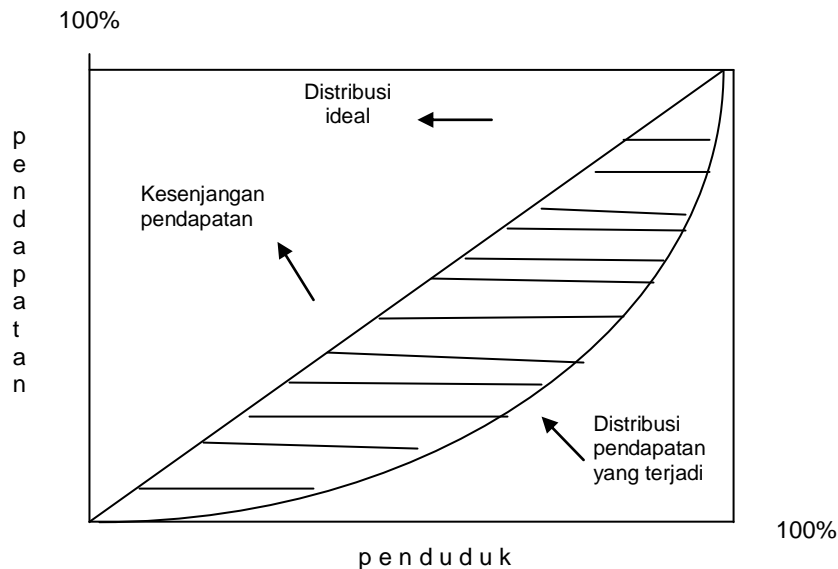
Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang karena gaya hidup, kebiasaan dan budaya mereka merasa sudah berkecukupan dan sama sekali merasa tidak kekurangan. Martanto, U. (2007:48) menjelaskan kemiskinan struktural adalah kemiskinan sebagai ketidak berdayaan sekelompok masyarakat untuk hidup layak disebabkan bekerjanya struktur sosial, politik dan ekonomi yang eksploitatif. Akibatnya selain tidak bisa mencukupi kebutuhan sandang papan dan pangan juga tidak sanggup mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan.

Pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. Menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Ridlo (2001:11), menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi: (1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi. (2) *Cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

Hasil Kurva Lorenz kemudian dijumlahkan dengan memberi densitas relative ketidakmerataan distribusi pendapatan yang disebut *Gini Ratio*. Pembagian kelas dapat menjadi tiga kelas (miskin, menengah dan kaya) atau lima kelas (termiskin, kedua, ketiga, keempat dan terkaya). Angka *Gini Ratio* 0 (nol) menunjukkan merata mutlak, sedangkan

angka 1 (satu) menunjukkan tidak merata mutlak (Remi dan Herijanto, 2002:41; Rusli dkk, 1995:12; dan Widodo, 1990:118).



Gambar 2 Kurva Lorenz

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Upaya mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan (Soegijoko, 1997:148).

Strategi pengentasan kemiskinan juga dikemukakan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (Unescap)* (2000), bahwa strategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari penanggulangan kemiskinan uang; kemiskinan akses ekonomi, sosial dan budaya; dan penanggulangan kemiskinan terhadap akses kekuasaan dan informasi. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat (Nugroho dan Dahuri, 2004:165). Upaya pengentasan kemiskinan perlu tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan.

Secara garis besar perencanaan dapat dibagi dalam beberapa jenis yang diantaranya dapat dikelompokkan berdasarkan proses atau hirarki penyusunannya. Perencanaan tersebut terdiri dari perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*). Tradisi reformasi sosial dan analisis

kebijakan termasuk perencanaan dengan hirarki dari atas ke bawah (*top-down*), sedangkan tradisi pembelajaran sosial dan mobilisasi sosial termasuk perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) (Wahyono, 2004).

Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) yaitu apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi yang lebih rendah. Institusi yang lebih tinggi harus menerima usulan yang diajukan oleh institusi yang lebih rendah. Institusi yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagai usaha sistematis untuk memilih alternatif guna mencapai tujuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang realistis dan rasional, baru dapat dilaksanakan dalam seperempat abad terakhir (Kartasasmita, 1997:105).

Pendekatan dalam program pengentasan kemiskinan hendaknya berdasarkan profil kemiskinan dan *people driven* dimana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis. Menurut Dillon (2001) paradigma penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah saat ini adalah bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan (Mubyarto, 2002). Kritik terhadap program pengentasan kemiskinan salah satunya adalah mekanisme penyaluran program tidak jelas dan jumlah dana kurang memadai. Pemerintah pusat sulit menggeneralisasi suatu kebijakan dengan jaminan efektif di semua wilayah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatory yang melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain sehingga memiliki hubungan *causality relationship*. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (*Mixed Methods*). Menurut Sugiyono (2012:17), penelitian kombinasi dapat melalui penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama. Penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk menguji kebenaran teori dengan observasi yang didahului dengan mengajukan hipotesis dan operasionalisasi variabel. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian sebagaimana

keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, penelitian ini menggunakan alat analisis inferensial.

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti. Pengumpulan data-data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara maupun angket.

Populasi adalah keseluruhan aspek yang menjadi objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan seluruh penduduk miskin Kota Makassar yang berada dibawah bimbingan PNPM Mandiri Perkotaan Makassar yang terdiri dari 78.125 jiwa atau 17.087 KK yang tersebar di 14 kecamatan dan 143 kelurahan di Kota Makassar. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh pupolasi tersebut. Dalam penelitian ini, penarikan sample dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan dan kriteria penelitian. Adapun rumus yang akan digunakan untuk menentukan besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(1 + (N)(e)^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

e = Tingkat Kepercayaan (10 % = 0,1)

Jadi besar sampel:

$$N = \frac{78.125}{1+(78.125)(0,1)^2}$$

$$N = 100$$

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 100 responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan program SPSS dengan rumus

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \varepsilon$$

dengan :

Y = Pengentasan Kemiskinan

x₁ = Strategi Dasar

x₂ = Strategi Operasional

b_1, b_2 = Koefisien regresi (parameter) yang diestimasi

ε = Error term

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri digunakan uji-F, uji-t dan koefisien determinasi (R^2) dan secara parsial (r^2).

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi variabel strategi dasar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah strategi PNPM Mandiri Kota Makassar dalam upaya meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat, menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayaan dan pembangunan partisipatif serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Rata-rata responden dengan menjawab sangat sering antara lain dengan menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan dalam kegiatan sosial, memberikan kontribusi pemikiran, sering dilibatkan dalam bentuk tenaga, struktur pengorganisasian, pelatihan-pelatihan dalam hal berwirausaha, bermitra dengan pemerintah, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, bermitra dengan masyarakat di luar kelurahan, dengan stakeholder, dengan lembaga social non bank untuk melakukan pembangunan sektoral, pembangunan wilayah serta melakukan pembangunan partisipatif.

Deskripsi variabel strategi operasional merupakan salah satu strategi PNPM Mandiri Kota Makassar dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah maupun swasta dalam mewujudkan tujuan utama PNPM dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar. Rata-rata responden memberikan jawaban sangat sering dengan menunjukkan peran sumberdaya masyarakat secara optimal, menunjukkan pemerintah daerah dan swasta selalu dilibatkan dalam kegiatan PNPM, organisasi masyarakat dilibatkan dalam kegiatan PNPM, melakukan pelatihan kewirausahaan, memberikan motivasi kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, melakukan sharing dan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas masalah kegiatan PNPM, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial serta memberikan pelayanan dalam pengelolaan dana.

Deskripsi variabel Pengentasan Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian adalah kondisi yang tidak berkecukupan secara ekonomi, khususnya dengan kebutuhan

konsumsi dasar seperti sandang, papan dan pangan di Kota Makassar. Dari jawaban responden yang mendominasi dengan jawaban sangat sering yang ditunjukkan pada saat melakukan program kewirausahaan, penyaluran dana yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, pembimbingan masyarakat dalam pengelolaan dana, pengembangan wawasan masyarakat, pengembangan wawasan masyarakat, pengembangan rasa percaya diri masyarakat, bimbingan masyarakat dalam menyusun tujuan hidup yang lebih baik, pemberian motivasi kepada masyarakat, memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam kemampuan manajerial, pengambilan keputusan, bekerja sama dengan orang lain, mendukung pengentasan kemiskinan, melakukan pelatihan kewirausahaan, membantu masyarakat dalam memasarkan hasil kerjanya.

Secara umum model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, maka dapat dikaji lebih lanjut dengan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh strategi dasar dan strategi operasional terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

Tabel 3. Pengujian Hipotesis dan Nilai Persamaan Regresi Berganda

HIP	Variabel Independen	Variabel Dependen	Direct Effect			Keterangan
			Standardize	t-hitung	p-value	
H ₁	Strategi Dasar (X ₁)	Pengentasan Kemiskinan (Y)	0.021	0.332	0.741	Tidak signifikan
H ₂	Strategi Operasional (X ₂)	Pengentasan Kemiskinan (Y)	0.934	14.565	0.000	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data 2017

Hasil *estimasi standardized regression* yang disamakan dengan uji t pada analisis regresi linier berganda pada Tabel 3 menunjukkan terdapat model pengaruh langsung (*direct effects*) yang dihasilkan dari analisis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi dasar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.
- b. Strategi operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

Pengaruh Strategi Dasar terhadap Pengentasan Kemiskinan

Strategi dasar dalam penelitian ini diukur dengan tiga dimensi utama yaitu pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan sinergitas. Berdasarkan analisis berdasarkan analisis data regresi liner berganda dengan bantuan program SPSS 22.0 terhadap pengentasan kemiskinan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa strategi dasar tidak mempunyai pengaruh terhadap program pengentasan kemiskinan. Artinya bahwa perbaikan strategi dasar tidak akan membuat nilai dalam mengentaskan kemiskinan menjadi lebih baik. Namun bukan berarti bahwa strategi dasar dapat diabaikan karena strategi dasar merupakan salah satu bagian umum dari strategi PNPM Mandiri Perkotaan.

Fakta lain yang dilihat dari hasil analisis terhadap isi empat dokumen perencanaan kunci (RPJMD, SPKD, RT, RW, dan RP4D) di kedua kota menunjukkan bahwa meski sudah ada perhatian terhadap isu kemiskinan, penggunaan data dan informasi tentang kemiskinan berbasis spasial, seperti sebaran penduduk miskin dan lokasi permukiman kumuh, di dalam dokumen-dokumen tersebut masih terbatas. Begitu pula dengan penggunaan data tersebut untuk perencanaan dan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dokumen perencanaan dan panduan pelaksanaan program juga belum secara jelas menyebutkan target pengurangan angka dan kondisi kemiskinan. Intervensi terhadap permasalahan seperti daerah kumuh juga masih dilakukan dengan pendekatan programatis, misalnya perbaikan rumah, dan belum secara signifikan menyentuh skala perencanaan di tingkat permukiman yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, konteks spasial kemiskinan juga berimplikasi terhadap perencanaan tata ruang dan wilayah. Implikasi rencana induk perkotaan terhadap penghidupan masyarakat, khususnya kelompok miskin, sangat besar. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada berkurangnya efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi juga dapat menimbulkan bentuk kemiskinan dan kerentanan baru atau memperparah kondisi kemiskinan yang sudah ada. Sebagai contoh, rencana pembangunan kawasan pelabuhan dan pergudangan di pesisir Kota Makassar belum mempertimbangkan kondisi penghidupan masyarakat miskin di wilayah tersebut yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh nelayan. Dengan pembangunan kawasan tersebut di masa mendatang, kelompok ini akan menghadapi kerentanan baru terkait dengan perubahan kondisi spasial. Akibatnya, mereka bisa bertambah miskin karena kehilangan sumber mata pencaharian,

sementara transisi ke kegiatan perekonomian perkotaan lainnya belum terjadi dengan sepenuhnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa strategi dasar yang diukur dengan tiga dimensi yaitu pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan sinergitas tidak berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Tidak adanya pengaruh strategi dasar terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar disebabkan karena berkurangnya efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan di Perkotaan. Selain itu Strategi dasar merupakan strategi umum yang memerlukan kebijakan yang berkelanjutan dalam melakukan penerapannya.

Pengaruh Strategi Operasional terhadap Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 22.0 diperoleh hasil pengaruh strategi operasional terhadap program Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa strategi operasional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Jadi, peningkatan nilai strategi operasional akan mengakibatkan peningkatan nilai dari Program Pengentasan Kemiskinan. Peningkatan nilai strategi operasional dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan mengembangkan potensi wirausaha masyarakat.

Selain itu juga penyediaan dana bagi masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Tak ketinggalan adalah penyediaan sarana dan prasarana fisik, sosial, ekonomi secara padat karya. Membangun paradigma sangat penting dalam merumuskan sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Jika salah dalam membangun paradigma, maka penerapannya di lapangan akan tidak tepat juga. Dengan demikian, maka program pun menjadi tidak berarti meski berganti-ganti konsep dan orientasi dalam rentang waktu bertahun-tahun.

Sementara di sisi lain, dalam beberapa programnya, pemerintah menuntut dikembangkannya kebijakan ekonomi kerakyatan dalam bentuk UMKM dan sebagainya, meski pemerintah juga turut memperlancar pendirian *mall-mall* dan industrialisasi perkotaan yang justru semakin meminggirkan pasar-pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat.

Seperti misalnya, isu-isu pembangunan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat marginal, kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, yang kesemuanya itu terkesan *lip service*, begitu jadi pemimpin, semua program tidak berjalan. Sehingga wajar saja, jika tiap pergantian kepemimpinan, program-program penanggulangan kemiskinan senantiasa berganti-ganti nama meski konsepnya sama. Dan jumlah orang miskinpun tetap saja tidak berubah dari tahun ke tahun. Bahkan, banyak program yang berhenti di tengah jalan. Contoh misalnya, program P2KP dan PPK yang diganti dengan PNPM Mandiri, kemudian program P4K yang ‘terkatung-katung’ karena sumber daya PPL yang tidak terpenuhi (akibat kehabisan dana) sehingga pendampingan petani-nelayan tidak berjalan maksimal, program OPK yang berganti nama lagi pada tahun 2001 menjadi kebijakan Raskin.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi liner berganda dengan bantuan SPSS diperoleh hasil pengaruh strategi operasional terhadap pengentasan kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi operasional memunyai pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan. Jadi, peningkatan nilai strategi operasional dapat meningkatkan nilai pengentasan kemiskinan di Kota Makassar tetapi bukan berarti strategi operasional dapat diabaikan karena strategi operasional merupakan faktor yang penting dalam melakukan aplikasi program PNPM Mandiri Perkotaan.

Variabel strategi operasional berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan Kota Makassar disebabkan karena sebagian besar anggaran program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makassar berfokus pada program lingkungan kemudian disusul oleh program sosial dan terakhir adalah program ekonomi. Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Kota Makassar dari tahun 2011 sampai tahun 2014 sebagai berikut.

Tabel 4. Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Kota Makassar

No	Tahun	Kegiatan						Jumlah (Rp)
		Lingkungan (Rp)	%	Sosial (Rp)	%	Ekonomi (Rp)	%	
1	2011	8.999.300.000	79,50	1.544.130.700	13,64	776.300.000	6,86	11.319.730.700
2	2012	17.330.283.200	70,57	5.037.386.800	20,51	2.190.000.000	8,92	24.557.670.000
3	2013	9.441.989.900	78,20	1.914.850.100	15,86	717.000.000	5,94	12.073.840.000
4	2014	9.974.084.500	77,58	2.350.762.500	18,28	526.250.000	4,09	12.857.097.000
Total		45.745.657.600	75,24	10.847.130.100	17,84	4.209.550.000	6,92	60.802.337.700

Sumber: PNPM Mandiri Perkotaan Kota Makassar, 2017 (diolah)

Dari tabel 4, alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makassar lebih besar pada program lingkungan yaitu program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makassar yang membantu dalam perbaikan fisik seperti jalan, saluran Air, dan lain-lain. Anggaran untuk program lingkungan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 rata-rata di atas 70% dari total alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makassar. Total dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan selama empat tahun terakhir sebesar Rp 60.802.337.700,- sebanyak 75,24% di alokasikan untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik jalan dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari tetapi kurang membantu dalam peningkatan kesejahteraan. Pembangunan fisik akan berdampak secara tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pemampuan sumber daya manusia.

Perbaikan jalan akan berdampak lebih baik terhadap pengentasan kemiskinan jika didukung oleh program peningkatan ekonomi masyarakat. Alokasi dana untuk program ekonomi seperti bantuan dana bergulir untuk kelompok usaha masyarakat sangat kecil dari program yang lain. Selama empat tahun terakhir alokasi dana untuk program ekonomi sebesar 6,92% dari total alokasi dana sebesar 60.802.337.700,-. Kecilnya anggaran untuk program ekonomi membuat kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makassar tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Peningkatan anggaran untuk program ekonomi diharapkan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan melakukan alokasi dana yang proporsional atau sebanding dengan alokasi dana pada program lingkungan. Alokasi dan untuk program lingkungan harus diikuti dengan alokasi dana untuk program ekonomi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Strategi dasar mempunyai pengaruh terhadap program pengentasan kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan di Perkotaan. Selain itu Strategi dasar merupakan strategi umum yang memerlukan kebijakan yang berkelanjutan dalam melakukan penerapannya. Hal ini terlihat dengan adanya program pelatihan yang diberikan tidak diikuti dengan pelatihan operasional. Strategi operasional mempunyai pengaruh terhadap pengentasan

kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makassar didominasi oleh program lingkungan yang berfokus pada pembangunan fisik sedangkan anggaran untuk program ekonomi lebih kecil dari program lainnya.

Penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai strategi dalam peningkatan semangat dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Kota Makassar. Strategi dalam melakukan pengurangan kemiskinan di Kota Makassar dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan pada nilai perbaikan penerapan strategi dasar PNPM Mandiri Perkotaan. Peningkatan nilai strategi dasar PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilakukan dengan cara PNPM bermitra dengan masyarakat di luar kelurahan, PNPM bermitra dengan lembaga social non bank, dan Masyarakat dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan wirausaha oleh PNPM.

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo. 1996. Kemiskinan dan Startegi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Libertry.Indonesia.
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial. 2002. Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. Biro Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Dillon, HS. 2001. Pertanian Membangun Bangsa. Jakarta : Sinar Harapan
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Martanto Ucuk. 2007. Kemiskinan di Indonesia – Potret Buram Desentralisasi. Jurnal Politik Kesejahteraan. Edisi 3 Tahun ke 3 (2007). Hal 45-57.
- Mubyarto. 2005. *A Development Manifesto*. Jakarta : Kompas Book Publishing
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Remi, Sumitro Sutyasti dkk. 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ridlo, Mohammad Agung. 2001. Kemiskinan di Perkotaan. Semarang: Penerbit Unissula Press.
- Rusli, Said (ed). 1995. Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin Suatu Tinjauan dan Alternatif. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.

- Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model jaminan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Wahyono, Teguh. 2004. Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisis, Desain dan Impelemntasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- <https://ardaninggar.wordpress.com/2009/06/23/evaluasi-implementasi-program-program-penanggulangan-kemiskinan-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-era-otonomi-daerah/>

**BUDAYA KERJA, MOTIVASI DAN PENINGKATAN
QUALITY OF WORK LIFE (QWL) DALAM MEMPENGARUHI
KINERJA PENGRAJIN PADA INDUSTRI KECIL
KLASTER LURIK DI KABUPATEN KLATEN**

Rismawati

Surel: rismawokeh@gmail.com

Universitas Fajar Makassar, Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No.101

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kinerja, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin serta untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan quality of work life (QWL) terhadap kinerja para pengrajin klaster lurik di Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengrajin pada daerah Industri Kecil di Kabupaten Klaten yang berjumlah 665 orang. Dalam penentuan sampel menggunakan metode Multi-Stage Cluster Sampling yaitu dengan cara menarik sampel dari area yang ada dan dipilih secara progresif lebih kecil atau lebih besar dari area tersebut. Setelah itu kemudian dihitung menggunakan Random Sampling dengan menggunakan Rumus Slovin. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 responden. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa budaya kerja memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengrajin, motivasi kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengrajin dan kualitas kehidupan kerja mampu memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pengrajin.

Kata kunci: *Budaya kerja, Motivasi kerja, Kualitas kehidupan kerja dan kinerja*

Latar belakang

Pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan sejarah masa lalu, namun berkaitan pula dengan upaya pembangunan masa depan yang mengutamakan kesinambungan berbagai potensi masa lalu dengan berbagai macam proses seleksi, perubahan dan adaptasi yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Di Indonesia, konsep pelestarian sebenarnya berkaitan erat dengan obyek kebudayaan sebagai salah satu kekayaan dan identitas bangsa yang telah melewati berbagai perkembangan zaman hingga saat ini. Salah satu obyek kebudayaan yang perlu dilestarikan adalah kain lurik.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang memajukan perekonomiannya melalui Usaha Kecil Menengah (UKM), dimana salah satunya adalah usaha dalam bidang tekstil, yaitu kain tenun lurik. Ciri pembuatan tenun lurik di wilayah ini adalah kain tenun lurik yang dibuat dengan menggunakan alat tradisional atau yang sering disebut dengan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Para pengrajin tenun lurik di Kabupaten Klaten mayoritas adalah kaum perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan cenderung lebih sabar, telaten dan teliti, sehingga cocok melakukan pekerjaan menenun kain lurik yang identik dengan kesabaran, ketelatenan dan ketelitian.

Perbedaan antara perempuan yang tinggal di kabupaten dan di desa. Perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung bekerja pada bidang formal. Sementara kebanyakan perempuan di pedesaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan di daerah kabupaten, sehingga perempuan pedesaan cenderung terlibat pada bidang informal. Pengrajin harus berinovasi dan berlomba-lomba membuat produk lurik ATBM yang variatif dengan kualitas bagus dan jika memungkinkan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Kabupaten Klaten juga merupakan salah satu daerah yang telah mengembangkan lurik dengan sentranya tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Cawas, Bayat, Pedan, Trucuk dan Juwiring.

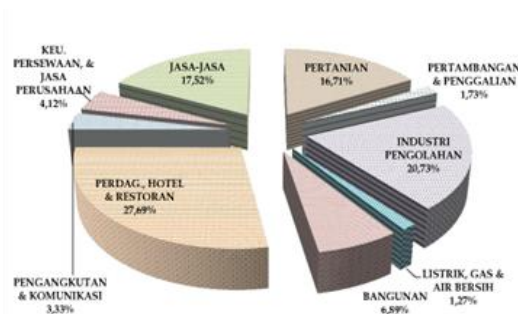
Dapat dikatakan UKM dapat dijadikan sebagai salah satu pekerjaan yang mampu menyerap perempuan pedesaan untuk bekerja demi menambah penghasilan keluarga. Salah satu UKM Kabupaten Klaten yang banyak menyerap tenaga kerja wanita sendiri adalah UKM yang bergerak pada bidang pembuatan kain tenun lurik. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai perusahaan milik perseorangan WNI dengan kekayaan bersih maksimum sepuluh milyar rupiah dan penjualan tahunan maksimum lima puluh milyar rupiah. Dengan definisi tersebut, UMKM merupakan 99.9% dari total seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Data yang lebih lengkap dapat dilihat di Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Jumlah Unit Usaha di Indonesia

Tahun	2009		2010		2011		2012		2013		
	Satuan	Unit	Persen	Unit	Persen	Unit	Persen	Unit	Persen	Unit	Persen
Jumlah Usaha Mikro		45,217,567	96.16%	48,512,438	98.95%	49,608,953	98.92%	5,084,771	90.02%	52,176,795	98.88%
Jumlah Usaha Kecil		1,694,008	3.60%	472,602	0.96%	498,565	0.99%	522,124	9.24%	546,675	1.04%
Jumlah Usaha Menengah		105,481	0.22%	36,763	0.07%	38,282	0.08%	36,717	0.65%	41,133	0.08%
Jumlah Usaha Besar		5,022	0.01%	4,577	0.01%	4,463	0.01%	4,650	0.08%	4,677	0.01%
Total Unit Usaha		47,022,078	100.00%	49,026,380	100.00%	50,150,263	100.00%	5,648,262	100.00%	52,769,280	100.00%

Sumber: Kementerian KUKM 2015

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja usaha mikro yang signifikan setiap tahunnya di tahun 2013 mencapai 90.012.694 atau sebesar 85.83%. Sedangkan dari tabel diatas berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja usaha kecil setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2009 jumlah tenaga kerja usaha kecil 9.204.768 dan di tahun 2010 turun menjadi 3.139.711 terjadi penurunan sebesar 6.51%. Namun pada tahun 2013 naik menjadi 3.521.073 atau naik sekitar 0.07% dari tahun 2010.

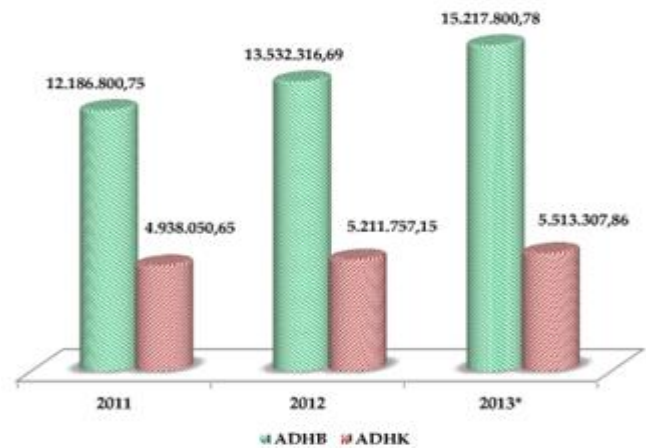


Sumber: Laporan akhir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten 2015

Gambar 1. Diagram Struktur Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2013

Selama tahun 2013, kondisi perekonomian di Kabupaten Klaten cenderung menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dikarenakan, pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi hampir seluruh sektor menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Namun, terdapat pula beberapa sektor yang mengalami penurunan, seperti sektor pertanian dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Grafik

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2011 hingga 2013 pada beberapa sektor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2011-2013

Nilai yang dihasilkan dari semua jenis produk unggulan ini diharapkan dapat selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Klaten.

Tabel 2. Rekapitulasi Produk Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2013

No	Produk Unggulan	Nilai (Rp)
1	Industri Logam	2.442.027.000
2	Industri Mebel	2.412.826.500
3	Konveksi	2.022.343.200
4	Industri Tembakau	1.045.192.500
5	Industri Pande Besi	1.004.404.500
6	ATBM/Lurik	1.261.029.000
7	Batik	1.284.154.560
8	Keramik	1.365.393.750

Sumber: Laporan akhir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten 2015

Dari data tersebut di atas klaster lurik dengan menggunakan alat tradisional merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Klaten. Namun dalam perkembangannya sedikit tersaingi dengan adanya industri tenun dengan menggunakan mesin, yang mana merusak pasar produk lurik tradisional. Tidak semua produk tradisional mampu menghasilkan puluhan lembar produk kain lurik dalam sehari dibandingkan dengan hasil dengan menggunakan mesin, hal ini merupakan alasan utama mengapa industri lurik tradisional tidak mampu bersaing dengan industri lurik menggunakan mesin. Persaingan tidak hanya dari segi kuantitas namun harga karena kain lurik dengan

menggunakan mesin di jual dengan harga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan lurik tradisional, walaupun jika dilihat dari segi kualitas sangat berbeda dengan kain lurik tradisional. Terkadang pasar pun memilih kain lurik ATM dibandingkan dengan lurik ATBM dengan alasan lebih nyaman dipakai dan lebih halus dipakai.

Pada Tahun 2015, di kawasan industri klaster lurik mendapat kunjungan dari Menteri Perekonomian justru yang diarahkan ke industri pembuatan kain lurik dengan menggunakan mesin, dan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usahanya, hal ini berarti industri lurik yang tradisional semakin terpuruk. Salah satu camat di kecamatan cawas memberikan penjelasan bahwa dengan mengarahkan modal usaha ke para pengusaha tenun lurik ATM maka semakin menurunkan semangat kerja para pengrajin tradisional serta semakin tergerusnya usaha kecil tenun lurik yang tradisional. Sangat disayangkan hal tersebut terjadi, perkembangan pengrajin lurik tradisional seperti mati suri, tetap berjalan dan menghasilkan sebuah hasil namun dalam perkembangannya hanya monoton seperti itu saja.

Dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya, pada saat terjadi bencana alam di Kabupaten Klaten semua alat tenun tradisional hamper semua mengalami kerusakan, dan tidak berjalan perekonomiannya di kecamatan penghasil tenun lurik. Salah satu warga di Kecamatan Bayat dimana hamper penduduk kampung tersebut mata pencahariannya adalah pengrajin tenun klaster lurik, memberanikan diri untuk memberikan saran bagaimana agar perekonomian di Kecamatan Bayat dapat berjalan pulih pasca bencana 2006 pada saat itu. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Bupati Klaten No.065/77/2010 yang mewajibkan PNS untuk mengenakan seragam lurik dua hari dalam sepekan diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat. Berdasarkan surat tersebut dapat pula meningkatkan penghasilan para pengrajin lurik, keberlangsungan lurik dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) dapat lestari, dan memberikan peluang usaha bagi para penjahit, konveksi, dan garmen untuk memproduksi pakaian-pakaian berbahan dasar tenun lurik.

Gambar 2.



Gambar 3.



Sesuai dengan kodratnya, kebutuhan manusia sangat beraneka ragam, baik jenis maupun tingkatannya. Bahkan, manusia memiliki kebutuhan yang cenderung tak terbatas, artinya selalu bertambah dari waktu ke waktu dan selalu berusaha segala kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia diartikan sebagai segala sesuatu yang ingin dimilikinya, dicapai dan dinikmati. Untuk itu manusia terdorong untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan kerja. Meskipun tidak semua aktivitas dikatakan kerja, Rivai (2009:857).

Salah satu model teori yang berdasarkan kepuasan kerja, yaitu teori yang dikemukakan oleh Edward Lawler yang dikenal dengan "*Equaty Model Theory*" atau teori kesetaraan. Menciptakan kepuasan pekerja adalah tidak mudah karena kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang mempengaruhinya antara lain budaya kerja dan kualitas kehidupan kerja pada industri kecil dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua pekerja di dalam suatu lingkungan kerja.

Fenomena yang dapat dilihat dari lingkungan pengrajin di Kabupaten Klaten mengenai tingkat kepuasan para pengrajin semakin menurun, dari hasil wawancara pada dengan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Cawas yang merupakan salah satu daerah percontohan untuk para pengrajin lurik yang mendirikan suatu organisasi yang mewadahi pengrajin lurik yaitu CLC (Cawas Lurik Center) mengemukakan bahwa adanya penurunan tingkat kepuasan pengrajin disebabkan karena pendapatan dari penjualan kain lurik ini mencapai sekitar 10 sampai 20 juta rupiah, namun saat ini terjadi kelesuan, dengan omzet per hari kurang dari 500 ribu rupiah per outlet pengrajin kain lurik.

Membahas masalah budaya itu sendiri merupakan hal yang esensial, karena akan selalu berhubungan dengan kehidupan. Budaya kerja merupakan kebiasaan dalam

mengembangkan etos kerja yang sesuai dengan ciri khas/karakteristik yang dimiliki. Budaya kerja menurut Becker (2004:79) pada intinya akan membentuk moral kerja yang baik untuk peningkatan kinerja yang teraktualisasikan dengan baik oleh para pengrajin dalam menjalankan aktivitasnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan para pegarjin sangat menjunjung tinggi adat istiadat juga tata karma dalam beraktivitas. Misalnya pengrajin A mempunyai keperluan keluarga sedangkan pengrajin B sudah menyelesaikan pekerjaannya akhirnya pengrajin A menitip pekerjaan kepada pengrajin B dengan konsekuensi upah kerja pengrajin A diberikan kepada pengrajin B. intinya pekerjaannya tidak tertinggal karena mereka ditargetkan dalam sehari harus mampu menyelesaikan 10-12 meter per hari. Dari contoh tersebut dapat dikatakan sikap toleransi dan adat istiadat yang kental saling menghargai.

Kualitas kehidupan kerja merupakan filosofi dalam memperbaiki kualitas sumberdaya manusianya. Kualitas kehidupan kerja (*Quality of Work Life* - QWL) mengacu kepada lingkungan pekerjaan terkait dengan keperluan pribadi dan nilai pengrajin tersebut. Kualitas kehidupan kerja dan kinerja merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas kehidupan kerja dapat terwujud apabila pengrajin mencapai tahan efektivitas kerjanya. Terdapat 4 dimensi yang dijelaskan dalam kualitas kehidupan kerja yang diharapkan mampu memberi peningkatan dalam kinerja pengrajin itu sendiri, antara lain yaitu partisipasi dalam memecahkan masalah, sistem imbalan yang inovatif, perbaikan lingkungan kerja dan rekonstruksi kerja.

Dalam wawancara yang telah dilakukan kepada para pengrajin, dalam sehari mereka harus menyelesaikan 10-15 meter dengan upah kerja Rp. 3.500,-/meter. Jika dihitung penghasilan mereka Rp. 35.000,- s/d Rp. 40.000,- pengrajin belum dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Belum adanya jaminan kerja, pemilik usahapun menerapkan sistem kekeluargaan, sebagai contoh apabila terdapat pengrajin yang sakit pemilik usaha serta rekan pengrajin bersama menjenguk dan memberikan alakadarnya. Dari hal yang terjadi tersebut diatas dapat dilihat bahwa masih rendah kualitas kehidupan kerja di kawasan industri lurik ini. Terdapat 3 indikator dalam pengukuran kualitas kehidupan kerja oleh Wayne (1992) antara lain sistem imbalan yang inovatif, sistem imbalan yang sesuai dan fasilitas yang memadai dalam bekerja.

Potensi kain tenun lurik Kabupaten Klaten merupakan hasil produksi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Pengrajin harus berinovasi dan berlomba-lomba membuat produk lurik ATBM yang variatif dengan kualitas bagus dan jika memungkinkan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Pengembangan produk unggulan lurik tersebut tidak lepas dari potensi dan karakteristik lurik di masing-masing daerah tersebut. Kabupaten Klaten juga merupakan salah satu daerah yang telah mengembangkan lurik dengan sentranya tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Cawas, Bayat, Pedan, Trucuk dan Juwiring.

Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti ingin mengembangkan penelitian yang lebih konstruktif dan representatif, serta fenomena yang menarik mengenai budaya kerja, motivasi kerja, kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Sehingga dapat ditarik permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut: apakah budaya kerja mampu meningkatkan kinerja pengrajin lurik, apakah motivasi kerja mampu meningkatkan kinerja pengrajin lurik dan apakah kualitas kehidupan kerja mampu meningkatkan kinerja pengrajin lurik di Kabupaten Klaten.

Kajian Pustaka

Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Usaha Mikro merupakan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan,

perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum, di mana manajemen umum sebagai proses meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Teori manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Beer dan McKenna (2004) dikenal dengan teori asset. Teori ini menjelaskan bahwa setiap karyawan dinilai memiliki asset bagi suatu organisasi, yang saling mempengaruhi untuk menghasilkan kinerja. Teori kemauan yang baik (*goodwill*) yang dikemukakan oleh Walton (2004) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan referensi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kepentingan dalam menghasilkan hasil kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada prinsipnya, manajemen sumber daya manusia adalah mengembangkan dan mengolah potensi sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah meningkatkan motivasi kerja dan budaya kerja dengan melaksanakan nilai juang, etos kerja, ciri khas dan norma yang berlaku (Flippo, 2003:41).

Kinerja merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pengrajin kluster lurik dalam industry kecil yang menghasilkan *output* berdasarkan pengembangan kerja yang terarah, terorganisir dan berkesinambungan untuk mencapai substansi kerja. Menurut Rivai (2004) Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Lain hal pendapat dari Notoatmodjo (1992:147), kinerja adalah hasil kerja actual yang dilakukan oleh karyawan sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan apa yang telah digariskan untuk mencapai tujuan organisasi.

Namun demikian untuk mengetahui bahwa kinerja pengrajin lurik ini telah menghasilkan suatu tujuan, adanya standar kinerja adalah suatu yang penting untuk menetapkan standar sebelum pekerjaan itu dilakukan sehingga semua pengrajin lurik yang telah terlibat akan memahami tingkat kinerja yang diharapkan dalam organisasi. Dengan demikian, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (aspek kuantitas, kualitas, efisiensi kerja dan efektivitas kerja).

Dengan demikian, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (aspek kuantitas, kualitas, efisiensi kerja dan efektivitas kerja).

Budaya kerja merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup. Menurut Biech dalam Triguno (2004:31) menyebutkan bahwa nilai-nilai, perilaku, dan falsafah yang dianut setiap orang mempunyai arti proses yang panjang yang terus menerus disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan SDM itu sendiri sesuai dengan prinsip pedoman yang diakui.

Suatu budaya kerja dalam mencapai tujuan organisasi, didukung oleh adanya pemahaman dari setiap unsur atau komponen-komponen dalam suatu organisasi, khususnya sumberdaya manusia/karyawan yang berkaitan dengan nilai juang, etos kerja, ciri khas dan norma yang diterapkan suatu organisasi menurut Norman (2002). Berdasarkan uraian diatas, dipahami bahwa budaya kerja merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi pegangan para pengrajin klaster lurik dalam menjalankan kewajibannya dan juga perilaku di dalam lingkungan kerjanya.

Salah satu ciri masyarakat modern adalah keterbatasan waktu sehingga setiap manusia pada dirinya pada dasarnya perlu memiliki motivasi. Dengan demikian, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang specific sesuai dengan tujuan individu.

Teori yang mendukung dan memiliki relevansinya dengan penelitian ini adalah motivasi dari Maslow (Gibson et al.,1997:66). Teori ini mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi lima kategori dalam urutan menarik secara berurutan sampai kebutuhan yang paling mendasar cukup dipenuhi, seseorang tidak akan mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Herarki kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Quality of Work Life merupakan pendekatan manajemen yang terus menerus diarahkan pada peningkatan kualitas kerja. *Quality of Work Life* mencakup aktifitas-aktifitas yang ada di dalam industry kecil, yang diarahkan untuk meningkatkan suatu kondisi kehidupan kerja yang dapat membangkitkan semangat para pengrajinnya dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran industry tersebut.

Menurut Harvey & Brown, 1992 menyatakan bahwa *Quality of Work Life* mencoba untuk memperbaiki kualitas kehidupan para pekerja, tidak dibatasi pada perubahan konteks suatu pekerjaan tapi juga termasuk memmanusiakan lingkungan kerja untuk memperbaiki martabat dan harga diri pekerja. *Quality of Work Life* menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang memmanusiakan manusia, sehingga manusia lebih dilihat pada harkat dan martabat kemanusiaannya, bukan hanya sebagai alat, inilah yang merupakan peran penting dalam penciptaan *Quality of Work Life*.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari hipotesis sampai dengan analisa akhir. Penelitian ini menggunakan hubungan kausalitas (*explanatory research*) (Ghazali,2004). Jenis data terdiri dari data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, sedangkan yang kedua data kualitatif yaitu data yang tidak data dijelaskan dalam bentuk angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penejelasan mengenai data primer adalah data yang diolah dan dikumpulkan secara langsung merupakan informasi yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden. Sedangkan data sekunder bersmber dari dokumen-dokumen seperti jumlah pengrajin klaster lurik, keberadaan industri kecil tersebut., berapa banyak yang dihasilkan dalam sehari, dll.

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data perlu dilakukan secara behati-hati dan cermat, sehingga dan diuji suatu kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut Sugiyono (2008:63) terdapat 4 macam teknik pengumpulan data: Pengamatan(Observasi), wawancara, metode kuesioner dan dokumentasi. Populasi merupakan generalisasi responden dalam suatu wilayah industri kecil yang berada di Kabupaten Klaten. Menurut (Sumarsono, 2005) populasi merupakan kumpulan dari seluruh elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu riset. Dalam penelitian ini seluruh pengrajin di daeraj industri kecil di Kabupaten Klaten berjumlah 665 orang. Maka dari itu menggunakan metode Multi-Stage Cluster Sampling yaitu menarik sampel dari area dan dipilih secara progresif lebih kecil atau lebih besar dan dihitung dengan menggunakan Random Sampling menggunakan rumus Slovin.

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik *Statified Proporsional Random Sampling* dengan penentuan sampel berdasarkan rumus slovin (Umar, 1999: 78), adapun rumus yang akan digunakan untuk menentukan besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(1 + (N)(e)^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

e = Tingkat Kepercayaan (10 % = 0,1)

Jadi besar sampel:

$$N = \frac{665}{1+(665)(0,1)^2}$$

$$N = 87$$

Selanjutnya penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel secara teknik probability sampling yaitu dengan teknik Stratified Random Sampling atau juga disebut Pengambilan sampel secara acak distratifikasi. Stratified Random Sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan atas kelompok-kelompok subjek dan antara satu kelompok dengan kelompok lain tampak adanya strata atau tingkatan.

Tabel 3. Jumlah Sampel Penelitian secara Proporsional

No.	Kecamatan	Jumlah Populasi Industri Kecil Pengrajin	Jumlah Sampel Industri Kecil Pengrajin
1.	Kecamatan Cawas	256	34
2.	Kecamatan Bayat	290	38
3.	Kecamatan Pedan	57	7
4.	Kecamatan Trucuk	39	5
5.	Kecamatan Juwiring	23	3
Jumlah		665	87

Sumber: Laporan akhir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten 2017

Alasan menggunakan teknik stratified random sampling adalah karena populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

Selain itu untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data melalui kuesioner.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan program SPSS dengan rumus

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \varepsilon$$

dengan :

Y = Kinerja

x₁ = Budaya Kerja

x₂ = Motivasi

x₃ = Kualitas Kehidupan Kerja

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi (parameter) yang diestimasi

ε = Error term

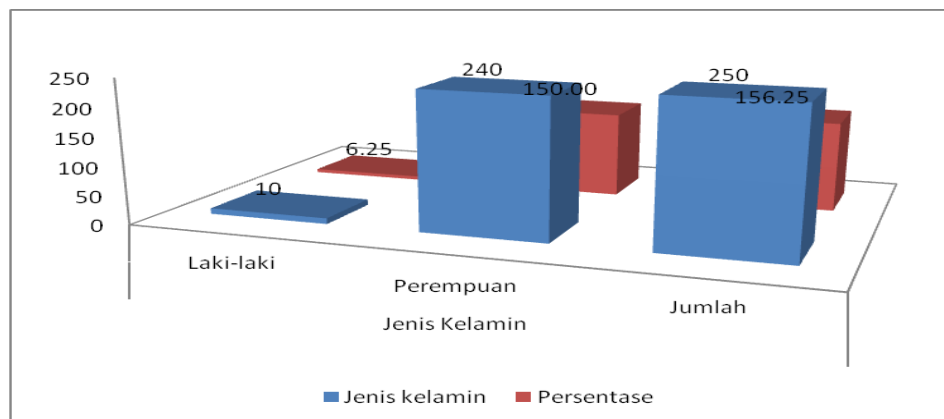
Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri digunakan uji-F, uji-t dan koefisien determinasi (R²) dan secara parsial (r²).

Hasil dan Pembahasan

Responden dalam penelitian ini sebanyak 87 orang pengrajin kluster lurik ATBM yang berada di Kabupaten Klaten yang representative untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden dalam memberikan informasi mengenai identitas diri mulai dari jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan dan masa kerja. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

Jenis Kelamin

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar chart dibawah ini :



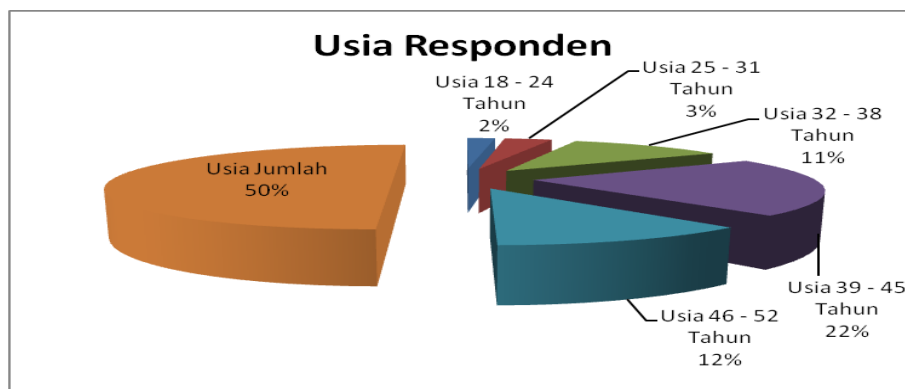
Sumber: data yang telah diolah 2017

Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pengrajin tenun lurik di Kabupaten Klaten mayoritas adalah kaum perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan cenderung lebih sabar, lembut dan teliti, sehingga cocok melakukan pekerjaan menenun kain lurik yang identik dengan kesabaran, ketelatenan dan kelembutan selain itu pengrajin perempuan memilih bekerja paruh waktu dikarenakan mereka sebagian besar ibu rumah tangga.

Usia

Dalam konteks usia semakin baik kesehatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat maka semakin panjang usia yang dimiliki seseorang, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah pemahaman tentang kesehatan maka semakin pendek usia seseorang. Usia pengrajin klaster lurik di Kabupaten Klaten Jawa Tengah dijadikan responden dari penelitian. Untuk lebih jelasnya usia responden ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Sumber: data yang telah diolah 2017

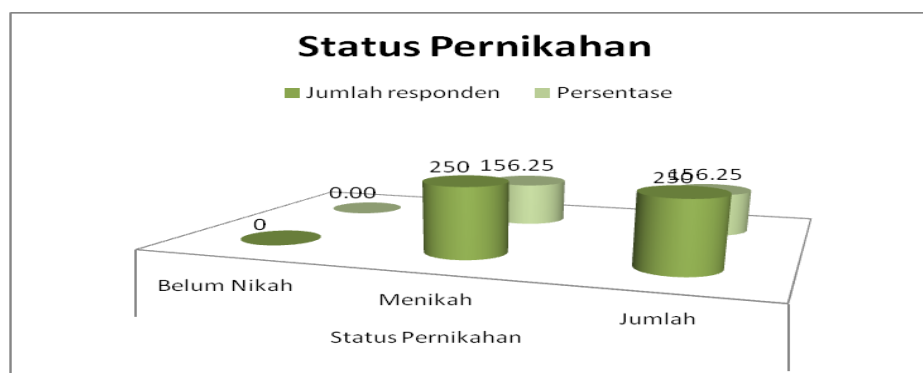
Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Maka dapat dilihat usia responden 39 – 45 tahun yang mendominasi usia pengrajin dan cukup dewasa dalam bersikap dan bertindak. Alasan lain mengenai faktor usia terdapat usia yang sudah tidak produktif yang masih berantusias dalam bekerja hal ini karena mereka mempunyai perasaan nyaman dalam bekerja dan juga terdapat ikatan batin

yang baik sehingga apapun yang terjadi mereka tetap mempertahankan walaupun gajinya sedikit walaupun tidak utama dia bekerja tapi utamanya dia mendapat kesenangan dan *enjoy* dalam bekerja dan hubungan dengan yang pemilik usaha juga terjalin dengan baik.

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Faktor individual yang dimaksud adalah kesediaan para pengrajin untuk menerima dan melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada masing-masing pengrajin untuk menyelesaikan pekerjaannya.



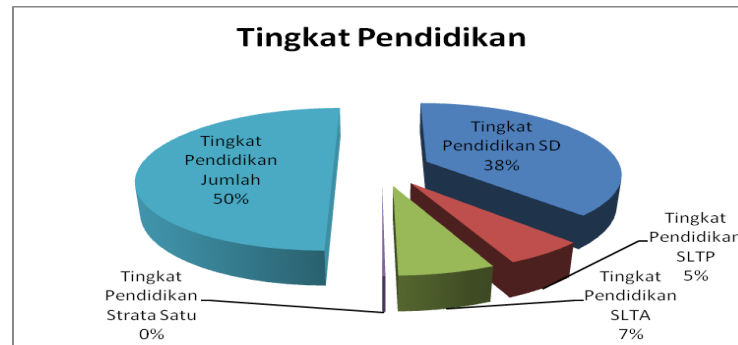
Sumber: data yang telah diolah 2017

Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Pengrajin ATBM memang didominasi oleh perempuan yang sudah menikah khususnya kaum ibu-ibu, mereka mempunyai semangat juga motivasi tersendiri untuk dapat tetap bekerja prinsip mereka bahwa yang terpenting adanya kesibukan walaupun dengan upah kerja sangat minim dan belum dapat membantu mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang ditamati oleh responden sesuai dengan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang ditekuni dan diakui oleh pemerintah atas tamatan pendidikan yang dimilikinya. Jelasnya dapat dilihat dari gambar sebagai berikut ini:



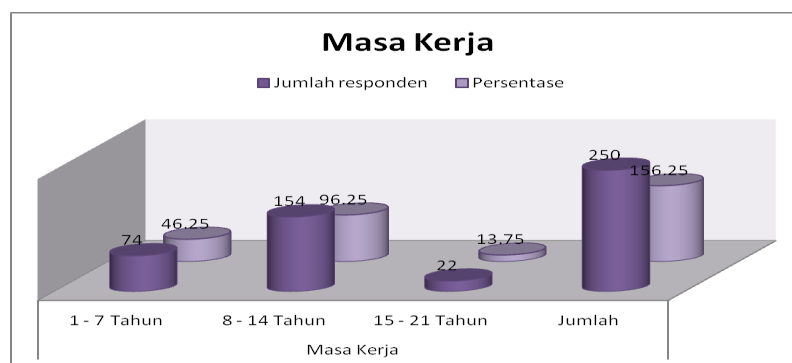
Sumber: data yang telah diolah 2017

Gambar 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa yang mendominasi tingkat pendidikan para pengrajin dengan pendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 188 responden atau 38% dari total responden. Alasan yang paling mendasar yaitu karena mereka hanya mampu bekerja pada tempat tersebut dengan bekal keterampilan dan keuletan yang mereka miliki sehingga dapat dibina oleh para pemilik usaha pada tempat tersebut. Korelasinya adalah mereka (pengrajin) mampu untuk melaksanakan pekerjaan untuk membuat tenun kain lurik tersebut karena sesuai dengan kemampuan juga keterampilannya.

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja yang pendek dan lama mampu memberikan pengaruh pada *experience* (pengalaman) dari seorang pengrajin. Artinya bahwa mereka yang memiliki masa kerja lama atau *experience* yang matang menginginkan memperoleh pekerjaan dan gaji yang lebih memuaskan.



Sumber: data yang telah diolah 2017

Gambar 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Dapat dilihat bahwa masa kerja di dominasi pada 8 – 14 tahun sebesar 154 responden atau 96.25. Ini menunjukkan bahwa para pemilik usaha kecil khususnya pemilik usaha kluster lurik ATBM juga harus melihat dengan lamanya bekerja merupakan salah satu hal yang mendukung tingkat produktivitas. Rata-rata yang bekerja adalah ibu rumah tangga maka tidak ada target yang harus dicapai, sehingga apabila pengrajin mempunyai kebutuhan yang banyak maka mereka harus bekerja lebih dari biasanya.

Tabel 4. Pengujian Hipotesis dan Nilai Persamaan Regresi Berganda

HIP	Variabel Independen	Variabel Dependen	Direct Effect			Keterangan
			Standardize	t- hitung	p-value	
H ₁	Budaya kerja (X ₁)	Kinerja (Y)	-0.029	-0.210	0.834	Tidak signifikan
H ₂	Motivasi (X ₂)	Kinerja (Y)	0.293	2.228	0.029	Signifikan
H ₃	Kualitas kehidupan kerja (X ₃)	Kinerja (Y)	0.141	1.419	0.160	Tidak signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data 2017

Hasil *estimasi standardized regression* yang disamakan dengan uji t pada analisis regresi liner berganda pada Tabel 4 menunjukkan terdapat model pengaruh langsung (*direct effects*) yang dihasilkan dari analisis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- c. Budaya kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengrajin.
- d. Motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengrajin.
- e. Kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengrajin.

Pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pengrajin

Budaya kerja merupakan suatu kebiasaan yang tercermin dari sikap ataupun tingkah laku seseorang. Budaya Jawa lebih mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kesehariannya. Budaya Jawa khususnya Jawa Tengah masih sangat kental dengan tata krama (unggah-ungguh), lemah lembut dari segi tutur kata dan bahasanya. Saling menghormati dan toleransi juga tenggang rasa yang dijunjung tinggi sangat mempengaruhi karakter dari para pengrajin. Dalam hal bekerja orang Jawa dinilai

sangat giat dalam bekerja dan tidak milih-milih tempat dimana dia harus bekerja. Mereka bersedia bekerja dimana saja asalkan kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pasca penelitian dengan Tokoh masyarakat yaitu Bapak Camat di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten mengenai kuatnya nilai budaya yang tercermin dari sikap dan tingkah laku para pengrajin yang berada di Kecamatan Cawas, : “Yang membuat budaya kerja yang terbentuk oleh pengrajin lebih dominan dibandingkan kinerjanya salah satunya antara lain yaitu Faktor keterikatan kekeluargaan sesama tetangga sangat erat sekali, berpengaruh terhadap hampir semua lini kehidupan masyarakat termasuk bagaimana mereka melakukan pekerjaan diwilayah tetangganya. Budaya yang identik dengan “Ewuh Pakewuh” sangat berpengaruh terhadap tetangga dan lingkungan sekitar. Padahal di wilayah kami pengrajin ATBM rata-rata pekerja diwilayahnya sendiri sebagian besar tetangga dari segi umur bukan yang produktif. Ukuran upah dan sebagainya walaupun ada ukurannya tetapi tidak terlalu dihiraukan. Disini dapat dilihat bahwa kentalnya rasa kebersamaan dan rasa tidak enak ataupun tidak nyaman jika ada tetangga rumah atau tetangga pada lingkungan rumahnya sedang melakukan pekerjaan, sebagai tetangga dengan adanya budaya ewuh pakewuh tadi mereka ikut membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga para pengrajin tenun ini memang dapat dilihat dari beberapa pengrajin yang usianya sudah tidak produktif karena prinsip mereka lebih baik bekerja dari pada menganggur setidaknya ada yang mereka hasilkan dalam waktu sehari walaupun bukan orientasinya pada upah atau imbalan yang mereka terima tetapi cenderung pada kebersamaanya dan kekeluargaannya. Ditambahkan dari hasil wawancara dengan Ibu Camat di Kecamatan Pedan mengenai nilai juang para pengrajin yaitu sebagai berikut Tidak ada target tersendiri untuk nilai juang tersebut namun hanya sesuai dengan perintah dari pemilik usaha. Tidak ada andil dari pengrajin itu sendiri untuk dapat menginovasi bentuk dan model dari pengrajin tersebut. Mereka hanya statis saja mengikuti saja apa yang sudah diperintahkan. Dia tidak mau mendahului perintah dari pemilik usaha tersebut karena adanya keterikatan. Secara batiniyah sudah ada ikatan dengan pekerjaan dan pemilik usaha, hal ini membuat pengrajin merasa puas dengan pekerjaan serta pemilik usahapun cukup puas dengan hasil kerja yang ditunjukkan oleh para pengrajin. Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh budaya kerja yang saling menghormati dan mematuhi tercermin dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengrajin yang patuh

terhadap perintah pemilik usaha tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan, serta pengrajin menjalankan pekerjaannya dengan hasil yang bagus.

Pengaruh Motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin

Motivasi merupakan dorongan seseorang baik individu maupun kelompok dalam bersikap untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Motivasi sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga dapat hasil kerja dapat dicapai. Motivasi pengrajin klaster lurik di Kabupaten Klaten terlihat sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang mereka lakukan. Karena semangat bekerja para pengrajin sangat tinggi selain sebagai pengrajin tenun klaster lurik tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka juga bekerja sebagai buruh sawah, pada saat panen dan tanam padi mereka meminta ijin kepada pemilik usaha untuk pergi ke sawah. Setelah kegiatan mereka selesai merekapun akan kembali melanjutkan aktivitas dengan menenun kembali. Dari kegiatan yang mereka tunjukkan dapat dilihat bahwa semangat bekerja para pengrajin tersebut sangat tinggi walaupun dari segi pemenuhan kebutuhan dikatakan masih jauh dari harapan dan belum dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dapat dilihat bahwa penerapan teori Hierarki Kehidupan yang dikemukakan oleh Maslow dapat disesuaikan dengan keadaan pengrajin. Yang pertama secara fisiologis dalam kebutuhan sehari-hari pengrajin ingin dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. tetapi jaminan yang diharapkan bukan seperti layaknya bekerja pada suatu perusahaan besar, karena sistem manajemen yang masih tradisional ataupun kekeluargaan maka pemilik usaha dalam memberikan jaminan kerja kepada para pengrajin yang sedang sakit ataupun yang sedang tertimpa musibah dengan cara memberikan santunan seadanya, dan memberikan semangat dengan cara menjenguk mereka yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami musibah. Selanjutnya dapat dilihat dari kebutuhan rasa aman, dalam hal ini para pengrajin menginginkan suasana kerja aman tidak ada kecurian maupun gangguan yang dapat merusak konsentrasi. Sebagai salah satu contoh apabila rekan kerja mereka sedang mendapat musibah teman-teman pengrajin berinisiatif mengumpulkan sumbangan sebagai salah satu dukungan moril yang mereka tunjukkan. Kebutuhan rasa memiliki juga dapat dilihat pada saat adanya partisipasi seperti yang dicontohkan diatas, pengrajin merasa dihargai sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik.

Pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja pengrajin

Kualitas kehidupan kerja yang tampak terlihat pada industri kecil klaster lurik ATBM di Kabupaten Klaten ini pengrajin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan upah kerja yang diberikan tidak berbanding lurus dengan jerih payah, energy serta keuangan yang telah diberikan kepada para pengrajin tersebut. Begitu pula mengenai jaminan kesehatan, pemilik usaha hanya memberikan santunan apabila ada anggotanya yang sakit. Hal ini disebabkan karena sistem manajemen yang diberlakukan masih tradisional yaitu dengan menggunakan manajemen kekeluargaan, sehingga disini pengrajin tidak dapat menuntut hak sepenuhnya karena hubungan dengan pemilik usaha sangat baik seperti layaknya keluarga sendiri. Keterbatasan jaminan dan upah yang diberikan oleh pemilik usaha tidak menyurutkan semangat pengrajin dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan komunikasi yang baik dan rasa kekeluargaan yang tercipta diantara pengrajin dengan pemilik usaha membuat pengrajin justru lebih giat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Disini tampak ketidakpuasan pada pengrajin dalam bekerja.

Upah kerja yang didapat dari hasil menenun dalam sehari sekitar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 40.000 per hari dengan konsekuensi pengrajin harus menyelesaikan pekerjaannya 12 sampai dengan 15 meter perhari. Apabila target tidak dapat diselesaikan maka upah yang didapat pasti akan lebih rendah dari target yang sudah ditentukan. Faktor penyebab tidak nyatanya (tidak signifikannya) pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja diakibatkan karena rendahnya dorongan yang timbul dari dalam diri individu dalam bekerja yang disebabkan karena upah kerja yang sangat rendah serta jaminan kesehatan yang tidak ditetapkan dengan prosedur yang seharusnya. Karena menggunakan manajemen kekeluargaan membuat pengrajin kesulitan dalam menyampaikan saran ataupun masukan kepada pemilik usaha, dengan alasan saling menghormati dan toleransi. Selain itu juga terkendala distribusi atau pemasaran yang tidak maksimal membuat upah kerja pengrajinpun menjadi terhambat, persaingan dengan produksi kain tenun yang menggunakan mesin yang harganya lebih murah dan lebih halus membuat produksi kain tenun lurik tradisional ini semakin menurun.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut :

Terdapat pengaruh budaya kerja negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengrajin klaster lurik dengan indikator yaitu nilai juang, etos kerja, ciri khas dan norma. Terdapat pengaruh motivasi kerja positif dan signifikan terhadap kinerja pengrajin klaster lurik yang diukur dengan indikator kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Dan terdapat pengaruh positif tidak signifikan kualitas kehidupan kerja yang diukur dengan menggunakan dimensi penyelesaian konflik, kesehatan kerja, pengembangan karier, sistem imbalan yang inovatif dan keamanan kerja.

Disarankan kepada para pengrajin agar berani mengambil keputusan dan bersikap tegas dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tanggungjawab yang penuh. Disarankan kepada pengrajin pada industri klaster lurik di Kabupaten Klaten agar senantiasa saling memotivasi serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerjanya. Dan disarankan kepada pengrajin agar memelihara komunikasi yang baik dengan pemilik usaha dalam mengelola konflik baik secara pribadi maupun dalam pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Becker, J.C., Domschke, W., Pohle, T., 2004. Current Approach to Prevent NSAIDinduced Gastropathy-COX Selectivity and beyond. *British Journal of Clinical Pharmacology* 58(6):587-600
- B. Flippo, Edwin 2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, cetakan kesepuluh, Jakarta : Erlangga.
- Buku Penyusunan Profil Klaster Lurik Kabupaten Klaten Tahun 2015. CV. Saka Konsultan Perencanaan dan Pembangunan Wilayah.
- Desertasi Rismawati 2015, Pengaruh Budaya Kerja, Motivasi dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Pengrajin Lurik Alat Tenun Bukan Mesin di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
- Gibson, Ivancevich dan Donnelly, 1997. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, Jilid I. Erlangga, Jakarta.
- Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Diterjemahkan oleh Vivin Andika Yuwono dkk. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Notoatmodjo, Soekidjo, 1992. Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Tentang UMKM (Usaha Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2005. Metode Riset Sumber Daya Manusia, Edisi 1. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Surat Edaran (SE) Bupati Klaten No.065/77/2010 yang mewajibkan PNS untuk mengenakan seragam lurik dua hari dalam sepekan
- Rivai, Veithzal. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Triguno. 2004. Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja. Jakarta: Golden Trayon Press
- Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Walton, 2004. The Brave New World of Neuromarketing is Here. B&I (Australia), 19 November
- Zimmer, Thomas dan Norman M. Scarborough. 2002. Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Harvey & Brown, 1992
- Imam Ghozali. 2004. "Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS", Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS RASIO PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oktarini Khamilah Siregar dan Yunita Sari Rioni

Surel:

oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id

yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id

Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Gatot Subroto Km 4,5 Medan

ABSTRAK

Kota Medan merupakan Pemerintah Kota yang metropolitan dimana wilayahnya memiliki jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya sehingga membuat bingung para pemerintah daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Disisi lain alokasi dana pembangunan yang tersedia relatif terbatas maka pemerintah harus dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna untuk pembangunan yang berkelanjutan. Maka Pemerintah harus dapat menumbuhkan investasi baru di Kota Medan melalui pengalokasi dana penerimaan seperti pendapatan, utang dan belanja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data LKPD kota Medan dan Medan dalam angka dari tahun 2006 sampai dengan 2015, kemudian data diolah menggunakan metode SPSS. Hasil analisis data ini dapat membuktikan bahwa secara parsial Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Debt Servica Ratio, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Kemudian secara Simultan Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Debt Servica Ratio, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Dengan tingkat pengaruh 98,50 % rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Debt Servica Ratio, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dalam harga konstan sedangkan sisanya 0,50% dijelaskan oleh faktor lain yang seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis pertumbuhan utang, analisis realisasi pendapatan dan belanja dan rasio kinerja keuangan lainnya. Dengan pengelolaan kinerja keuangan daerah yang optimal seperti efektivitas dalam penggunaan belanja dan efisiensi pendapatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan) di Kota Medan.

Kata kunci: Utang, Pendapatan, Belanja dan PDRB Harga Konstan

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan berfokus pada sektor strategis dan potensial pada wilayah baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mewujudkan melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PerMendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Menurut Marijana Badun (2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan penting untuk mengetahui kapan sistem keuangan berubah lebih baik atau buruk.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana utang yang digunakan Pemerintah Kota Medan sebagai belanja daerah dapat memperbaiki prasarana dan sarana seperti infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sehingga diperlukan alat pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio utang terhadap PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, *debt service ratio*, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh terhadap PDRB dalam harga konstan pada pemerintah Kota Medan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan dianalisis adalah mencakup komposisi APBD, baik penerimaan seperti pendapatan, utang dan alokasi belanja. Analisis mengenai penerimaan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah agar dapat menjadi pemasukan daerah. Sedangkan analisis belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah melakukan alokasi sumberdaya untuk aktivitas pembangunan dan analisis utang menjelaskan kemampuan pemerintah mengolah manajemen utang secara baik dimana akan mempengaruhi kondisi stabilitas makro ekonomi dan faktor eksternal seperti kebijakan fiskal dan moneter. Manfaat utang dapat juga digunakan dalam memperbaiki struktur neraca, meningkatkan struktur fiskal, menjaga kesinambungan fiskal serta untuk membiayai investasi pembangunan yang membutuhkan dana besar sehingga akselerasi pembangunan tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh untuk sementara adalah laporan realisasi Pemerintah Kota Medan bahwa total belanja tahun 2009 sebesar Rp.1.886.588.720.238,68, tahun 2010 sebesar Rp.2.235.195.758.724,49, tahun 2011 sebesar Rp.3.032.799.976.733,88, mengalami penurunan tahun 2012 sebesar Rp.3.021.172.391.041,67 dan meningkat kembali tahun 2013 sebesar Rp.3.224.449.048.408,88. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB Harga berlaku bahwa setiap tahun mengalami peningkatan adalah ditahun 2009 sebesar Rp. 33.430.051,02, tahun 2010 sebesar 35.822.224,73, tahun 2011 sebesar Rp. 38576.234,25, tahun 2012 sebesar Rp. 105.162.000 dan tahun 2013 sebesar Rp.110.795.420. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan belanja yang semakin meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahun bertambah. Sehingga kita akan melihat sejauhmana kemampuan Pemerintah Kota Medan semenjak Otonomi Daerah dari tahun 1999 yang membuktikan bahwa daerah tersebut sudah mandiri yaitu dalam memanfaatkan pendapatan, utang dan belanja memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai aktivitas seperti perbaikan sarana dan pasarana. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sehingga pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Seperti pendapat Magdalena K (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Jika sarana dan

prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Dan daerah tersebut terhindar dari risiko dalam pembayaran utang seperti reputasi menjadi turun, risiko ekonomi meningkat sehingga investor enggan untuk berinvestasi serta mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Rumusan Masalah

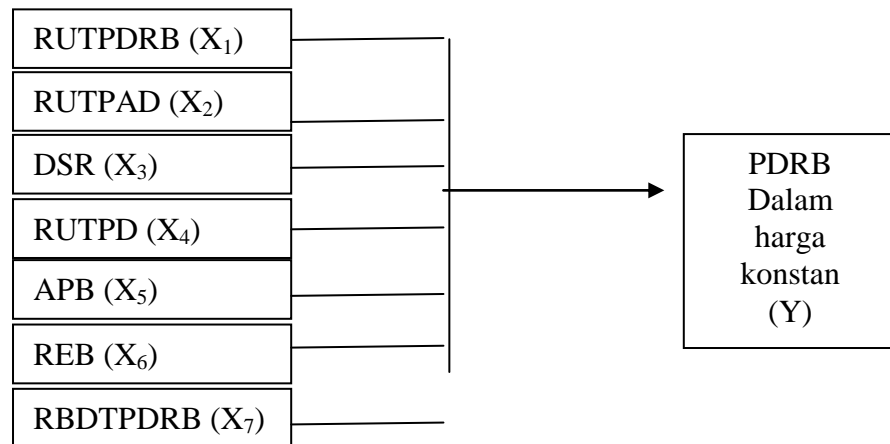
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah rasio utang terhadap PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, *debt service ratio*, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PDRB di Pemerintah Kota Medan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh rasio utang terhadap PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, *debt service ratio*, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PDRB di Pemerintah Kota Medan.

Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih mengharuskan pengguna stakeholders harus dapat meningkatkan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mencapai kenaikan dari pendapatan perkapita, penyediaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja yang pada gilirannya mampu mengurangi angka pengangguran selain itu pembangunan ekonomi juga dapat mengusahakan pemerataan pendapatan serta dapat mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antar daerah.

Pembangunan ekonomi disuatu daerah merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan berkesinambungan yang dijalankan secara bersama-sama baik itu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dilakukan sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasil *outputnya* sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Jadi berdasarkan konsep perekonomian terbuka, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan agregat dari konsumsi sektor rumah tangga, investasi sektor swasta, pengeluaran sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri sektor ekspor-impor ($Y = C + I + G + NX$).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Ada beberapa defenisi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang dikemukakan para ekonom dengan menggunakan sudut pandang yang beragam, tetapi pada dasarnya kesemuanya mempunyai pengertian yang sama. Salah satu indikator kerbersihan pembangunan ekonomi adalah kenaikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Secara konsepsional pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung secara terus menerus harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembangunan. Karena itu pembangunan ekonomi disamping mengubah struktur produksi nasional dengan cara merombak PDB kearah yang lebih baik juga harus berupaya merubah distribusi pendapatan nasional yang semakin merata.

Untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan suatu indikator. Sadono (2008) menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :

- a. Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB)
- b. Produk Domestik Bruto Perkapita/Pendapatan Perkapita.
- c. Pendapatan Per Jam Kerja

Laporan Keuangan

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelasaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan dan pertanggung jawaban anggaran. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Satandar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan

keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2010).

Dalam Bastian (2010) disebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam pemerintah daerah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan, dan untuk mendemostrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya - sumber daya terpercaya dengan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya finansial, bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya, kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya dan informasi agrerat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal kas jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan, Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.

Jenis Laporan Keuangan

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial (Mardiasmo, 2007), Bastian (2010) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan yang lengkap

meliputi laporan Posisi Keuangan, laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan Realisasi Anggaran, laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut ini (Suyono, 2010) adalah

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Formasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Daftar dan skedul.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan (Bastian, 2010). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dalam laporan

keuangan pemerintah dikatakan relevan, jika memenuhi kriteria seperti manfaat umpan balik (*feedback value*) yaitu Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, Manfaat prediktif (*predictive value*) yaitu Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, Tepat waktu yaitu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan dan Lengkap yaitu

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaatnya yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Misalkan dalam satu kegiatan target yang akan dihasilkan adalah 100 orang yang akan terlatih, kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan berapa jumlah yang terlatih, apakah masih tetap 100 orang, kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang.

Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Bastian, 2010).

Mengadakan interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan, manajer akan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaannya, dan akan dapat diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di masa lalu dan masa yang sedang berjalan. Dengan mengadakan analisis keuangan dari tahun-tahun yang telah lalu dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian oleh manajemen analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi di masa depan dan, yang lebih penting, sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan untuk masa yang akan datang.

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk pembuatan keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence* dan sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat sistem pengukuran kinerja menurut Iyahul Ulum (2009), antara lain adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara Objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara Objektif.

Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio Utang Terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan anatar jumlah total utang pemerintah daerah dengan PDRB setiap tahunnya. Manfaat rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengganggu beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah. Rumus rasio ini adalah

$$\text{Rasio Utang terhadap PDRB} = \text{Total Utang} / \text{PDRB}$$

b. Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total PAD, rasio ini menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan PAD, jika rasio ini semakin rendah maka akan semakin baik. Rumus rasio ini adalah

$$\text{Rasio Utang terhadap PAD} = \text{Total Utang} / \text{PAD}$$

c. Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

Rasio ini menjelaskan tentang kinerja pinjaman daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat mengembalikan pinjamannya kepada para kreditor yaitu pihak eksternal. Rumus rasio ini adalah

$$\text{Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

d. Debt Service Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah meliputi pokok dan bunganya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya. Rumus rasio adalah

$$\text{DSR} = \frac{\text{Total pendapatan daerah}}{\text{Pokok pinjaman} + \text{bunga}}$$

e. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Rumus analisis pertumbuhan belanja adalah

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn } t = \frac{(\text{Realisasi belanja thn } t - \text{realisasi belanja thn } t-1)}{\text{realisasi belanja thn } t-1}$$

f. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Manfaat rasio ini adalah untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumus rasio ini adalah

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%}{}$$

g. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Manfaat rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rumus rasio adalah

$$\text{Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Total realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah hubungan kausal. Pendekatan dengan ruang lingkup Pemerintah Kota Medan dengan tujuan dapat diketahui kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian dilakukan dengan fakta untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio utang, pendapatan dan belanja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Medan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan dan Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan. Waktu penelitian direncanakan dari 1 bulan setelah pengumuman pemenang hibah kemristekdikti.

Sumber Data

Sumber data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan, Medan Dalam Angka.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan dari tahun 2006 sampai dengan 2015 sehingga berjumlah 10 unit amatan analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi berupa data sekunder meliputi PDRB dalam harga berlaku, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2006 sampai dengan 2015 serta buku dan jurnal mengenai topik penelitian.

Metode Analisis Data

Metodologi digunakan berupa pendekatan analisis kuantitatif yang digunakan untuk melihat dampak analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PDRB dalam harga berlaku pada Pemerintah Kota Medan, dengan menggunakan pendekatan Regresi Berganda dimana variabel-variabel tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS. Berikut ini model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \text{RUTPDRB} + \beta_2 \text{RUTPAD} + \beta_3 \text{DSR} + \beta_4 \text{RUTPD} + \beta_5 \text{APB} + \beta_6 \text{REB} + \beta_7 \text{RBDTPDRB} + e$$

Keterangan:

PDRB (Y) : Produk Domestik Regional Bruto dalam harga konstan

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5,6}$ dan 7 : Koefisien Regresi $X_{1,2,3,4,5,6}$ dan 7

RUTPDRB (X_1) : Rasio Utang Terhadap PDRB

RUTPAD (X_2) : Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

DSR (X_3) : *Debt Service Ratio*

RUTPD (X_4) : Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

APB (X_5) : Analisis Pertumbuhan Belanja

REB (X_6) : Rasio Efisiensi Belanja

RBDTPDRB (X_7) : Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

e : error

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskripsi

Untuk melihat bagaimana perkembangan statistik deskripsi untuk masing-masing variabel penelitian maka dapat dilihat data sebagai berikut ini

Tabel 1. Perkembangan Rasio kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tahun	PDRB	RUP	RUTPAD	RUPD	DSR	APB	REB	RBDPDRB
2006	27.234,45	6067217,00	0,5282	0,1181	0	0,0452	0,8178	4822362
2007	29.352,92	5687567,00	0,5343	0,1016	2915,14	0,0604	0,7945	4744666
2008	31.373.951,99	5302,39	0,4249	0,0921	3207,24	0,0612	0,8313	47107,82
2009	33.430.051,02	6156,66	0,5584	0,11	904,22	0,2765	0,8029	56433,92
2010	35.822.224,73	3959,31	0,2408	0,6085	856,82	0,1848	0,8657	62396,9
2011	38.576.234,25	3876,77	0,1503	0,0544	1349,03	0,3605	0,8955	78831,9
2012	105.162.000	411,26	0,3774	0,1445	900,87	-0,01	0,7381	2864316
2013	110.795.420	2969014,00	0,2727	0,1004	658,71	0,0705	0,7609	2910273
2014	117.528.080	1688267,00	0,1433	0,0491	2851,6	0,1545	0,8048	3167309
2015	124.277.480	189451,00	0,1581	0,5553	41697,67	0,175	0,8001	3519333

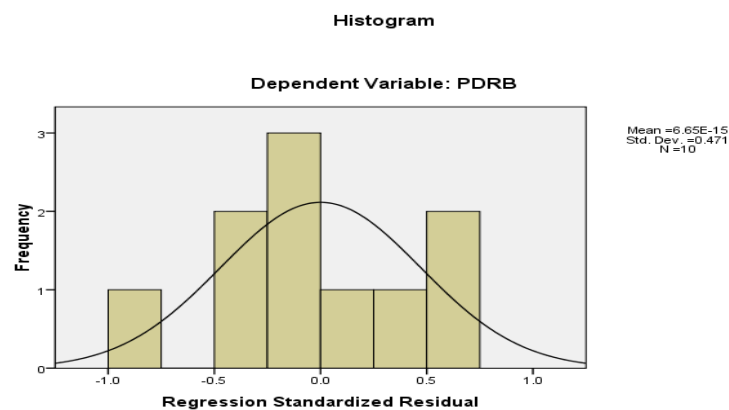
Sumber : Data Diolah , 2017

Berdasarkan data diatas bahwa PDRB Kota Medan nilai terendah di tahun 2006 sebesar 27.234,45 Milyar dan tertinggi di tahun 2015 sebesar 124.277.480 milyar. RUP (Rasio Utang terhadap PDRB dalam harga konstan) nilai terendah di tahun 2012 sebesar 411,26 dan tertinggi ditahun 2007 sebesar 5.687.567. RUTPAD (Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah) nilai terendah ditahun 2014 sebesar 0,1433 dan nilai tertinggi ditahun 2009 sebesar 0,5584. RUPD (Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah) nilai terendah ditahun 2011 sebesar 0,0544 dan nilai tertinggi ditahun 2010 sebesar 0,6085. DSR (*Debt Service Ratio*) nilai terendah di tahun 2006 sebesar 0 dan nilai tertinggi ditahun 2015 sebesar 41.697,67. APB (Analisis Pertumbuhan Belanja) nilai terendah ditahun 2011 sebesar -0,01 dan nilai tertinggi ditahun 2011 sebesar 0,3605. REB (Rasio Efisiensi Belanja) nilai terendah ditahun 2012 sebesar 0,7381 dan nilai tertinggi ditahun 2012 sebesar 0,8955. RBDTPDRB (Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB) nilai terendah ditahun 2008 sebesar 47107,82 dan nilai tertinggi ditahun 2007 sebesar 4.744.666.

2. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Normalitas

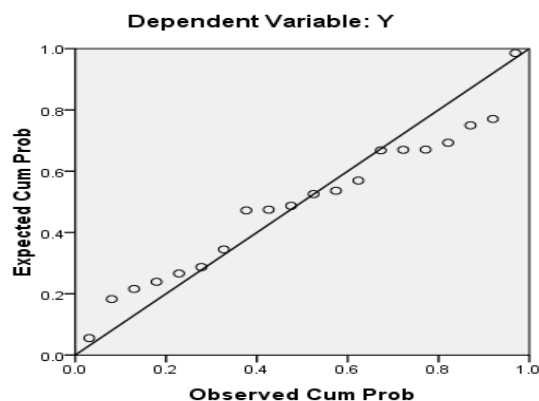
Dilihat dari grafik histogram menunjukkan data distribusi nilai residual telah berdistribusi normal. Demikian juga pada norma probability plot, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Begitu pula dengan uji normalitas residual dari uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnof (*1-sampel K-Stest*) menunjukkan bahwa model regresi sudah memenuhi syarat uji asumsi normalitas data.



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 1 Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov dengan $\alpha = 0.05$ asymp.Sig = 1.000 > 0.05 sehingga menunjukkan data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2. *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03014563E6
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.102
	Negative	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		.354
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: data diolah, 2017

b. Uji Multicollinierity

Tabel 3 *Collinerity Statistics*

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-9.352E7	2.809E7			
	RUP	-.156	1.050	-.021	.081	12.294
	RUTPAD	2.521E7	6.852E6	.234	.404	2.474
	RUPD	4.747E6	4.938E6	.055	.508	1.970
	DSR	-53.961	107.528	-.038	.282	3.545
	APB	1.332E7	1.077E7	.085	.345	2.897
	REB	1.368E8	3.288E7	.348	.234	4.280
	RBDPDRB	-6.394	1.441	-.703	.065	15.341

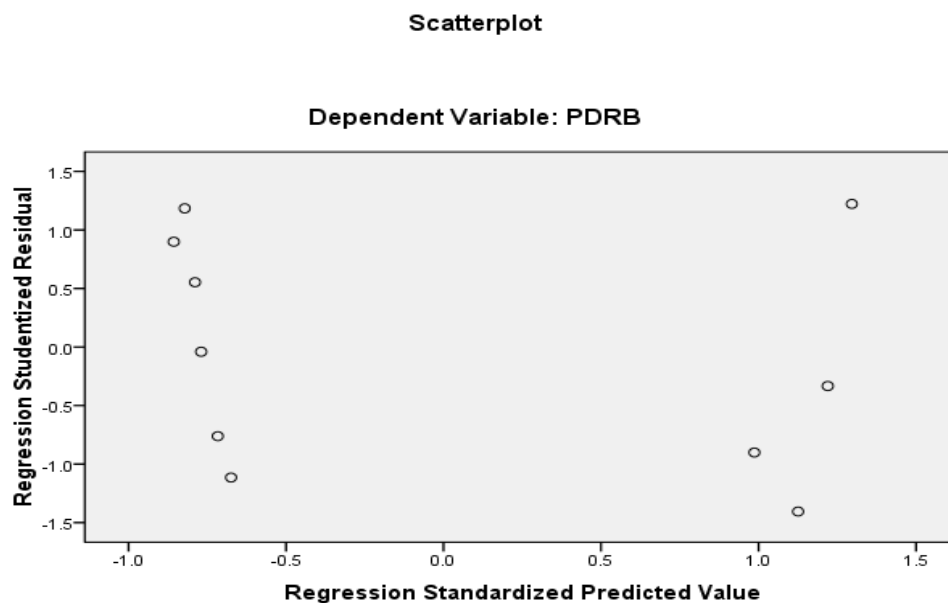
a. Dependent Variable: PDRB
 Sumber: data diolah, 2017

Uji multikolinieritas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen pada model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil uji statistik nilai *Tolerance* menunjukkan ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10, dan demikian juga hasil perhitungan *Variance Inflation*

Factor (VIF) menunjukkan nilai VIF lebih besar dari 10 yaitu variabel RUP, dan RBDPDRB ini disebabkan karena satuan variabel berbeda ada yang ribuan dan desimal serta kurangnya data sampel penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Grafik scatterplots menunjukkan titik-titik sudah menyebar secara acak dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 3. Scatterplot

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel dibawah menunjukkan nilai Durbin Waston sebesar 2.071, nilai ini berada diantara -2 sampai +2 sehingga hal ini mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4 Uji Durbin Waston

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.998 ^a	.997	.985	2.18527E6	.997	87.103	7	2	.011	2.071

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan

Tabel 4.5. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.912E15	7	4.160E14	87.103	.011 ^a
	Residual	9.551E12	2	4.775E12		
	Total	2.921E15	9			

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

Dari hasil uji Anova diperoleh F-hitung sebesar 87,103, dengan tingkat probabilitas 0.01. Dengan demikian disimpulkan, $p = 0.000 < \alpha = 0.05$, bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Servica Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap pusat pertumbuhan ekonomi (PDRB) . Diperoleh hasil uji coefficient bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Servica Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	T	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	-93.520.000.000	2.809E7		-3.329	.080
	RUP	-.156	1.050	-.021	-.149	.895
	RUTPAD	25.210.000.000	6.852E6	.234	3.679	.067
	RUPD	4.747.000.000	4.938E6	.055	.961	.438
	DSR	-53.961	107.528	-.038	-.502	.666
	APB	13,320.000.000	1.077E7	.085	1.237	.342
	REB	136.800.000.000	3.288E7	.348	4.162	.053
	RBDPDRB	-6.394	1.441	-.703	-4.436	.047

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut;

$$\text{PDRB} = - 93.520.000.000 - 0.156 \text{ RUP} + 25.210.000.000 \text{ RUTPAD} + 4.747.000.000 \text{ RUPD} - 53.961 \text{ DSR} + 13.320.000.000 \text{ APB} + 136.800.000.000 \text{ REB} - 6.394 \text{ RBDTPDRB}$$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan nilai Adjusted R Square bahwa hanya 98,50 % rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dalam harga konstan sedangkan sisanya 0,50% dijelaskan oleh faktor lain yang seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis pertumbuhan utang, analisis realisasi pendapatan dan belanja dan rasio kinerja keuangan lainnya.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.998 ^a	.997	.985	2.18527E6	.997	87.103	7	2	.011

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

Pembahasan

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menentukan keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode. Hal ini berimplikasi pada terpacunya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup komposisi APBD dari penerimaan yakni pendapatan, hutang dan alokasi pengeluaran. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan rasio Hutang terhadap PDRB, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pengeluaran, Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Pengeluaran Daerah atas PDRB telah mempengaruhi pusat pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di Pemerintahan Kota Medan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Pemerintah Kota Medan untuk pengeluaran daerah mampu menciptakan investasi di daerah tersebut. Sehingga pengaruh ini dapat meningkatkan pendapatan daerah itu dan memacu pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di pemerintahan Kota Medan. Sementara itu, secara parsial bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Servica Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), ini membuktikan bahwa secara otomatis utang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan tidak langsung merangsang peningkatan pendapatan daerah karena dalam menumbuhkan investasi atau pusat pertumbuhan itu melalui dengan memperbaiki infrastruktur pemerintah berupa belanja yang efeknya ke pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja berpengaruh positif sebesar 4.162 secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan) sehingga Pemerintah Kota Medan selama tahun 2006 sampai dengan 2015 telah benar-benar efisien dalam mengelola belanja untuk biayai pembangunan daerah nya atau jumlah dana yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah sudah optimal, sedangkan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh negatif sebesar - 4.436 secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), masih adanya pembiayaan belanja daerah yang belum sesuai dengan perkembangan daerah tersebut menyebabkan pengaruh yang negatif dalam memperoleh pendapatan karena belanja daerah masih banyak menggunakan utang serta peningkatan belanja daerah tidak sesuai dengan bertambahnya pertumbuhan ekonomi sehingga untuk Pemerintah Kota Medan harus lebih optimal dan efektif lagi pengelolaan keuangan daerahnya dalam menghindari efek dari ketimpangan belanja dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pemerintah daerah berhasil menggunakan dana hutang dengan membiaya pengeluaran daerah untuk melakukan investasi dalam meningkatkan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat serta kemampuan pemerintah daerah dengan bertanggung jawab dalam membayar hutangnya.

Disisi lain bahwa hutang digunakan dalam memperbaiki struktur neraca, meningkatkan struktur fiskal, menjaga kesinambungan fiskal serta untuk membiayai investasi pembangunan yang membutuhkan dana besar sehingga akselerasi pembangunan

tercapai. Negara kita masih mengalami defisit APBN, dimana untuk menutupinya melalui pembiayaan dengan cara berhutang ke negara lain. Untuk pemerintah harus bekerja keras dalam mengelola investasi tersebut agar peningkatan pembiayaan yang bersumber dari hutang harus dibarengi dengan optimalisasi belanja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Tetapi pemerintah Kota Medan belum efisien peningkatan pendapatannya yang dibiayi dengan hutang sehingga belum ada hubungan yang optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Masih banyak investasi di Kota Medan belum dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi karena ini berhubungan dengan aset Pemerintah Kota Medan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan yang berkelanjutan menuju dan menghadapi masyarakat ASEAN.

Penutup

Kota Medan merupakan Pemerintah Kota yang metropolitan dimana wilayahnya memiliki jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya sehingga membuat bingung para pemerintah daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen. Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hasil yang diperoleh secara simultan rasio Hutang terhadap PDRB, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pengeluaran, Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Pengeluaran Daerah atas PDRB telah mempengaruhi pusat pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di Pemerintahan Kota Medan. Sementara itu, secara parsial bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Pemerintah Kota Medan lebih ekonomis, efisien dan efektif dalam mengelola keuangan daerah sehingga

pembangunan daerah dapat tercapai. Selanjutnya dalam pemanfaatan Pengeluaran Daerah yang efektif berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang optimal dan seimbang dengan penggunaan hutang pada pemerintahan daerah masing-masing dapat berkontribusi positif pada pendapatan daerah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki PDRB tertinggi dan terendah pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten lainnya.

Daftar Pustaka

- Agus Tri Basuki dan Imamudin Y .2015. *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI
- Ghozali, Imam. 2011. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17* Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mahmudi. (2009). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mankiw. (2006). *Makro Ekonomi* :Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Marijana Badun. (2009). *Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence*. Institute of Public Finance, Zagreb.
- Magdalena Kludacz. (2012). *Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals*. The College of Economics and Social Sciences in Plock. Warsaw University of Technology Plock, Poland.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Teori Pengantar Makroekonomi*. PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta
- Ulum, Ihyahul. (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- www.medan.bps.go.id
- www.pemkomedan.go.id

REGULASI DAN KEBIJAKAN PANGAN SATU UPAYA MEMBANGUN BANGSA YANG SEHAT DAN PRODUKTIF

Budi Arsih dan Widihartati Setiasih

Surel: buddy_arsih@yahoo.com

Fakultas Hukum, UNDARIS, Ungaran

ABSTRAK

Di Indonesia masalah kemiskinan selalu diindentikan dengan beberapa kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok Pangan Sandang Papan dan Kesehatan yang layak diberbagai daerah . Menurut WHO kesehatan meliputi hak atas informasi, hak atas privasi, hak untuk menikmati kemajuan teknologi , hak atas pendidikan tentang kesehatan, hak atas ketersediaan makanan dan gizi, hak untuk mencapai standar hidup optimal, dan hak atas jaminan social. Jika kondisi tersebut terpenuhi akan tercapai satu kondisi bangsa yang sehat dan sejahtera. Oleh sebab itu diperlukan berbagai kebijakan yang menyeluruh untuk mewujudkannya. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan Regulasi dan kebijakan Pangan dan Tantangan dan Upaya mencapai Kedaultan pangan agar menjadi bangsa sehat dan Produktif. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan analisis yuridis dan sosiologis .Pembahasan menemukan bahwa regulasi ketersediaan pangan belum maksimal UU hanya berada pada tataran teori dan pada implementasi masih banyak tantangan yang ditemui dan tidak dilaksanakan. Masalah persoalan kedaultan pangan dan kerentanan pangan juga terjadi dari kebijakan yang salah dan rendahnya kualitas manusia karena kemiskinan . Untuk itu diperlukan sinergi dan integrasi dari beberapa elemen yang ada agar tercapai bangsa yang sehat dan produktif.

Kata kunci: *Regulasi, Kebijakan, Kedaultan Pangan, Sehat, Produktif*

Pendahuluan

Kesehatan masyarakat meliputi hak atas informasi, hak atas privasi, hak untuk menikmati kemajuan teknologi kesehatan, hak atas pendidikan tentang kesehatan, hak atas ketersediaan makanan dan gizi, hak untuk mencapai standar hidup optimal, dan hak atas jaminan sosial [WHO, 2014]. Untuk mendukung bangsa yang sehat diperlukan gizi yang cukup jika tidak terpenuhi, hal tersebut dapat menghambat perkembangan fisik dan mental seseorang. Penanganan gizi sangat terkait dengan strategi

sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas dan produktif. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kecukupan pangan dan ketersediaan pangan karena masalah pangan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan pangan adalah hak masyarakat terhadap makanan sehat dan sesuai budaya yang dihasilkan melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan [Edelman: 2014 hal 967]

Upaya diatas tidak mudah karena masalah kemiskinan menjadi penghalang dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Miskin dalam kajian ini adalah tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural [Suharto 2013: 15]. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makanan.

Kemiskinan berkaitan erat dengan sumber daya manusia, kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas, begitu pula sebaliknya. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu, yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar anggota masyarakat (sandang, pangan, papan). Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut [Usman 2012:126].

Dari sisi yang lain Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sebagai contoh dari hasil penelitian Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kehutanan (KP4K) dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY dari tahun 2013 hingga 2016 kemajuan ketahanan pangan Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan dari 34 desa yang mengalami rawan pangan masih ada 9 desa pada tahun 2016. Pada 2009 jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau sekitar 8,99 persen dari total penduduk

Indonesia. Pada 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia. [www.bps.go.id, Data Statistik]. Data dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa Indonesia pernah berada di peringkat kelima negara dengan kekurangan gizi . Jumlah tersebut merupakan 4,5 persen dari jumlah balita Indonesia, yakni 23 juta jiwa, terutama daerah bagian timur Indonesia [www.depkes.go.id, Indonesia Peringkat Kelima Gizi Buruk].

Penyediaan pangan merupakan salah satu isu utama dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat yang paling erat kitannya dengan pembangunan lingkungan. Sementara ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, akan ditentukan oleh daya beli masyarakat terhadap pangan, ketahanan pangan dalam pembangunan pertanian menuntut kemampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan yang diperlukan dan juga menuntut kondisi yang memudahkan masyarakat memperolehnya dengan harga yang terjangkau khususnya bagi masyarakat lapisan bawah (sesuai daya beli masyarakat). Pada kenyataannya, beberapa produk pangan penting seperti beras dan gula, produksin dalam negeri dirasa masih kalah dengan produk impor karena tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Penelitian menemukan bahwa tingkat kekurangan gizi berbanding terbalik dengan pendapatan negara, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin rendah tingkat malnutrisi.

Selain itu beberapa kebijakan perdagangan dalam era globalisasi ternyata mengesampingkan kepentingan petani nasional. Padahal, sebagai salah satu sektor pembangun perekonomian nasional, hasil bercocok tanam petani juga menentukan keberhasilan program pemerintah dalam swa sembada pangan. Liberalisasi perdagangan akan mempermudah masuknya produk impor ke Indonesia melalui beberapa perjanjian dan kerjasama antar negara. Sebut saja ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan ASEAN Economic Community yang telah beroperasi sejak 2015. Implementasi kedua perjanjian ini diyakini bisa mematikan petani tidak hanya memantau waktu untuk musim tanam padinya, namun mau tidak mau juga harus memantau apa yang terjadi di balai desa, pendopo bupati, kantor kementerian pertanian, istana negara dan bahkan kantor pusat Bank Dunia, IMF, WTO, FAO dan IFAD. Dua badan terakhir ini merupakan lembaga Internasional di bawah PBB yang mengurus pangan, pertanian dan pembiayaan pembangunan pertanian Internasional.

Lebih dari itu FAO dan IFAD sudah sekian lama menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk program-program pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir situasi pangan dan pertanian internasional dapat dikatakan tidak stabil, oleh karena terpaan krisis keuangan global, krisis energi dan krisis perubahan iklim. Terpaan tersebut menghasilkan dampak kemiskinan dan kelaparan. Khususnya di kawasan pedesaan. [FAO.2010] menyebutkan bahwa kelaparan penduduk dunia tahun 2009 mencapai 1.02 milyar, sementara kelaparan di Indonesia dilaporkan berjumlah 36.7 juta.

Hal ini dapat diartikan bahwa ada persoalan yang sangat serius dalam akses terhadap alat produksi, mode produksi, distribusi dan pasar, sehingga buruh tani dan petani kecil di pedesaan menjadi miskin dan lapar karena termarginalkan dalam sistem pembangunan pertanian yang tidak adil. Atas dasar latar belakang tersebut maka membatasi persoalan kepada : Bagaimanakah regulasi pangan dan kebijakan pangan di Indonesia ? Apakah Tantangan dan Upaya mencapai Kedaulatan pangan agar menjadi bangsa sehat dan Produktif.?

Kajian Pustaka

Definisi Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman [Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan]. Sedangkan Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pangan yang dikonsumsi harus memenuhi standar keamanan pangan [Pasal 1 angka 7. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan].

Cita-cita hukum bangsa Indonesia dalam Pancasila khususnya sila kelima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Disamping itu amanat UUD 1945, Pasal 28 A ayat 1 juga jelas menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan” mengisyaratkan pentingnya kebutuhan pangan dalam mencapai kehidupan sejahtera lahir dan batin. Kemudian secara operasional untuk memaknai kedaulatan pangan, ketahanan, dan keamanan pangan, yang diperkuat dengan payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang pangan, menggantikan Undang-Undang No 7 tahun 1996 tentang pangan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila kelima ini kemudian dioperasionalkan atau dijabarkan dalam bentuk teks hukum berupa pasal dan ayat yang ada di UUD 1945 khususnya Pasal 28 A ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (4). Masuknya aspek kedaulatan pangan merupakan konsekuensi bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (biasanya disingkat ECOSOC Rights). Basis argumennya adalah bahwa selama ini negara belum secara sistematis mampu mengakui hak atas pangan warganya. Dengan kedaulatan pangan, diharapkan tidak lagi dijumpai persoalan-persoalan dasar tentang pangan, seperti gizi buruk, kelaparan, rawan pangan dan sebagainya. UU Pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas pangan warga negaranya.

Kesehatan dan Pembangunan Ekonomi

Kesehatan merupakan fungsi produksi dan modal yang tahan lama sehingga mirip dengan stok barang ekonomi lain yang dapat berkurang atau bertambah dengan pertambahan waktu atau umur. Bagi mereka yang mempunyai stok kesehatan yang selalu meningkat maka produksi mereka akan meningkat pula. Apabila stok kesehatan ditunjang dengan stok faktor lain seperti pendidikan, modal dan relasi maka nilai produksi akan lebih meningkat. Jika stok barang lain disebut X dan stok kesehatan adalah S maka hubungan pemanfaatan (utilitas) seseorang dapat dinyatakan dengan rumus $U = f(X,S)$. [Grossman 1972].

Di negara maju, upaya untuk menurunkan kesakitan dan mengurangi hak non-produktif senantiasa dilakukan untuk mencegah kehilangan fungsi produktifitas (*lost of productivity*). Pemikiran tersebut dapat dipahami jika upaya kuratif terbukti tidak “*cost effective*” karena intervensi dilakukan terbatas pada seseorang yang

telah kehilangan fungsi sehat. Sebaliknya, upaya promotif dan preventif merupakan upaya pra-investasi yang dikeluarkan dan dikembalikan dalam bentuk pencegahan kehilangan produktivitas atau pencegahan kerugian karena seseorang tidak jatuh dalam kondisi sakit. Seorang yang tidak sakit tentu saja dapat terus bekerja dan akan meningkatkan pendapatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya promotif preventif yang dilakukan secara tepat, jauh bersifat *'cost effective'* daripada upaya kuratif. Pada sidang di Ottawa tahun 1986, WHO memperkenalkan konsep baru sehat dan produktif yang terangkum dalam The Ottawa Charter: *"Health is a source of everyday life, not merely the objective of living"*. Konsep ini berpengaruh terhadap tujuan dari upaya kesehatan yang tidak lagi hanya sekedar mencapai kehidupan sehat individu atau masyarakat. [WHO 1986]. UNFPA menyatakan tahun 1992 sebagai *"The Year of Human Resource Development"* sebagai pertanda dimulai gerakan baru pembangunan kesehatan yang lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia untuk kelangsungan pembangunan. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah Angka *Human Development Index* (HDI).

Pada masa yang akan datang upaya kesehatan diharapkan dapat membawa setiap individu anggota masyarakat mencapai kondisi sehat produktif. Selanjutnya, WHO mengubah definisi sehat tahun 1948 menjadi definisi WHO 1988 yang telah memasukkan unsur sehat produktif. Sehat adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi sehat inilah yang selanjutnya juga telah diamanahkan dalam UU Kesehatan R.I No. 23/1992 .

Konsep kedaulatan Pangan

Kedaulatan Pangan dilahirkan pertama kali saat pertemuan petani yang dibentuk tahun 1992 pada Kongres *The National Union of Farmers and Livestock Owners* (UNAG). Kegiatan ini dikoordinasikan oleh petani yang tersebar mulai dari Afrika, Amerika Utara, Tengah dan Selatan; Asia, Karibia dan Eropa. Pertemuan ini berhasil merumuskan visi bahwa "Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan pangan dasar dengan

menghormati keragaman budaya dan sistem produksinya sendiri. Masyarakat memiliki hak untuk memproduksi makanannya sendiri di wilayahnya. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat untuk mencapai keamanan pangan sejati (*genuine food security*)" Semenjak kegiatan ini, berbagai publikasi, pernyataan dan deklarasi telah disampaikan dalam konteks kerangka kerja kedaulatan pangan.

Pemikiran ini dikristalkan sebagai sebuah gerakan, dimana pada tahun 2002 berhasil dibentuk sebuah komite yaitu *International Planning Committee (IPC)* untuk kedaulatan pangan. IPC merumuskan bahwa kedaulatan pangan memiliki empat area yaitu: (1) hak terhadap pangan (2) akses terhadap sumber-sumber daya produktif, (3) pengarusutamaan produksi yang ramah lingkungan (*agroecological production*), serta (4) perdagangan dan pasar lokal [IPC, 2006]. Hak terhadap pangan dikaitkan dengan pengembangan pendekatan hak asasi manusia pada individu, serta pangan bergizi yang diterima secara kultural. Sedangkan akses kepada sumber daya produktif berkaitan dengan akses kepada lahan, air, dan sumber genetic.

Kedaulatan pangan mengutamakan pada hak masyarakat untuk pangan dan sistem memproduksinya, sekaligus keprihatinan terhadap sistem perdagangan" [*Global Politics*, 2012]. Satu dokumen penting dikeluarkan tahun 2010, dimana direktur FAO, José Graziano da Silva, menekankan komitmen FAO saat mengutip isi dokumen *The Voluntary Guidelines on Responsible Governance*, bahwa FAO akan melibatkan berbagai stakeholder dan pentingnya melibatkan aktor baru dalam pembangunan dunia yang diinginkan. Partisipasi penuh dari masyarakat sipil, gerakan sosial (*social movements*), dan masyarakat adat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi FAO.

Pada tahun 2012, dari dokumen *The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security* yang dikeluarkan oleh *Committee on World Food Security (CFS)*, dicantumkan dengan agak panjang terbaca tentang hak bersama dan regulasi tentang pengusahaannya (*collective rights and customary forms of tenure*) dimana disampaikan secara eksplisit tentang komunitas asli (*indigenous communities*) dan kewajiban negara [UN, 2010]. Tahun 2013, organisasi IFAD (*The International Fund for Agricultural Development*) memberikan dana dan menggerakkan kegiatan pemberdayaan untuk kelompok miskin. Untuk memungkinkan kelompok miskin pedesaan mengatasi kemiskinan mereka dengan

terlibat dalam aktivitas mata pencaharian pertanian pedesaan. Kedaulatan pangan adalah peluang bagi petani untuk mengontrol pangan mereka sendiri. Pada level rumah tangga, kedaulatan pangan berkenaan dengan bagaimana petani memiliki kedaulatan terhadap berbagai sumber daya untuk menjalankan pertanian dan kehidupannya dengan sejahtera dan bermartabat [Kerr :2013].

FAO menjadikan tahun 2014 sebagai tahun Pertanian Keluarga (*Family farming*). Dari dokumen “*Community Family Farming: An Ally For Food Sovereignty And The Fight Against Hunger*” [Moreira, 2014] .Pertanian keluarga dan pendekatan kedaulatan pangan merupakan strategi untuk memerangi kelaparan dunia. *The International Year of Family Farming (IYFF)* diumumkan secara resmi oleh PBB di New York tanggal 22 November 2013. . Tahun 2015, PBB merumuskan deklarasi kedua tentang hak-hak petani (*The 2nd Session For Declaration On The Peasants Rights*). Deklarasi dilangsung di Genewa - Swiss pada tanggal 6 Februari 2015.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang sering digunakan oleh peneliti ilmu sosial yang diterapkan oleh Bank Dunia [Word Bank 2009]. Metode yuridis dipakai untuk melihat peraturan peraturan dan kebijakan pangan di Negara Indonesia sedangkan pendekatan Sosiologis dipakai untuk melihat bagaimana tantangan implementasi regulasi dan kebijakan Pangan dalam upaya mendukung bangsa yang sehat dan Produktif. Selain itu Pendekatan induktif paling banyak digunakan dalam penelitian ini karena hanya sedikit literatur yang ada yang terutama terkait dengan Indonesia sebagai studi kasus untuk merumuskan teori [Saunders, 2009] .

Penelitian ini menggunakan kerangka teori konsep kesehatan dan ekonomi ,teori ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan wacana tata kelola keamanan makanan ,untuk mendapatkan pemahaman dan merancang wawancara, dan kemudian mengembangkan teori yang kuat dari hasil wawancara. Mengintegrasikan kedaulatan pangan ke dalam topik ketahanan pangan cukup baru di Indonesia, dan sifat kebijakan pangan , instrumen dari beberapa responden dalam lingkungan sosial adalah sumber yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dengan melihat pada data bibliografi dan documental, sedangkan Tinjauan literatur dilakukan melalui data pencarian terpisah diantara keamanan pangan, kemiskinan dan kesehatan masyarakat melalui berbagai literatur ilmu sosial dan yang relevan. Sesuai dengan sifat penelitian data yang perlu dikumpulkan bersifat kualitatif. Data kualitatif menggunakan studi eksplorasi, [Saunders , 2009, hal.139) mengeksplorasi apa yang sedang terjadi; mencari wawasan baru; untuk mengajukan pertanyaan dan menilai fenomena .

Hasil Dan Pembahasan

1. Regulasi Dan Kebijakan Pangan Di Indonesia

Untuk mencapai kedaulatan pangan tentunya harus didukung dengan satu regulasi yang kuat regulasi harus menjadi amanah dan acuan yang kuat bersama bagi seluruh pemimpin dan pembuat kebijakan Pangan . Pangan adalah persoalan seluruh bangsa dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan rakyat terbebas dari sakit dan kekurangan akibat masalah Pangan , Regulasi subsidi dan Perdagangan mengenai pangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi atas Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
- e. Perundang-undangan
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- i. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
- j. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Regulasi impor Pangan antara lain :

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

- b. Inpres Nomor 9 tahun 2002 tentang penetapan kebijakan keberasan.
- c. Kep. MPP No. 9/MPP/Kep/1/2004.
- d. Kep. MPP No. 368/MPP/Kep/5/2004
- e. Surat MENDAG No. 71/M/XII/2004.
- f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 357/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/I/ 2004 tentang Ketentuan Impor Beras [23<http://disperindag.kalbarprov.go.id/inventory/download/192e402f0c798b7fb43e7f95f336d022.pdf>].

Terdapat juga regulasi kebijakan impor terbaru yang diterbitkan pemerintah terkait komoditas pangan seperti kedelai, daging sapi, dan buah ataupun sayuran, seperti cabai dan bawang merah. Regulasi tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan
- b. Impor Kedelai dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.
- c. Permendag Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendag Nomor 16
- d. Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
- e. Permendag Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
- f. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Mendukung Pencapaian Kedaulatan Pangan. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa *petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.*

2. Kebijakan Program Nawacita

Selain undang undang dan peraturan peraturan pelaksana lainnya pemerintah juga mencanangkan program yang dituangkan dalam Kebijakan Presiden NAWACITA “Nawacita” bermakna sebagai sembilan agenda perubahan. Kedaulatan pangan tercantum secara jelas pada agenda nomor 7 (Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan

Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik). Dalam cita nomor 7 ini ada lima program yaitu: (1) Membangun kedaulatan pangan, (2) Membangun kedaulatan energi, (3) Membangun kedaulatan keuangan, (4) Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di setiap sentra produksi tani/nelayan, dan (5) Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional [Anonymous, 2014]. Tiga, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Dalam dokumen ini khususnya bab Perkuatan Kedaulatan Pangan [Bapenas, 2014], kedaulatan pangan memuat strategi komponen Nawacita dengan optimal

Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045 berupa Pertanian, Bioindustri Berkelanjutan (Kementan, 2014). Dalam bagian sasaran pembangunan disebutkan target untuk Terwujudnya kemandirian pangan nasional paling lambat pada 2020, kedaulatan pangan nasional paling lambat pada 2025 dan kedaulatan pangan komunitas paling lambat pada 2045. Khusus untuk membangun kedaulatan pangan disebutkan akan digunakan lima pendekatan sebagai berikut, yaitu [Anonymous, 2014]: a. membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, b. stop impor pangan khusus untuk beras, jagung dan daging sapi, c., stop impor pangan khusus untuk komoditas kedelai, bawang merah dan cabe merah d. reforma agraria, e. penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani.

Dari penjelasan pendekatan tersebut diatas sangat jelas bahwa point-point penting dalam dokumen Nawacita menguraikan konsep dan strategi kedaulatan pangan sebagaimana pemikiran yang berkembang dan menjadi agenda internasional.

3. Rekomendasi Internasional Keamanan Pangan

Selain Kedaulatan dan ketersediaan pangan untuk men capai bangsa yang sehat diperlukan satu keamanan pangan yang selamat untuk dikonsumsi. Kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan yang aman secara internasional diatur dalam Perjanjian Internasional dalam Konfrensi ke-11 *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang diselenggarakan pada tahun 1961 telah menyepakati resolusi dalam pembentukan Komisi *Codex Alimentarius*. Tujuan utama pembentukan komisi ini adalah untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan praktek yang adil dalam perdagangan Pangan. Dalam *Komisi Codex Alimentarius* ditetapkan pula formula standar makanan seperti residu

pestisida, zat aditif pada makanan, residu obat hewan, kebersihan, makanan yang terkontaminasi, radio nuklida dan pelabelan.

Negara-negara penghasil residu pestisida mencoba menghambat perdagangan pangan dalam negeri mereka dengan alasan *Sanitary and Phytosanitary* atas produk dari negara lain yang terindikasi tercemar residu pestisida. Namun produksi dan keuntungan perusahaan penghasil residu pestisida tersebut berasal dan mengalir ke negara produsen, meskipun perusahaan tersebut membuka kantor cabang di beberapa negara asia seperti produsen Aventis dari Prancis memiliki kantor cabang di Cina, Indonesia, India, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Srilanka, Taiwan, dan Vietnam [Devlin M. Kuyek, 1999- 6]

Hasil negosiasi tentang pentingnya keamanan pangan ini kemudian disepakati dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi perdagangan Dunia (WTO) di Maroko pada tanggal 1 Januari 1995. Dua Perjanjian penting yang menyangkut tentang keamanan pangan antara lain penerapan tindakan yang berhubungan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan hambatan teknis dalam perdagangan atau *Technical Barrier to Trade* (TBT), dan *Agreement on Agriculture* (AoA). Masing masing bidang memiliki comite seperti *Committee on Agriculture* (CoA) dan *Committee on Sanitary and Phytosanitary* [Yusuf Adiwibowo: 2010- 69]

Pemberian standard dalam perdagangan disebut dengan *Technical Barrier to Trade* atau *standards Code*. Sedangkan untuk keamanan, lebih mengarah pada hasil pertanian yang tujuannya untuk mengatur kebijakan yang terkait erat dengan perlindungan kesehatan makanan (*food safety*), hewan/ binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang biasa disebut dengan *Sanitary and Phytosanitary*. Pemberian standar dan keamanan dalam perdagangan diatur dalam artikel 20 GATT memberikan wewenang pada pemerintah untuk memberikan standar dalam regulasi teknis dengan tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan. Hal ini sejalan dengan Pasal XX (b) GATT yang berisi:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health [<http://www.wto.org/article20> , diakses 2017]

Standar yang lazim dilakukan selama ini seperti *International Organization for Standardization*, dilakukan dalam bentuk seri yang berhubungan dengan sistem mutu yaitu ISO seri 9000, ISO 14000, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), QMP, Program Cleaner Production, dan Program Responsibility Care. Penaksiran resiko dan penetaan tingkat perlindungan *Sanitary and Phytosanitary* yang layak dilakukan sebagai standar yang digunakan untuk penegakan hukum [GATT 1996].

Keamanan pangan WHO karena kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkannya. Bagi negara-negara anggota PBB wajib mengaksesi dan mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka. Dalam upaya tersebut terlihat peraturan perundang-undangan negara anggota PBB dan WTO melaksanakan aturan tentang keamanan pangan secara harmoni, mulai dari Konstitusi PBB, WHO, FAO dan WTO.

Di Indonesia secara nasional juga telah meratifikasi beberapa ketentuan internasional tersebut dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai amanah dan rekomendasi Dunia . Dalam Pasal 69 UU Pangan, diuraikan antara lain: a) Sanitasi Pangan, yaitu upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. ruang lngkup sanitasi meliputi kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan; b) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; c) Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; d) Pengaturan terhadap iradiasi pangan; e) Penetapan standar kemasana Pangan; f) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; e) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Permenkes No: 258/Menkes/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. Peraturan menteri kesehatan ini juga mengedepankan rezim perijinan dan pelarangan ini sebagai upaya serius dalam penanggulangan keamaan pangan.

Selain itu UU No: 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman juga telah ditetapkan bahwa pestisida yang akan diedarkan di Indonesia wajib terdaftar dan memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, dan diberi label. Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan dalam PP No: 7 Tahun 1973, ditegaskan bahwa pestisida harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian. Hanya pestisida

yang telah terdaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian yang boleh diedarkan, disimpan, dan digunakan dalam wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah melalui Permentan Nomor :24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, Permentan No: 43/Kpts/SR.140/9/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik dan Permentan No: 70/Kpts/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian selaku pintu masuk dan keluarnya izin pendaftaran pupuk dan pestisida sesuai dengan tupoksinya melakukan Koordinasi Perizinan Pupuk dan Pestisida dengan instansi terkait, Ijin ini diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum [Kosim Adisapoetra :1978- 72].

Keamanan pangan yang menjadi isu internasional ditandai dengan banyaknya hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara maju atas produk pangan karena terindikasi ancaman bagi masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Hambatan itu pernah dialami oleh Indonesia dengan larangan impor makanan laut karena diindikasikan terdapat residu zat aktif secara farmakologi oleh Uni Eropa dengan Keputusan Komisi 2010/220/EU pada tanggal 16 April 2010 [<http://www.reading.ac.uk/foodlaw/f-eu-law.htm> 2012]

Bahkan di Amerika Serikat pada Tahun 2011, presiden Barak Obama menandatangani UU baru mengenai FDA yaitu merupakan badan yang berada di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat. FDA bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin keamanan, khasiat dan keamanan obat-obatan manusia dan hewan, produk biologi, peralatan medis, suplai makanan untuk negara, kosmetik dan produk radiasi, dan mengatur pembuatan, pemasaran dan distribusi produk tembakau.

FDA juga bertanggung jawab untuk memajukan kesehatan masyarakat dengan membantu mempercepat inovasi untuk membuat obat- obatan dan makanan lebih efektif, aman dan terjangkau, dan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat berbasis ilmiah untuk obat-obatan dan makanan, dan untuk mengurangi penggunaan tembakau untuk meningkatkan kesehatan.[<http://e-resources.pnri.go.id/library.php?id=10000&key=Food+Safety+Modernization+Act>]

Penyakit dalam makanan dan menyebabkan kematian seperti yang disebabkan *avian influenza* (flu burung) dan virus *E.coli* pada bayam dan sayuran lainnya, *Salmonella enteritidis* dalam telur, antraks, cemaran aflataksin pada jagung dan kacang tanah, dan mikroba patogen lainnya [J. Glenn Morris : 2011]. Salah satu pemicu penyebaran bahaya virus, mikroba patogen dan residu pestisida dalam makanan dan untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan pelibatan industri benih, pupuk, pestisida, dan gencarnya promosi membuat penggunaan pestisida dan cemaran residu aktif lainnya tak dapat dipisahkan dalam sistem pertanian.

Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang dilakukan secara terus menerus menyebabkan unsur hara (Unsur hara adalah senyawa atau nutrisi organik atau anorganik yang ada di dalam tanah. Unsur hara sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman. Unsur hara yang pokok bagi tanaman adalah unsur Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) [Hardjowigeno S: 1987]. Selain itu pestisida bersifat bioaktif yang artinya pestisida dengan satu atau beberapa cara mempengaruhi kehidupan, misalnya menghentikan pertumbuhan, membunuh hama, menekan hama, mengatur tumbuhan tanaman serta mengeringkan atau merontokkan daun. Karena bersifat bioaktif maka pestisida mengandung bahaya baik terhadap manusia maupun lingkungan. [Panut Djojosumarto, 2008 h.18].

Sebagai upaya untuk melindungi rakyat dari bahaya virus, mikroba patogen dan residu pestisida yang terkandung dalam makanan, maka dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.*

4. Tantangan Dan Upaya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Tidak dapat dipungkiri perjuangan panjang telah dilakukan bangsa ini menuju ketahanan pangan nasional, makin terasa kompleks pasca Indonesia meratifikasi Asean Charter yang dalam bentuk UU No 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya gugatan Pengujian UU No 38 Tahun 2008 Ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai macam NGO serta organisasi kemasyarakatan petani

karena berbagai masalah kemudian dirasakan merugikan hak konstitusional para pemohon khususnya petani Indonesia [2013:484]. Forum Petani Nasional dalam rangka refleksi menuju konsolidasi petani seluruh Indonesia.

Forum ini dihadiri oleh 13 organisasi petani seluruh Indonesia yang menyimpulkan bahwa, ada sembilan masalah pokok yang dihadapi oleh petani di Indonesia, yaitu: (a) kepemilikan lahan yang dimiliki petani sangat sempit, rata-rata 0,3 Hectar per Rumah Tangga Petani, (b) akses air yang sulit, selain karena kekeringan yang semakin sering terjadi juga karena privatisasi sumber-sumber air oleh pemilik modal, (c) kebijakan perbenihan nasional yang diskriminatif terhadap kreatifitas petani pemulia benih, (d) belum ada jaminan perlindungan harga yang adil bagi di tingkat petani, sehingga pasar dimonopoli oleh pemodal besar dan korporasi pertanian, (e) sulitnya akses permodalan untuk petani di pedesaan, sehingga banyak petani yang tergantung pada tengkulak atau rentenir, (f) lemahnya dukungan pemerintah dalam mendukung infrastruktur pertanian (irigasi, jalan, teknologi tepat guna) dan saprodi kepada petani, (g) terjadi ledakan hama yang sulit dikendalikan oleh petani, karena iklim yang ekstrim, sehingga masa tanam ke-2 banyak petani gagal panen, (h) masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia akibat revolusi hijau di masa lalu, dan (i) rendahnya keterlibatan organisasi petani terhadap perencanaan, kebijakan dan pembangunan pertanian di Indonesia.

Atas dasar kondisi tersebut diperlukan upaya dan langkah sebagai solusi dalam mendukung upaya kedaulatan dan ketahanan pangan. Oleh sebab itu dari perbandingan antara kondisi riil dilapangan dan pada tataran normatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan, maka banyak terjadi sebuah pengingkaran terhadap produk- produk dalam negeri kita. Politik hukum tentang pangan nampaknya sudah jauh masuk kedalam tataran ekonomi liberal. Ini secara langsung akan berdampak pada krisis pangan nasional dan juga akan berdampak kerusakan lingkungan masuknya tanaman dan hasil tanaman serta bahan lain harus sesuai dengan aturan, mengikuti ketentuan berikut.

- a. Negara update database produk pangan dalam negeri, untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.
- b. Negara memfiltrasi dalam hubungan pemasukan tanaman, produk tanaman atau bahan lain yang masih bisa dipenuhi sendiri oleh sistem pertanian nasional
- c. Negara harus menolak terhadap bahan tanaman impor yang bisa merugikan petani lokal.

Untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) seperti monopoli dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah secara langsung yang digunakan untuk melindungi petani lokal dan konsumen. Dalam hal perlindungan terhadap petani lokal maka pemerintah melakukan penetapan harga minimum atau harga dasar produk kebutuhan pangan. Pemerintah juga melindungi konsumen maka pemerintah menetapkan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) agar sesuai dengan daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut.

Intervensi tidak langsung juga dilakukan melalui kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Artinya komoditas luar negeri harus dikenakan pajak lebih tinggi dari pada produk lokal, dan jangan sebaliknya. Sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli hasil produk lokal. Berbagai macam tantangan untuk dapat memenuhi permintaan pangan, bukan hanya berasal dari kelangkaan pangan, akan tetapi juga ada faktor lain yang disebabkan karena kurang meratanya distribusi pangan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, harus mengembangkan gagasan untuk membuat strategi yang dapat mengintegrasikan aspek-aspek kebijakan pertanian dan produksi pangan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Maka dengan disyahnanya Undang Undang 18 tahun 2012 tentang pangan yang menggantikan Undang Undang No. 7 tahun 1996. Undang-Undang tersebut memberikan media berupa mekanisme menuju swa-sembada pangan dan menekankan pentingnya kedaulatan pangan nasional. Undang Undang Pangan yang baru tersebut juga berfungsi sebagai dasar hukum yang memadai dalam upaya mengatur, perencanaan, ketersediaan, harga komoditas, nutrisi dan konsumsi, keamanan, periklanan, pemberian label pada produk, dan institusi pangan serta partisipasi publik dan pengimplementasian kebijakan.

Upaya reformasi kebijakan pertanahan dan agraria juga telah menjadi salah satu agenda utama dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia sejak tahun 1960an. Pada tahun 2009, DPR RI telah mensahkan Undang Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang Undang Pangan tersebut juga mengamanatkan sebagai upaya adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional. Saat ini,

ada tiga lembaga pangan di Indonesia, yaitu Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang diketuai oleh Presiden, Badan Ketahanan Pangan (BKP) di bawah Kementerian Pertanian, dan Perum BULOG. Perlu ditekankan bahwa ketersediaan pangan bukan hanya merupakan persoalan sosial-ekonomi belaka, akan tetapi lebih jauh lagi adalah mengenai keamanan nasional. Selain itu Indonesia juga harus lebih mandiri dalam memastikan ketersediaan pangan dan mencapai ketahanan pangan. Sehingga pangan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai komoditas politik atau komoditas bisnis, tetapi akses terhadap kecukupan pangan merupakan hak mendasar bagi seluruh manusia di dunia, lebih khusus adalah rakyat.

Pangan dan keamanan merupakan kebutuhan asasi manusia. Pasal 28A yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Pasal 40 PBB menjamin bahwa, "*Setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang memadai untuk hidup sehat dan sejahtera bagi diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pelayanan sosial, hak keamanan kerja, sakit, orang lumpuh, janda, usia lanjut....*" Untuk memperkuat pernyataan Deklarasi PBB tersebut, maka PBB pun mengeluarkan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan *International Covenant In Economic, Social and Cultural Rights* [Muladi 2013].

5. Upaya Berbagai Negara Dalam mengatasi Masalah Pangan

Di negara-negara berkembang ada kecenderungan untuk meningkatkan proteksionisme di bidang pertanian, untuk melindungi petani lokal dari subsidi yang ditawarkan di negara-negara kaya [Bank Dunia, 2008]. Menurut Chilton, Chyatte dan Breaux (2007), jelas bahwa di negara maju, yang memiliki program infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendapatan dan investasi yang lebih besar dalam pendidikan daripada rata-rata global, dampak malnutrisi tampak jelas karena perbedaan ini.

Dari beberapa penelitian yang ada di negara yang disurvei menggunakan bank makanan [Rush, 2009; SIGNAL, 2001], yang menjalankan peran utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat rentan dan mendistribusikan kembali makanan surplus, berinteraksi antara keamanan pangan dan kebijakan sosial, terutama hubungan antara kesehatan, gizi dan hak asasi manusia atas makanan. Pertumbuhan internasional bank makanan di negara-negara dunia pertama menimbulkan pertanyaan penting, tidak hanya

mengenai ketahanan pangan tetapi juga untuk diskusi mengenai arah reformasi kesejahteraan dan kebijakan sosial saat ini [Riches, 2002].

Di Australia, Strategic Inter-Governmental Nutrition Alliance [SIGNAL, 2001] telah mengembangkan dua pedoman strategis untuk mencapai ketahanan pangan: dengan memperbaiki nutrisi kelompok rentan dan; memerangi hambatan struktural terhadap makanan yang sehat dan aman, seperti investasi teknologi dalam produksi pangan dan pengurangan limbah, penyertaan dan investasi sosial di bidang pendidikan [Australian Public Health Association, 2009; SINAL, 2001; Kemitraan Kesehatan Masyarakat Nasional, 2001].

Program: Program Bantuan Nutrisi Tambahan [SNAP], yang berusaha membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk membeli makanan; Makanan Sekolah, yang terdiri dari penyediaan makanan dengan harga mahal di sekolah umum; Program Distribusi Makanan, yang wajib untuk makanan bagi orang tua, penduduk miskin, wanita hamil dan menyusui serta orang berpenghasilan rendah; program Perempuan, Bayi dan Anak yang memberikan dukungan bagi perempuan, bayi dan anak-anak; Program Makanan Anak dan Dewasa, yang menyediakan makanan bergizi di tempat penampungan dan daerah miskin.

Di Malaysia, penyebab utama kurangnya akses terhadap makanan, kekurangan gizi dan kerawanan pangan adalah tingkat populasi berpenghasilan rendah [Belik, 2003; Dunee and Edkins, 2008; Sharif and Merlin, 2001; United Nations Pengembangan Program, 2005; Rocha, 2009]. Dengan demikian, harga pangan merupakan faktor penentu ketahanan pangan di negara-negara ini [Dunee and Edkins, 2008; United Nations Development Program, 2005]

Di Brasil yang dilakukan oleh Hoffmann [2008] ke dalam faktor-faktor penentu kerawanan pangan di Brasil, menunjukkan bahwa: a) kemungkinan kerawanan pangan berkurang di tempat tinggal pedesaan, dengan kegiatan pertanian, kehadiran orang-orang berusia di bawah 18 tahun di rumah dan sekolah dari orang-orang yang referensi, b) kemungkinan meningkat ketika orang tersebut kelompok produktif, wanita memiliki pekerjaan informal dan c) faktor penentu yang paling penting adalah pendapatan keluarga per kapita yang rendah. Program Perolehan Pangan dikembangkan oleh pemerintah Brasil sebagai sarana keamanan pangan yang berkelanjutan, dengan tujuan mendorong pertanian keluarga. dengan Pemnafaatan lahan pekarangan rumah .

Di Afrika Selatan, walaupun kebanyakan keluarga bergantung pada industri pengolahan makanan dan makanan ritel untuk memenuhi kebutuhan mereka, pertanian subsisten atau konsumsi rumahan dianggap sebagai komponen penting dari ketahanan pangan [Human Sciences Research Council, 2004; Watkinson dan Makgetla: 2002]. Kerawanan pangan pada tahun 2015 melakukan tindakan : untuk meningkatkan produksi dan distribusi makanan , meningkatkan pendapatan dan gizi penduduk dan keamanan pangan; meningkatkan kesempatan kerja. Program keamanan pangan lainnya di Afrika Selatan adalah Program Nutrisi Sekolah Nasional, yang bertujuan untuk memberi anak-anak miskin setidaknya satu kali makan sehari, dan untuk mempromosikan pembangunan lokal dan menciptakan lapangan kerja dengan menawarkan makanan sekolah [Republic of South Africa, 2009].

Di Malaysia, program makan siang sekolah, seperti Skema Makanan Tambahan dan Program Susu Sekolah juga dianggap penting dalam memerangi kelaparan. Selain itu ada Program Pangan dan Gizi Terapan (AFNP), yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan memperbaiki pendidikan gizi, kesehatan dan pendidikan dasar dengan memperbaiki gizi ibu, bayi dan anak-anak [United Nations Development Program, 2005].

Di China [Huang dan Rozelle, 2009, India dan Ekuador oleh Farrow et al., 2005] kerawanan pangan terkonsentrasi di daerah-daerah dengan kelompok-kelompok besar kemiskinan. Banyak 50% populasi dunia yang terkena dampak kelaparan di India, di mana tingkat kerawanan pangan adalah 35%. Hampir 9 dari 10 wanita hamil berusia antara 15 dan 49 tahun menderita kekurangan gizi dan anemia dan lebih dari setengah anak-anak berusia di bawah 5 tahun memiliki tingkat kesehatan yang rendah atau gizi buruk sedang sampai berat. China memiliki 15% populasi kurang gizi di dunia, hampir 123 juta orang. Namun demikian, tingkat malnutrisi (9% populasi pada 2003-05) lebih rendah dari yang ditemukan di Asia dan Pasifik (16% populasi pada 2003-05) [FAO, 2008].

Organisasi internasional seperti WFP, badan kemanusiaan terbesar untuk memerangi kelaparan dunia. Ini juga memiliki program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan logistik dan integrasi antara anggota rantai pasokan. WFP bekerja dengan pemerintah dalam upaya untuk mempromosikan pengembangan kapasitas nasional untuk membangun ketahanan pangan dengan mendanai berbagai program distribusi makanan [WFP, 2009, 2007].

Indonesia juga telah memiliki program yang paling komprehensif yaitu Program Makan Tambahan yang bertujuan untuk menyediakan makan siang sekolah untuk siswa sekolah dasar, dan Sistem Distribusi Publik Target (TPDS), yang mensubsidi pembelian makanan dengan harga lebih rendah kepada keluarga berpenghasilan rendah. Layanan Pengembangan Anak Terpadu [ICDS] adalah program terbesar untuk mempromosikan kesehatan, pendidikan dan gizi di kalangan perempuan dan anak-anak dan bekerja sama dengan Bank Dunia, Koperasi untuk Bantuan dan Bantuan di Mana-mana Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa [UNICEF] dan WFP, program ini bertujuan untuk mendistribusikan suplemen makanan, mempromosikan pendidikan prasekolah, imunisasi, perawatan kesehatan dan pemantauan pertumbuhan [WFP, 2009,]

Sudah banyak kegiatan yang mengatas-namakan “Pemberdayaan Masyarakat” untuk mengentaskan kemiskinan ini mulai dari: BUTSI, SP3 (Depdikbud), SP2W (Bappenas), TKPMP (Depnaker), FK (Depdagri). PPK dan P2KP yang sekarang menjelma menjadi PNPM MP, dirana pertanian sekarang sedang di implementasikan program “Desa Mandiri Pangan”. Sementara itu juga ada banyak program-program lain yang diimplementasikan oleh Lembaga-lembaga non pemerintah (NGO) baik lokal, nasional maupun international. Pemberdayaan Masyarakat sangat sering diucapkan setiap kali ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah tadi. Pemberdayaan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat dan desa. Upaya pemberdayaan masyarakat harusnya dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian.

[Menurut Tjakrawardaya 2009] Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedang sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Yaitu menjadi masyarakat atau kelompok miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. termasuk memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beberapa upaya untuk memberdayakan masyarakat pedesaan umumnya sebagai upaya membebaskan masyarakat dari kemiskinan, utamanya pada aras usaha mikro di pedesaan, diharapkan dapat memberikan 4 (empat) akses minimal, yaitu, akses pada sumberdaya, teknologi, informasi dan sumber pembiayaan [Marjono, 2009]. Tak pelak lagi untuk memberdayakan masyarakat hal yang mutlak harus Kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan dan kegiatan lainnya agar mereka mampu mempunyai akses terhadap sumberdaya, teknologi, informasi dan sumber pembiayaan. Efek lanjutannya melalui *pemberdayaan* agar masyarakat mampu mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Tak kalah penting juga, masyarakat diberikan kesempatan menentukan pilihan terhadap program pembangunan untuk mereka, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Sehingga program pembangunan tersebut tidak akan menciptakan ketergantungan iaitu dengan Perubahan Perilaku Masyarakat [Kurt Lewin (1970) berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong (*driving forces*) dan kekuatan-kekuatan penahan (*restrining forces*). Perilaku ini dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut didalam diri seseorang. Bila Kekuatan-kekuatan pendorong meningkat dan kekuaktn penahan menurun akan terjadi perubahan perilaku. Hal ini terjadi karena adanya stimulus-stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku. Stimulus tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan atau informasi-informasi, ataupun regulasi sehubungan dengan perubahan perilaku yang dikehendaki. Sedangkan faktor-faktor penahan yang ada dimasyarakat sendiri dapat berasal dari adat istiadat, tabu dan norma-norma warisan nenek moyang, dan juga kepentingan individu yang akan menghalangi adanya perubahan perilaku. Kesemua faktor tersebut akan sangat susah dikurangi bila tidak dengan upaya yang terus menerus dan adanya dukungan dari semua pihak, baik pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri sebagai suatu sistem.

Penutup

Semakin rendah pendapatan negara, semakin rendah tingkat investasi teknologi. Pertanian mulai muncul sebagai faktor penting dalam ketahanan pangan .Semakin rendah pendapatan negara, pertanian menjadi semakin kritis, karena negara tersebut tidak

memiliki cukup pendapatan untuk mengimpor makanan dan juga berinvestasi pada teknologi dan produktivitas. Dengan demikian, kebijakan publik yang mempromosikan distribusi pendapatan antar negara diperlukan. Investasi internasional dalam teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di negara-negara ini sangat penting untuk mempromosikan ketahanan pangan. Kebijakan *Agri-food*, dengan memperbaiki kesehatan penduduk dan membantu memerangi kelaparan, kemiskinan, kekurangan gizi dan kematian anak, juga menyediakan lapangan kerja dan pendapatan, memindahkan, merampingkan dan memanfaatkan ekonomi, memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Kebijakan makanan, dilakukan di tingkat nasional dan internasional untuk membuat makanan sehat lebih mudah diakses oleh penduduk berpenghasilan rendah. Untuk ini, perlu menggabungkan kebijakan pertanian, kebijakan harga, tindakan pengaturan dan pendidikan konsumen Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, universitas dan industri makanan. Kebijakan kompensasi, meski kurang memiliki efektivitas jangka panjang, memainkan peran penting dalam mengintegrasikan bagian populasi yang berada pada margin konsumsi karena faktor historis. Namun, mengingat ketidakteraturan konsumsi dan program distribusi makanan yang dilakukan setiap bulan harus dilakukan lebih sering dan menekankan distribusi makanan sehat untuk dilakukan. mereka lebih mudah diakses keluarga dalam situasi keresahan pangan. Selain kebijakan kesejahteraan masyarakat, kebijakan berkelanjutan untuk memerangi kerawanan pangan, yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial melalui investasi di bidang pendidikan dan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan.

Daftar Pustaka

- Agoramoorthy C. (2008) "Can India meet the increasing food demand by 2020?", *Futures*, 40/5: 503–506.
- Amerika Serikat (DS-406) (*Jurnal IUS 2013*) 180, 234
- Beauregard, S. and R. Gottlieb. 2009. *Food Policy for People: Incorporating Food Sovereignty Principles Into State Governance: Case studies of Venezuela, Mali, Ecuador, and Bolivia*. April 2009. Los Angeles: Urban and Environmental Policy Department, Occidental College.
- Belik W. (2003) "Perspectivas para a segurança alimentar e nutricional no Brasil", *Revista Saúde e Sociedade*, 12:12-20.

- Chilton M, Chyatte M., and Breaux J. 2007. "The negative effects of poverty & food insecurity on child development", *Indian Journal Med Res*, 126: 262-272.
- Caballero B, and Popkin BM(2002) The nutrition transition: diet and disease in the developing world. London: Academic Press.
- Candel, J.J.L. (2014). Food security governance: A systematic literature review. *Food Security*, 6, 585-601, DOI: [10.1007/s12571-0140-0364-2](https://doi.org/10.1007/s12571-0140-0364-2)
- Dunne J.P., and Edkins B. (2008) "The demand for food in South Africa", *South Africa Journal of Economics*, 76:104-117.
- Devlin M. Kuyek,(1999.6) Yang Diuntungkan Dari Bisnis Racun Industri Pestisida Yayasan Duta Awan
- De Janvry A., and Sadoulet E.(2000) "Rural poverty in Latin America: determinants and exit paths", *Food Policy*, 25.
- Edelman, 2014a, hal.967). FAO (Edelman, M. (2014a). Food sovereignty: Forgotten genealogies and future regulatory challenges. *The Journal of Peasant Studies*, 41(6), 959-978, DOI.
- Enz, A.C, Kosova, R., dan Lomanno, M., (2011), "The Impact of Terrorism and Economic Shocks on U.S. Hotels", *Cornell Hospitality Report*, Vol. 11, No. 5, dikutip dari Kapiki (2012), h. 20.
- Farrow A, Larrea C, Hyman G, and Lema G. (2005) "Exploring the spatial variation of food poverty in Ecuador", *Food Policy*, 30: 510-531.
- Gill G.J., Farrington J., Anderson E., Luttrell C., Conway T., Saxena N.C., and Slater R (2003) "Food security and the Millennium Development Goal on hunger Asia". Overseas Development Institute, London.
- Huang, J., and Rozelle, S.(2009)" Agriculture, food security, and poverty in china: past performance, future prospects, and implications for agricultural R&D policy". *International Food Policy Research Institute (IFPRI). Center of Chinese Agricultural Policy*.
- Hoffmann R. (2008) "Determinantes da Insegurança Alimentar no Brasil: análise dos dados da PNAD de 2004", *Segurança Alimentar e Nutricional*, 15/1: 49-61
- Hardjowigeno S., Ilmu Tanah (1987) Akademika Pressindo h. 25.
- Grossman Michael.(1972) The demand for health: theoretical and empirical investigation. New York: Columbia University Press.
- J. Glenn Morris, (2011) How Safe Is Our Food, *Emerging Infectious Diseases* h. 17
- IPC[International Planning Committee] 2006. International Planning Committee for Food Sovereignty. IPC Focal Points.
- Kosim Adisapoetra, (1978) Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara ,Pradnya Paramita h. 72.
- Muladi, Human Rights And Human Responsibility (PDIH UNDIP 2008) 1-2, Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian: Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat dalam

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial (Vol 3, no 2, *Jurnal Ilmu Hukum* 2013) 135).

Panut Djojosumarto, Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian (2008) PT. Agromedia Pustaka h. 18.

Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Rush E. (2009). "Food security for pacific people in New Zealand". *A report for the ObesityAction Coalition*.

Riches G (2002) "Food Banks and Food security: welfare reform, human rights and social policy", *Lesson from Canada. Social Policy & Administration*, 36 /6: 648-663.

Rocha, C. (2009) "Development in National Policies for Food and Nutrition Security in Swaminathan M.S. 2001. "Food security and sustainable development", *Current Science*, 81/8: 948-954

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research methods for business students*. (5th ed.). Essex. Pearson Education Limited.

Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

World Health Organization. 2002 *Health and human right*. Geneva: *Publication Series Issue No.1 WHO/PAHO*

Organisasi dan Kementerian :

Brazil", *Development Policy Review* 27/1: 51-66.

Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 23 tahun 1992

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementan (Kementerian Pertanian) 2013. Rencana Kerja Kementerian Pertanian 2014. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Kementan (Kementerian Pertanian) 2014. Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015–2045: Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian

Kementan (Kementerian Pertanian). 2015. Rencana Kerja Kementerian Pertanian 2016. Disampaikan pada *Pra-Musrenbangtannas* 2015. Jakarta, 12 Mei 2015

McKeon, N. (2015). *Food security governance: Empowering communities, regulating corporations*.

World Health Organization. *Healthy public policy adelaide recommendation*. Geneva: 1988.

World Health Organization. *The Jakarta declaration on leading health promotion into the 21st century*. Geneva: 1998

World Food Program 2007. Country programs: India (2008-2012). World Food Program. 2009. Ecuador overview. <http://www.wfp.org/countries/ecuador>.

GATT Agreement, Sanitary and Phytosanitary Agreement, 1996

Peraturan Perundangan :

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan .

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Internet :

Food and Agricultural Organization of The United Nations. 2008. "The state of food insecurity in the world 2008: High food prices and food security – threats and opportunities". <http://www.fao.org/docrep/011/i0291e/i0291e00.htm>.

Food and Agriculture Organization of The United Nations. 2006. "The state of food insecurity in the world 2006: eradicating world hunger– taking stock ten years after the World Food Summit". <http://www.fao.org/docrep/009/a0750e/a0750e00.HTM>.
Acesso em: 22 maio 2009.

Food and Agricultural Organization of The United Nations (FAO). 2009. Food security statistics. <http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/>.

Republic of South Africa.2009. "Situational analysis of children in South Africa". http://uscdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/20875_orc.pdf.

Strategic Inter-Governmental Nutrition Alliance.(SIGNAL 2001)." Food security for all building healthier communities". Food Chain (5). <http://www.nphp.gov.au/workprog/signal/foodchain/fdchain5.pdf>.

United Nations Development Programme .2005. "Malaysia: Achieving the millennium development goals". <http://www.epu.jpm.my/New%20Folder/publication/UNDP1.pdf>.

ANALYSIS OF EFFECT LABOR ABSORPTION IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES TO POVERTY IN INDONESIA

Lia Amaliawiati, Farida Nursjanti

Surel:

lia.amaliawiati@widyatama.ac.id

farida.nursyanti@widyatama.ac.id

Universitas Widyatama, Bandung

ABSTRAK

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha penting bagi perekonomian Indonesia, karena sebagian besar usaha di Indonesia (99%) merupakan UMKM dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 57,87% selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016), selain itu UMKM telah mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sebanyak 97,69% selama kurun waktu 5 tahun tersebut. Penyerapan tenaga kerja yang besar tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, jika dilihat dari nilai penyerapan tenaga kerja di sector UMKM mengalami trend yang menurun selama kurun waktu 5 tahun 2012-2016 dan hal ini diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan, hal tersebut mencerminkan bahwa antara penyerapan tenaga di sector UMKM mempunyai hubungan yang searah dengan tingkat kemiskinan, dan selanjutnya dikhawatirkan ketika penyerapan tenaga kerja di sector UMKM naik maka tingkat kemiskinan juga meningkat, oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh penyerapan tenaga kerja di sector UMKM terhadap tingkat kemiskinan. Model yang digunakan untuk menganalisis hubungan tersebut adalah multiple regresi dan memasukan variable dummy. Data yang digunakan adalah data time series dari data sekunder mulai tahun 2000 sampai dengan 2016. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dan menunjukkan rata-rata kemiskinan sesudah krisis global 2008 lebih rendah dibandingkan sebelum tahun 2008.

Kata kunci: kemiskinan, penyerapan tenaga kerja UMKM, pengangguran, inflasi

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi (Gebremariam, Gebremedhin & Jackson dalam Agyapong, 2012; Katua, 2014; Subhan dan Mehmood, 2013). Keberadaan UMKM memiliki banyak peran lainnya, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat (Alauddin dan

Chowdury, 2015; Aremu dan Adeyemi 2011; Katua 2014), mengurangi kesenjangan pendapatan (Ali, 2013) dan dapat mengurangi inflasi (Priyanath dan Premaratne, 2014). Beberapa peneliti lainnya, yaitu Alauddin dan Chowdury (2015), Mukras dalam Agyapong (2010), Oba and Onuoha (2013), Omalara (2012) serta Zacheus dan Omoseni (2014) menyatakan bahwa UMKM dapat membantu penurunan tingkat kemiskinan.

UMKM merupakan sektor yang dapat bertahan ketika Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi tahun 1997 dan krisis global tahun 2008 karena UMKM mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar, diantaranya adalah UMKM menggunakan input yang berasal dari sumber daya lokal. Ketika terjadi krisis yang berdampak pada nilai mata uang rupiah (depresiasi rupiah) dan berakibat pada naiknya harga input produk (biaya produksi menjadi naik), kegiatan usaha sektor UMKM relatif tidak terkena dampak besar. Sebagian UMKM pada saat krisis bahkan mulai mencoba untuk masuk ke pasar global karena menurunnya permintaan dalam negeri (Kuswantoro et al., 2012).

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan perusahaan besar (Akira dalam Kuswantoro et al. 2012.; Alauddin dan Chowdury, 2015; (Subhan dan Mehmood, 2013; Oba dan Onuoha, 2013) dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan (Alauddin dan Chowdury, 2015; Katua, 2014; Lawal et al., 2014). Zacheus dan Omoseni (2014) mengungkapkan bahwa UMKM dapat mengurangi pengangguran.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Agyapong (2010) mengungkapkan bahwa kontribusi UMKM pada penyerapan tenaga kerja melebihi 65% di negara maju dan kontribusinya lebih dari 95% di negara berkembang. Berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), diungkapkan pula besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu sebesar lebih dari 55% di negara maju dan melebihi 70% di negara berkembang.

Perkembangan UMKM dan kontribusi pada PDB di Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Perkembangan UMKM dan Kontribusi UMKM pada PDB

Tahun	Jumlah UMKM		Kontribusi UMKM terhadap PDB	
	(unit)	Pangsa (%)	(Miyar Rp.)	Pangsa (%)
2009	52.764.750	99,99	2.969.346,2	56,18
2010	54.114.821	99,99	3.411.574,7	56,22
2011	55.206.444	99,99	4.321.830	58,05
2012	56.534.592	99,99	4.869.568,1	59,08
2013	57.895.721	99,99	5.440.007,9	60,34

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI

Dari Tabel 1. terlihat bahwa hampir seluruh usaha perekonomian Indonesia adalah UMKM dengan pangsa mencapai 99,99% dan kontribusi UMKM terhadap PDB rata-rata mencapai 58% dalam kurun waktu 5 tahun (2009 s.d 2013), sehingga dapat dikatakan bahwa usaha yang menggerakkan roda perekonomian dan yang menjadi pilar utama usaha di Indonesia adalah UMKM. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa UMKM merupakan usaha yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keunggulan sektor UMKM lainnya adalah terserapnya tenaga kerja yang cukup besar dibandingkan dengan sektor usaha besar, dapat terlihat dari tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2. Penyerapan tenaga kerja UMKM dan Usaha Besar di Indonesia

Tahun	Penyerapan tenaga kerja UMKM (%)	Penyerapan tenaga kerja Usaha Besar (%)
2009	97,28	2,72
2010	97,27	2,73
2011	97,24	2,76
2012	97,16	2,84
2013	96,99	3,01

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI

Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa sektor UMKM selama kurun waktu 5 tahun tersebut telah menyerap tenaga kerja rata-rata 97,19% yang menunjukkan bahwa sektor UMKM berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat sehingga upaya untuk memajukan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM ini akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya UMKM dapat memberikan kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada di Indonesia dan harus ditanggulangi secara tepat karena tercatat nilainya masih tinggi seperti terlihat pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Kemiskinan di Indonesia

TAHUN	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
2009	31,53	14,15
2010	31,02	13,33
2011	29,89	12,49
2012	28,19	11,96
2013	28,55	11,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan data Tabel 3. jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan nilai yang tinggi dengan rata-rata sebanyak 29,836 juta orang dan tingkat kemiskinan rata-rata 12,68% selama kurun waktu 5 tahun (2009 s.d 2013), namun jika dilihat dari perkembangannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin sebanyak 31,53 juta atau setara 14,15% di tahun 2009 telah mengalami penurunan terus-menerus setiap tahunnya sehingga di tahun 2013 mencapai 28,55 juta atau sebesar 11,47% dan mengalami penurunan rata-rata 1% setiap tahunnya meskipun belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai pendapatan bertambah banyak dan hal ini tidak terlepas dari semakin banyak terserapnya tenaga kerja di setiap sektor usaha termasuk di dalamnya sektor UMKM, seperti yang sudah dijelaskan terdahulu bahwa UMKM merupakan sektor yang paling besar dalam penyerapan tenaga kerja (99,99% dari total tenaga kerja yang ada), hal ini dapat diyakini bahwa UMKM merupakan sektor penyumbang terbesar dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 2. dan Tabel 3. terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013 fenomena hubungan antara penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM dengan tingkat kemiskinan menunjukkan hubungan yang searah, tingkat penyerapan tenaga kerja yang menurun terus 97,28%, 97,27%, 97,42%, 97,16% kemudian menjadi 96,99% di tahun 2013 dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 14,15% , 13,33%, 12,49%, 11,96% menjadi 11, 47%. Fenomena hubungan yang searah tersebut perlu ditelusuri karena ketika penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM meningkat, semakin besar pula tingkat kemiskinan.

Permasalahan

Berdasarkan paparan pada latar belakang, identifikasi masalah yang hendak ditelaah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor UMKM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

Kajian Pustaka

Dalam berbagai definisi, kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi. Dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan adanya ketimpangan pada distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Nilai kebutuhan minimum tersebut dinamakan garis kemiskinan dan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin (BPS, 2014).

Badan Pusat Statistik (2014) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non-makanan). Dalam BPS (2014) dicantumkan pula beberapa pengertian kemiskinan, diantaranya *United Nations Development Program (UNDP)* yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, sedangkan World Bank menyatakan bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.

Bapennas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik (BPS, 2014).

Kartasamita dalam Nurwati (2008) menyatakan terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, antara lain tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan terbatasnya lapangan kerja. World Bank juga mengungkapkan beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu jenis pekerjaan, pendidikan, gender, lokasi geografis, serta akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur.

Untuk mengurangi kemiskinan, berbagai negara dan organisasi internasional menyadari pentingnya pertumbuhan ekonomi karena tingginya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Bibi dalam Putri dan Yuliarmi, 2013). Banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, antara lain penelitian yang dilakukan Ramdani (2015) yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal senada juga diungkapkan oleh Chani dan Zeman dalam Sabir dan Tahir (2012) yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan.

Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sering digunakan. Inflasi terjadi jika tingkat harga dan biaya mengalami kenaikan secara umum. Meningkatnya harga akibat inflasi akan berpengaruh pada penurunan daya beli dan pendapatan riil masyarakat (BPS, 2015). Berdasarkan sifatnya, inflasi dikelompokkan menjadi inflasi ringan, inflasi sedang, dan inflasi berat. Sabir dan Tahir (2012) juga mengungkapkan hasil penelitian Adeyemi et al. dan penelitian Chani yang menunjukkan bahwa kenaikan inflasi dapat menaikkan tingkat kemiskinan.

Verner dalam Putri dan Yuliarmi (2013) mengkaitkan kemiskinan dengan rumah tangga yang kurang berpendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan yang selanjutnya dapat membantunya terhindar dari kemiskinan. Awan et al. dalam Sabir dan Tahir (2012) menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tersebut mendukung teori bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Putri dan Yuliarmi (2013) juga menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan,

Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Menurut BPS (2014), pengangguran terbuka terdiri dari orang yang

tak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, orang yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Banyaknya pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan. Sadono Sukirno (2015) menyatakan bahwa menurunnya tingkat kesejahteraan akan menimbulkan kemiskinan. Hasil penelitian Putri dan Yuliarmi (2013) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Ramdani (2015) mengungkapkan hasil yang berbeda, yaitu tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

World Bank dalam Ayyagari et. al (2007) memandang sektor UMKM sebagai elemen inti untuk mengurangi kemiskinan. Pentingnya UMKM juga dinyatakan oleh BPS dan beberapa peneliti lainnya. Menurut BPS (2015) industri mikro dan kecil merupakan salah satu bagian dari sektor ekonomi yang memiliki peranan penting di Indonesia. Keberadaannya membantu perekonomian Indonesia untuk bangkit dari krisis ekonomi.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 4. Kriteria UKM

	ASSET	OMZET
Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta - Rp 500 juta	> Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 juta - Rp 10 milyar	> Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar

Sumber: diolah dari UU No. 20 Tahun 2008

Selain berperan penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja (Bank Indonesia, 2011). Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia, BPS menggunakan usia 15 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja.

Studi yang dilakukan Oba dan Onuoha (2013) menyimpulkan bahwa pendapatan UMKM yang ditunjukkan dengan kontribusi terhadap PDB memiliki hubungan dengan penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan. Ali (2013) yang melakukan penelitian mengenai UMKM di Pakistan juga menyatakan bahwa UMKM sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan kesimpulan Munizu (2010) bahwa keberadaan UMKM tidak hanya mengurangi kesenjangan antar golongan pendapatan tetapi juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian terdahulu mengenai kemiskinan sebagai berikut:

1. Ramdani (2015) meneliti tentang determinan kemiskinan di Indonesia dan memperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan, untuk pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
2. Pratama (2014) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi, konsumsi, pendapatan perkapita, dan IPM memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan sedangkan tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan.
3. Ali (2013) menyimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan, pendidikan, dan output UMKM berpengaruh terhadap kemiskinan di Pakistan. Inflasi tidak berpengaruh pada

tingkat kemiskinan pada jangka pendek, namun pada jangka panjang dapat meningkatkan kemiskinan.

4. Barika (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera, belanja pemerintah
5. berpengaruh negatif dan Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera.
6. Harlik, Amir, Hardiani (2013) melakukan penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di kota Jambi. Mereka menemukan bahwa secara simultan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan korelasi antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah negatif.
7. Nizar, Hamzah, Syahnur (2013), memperoleh kesimpulan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi (PDB) dan tingkat kemiskinan negatif dan signifikan. FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
8. Wahyudi dan Rejekingsih (2013) yang menganalisis kemiskinan di Jawa Tengah mendapatkan kesimpulan bahwa kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan.
9. Oba dan Onuoha (2013) yang meneliti peran UMKM di Nigeria menyimpulkan bahwa UMKM berhubungan dengan penyerapan kerja dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
10. Putri dan Yuliarmi (2013) mengkaji faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bali. Mereka memperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

11. Rusdarti dan Sebayang (2013) menemukan bahwa PDRB dan pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
12. Leasiwal (2013) yang mengkaji determinan dan karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku menemukan adanya pengaruh daya beli masyarakat, inflasi, rata-rata lama sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup serta Jumlah Sekolah Menengah Atas terhadap kemiskinan.
13. Sunusi, Kumenaung, Rotinsulu (2012) memperoleh kesimpulan bahwa tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
14. Sabir dan Tahir (2012) menemukan variabel pertumbuhan PDB dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan inflasi dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pakistan.
15. Yacoub (2012) menemukan adanya pengaruh negatif tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
16. Azami (2009) memperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
17. Hendrati dan Aprilianti (2009) yang menganalisis tingkat kemiskinan pada saat krisis di kota Surabaya menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk, investasi, subsidi ekonomi, tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM terhadap tingkat kemiskinan. Mengacu kepada beberapa penelitian mengenai tingkat kemiskinan peneliti-peneliti lain yang menunjukkan hasil yang berbeda, dalam penelitian ini juga digunakan variabel-variabel lainnya, yaitu tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

$H_0: \beta_1 \geq 0$ artinya penyerapan tenaga kerja UMKM tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

$H_1: \beta_1 < 0$ artinya penyerapan tenaga kerja UMKM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *hypothesis testing empirical study* yaitu menguji hipotesis yang ditetapkan dan menjelaskan temuan baik konsisten maupun yang tidak konsisten dengan teori dan penelitian terdahulu dengan menggunakan alternatif-alternatif teori yang ada. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara sederhana dapat disusun desain penelitian seperti di bawah ini:

1. Model tingkat kemiskinan diestimate dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*
2. Karena data yang digunakan adalah *times series*, asumsi yang sering digunakan adalah adanya asumsi data harus mengikuti distribusi normal, maka dalam penelitian ini pertama dilakukan uji normalitas
3. Untuk memperkuat analisis dari hasil penaksiran, penelitian ini dilengkapi pengujian validasi asumsi-asumsi yang dimiliki OLS, pengujian tersebut berkaitan dengan ada tidaknya multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Gujarati, 2010 dan Wing Wahyu, 2011).
 - A. Multikolinier, artinya antar variabel independen yang terdapat pada model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi dan mendekati 1).

Mendeteksi adanya multikolinier dalam model sebagai berikut:

- a. Mendeteksi t-hitung dan F-ratio, jika R^2 tinggi dan F-ratio tinggi, sedangkan sebagian besar tau bahkan seluruh koefisien regresi tidak signifikan (nilai t-hitung sangat rendah).
- b. Diantara dua variabel independen memiliki koefisien yang tinggi atau tanda koefisien korelasi variabel independent berbeda dengan tanda koefisien regresinya
- c. Membuat persamaan regresi antar variabel independen. Jjika koefisien regresinya signifikan, maka dalam model terdapat multikolinier.

Ada beberapa alternatif dalam menghilangkan masalah multikolinieritas dalam model, adalah sebagai berikut:

- a. Menghilangkan salah satu atau beberapa variabel yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi
 - b. Dengan cara menambah data
 - c. Dengan mentransformasikan variabel, nilai variabel yang digunakan mundur satu tahun
- B. Heteroskedastis, artinya variabel dalam model tidak sama untuk semua pengamatan, dengan kata lain heteroskedastis muncul dalam bentuk residual yang semakin besar bila pengamatan semakin besar, pendeteksian heteroskedastis menggunakan uji Park, uji White, uji Glejser, uji korelasi Spearman atau yang lainnya.

Ada beberapa alternatif dalam menghilangkan masalah heteroskedastis dalam model, adalah sebagai berikut:

- Jika varian dan residual diketahui maka menggunakan metode *Weighted Least Square* (WLS).
 - Apabila varian dan residual tidak diketahui maka menggunakan metode White
 - Menggunakan metode Transformasi
- C. Autokorelasi, artinya adanya korelasi antar anggota sampel yang diturunkan berdasarkan waktu, untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam waktu model regresi dilakukan pengujian Durbin-Watson dengan menghitung d (yang menggambarkan koefisien DW), nilai d akan berada di kisaran 0 sampai 4; jika $d < d_l$ berarti terdapat autokorelasi positif, jika $d_l < d < d_u$ dan $4 - d_u < d < 4 - d_l$ berarti tidak terdeteksi apakah ada autokorelasi atau tidak; jika $d_u < d < 4 - d_u$ berarti tidak terdapat autokorelasi; jika $d > 4 - d_u$ berarti terdapat autokorelasi negative.

Cara mengatasi autokorelasi adalah sebagai berikut:

- Jika struktur korelasi diketahui, diatasi dengan melakukan transformasi terhadap persamaan, metode ini sering disebut dengan *generalized difference equation*.
- Jika struktur korelasi (ρ) tidak diketahui, diatasi dengan menggunakan nilai estimasi residual e_t untuk menghilangkan unsur korelasi, perhitungan

dilakukan dengan cara iterasi sampai memperoleh nilai ρ yang tidak mengandung masalah autokorelasi.

4. Langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan pendekatan uji keberartian (*test of significance*) yang meliputi signifikansi model (F-test) untuk melihat kesesuaian model (*goodness of fit*) dan uji hipotesis (t-test). Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik hitung yang diperoleh dari hasil penaksiran dengan nilai statistic yang terdapat dalam tabel pada selang keyakinan (*confidence interval*) tertentu (Gujarati,2010), secara matematis Model yang digunakan adalah multiple regresi, juga menggunakan variabel dummy untuk membedakan tahun sebelum krisis global dengan setelah krisis global, dengan model persamaan ekonometrika sebagai berikut:

$$\ln \text{ miskin} = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \text{ umkm} + \beta_2 \ln \text{ peng} + \beta_3 \ln \text{ gdp} + \beta_4 \text{ inf} + \beta_5 D + \ln \epsilon_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

model di atas kemudian diestimasi menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*

$\ln \text{ miskin}$ = jumlah orang miskin di Indonesia

$\ln \text{ umkm}$ = jumlah penyerapan tenaga kerja di sector UMKM

$\ln \text{ peng}$ = jumlah pengangguran

$\ln \text{ gdp}$ = nilai GDP berdasarkan harga yang berlaku

inf = tingkat inflasi

D_{1i} = variable dummy dimana 1 untuk periode tahun 2008 sampai 2016 (periode setelah krisis global) dan 0 yang lainnya

$\ln \epsilon_{ij}$ = log natural distribusi normal dari error term

Operasionalisasi variabel

A. Jumlah penduduk miskin

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan

B. Jumlah penduduk yang menganggur

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperolehnya (Sadono Sukirno, 2012),

C. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga secara terus-menerus di keseluruhan barang dalam suatu perekonomian, inflasi diukur dari indeks harga konsumen (IHK) atau indeks harga perdagangan besar (IHPB), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

D. Nilai GDP harga yang berlaku

Merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 2012).

E. Jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang berumur 15 tahun keatas yang mampu ditampung oleh sektor UMKM di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional dan pengukurannya dinyatakan dalam orang,

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan *time series* kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2016 dan data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM, dan lembaga instansi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan data statistik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengolahan data diawali dengan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model sebuah regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara uji Jarque-Bera. Apabila probabilitas Jarque-Bera lebih besar

dari 0,05 maka data terdistribusi normal, sebaliknya jika probabilita lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software Eviews diperoleh nilai probabilita Jarque-Bera 0,828003, hal ini menunjukkan data terdistribusi normal

Selanjutnya melakukan pengolahan estimasi persamaan kemiskinan dan diperoleh hasil persamaan kemiskinan sebagai berikut:

$$\ln \text{ miskin} = 22.469 - 0.299 \cdot \ln \text{ umkm} + 0.054 \cdot \ln \text{ peng} - 0.0274 \cdot \ln \text{ gdp} - 0.005 \cdot \text{inf} - 0.137 \cdot \text{dum}$$

p-value (0.0000) (0.2357) (0.3786) (0.6814) (0.0857) (0,0085)

$$R^2 = 95.34 \quad \text{prob } F_{\text{STAT}} = 0.0000 \quad DW_{\text{STAT}} = 1.67$$

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat terlihat tidak ada satu variabel independen yang signifikan dan juga nilai R^2 yang tinggi serta nilai Durbin Waltson yang kecil, hal ini patut diduga adanya multikolinier dan terjadi otokorelasi, sehingga selanjutnya dilakukan pengujian dan perbaikan penyimpangan asumsi regresi linier.

Multikolinieritas

Pada persamaan kemiskinan semua variable bebas tidak signifikan yang dapat dilihat dari nilai *p-value* lebih besar dari 5%, maka akan diuji masalah multikolinier dengan cara menghitung korelasi antar variabel independen, diperoleh hasil nilai korelasi yang paling besar diantara variabel-variabel bebas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Korelasi Pengujian Kolinier Persamaan kemiskinan

	LNUMKM	LNPENG	LNGDP	INF	DUM
LNUMKM	1.000000	-0.333084	0.971864	-0.510660	0.826134
LNPENG	-0.333084	1.000000	-0.309335	0.293086	-0.502454
LNGDP	0.971864	-0.309335	1.000000	-0.539761	0.875821
INF	-0.510660	0.293086	-0.539761	1.000000	-0.565265
DUM	0.826134	-0.502454	0.875821	-0.565265	1.000000

Sumber : hasil pengolahan data program Eviews 9

Berdasarkan tabel 5 bahwa ada korelasi antara UMKM dengan GDP dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9718, Salah satu ukuran untuk melihat adanya multikolinier antar variable independen yaitu dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) atau tolerance ($1/VIF$), regresi yang bebas multikolinier memiliki VIF disekitar satu atau mendekati satu, jika suatu variable independen nilai VIF 10 dikatakan terjadi kolinearitas

yang kuat antar variabel independen (Dedi Rosadi, 2012). Dengan menggunakan EViews diperoleh nilai tolerance dari persamaan kemiskinan seperti tertulis di tabel berikut:

Tabel 6. VIF dari regresi semu kemiskinan

Variabel dependen	R^2	$TOL = 1 - R^2$	$VIF = 1/TOL$
Ln umkm	0,9521	0,0479	20,8768
Ln peng	0,3903	0,6097	0,00016
Ln gdp	0,9676	0,0324	30,8642
Inf	0,3308	0,6692	1,4931
Dum	0,8503	0,1497	0,8503

Sumber : hasil pengolahan data program Eviews 9

Terlihat dari hasil perhitungan VIF pada tabel 6. variabel ln peng, inf, dan dum nilai VIF nya lebih kecil dari 10, berarti tidak terdapat kolinier antara variabel-variabel tersebut, sedangkan ln umkm dan ln gdp mempunyai nilai VIF lebih dari 10 berarti terjadi kolinier diantara kedua variabel tersebut, maka cara mengatasi masalah kolinier ini dengan cara menghilangkan salah satu yang berkolinier, sehingga penulis memutuskan untuk mengeluarkan ln gdp dari model sedangkan ln umkm tidak dikeluarkan karena variabel inilah yang akan diteliti.

Autokorelasi

Penentuan ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat nilai DWstat dan membandingkannya dengan DWtabel. Dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai d yang ditemukan sebesar 1,9147 dan berada diantara 1,900 (du) dan 2,100 (4-du). DWstat persamaan kemiskinan untuk sebesar 1,9147 berada di daerah Ho diterima berarti data tidak mengandung autokorelasi.

Heteroskedastis

Pengujian heteroskedastis menggunakan uji White yaitu dengan cara meregres kuadrat dari residu persamaan regresi (e^2) dengan variabel bebas, hasil dari regresi persamaan kemiskinan diperoleh prob chi-square sebesar 0,45 berarti lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastis.

Hasil estimasi persamaan kemiskinan sebagai berikut:

$$\text{Ln miskin} = 23.9077 - 0.3914 \cdot \text{Ln umkm} + 0.0441 \cdot \text{Ln peng} - 0.0053 \cdot \text{inf} - 0.1481 \cdot \text{dum}$$

p-value (0.0000) (0.0010) (0.4139) (0.0781) (0.0007)

$R^2 = 0,9526$; $F_{STAT} = 60,3658$; Prob (F-statistik) = 0,0000 ; $DW_{STAT} = 1.9147$

Persamaan hasil estimasi tersebut yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis model kemiskinan.

Analisis Model Kemiskinan:

a. Uji kesesuaian model

Berdasarkan nilai prob (F-statistik) sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa model kemiskinan yang digunakan telah sesuai, yang berarti bahwa variabel umkm, peng, inf, dan dum memiliki hubungan linier dengan kemiskinan dengan kata lain model yang diestimasi sudah tepat atau layak (fit)

b. Uji hipotesis

- Berdasarkan hasil estimasi model kemiskinan dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor umkm (ln umkm) mempunyai arah yang konsisten dengan apa yang dihipotesiskan, dengan menetapkan tingkat kesalahan 5% secara statistik menunjukkan angka yang signifikan (ρ value = 0,0010), penyerapan tenaga kerja di sektor umkm berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien ln umkm sebesar -0,3914 mengandung arti ketika penyerapan tenaga kerja di sektor umkm meningkat 1 persen maka kemiskinan akan turun sebesar 0,39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor umkm di Indonesia sangat berkontribusi bagi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

- Ali (2013) yang menyimpulkan bahwa UMKM berpengaruh terhadap kemiskinan di Pakistan.
- Oba dan Onuoha (2013) yang meneliti peran UMKM di Nigeria dan menyimpulkan bahwa UMKM berhubungan dengan penyerapan kerja dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
- Azami (2009) yang memperoleh kesimpulan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

- Variabel lain yang menunjukkan secara statistik signifikan adalah variabel dummy yang menyatakan 0 jika sebelum tahun 2008 (sebelum krisis global) dan 1 sesudah tahun 2008 (setelah krisis global) dengan nilai p value = 0,0007 dan mempunyai nilai koefisien dum sebesar -0,1481 yang mengandung arti bahwa dalam kondisi *ceteris paribus* rata-rata kemiskinan sesudah krisis global 2008 lebih rendah 0,1481% dibandingkan sebelum tahun 2008.

Dari hasil tersebut menyatakan bahwa krisis global 2008 di Indonesia tidak secara langsung menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi naik hal ini disebabkan krisis yang terjadi diawali dengan krisis financial di Amerika sedangkan di Indonesia eksposur langsung terhadap sekuritas-sekuritas bermasalah dari pasar global cenderung terbatas, karena minimalnya eksposur perbankan dan lembaga-lembaga keuangan Indonesia terhadap sekuritas-sekuritas bermasalah dari luar negeri tersebut menyebabkan tidak secara langsung dapat mempengaruhi terhadap peningkatan tingkat kemiskinan.

- Inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada tingkat keyakinan 95%, sejalan dengan penelitian Barika (2013) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera.

Dalam penelitian ini inflasi signifikan hanya pada taraf keyakinan sebesar 92% dengan koefisien inflasi sebesar negatif 0,0053 yang berarti ketika inflasi naik 1% maka kemiskinan turun sebesar 0,0053%. Dengan menerapkan pada tingkat keyakinan 92% mengindikasikan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan akan meningkatkan ketidakmerataan pengeluaran penduduk miskin atau distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tidak merata. Penelitian bahwa inflasi berpengaruh pada kemiskinan sejalan dengan:

- Leasiwal (2013) yang mengkaji determinan dan karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku menemukan adanya pengaruh inflasi terhadap kemiskinan.
 - Sabir dan Tahir (2012) menemukan variabel inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pakistan.
- Penganguran menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,4139 hal ini mengindikasikan bahwa penyebab seseorang

atau penduduk miskin bukan bersumber dari besarnya tingkat pengangguran, hal ini sejalan dengan penelitian :

- Putri dan Yuliarmi (2013) mengkaji faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bali. Mereka memperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengangguran tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
- Rusdarti dan Sebayang (2013) menemukan bahwa pengangguran pengaruhnya tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Penutup

Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor UMKM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dapat menurunkan kemiskinan masyarakat Indonesia.

Inflasi tidak significant secara statistik terhadap kemiskinan begitu juga dengan pengangguran tidak berpengaruh pada kemiskinan mengindikasikan bahwa indikator kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh tingkat inflasi dan pengangguran melainkan oleh indikator lain.

variabel dummy mengindikasikan bahwa kemiskinan setelah krisis global 2008 menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan sebelum tahun 2008.

Implikasi yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah pemerintah harus terus mendukung UMKM dengan regulasi-regulasi yang dapat memperluas usaha UMKM sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan

Daftar Pustaka

- Agyapong, D (2010). "Micro, Small and Medium Enterprises' Activities, Income Level and Poverty Reduction in Ghana – A Synthesis of Related Literature". *International Journal of Business and Management*, 5(12): 196-205
- Alauddin and M.M. Chowdhury (2015). Small and Matedium Enterprise in Bangladesh- Prospects and Challenges. *Global Journal of Management and Business Research*, 5(7)
- Ali, S.(2013). The Small and Medium Enterprises and Poverty in Pakistan: An Empirical Analysis. *European Journal of Business and Economic*, 8(2): 25-30
- Ali, S.. (2013). The Small and Medium Enterprises and Poverty in Pakistan: An Emprical Analysis. *European Journal of Business and Economics*. 8(2):25-30

- Ayyagari, M., T. Beck , A.T. Kunt,(2007). Small and Medium Enterprises Across the Globe. *Small Business Economics*, Vol, 29:415-434
- Azami, P. A. 2009. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pendidikan terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2007. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(3): 281-314
- Badan Pusat Statistik (2014).Perhitungan dan Analisis: Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2014, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2015).Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Barika (2013). Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan* 5(1): 27-36
- Gujarati, Damodar N, (2010), *Basic Econometrics*, 5th edition, McGraw-Hill, 2010
- Harlik, A. Amir, Hardiani, (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2): 109-120
- Hendrati dan Aprilianti (2009). Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Tingkat Kemiskinan Pada Saat Krisis di Kota Surabaya.*Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 9(1): 29-39
- Katua, N. T. (2014). "The Role of SMEs in Employment Creation and Economic Growth in Selected Countries". *International Journal of Education and Research*, 2(12)
- Kuswanto, F., M.M. Rosli, R.A. Kader (2012). "Innovation in Distribution Channel, Cost Efficiency & Firm Performance: The Case of Indonesian Small & Medium Enterprise Scales". *International Journal of Business, Humanities and Technology* ,4(2)
- Lawal, A.A., H.A. Ajonbadi, B. O. Otokiti (2014). "Strategic importance of the Nigerian small and medium enterprises (SMES): Myth or reality". *American Journal of Business, Economics and Management*. Vol. 2, No. 4: 94-104.
- Leasiwal, T. C. (2013). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*7(2):1978 - 3612
- Nurwati (2008), Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1) : 1-11
- Oba, U.O. , B. Onuoha, B. Chima (2013).The Role of Small and Medium Scale Enterprises in Poverty Reduction in Nigeria: 2001–2011,*An InternationalMultidisciplinary Journal, Ethiopia* Vol. 7 (4), Serial No. 31:1-25
- Omolara, F. (2012). "An Appraisal of the Small and Medium Scale Enterprises on Poverty Alleviationin Southwestern State of Osun in Nigeria". *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 5(4): 97-106
- Pratama, Y.C. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia, *ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen*4(2):210-223

- Priyanath, H.M.S. and S.P Premaratne (2013). "Government SME Development Programs in Sri Lanka: A Review in the Lens of Transaction Cost Economics". *Sabaragamuwa University Journal*, 13 (2): 59-81
- Putri, S.M. dan Yuliarmi, N. (2013). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali, *E-Jurnal EP Unud*, 2 (10), 441-44
- Ramdani (2015). Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012, *Economics Development Analysis Journal* 4 (1): 97-104
- Rusdarti dan Sebayang (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 9(1)
- Sabir, H.M. and S.H. Tahir (2012). The Impact of Different Macroeconomic Variabels on Poverty in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(10): 788-790
- Sukirno, Sadono (2012), *Pengantar Teori Makroekonomi*, PT RajaGrafindo Persada,
- Subhan, Q.A. and M.R Mehmood (2013). "Innovation in Small and Medium Enterprises (SME's) and its impact on Economic Development in Pakistan ". *Proceedings of 6th International Business and Social Sciences Research Conference* 3 – 4 January, 2013
- Sunusi, D.K., A. Kumenaun, S. Rotinsulu (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2): 120-137
- Wahyudi, D. dan T. Rejekingsih (2013)., Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah, *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1): 1-15
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS* 8(3):176 - 185
- Zacheus, O.O. and O.A. Omoseni (2014). "The Impact of Small and Medium Scale Enterprises on Economic Development of Ekiti State, Nigeria". *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(16):115-122

DAMPAK STRATEGI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG DAN KEPUASAN WISATAWAN KE BUMI PERKEMAHAN SIBOLANGIT

Miftah El Fikri dan Husni Muharram Ritonga

E-mail: miftahel@dosen.pancabudi.ac.id

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

ABSTRAK

Bumi Perkemahan Sibolangit merupakan suatu kawasan/areal perkemahan di daerah pegunungan yang beriklim sejuk dan jauh dari penatnya kota. Bumi Perkemahan Sibolangit dewasa ini semakin sepi jumlah kunjungan karena masalah-masalah yang terjadi di dalam areal perkemahan. Mulai dari keluhan hingga bekurangnya jumlah pengunjung terlihat dari minimnya tenda-tenda di areal perkemahan terutama di akhir pekan dan tidak terawatnya lingkungan bumi perkemahan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan melihat penyebab terjadinya penurunan jumlah pengunjung di areal Bumi Perkemahan Sibolangit yang dilihat dari segi pemasaran, khususnya pemasaran pariwisata. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang berwisata di Bumi Perkemahan Sibolangit sebanyak 50 orang dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Teknik analisis data menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) dengan pengujian hipotesis Uji F, Uji T dan Uji Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Strategi Promosi, Strategi Fasilitas dan Strategi Lingkungan sangat mempengaruhi Keputusan Berkunjung dan Kepuasan Pengunjung ke Bumi Perkemahan Sibolangit. Pada penelitian ini Strategi Lingkungan yang paling dominan mempengaruhi pengunjung ke Bumi Perkemahan Sibolangit. Sedangkan Strategi Fasilitas yang paling rendah mempengaruhi pengunjung berkunjung ke Bumi Perkemahan Sibolangit.

Kata kunci: Strategi Promosi, Strategi Fasilitas, Strategi Lingkungan, Keputusan Berkunjung dan Kepuasan Wisatawan

Pendahuluan

Pendidikan non formal merupakan salah satu bagian dari dunia pendidikan, pendidikan non formal memiliki banyak materi yang tidak diajarkan di dalam pendidikan formal. Kegiatan non formal di Sumatera Utara telah berkembang secara perlahan, ditandai munculnya bimbingan belajar yang berjamur di kota-kota besar. Berkemah merupakan salah satu pendidikan non formal, dengan berkemah para peserta didik diajarkan kerja sama tim, gotong royong, petualangan, kepemimpinan dan kemandirian, semua hal ini

merupakan materi-materi yang didapat di dalam kegiatan non formal. Bumi Perkemahan yang paling terkenal di Sumatera Utara adalah Bumi Perkemahan Sibolangit yang merupakan salah satu Bumi Perkemahan dengan wisata alam yang luas. Berkemah di tengah alam, diselimuti angin sejuk Berastagi, dan pemandangan bukit serta pohon pinus menjadi momen yang tidak terlupakan. Kawasan tersebut sudah dibuka untuk umum bagi wisatawan atau pengunjung. Bumi Perkemahan Sibolangit memiliki lapangan yang berbukit-bukit dan berada di kaki Gunung Sibayak dengan udara yang sejuk. Bumi Perkemahan Sibolangit yang berhadapan dengan Hutan Lindung Sibolangit dan dibatasi oleh aliran sungai kecil, sangat strategis untuk setiap kegiatan *outdoor* dan pendidikan serta rekreasi seperti *tracking / Jungle track*. Uniknya Hutan Lindung yang seharusnya tertutup untuk kegiatan kemah, justru dibuka secara bebas bagi khlayak umum. Setiap pengunjung yang akan berkemah di kawasan Hutan Lindung Sibolangit harus membayar retribusi sebanyak 2 kali di 2 posko berbeda, yaitu : di kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit dan di depan Pintu Kawasan Hutan Lindung Sibolangit. Ironisnya pemungutan retribusi tersebut tidak dilakukan oleh aparat yang berwenang (berseragam). Selain itu, dengan banyaknya retribusi yang dibebankan pada setiap pengunjung seharusnya dapat memberikan kompensasi yang layak bagi kelestarian Hutan Lindung Sibolangit, namun justru sebaliknya kawasan Hutan Lindung Sibolangit perlahan menuju kepada kehancuran. Fakta yang dijumpai dilapangan bahwa kondisi Hutan Lindung Sibolangit semakin mengkhawatirkan, bukan hanya dikarenakan maraknya penebangan-penebangan liar, melainkan juga disebabkan karena tumpukan sampah anorganik yang berserakan hingga hampir setiap sisi tanah terdapat tumpukan sampah. Padahal pungutan demi pungutan retribusi semakin gencar tanpa timbal balik bahkan semakin brutal, selain retribusi yang dibebankan harus dibayar tanpa menerima tanda bukti yang sah dari petugas yang berwenang (www.rimbaraya.bs.com). Bumi Perkemahan Sibolangit dewasa ini mulai kehilangan daya tariknya terhadap para pengunjung untuk melakukan kegiatan *outdoor*, karena hal-hal tersebut, sehingga jumlah kunjungan terhadap bumi perkemahan ini berkurang drastis, tidak seramai dahulu, ditambah lagi dengan munculnya areal perkemahan baru disekitar Bumi Perkemahan Sibolangit tersebut. Penelitian ini akan melihat penyebab terjadinya penurunan jumlah pengunjung di areal Bumi Perkemahan Sibolangit yang dilihat dari segi pemasaran, khususnya pemasaran pariwisata serta

pengaruhnya terhadap kepuasan berkunjung. Hasil analisis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pengelola bumi perkemahan dalam membuat keputusan-keputusan dalam bidang pemasaran, agar menaikkan kembali jumlah kunjungan di Bumi Perkemahan Sibolangit

Permasalahan

Bumi Perkemahan Sibolangit merupakan suatu kawasan/areal perkemahan di daerah pegunungan yang beriklim sejuk dan jauh dari penatnya kota. Bumi Perkemahan Sibolangit dewasa ini semakin sepi jumlah kunjungan karena masalah-masalah yang terjadi di dalam areal perkemahan. Bekurangnya jumlah pengunjung terlihat dari minimnya tenda-tenda di areal perkemahan terutama di akhir pekan dan tidak terawatnya lingkungan bumi perkemahan ini. Hal ini merupakan dasar masalah Bumi Perkemahan tersebut.

Kajian Pustaka

Pemasaran wisata adalah suatu sistem dan koordinasi yang harus dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan, kelompok, baik milik swasta ataupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional atau internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar (Krippendorff dalam Yoeti, 2005). Pariwisata sebagai suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen potensial dan aktual perlu memiliki differensiasi agar mampu bersaing dengan produk-produk yang ditawarkan oleh para kompetitor (Siahaan, 2008)

Strategi pemasaran di suatu destinasi pariwisata dibagi dua tingkatan, yakni di tingkat pengelola destinasi pariwisata itu sendiri dan di tingkat unit-unit bisnisnya sendiri (Suradnya, 2011). Secara spesifik strategi di tingkat destinasi dapat dibagi ke dalam dua kelompok yakni:

- a. Strategi promosi, meliputi ; menyusun dan melaksanakan program-program promosi di tingkat destinasi kepada target-target pasar yang dijadikan sasaran dan mengedukasi serta menciptakan kesadaran dikalangan wisatawan agar berperilaku sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- b. Startegi fasilitasi, ditujukan kepada upaya membangun kerjasama antara pengelola dan destinasi pariwisata dengan kalangan unit-unit bisnis pariwisata di destinasi

bersangkutan, dan antara payung promosi yang dirancang pengelola destinasi dengan kalangan industri.

- c. Strategi lingkungan, ditujukan kepada upaya membangun, memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar areal destinasi wisata.

Keputusan berkunjung pada konteks pariwisata diadaptasi dari konsep keputusan pembelian konsumen. Model lima tahap proses pembelian tersebut menjelaskan bahwa konsumen harus melalui lima tahap dalam proses pembelian sebuah produk. Namun hal ini tidak berlaku, terutama atas pembelian dengan keterlibatan yang rendah. Konsumen dapat melewati atau membalik beberapa tahap. Contohnya pada konteks pariwisata, wisatawan yang pernah berkunjung ke suatu destinasi wisata mulai dari kebutuhan akan berwisata menuju keputusan pembelian, dan melewati pencarian dan evaluasi informasi (Kotler & Armstrong, 2012).



Gambar 1. Tahap pengambilan keputusan destinasi wisata

Rangkaian proses keputusan berkunjung wisatawan diuraikan dalam pemaparan berikut ini (Suryadana dkk, 2015):

- a. Pengenalan kebutuhan, proses berkunjung dimulai saat calon wisatawan mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Dalam proses pengenalan kebutuhan, calon wisatawan mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan berwisata.
- b. Pencarian informasi, tahap proses keputusan berkunjung di mana calon wisatawan ingin mencari informasi lebih banyak mengenai suatu destinasi wisata. Minat utama pemasar berfokus ada sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan wisatawan dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut kepada keputusan berkunjung.
- c. Evaluasi alternatif, tahap proses keputusan berkunjung di mana calon wisatawan menggunakan informasi untuk mengevaluasi alternatif dalam sekelompok pilihan.

- d. Keputusan berkunjung, calon wisatawan membentuk preferensi atas alternatif pilihan. Kemudian akan terbentuk niat untuk mengunjungi daerah tujuan wisata yang mereka sukai.
- e. Prilaku pasca berkunjung, tahapan proses keputusan berkunjung di mana wisatawan mengalami tindakan selanjutnya atau pengalaman setelah kunjungan dilakukan berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan wisatawan. Jika kunjungan tidak memenuhi ekspektasi; wisatawan kecewa; jika kunjungan memenuhi ekspektasi; wisatawan puas; dan jika kunjungan melebihi ekspektasi; wisatawan sangat puas.

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Kepuasan juga merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya (Kotler & Armstrong, 2012). Kepuasan konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain (Gasper dalam Suryadana dkk, 2015):

- a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen produk.
- b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.
- c. Pengalaman dari teman-teman.

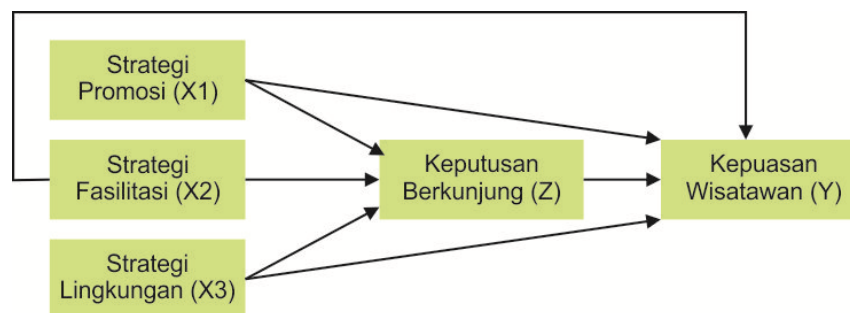
Ada lima faktor yang menentukan tingkat kepuasan konsumen (Lupiyoadi dalam Sarjono dkk, 2013):

- a. Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.
- b. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Emosional, pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum kepadanya bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
- d. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya.

- e. Biaya, pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut.

Metode Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi yang berkaitan dengan variabel strategi-strategi pemasaran pariwisata yang dipilih dan memiliki potensi sebagai strategi yang dapat diterapkan dalam penelitian ini yaitu strategi promosi, strategi fasilitasi dan lingkungan, variable keputusan konsumen yaitu alternatif dan pemilihan keputusan dalam mengunjungi Bumi Perkemahan Sibolangit, serta variabel kepuasan konsumen yang dilihat dari kunjungan yang berkelanjutan. Maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka konseptual penelitian

Pada bagian ini setiap variabel penelitian didefinisikan secara sistematis dan memaparkan indikator yang mewakili variabel penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. Operasional variabel

No	Nama Variabel	Defenisi	Indikator
1	Strategi Promosi (X1)	Serangkaian kegiatan dan gagasan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kekhlayak ramai dengan tujuan memunculkan keputusan	1. Paket kegiatan wisata perkemahan. 2. Event kegiatan wisata perkemahan. 3. Menciptakan produk yang mewakili kegiatan wisata

No	Nama Variabel	Defenisi	Indikator
		konsumen untuk menggunakan produk.	(merchandise). 4. Diversifikasi produk wisata (menonjolkan keunikan wisata).
2	Strategi Fasilitasi (X2)	Serangkaian kegiatan dan gagasan yang menggunakan sarana pendukung untuk memudahkan/membantu keberhasilan produk di pasar.	1. Peremajaan fasilitas penginapan/mess di areal perkemahan. 2. Akses jalan aspal dan jalan setapak di areal perkemahan 3. Penggunaan tanda medan (Papan tanda/Denah lokasi) di dalam perkemahan. 4. Adanya toko-toko yang mendukung kegiatan perkemahan di luar areal perkemahan
3	Strategi Lingkungan (X3)	Serangkaian kegiatan dan gagasan yang menggunakan aspek lingkungan sekitar untuk membuat permintaan dan menimbulkan daya tarik akan produk.	1. Kebersihan destinasi wisata di dalam areal perkemahan. 2. Kenyamanan sarana pendukung kegiatan perkemahan (MCK, Air bersih dan Mess). 3. Membuat program-program perkemahan ramah lingkungan. 4. Pembuatan taman-taman bermain di dalam areal perkemahan.
4	Keputusan Berkunjung (Z)	Serangkaian kegiatan pemilihan alternatif dan pembuatan keputusan untuk memilih kunjungan ke destinasi wisata.	1. Bumi Perkemahan Sibolangit menjadi alternatif pilihan destinasi wisata. 2. Bumi Perkemahan Sibolangit menjadi pilihan utama memilih areal perkemahan. 3. Nama besar Bumi Perkemahan Sibolangit menjadi dasar keputusan. 4. Teman dan keluarga anda juga memilih Bumi Perkemahan Sibolangit sebagai areal perkemahan.
5	Kepuasan Wisatawan (Y)	Sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan.	1. Kesuaian hal yang dikorbankan dengan harapan. 2. Kesetiaan konsumen berkunjung ke Bumi Perkemahan. 3. Keinginan konsumen kembali

No	Nama Variabel	Defenisi	Indikator
			mengunjungi Bumi Perkemahan. 4. Ketersediaan memberikan rekomendasi.

Penelitian ini dilakukan di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada Maret-September 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian (Puspowarsito, 2008). Penelitian dekriptif sering disebut juga sebagai penelitian survei, dengan langkah pengerjaan mendefenisikan tujuan yang jelas dan spesifik serta merancang metode pendekatannya.

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode/cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan segala data yang digunakan sebagai dasar penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling* dengan teknik pengambilan *Accidental Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah proses pemilihan sampling yang tidak melibatkan unsur peluang, sedangkan *Accidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana satuan sampling diperolehnya secara sembarangan (Puspowarsito, 2008). Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan data primer, serta studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Rusiadi dkk, 2013). Sedangkan sumber data primer pada penelitian ini ada opini konsumen yang mengunjungi Bumi Perkemahan Sibolangit yang difokuskan pada akhir pekan dan hari libur nasional, opini konsumen ini difokuskan pada konsumen yang berada dari luar daerah kawasan sibolangit.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengunjung yang berkunjung ke Bumi Perkemahan Sibolangit yang jumlah populasi tidak terhingga / Populasi Tak Terbatas atau populasi tak terhingga, yakni sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif (Nawawi, 2001). Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi

ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2005). Atas dasar tersebut maka jumlah sampel diperkirakan berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling* yang merupakan teknik sampling kebetulan dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai (Usman, 2008).

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Rusiadi dkk, 2013). Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif dan analisis jalur (path). Analisis deskriptif adalah sebuah alat pengolahan data yang menggambarkan karakteristik secara rinci dan menjelaskan data penelitian. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat karakteristik responden yang merupakan konsumen potensial dari penelitian ini. Pengukuran data analisis deskriptif menggunakan data nominal dan data ordinal.

Analisis jalur digunakan untuk melihat secara langsung dan tidak langsung pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel intervening (Benhur dkk, 2013). Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, yang berfungsi memediasi hubung antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengukuran data analisis jalur menggunakan data interval. Persamaan analisis jalur pada penelitian ini adalah:

Persamaan substruktur 1 (Analisis Regresi Berganda):

$$Z = p_{1.1} X_1 + p_{1.2} X_2 + p_{1.3} X_3 + e_1$$

Dimana:

Z = Keputusan berkunjung

X₁ = Strategi promosi

X₂ = Strategi fasilitas

X₃ = Strategi lingkungan

P_{1.1} = Koefisien jalur X₁ pada persamaan substruktur 1

P_{1.2} = Koefisien jalur X₂ pada persamaan substruktur 1

P_{1.3} = Koefisien jalur X₃ pada persamaan substruktur 1

e_1 = Variabel yang tidak terungkap pada persamaan substruktur 1

Persamaan substruktur 2 (Analisis Regresi Berganda):

$$Y = p_{2.1} X_1 + p_{2.2} X_2 + p_{2.3} X_3 + e_2$$

Dimana:

Y = Kepuasan wisatawan

X_1 = Strategi promosi

X_2 = Strategi fasilitas

X_3 = Strategi lingkungan

$P_{2.1}$ = Koefisien jalur X_1 pada persamaan substruktur 2

$P_{2.2}$ = Koefisien jalur X_2 pada persamaan substruktur 2

$P_{2.3}$ = Koefisien jalur X_3 pada persamaan substruktur 2

e_2 = Variabel yang tidak terungkap pada persamaan substruktur 2

Persamaan substruktur 3 (Analisis Jalur):

$$Y = p_{3.1} X_1 + p_{3.2} X_2 + p_{3.3} X_3 + p_{3.4} Z + e_3$$

Dimana:

Y_2 = Kepuasan wisatawan

X_1 = Strategi promosi

X_2 = Strategi fasilitas

X_3 = Strategi lingkungan

Z = Keputusan berkunjung

$P_{3.1}$ = Koefisien jalur X_1 pada persamaan substruktur 3

$P_{3.2}$ = Koefisien jalur X_2 pada persamaan substruktur 3

$P_{3.3}$ = Koefisien jalur X_3 pada persamaan substruktur 3

$P_{3.4}$ = Koefisien jalur Z pada persamaan substruktur 3

e_3 = Variabel yang tidak terungkap pada persamaan substruktur 3

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan melakukan tiga kali analisis linear berganda, sehingga hasilnya tercermin dalam tiga substruktur yaitu:

Hasil dan Pembahasan Persamaan Substruktur I

Tabel 2. Coefficients^a Persamaan Substruktur I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.566	2.189		.715	.478
	X1	.052	.140	.042	.371	.713
	X2	.301	.117	.317	2.580	.013
	X3	.553	.101	.566	5.490	.000

a. Dependent Variable: Z

Sumber: Data penelitian

Pada tabel 2 terlihat bahwa variabel yang paling mempengaruhi keputusan berkunjung adalah Strategi lingkungan dengan persamaan:

$$Z = 1.566 + 0,052X1 + 0,301X2 + 0,553X3$$

Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung yang datang ke areal Bumi Perkemahan Sibolangit ingin menikmati udara pegunungan yang sejuk. Keinginan konsumen ini dapat tercapai jika pihak pengelola memperbaiki dan menjaga kebersihan lingkungan serta membuat taman-taman bermain di areal Bumi Perkemahan Sibolangit. Sehingga dengan lingkungan yang bersih segala kegiatan berkemah dan berkumpul menjadi menyenangkan di areal tersebut.

Strategi fasilitas memiliki peran kedua yang mempengaruhi keputusan konsumen berkunjung di Bumi Perkemahan Sibolangit, walaupun pada kenyataan fasilitas yang diberikan Bumi Perkemahan Sibolangit sangat minim dan tidak terawat, jalanan yang becek dan berlubang, jembatan yang bolong bahkan sulitnya menjangkau MCK bagi pengunjung yang berkemah jauh ke dalam areal perkemahan.

Hasil dan Pembahasan Persamaan Substruktur II

Tabel 3. Coefficients^a Persamaan Substruktur II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.578	1.551		.373	.711
	X1	.253	.099	.235	2.561	.014
	X2	.122	.083	.147	1.475	.147
	X3	.565	.071	.663	7.921	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data penelitian

Pada tabel 3 terlihat bahwa variabel yang paling mempengaruhi Kepuasan Wisatawan adalah Strategi lingkungan dengan persamaan:

$$Y = 0,578 + 0,253X1 + 0,122X2 + 0,565X3$$

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sangat berperan penting untuk memenuhi harapan pengunjung ketika berwisata ke areal Bumi Perkemahan Sibolangit. Ketika pengunjung melakukan kegiatan wisata ke suatu daerah dataran tinggi, mereka memiliki harapan yang besar akan daerah tersebut. Pengunjung berharap dapat merasakan udara segar dan indahny bukit-bukit hijau yang tidak didapatkan di kota. Inilah harapan pengunjung yang harus diwujudkan pihak pengelola agar pengunjung merasakan bahwa harpanya ke Bumi Perkemahan Sibolangit sesuai dengan kenyataan. Apabila pengunjung merasa puas akan suatu produk (destinasi wisata), mereka akan kembali ke tempat tersebut bahkan merekomendasikannya ke orang lain.

Strategi promosi memiliki posisi kedua yang mempengaruhi kepuasan konsumen berwisata di Sibolangit. Di areal Bumi Perkemahan sering dijadikan kegiatan *outbond* dan beberapa instruktur menggunakan jasa *freelance* untuk memanjakan pengunjung menikmati kegiatan alam. Di bagian dalam Bumi Perkemahan Sibolangit kita dapat menikmati balapan motor dan mobil di areal perkemahan, hal ini salah satu merupakan cara Bumi Perkemahan Sibolangit mempromosikan dirinya. Tetapi dalam hal kegiatan di lapangan pihak pengelola sibolangit memiliki kawasan yang berbeda dan tercluster pengelolanya, perbedaan pihak pengelola dan tidak jelasnya biaya yang dikeluarkan

pengunjung membuat kegiatan dan koordinasinya jadi membingungkan ketika adanya suatu event di areal Bumi Perkemahan Sibolangit.

3.3. Hasil dan Pembahasan Persamaan Substruktur III

Tabel 4. Coefficients^a Persamaan Substruktur III

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.432	1.563		.276	.784
X1	.248	.099	.231	2.503	.016
X2	.094	.089	.113	1.058	.296
X3	.514	.092	.602	5.582	.000
Z	.093	.105	.107	.893	.377

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Penelitian

Pada tabel 4 terlihat bahwa variabel yang paling mempengaruhi Kepuasan Wisatawan melalui keputusan berkunjung adalah Strategi lingkungan dengan persamaan $Y = 0,432 + 0,248X1 + 0,094X2 + 0,514X3 + 0,093Z$. Dari persamaan substruktur I dan substruktur II menunjukkan bahwa Strategi Lingkungan memiliki peran paling dominan untuk menaikkan jumlah wisatawan dan memberikan kepuasan bagi para pengunjung. Artinya dari persamaan di atas pun menunjukkan kemampuan Strategi Lingkungan untuk memberikan dampak yang sangat besar untuk membuat pilihan wisatawan berkunjung ke areal Bumi Perkemahan Sibolangit, di samping karena sibolangit memiliki bentuk alam yang sejuk, sibolangit juga merupakan areal Bumi Perkemahan yang sangat luas dan tertua di Sumatera Utara. Pengunjung dapat memilih tempat di manapun yang mereka sukai untuk melaksanakan kegiatan alamnya, karena selain luas di Bumi Perkemahan Sibolangit memiliki titik titik perkemahan yang menjadi abagian favorit para pengunjung misalnya Air Terjun Dua Warna, Jaga Wana, Hutan pinus dan masih banyak titik wisata lain yang ditawarkan di Bumi Perkemahan Sbolangit.

Penutup

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai strategi ke depan bagi pihak pengelola dan pemerintah setempat khususnya Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk memperhatikan lingkungan di sekitar areal perkemahan dengan cara

menjaga kebersihan lingkungan Bumi Perkemahan agar tetap terjaga keindahan dan keasrian alamnya, karena strategi lingkungan merupakan strategi yang paling dominan yang paling mempengaruhi semua variabel independen disetiap pertanyaan substruktur. Strategi lingkungan yang dapat digunakan di areal Bumi Perkemahan Sibolangit yaitu:

1. Reboisasi atau penanaman hutan kembali khususnya pohon pinus yang menjadi ciri khas dataran tinggi dan perkemahan.
2. Membersihkan areal perkemahan setiap hari dan mendaur ulang sampahnya , sehingga sampah tidak bertebaran dan merusak lingkungan.
3. Membuat MCK yang sangat bersih di beberapa titik-titik destinasi wisata di areal perkemahan.
4. Menyediakan tempat sampah dan penampungan sampah di beberapa areal Bumi Perkemahan.
5. Menyediakan lampu jalan dan penerangan di setiap jalan setapak di areal perkemahan, sehingga Bumi Perkemahan menjadi lebih indah dan dapat dinikmati di malam hari.
6. Membuat pos-pos penyewaan kegiatan alam dan rekreasi, sehingga membuat konsumen menjadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan lamnya
7. Kemudian bagi pihak pengelola seharusnya transparan dalam mengutip retribusi Bumi Perkemahan dan dilegalkan dengan karis masuk, sehingga selain menjadi pendapatan daerah Deli Serdang juga sebagai biaya pemeliharaan lingkungan di Bumi Perkemahan Sibolangit.

Demikianlah hasil dari penelitian ini, semoga penelntian ini bermanfaat untuk masyarakat di Kecamatan Sibolangit khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya sehingga Bumi Perkemahan Sibolangit kemabali citranya dan diminati oleh para pengunjung.

Daftar Pustaka

- Hadari Nawawi. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Puspowarsito. (2008). *Metode Penelitian Organisasi Dengan Aplikasi Program SPSS*. Humaniora: Bandung.
- Sarjono, Adil, Amrin Fauzi dan Paham Ginting. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Peternak Pada PT. Ciamas Adisatwa Medan*. Jurnal Manajemen Sains. Vol. 1 No. 4 Oktober 2013.Hlm. 386.

- Siahaan, Sinthon L. (2008). *Visit Indonesia Year 2008 : Suatu Tinjauan Dari perspektif Pemasaran destinasi Pariwisata*. Majalah Ilmiah Panorama Nusantara. Edisi IV, Januari-Juni 2008. Hlm. 8.
- Sugiyono. (2005) *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Suryadana, M. Liga dan Vanny Ocatavia. (2015). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini. (2008). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Yoeti, Oka A. (2005). *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- www.tribunnews.com/travel/2015/06/10/bumi-perkemahan-sibolangit-di-berastagi-air-bersih-melimpah-bebas-hewan-buas-pemandangan-indah. diakses tanggal 13 April 2016.
- www.rimbaraya.blogspot.co.id/2005/01/hutan-lindung-sibolangit-tanggung.html diakses tanggal 13 April 2016.
- www.wikipedia.org/wiki/Berkemah diakses tanggal 13 April 2016.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN PADA PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

Suhana¹⁾, Lie Liana¹⁾, Askar Yuniarto¹⁾, dan Desy Herma Fauza²⁾

Surel:

suhana.aziza@gmail.com, lieliana08@gmail.com,
desyhf@gmail.com,
askaryuniarto@yahoo.com

- 1) University of STIKUBANK, Semarang
- 2) University of Dian Nuswantoro, Semarang

ABSTRAK

Salah satu isu penting pada perguruan tinggi swasta adalah perolehan mahasiswa baru setiap tahunnya. Hal ini karena sebagian besar perguruan tinggi swasta masih menggantungkan pemasukan utamanya dari mahasiswa. Isu kurikulum juga merupakan isu penting untuk diperhatikan. Kurikulum memegang peran sentral bagi tercapainya tujuan pembelajaran suatu institusi pendidikan. Salah satu karakteristik guru/dosen yang memberi kontribusi pada perilaku dan keterikatan siswa pada tugas-tugas akademik adalah gaya kepemimpinan dosen. Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional merupakan dua gaya kepemimpinan yang berbeda. Meski demikian di sejumlah penelitian kedua gaya ini merupakan kontinum yang mana kombinasi keduanya akan memiliki kontribusi yang lebih baik dibanding ketika diimplementasikan secara sendiri-sendiri. Selain gaya kepemimpinan, pendekatan pembelajaran deep learning dan surface learning diprediksi memiliki pengaruh pada prestasi akademik mahasiswa. Penelitian ini menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional/ transaksional serta pendekatan pembelajaran deep learning dan surface learning pada prestasi akademik mahasiswa. Jumlah sampel penelitian ini adalah 300 mahasiswa ekonomi di dua universitas swasta di Semarang. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa dosen lebih sering menggunakan gaya kepemimpinan transaksional, dibanding dengan gaya kepemimpinan transformasional. Meski demikian, gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh signifikan pada prestasi mahasiswa. Temuan lainnya adalah bahwa mahasiswa lebih banyak menggunakan pendekatan surface learning dibanding deep learning. Pendekatan pembelajaran deep learning memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi akademik mahasiswa. Sementara pendekatan pembelajaran surface learning tidak memiliki pengaruh signifikan pada prestasi akademik mahasiswa. Temuan-temuan tentang hubungan antar variabel di penelitian ini masih sangat variatif. Hal ini mengindikasikan bahwa bukti empirik perihal hubungan antar variabel ini masih banyak dibutuhkan. Penelitian mendatang bisa dilakukan dengan cakupan yang lebih besar.

Kata kunci: *kepemimpinan transformasional/transaksional, pendekatan pembelajaran surface learning dan deep learning, prestasi akademik mahasiswa*

Pendahuluan

Salah satu isu penting pada perguruan tinggi swasta yang selalu menarik untuk dibicarakan adalah perolehan mahasiswa baru setiap tahunnya. Hal ini bisa dipahami ketika melihat realitasnya bahwa sebagian besar perguruan tinggi swasta masih menggantungkan pemasukan utamanya dari mahasiswa yang berhasil direkrutnya. Masalah tidak selesai ketika suatu perguruan tinggi berhasil merekrut mahasiswa sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Mahasiswa yang sudah berhasil direkrutpun memiliki potensi untuk mundur di awal-awal tahun mereka kuliah. Realitas di perguruan tinggi swasta secara umum, sebesar 15-30% mahasiswa yang berhasil direkrut akan mundur di tahun-tahun awal mereka kuliah.

Selain isu di atas, isu kurikulum juga merupakan isu yang penting untuk diperhatikan. Kurikulum memegang peran penting bagi tercapainya tujuan pembelajaran suatu institusi pendidikan. Kurikulum yang mampu menterjemahkan kompetensi yang akan dihasilkan lulusan ke dalam berbagai mata kuliah yang harus diambil mahasiswa akan menjadi pilihan manajemen perguruan tinggi untuk diterapkan. Dalam konteks ini mensetting kurikulum sedemikian rupa yang mampu menjawab visi kompetensi lulusan menjadi sangat krusial.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum yang berbasis pada kompetensi pembelajar. Model pembelajaran kurikulum ini menekankan pada *students's learning center*, pusat pembelajaran pada mahasiswa. Peran dosen adalah sebagai fasilitator dan memberikan benang merah setiap topik yang dibahas mahasiswa agar substansi per materi tidak melenceng dari intinya. Indikator hasil penerapakan kurikulum ini adalah mahasiswa lulus semua dengan nilai minimal "B".

Faktanya, tujuan ideal penerapan kurikulum ini belum seperti yang diharapkan. Berdasarkan pra survei yang dilakukan di beberapa universitas di Semarang diketahui bahwa efektivitas penerapan kurikulum ini belum seperti yang diharapkan. Hal ini diketahui dari masih cukup banyaknya mahasiswa yang memiliki nilai di bawah "B", yang dengan demikian mereka harus mengambil remedial. Fakta ini memberikan justifikasi akan pentingnya mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa memberi peran pada tercapainya target penerapan kurikulum berbasis kompetensi.

Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, tenaga pengajar, baik itu guru maupun dosen merupakan determinan penting yang memiliki pengaruh pada keberhasilan pembelajaran. Indikasi ini didukung oleh pernyataan Bolkan, S. dan Goodboy A.K. (2009) bahwa di kelas dosen bisa berperan bermacam-macam, tetapi posisi sebagai pemimpin di kelas memegang peran penting. Kepemimpinan dosen merupakan konsep penting dan menggambarkan perilaku dosen dalam mengajar (Treslan, 2006).

Pengajar yang memiliki kemampuan memotivasi dan memimpin memiliki dampak yang positif pada peningkatan prestasi mahasiswa (Vermunt & Verloop, 1999). Beberapa penelitian mendukung indikasi ini. Chen (2008) dan Eccles & Roeser (2011) menyatakan bahwa dukungan emosional akademik guru bisa berupa dorongan dan kepercayaan dan juga dorongan instrumen seperti memberikan bantuan siswa dalam menyelesaikan berbagai tugas pembelajaran memiliki kontribusi yang signifikan pada hasil akademik siswa.

Salah satu karakteristik guru/dosen yang memberi kontribusi pada perilaku siswa dan pendekatan serta keterikatannya pada tugas-tugas akademik adalah gaya kepemimpinan dosen. Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional merupakan dua gaya kepemimpinan yang berbeda. Meski demikian di sejumlah penelitian, kedua gaya ini merupakan kontinum yang mana kombinasi keduanya akan memiliki kontribusi yang lebih baik dibanding ketiga gaya tersebut diimplementasikan secara sendiri-sendiri (Zaidatol dkk, 2015). Pounder (2008a) menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan transformasional di kelas memiliki kontribusi pada prestasi akademik mahasiswa. Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Bolkan dan Goodboy (2009) bahwa implementasi gaya kepemimpinan transformasional menghasilkan perilaku positif siswa, keluaran pembelajaran dan kredibilitas guru. Temuan penelitian Bolkan, S. dan Goodboy, A.K. (2010) memperkuat temuan di atas bahwa model kepemimpinan yang dikembangkan di setting bisnis, dapat diterapkan di penelitian perilaku guru. Ide utamanya adalah fungsi ruang kelas sebagai organisasi, ruang kelas sebagai organisasi sosial kecil dan guru sebagai pemimpin sedangkan siswa sebagai pengikut.

Selain gaya kepemimpinan dosen, hal lain yang secara teoritis diprediksi memiliki kontribusi pada peningkatan prestasi mahasiswa adalah pendekatan pembelajaran mahasiswa. Penelitian tentang pembelajaran siswa/mahasiswa di sekolah menengah atas

dan perguruan tinggi telah berkembang sebagai area penelitian mandiri kira-kira tahun 1970an. Karya awal secara esensial dibatasi pada prediksi kinerja akademik oleh beberapa faktor seperti: kecerdasan (IQ), status sosial ekonomi, kepribadian dan variabel gaya kognitif, kemampuan khusus, pengetahuan sebelumnya, daya tarik ke mata pelajaran/kuliah tertentu (Biggs, 1987).

Pendekatan pembelajaran mahasiswa bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu *deep learning* dan *surface learning*. Konsep ini dikenalkan oleh Marton dan Saljo (1976) dalam Gijbels et al (2005). *Deep learning* mengacu pada sikap belajar mahasiswa yang menunjukkan motivasi intrinsik dan berusaha untuk menggunakan berbagai strategi untuk memaksimalkan logika makna, sedangkan *surface learning* mengacu pada gaya belajar yang menggambarkan perasaan takut akan kegagalan, mengingat atau pembelajaran yang bersifat mekanis dengan sasaran objek-objek yang sempit. Dari sejumlah literatur yang ada diketahui bahwa pendekatan *deep learning* memiliki kontribusi positif signifikan pada prestasi mahasiswa, sementara pendekatan *surface learning* memiliki kontribusi negatif signifikan pada prestasi mahasiswa (Cuciuc, L.S et al, 2015)

Permasalahan

Salah satu isu utama perguruan tinggi swasta adalah perolehan mahasiswa baru di tiap tahunnya. Masalah masih muncul ketika mahasiswa baru yang direkrutnya sesuai dengan targetnya. Masalah dimaksud adalah bagaimana mempertahankannya agar mahasiswa tetap belajar di perguruan tinggi sampai lulus. Selain isu mahasiswa baru, isu kurikulum juga penting untuk mendapat perhatian. Kinerja kurikulum berbasis kompetensi yang telah diterapkan belum seperti yang diharapkan. Masih banyak mahasiswa yang belum kompeten. Hal ini terlihat dari masih cukup banyaknya mahasiswa mengambil mata kuliah remedial. Mengetahui faktor –faktor yang memiliki pengaruh pada meningkatnya kinerja mahasiswa merupakan hal penting dilakukan.

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut apakah gaya kepemimpinan transformasional dosen memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi mahasiswa, apakah gaya kepemimpinan transaksional dosen memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi mahasiswa, apakah pendekatan pembelajaran *deep learning* memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi mahasiswa, dan apakah pendekatan

pembelajaran *surface learning* memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi mahasiswa.

Tinjauan Kepustakaan

Prestasi Akademik

Prestasi akademik mahasiswa merupakan isu yang penting dalam pendidikan tinggi. Indikator capaian ini biasanya berupa Indeks Prestasi Akademik (IPK). Keberhasilan memperoleh indeks yang baik turut memberi kontribusi pada keberhasilan masa depannya. Cukup banyak penelitian yang membahas tentang topik ini. Indikasi ini relevan dengan apa yang disampaikan Chen (2005) bahwa prestasi akademik merupakan sebuah topik yang masih tetap eksis di komunitas penelitian karena para peneliti telah menemukannya sebagai sebuah indikator penyesuaian siswa dan keberhasilan masa depannya.

Pembelajaran akan menghasilkan prestasi. Meski demikian, tidak semua prestasi merupakan hasil dari pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran tidak selalu digambarkan dalam kinerja yang bisa diukur. Pembelajaran dan prestasi secara intrinsik berhubungan. Memahami mekanisme pembelajaran dapat meningkatkan prestasi akademik siswa (Cuciac, L.S et al, 2015)

Penelitian tentang prestasi akademik fokus pada determinan individu dan kontekstual. Determinan kontekstual salah satu contohnya adalah guru dan karakteristik kepribadiannya. Kemajuan siswa akan semakin cepat manakala mereka didampingi oleh guru yang profesional (Taylor, Pressley & Pearson, 2000). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan guru merupakan faktor penting untuk meningkatkan prestasi siswa (Shuel, 1996 dalam Cuciac, L.S et al, 2015)

Student Perceived Academic Performance (SPAP) merupakan instrumen untuk mengukur prestasi akademik siswa. SPAP dioperasionalkan sebagai seberapa jauh siswa merasa mampu menggunakan ketrampilan belajarnya untuk mempelajari materi yang diberikan oleh guru secara efektif. Neumann dan Neumann (1993) menggunakan 3 item untuk mengukur prestasi mahasiswa yang dipersepsikan.

Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional

Teori kepemimpinan transformasional merupakan teori kepemimpinan integratif dari beberapa pendekatan kepemimpinan sebelumnya (*traits, behavior and contingent leadership*) (Lussier & Achua, 2007). Konsep kepemimpinan transformasional dan transaksional merupakan pendekatan yang paling populer untuk memahami efektivitas pemimpin (Antonakis & Atwater (2002).

Dimensi gaya kepemimpinan transformasional meliputi: *idealized influence (attribute)*, *idealized influence (behavior)*, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual dan *individualized consideration*. Dimensi *idealized influence* menggambarkan seorang pemimpin dipersepsikan sebagai seorang model peran yang memberikan inspirasi (Moss & Ritossa, 2007). Dimensi ini memiliki 2 bentuk yaitu *idealized influence attribute* dimana seorang pemimpin dipercaya dan dihormati dan *idealized influence behavior* dimana seorang pemimpin menunjukkan perilaku luar biasa yang selalu berpikir tentang kelompok di atas kepentingan pribadinya (Moss & Ritossa, 2007). Sementara untuk dimensi motivasi inspirasional berarti bahwa seorang pemimpin memotivasi anak buah dengan memberikan makna dan tantangan pada pekerjaannya (Bass et.al, 2003). Selain itu, seorang pemimpin berhasil meyakinkan bawahan perihal masa depannya secara optimistik (Antonakis et al, 2003).

Di ranah bisnis, banyak penelitian yang menemukan bahwa kepemimpinan transformasional telah terbukti memiliki pengaruh positif pada kepuasan kerja bawahan, kepuasan dengan pemimpinnya, motivasi pengikutnya, kepuasan kerja dan efektivitas kepemimpinan (Judge & Piccolo, 2004). Akhir-akhir ini, persepsi mahasiswa atas kualitas kepemimpinan transformasional dari dosennya telah diteliti di seting universitas. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara kepemimpinan transformasional dan usaha ekstra mahasiswa, efektivitas dosen, dan kepuasan mahasiswa (Pounder, 2008) dalam Bolkan, S. dan Goodboy, L.K (2009). Lebih jauh lagi, kepemimpinan ini telah terbukti secara positif berhubungan dengan pembelajaran kognitif, pembelajaran afektif, motivasi mahasiswa, kepuasan komunikasi mahasiswa, partisipasi mahasiswa dan kredibilitas dosen (Bolkan, S. & Goodboy, L.K, 2009). Lin (2012) juga memberikan dukungan perihal hubungan ini melalui penelitiannya yang menemukan bahwa penerapan gaya kepemimpinan transformasional di kelas memiliki

pengaruh yang signifikan pada hasil belajar mahasiswa. Penelitiannya juga mengindikasikan bahwa potensi gaya kepemimpinan transformasional dalam menghasilkan ketautan mahasiswa dan kepuasan yang lebih mendorong mahasiswa untuk berprestasi. Dosen memiliki kesempatan untuk menunjukkan perilakunya dalam komunikasi sehari-hari, umpan balik dalam kelas dan juga saat jam kantor.

Sementara kepemimpinan transaksional adalah bagian kedua dari teori gaya kepemimpinan transformasional. Inti konsep kepemimpinan ini adalah adanya proses pertukaran yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Pemimpin ini memberikan target yang ingin dicapai, selanjutnya mengawasi hasil kerja bawahan (Antonakis, 2003). Pemimpin transaksional mengarahkan bawahannya untuk menyelesaikan hasil pekerjaan seperti yang diharapkan seperti: kualitas output yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik dan mengurangi biaya produksi.

Dimensi gaya ini adalah sebagai berikut: *contingent reward*, *management-by-exception active*, dan *management-by-exception passive*. Dimensi *contingent reward* menggambarkan seorang pemimpin yang memberikan penghargaan atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini termasuk klarifikasi atas pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh *reward* dan penggunaan insentif untuk memberikan motivasi. Sedangkan dimensi *management-by-exception active* adalah tentang sikap seorang pemimpin yang memperhatikan anak buah secara serius atas kesalahan yang dilakukan. Pemimpin tipe dimensi ini mengecek perilaku pengikut, memprediksi masalah dan mengambil tindakan korektif sebelum perilaku menyebabkan kesulitan yang lebih (Judge&Picolo, 2004). Dimensi *management-by-exception passive* melukiskan tipe seorang pemimpin yang membiarkan kesalahan terjadi dulu, baru kemudian melakukan tindakan perbaikannya (Judge&Picolo, 2004). Pemimpin tidak mencari penyimpangan anak buah secara aktif tetapi hanya melakukan tindakan perbaikan ketika masalah terjadi (Antonakis, 2003).

Pendekatan Pembelajaran *Deep Learning* dan *Surface Learning*

Penelitian perihal pendekatan pembelajaran dan hubungannya dengan prestasi akademik merupakan lahan riset yang masih perlu untuk diperdalam. Marton dan Saljo (1976) menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran mahasiswa, sebuah gagasan

yang kemudian menjadi sebuah kerangka konseptual yang kuat, yang kemudian dikenal dengan *Student Approach Learning* (SAL), (Biggs dkk (2001).

Secara konsep, strategi pembelajaran mahasiswa tergantung pada berbagai faktor seperti: motivasi dan tujuan mahasiswa, persepsinya pada tugas pembelajaran, model pembelajaran dan evaluasi yang digunakan serta iklim kelas.

Biggs (2001) membedakan antara pendekatan *deep learning* dan *surface learning*. Ketika menggunakan pendekatan pembelajaran *deep learning*, mahasiswa akan menunjukkan motivasi intrinsiknya dan mencoba untuk menggunakan strategi-strategi untuk mengoptimalkan logika maknanya. Pendekatan pembelajaran *deep approach* mengacu pada maksud untuk memahami materi yang diterima (Entwistle & Waterson, 1988). Seorang mahasiswa yang menerapkan *deep learning approach* akan memperhatikan ide dasar atau pesan dari materi yang dipelajari (Heikkila dan Lonka, 2006). Sementara sebuah pendekatan *surface learning* mengacu pada ketakutan akan kegagalan, mengingat materi dan sasaran pembelajaran yang sempit. Mahasiswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran *surface learning* berkonsentrasi lebih pada ciri permukaan teks dan mencoba mengingatnya kata per kata (Heikkila dan Lonka, 2006).

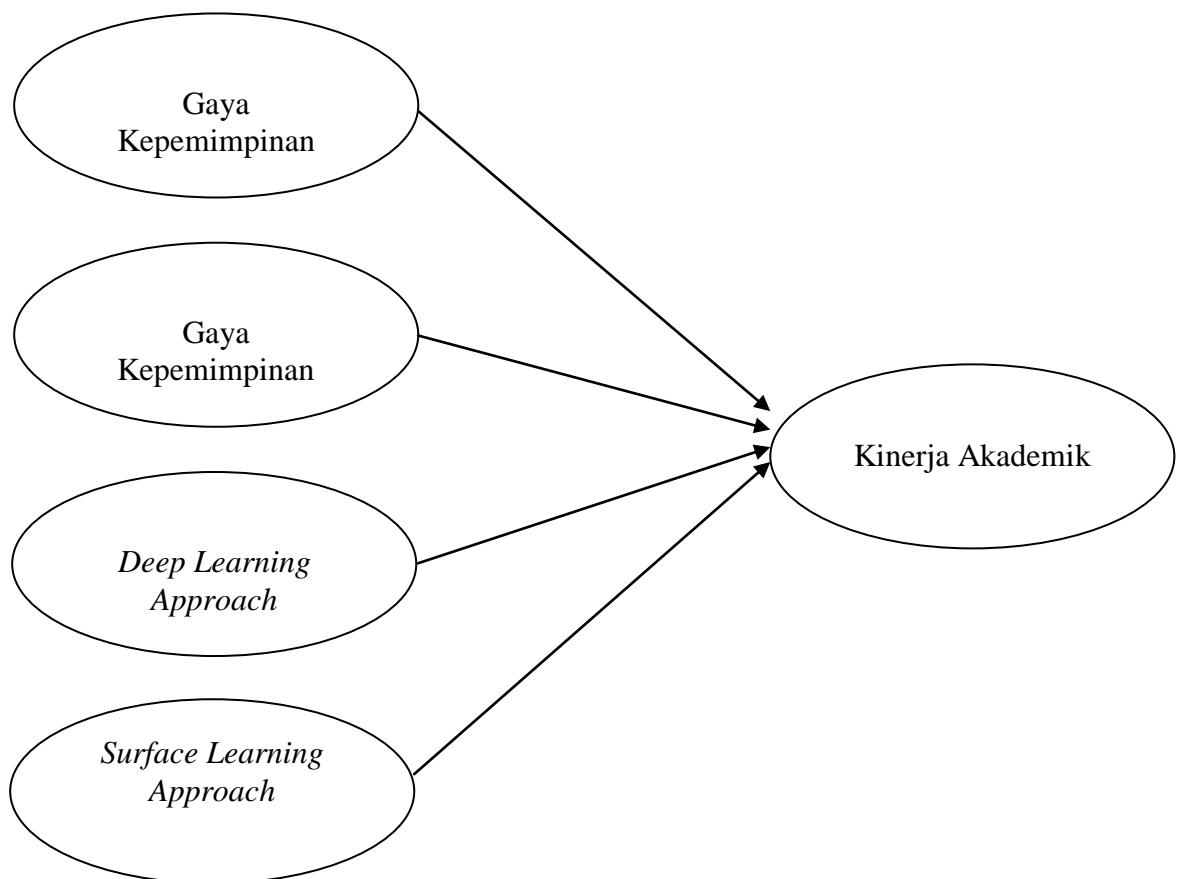
Sebelumnya, Biggs (1987) telah memberikan perbedaan antara pendekatan pembelajaran *deep learning* dan *surface learning*. Mahasiswa yang mengadopsi pendekatan *deep learning*: 1) tertarik pada tugas akademik dan menikmati ketika mengerjakannya, 2) mencari makna yang ada dalam teks, 3) mempersonalisasi tugas, membuatnya berarti untuk menambah pengalaman, 4) mengintegrasikan aspek-aspek atau bagian tugas ke keseluruhan, melihat hubungan antara keseluruhan dan pengetahuan sebelumnya, dan 5) mencoba berteori tentang tugas serta membentuk hipotesis. Sementara bagi mahasiswa yang mengadopsi pendekatan *surface learning* akan: 1) melihat tugas sebagai permintaan yang mesti dipenuhi, 2) melihat aspek atau bagian tugas sebagai hal terpisah dan tidak berhubungan dengan tugas lainnya, 3) khawatir tentang waktu penyelesaian tugas, 4) menggantungkan pada daya ingat, mencoba memproduksi lagi aspek-aspek permukaan dari tugas (kata-kata yang digunakan, contohnya)

Biggs (2007) melihat pendekatan pembelajaran mahasiswa sebagai sekumpulan motif dan strategi yang cocok. Mahasiswa yang hanya ingin lulus saja dengan usaha minimal nampaknya hanya mengingat bagian-bagian utama tema perkuliahan, sedangkan

mahasiswa yang secara intrinsik termotivasi akan fokus pada eksplorasi subjek, kemudian menghubungkan antar makna sebelum dan sesudah informasi tersebut.

Tujuan pembelajaran kualitas seharusnya persis dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan pendekatan *deep learning* dan secara bersamaan tidak mendorong mahasiswa menggunakan pendekatan *surface learning*. Dalam perspektif ini, cara pembelajaran yang digunakan secara aktual menggambarkan sifat hubungan diantara mahasiswa, tugas dan konsteks akademik dengan guru sebagai faktor kontekstual. Baik dosen maupun mahasiswa bertanggungjawab akan hasil belajar mahasiswa (Cuciac, L.S. et al, 2015)

Model Penelitian



Metode Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen itu valid jika memiliki validitas >4 . Validitas yang digunakan dalam penelitian

ini adalah validitas konstruk, sehingga pendekatan yang digunakan adalah analisis faktor *Kaiser-Meyer-Olkin*. Nilai tinggi antara 0,5 sampai 1 menunjukkan bahwa penggunaan analisis faktor adalah tepat.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya suatu instrumen dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang tidak baik akan mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Keputusan uji reliabilitas adalah jika cronbach's alpha > 0,7. .

Analisis Data

Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan *goodness of fit* untuk mengetahui apakah suatu variabel bisa didekati dengan menggunakan distribusi atau tidak. Data dikatakan normal jika nilai sig > 0,5.

Regresi Berganda

Uji regresi berganda mempunyai rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

α : konstanta

β : koefisien regresi variabel bebas

X1 : variabel gaya kepemimpinan transformasional

X2 : variabel gaya kepemimpinan transaksional

X3 : variabel pendekatan pembelajaran *deep learning*

X4 : variabel pendekatan pembelajaran *surface learning*

Y : variabel prestasi akademik mahasiswa

e : *error*

Kelayakan Model

Uji statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah uji untuk mengukur derajat kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara lebih baik.

Uji t

Uji t merupakan uji pengaruh suatu variabel bebas ke variabel terikat secara individual. H_0 tidak bisa ditolak jika probabilitas $>0,05$, sementara jika $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil Penelitian

Uji Validitas Variabel X1

Pada pengujian validitas tahap satu pada indikator-indikator dari variabel X1 ini ternyata X1.9 dan X1.10 mempunyai nilai *loading factor* $< 0,4$ yang berarti bahwa kedua indikator ini tidak valid. Tidak valid artinya indikator X1.9 dan X1.10 tidak bisa digunakan untuk mengukur X1. Dengan demikian maka kedua indikator ini dikeluarkan saja. Setelah kedua indikator ini dikeluarkan, kemudian dilakukan uji validitas tahap 2 terhadap indikator-indikator yang valid.

Pada pengujian validitas tahap dua ini ternyata semua indikator valid karena *loading factor* $> 0,4$. Hal ini berarti bahwa indikator X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8, X1.11, X1.12, X1.13, X1.14, X1.15, dan X1.16 bisa digunakan untuk mengukur variabel X1. Nilai KMO $0,919 > 0,5$, ini berarti syarat kecukupan sampel terpenuhi. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pada indikator-indikator dari variabel X1 ini dapat dilakukan uji reliabilitas.

Variabel X2

Pada pengujian validitas tahap satu ini ternyata semua indikator-indikator dari variabel X2 valid karena *loading factor* $> 0,4$. Hal ini berarti bahwa indikator X2.1, X2.2, X2.3, dan X.2.4 dapat digunakan untuk mengukur variabel X2. Nilai KMO $0,735 > 0,5$, ini berarti syarat kecukupan sampel terpenuhi. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pada indikator-indikator dari variabel X2 ini dapat dilakukan uji reliabilitas.

Variabel X3

Pada pengujian validitas tahap satu ini ternyata semua indikator-indikator dari variabel X3 valid karena *loading factor* $> 0,4$. Hal ini berarti bahwa indikator X3.1, X3.2, X3.3, X.3.4, X3.5, X3.6, X3.7, X3.8, X3.9 dan X3.10 dapat digunakan untuk mengukur variabel X3. Nilai KMO $0,866 > 0,5$, ini berarti syarat kecukupan sampel terpenuhi. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pada indikator-indikator dari variabel X3 ini dapat dilakukan uji reliabilitas.

Variabel X4

Pada pengujian validitas tahap satu pada indikator-indikator dari variabel X4 ini ternyata X4.4 dan X4.5 mempunyai nilai *loading factor* $< 0,4$ yang berarti bahwa kedua indikator ini tidak valid. Tidak valid artinya indikator X4.4 dan X.4.5 tidak bisa digunakan untuk mengukur X4. Dengan demikian maka kedua indikator ini dikeluarkan saja. Setelah kedua indikator ini dikeluarkan, kemudian dilakukan uji validitas tahap 2 terhadap indikator-indikator yang valid.

Pada pengujian validitas tahap dua ternyata masih ada yang tidak valid yaitu indikator X4.10 dengan nilai *loading factor* $0,391 < 0,4$. Dengan demikian maka indikator X4.10 ini dikeluarkan saja. Setelah indikator ini dikeluarkan, kemudian dilakukan uji validitas tahap 3 terhadap indikator-indikator yang valid.

Pada pengujian validitas tahap tiga ini ternyata semua indikator-indikator dari variabel X4 valid karena *loading factor* $> 0,4$. Hal ini berarti bahwa indikator X4.1, X4.2, X4.3, X.4.6, X4.7, X4.8, dan X4.9 dapat digunakan untuk mengukur variabel X4. Nilai KMO $0,825 > 0,5$, ini berarti syarat kecukupan sampel terpenuhi. Berdasarkan hal ini

dapat disimpulkan bahwa pada indikator-indikator dari variabel X4 ini dapat dilakukan uji reliabilitas.

Variabel Y

Pada pengujian validitas tahap satu ini ternyata semua indikator-indikator dari variabel Y valid karena *loading factor* > 0,4. Hal ini berarti bahwa indikator Y1, Y2, dan Y3 dapat digunakan untuk mengukur variabel Y. Nilai KMO 0,684 > 0,5, ini berarti syarat kecukupan sampel terpenuhi. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pada indikator-indikator dari variabel Y ini dapat dilakukan uji reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
X1	0,862	> 0,6	Reliabel
X2	0,688		Reliabel
X3	0,812		Reliabel
X4	0,785		Reliabel
Y	0,742		Reliabel

Berdasarkan nilai Cronbach's Alpha yang semuanya > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan Y semuanya adalah reliabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator dari variabel-variabel ini konsisten, Dengan demikian indikator-indikator dari variabel X1, X2, X3, X4 dan Y dapat dianalisis lebih lanjut.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		296
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,47797791
Most Extreme Differences	Absolute	,035
	Positive	,033
	Negative	-,035
Kolmogorov-Smirnov Z		,605
Asymp. Sig. (2-tailed)		,857

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,605 dan tidak signifikan karena $0,857 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.

Regresi Linear Berganda

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42,007	4	10,502	45,344	,000 ^a
	Residual	67,397	291	,232		
	Total	109,404	295			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji F didapatkan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa model fit atau layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,620 ^a	,384	,375	,481

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,375 menunjukkan bahwa variabel Y hanya dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 sebesar 37,5%. Sementara sisanya sebesar 62,5% variabel Y dijelaskan oleh variabel lain.

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,729	,179		4,074	,000
	X1	,024	,078	,023	,310	,756
	X2	,006	,065	,006	,088	,930
	X3	,654	,068	,566	9,603	,000
	X4	,099	,046	,106	2,181	,030

a. Dependent Variable: Y

X1 = Gaya kepemimpinan Transformasional

X2 = Gaya kepemimpinan Transaksional

X3 = *Deep Learning*

X4 = *Surface Learning*

Y = Prestasi Mahasiswa

Pembahasan Hasil Penelitian

Gaya Kepemimpinan Transformasional/Transaksional dan Prestasi Mahasiswa

Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi akademik mahasiswa. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Responden lebih banyak mempersepsikan bahwa dosen lebih banyak memainkan peran sebagai pemimpin transaksional (3,0) dibanding transformasional (2,8). Temuan ini tidak mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Bass & Riggio (2006) dalam Cuciac, L.S et al (2015) dan Harrison (2011) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding gaya kepemimpinan transaksional. Perihal signifikansi, temuan ini juga tidak mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Lin, K. (2002), Goodboy (2009), Pounder (2008a).

Hal-hal yang bisa dijelaskan perihal temuan ini adalah bahwa dalam konteks perguruan tinggi swasta pada umumnya, kualitas input belum ideal. Dosen sering kecewa dengan hasil belajar yang dicapai mahasiswanya. Dari jumlah mahasiswa tertentu di kelas, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah syarat minimal cukup banyak. Sementara ketentuan minimal untuk kurikulum KBK menghendaki mahasiswa memiliki nilai minimal 3,0. Dosen menempuh langkah pragmatis dengan memberikan reward bagi mahasiswa yang melakukan effort tertentu. Hal ini bisa jadi menjadi penyebab mengapa responden mempersepsikan dosen lebih memainkan peran transaksional. Indikasi ini didukung oleh Cuciac, L.S et al (2015) bahwa ketika tingkat kinerja mahasiswa rendah, dosen secara praktis akan berorientasi pada tugas, dalam pengertian bahwa tujuan utama bisa jadi memenuhi syarat minimal. Peran transaksional adalah peran bagaimana seorang pemimpin memberikan “iming-iming” atas capaian yang dilakukan anak buah. Dalam konteks ini, mahasiswa diberi motivasi dengan mendapatkan nilai yang lebih baik jika

mahasiswa mampu melakukan sesuatu yang diminta dosennya. Menurut pengamatan peneliti, hasil yang dicapai cukup material. Artinya dengan kualitas mahasiswa yang standar bahkan bisa jadi di bawah standar, dapat lulus mengikuti mata kuliah tertentu. Meski demikian, meskipun dipandang efektif, efek pendekatan kepemimpinan transaksional lebih bersifat jangka pendek. Untuk itu, para dosen tetap didorong untuk meningkatkan gaya kepemimpinan transformasionalnya. Indikasi yang ada bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki dampak baik dalam jangka panjang.

Penjelasan lainnya adalah perihal kecocokan item kuesioner pada kepemimpinan transformasional dengan setting pendidikan. Meskipun ada peneliti yang menyatakan bahwa model pada setting bisnis bisa diterapkan di kelas, ada juga peneliti yang menyatakan bahwa setting bisnis berbeda dengan setting pendidikan. Indikasi ini disampaikan oleh Bolkan, S. dan Goodboy, A.K (2009), perihal pentingnya item yang lebih pas untuk konteks pendidikan. Menurutnya masalah yang ada dengan penelitian gaya kepemimpinan transformasional di dalam kelas adalah bahwa MLQ tidak diciptakan untuk konteks pendidikan. Meskipun faktanya pengukuran kepemimpinan transformasional ada, standar evaluasinya di dalam kelas belum ditetapkan. Lebih jauh mereka menyarankan perlunya item-item yang persis untuk mengoperasionalkan gaya kepemimpinan transformasional di dalam kelas.

Mereka menemukan kuesioner untuk mengukur gaya kepemimpinan transformasional pada setting pendidikan dengan nama *The Student Intellectual Stimulation Scale* yang terbukti memiliki reliabilitas internal yang tinggi dan validitas konvergen. Menurutnya, penelitian tentang kepemimpinan transformasional di perkuliahan masih dalam tahap awal dan kemungkinan untuk penelitian masa depan masih sangat terbuka. Peneliti-peneliti selanjutnya bisa jadi fokus pada stimulasi intelektual khususnya untuk menentukan bagaimana gaya pengajaran mempengaruhi pengalaman mahasiswa di perkuliahan. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Gill et al (2011) membuktikan indikasi ini bahwa dimensi stimulasi intelektual memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi akademik.

Pendekatan *Deep Learning* dan Prestasi Mahasiswa

Berdasarkan uji t yang dilakukan diketahui bahwa pendekatan pembelajaran *deep learning approach* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi

mahasiswa. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi (beta) sebesar 0,566.

Ketika mahasiswa menggunakan pendekatan *deep learning*, secara intrinsik diri mahasiswa akan termotivasi. Mahasiswa mencoba menghubungkan-hubungkan pengetahuan yang didapat sebelumnya dengan pengetahuan yang diperoleh kemudian. Dalam *deep learning approach*, para mahasiswa berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai makna inti dari materi kuliah yang diberikan. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan *surface learning* yang justru sebaliknya.

Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Biggs (1987), Trigwell dan Prosser (1991), Zeegers (2001), Biggs et al (2001) serta Heikkilan dan Lonka (2006) bahwa pendekatan pembelajaran *deep learning* memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja akademik mahasiswa.

Temuan penelitian ini tidak mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Watkins (2001), meskipun dengan arah yang sama, pendekatan *deep learning* tidak berpengaruh signifikan pada kinerja mahasiswa.

Temuan lain penelitian ini adalah bahwa para responden lebih banyak menggunakan pendekatan pembelajaran *deep learning* yaitu sebesar 2,9 dibanding dengan pendekatan *surface learning* yang hanya sebesar 2,2. Temuan ini bisa jadi selaras dengan jumlah responden penelitian yang lebih banyak mahasiswinya. Di sejumlah penelitian, mahasiswi cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran *deep learning*.

Pendekatan *Surface Learning* dan Prestasi Mahasiswa

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan diketahui bahwa pendekatan pembelajaran *surface learning* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap prestasi mahasiswa. Hal ini diketahui dari nilai t sebesar $0,03 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi justru pada arah yang berlawanan yaitu *surface learning* memiliki pengaruh positif signifikan pada kinerja mahasiswa.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Watkins (2001) dan tidak mendukung temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Biggs (1987), Trigwell dan Prosser (1991), Zeegers (2001), Biggs et al (2001) serta Heikkilan dan Lonka (2006). Penjelasan yang bisa diberikan adalah bahwa pendekatan pembelajaran

sensitif pada konteks pembelajaran, umur serta jender (Gijbels et al, 2005). Konteks pembelajaran mengacu pada mata kuliah yang dipelajari. Artinya untuk mata kuliah tertentu, mahasiswa akan cenderung menggunakan pendekatan tertentu. Sedangkan jender, sebagian besar responden adalah mahasiswi yang dari beberapa bukti empirik diketahui bahwa mahasiswi cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran *deep learning approach* dibanding dengan mahasiswa. Umur juga memiliki hubungan dengan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Semakin mahasiswa itu berada pada semester yang lebih atas maka pendekatan pembelajaran yang digunakan akan lebih mengacu pada *deep learning approach*.

Penjelasan lainnya adalah bahwa ada indikasi pengaruh pendekatan pembelajaran *surface learning* ke prestasi akademik mahasiswa dimediasi oleh jenis/tipe pertanyaan ujian mata kuliah tertentu (Gijbel et al, 2005). Jika pertanyaan mata kuliah tertentu dari dosen tertentu cenderung ke jenis pertanyaan hafalan maka mahasiswa akan cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran *surface learning*. Meski demikian penelitiannya belum berhasil membuktikan signifikansinya.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya diketahui bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi akademik mahasiswa. Responden lebih banyak mempersepsikan dosennya memiliki gaya kepemimpinan transaksional dibanding transformasional. Penelitian dapat membuktikan bahwa pendekatan *deep learning* memiliki pengaruh positif signifikan pada kinerja mahasiswa. Sedangkan pendekatan pembelajaran *surface learning* tidak memiliki negatif signifikan pada kinerja mahasiswa. Temuan penelitian ini memberikan dukungan dan tidak memberikan dukungan ke sejumlah penelitian yang sebelumnya dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa bukti empirik masih banyak dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas perihal hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Sejumlah faktor yang memiliki potensi berpengaruh pada pendekatan pembelajaran tertentu penting untuk dipertimbangkan bagi penelitian berikutnya, seperti: jender, usia, jenis mata kuliah, dan lain-lain.

Agenda penelitian mendatang disarankan melibatkan sampel yang lebih besar dan lebih heterogen. Penelitian mendatang juga disarankan menggunakan tipe perguruan tinggi yang berbeda, dengan tingkat prestasi mahasiswa yang berbeda serta menggunakan ukuran kinerja akademik yang bisa jadi berbeda.

Daftar Pustaka

- Antonakis, J., & Atwater, L. (2002). *Leader Distance: A Review and a proposed theory*. The Leadership Quarterly. 673-704
- Antonakis, J. Avolio, B.J., & Sivasubramaniam, N. (2003). Context and leadership: an examination of the nine-factor full-range leadership theory using the Multifactor Leadership Questionnaire. The Leadership Quarterly. 14 (3), 261-295
- A Gill dkk.2011. The Relations of Transformational Leadership and Empowerment with Student Perceived Academic Performance: A Study among India Commerce Students. Business and Economics Journal. Volume 2011: BEJ-34
- Bass, B.M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership. European Journal of work and organizational psychology, 8(1), 9-32
- Bass, B.M. et.al. (2003) The multifactor leadership questionnaire report. Palo Alto, CA: Mind Garden
- Bass, B.M. et.al. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of applied psychology, 88(2), 207-218.
- Biggs. 1987. Student Approaches to Learning and Studying. Hawthorne. Vistoria: Australian Council for Education Research
- Biggs, Kember & Leung. 2001. The revised two factor study process questionnaire. British journal of education psychology, 7, (1), 133-149
- Bolkan, S. dan Goodboy, A.K. 2009. *Transformational Leadership in the Classroom: Fostering student learning, student participation and teacher credibility*. Journal of Instructional Psychology. 36(4), 296-306
- Bolkan, S. dan Goodboy, A.K. 2010. *Transformational Leadership in the Classroom: The Development and Validation of the Student Intellectual Stimulation Scale*. Communication Reports. 23(2). 91-105
- Chen. 2008. Grade-Level Differences Relations of Parental, Teacher & Peer Support to Academic Engagement and Achievement among Hong Kong students. Schools Psychology International, 29 (2), 183-198
- Chen, J.J. 2005. *Relation of Academic Support from Parents, Teachers, and Peers to Hong Kong Adolescents' Academic Achievement: The Mediating Role of Academic Engagement*. Genetic, Social, and General Psychology Monographs. 13(2).77-127

- Cuciac, L.S et al. 2015. The Influence of Teachers' perceived leadership styles and students' learning approaches on academic achievement. Proceeding of the 13th edition of the international conference on science of education. Sureava
- Eccles dan Roeser. 2011. Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of research on adolescence, 21 (1), 225-241
- Entwistle, N. dan Waterston, S.1988. *Approaches to Studying and Levels of Processing in University Students*. Br. J. Educ. Psychol. 258-265
- Gijbels, D. et al. 2005. *The relationship between students' approaches to learning and the assessment of learning outcomes*. European Journal of Psychology of Education. XX. 327-341
- Harrison, J.L. (2011). *Instructor Transformational Leadership and Student Outcomes*. Emerging Leadership Journeys, 4(1), 82-136
- Heikkila, A. dan Lonka, K. 2006. *Studying in higher education: Students' approaches to learning, self-regulation, and cognitive strategies*. Studies in Higher Education. 31(1)
- Judge, T.A., & Piccolo., R.F. (2004) Transformational and Transactional leadership: A Meta-Analytic test of their relative validity. Journal of Applied Psychology, 89(5), 755-768
- Lin, K. 2012. *Rethink Student Evaluation of Teaching*. World Journal of Education. 2(2)
- Lussier, R., & Achua, C.F. (2007). Leadership Theory, application and skill development. Cincinnati, OH: South Western Publishing
- Marton dan Saljo. 1976. On qualitative differences in learning: 1-outcome and process. British journal of educational psychology, 46 (1), 4-11
- Moss, S.A., & Ritossa, D.A. (2007). The impact of goal orientation on the association between leadership style and follower performance, creativity and work attitudes. Leadership & Organizational Development Journal, 3(4), 433-456
- Neumann dan Neumann. 1993. Quality of Learning Experience and Students' college outcome. The International Journal of Educational Management, 7: 4-10
- Pounder, J.S. 2008a. *Transformational classroom leadership: A novel approach to evaluating classroom performance*. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33, 233-243
- Taylor, Pressley & Pearson. 2000. *Effective teacher and schools: trends across recent studies*
- Treslan, D.L. 2006. *Transformational Leadership in the classroom: Any evidence?* Education Canada, 46, 58-62
- Trigwell, K & Prosser, M. 1991. *Relating approaches to study and the quality of learning outcomes at the course level*. British Journal of Educational Psychology, 61, 265-275

- Vermont and Verloop. 1999. Congruence and friction between learning and teaching learning and instruction, 9 (3), 257-280
- Watkins, D. 2001. *Correlates of approaches to learning: A cross-cultural meta analysis. Perspectives on thinking, learning and cognitive styles*
- Zeegers, P. 2001. *Student learning in science: A longitudinal study*. British Journal of Educational Psychology, 71, 115-132

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP *ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB)* DENGAN VARIABEL INTERVENING KEPUASAN KERJA (STUDI KASUS PADA SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SEMARANG)

Frans Sudirjo

Surel: frans_sudirjo@yahoo.co.uk

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Semarang

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi, terhadap kepuasan kerja, pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, pengaruh kepuasan kerja terhadap *organizational citizenship behavior (OCB)*, pengaruh iklim organisasi terhadap *organizational citizenship behavior (OCB)* dan pengaruh komitmen organisasi terhadap *organizational citizenship behavior (OCB)*. Populasi dan sampel adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang sebanyak 177 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data diolah dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan program Analysis of Moment Structure (AMOS) versi 19.0. Hasil penelitian menunjukkan iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB), komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB), kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB).*

Kata Kunci : *Iklim organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan Organizational Citizenship Behavior (OCB).*

Pendahuluan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang sebagai instansi pelayanan publik bidang Peternakan dan Perikanan dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai yang dapat

dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu.

Dari tingkat kehadiran sebagai indikator kedisiplinan tidak menunjukkan angka yang maksimal, tabel 1 menunjukkan keadaan prosentase angka kehadiran pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang pada tahun 2016.

Tabel 1. Tingkat Kehadiran PNS Disnakan Kab. Semarang tahun 2016

Bulan	Jumlah hari kerja	Jumlah Pegawai	rata-rata kehadiran	Prosentase kehadiran (%)
Januari	21	177	174	98,31
Pebruari	21	177	175	98,87
Maret	21	177	172	97,18
April	20	177	174	98,31
Mei	21	177	173	97,74
Juni	21	177	173	97,74
Juli	22	177	172	97,18
Agustus	19	177	173	97,74
September	20	177	173	97,74
Oktober	21	177	175	98,87
Nopember	20	177	173	97,74
Desember	18	177	172	97,18

Sumber : Disnakan Kab. Semarang, 2017

Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai telah jelas mengatur perihal masuk kerja dan ketentuan jam kerja untuk PNS, serta menguraikan berbagai bentuk sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan adanya tingkat absensi yang baik maka dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pada tabel diatas menunjukkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang pada tahun 2012 tingkat absensi belum optimal.

Melihat hal yang terjadi, sehingga memang dibutuhkan pegawai yang mempunyai kinerja yang baik untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kinerja yang baik menuntut pegawai berperilaku sesuai yang diharapkan oleh organisasi. Perilaku ini tidak hanya “*in role*” tetapi juga perilaku “*exstra role*”. Perilaku *exstra role* tersebut disebut juga dengan perilaku *Organizational Citizenship behavior (OCB)*.

Organ (2010) dalam Lubis (2015) mengatakan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) merupakan perilaku individu yang bebas, yang tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem pemberian penghargaan dan dalam mempromosikan fungsi efektif organisasi, dengan kata lain, OCB adalah perilaku karyawan yang melebihi peran yang diwajibkan, yang tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem reward formal merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Perilaku ini cenderung melihat seorang pegawai sebagai makhluk sosial dibandingkan dengan makhluk individu yang mementingkan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kemampuan untuk memilih empati pada orang lain dan lingkungannya untuk menjaga dan meningkatkan interaksi sosial yang lebih baik. Terlebih lagi, untuk melakukan segala sesuatu yang baik manusia tidak selalu digerakan oleh hal-hal yang menguntungkan dirinya, misalnya seseorang mau membantu orang lain jika ada imbalan tertentu.

Utami (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan iklim organisasi terhadap OCB. Iklim organisasi yang kondusif akan mendorong kenyamanan anggota organisasi dalam berkegiatan dan dapat berkonsentrasi dalam bekerja, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Sementara Ngadiman, Anis Eliyana dan Dwi Ratmawati (2013) dengan penelitian yang berjudul "*Influence of Transformational Leadership and Organization Climate to the Work Satisfaction, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on the Educational Personnel of Sebelas Maret University, Surakarta*", menyimpulkan bahwa Kepemimpinan Transformasional dan Iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Kerja, Kepemimpinan Transformasional dan Iklim organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen Organisasi, Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen Organisasi, Kepemimpinan Transformasional dan Iklim organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap OCB, Komitmen organisasi dan Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap OCB. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yohanes Oemar (2011) dengan judul Pengaruh Iklim Organisasi, Kemampuan kerja, komitmen Organisasi terhadap *Organizational Citizenship Behavior*

menyimpulkan Iklim organisasi, Kemampuan kerja, komitmen organisasi, Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap OCB.

Berdasar uraian diatas, terbukti masih ada kontroversi pendapat antara peneliti yang dapat disajikan secara sistematis dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 Research Gap

No	Research Gap	Temuan	Peneliti	Metode
1	Terdapat kontroversi pandangan mengenai hubungan iklim organisasi terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB)	Ada pengaruh signifikan antara Iklim organisasi terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB)	Utami (2013)	Regresi berganda
		Tidak ada pengaruh signifikan antara Iklim organisasi terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB)	Ngadiman, Anis Eliyana dan Dwi Ratmawati (2013)	SEM
2.	Terdapat kontroversi pandangan mengenai hubungan Komitmen Organisasi terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB)	Ada pengaruh signifikan antara Komitmen organisasi terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB)	Yohanes Oemar (2011)	Regresi berganda
		Tidak ada pengaruh signifikan antara Komitmen pegawai terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB)	Arum Darmawati, dkk (2013)	Regresi berganda

Sumber : dikembangkan untuk penelitian ini, 2017

Berdasar uraian tersebut diatas maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP *ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR* (OCB) DENGAN VARIABEL INTERVENING KEPUASAN KERJA (Studi Kasus pada SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang)”.

Kajian Pustaka

Pengertian Iklim Organisasi

Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah

laku anggota organisasi. Iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota dibangun, diarahkan, dan dihargai oleh sebuah organisasi. Semua organisasi tentu memiliki strategi dalam manajemen SDM. Iklim organisasi yang terbuka memacu pegawai untuk mengutarakan kepentingan dan ketidakpuasan tanpa adanya rasa takut akan tindakan balasan dan perhatian. Ni Wayan Fitriani dan I Gusti Ayu Manuati (2017) mengatakan bahwa iklim organisasi yang baik membuat enggan karyawan untuk pindah ke organisasi lain. Perilaku kekeluargaan antara karyawan membuat organisasi tempat bekerja sebagai “rumah kedua” bagi mereka. Mereka bahkan rela puluhan tahun mengabdikan sampai masa pensiun.

Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional adalah kumpulan dari perasaan dan keyakinan bahwa orang-orang tersebut memiliki organisasi secara keseluruhan (George dan Jones dalam Rini, dkk., 2013). Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi, akan melakukan tugas yang tidak hanya tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya, tetapi juga melakukan pekerjaan yang lainnya, dimana jika ada karyawan yang tidak mampu mengerjakan suatu pekerjaan, maka karyawan yang berkomitmen ini cenderung akan membantu rekannya demi tercapainya tujuan yang diharapkan oleh organisasi tanpa membanding-bandingkan kemampuannya dengan karyawan lain (Ni Wayan Fitriani dan I Gusti Ayu Manuati, 2017).

Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Robbins dan Judge (2008) mendefinisikan OCB sebagai perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang pegawai, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. OCB sangat penting artinya untuk menunjang keefektifan fungsi-fungsi organisasi, terutama dalam jangka panjang.

Pengertian Kepuasan Kerja

Mathis dan Jackson (2011) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja itu dianggap sebagai hasil dari pengalaman karyawan dalam hubungannya dengan nilai sendiri seperti apa yang dikehendaki dan diharapkan dari pekerjaannya.

Pandangan tersebut dapat disederhanakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap dari individu dan merupakan umpan balik terhadap pekerjaannya.

Hubungan Iklim Organisasi Dengan Kepuasan kerja

Penelitian yang dilakukan Ngadiman, Anis Eliyana dan Dwi Ratmawati (2013) dengan judul "*Influence of Transformational Leadership and Organization Climate to the Work Satisfaction, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on the Educational Personnel of Sebelas Maret University, Surakarta*" menunjukkan bahwa Iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : *Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja.*

Hubungan Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan kerja

Penelitian yang dilakukan oleh Ristiana (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior (OCB). Penelitian yang dilakukan oleh Kencanawati (2014) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap OCB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen karyawan terhadap perusahaan, maka OCB karyawan juga akan meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : *Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja.*

Hubungan Iklim Organisasi Dengan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB)

Hasil penelitian Lubis (2015) dan Ni Wayan Fitriani dan I Gusti Ayu Manuati (2017) menemukan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Sejalan dengan teori dari para pakar dan pembuktian empiris oleh hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut :

H3 : *Iklim Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior*

Hubungan Komitmen Organisasi Dengan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB)

Penelitian yang dilakukan Yohanes Oemar (2013) dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Kemampuan Kerja, Komitmen Organisasi terhadap *Organizational Citizenship Behavior* pegawai pada Bappeda kota Pekanbaru menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB”. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

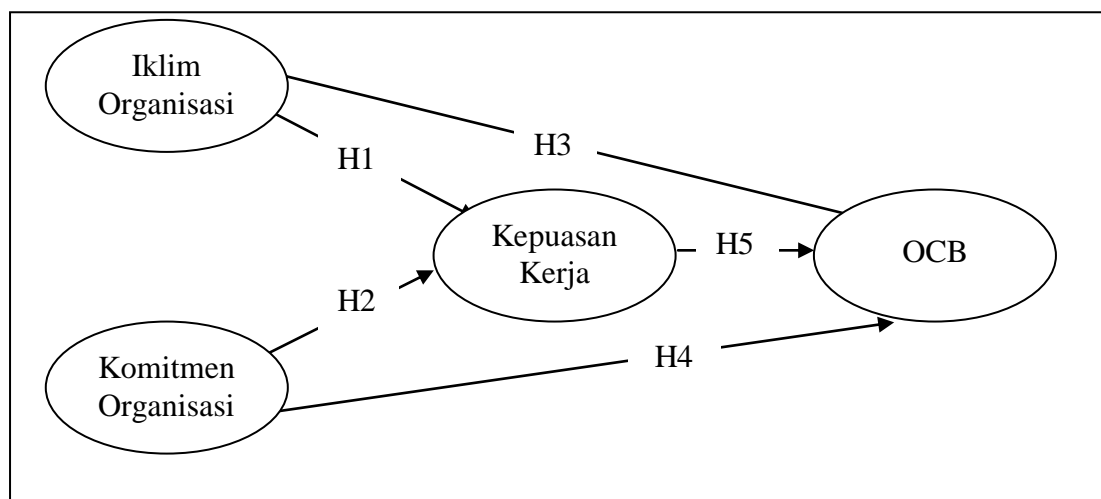
H4 : *Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior*

Hubungan Kepuasan Kerja Dengan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB)

Penelitian sebelumnya dilakukan, B. Maptuhah Rahmi (2013) dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap *Organizational Citizenship Behavior* Dan Komitmen Organisasional Dengan Mediasi Kepuasan Kerja pada guru tetap SMA Negeri di Kabupaten Lombok Timur”. Hasil pengujian membuktikan Nilai koefisien *standardized regression weight* antara variabel kepuasan kerja dengan variabel *OCB* adalah sebesar 0,164 dengan *probability* sebesar 0,054 atau $p \leq 0,05$. Ini berarti variabel kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel *OCB*. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H5 : *Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior*

Kerangka Pemikiran



Sumber : dikembangkan untuk penelitian ini, 2017

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Iklim Organisasi

Litwin & Stringer's (Hidayat 2001) ketika mengkaji tentang dimensi-dimensi iklim organisasi dalam suatu model alat ukur yang disebut *Litwin & Stringer' Organizational Climate* (LSOC), iklim organisasi dapat digambarkan dalam empat indikator , yaitu :

- a. Struktur,
- b. Tanggungjawab individu,
- c. Dukungan,
- d. Komitmen.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional merupakan sikap loyal dari pekerja organisasi dan merupakan proses yang berkelanjutan. Alat ukur komitmen organisasi dari Meyer dan Allen (1997) indikatornya adalah :

- a. Komponen *affective*, adanya keterlibatan pada organisasi
- b. Komponen *continuance*, Pekerja yang mau tetap berada di organisasi
- c. Komponen *normative*, kewajiban untuk memberikan hasil terbaik untuk organisasi.

Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Indikator yang digunakan (Organ, 1988), yakni :

- a. Perilaku *Altruisme* : adalah perhatian tanpa pamrih untuk kesejahteraan orang lain, membantu orang lain pekerjaannya yang sangat banyak.

- b. Perilaku *Courtesy* : mengambil langkah-langkah untuk mencoba mencegah masalah dengan pekerja lain dan memaksimalkan penggunaan waktu.
- c. Perilaku *Civic Virtue* : menghadiri pertemuan yang tidak wajib, tetapi dianggap penting, mengikuti perubahan dalam organisasi.
- d. Perilaku *Conscientiousness* : yaitu tidak mengambil istirahat ekstra. Patuhi aturan dan peraturan perusahaan, melakukan tugas melebihi kerja mereka.
- e. Perilaku *Sportmanship* : menghindari komplain tentang hal-hal yang tidak berarti.

Kepuasan Kerja

Menurut Smith, Kendall & Hulin (dalam Luthans, 2006) ada beberapa dimensi kepuasan kerja yang dapat digunakan untuk mengungkapkan karakteristik penting mengenai pekerjaan, dimana orang dapat meresponnya. Indikator tersebut adalah:

- a. Pekerjaan itu sendiri (*Work It self*),
- b. Atasan (*Supervision*),
- c. Teman sekerja (*Workers*),
- d. Promosi (*Promotion*).

Populasi

Populasi adalah kumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari ciri-ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai kelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik (Cooper dan Emory, 1995). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang yang berjumlah 177 orang.

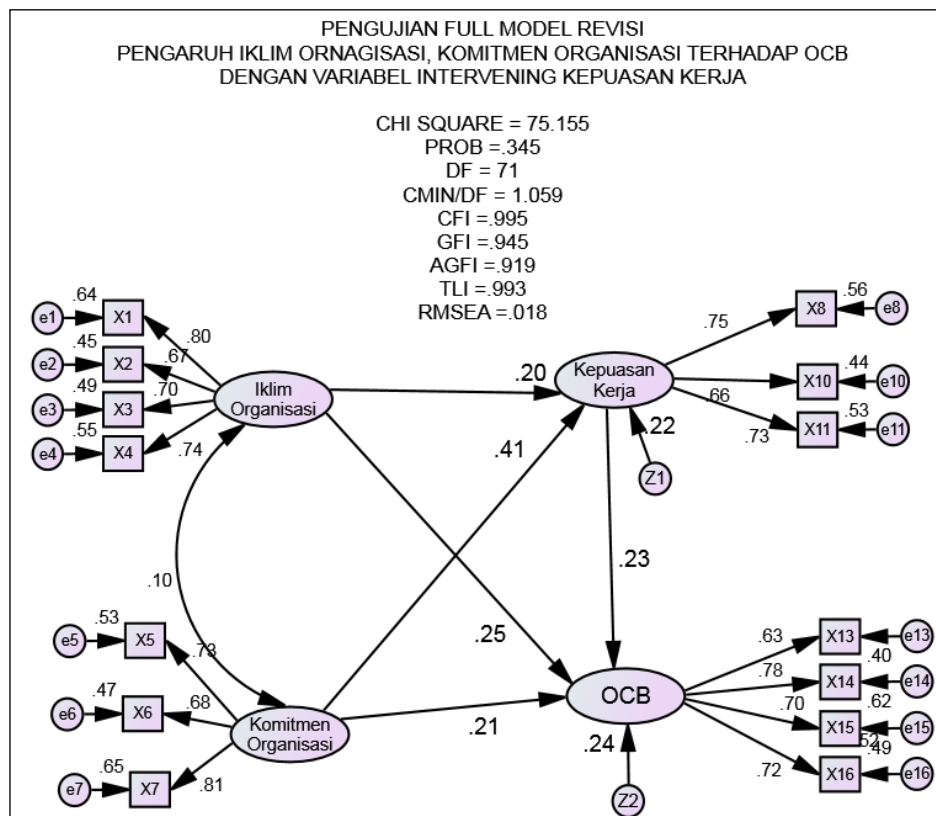
Sampel

Sampel adalah subset dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 2012). Pada penelitian ini menggunakan seluruh populasi dijadikan sebagai sampel, maka teknik yang digunakan adalah sensus. Jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Semarang sebanyak 177orang.

Teknik Analisa Data

Model yang digunakan untuk menganalisa dengan menggunakan *the structural Equation Modelling (SEM)* dari paket *software statistic AMOS* dalam model dan pengkajian hipotesis. Model persamaan structural SEM adalah sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relative rumit secara simultan. Yang dimaksud rumit adalah model simultan yang dibentuk melalui lebih dari satu variable dependen pada saat yang sama berperan sebagai variable independen bagi hubungan berjenjang lainnya (Ferdinand, 2006).



Sumber : Data primer diolah, 2017

Gambar 2. Analisis Full Structural Equation Modelling (SEM)

Hasil pengujian SEM menunjukkan bahwa model dapat diterima dan sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran memenuhi kriteria *Goodness of fit* dengan *Chi-square* sebesar 75,155 dan tingkat signifikan sebesar 0,345 menunjukkan model persamaan struktural yang baik. Semua indeks pengukuran CMIN/DF, GFI, AGFI, TLI < CFI dan RMSEA berada pada rentang yang diharapkan. Hasil pengujian SEM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Pengujian SEM

No	Goodness of fit index	Cut of value	Hasil Analisis	Evaluasi Model
1	χ^2 - <i>Chi-Square</i>	92,808	79,155	Baik
2	Significancy Probability	$\geq 0,05$	0.345	Baik
3	CMIN/DF	$\leq 2,00$	1.059	Baik
4	GFI	$\geq 0,90$	0,945	Baik
5	AGFI	$\geq 0,90$	0.919	Baik
6	TLI	$\geq 0,95$	0,993	Baik
7	CFI	$\geq 0,95$	0,995	Baik
8	RMSEA	$\leq 0,08$	0.018	Baik

Sumber : Data primer diolah, 2017

Hasil Full model SEM dapat diartikan bahwa hubungan antar variabel laten dengan indikator dinyatakan signifikan. Hasil uji koefisien regresi menunjukkan nilai yang memenuhi syarat yakni CR berada diatas nilai 1,96 dengan probabilitas <0.05. Hubungan antar variabel memiliki pengaruh positif, sebagai contoh Kepuasan kerja dengan Iklim organisasi memiliki nilai CR = 2,232 (> 1,96) dengan probabilitas 0.026 (< 0.001). Hal ini berarti variabel Iklim Organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, hipotesis diterima secara empiris. Penjelasan variabel yang lain seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Regression Weights Standardized SEM

Pengaruh Antar Variabel	Estimate	Standardized estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kepuasan_Kerja <--- Iklim_Organisasi	.191	.203	.086	2.232	.026	par_11
Kepuasan_Kerja <--- Komitmen_Organisasi	.373	.407	.094	3.944	***	par_12
OCB <--- Iklim_Organisasi	.189	.249	.072	2.642	.008	par_13
OCB <--- Komitmen_Organisasi	.154	.209	.076	2.013	.044	par_10
OCB <--- Kepuasan_Kerja	.187	.233	.093	2.022	.043	par_9

Sumber : Data primer diolah, 2017

Pengujian Hipotesis

Selanjutnya pembahasan mengenai pengujian hipotesis akan dilakukan secara bertahap sesuai urutan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 bertujuan menguji apakah iklim organisasi berpengaruh positif terhadap terhadap kepuasan kerja pegawai. Dari analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai CR sebesar 2.232 dan dengan probabilitas sebesar 0.026. Kedua nilai tersebut menunjukkan hasil yang memenuhi syarat yaitu CR diatas diatas 1.96 dan probabilitas dibawah 0,05, dengan demikian Hipotesis 1 diterima. Melihat nilai estimate yang bernilai positif dapat diartikan bahwa pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja adalah positif artinya semakin baik iklim organisasi maka makin tinggi kepuasan kerja pegawai.
2. Hipotesis 2 bertujuan menguji apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap terhadap kepuasan kerja pegawai. Dari analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai CR sebesar 3,944 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut menunjukkan hasil yang memenuhi syarat yaitu CR diatas 1.96 dan probabilitas dibawah 0,05, dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Melihat nilai estimate yang bernilai positif dapat diartikan bahwa pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kepuasan kerja adalah positif artinya semakin baik Komitmen Organisasi makin tinggi kepuasan kerja pegawai.
3. Hipotesis 3 bertujuan menguji apakah iklim organisasi berpengaruh positif terhadap terhadap OCB pegawai. Dari analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai CR sebesar 2.642 dan dengan probabilitas sebesar 0.008. Kedua nilai tersebut menunjukkan hasil yang memenuhi syarat yaitu CR diatas diatas 1.96 dan probabilitas dibawah 0,05, dengan demikian Hipotesis 3 diterima. Melihat nilai estimate yang bernilai positif dapat diartikan bahwa pengaruh Iklim Organisasi berpengaruh terhadap terhadap OCB.
4. Hipotesis 4 bertujuan menguji apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap terhadap OCB pegawai. Dari analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai CR sebesar 2.013 dan dengan probabilitas sebesar 0.044. Kedua nilai tersebut menunjukkan hasil yang memenuhi syarat yaitu CR diatas diatas 1.96 dan probabilitas

- dibawah 0,05, dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Melihat nilai etimate yang bernilai positif dapat diartikan bahwa pengaruh Komitmen Organisasi terhadap OCB adalah positif artinya semakin baik Komitmen Organisasi makin tinggi OCB pegawai.
5. Hipotesis 5 bertujuan menguji apakah Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap terhadap OCB pegawai. Dari analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai CR sebesar 2.022 dan dengan probabilitas sebesar 0.043. Kedua nilai tersebut menunjukkan hasil memenuhi syarat yaitu CR diatas diatas 1,96 dan probabilitas dibawah 0,05 dengan demikian Hipotesis 5 diterima. Melihat nilai etimate yang bernilai positif dapat diartikan bahwa pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB adalah berpengaruh positif dan signifikan.

Hasil Dan Pembahasan

Hubungan antara Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja

Hasil ini mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman, Anis Eliyana dan Dwi Ratmawati (2013), menjelaskan bahwa Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sementara Burke (1994) berpendapat bahwa iklim organisasi yang kondusif erat kaitannya dengan kepuasan kerja melalui persepsi terhadap pekerjaan itu sendiri. Penelitian lain yang memperkuat pendapat mengenai hubungan iklim organisasi dan kepuasan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Friedlander dan Margulies (1969) yang berpendapat bahwa iklim organisasi mempunyai hubungan yang langsung terhadap kepuasan kerja.

Hubungan antara Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Edi Wibowo dan Wiwik Susilowati (2010) yang menunjukkan bahwa Komitmen organisasional secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.

Sementara itu dukungan penelitian lain dikemukakan oleh Zineldin and Johnsson, (2000) yang menyatakan bahwa kepuasan yang tinggi akan menyebabkan kualitas hubungan antar individu dalam organisasi semakin baik, dan kualitas hubungan akan menyebabkan komitmen diantara mereka makin baik.

Hubungan antara Iklim Organisasi terhadap OCB

Penelitian ini memberikan dukungan terhadap Hasil penelitian yang dilakukan Ida Ayu Brahmasari (2008) yang menunjukkan hasil Iklim Organisasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap OCB. Hasil penelitian ini juga didukung pendapat Suresh et al, (2010) bahwa *Organizational Citizenship Behavior* juga berhubungan erat dengan Iklim organisasi karena merupakan elemen penting dalam menentukan efisiensi suatu organisasi dan mempunyai pengaruh kuat dalam organisasi seperti struktur, sistem dan perilaku manajemen.

Hubungan antara Komitmen Organisasi terhadap OCB

Hasanbasri (2007) meneliti kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap OCB dan menemukan bahwa baik kepuasan kerja maupun komitmen organisasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap OCB. Hal ini didukung penelitian Duff (2007) dan Jamali et al (2009) menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap OCB. Dukungan secara teoritis dikemukakan oleh Podsakof (1996) dalam Organ *et al.* (2006) bahwa variabel kepuasan, komitmen organisasi dan kepercayaan pada pimpinan sebagai variabel mediasi yang berpengaruh terhadap OCB. Semakin meningkat kepuasan, komitmen organisasi dan kepercayaan pada pimpinan maka akan meningkatkan OCB pegawai. Penelitian lain juga dilakukan Yohanes Oemar (2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB.

Hubungan Kepuasan Kerja Terhadap OCB

Dukungan terhadap hasil penelitian ini dikemukakan oleh Krishnan *et al.* (2009) yang menunjukkan bahwa baik kepuasan kerja intrinsik maupun kepuasan kerja ekstrinsik berpengaruh signifikan terhadap OCB. Penelitian lain mengenai kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan OCB yakni B. Maptuhah Rahmi (2013).

Kesimpulan

1. Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, artinya bahwa iklim organisasi yang ada dalam keadaan yang baik dan kondusif maka akan meningkatkan kepuasan pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
2. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, artinya semakin kuat komitmen organisasi maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
3. Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), artinya bahwa Iklim organisasi yang tinggi mampu meningkatkan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
4. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Komitmen Organisasi mampu meningkatkan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
5. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin tinggi pula tingkat *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.

Saran

1. Untuk meningkatkan kepuasan kerja pada Pegawai, perlu menciptakan suasana kerja yang harmonis antara atasan dan bawahan maupun antara rekan kerja sehingga setiap pegawai merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
2. Dalam rangka peningkatan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) Pegawai, perlu dilakukan dengan meningkatkan kepuasan kerja pegawai.
3. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengembangkan kemampuan secara maksimal dan melakukan pekerjaannya sesuai kewajiban dan potensi yang ada.

Implikasi Teoritis

Model dalam penelitian ini telah diuji kesesuaian model (*fit model*) dengan menggunakan alat analisis *the Structural Equation Modelling (SEM)* dari paket *software statistic AMOS*, sehingga memberikan dukungan empiris terhadap temuan penelitian terdahulu atau menguatkan teori-teori sebelumnya.

Implikasi Manajerial

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat diperlukan perilaku OCB yang tinggi dan dilakukan secara tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh, niscaya akan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Dengan demikian akan berimbas pada kinerja pemerintahan pada tataran optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Keterbatasan Penelitian

1. Kuesioner penelitian sebagai alat ukur pada ke 4 (empat) variabel tanpa menyertakan alasan mengapa responden memilih pilihan tersebut sehingga eksplorasi data menjadi sangat terbatas.
2. Hasil pembahasan terbatas pada perhitungan secara kuantitatif dengan analisis statistik tanpa dukungan pengolahan data secara kualitatif sehingga penelitian ini hanya berlaku pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.

Agenda Penelitian Kedepan

1. Penambahan indikator-indikator lain diluar penelitian ini yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat mengukur variabel lebih baik dan lebih qualified seperti variabel Kinerja dan Kepemimpinan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan pembandingan dengan lingkup organisasi yang luas dan populasi yang lebih besar sehingga penelitian ini diharapkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, Arum, Lina Nur Hidayati & Dyna Herlina S. 2013, *Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior*. Jurnal *Economia* Volume 9 Nomor 1.
- Fitriani, Ni Wayan & I Gusti Ayu Manuati Dewi. 2017, *Pengaruh Iklim Organisasi dan Loyalitas Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior*. eJurnal Manajemen Unud. Volume 6 No.5.
- Kencanawati, A.A.M. 2014, *Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Kepuasan Kerja Memengaruhi Organizational Citizenship Behavior Pada PT. (BPR) Cahaya Bina Putra Kerobokan Bandung*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 10 (1) : 44-45.
- Lubis, M. S. 2015, *Pengaruh Iklim Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pembentukan Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Karyawan*. eJurnal Apresiasi Ekonomi. 3 (2) : 75 – 84.
- Ngadiman., Anis Eliyana, & Dwi Ratmawati. 2013, *Influence of Transformational Leadership and Organization Climate to the Work Satisfaction, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on the Educational Personnel of Sebelas Maret University, Surakarta*. Europe Journal Of Business And Management. Volume 5 No. 10.
- Oemar, Yohanes. 2011, *Pengaruh Budaya Organisasi, Kemampuan kerja, komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 11 No. 1.
- Purnama Chamdan. 2013, *Influence Analysis Of Organizational Culture Organizational Commitment Job And Satisfaction Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Toward Improved Organizational Performance International*. Journal Of Business, Humanities And Technology. Volume 3 No. 5.
- Rahmi, B. Maptuhah. 2013, *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dan Komitmen Organisasional Dengan Mediasi Kepuasan Kerja (Studi Pada Guru Tetap SMA Negeri Di Kabupaten Lombok Timur)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Ristiani, Merry. 2013, *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Dan Kinerja Karyawan Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Denpasar*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen. 9 (1) : 56-70.
- Stephen P.Robbins. Timothy A. Judge, 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Utami, H.M. 2013, *Pengaruh Iklim Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja Anggota Koperasi*. E-Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 7(2).

Wibowo, Edi., Wiwik Susilowati. 2010, *Pengaruh Kepemimpinan, Organizational Citizenship Behaviour, Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kepuasan Kerja*. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan . Volume 10, No. 1, April : 66 – 73.

ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BATU BARA

Annisa Ilmi Faried Lubis dan Rahmad Sembiring

Surel:

annisailmi@dosen.pancabudi.ac.id

rahmadsembiring@dosen.pancabudi.ac.id

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan

ABSTRAK

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dimana luas wilayah 904,96 km² memiliki jumlah penduduk ±453.764 jiwa. Kabupaten Batu Bara memiliki sumber daya alam perikanan yang potensial untuk bisa dikelola secara bertahap dan berkelanjutan. Aspek dalam pengelolaan sumber daya perikanan belum berjalan efektif dan terawasi dengan baik. Nelayan pesisir berusaha untuk bisa memperoleh hasil tangkapan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan aspek keberlanjutan. Disisi lain dengan keterbatasan yang dimiliki oleh daerah tersebut seperti sumber daya manusia, modal, infrastruktur serta rendahnya akses informasi dan penguasaan teknologi oleh masyarakat disekitar pesisir dalam upaya pemanfaatan sumber daya alamnya menyebabkan mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu pembangunan harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam semua aspek dan dapat mengoptimalkan sumber daya alam lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Analisis peningkatan kesejahteraan nelayan dalam mendukung pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai macam strategi pengembangan wilayah pesisir tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional dan perencanaan bagi para stakeholders serta pelaku usaha di bidang perikanan dalam mendukung pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat nelayan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan diatas, yaitu : (1) Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Batu Bara (2) Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dalam mendukung pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Batu Bara. (3) Untuk menganalisis pengaruh pembangunan akses modal dalam mendukung pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Batu Bara. (4) Untuk menganalisis pengaruh pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Batu Bara. (5) Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pengelolaan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh signifikan dalam mendukung pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Batu Bara.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Nelayan, Kebijakan Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Pembangunan Akses Modal, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kemiskinan*

Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir salah satu kecenderungan baru dalam paradigma pembangunan yang ada di Indonesia. Setelah sekian lama wilayah laut dan pesisir menjadi wilayah yang terabaikan dan dilupakan dalam pembangunan di Indonesia. Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Ada banyak kegunaan yang mampu kita eksplorasi dari sumber kelautan yang kita miliki, salah satunya memberdayakan masyarakat pesisir sebagai konsumen utama yang akan memanfaatkan sektor kelautan yang ada.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan masih menggunakan indikator perubahan pendapatan nelayan. Indikator demikian menurut Basuki, dkk (2001) kurang tepat dan menyesatkan untuk menggambarkan secara tepat perbaikan kesejahteraan nelayan karena belum membandingkan dengan pengeluaran nelayan untuk kebutuhan konsumsi keluarganya.

Menurut Purwanto (2009) faktor determinan belum tercapainya pengelolaan sumber daya peningkatan kesejahteraan secara optimal adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, fasilitas ekonomi perikanan, dan fasilitas umum-sosial,
2. Rendahnya kualitas SDM, masyarakat belum memiliki kemampuan maksimal untuk mengelolanya demi meningkatkan kesejahteraan sosial mereka,
3. Teknologi penangkapan yang terbatas kapasitasnya,
4. Akses modal dan pasar produk ekonomi lokal yang terbatas,
5. Tidak adanya kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjadi instrument pembangunan masyarakat.
6. Belum adanya komitmen pembangunan kawasan pesisir secara terpadu.

Dengan adanya strategi peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir ini diharapkan menjadi sebuah solusi dimana penyelesaiannya perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan. Selain itu, peningkatan produktivitas masyarakat pesisir lebih menjadi sasaran dalam proses pembangunan pesisir

guna memajukan kesejahteraan serta menyongsong kemandirian daerah secara berkelanjutan. Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan pembangunan manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat.

Pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya (DKP, 2000). Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat pesisir Indonesia adalah permodalan yang lemah, padahal permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pesisir itu sendiri.

Hasil pengamatan dilapangan masyarakat di kawasan pesisir kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Meskipun cukup potensial namun tingkat kesejahteraan masyarakat kawasan pesisir relatif masih rendah jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Begitu banyak kendala yang dihadapi masyarakat di kawasan pesisir diantaranya adalah kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal dan pembangunan sarana dan prasarana dan minimnya alat tangkap dan faktor cuaca yang tidak menentu. Kekurangan modal ini juga sangat mengurangi aktivitas usaha masyarakat pesisir, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Kasryno, 2004).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah mempunyaiperanan penting dalam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Adapun strategi pemerintah dalam menanggulangi kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi sedikit teratasi dalam upaya peningkatan pembangunan pesisir yang mencakup kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pengembangan akses modal, pengelolaan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana serta mengurangi angka kemiskinan diwilayah tersebut.

Dengan adanya strategi peningkatan kesejahteraan pesisir ini diharapkan menjadi sebuah solusi dimana penyelesaiannya perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif

dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan. Selain itu, peningkatan produktivitas masyarakat pesisir lebih menjadi sasaran dalam proses peningkatan kesejahteraan pesisir guna memajukan kesejahteraan serta menyongsong kemandirian daerah secara berkelanjutan. Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan kesejahteraan manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat.

Jumlah penduduk Batu Bara keadaan Bulan Juni Tahun 2016 diperkirakan sebesar 379.400 jiwa, luas wilayah 904,96 Km², Jumlah rumah tangga sebanyak 87.592. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 77,11 persen dan sisanya 22,89 persen tinggal di daerah perkotaan. Bila dilihat per kecamatan maka Kecamatan Lima Puluh merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 22,85 persen sedangkan Kecamatan Sei Balai adalah yang terkecil yaitu 7,63 persen.

Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Kecamatan Medang Deras dengan kepadatan mencapai 705 jiwa per km² disusul dan yang terjarang adalah Kecamatan Sei Suka yaitu 311 jiwa per km². Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh etnis Melayu, Jawa dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini.

Tabel 1 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Rumah Tangga	Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
Sei Balai	92,64	6.604	26.914	7,09
Tanjung Tiram	173,79	14.714	63.728	16,80
Talawi	89,80	12.510	54.185	14,28
Lima Puluh	238,55	19.811	85.811	22,62
Air Putih	72,24	10.855	47.017	12,39
Sei Suka	171,47	12.238	53.010	13,97
Medang Deras	65,47	11.251	48.735	12,85
Total	904,96	87.592	379.400	100,00

Sumber : Barada, 2016

Adapun data-data sehubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram sebagai berikut :

Tabel 2 Banyaknya Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan
 Tiap Kecamatan di Kabupaten Batu Bara

Kecamatan	Tingkat Kesejahteraan				
	Pra-S	KS-I	KS-II	KS-III	KS-III Plus
Sei Balai	315	1 558	3 111	1 348	1 497
Tanjung Tiram	3 566	4 221	9 145	413	-
Talawi	373	3 136	3 696	4 962	2 993
Lima Puluh	2 913	3 357	7 491	6 714	2 549
Air Putih	1 536	2 545	4 306	3 989	368
Sei Suka	251	402	609	8 989	3 311
Medang Deras	1 363	2 092	4 877	3 801	900
Batu Bara	10 317	17 311	33 235	30 216	11 618

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, Tahun 2016

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Tiram, dimana Kecamatan Tanjung Tiram adalah wilayah paling dekat dengan laut dibanding wilayah lainnya di Kabupaten Batubara. Jika dilihat kemiskinan nelayan sebagian besar adalah yang memiliki profesi sebagai nelayan ikan berskala kecil dengan pendapatan kurang dari Rp 30.000,- per satu kali hasil dari tangkapan ikan di laut. Aktivitas nelayan biasanya bersifat individual, tradisional dan biasanya hanya bisa melakukan kegiatan menangkap ikan saja. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa potensi sumberdaya perikanan belum dapat dikelola serta dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan nelayan pesisir.

Hasil observasi awal yang dilakukan, strategi peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini sangat penting untuk dilakukan, dimana saat ini pemerintah tengah menggalakkan pembangunan pesisir, sehingga penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai macam strategi peningkatan wilayah pesisir tersebut.

Kajian Pustaka

Peningkatan Kesejahteraan

Desa Pahlawan merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan rata-rata tingkat ekonomi masyarakatnya

adalah menengah ke bawah, banyak diantaranya tinggal di gang-gang kecil, padat, pengap, ukuran rumah yang cukup sempit karena dihuni secara turun temurun serta dikelilingi oleh banyaknya sampah yang berserakan di sekeliling rumah masyarakat. Nelayan Desa Pahlawan yang memiliki profesi sebagai nelayan banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di laut, selebihnya, waktu santai digunakan untuk berkumpul dengan keluarga atau bersosialisasi dengan para tetangga untuk sekedar bincang-bincang saja. Mayoritas nelayan pergi malaut dengan menggunakan alat tangkap yang cukup sederhana dengan perlengkapan seadanya pula. Hasil tangkapan dijual kepada pedagang pengepul dan pedagang eceran ke desa ataupun langsung di jual di pasar tradisional yang ada di desa tersebut. Adakalanya nelayan tidak bisa mendapatkan ikan pada musim paceklik tiba dikarenakan cuaca buruk yang tidak memungkinkan para nelayan untuk melaut. Sebaliknya pada saat musim ikan seperti pada bulan juni sampai agustus ikan akan melimpah ruah, yang akan membuat hasil tangkapan ikan melimpah ruah melebihi kapasitas. Sehingga sebagian besar kebutuhan rumah tangga nelayan bisa terpenuhi.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pahlawan sangat tergantung pada musim ikan yang berlangsung di daerah ini. Rata-rata mendapatkan hasil tangkapan antara Rp 30.000,- sampai Rp 100.000,- dalam sekali melaut. Namun nelayan tidak bisa pergi melaut setiap hari dikarenakan banyak faktor seperti keadaan laut, cuaca, kapal yang rusak, alat tangkap yang tidak bisa dipakai saat menangkap ikan dan lain sebagainya. Ada kalanya ikan mudah didapat, sehingga produksi dapat meningkat, tetapi ada saatnya pula ikan-ikan sulit untuk didapat. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penghasilan dari laut saja melainkan ada pekerjaan lain baik dari pendapatan istri sebagai buruh cuci, petani, dan lain-lain. Tidak sedikit dari para nelayan mengeluhkan hasil tangkapan semakin sedikit sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan semakin meningkat sedangkan penghasilan yang didapat semakin menurun. Keadaan seperti ini dapat mengancam tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan

konsumen (Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Kualitas pelayanan yang akan saya teliti di lihat dari pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemberian pelayanan kesehatan pada pasien BPJS menggunakan sistem rujukan berjenjang sesuai kebutuhan medis. Sistem ini dimulai dari Fasilitas Kesehatan (FasKes) tingkat pertama.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama diberikan oleh puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang dipilih peserta saat pendaftaran. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki angka kunjungan paling tinggi adalah puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Lemahnya sosialisasi tentang sistem dan prosedur serta kualitas pelayanan yang rendah masih menjadi persoalan yang paling sering dikeluhkan konsumen. BPJS Kesehatan wajib mensosialisasikan prosedur baru ini kepada seluruh petugasnya masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan mentransparansikan prosedur tersebut, secara tidak langsung,

Kebijakan Pemerintah

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21) mengklasifikasi kebijakan, *policy*, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor BSM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif BSM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan sosial mikro adalah bagaimana agar bantuan social tersebut dapat lebih tepat sasaran, diterima oleh yang benar-benar membutuhkannya. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh membutuhkannya.

Banyak program yang diperlukan berkaitan dengan penajaman dan pengenalan sasaran. Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan test kebutuhan (*mean test*) sebagai salah satu instrument untuk meyakinkan bahwa dana bantuan sosial yang akan diberikan benar-benar sesuai dan tepat sasaran. Berbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada akhirnya bermuara pada upaya untuk mendorong penduduk agar terlepas dari kemiskinan sehingga dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Salah satu strategi dalam pemberian bantuan sosial adalah bagaimana mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang tampaknya menjadi salah satu fokus program bantuan sosial yang perlu mendapat prioritas tinggi.

Pembangunan Akses Modal

Pengelolaan sumber daya dalam pengembangan akses modal sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga komponen penting, yaitu pertumbuhan, perubahan struktur ekonomi dan pengurangan jumlah kemiskinan. Dalam hal, pelaksanaan pembangunan berarti pula peningkatan penggunaan modal secara tepat dan efektif.

Kredit produksi diberikan kepada peminjam untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif, sedangkan kredit konsumsi diberikan kepada peminjam yang kekurangan dana untuk membiayai konsumsi keluarga seperti biaya anak sekolah. Menurut Suyatno (2006), didalam transaksi kredit terdapat unsur-unsur kredit, yaitu kepercayaan merupakan keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang dan barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini timbul karena sebelumnya pihak pemberi kredit telah melakukan penyelidikan dan analisa terhadap kemampuan dan

kemaun calon nasabah dalam membayar kembali kredit yang akan disalurkan. Semakin lama jangka kredit yang diberikan semakin tinggi resiko yang dihadapinya karena dalam waktu tersebut terdapat juga unsur ketidakpastian yang tidak diperhitungkan. Keadaan inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko yang bernama jaminan. Prestasi atau Objek Kredit, pemberian kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk barang dan jasa, namun dapat dinilai dalam bentuk uang. Pengembangan akses modal akan dilihat dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Berdasarkan RPJMN 2015- 2019, pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari APBN selama 2015- 2019 berkontribusi Rp 2.215 triliun.

Untuk memenuhi keterbatasan anggaran infrastruktur, pemerintah telah mendorong dan membuka lebar peluang bagi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka diri kepada swasta untuk masuk dengan melakukan skema seperti sekuritisasi yakni penjualan piutang kepada investor supaya korporasi mendapatkan dana. Infrastruktur telah menciptakan konektivitas, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sendiri, tetapi juga menggeliatkan ekonomi di daerah lain. Dengan demikian, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur antardaerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.

Kemiskinan Masyarakat Nelayan Desa Pahlawan

Pada umumnya, kemiskinan masyarakat pesisir Desa Pahlawan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar diantaranya kebutuhan akan pangan, pendidikan,

kesehatan, pekerjaan, infrastruktur dan lain sebagainya. Disamping itu kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, permodalan, teknologi, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak kepada masyarakat nelayan pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Kemiskinan menurut masyarakat Desa Pahlawan silihat dari tidak menentunya pendapatan yang diperoleh, karena perekonomian masyarakat disana sangat menggantungkan hasil tangkapan laut. Pada saat musim angin dan ombak besar tidak jarang pula para nelayan pulang hanya dengan tangan kosong, sedangkan pada saat cuaca mendukung para nelayan harus bersaing dalam perebutan sumberdaya laut, sehingga pemenuhan standar hidup layak sangat sulit untuk dicapai. Kondisi tersebut semakin membuat nelayan pesisir terus berada dalam lingkaran kemiskinan setiap tahunnya.

Jika dilihat pada umumnya masyarakat nelayan pesisir tidak tersentuh oleh teknologi modern, sehingga kualitas sumber daya manusia rendah yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas hasil tangkapan juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh aparat nelayan, dalam hal ini adalah teknologi dibidang penangkapan dan budidaya. Kebanyakan tingkat pendidikan masyarakat adalah hanya sebatas lulusan Sekolah Dasar, dan sedikit pula masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir nelayan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam hal yang terkait dengan tingkat adopsi teknologi yang akan diterapkan dalam menangani hasil tangkapan laut. Pada sisi lain ikan hasil tangkapan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan makanan lain, hal itu disebabkan oleh adanya bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya mengandalkan boks es untuk mengawetkan hasil tangkapannya.

Metode Penelitian

Peubah atau Diukur Yang Diamati

Parameter yang diamati adalah strategi peningkatan kesejahteraan nelayan yang mencakup kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan pesisir yang mencakup

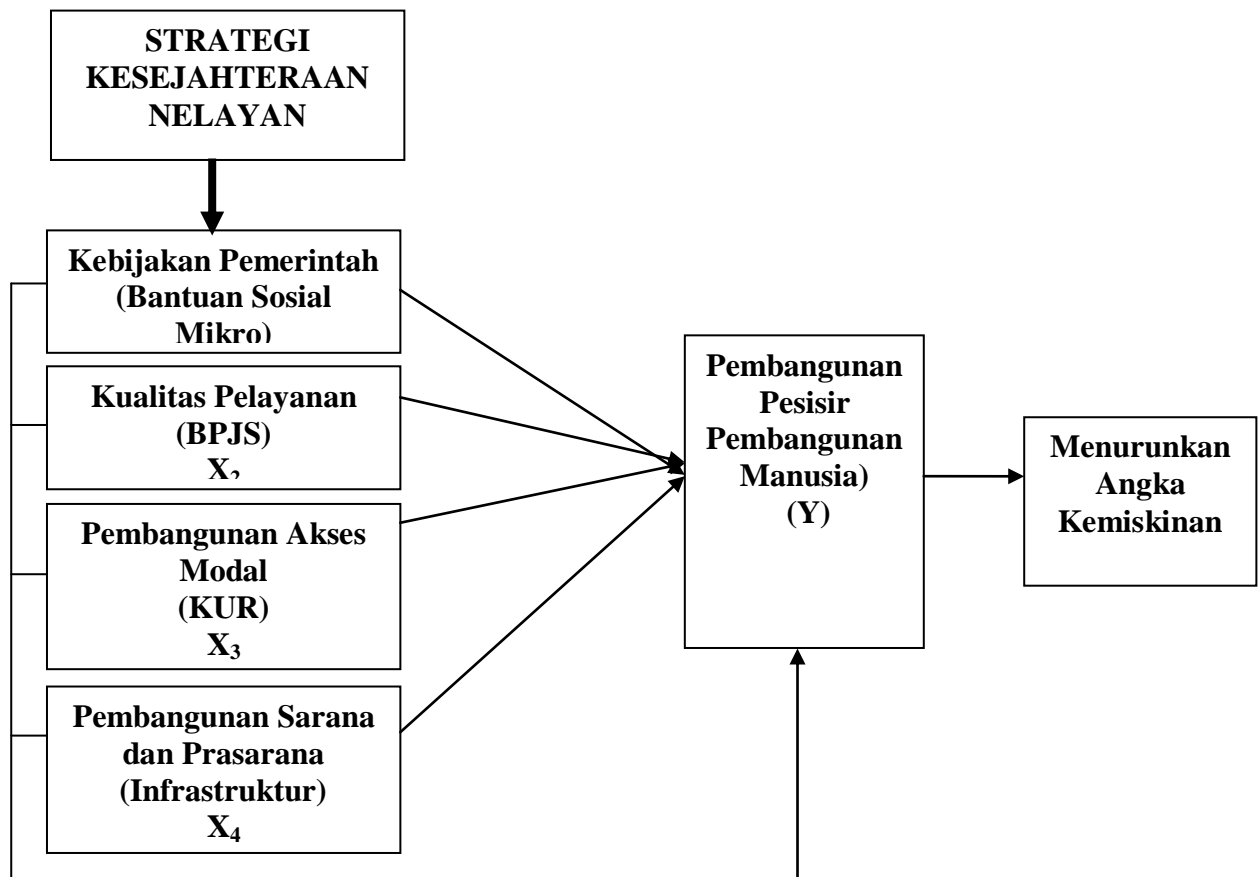
pembangunan manusia dan upaya menurunkan angka kemiskinan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. Waktu penelitian dilakukan mulai November 2016 sampai dengan September 2017.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini merupakan tinjauan teori dan tinjauan terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar variabel Adapun kerangka konseptual ini di gambarkan sebagai berikut :



Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Analisis data disesuaikan strategi peningkatan kesejahteraan nelayan yang mencakup kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan pesisir yang mencakup pembangunan manusia dan upaya menurunkan angka kemiskinan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang diakomodir dengan pendekatan Deskriptif dan Kuantitatif.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada strategi peningkatan kesejahteraan nelayan yang mencakup kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan pesisir yang mencakup pembangunan manusia dan upaya menurunkan angka kemiskinan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dimana populasinya adalah seluruh kepala rumah tangga di Desa Pahlawan sebanyak 1452 orang dan sampel ditetapkan berdasarkan kuota sampling sebanyak 100 orang dengan teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran angket ke responden, wawancara dan observasi langsung ke Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. Pengumpulan data sekunder dilakukan mencari data-data terkait yang dibutuhkan dengan melihat dokumen-dokumen di kantor kepala Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dengan cross section atau penyebaran angket kepada 100 orang responden. Penelitian ini juga menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder dengan melihat dokumen-dokumen terkait di kantor kepala Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif dan Analisis Kuantitatif.

1. Analisis Deskriptif dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan strategi peningkatan kesejahteraan nelayan dalam mendukung pembangunan pesisir secara lebih komprehensif yang ditinjau dari kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram.
2. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda, sebagai berikut :

a. Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda bertujuan untuk membuktikan hipotesis. Menemukan pola pengaruh yaitu perubahan suatu variabel dependen akibat dari perubahan variabel independen, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

dimana :

Y = Variabel Dependen (Pembangunan Pesisir)

X₁ = Kebijakan Pemerintah

X₂ = Kualitas pelayanan

X₃ = Pembangunan akses modal

X₄ = Pembangunan sarana dan prasarana

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error Term

Adapun untuk menguji signifikan tidaknya hipotesis tersebut digunakan **uji kesesuaian** (*testgoodness of fit*) yang terdiri dari:

1. Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)
2. Uji ipotesis Simultan (Uji-F)
3. Uji Determinasi

Untuk mendapatkan hasil yang baik, regresi berganda mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik, maka sebelum uji regresi berganda penelitian ini akan melakukan **pengujian asumsi klasik**, yaitu:

1. Uji Normalitas Data
2. Uji Multikolinieritas

Hasil dan Pembahasan

Analisa Regresi Linier Berganda

1. Uji Validitas Dan Reabilitas

Berdasarkan hasil olahan data SPSS, uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas konstruk apakah suatu item instrumen valid atau tidak adalah dilihat dari nilai probabilitas koefisien korelasinya. Jika nilai korelasi yang diperoleh positif, maka item yang akan di uji tersebut adalah valid.

Namun walaupun positif perlu bila nilai korelasi (r) tersebut dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , apabila nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item instrumen tersebut tidak valid sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai item-item di dalam instrumen penelitian.

a. Uji Validitas X_1 Kebijakan Pemerintah

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen X_1 (Kebijakan Pemerintah)

No. Butir	Koefisien Korelasi	r_{tabel}	Status
1	0,708	0,256	Valid
2	0,769	0,256	Valid
3	0,773	0,256	Valid
4	0,741	0,256	Valid

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2017

Berdasarkan hasil output SPSS nilai validitas terdapat pada kotak *Corrected item-total correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas ke-4 butir pertanyaan dinyatakan valid karena nilai validitas sebesar 0,708, 0,769, 0,773, 0,741 lebih besar dari 0,3 dan juga pasti lebih besar dari r_{tabel} pada $n = 100$ sebesar 0,256.

Tabel 4. Ringkasan Pengujian Reabilitas Instrumen

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	4

Sumber : Data Penelitian, 2017

Hasil output SPSS diketahui nilai reabilitas sebesar $0,735 > 0,05$ hasil uji validitas dan reabilitas sudah memadai maka instrumen dapat dipercaya untuk digunakan penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen X₂ (Kualitas Pelayanan)

No. Butir	Koefisien Korelasi	r _{tabel}	Status
1	0,663	0,256	Valid
2	0,696	0,256	Valid
3	0,672	0,256	Valid
4	0,568	0,256	Valid

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2017

Berdasarkan hasil output SPSS nilai validitas terdapat pada kotak *Corrected item-total correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas ke-4 butir pertanyaan dinyatakan valid karena nilai validitas sebesar 0,663, 0,696, 0,672, 0,568 lebih besar dari 0,3 dan juga pasti lebih besar dari r_{tabel} pada n = 100 sebesar 0,256.

Tabel 6. Hasil Reabilitas Instrumen

Cronbach's Alpha	N of Items
.426	4

Sumber : Data Penelitian, 2017

Hasil output SPSS diketahui nilai reabilitas sebesar 0,426 > 0,05 hasil uji validitas dan reabilitas belum memadai maka instrumen tidak dapat dipercaya untuk digunakan penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen X₃ (Pembangunan Akses Modal)

No. Butir	Koefisien Korelasi	r _{tabel}	Status
1	0,697	0,256	Valid
2	0,781	0,256	Valid
3	0,753	0,256	Valid
4	0,586	0,256	Valid

Berdasarkan hasil output SPSS nilai validitas terdapat pada kotak *Corrected item-total correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas ke-4 butir pertanyaan dinyatakan valid karena nilai validitas sebesar 0,697, 0,781, 0,753, 0,586 lebih besar dari 0,3 dan juga pasti lebih besar dari r_{tabel} pada n = 100 sebesar 0,256.

Tabel 8. Hasil Reabilitas Instrumen

Cronbach's Alpha	N of Items
.628	4

Sumber : Data Penelitian, 2017

Hasil output SPSS diketahui nilai reabilitas sebesar $0,628 > 0,05$ hasil uji validitas dan reabilitas belum memadai maka instrumen tidak dapat dipercaya untuk digunakan penelitian.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Instrumen X4 (Pembangunan Sarana Dan Prasarana)

No. Butir	Koefisien Korelasi	r_{tabel}	Status
1	0,644	0,256	Valid
2	0,501	0,256	Valid
3	0,688	0,256	Valid
4	0,593	0,256	Valid

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2017

Berdasarkan hasil output SPSS nilai validitas terdapat pada kotak *Corrected item-total correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas ke-4 butir pertanyaan dinyatakan valid karena nilai validitas sebesar 0,644, 0,501, 0,688, 0,593 lebih besar dari 0,3 dan juga pasti lebih besar dari r_{tabel} pada $n = 100$ sebesar 0,256.

Tabel 10. Hasil Reabilitas Instrumen

Cronbach's Alpha	N of Items
.615	4

Sumber : Data Penelitian, 2017

Hasil output SPSS diketahui nilai reabilitas sebesar $0,615 > 0,05$ hasil uji validitas dan reabilitas belum memadai maka instrumen tidak dapat dipercaya untuk digunakan penelitian.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Instrumen Y (Peningkatan Kesejahteraan Nelayan)

No. Butir	Koefisien Korelasi	r_{tabel}	Status
1	0,756	0,256	Valid
2	0,580	0,256	Valid
3	0,691	0,256	Valid
4	0,716	0,256	Valid

Sumber : Data Penelitian, 2017

Berdasarkan hasil output SPSS nilai validitas terdapat pada kotak *Corrected item-total correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas ke-4 butir pertanyaan dinyatakan valid

karena nilai validitas sebesar 0,756, 0,580, 0,691, 0,716 lebih besar dari 0,3 dan juga pasti lebih besar dari r_{tabel} pada $n = 100$ sebesar 0,256

Tabel 12. Hasil Reabilitas Instrumen

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	4

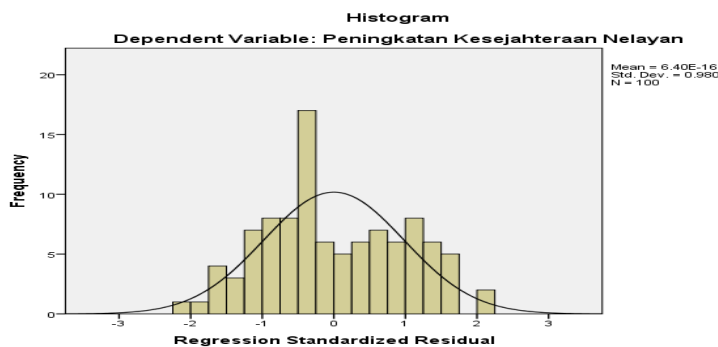
Sumber : Data Penelitian, Tahun 2017

Hasil output SPSS diketahui nilai reabilitas sebesar $0,627 > 0,05$ hasil uji validitas dan reabilitas belum memadai maka instrumen tidak dapat dipercaya untuk digunakan penelitian.

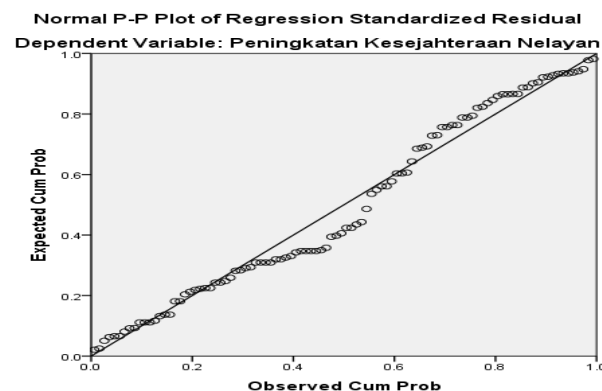
Hasil Analisa Data Regresi Linier Berganda

a. Interpretasi Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Normalitas Data



Gambar 1 : Histogram Regression Standardized Residual



Gambar 2 : Observed Cum Prob

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal yaitu dimana dapat dilihat dari gambar histogram yang memiliki kecembungan sembang ditengah dan juga dapat dilihat dari gambar normal pp plot terlihat bahwa titik-titik berada diantara garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data distribusi normal.

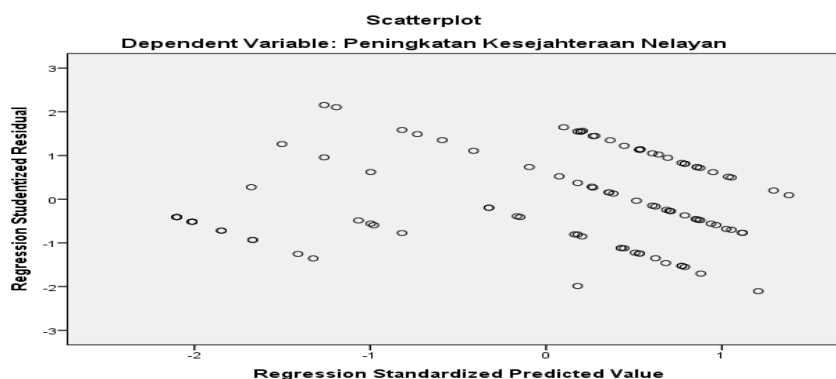
2) Multikolinearitas

Tabel 12. Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				
	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)					
1 Kebijakan pemerintah	.710	.342	.231	.400	2.499
1 Kualitas pelayanan	.518	.075	.048	.538	1.857
Pembangunan akses modal	.640	.168	.108	.384	2.601
Pembangunan sarana dan prasarana	.640	.357	.242	.627	1.595

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini (kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana) terbebas dari masalah multikolinearitas yaitu dapat dilihat dari nilai VIF variabel yang besarnya kurang dari 10 dan nilai tolerance yang melebihi 0,1.

3) Heteroskedasitas



Gambar 3 : Scatterplot

Gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Hal ini bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

b. Korelasi

1) Korelasi Parsial

Tabel 13. Correlation

		Correlations				
		peningkatan kesejahteraan nelayan	kebijakan pemerintah	kualitas pelayanan	pembangunan akses modal	pembangunan sarana dan prasarana
Pearson Correlation	peningkatan kesejahteraan nelayan	1.000	.710	.518	.640	.640
	kebijakan pemerintah	.710	1.000	.595	.721	.585
	kualitas pelayanan	.518	.595	1.000	.523	.409
	pembangunan akses modal	.640	.721	.523	1.000	.661
	pembangunan sarana dan prasarana	.640	.585	.409	.661	1.000
Sig. (1-tailed)	peningkatan kesejahteraan nelayan	.	.001	.463	.002	.000
	kebijakan pemerintah	.001	.	.000	.000	.000
	kualitas pelayanan	.463	.000	.	.000	.000
	pembangunan akses modal	.002	.000	.000	.	.000
	pembangunan sarana dan prasarana	.000	.000	.000	.000	.
N	peningkatan kesejahteraan nelayan	100	100	100	100	100
	kebijakan pemerintah	100	100	100	100	100
	kualitas pelayanan	100	100	100	100	100
	pembangunan akses modal	100	100	100	100	100
	pembangunan sarana dan prasarana	100	100	100	100	100

Tabel correlation menunjukkan correlation parsial variabel dependent dengan variabel independent.

Dimana :

1. $rX_1 = 0,710$ menunjukkan hubungan kebijakan pemerintah dengan peningkatan kesejahteraan berada dalam taraf hubungan sangat kuat.
2. $rX_2 = 0,640$ menunjukkan hubungan kualitas pelayanan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan berada dalam taraf hubungan sedang.
3. $rX_3 = 0,640$ menunjukkan hubungan pembangunan akses modal dengan peningkatan kesejahteraan nelayan berada dalam taraf hubungan sedang.
4. $rX_4 = 0,518$ menunjukkan hubungan pembangunan sarana dan prasarana dengan peningkatan kesejahteraan nelayan berada dalam taraf hubungan rendah.

2) Korelasi Simultan

Tabel 14. Korelasi Simultan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.774 ^a	.600	.583	.85870	.600	35.583	4	95	.000	1.489

a. Predictors: (Constant), Pembangunan sarana dan prasarana, Kualitas pelayanan, Kebijakan pemerintah, Pembangunan akses modal

b. Dependent Variable: Peningkatan kesejahteraan nelayan

Hasil nilai R sebesar 0,774 sebagai nilai korelasi berganda artinya kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana dengan peningkatan kesejahteraan nelayan berada pada taraf hubungan erat.

c. Regresi Linier Berganda

Tabel 15. Hasil Regresi

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.208	.662		.313	.755
1 Kebijakan pemerintah	.337	.095	.365	3.552	.001
Kualitas pelayanan	.090	.122	.065	.737	.463
Pembangunan akses modal	.183	.110	.174	2.663	.002
Pembangunan sarana dan prasarana	.355	.095	.305	3.726	.000

Hasil output SPSS tabel coefficients maka persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,208 + 0,337 + 0,090 + 0,183 + 0,355 + e$$

Interpretasi dari persamaan Regresi Linier Berganda :

- Jika kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana tidak ditingkatkan maka peningkatan kesejahteraan nelayan akan menurun
- Jika masyarakat Desa Pahlawan memiliki kebijakan pemerintah lebih dari 1 maka peningkatan kesejahteraan nelayan akan meningkat signifikan
- Jika masyarakat Desa Pahlawan memiliki kualitas pelayanan semakin tinggi maka peningkatan kesejahteraan menurun namun tidak signifikan
- Jika masyarakat Desa Pahlawan memiliki pembangunan akses modal lebih dari 1 maka peningkatan kesejahteraan nelayan akan meningkat signifikan.
- Jika masyarakat Desa pahlawan memiliki pembangunan sarana dan prasarana lebih dari 1 maka peningkatan kesejahteraan nelayan akan meningkat signifikan

d. Test Goodness of fit

1) Uji t (Uji Hipotesis Parsial)

Tabel 16. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.208	.662		.313	.755
1 Kebijakan pemerintah	.337	.095	.365	3.552	.001
Kualitas pelayanan	.090	.122	.065	.737	.463
Pembangunan akses modal	.183	.110	.174	2.663	.002
Pembangunan sarana dan prasarana	.355	.095	.305	3.726	.000

Interprestasi Hasil Uji t

- Variabel X_1 (Kebijakan Pemerintah) Nilai T_h (3,552) > T_t (1,96) dan nilai sig 0,001 < 0,005 maka H_a diterima artinya kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
- Variabel X_2 (Kualitas Pelayanan) Nilai T_h (0,737) < T_t (1,96) dan nilai sig 0,463 > 0,005 maka H_a ditolak artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
- Variabel X_3 (Pembangunan Akses Modal) Nilai T_h (2,663) > T_t (1,96) dan nilai sig 0,002 < 0,005 maka H_a diterima artinya pembangunan akses modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
- Variabel X_4 (Pembangunan Sarana dan Prasarana) Nilai T_h (3,726) > T_t (1,96) dan nilai sig 0,000 < 0,005 maka H_a diterima artinya pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.

2) Uji F (Uji Hipotesis Simultan)

Tabel 17. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a1	Regression	104.951	4	26.238	35.583	.000 ^b
	Residual	70.049	95	.737		
	Total	175.000	99			

a. Dependent Variable: Peningkatan kesejahteraan nelayan

b. Predictors: (Constant), Pembangunan sarana dan prasarana, Kualitas pelayanan, Kebijakan pemerintah, Pembangunan akses modal

Nilai F_{hitung} pada tabel diatas $F_{hitung} 35,583 > F_{tabel} 2,46$ ($n-k-1$) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak dan artinya kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana secara bersama-sama signifikan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan.

3) Uji Determinasi

Tabel 18. Model Summary dan *R-Square*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.774 ^a	.600	.583	.85870	.600	35.583	4	95	.000	1.489

a. Predictors: (Constant), Pembangunan sarana dan prasarana, Kualitas pelayanan, Kebijakan pemerintah, Pembangunan akses modal

b. Dependent Variable: Peningkatan kesejahteraan nelayan

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh kebijakan pemerintah (X_1), kualitas pelayanan (X_2), pembangunan akses modal (X_3), dan pembangunan sarana dan prasarana (X_4) terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan (Y), maka dapat diketahui melalui uji determinasi yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} D &= R^2 \times 100 \% \\ &= 0,583 \times 100 \% \\ &= 58,3 \% \end{aligned}$$

Nilai R Square diatas diketahui adalah 0,583 atau 58,3 menunjukkan sekitar 58,3% variabel peningkatan kesejahteraan (Y) dipengaruhi kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan kases modal, pembangunan sarana dan prasarana. Sisanya 41,7% dipengaruhi oleh variabel yang teliti dalam penelitian ini contohnya pendapatan nelayan, pengeluaran nelayan dan lain-lain.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan upaya menurunkan angka kemiskinan

Hasil pengujian terhadap hipotesis H_a menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien kebijakan pemerintah sebesar 0,307 dengan nilai t 3,552 dan tingkat signifikan sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa H_a yang menyatakan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu hal penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Pahlawan. Dimana pemerintah wajib memiliki keputusan yang dipilih untuk bertindak, dan berisikan pernyataan ataupun ide yang dibuat oleh pemerintah, kelompok sosial yang digunakan untuk mempengaruhi pihak-pihak terkait, dengan menggunakan sangsi-sangsi. Pemerintah juga harus memberikan bantuan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan nelayan Desa Pahlawan sedikit teratasi dalam pengembangan nelayan di daerah pesisir melalui Bantuan Sosial Mikro di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Program BSM ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Bantuan Sosial Mikro (BSM) diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi sehingga UKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor BSM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif BSM di dalam proses pembangunan ekonomi nelayan Desa Pahlawan, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan sosial mikro adalah bagaimana agar bantuan sosial tersebut dapat lebih tepat sasaran, diterima oleh yang benar-benar membutuhkannya. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan hasil menunjukkan kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan Desa Pahlawan yang masih berada dibawah garis kemiskinan masih sangat membutuhkan program-program yang bisa membuat masyarakat lebih memiliki potensi dalam melakukan kegiatan dalam nelayan. Untuk pelaksanaan program nelayan, maka terlebih dahulu dinas instansi terkait harus melakukan pendataan nelayan secara jelas, siapa nelayan dan yang bukan nelayan, kemudian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nelayan dan disesuaikan dengan kondisi nelayan untuk bisa menurunkan angka kemiskinan.

Tidak Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan upaya menurunkan angka kemiskinan

Hasil pengujian terhadap hipotesis H_a menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien kualitas pelayanan sebesar 0.090 dengan nilai t 0.737 dan tingkat signifikan sebesar 0.463. Hal ini menunjukkan bahwa H_a yang menyatakan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan BPJS di Desa Pahlawan belum teratasi dengan baik dikarenakan minimnya permodalan masyarakat Desa Pahlawan.

Seharusnya BPJS kesehatan untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat di Desa Pahlawan agar berkualitas, dan juga BPJS kesehatan harus wajib mensosialisasikan prosedur kepada seluruh masyarakat Desa Pahlawan agar mempermudah masyarakat dalam melakukan kesehatan. BPJS Kesehatan

ini penting dan wajib diberikan kepada setiap masyarakat nelayan Desa Pahlawan karena tanpa kontrol dan pengawasan dari masyarakat BPJS Kesehatan tidak akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berkewajiban membantu masyarakat memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak mereka. Jika masyarakat ikut aktif berpartisipasi mengawasi kinerja dan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan tidak akan ada lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berani memperdaya masyarakat. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dapat membaik hingga akhirnya diharapkan dapat menjadi perpanjang-tanganan dalam memenuhi hak seluruh warga negara atas kesehatan terutama bagi masyarakat nelayan pesisir.

Pengaruh Pembangunan Akses Modal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan upaya menurunkan angka kemiskinan

Hasil pengujian terhadap hipotesis H_a menunjukkan bahwa pembangunan akses modal berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien kebijakan pemerintah sebesar 0,183 dengan nilai t 2,663 dan tingkat signifikan sebesar 0.002. Hal ini menunjukkan bahwa H_a yang menyatakan pembangunan akses modal berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan.

Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa pembangunan akses modal yang dilakukan oleh Kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap peningkatan masyarakat nelayan Desa Pahlawan karena sangat membantu masyarakat nelayan untuk menambah modal dalam kegiatan nelayan mereka. Dimana hal ini pengembangan akses modal sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga komponen penting, yaitu pertumbuhan, perubahan struktur ekonomi dan pengurangan jumlah kemiskinan. Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan berarti pula peningkatan penggunaan modal secara tepat dan efektif. Penggunaan modal ini berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman (kredit), akan tetapi dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki maka dibutuhkan modal pinjaman yang tepat waktu guna menjaga input agar memiliki produktivitas yang maksimal. Upaya menurunkan angka kemiskinan dengan tidak adanya akses modal oleh nelayan pesisir ke lembaga perbankan sehingga sulit untuk memperoleh modal untuk bisa meningkatkan usaha mereka dikarenakan pendapatan

nelayan yang sering sekali mengalami fluktuatif, dimana tidak memberikan jaminan kepada lembaga perbankan untuk memberikan bantuan kredit kepada nelayan. Walaupun secara nasional ada program pemberian kredit kepada nelayan tetapi pada tingkat lokal hal ini sulit direalisasikan. Untuk itu diperlukan perhatian dalam pemberian kredit tidak hanya diberikan kepada usaha kecil dan menengah sementara kelompok nelayan dan petani belum tersentuh sepenuhnya dari program pemerintah. Pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian serius kepada nelayan dan petani dengan cara memberikan bantuan baik berupa kredit ataupun dana hibah kepada nelayan sehingga dapat meningkatkan usaha nelayan dibidang perikanan tangkap.

Pengaruh Pembangunan Sarana Dan Prasarana Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan upaya menurunkan angka kemiskinan

Hasil pengujian terhadap hipotesis H_a menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien pembangunan sarana dan prasarana sebesar 0,355 dengan nilai t 3,726 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H_a yang menyatakan pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan. Dengan demikian dalam hal ini pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Lebih dari itu infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Infrastruktur di Desa Pahlawan ini kurang sangat memadai. Dikarenakan masyarakat Desa Pahlawan tidak pernah merasakan jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur dan baik, sumber air yang bersih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pahlawan. Masyarakat Desa Pahlawan tidak pernah merasakan pengelolaan sampah dengan penyediaan fasilitas seperti tong sampah, sapu lidi dan lainnya. Jika dilihat lingkungan Desa Pahlawan telah mencemari pinggiran laut, dan sekitar rumah mereka sudah bertumpuk sampah-sampah di halaman rumah mereka. Pemerintah tidak menciptakan konektivitas, tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Desa Pahlawan, hanya melihat ekonomi di daerah lain tanpa berupaya untuk memperbaiki

kawasan pesisir nelayan Desa Pahlawan. Dengan demikian upaya pemerataan pembangunan infrastruktur Desa Pahlawan harus teratasi antardaerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat nelayan pesisir.

Berbagai nelayan lokal, mereka hidup dalam kemiskinan, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan lokal sangat tradisional dan terbatas, sehingga berpengaruh terhadap aktifitas penangkapan ikan, dan dapat menyebabkan hasil tangkapan nelayan menjadi kecil. Oleh karena itu perlu adanya program pemberdayaan nelayan dengan cara menyediakan modal dan sarana prasarana penangkapan ikan yang memadai sehingga para nelayan pesisir dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang tersedia secara berkelanjutan untuk peningkatan pendapatn nelayan.

Daftar Pustaka

- Basuki, R, Prayogo U.H., Tri Pranaji, Nyak Ilham, Sugianto, Hendiarto, Bambang W, Daeng H., dan Iwan S., (2001). Pedoman Teknis Nilai Tukar Nelayan. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau kecil, DKP. Jakarta.
- [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Batu Bara. (2011) Lima Puluh.[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara. (2014) Batu Bara Dalam Angka (2015). Lima Puluh.
- Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Fauzi, Akhmad. Anna, Suzy. (2005). *Pemodelan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- H.Marjuki. (2013). *Analisis Pemberdayaan Pesisir dengan studi AHP*. Cirebon
- Ismail. Z. (2001). *Pengembangan Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan. Jakarta.
- Imron, Masyuri. 2003. "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. "Jurnal Masyarakat Nelayan. Jakarta: PMB.
- Imron, Masyuridan M. Azzam Manam. 2009. *Strategi Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan*. Jakarta: LIPI.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Lestari, I. dan Wirjodirdjo. (2010). *Analisis Kesejahteraan Pelaku Industri. Pengolahan Ikan Pada Komunitas Klaster Masyarakat Nelayan Pesisir: Sebuah Pendekatan*

- Dinamika Sistem Jurusan Teknik Industri. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Surabaya.
- Muflikhati I. (2010). Analisis dan Pengembangan Model peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Purnomo, A.H dan Taryono. (2005). Ekonomi Pembangunan Perikanan. Universitas Terbuka.
- Rusiadi, Subiantoro, N. Hidayat. (2014). *Metode Penelitian, Manajemen, AKuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel. Cetakan Kedua*. USU Press. Medan.
- Suharto, Edi (1997). Ekonomi Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung.
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Konsep Kebijakan Pemerintah. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjiptono, Fandy. (2007). Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Andi Ofset. Yogyakarta.
- Wardatul. (2006). Strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha tambak di Desa Babalan Kecamatan Weduk Kabupaten Deamak Jawa Tengah.

DAMPAK BUDAYA SOSIAL EKONOMI DALAM MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN KELUARGA NELAYAN KABUPATEN BATUBARA

Rahmad Sembiring dan Annisa Ilmi Faried Lubis

Surel: rahmadsembiring@dosen.pancabudi.ac.id
Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Gatot Subroto Km 4,5, Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat keluarga pesisir dengan pendekatan variabel Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Kesehatan, Modal, ketrampilan. Masalah penelitian muncul karena kemiskinan pesisir sangat ditentukan secara multidimensional. Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak 125 responden. Pendekatan penelitian ini menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi secara nyata oleh pendidikan, usia dan kesehatan sedangkan kesejahteraan dipengaruhi nyata oleh jenis kelamin, kepemilikan modal dan tingkat ketrampilan. Selain itu dari kajian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pola pikir para keluarga nelayan untuk lebih aktif dan kreatif dalam memberdayakan sumberdaya alam lingkungannya menjadi produk produk yang bernilai ekonomi, dapan menambah pendapatannya dan membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarganya.

Kata kunci: budaya, sosial, ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan, keluarga nelayan

Pendahuluan

Rendahnya penghasilan nelayan menjadi faktor masih tingginya angka kemiskinan nelayan. Sekitar 16,2 juta nelayan di Indonesia atau sekitar 44 persen dari jumlah nelayan yang mencapai 37 juta jiwa hidup dibawah ambang kemiskinan. Tidak mengherankan lagi jika kesejahteraan nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan (Pemkab Purbalingga, 2009). Nelayan masih sering diidentikkan dengan kemiskinan, terutama pada saat sekarang ini, masyarakat nelayan perdesaan di negara yang sedang berkembang Kemiskinan masih menjadi masalah nasional yang serius, merupakan masalah yang cukup rumit, meskipun kebanyakan negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi dan politik.

Nelayan umumnya berdomisili di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang beraktivitas perikanan laut (*marine fisheries*) dan perikanan perairan umum (*inland fisheries*) yang berdomisili di sekitar perairan danau, waduk, rawa dan sungai. Tahun 2016

wilayah Administrasi pemerintahan Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 kecamatan, 141 desa dan 10 kelurahan. Dari 100 kepala desa atau lurah, 19 diantaranya dikepalai oleh perempuan atau sekitar 12,58 persen.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2016

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
Sei Balai	92,64	6.604	27.609	7
Tanjung Tiram	173,79	14.571	66.749	17
Talawi	89,80	12.875	57.128	14
Lima Puluh	238,55	20.646	89.003	22
Air Putih	72,24	11.485	49.217	12
Sei Suka	171,47	13.023	55.045	14
Medang Deras	65,47	11.814	51.698	13
Total	904,96	91.018	396.479	100,00

Sumber : BPS, 2017

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batubara tahun 2010 sebanyak 46.000 ribu jiwa atau sebesar 18,12%. Jumlah penduduk tersebut tidak diketahui secara pasti pemetaannya. Analisis penelitian ini akan membuktikan pemetaan kemiskinan berdasarkan beberapa pertimbangan yang kemudian akan ditemukan masing-masing pemetaan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Faktor penduduk miskin tersebut dipengaruhi oleh masih rendah dan dibawah garis rata-rata, dimana indeks pembangunan manusia Kabupaten Batu Bara tahun 2011 sebesar 72,05 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata indeks pembangunan manusia Sumatera Utara sebesar 74,53. Rendahnya IPM Batu Bara tersebut salah satunya disumbang oleh masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,61 tahun lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah Sumatera Utara 8,86 tahun.

Berdasarkan beberapa kajian kuantitatif baik sosial, ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan. Propinsi Sumatera Utara tidak memiliki data tentang penduduk miskin secara riil dan kuadrant pemetaan penduduk miskin. Kuadrant pemetaan penduduk miskin memungkinkan pengambilan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. Kuadrant pemetaan penduduk miskin didasarkan atas pertimbangan : wilayah (kota, desa, pesisir), pekerjaan (petani, nelayan, lainnya), tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA), jumlah

keluarga, akses ekonomi (jarak dengan pusat kota, jarang dengan jalan kabupaten/kecamatan), akses pendanaan/kredit/pinjaman (jarak dari bank/non bank, jumlah kredit yang diperoleh, kemudahan mendapatkan pendanaan). Akses penyaluran hasil nelayan, petani (pasar, koperasi). Akses jaminan stabilitas harga (agen, distributor, koperasi).

Desa Pahlawan angka anak yang putus sekolah sangat tinggi, dari beberapa responden yang di tanyakan, alasan yang paling banyak ditemui ialah karena kekurangan biaya, dan juga masalah lain yang ditemukan disana ialah banyak pernikahan yang masih dibawah umur / nikah muda. Masalah ini juga memicu terjadi peningkatan keluarga miskin disana. hal ini mengapa tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat disana cukup rendah.

Tabel 2. Penghasilan keluarga nelayan

no	Penghasilan/bulan	Banyak responden
1	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	1
2	Rp. 500.000 - Rp 1.000.000	10
3	Tidak menentu	16

Sumber : observasi awal, 2017

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan keluarga nelayan di desa tanjung tiram Kabupaten batubara dari 27 responden yang ada, keluarga nelayan yang berpenghasilan Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 perbulan hanya sebanyak 1 responden, sedangkan yang berpenghasilan Rp 500.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 10 responden, dan yang berpenghasilan tidak tetap atau tidak bisa ditaksir pendapatannya ada sebanyak 16 responden.

Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dampak perubahan budaya (usia dan jenis kelamin) masyarakat nelayan pesisir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan

- kesejahteraan di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara?
2. Apakah dampak perubahan social (pendidikan dan kesehatan) masyarakat nelayan pesisir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara?
 3. Apakah dampak perubahan ekonomi (modal dan pekerjaan) masyarakat nelayan pesisir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara?
 4. Apakah dampak budaya (usia dan jenis kelamin), dampak perubahan social (pendidikan dan kesehatan) dan perubahan ekonomi (modal dan pekerjaan) masyarakat nelayan pesisir berpengaruh terhadap kesejahteraan melalui kemiskinan di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara.

Kajian Pustaka

Kemiskinan

Lebih lanjut dinyatakan oleh Sajogya dalam Bagong Suyanto (2013:4) telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut:

- a. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya.
- b. Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi beras 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 180 kilogram per tahunnya.

Adapun Mubyarto (1998) memberikan definisi kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya ketrampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya, terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan, yakni paradigma neoliberalisme dan demokrasi sosial. Selanjutnya dua paradigma tersebut akhirnya menjadi *blue print* dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan definisi kemiskinan.

Kesejahteraan Keluarga

Menurut BPS (2005) dalam penelitian Eko Sugiharto (2012) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Tingkat pendapatan adalah jumlah penerimaan berupa uang atau barang yang dihasilkan oleh segenap orang yang merupakan balas jasa untuk faktor-faktor produksi (BPS, 2006). Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga yaitu:

- 1) Pendapatan dari gaji dan upah yaitu balas jasa terhadap kesediaan orang menjadi tenaga kerja.
- 2) Pendapatan dari asset produktif yaitu asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya.
- 3) Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang di terima bukan sebagai balas jasa atau input yang di berikan.

Budaya Sosial Ekonomi

Keadaan budaya sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki.

Menurut Soerjono Soekanto (2001) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan

hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sedangkan menurut Bintarto (1977) dalam Fandi mengemukakan tentang pengertian kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dengan lima parameter yang dapat di gunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, Usia, keterampilan yang dimiliki, pekerjaan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal.

a. Hubungan kerja nelayan

Hubungan sosial dan ekonomi yang terbentuk antara produsen dan non-produsen pada lingkungan ekonomi produksi merupakan hubungan produksi. Hubungan produksi ini dipadukan dengan alat produksi untuk membentuk sebuah model produksi. Alat produksinya ialah alat-alat, mesin, dan pabrik yang mendukung proses produksi. Sedangkan model produksi merupakan sebuah kombinasi dari beberapa hubungan produksi dan kekuatan produksi. Salah satu kunci pembeda adalah antara model produksi kapitalis dengan model produksi nonkapitalis. Produsen pada saat ini merupakan bentuk terpisah dari pemilikan alat produksi. Produsen pada model non-kapitalis seperti seorang petani yang memiliki beberapa alat produksi tetapi dipengaruhi oleh non-produsen, seperti seorang tuan tanah yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari produsen dengan cara penggunaan kekuatan politik, militer atau ideologi (Jary dan Julia, 2011).

Hubungan sosial masyarakat nelayan terkait dengan karakteristik sosial nelayan tersebut. Karakteristik masyarakat nelayan dan petani berbeda secara sosiologi. Masyarakat petani menghadapi sumberdaya terkontrol, yaitu lahan untuk produksi suatu komoditas. Nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat terbuka dan menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Resiko pekerjaan yang relatif besar menyebabkan masyarakat nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Satria, 2011). Menurut Purwanti (2014), berdasarkan status hubungan kerja dan pemilikan modal nelayan dibedakan:

- a. Nelayan pemilik alat produksi (perahu dan alat tangkap) yang tidak ikut melaut. Nelayan ini disebut dengan juragan darat. Juragan darat umumnya memiliki pekerjaan lain diluar bidang perikanan, seperti sopir, guru, aparat desa, dan pedagang pengumpul ikan.
- b. Nelayan pemilik alat produksi yang ikut melaut, nelayan ini disebut dengan juragan laut.
- c. Buruh nelayan, yaitu nelayan yang tidak memiliki perahu. Jaringan sosial antar nelayan membentuk pola hubungan yang dapat dijabarkan secara horizontal dan vertikal (Kusnadi, 2012:6). Hubungan sesama kerabat, saudara sedarah, dan bentuk-bentuk afinitas merupakan contoh pola horizontal. Pola tersebut menggambarkan bahwa individu-individu akan lebih kuat berinteraksi jika antara satu dengan yang lain tidak mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu lebar. Interaksi nelayan membentuk pola hubungan patron-klien yang umum terjadi antara nelayan kaya (juragan) dan tengkulak dengan nelayan miskin (buruh). Pola vertikal terbentuk karena ada ketergantungan ekonomi antara buruh dan juragan maupun tengkulak dengan baik.

b. Keterampilan

Menurut Kusnadi (2012), Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan, pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi keterampilan penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Kedua, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil jika ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang di investasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional dari segi peralatan tangkap yang digunakan. Masyarakat nelayan menurut Wahyuningsih (2017), dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu:

- a. Nelayan juragan, merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
- b. Nelayan pandega/pekerja, yang tidak memiliki alat produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut.
- c. Nelayan pemilik merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan alat penangkap ikan sederhana, karena itu disebut juga nelayan perorangan atau nelayan miskin.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1). Secara formal pendidikan dikeluarga nelayan pada umumnya cukup memprihatikan, kebanyakan mereka hanya lulusan SD dan SMP namun angka yang tidak mengecap pendidikan juga sangat tinggi. Tingkat pendidikan akan berpengaruh pula pada pendapatan. Dalam jenis pekerjaan yang sama, yang memerlukan pikiran untuk mempekerjakannya, tentunya orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Hal demikian tentunya akan berpengaruh pada penghasilan.

d. Jenis Kelamin

Berdasarkan uraian dari beberapa tokoh (Williams dan Best (1990) dalam Taylor, Peaplaw & sears (2009) (Kenrick, Trost, & Sundie, 2004 dalam Taylor, Peplau dan Sears, 2009), Taylor, Peplau dan Sears, (2009)) dapat disimpulkan bahwa konsep gender dan jenis kelamin adalah dua penjelasan yang berbeda. Gender lebih kepada sifat-sifat atau karakter yang melekat, juga atas dasar pengaruh dari kultur. Sedangkan jenis kelamin adalah ditinjau dari faktor fungsi seks atau lebih kepada penilaian biologis.

e. Modal Kerja

Menurut Irawan dan Suparmoko (1979: 96) modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung. Dapat dikatakan bahwa kapital lebih khusus terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk proses produksi yang akan datang. Modal sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan dan keahlian. Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode tertentu untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek (Current income) yang sesuai dengan maksud utama memulai usaha. Dalam memulai usahanya, nelayan membutuhkan modal yang cukup untuk menangkap ikan. Modal tersebut dibutuhkan untuk membeli perahu, alat penangkap ikan, mesin serta alat-alat tambahan yang dapat menunjang untuk meningkatkan hasil tangkapannya yang banyak. Modal kerja menurut jenisnya terdiri dari dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian modal kerja yang relatif permanen, yaitu jumlah modal kerja minimal yang harus tetap ada dalam suatu usaha untuk dapat melaksanakan operasinya atau sejumlah modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dibedakan menjadi beberapa: (1) Modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitasi usahanya. (2) Modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.
- b. Bagian modal kerja yang bersifat variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah tergantung pada perubahan keadaan. Modal kerja dibedakan menjadi beberapa: (1) Modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan dan fluktuasi musim. (2) Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. (3) Modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat atau mendadak yang tidak dapat diketahui atau diramalkan (Bambang Riyanto, 2009).

Menurut Mulyadi (2008: 86) modal usaha nelayan dapat dilakukan dengan penilaian menurut tiga cara: (1) Penilaian didasarkan kepada nilai alat-alat yang baru, yaitu berupa ongkos memperoleh alat-alat tersebut menurut harga yang berlaku sekarang. Jadi,

dengan mengetahui jenis- jenis alat dan jumlahnya beserta harganya yang baru dapatlah dihitung besar modal sekarang. (2) Berdasarkan harga pembelian atau pembuatan alat-alat, jadi berapa investasi awal yang telah dilaksanakan nelayan, bertolak dari sini, dengan memperhitungkan penyusutan tiap tahun, dapat dihitung nilai alat-alat atau modal pada waktu sekarang. Cara kedua ini dilakukan apabila nelayan membeli alat-alat baru dan nelayan mengingat harga pembeliannya. (3) Dengan menaksir nilai alat-alat pada waktu sekarang, yakni harga yang akan diperoleh apabila alat-alat dijual. Cara ini terutama digunakan hanya untuk menilai perahu yang umurnya telah beberapa tahun dan masih dalam kondisi yang agak baik. Sebagian modal nelayan digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi, penyediaan input produksi (sarana produksi), seperti untuk memiliki perahu/kapal, alat tangkap yang digunakan, serta bahan bakar untuk perahu. Sedangkan dalam prasarana pendukung nelayan dipakai untuk modal membeli es, keranjang ikan, serta perbekalan makan yang dibawa. Tidak seperti hasil pertanian, ikan merupakan hasil yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan tanpa teknologi yang canggih, yakni tempat pendingin, pembeku, atau pengeringan (Mulyadi, 2005). Semakin besar modal yang digunakan, maka akan semakin besar pula hasil produksi nelayan yang didapat.

f. Usia atau Umur Orang tua

Umur adalah individu yang dihitung mulai saat di lahirkan sampai saat beberapa tahun. Semakin cukup umur tingkat pematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman jiwa (Nursalam, 2010 dalam Waedi, 2010:18).

Umur adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan. Umur mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang semakin bertambah umur seseorang semakin bertambah pula pengalaman dan pengetahuan yang di perolehnya (Hurlock, 2004 dalam Waedi, 2010:19).

Usia adalah waktu yang mengukur waktu berdasarkan satu benda atau makhluk hidup maupun mati misalnya umur manusia dikatakan 15 tahun diukur sejak dia lahir sehingga waktu umur itu dihitung, oleh karena itu umur itu diukur dari mulai dia lahir sampai sekarang ini (Weliono, 2002 dalam Fandi, 2012).

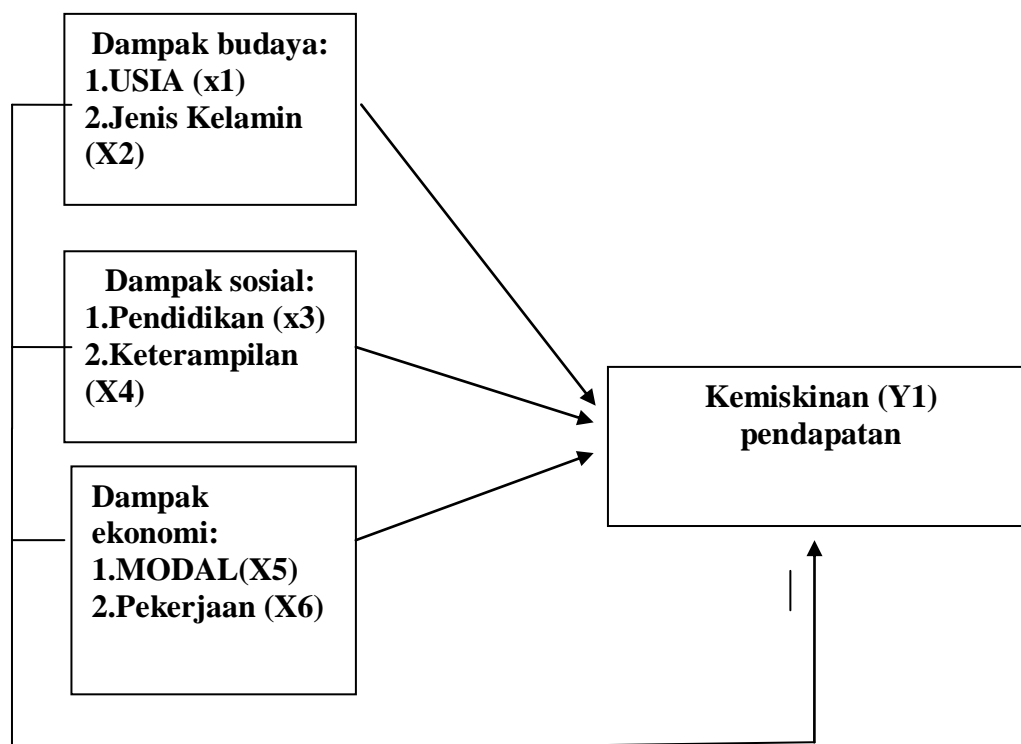
Metode Penelitian

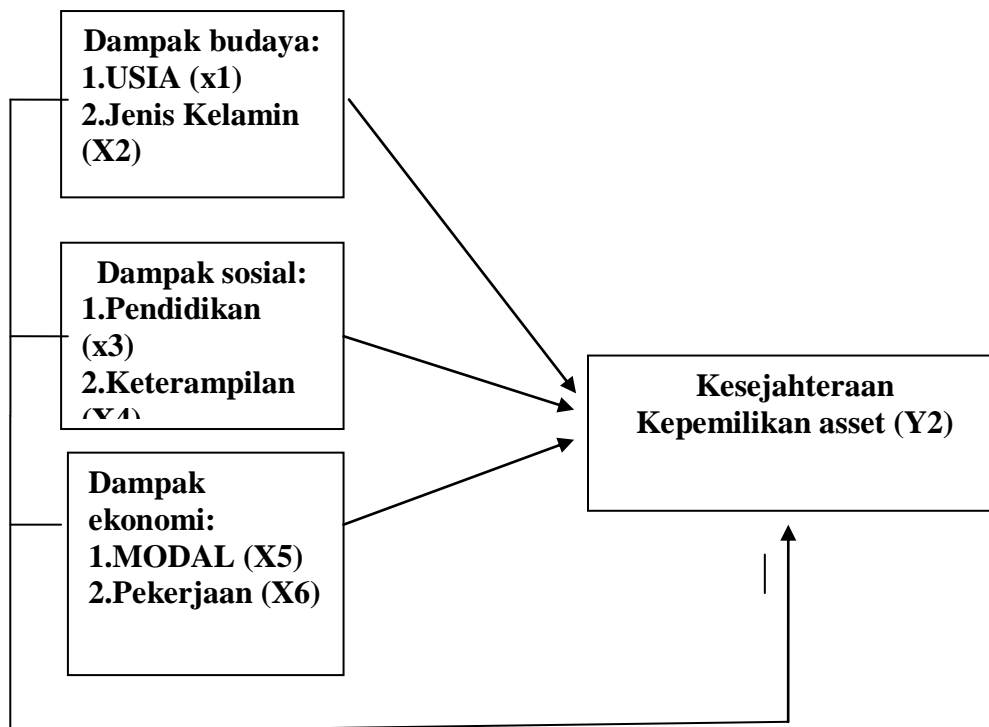
Materi penelitian

Materi penelitian ini menggunakan materi deskriptif dan kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan cara mengumpulkan data, mencari fakta, dan kemudian menjelaskan dan menganalisa data yaitu dengan cara penyusunan dan pengumpulan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana dampak sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batubara.

Prosedur Penelitian

Kerangka konseptual pada penelitian merupakan sintesis dan tinjauan teori dan tinjauan terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar variabel dan merupakan tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Konseptual

Parameter Yang Diamat

Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup Usia (X1), jenis kelamin (X2), pendidikan, (X3), Keterampilan (X4), kepemilikan modal (X5), dan status pekerjaan (X6), serta tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Y1) dan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir (Y2).

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Pahlawan kecamatan Tanjung tiram kabupaten Batubara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, dengan waktu penelitian yang direncanakan adalah:

Jenis Dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup tentang Pendapatan sebagai variabel Y yang ditinjau dari faktor

tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu Dampak Budaya dan Dampak Social beserta Dampak Ekonomi sebagai variabel X yang ditinjau dari usia (x1), pendidikan (x2), modal (x3), dan keterampilan (x4) di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram kabupaten BatuBara.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik data primer. Pengumpulan data primer dengan observasi, wawancara dan penyebaran angket langsung kepada masyarakat nelayan pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram.

Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80).

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan yang ada di desa Pahlawan kecamatan Tanjung tiram kabupaten Batubara yaitu sebanyak 100% dari jumlah masyarakat atau penduduk yang ada di Desa Nelayan yaitu sebanyak 5.567 orang. Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya (Sabar, 2007). Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan 100 orang responden. Dengan teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria.

Metode Analisi Data

1. Regresi linier berganda

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang bertujuan melihat hubungan antara variable tingkat kesejahteraan (X_1), daya beli nelayan (X_2) terhadap nilai tukar nelayan (Y) dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus:

Persamaan kemiskinan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y	= Kemiskinan
a	= Konstanta
X ₁	= Usia
X ₂	= Jensi kelamin
X ₃	= Pendidikan
X ₄	= Kesehatan
X ₅	= Modal
X ₆	= Pekerjaan
b ₁ -b ₂ -b ₃	= Koefisien regresi
e	= Error

Persamaan kesejahteraan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y	= Tingkat kesejahteraan
a	= Konstanta
a	= Konstanta
X ₁	= Usia
X ₂	= Jensi kelamin
X ₃	= Pendidikan
X ₄	= Kesehatan
X ₅	= Modal
X ₆	= Pekerjaan
b ₁ -b ₂ -b ₃	= Koefisien regresi
e	= Error

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square (OLS)*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus dipenuhi untuk model regresi linier terbaik. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

$H_0 : F(x) = F_0(x)$, dengan $F(x)$ adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel dan $F_0(x)$ adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$H_1 : F(x) \neq F_0(x)$ atau distribusi populasi tidak normal.

Pengambilan keputusan.

- Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima
- Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel prediktor/independen dalam suatu model regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan menggunakan *Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF)*. *Rule of thumb* yang digunakan sebagai pedoman jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians tidak konstan. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

3. Uji Kesesuaian (*Rasio Goodness Of Fit*)

Goodness of Fit test yaitu persamaan regresi yang digunakan dalam proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestiasi variabel dependen terhadap variabel independen, oleh karena itu perlu diadakan pengujian Goodness of Fit Test dengan menggunakan alat bantu SPSS.

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji - t)

Uji parsial atau biasanya lebih dikenal dengan uji t adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah/masing-masing/satu per satu. Sebagai contoh kita punya variabel *return on investment* (X_1), *debt to equity ratio* (X_2), Inflasi (X_3) dan return saham (Y). yang dinamakan uji parsial yakni menerangkan pengaruh dari X_1 terhadap Y, atau X_2 terhadap Y.

Uji parsial dikatakan signifikan apabila :

1. Nilai t-hitung > t-tabel

T hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui hasil

pengolahan data seperti SPSS (pada tabel *coefficient* dengan nama t). Sedangkan t tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan melihat nilai pada tabel t.

2. Nilai signifikan harus < derajat kepercayaan (umumnya derajat kepercayaan penelitian adalah 0,05)

Nilai signifikan dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS (pada tabel *coefficient* dengan nama sign).

Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dikatakan sangat signifikan.

b. Uji Hipotesis Simultan (Uji - F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak/bersama-sama atau sekaligus. Sebagai contoh uji X_1 dan X_2 secara serentak terhadap Y. Uji simultan dikatakan signifikan apabila :

1. Nilai F hitung > F tabel

F hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui hasil pengolahan data seperti SPSS (pada tabel ANOVA dengan nama F). Sedangkan F tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan nilai pada tabel F.

2. Signifikansi $F <$ derajat kepercayaan penelitian (0,05 pada umumnya)

Nilai signifikansi dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS (pada tabel ANOVA dengan nama sign).

Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dikatakan sangat signifikan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relative rendah karena adanya varians yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah saya lakukan maka dapat saya simpulkan bahwa :

- i. Dimana Variabel usia (X1), jenis kelamin (X2), pendidikan (X3), dan modal kerja (X6) tidak memiliki hubungan koefisien dengan variabel dependen tingkat pendapatan, dikarenakan di masyarakat desa pahlawan dimana tingkat pendapatan lebih dipengaruhi oleh variabel keterampilan (X4) dan modal kerja (X5) dalam hal melaut atau melakukan aktifitas ekonomi memanfaatkan hasil laut daerah pesisir.
- ii. Dimana variabel usia (X1), keterampilan (X4), status pekerjaan (X6) tidak memiliki pengaruh dalam mempengaruhi variabel dependen kepemilikan

asset (Y2). Hal ini bertolak belakang dengan variabel jenis kelamin (X2), pendidikan (X3) dan modal kerja (X5) yang memiliki hubungan koefisien dalam mempengaruhi variabel dependen kepemilikan asset (Y2) masyarakat desa Pahlawan.

Penutup

Demikianlah artikel ini saya buat dimana sekiranya masih banyak kekurangan dalam pemaparan dalam tulisannya dimana saran yang bisa saya paparkan dari kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Batu Bara harusnya lebih memperhatikan para nelayan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan agar bisa hidup sejahtera, dan dapat memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat nelayan maka mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik.
- b. Meningkatkan pendidikan maka masyarakat juga akan mampu berfikir dengan maju, sebab mereka akan memiliki skil dan keahlian selain melaut melainkan mampu mengubah sesuatu hasil tangkap mereka dengan nilai yang lebih tinggi.
- c. Adanya dukungan motivasi dari pemerintah daerah dalam membangun atau meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Desa Pahlawan agar menjadi lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani . (2011). Sosiologi:skematika, teori dan terapan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bintarto. (2011). Geografi Sosial. U.P Spring. Yogyakarta.
- Dahuri, R., J.Rais,S.P.Ginting dan M.J.Sitepu.(2011). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

- Definisi dan Pengertian Pengaruh*, diakses tanggal 30 Desember 2012, (<http://carapedia.com/pengertian-definisi-pengaruh-info2117.html>).
- Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatmasari Dewi. (2005). Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Fakultas Syraiah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Herien Puspitawati, Achmad Fahrudin, Ujang Sumarwan, Hartoyo, Istiqlaliyah. (2010). Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat. Program Pascasarjana IPB Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hidayat, Rahmat., Nur Subiantoro, dan Rusiadi. *Metode Penelitian*. Medan : USU Press.
- <http://www.bi.go.id>
- <http://www.bps.go.id>
- <http://www.BKKBN.go.id>
- Kusnadi R. (2012). Pertumbuhan Penduduk. <http://rahmatkusnadi.com/2010/02/pertumbuhan-penduduk> . html [Rabu 14 September 2011].
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- . 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS. 93
- Lestari, Juwita. (2013). “Kontribusi Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Sektoral Di Kota Palembang”. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP.
- Pane, Sanusi Ghazhali. (2017). Analisis Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pesisir Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Medan.
- Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor.2/PERMEN-KP 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Reddy Zaki Oktama. (2013). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan Di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2013. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Rutoto, Sabar. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus
- Sabar. (2007) “Teori sampel.

- Salim, (1984). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Inti Dayu Press.
- Sugiono. (2011:80) "Teori populasi.
- Sugiyono, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiharto Eko, (2007). *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*. Jurusan Ekonomi Perikanan FPIK Ummul Samarinda. Samarinda.
- Sukirno Sadono, (2013). *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyuningsih dkk. 1997. *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Tengah*. Jakarta: Depdikbud Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini.
- Wasak Martha. (2012). *Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat*. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Sam Ratulagi. Manado.
- Winardi, (2012). *Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG: TINJAUAN RELOKASI PASAR JOHAR

Saifudin dan Inarotul Ulya

Surel: saifudin@usm.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang (USM)

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Kinerja Pedagang dan Kepuasan Konsumen Tinjauan pada Relokasi Pasar Johar Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketersediaan dan efektivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Kinerja Pedagang dan Kepuasan Konsumen yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Pasar Kota Semarang sebagai pengelola dan Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pasar Johar sebagai pelaksana. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Pelaksanaan metode-metode deskriptif dilakukan dengan pengumpulan informasi, penerapan praktek, dan dampak yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan pemerintah terhadap masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Praktik yang dilakukan berpengaruh positif terhadap kinerja pedagang dan kepuasan konsumen. Terdapat kelemahan dalam pengelolaan yaitu kurangnya pemeliharaan air yang ada di fasilitas pasar.

Kata kunci: *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kinerja Pedagang, dan Kepuasan Konsumen*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan globalisasi berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Pengaruh ekonomi menuntut suatu individu atau organisasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Keinginan dan kebutuhan masyarakat menjadi pemicu munculnya kehidupan yang berkualitas. Pasar sebagai salah satu fasilitas sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hadiwiyono (2011), pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi, pasar menjadi tempat bertemunya penjual berbagai kebutuhan masyarakat dan pembeli yang ingin memenuhi kebutuhannya. Bukan hanya sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli pasar juga di gunakan sebagai wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai tradisional seperti

kebiasaan tawar-menawar transaksi penjualan di pasar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Tanggung jawab sosial merupakan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban terhadap masyarakat dan sebagai penanggung resiko. Aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan keputusan manajemen perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tanggung jawab sosial didasarkan pada lingkungan yang berperan penting bagi kelangsungan perusahaan.

Lingkungan merupakan faktor penting bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Persoalan lingkungan semakin menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global dunia. Secara perlahan terjadi perubahan yang mendasar dalam pola hidup bermasyarakat yang secara langsung atau tidak memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Indonesia sebagai Negara berkembang tidak terlepas pula dari persoalan lingkungan yang semakin hari semakin terasa dampaknya. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya arti lingkungan mulai tumbuh secara perlahan-lahan. Kesadaran ini tentunya menjadi modal dasar sebagai sistem kontrol bagi perusahaan sehingga tidak menyebabkan efek buruk bagi lingkungan sekitar.

Efek yang muncul di sebabkan oleh lingkungan memiliki peran bagi para pelaku usaha dalam pengaruh kinerjanya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melakukan kewajiban untuk memenuhi bentuk tanggung jawab seseorang.

Pedagang merupakan peran penting dalam aktifitas pasar. Menurut Endrawanti (2014) pedagang pasar adalah seseorang yang mempunyai usaha dan tempat permanen sesuai dengan jenis usahanya dan dalam penampilan barang dagangan mempunyai variasi baik dalam penataan, kemasan, kebersihan sehingga bisa menarik para pembeli atau pelanggannya. Pedagang memiliki tuntutan dalam tingkat sosial dan ekonomi. Tingkat sosial dan ekonomi merupakan suatu keadaan seseorang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan primer maupun sekunder, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan.

Kepuasan konsumen menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan kesuksesan usaha perdagangan. Kepuasan konsumen yang dimaksud adalah kenyamanan

konsumen dalam berbelanja. Lingkungan yang nyaman, bersih, dan aman akan membuat konsumen kembali lagi untuk berbelanja ke pasar.

Jadi tanggung jawab sosial dan lingkungan pada kinerja dan kepuasan konsumen sangatlah penting untuk diperhatikan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk menciptakan kinerja dan kepuasan yang baik. Dengan terpenuhi segala bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perusahaan sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masyarakat Semarang mempunyai sejarah perdagangan yang berkembang pesat di pasar tradisional. Sejak tahun 1860 Pasar Johar merupakan salah satu pusat pasar terbesar di Semarang. Keberadaan Pasar Johar merupakan salah satu kunci perekonomian utama kota. Transaksi jual beli setiap hari terjadi dan memiliki interaksi sosial yang sangat baik. Setiap hari sebagian besar masyarakat Semarang beraktifitas di pasar tradisional tersebut. Sebagai pusat pasar terbesar di Semarang Pasar Johar dianggap sebagai pusat ekonomi kota Semarang. Hampir setengah masyarakat sangat bergantung dengan adanya Pasar Johar, dari pengelola pemerintah, pendiri usaha individu, pencari pekerjaan, sampai konsumen produktif.

Sudah lebih dari seabad Pasar Johar telah berjalan baik dan lancar dalam keseimbangan perekonomian kota. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2015 terjadi kebakaran hebat yang disebabkan karena korsleting listrik di salah satu kios pasar dan menyebar di seluruh kompleks pasar. Kebakaran yang terjadi malam hari mengakibatkan sekitar 4.917 pedagang kehilangan seluruh barang dagangan yang ludes di lalap api. Dalam semalam seketika melumpuhkan seluruh sektor perekonomian di Pasar Johar. Semua transaksi jual dan beli dalam usaha masyarakat berhenti, mengakibatkan kerugian yang besar. Bagi pedagang kebakaran ini tidak hanya berdampak kerugian materil yang besar tetapi juga berdampak pada keadaan psikologi pedagang, mereka mengalami depresi atau guncangan batin karena kehilangan sumber mata pencaharian.

Dengan adanya kejadian yang tidak terduga tersebut pemerintah kota Semarang mengambil langkah untuk tetap menjaga sistem perekonomian masyarakat dengan membuat tempat Relokasi Pasar Johar. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan pemerintah harus menyediakan tempat relokasi yang layak bagi pedagang dan konsumen. Seperti tertulis pada peraturan Undang-undang No. 112 tahun 2007, lokasi

pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pasar Tradisional wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi tempatnya. Fasilitas mengenai tempat parkir harus dipilih lebih luas untuk menampung lebih banyak kendaraan. Kebersihan, keamanan, ketertiban, dan ruang lingkup yang baik juga merupakan ketentuan dalam peraturan yang harus di perhatikan. Melihat peraturan pemerintah yang sudah tertulis maka Relokasi Pasar Johar telah di bangun di kompleks wilayah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Perencanaan pasar darurat tersebut dianggarkan pemerintah menghabiskan biaya sekitar Rp 31 Miliar.

Permasalahan

Peran tanggung jawab sosial dan lingkungan pemerintah dalam menyediakan relokasi dirasa masih kurang memuaskan. Beberapa pedagang mendapat bagian lapak yang sempit dan tidak sesuai keadaan lapak pada sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil pemerintah agar tempat relokasi yang di siapkan dapat menampung semua pedagang korban kebakaran. Terbatasnya lahan membuat para pedagang kurang sepatat dengan keputusan pemerintah. Tempat berdagang yang kurang nyaman membuat pengaruh kinerja pedagang menjadi berkurang. Penataan barang dagangan yang banyak tidak bisa di maksimalkan. Tempat yang sempit dan panas membuat pedagang kurang nyaman untuk berjualan. Sampai sekarang masih banyak pedagang yang tidak mau pindah ke tempat relokasi dan masih bertahan di beberapa tempat pinggir jalan di Pasar Johar.

Pemerintah Kota Semarang mengalami beberapa kendala dalam pembangunan Relokasi Pasar Johar. Setelah beberapa pedagang pindah dan meramaikan tempat relokasi terjadi pengaruh pada konsumen. Tempat yang masih baru dan sedikit kios pedagang membuat konsumen kurang puas. Keadaan yang panas dan gersang membuat beberapa konsumen tidak berminat untuk berkunjung dan mengakibatkan kurangnya pendapatan pedagang. Menurut Suranto (2010), Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjur (Band, 1991).

Kajian Pustaka

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori Legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar diterima oleh masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Rachmawati, 2009). Menurut Utami (2011) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Legitimasi adalah hal yang sangat penting bagi organisasi sehingga batasan-batasan yang telah ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan dalam mempunyai kebijakan operasi dalam batasan institusi, kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan norma ataupun adat yang diterima oleh masyarakat, akan mengancam legitimasi perusahaan serta sumber daya perusahaan, dan akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Dalam pengertiannya *stakeholder* merupakan kelompok ataupun individu yang dapat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. *Stakeholder* adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk reponsibilitas dan akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwa teori *Stakeholder* perusahaan bukanlah suatu organisasi yang hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholders*) namun juga harus mementingkan dan memberi manfaat kepada para *stakeholder*-nya (pemegang saham, konsumen, investor, kreditor, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan).

Tanggung Jawab Sosial

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah konsep yang tengah berkembang secara global dan penerapannya telah merambah ke semua sektor perekonomian. Keterlibatan sosial merupakan respon keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan atau pemerintah. *CSR* menunjukkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan.

Sofyan (2011) menggambarkan beberapa model dan kecenderungan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, yaitu : (1) *Model Klasik* – bahwa usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan di persembahkan kepada pemilik modal; (2) *Model Manajemen* – bahwa perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan sendiri. Manajer sebagai tim yang di percaya perusahaan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mengingat ketergantungannya dengan pihak lain (masyarakat) yang juga punya andil dalam pencapaian tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan setoran untuk pemilik modal; (3) *Model Lingkungan Sosial* – bahwa perusahaan meyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan (bersumber) dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan teori atau model klasik.

Dalam penelitian ini penerapan bentuk tanggung jawab sosial menggunakan *Model Manajemen* yang di anggap bahwa pengelola pasar merupakan sebuah manajemen yang di percaya pemerintah untuk mendirikan relokasi pasar johar untuk membantu para korban kebakaran.

Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang maka berlaku peraturan Perda Nomor 9 Tahun 203 tentang pengaturan pasar tradisional untuk semua bentuk dan tata kelola pembangunan pasar. Untuk peraturan ketertiban dan biaya yang berlaku menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang peraturan retribusi jasa umum.

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting* atau EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah seperti informasi tenaga kerja, produk, dan pencemaran lingkungan. Ada berbagai macam pendekatan dalam Akuntansi Lingkungan pada tingkat mikro atau perusahaan, antara lain akuntansi pengelolaan lingkungan, akuntansi energi dan bahan baku, pelaporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sosial. Akuntansi lingkungan merupakan salah satu bagian ilmu bidang akuntansi. Akuntansi lingkungan memberikan laporan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan.

Menurut Irfan dan Handayani (2015) di dalam akuntansi lingkungan ada beberapa komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya: (a). biaya operasional bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau pembayaran (*fee*) kontrak untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan operasionalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (*recycling*). (b). biaya daur ulang yang dijual atau biasa juga disebut dengan “*Cost incurred by upstream and down-stream business operations*”. (c). biaya penelitian dan biaya pengembangan (Litbang) yang terdiri dari biaya total untuk material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Dalam melaksanakan bisnis tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan sekitar, sebagai pelaksana baik pemerintah maupun masyarakat umum perlu memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang di hadapi. Tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Dalam Andayani dan Riduwan (2011) yang mengemukakan tiga bentuk tanggungjawab sosial perusahaan, yaitu : (a) *Corporate Philanthropy* – tanggungjawab sosial perusahaan berada sebatas kedermawanan yang bersifat sukarela belum sampai pada

kewajiban; (b) *Corporate Responsibility* – kegiatan pertanggungjawaban sosial sudah merupakan bagian dari kewajiban perusahaan, baik karena ketentuan UU atau kesadaran perusahaan; dan (c) *Corporate Policy* – tanggungjawab sosial perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya. Pada penerapan pengelola Pasar Johar termasuk pada bentuk tanggungjawab, *Corporate Responsibility* yaitu kegiatan pertanggungjawaban sosial sudah merupakan bagian dari kewajiban perusahaan, baik karena ketentuan undang-undang atau kesadaran perusahaan.

Konsep Dasar CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Irfan dan Hadayani (2015) menyatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap lingkungan sosial di mana perusahaan berada. Inilah konsep dasar dari CSR (*Corporate Social Responsibility*). Adapun pelaksanaannya sesuai kemampuan perusahaan tersebut. Bentuk kegiatan dari tanggungjawab itu boleh bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada dan sebagainya. Menurut Andayani dan Riduwan (2011) konsep dasar CSR secara menyeluruh dan mencakup elemen-elemen kunci yang dapat di lakukan melalui Penetapan kebijakan lingkungan yang tepat, Perencanaan, Implementasi dan operasi, Pengecekan dan koreksi prosedur, dan Pengkajian manajemen secara berkala.

Manajemen Pengelola Relokasi Pasar Johar

Menurut Irfan dan Handayani (2015) tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh manajemen dapat dilihat melalui dua kebijakan yaitu kebijakan sosial dan kebijakan lingkungan. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. kebijakan sosial juga ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan

mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak warga negaranya.

Kebijakan lingkungan adalah sebuah tindakan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola prosedur kegiatan perusahaan dengan maksud untuk mencegah, atau mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam dan memastikan lingkungan perusahaan tetap bersih supaya perubahan lingkungan tidak memiliki efek berbahaya pada manusia. Maka perusahaan perlu melakukan beberapa instrument kebijakan lingkungan, instrument kebijakan lingkungan adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan.

Kinerja Pedagang

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang individu seperti kemampuan, motivasi, dan kesempatan maka kinerja dapat diartikan sebagai ketersediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Pedagang

Menurut Irfan dan Handayani (2015) pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan pengguna dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga.

Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2008) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil terhadap ekspektasi mereka). Sedangkan menurut Tse dan Wilton yang di kutip oleh

Tjiptono & Chandra (2005) menyatakan kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut :
“Kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau standar kinerja tertentu) dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah konsumsi produk.” Dari kedua pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang diterimanya bila membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dalam Andi Irfan dan Handayani (2015) menerapkan pertimbangan agar memperoleh informasi yang teliti, langsung dari objek penelitian dan diperoleh suatu hasil yang lebih mendekati kenyataan, serta pertimbangan lain bahwa peneliti memiliki akses masuk ke dalam objek penelitian dan mendekati para informan. Penelitian ini mencakup pihak pengelola pasar Johar yang melakukan tanggung jawab dan lingkungan terhadap kinerja pedagang dan kepuasan konsumen. Fenomena terjadinya kebakaran pada Pasar Johar menghasilkan keputusan untuk mendirikan Relokasi Pasar Johar. Relokasi pasar yang baru merupakan kajian bentuk tanggung jawab pengelola bagi pedagang. Pembangunan yang di lakukan perlu di pertimbangkan dari segi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diterapkan.

Sehubungan dengan permasalahan yang tengah di hadapi penelitian ini menjadikan tempat Relokasi Pasar Johar sebagai lokasi penelitian. Kepindahan para pedagang ke tempat Relokasi Pasar Johar dirasa mempunyai beberapa pengaruh. Pengaruh yang di alami berasal dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam menyiapkan tempat Relokasi Pasar Johar. Penyediaan relokasi memberi pengaruh juga terhadap kinerja pedagang dan kepuasan konsumen. Periode penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2016. Peneliti melakukan pemilihan informan dengan didasari dengan pendekatan persuasif. Bugin (2003) menyatakan dalam Andayani dan Riduwan (2011) bahwa penentuan informan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria berikut: (a) Subjek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran fokus penelitian; (b) Subjek masih terlibat secara aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti; (c)

Subjek mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai; (d) Subjek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu; dan (e) Subjek tergolong masih “asing” dengan peneliti.

Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data harus relevan dengan obyek penelitian dan merupakan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini. Maka diperlukan adanya metode pengumpulan data yang sesuai. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode wawancara dilakukan dengan bentuk memberikan beberapa pertanyaan pada informan yang bisa dilakukan lebih dari satu kali pertemuan dengan lamanya waktu bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi, serta berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Bugin (2007) dalam Irfan dan Handayani (2015) menyatakan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Alat bantu yang digunakan pada penelitian ini adalah kamera handphone yang berfungsi sebagai alat perekam baik audio maupun video.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Pedagang Dan Kepuasan Konsumen

Pengelolaan Pasar Tradisional (Relokasi Pasar Johar) dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Adanya kebakaran yang melanda sebagian besar wilayah Pasar Johar, pemerintah Kota Semarang melakukan program kegiatan pembangunan pasar sementara sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Pelaksanaan tanggung jawab sosial dikelola oleh Dinas Pasar Kota Semarang dan dilaksanakan oleh koordinasi dari UPTD Pasar Johar. Objek penelitian ini merupakan Dinas Pasar, UPTD, pedagang, dan konsumen. Fenomena yang terjadi pada pasar Tradisional (Relokasi Pasar Johar) adalah pindahnya para pedagang Pasar Johar Semarang dari pasar darurat di Jalan Agus Salim ke Relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa informan yang berbeda di antaranya informan manajemen (pegawai dinas pasar dan pengelola UPTD pasar) yang melakukan praktik *corporate social responsibility* (CSR), (informan pedagang 1,2, dan 3) dan (informan konsumen 1,2, dan 3), adalah informan yang merasakan dampak dari sistem kinerja yang dilakukan oleh manajemen pengelola Relokasi Pasar Johar. Dalam menganalisis penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber yang mana teknik ini selain menggunakan teknik wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan observasi terlibat dengan melakukan catatan atau tulisan pribadi yang diperoleh langsung dari lapangan. Dengan berbagai pandangan yang ada itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal.

Praktik Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pemerintah Kota Semarang berupa program pembangunan pasar sementara untuk para pedagang korban kebakaran Pasar Johar Semarang. Sistem kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut bisa diketahui melalui wawancara yang telah dilakukan bersama informan yang dianggap tahu tentang pokok permasalahan yakni informan manajemen dari Dinas Pasar Kota Semarang yang berperan aktif dalam tanggung jawab pembangunan pasar. Pengelolaan lingkungan pasar tradisional (Relokasi Pasar Johar) berdasarkan peraturan penyelenggaraan pelayanan pasar yang di atur pada Perda nomor 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional merupakan suatu hal yang sangat penting bagi organisasi sehingga batasan-batasan yang telah ditekankan oleh norma -norma dan nilai-nilai sosial , dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Seperti yang diterangkan pada pendapat Utami (2011) tentang teori legitimasi. Dapat diperoleh pendapat bahwa pembangunan pasar di lakukan dengan ketentuan yang sudah jelas tertulis dalam peraturan perundang-undangan daerah agar tercapai tujuan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan.

Selain tanggung jawab lingkungan yang direncanakan pengelola melakukan tanggung jawab sosial dengan memberi bantuan untuk retribusi sewa. Dengan adanya bencana atau musibah kebakaran yang di alami oleh pedagang membuat penderitaan secara finansial.

Memberikan lapak bagi pedagang dilakukan dengan kebijakan lingkungan perusahaan. Pengurangan jatah lapak dilakukan dengan memperhatikan beberapa instrumen kebijakan lingkungan dengan tujuan pembagian lapak yang merata kepada semua korban kebakaran. Kebijakan lingkungan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau mengurangi efek yang merugikan dan memastikan lingkungan tertata dengan tertib dan rapi. Kebijakan sosial dengan tidak memungut biaya sewa salah satu bentuk kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang dialami pedagang korban kebakaran. Kebutuhan masyarakat akan finansial menjadi alasan utama kebijakan tersebut.

Kondisi Pedagang Setelah Diterapkannya Praktik Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Kondisi pedagang bisa diketahui dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Wawancara tersebut menunjukkan hasil yang baik, pedagang, menyatakan kondisi keadaan lokasi relokasi yang nyaman. Kenyamanan yang dirasakan berasal dari fasilitas-fasilitas yang memadai seperti lapak/kios yang layak huni untuk berjualan, tempat beribadah, MCK, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. Keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelola sudah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik. Pengelolaan berkaitan bahwa kinerja yang diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Dampak Pedagang dan Kepuasan Konsumen Setelah Diterapkannya Praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dari wawancara yang dilakukan pada pedagang diperoleh pendapat bahwa pedagang tidak keberatan dalam biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan. Ketentuan biaya tersebut dirasa sangat murah dan tidak mengurangi keuntungan berjualan. Biaya yang sedikit tidak mengganggu kinerja pedagang terkait dengan kuantitas yang dicapai pedagang seimbang dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan. Pengeluaran tersebut tidak mengurangi keuntungan pedagang dan memotivasi ketersediaan pedagang untuk menjaga kelestarian lingkungan pasar. Dengan adanya motivasi yang baik untuk pedagang bisa menjalin

hubungan baik kepada konsumen yang menjadi pelanggan dan menjadi penghasilan tetap untuk mendapatkan keuntungan yang merata setiap hari.

Dari wawancara yang di lakukan pada konsumen di peroleh bahwa respon konsumen terhadap praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan dirasa sudah sesuai dengan harapan. Lingkungan yang nyaman dan penawaran barang yang menarik menjadi daya tarik untuk para konsumen datang ke Relokasi Pasar Johar.

Proposisi

Implementasi teori *Corporate Social Responsibility* perlu adanya pengaruh untuk meningkatkan perekonomian lingkungan yang berimbas pada pembiayaan lingkungan berdasarkan akuntansi biaya yang muncul dalam pengoperasian lingkungan perusahaan. Dengan tidak adanya perhatian terhadap pembiayaan lingkungan akan berdampak pada pengaruh sosial yang muncul dari isu-isu lingkungan masyarakat. Isu-isu lingkungan biasanya berdampak pada psikis seseorang yaitu perilaku individu yang timbul. Dampak tersebut diatasi dengan kebijakan sosial dan kebijakan lingkungan yang mendasarkan pada psikologi sosial dengan memahami kondisi pedagang yang mengalami kerugian financial dan psikologi lingkungan yang memahami tingkah laku para pedagang dengan lingkungan pasar yang baru, lingkungan yang masih baru dengan fasilitas yang baru juga.

Penutup

Berdasarkan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan pemerintah diperoleh hasil yang positif bagi kinerja pedagang dan kepuasan konsumen. Kondisi pedagang korban kebakaran setelah dilakukan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan, kini merasa senang dan nyaman dalam melakukan aktivitas jual beli karena pihak manajemen telah memberikan fasilitas yang lengkap. Hal tersebut juga turut dirasakan bagi konsumen, mereka merasa nyaman dan senang ketika berbelanja, karena tempatnya lebih luas, teratur, bersih, dan aman. Tetapi dampak praktik tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan masih kurang dalam hal pengelolaan. Seperti yang diungkapkan responden pedagang bahwa air yang ada di fasilitas MCK dan mushola masih sering mati. Oleh karena itu dalam perawatan dan pengadaan pengelola dapat memakai

pihak ketiga. Pihak ketiga membantu menyediakan fasilitas dan pemeliharaan yang lebih diperhatikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Andayani, dan Akhmad Riduwan, 2011. *Tanggungjawab Lingkungan Dan Peran Informasi Biaya Lingkungan Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen : Studi Kualitatif. Journal. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.* [Http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id](http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id)
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Addhintheas.Blogspot.Com/2013/04-Metode-Penelitian-Deskriptif.Html, Diakses Tanggal 28 Juni 2016
- Almilia, L. Dan D. Wijayanto. 2007. "Pengaruh Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance." FEUI, *The 1st Accounting Conference*, 7-9 September.
- Endrawati, Susilo, 2014. *Dampak Relokasi Pasar : Studi Kasus Di Pasar Sampangan Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Semarang*
- Fadliyah, Lina, 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impulse Buying Pada Konsumen Jilbab Di Pasar Johar Semarang*. Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Handiwono, 2011. *Analisis Kinerja Pasar Tradisional Di Era Persaingan Pasar Global Di Kota Bogor*. Riset. Program Studi Manajemen. Pasca Institut Pertanian Bogor.
- Harahap Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harahap, S. Syafri. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irfan, A, dan Devi Handayani, 2015. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Kinerja Pedagang dan Kepuasan Kosumen: Tinjauan pada Pasar Senggol Panam Pekanbaru. Journal. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan. Centro Multi Akuntansi*
- Kariyadi, 2014. *Harian Suara Merdeka*. (Online). Tersedia: <http://joharku.blogspot.co.id/2012/04/pasar-johar-semarang.html>. (15 Mei 2016).
- Kotler, P. & Keller, K.L. 2008. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12. Alih Bahasa Benyamin Molan. Penerbit PT Indeks: Jakarta.
- Moetheriono. 2012 *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nut, Marzully Dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)" . *Jurnal Nominal / Volume 1 Nomor I/ Tahun 2012*

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013. *Tentang Pengaturan Pasar Tradisional*. Semarang.
- Pratiwi, W.M. 2013. *Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan: Perusahaan Manufaktur*. *Jurnal Mahasiswa Teknologi*.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2013. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1992, *Psikologi Lingkungan*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Solihin, Ismail, 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Salemba Empat
- Suaryana, Agung, 2011. *Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia* *Jurnal Akuntansi*
- Suranto, 2010. *Manajemen Dan Tingkat Kepuasan Pedagang Pengguna Pada Subterminal Agribisnis Sewukan Di Kabupaten Magelang*. *Thesis*. Program Magister Agribisnis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- www.seputarsemarang.com *Pasar Johar Semarang*.Html, Diakses Tanggal 11 Agustus 2016
- Yin, Robert, K. 2002. *Case Study Research Design And Methods*. 2002. PT. Raja Grafindo Perdasa. Jakarta.

RELEVANSI PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN AMNESTI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ine Novanty¹⁾, Ahmad Nurkhin¹⁾ dan Sumiadji²⁾

Surel:

ine.novanty@gmail.com,
ahmadnurkhin@mail.unnes.ac.id,
sumiadjimalang@gmail.com

1) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

2) Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti dengan hadirnya program amnesti pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Diperoleh sampel sebanyak 200 unit. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner yang dikembangkan dari beberapa peneliti terdahulu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang mempunyai pengaruh lebih kuat daripada variabel persepsi amnesti pajak. Saran yang diberikan diantaranya adalah kantor pelayanan pajak senantiasa meningkatkan program edukasi perpajakan kepada wajib pajak secara terprogram dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak amnesti pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber keuangan negara, dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Sehingga berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Namun demikian, jumlah penerimaan negara dari pajak belum mencapai hasil yang sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penyebab rendahnya penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak

dalam menyampaikan dan membayar pajak. Rahayu (2013:110) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan indeks rasio kepatuhan wajib pajak yang tercantum di dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sejak tahun 2012 rasio kepatuhan wajib pajak mengalami perubahan yang berfluktuasi. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 hanya sebesar 53,70%. Tahun 2013 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami sedikit kenaikan menjadi 60,86% , di tahun 2015 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi justru mengalami penurunan sebesar 1,99% menjadi 58,87 % dan di tahun 2015 sebesar 60,42%. Hal tersebut menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki sifat yang sangat sensitif dan mudah berubah.

Provinsi Jawa Tengah juga tak luput dari permasalahan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah Jawa Tengah hanya sebesar 52%. Dari 801.695 wajib pajak yang terdaftar, baru 412.987 wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Proses penyampaian SPT di wilayah Jawa Tengah dapat dilakukan melalui pelayanan, KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya, dan juga KPP Pratama. Salah satu KPP Pratama yang memberikan layanan perpajakan di wilayah Jawa Tengah adalah KPP Pratama Semarang Timur. KPP Pratama Semarang Timur adalah kantor pelayanan pajak yang memberikan layanan untuk wilayah kerja sebagian desa dan kelurahan di Kecamatan Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Semarang Utara yang juga memiliki masalah kepatuhan wajib pajak. Jumlah pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Semarang tidak selalu sesuai dengan jumlah wajib pajak (WP) yang wajib melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum maksimal menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan KPP Pratama Semarang Timur.

Tabel 1 dan tabel 2 berikut menunjukkan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Timur serta laporan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015-2016 mengalami

penurunan yang sangat drastis. Hal ini juga ditunjukkan pada tabel 2 bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2015-2016.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp 105.425.267,00	Rp 96.326.627,00	91,37%
2013	Rp 112.541.000,00	Rp 122.440.911,00	108,80%
2014	Rp 321.813.285,00	Rp 306.017.380,00	95,09%
2015	Rp 478.182.000,00	Rp 327.862.722,00	68,56%
2016	Rp 597.594.265,00	Rp 172.323.176,00	28,84%

Sumber: KPP Pratama Semarang Timur

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur

Tahun	Jumlah WP	WP Wajib SPT	WP Laporan	Persentase
2012	33.417	26.965	18.287	67,82%
2013	34.523	24.910	19.171	76,96%
2014	38.285	25.944	20.084	77,41%
2015	40.138	22.657	20.536	90,64%
2016	42.096	27.094	17.494	64,57%
Jumlah	188.459	127.570	95.799	75,10%

Sumber:
KPP
Pratama
Semarang
8
Timu

r

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi atau saat dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Agustiniingsih dan Isroah (2016) menyebutkan kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari melalui seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak terhadap semua ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan prosedur penyampaian pajak dengan benar. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyebutkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah ada. Ketidakhahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan secara jelas menyebabkan mereka tidak dapat mematuhi kewajibannya sehingga menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Saad (2014) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap perpajakan dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Agustiniingsih dan Isroah (2016) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Andinata (2015) menemukan hasil yang berbeda, pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan membayar pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak selain pemahaman perpajakan. Kesadaran diri wajib pajak sangat dibutuhkan mengingat sistem pemungutan yang berlaku adalah self assessment yang memberikan kesempatan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Suryarini dan Tarmudji (2009:9) menyebutkan bahwa wajib pajak dengan kesadarannya sendiri harusnya sudah membayar pajak dengan benar (semua penghasilan sudah dilaporkan). Namun pada realitanya setiap orang memiliki kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak. Andinata (2015) serta Agustiningsih dan Isroah (2016) berhasil membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Nugroho dkk. (2016) menemukan kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan.

Tahun 2016 merupakan tahun implementasi program pengampunan pajak di Indonesia. Fenomena ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan realitas kepatuhan pembayaran pajak. Artinya, pemerintah menerbitkan terobosan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber pajak. Widodo (2010:239) menjelaskan amnesti pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja. Melalui kebijakan amnesti pajak atau pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa pengampunan pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Kebijakan amnesti pajak masih menjadi kontroversi walaupun dianggap mampu menjadi alat untuk menghimpun dana pajak secara cepat. Masalah kecemburuan sosial bagi wajib pajak patuh terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran maupun pelanggaran juga tidak dapat dihindari. Widodo (2010:243) menyebutkan bahwa bagi sebagian besar wajib pajak yang jujur mungkin akan merasa terganggu atau kecewa dengan program pengampunan pajak. Jika sebagian besar wajib pajak telah sukarela

menjadi wajib pajak patuh, pemberian amnesti pajak kepada sekelompok orang yang selama ini melakukan penghindaran pajak dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap konsep keadilan dalam pajak. Selama ini, para wajib pajak patuh sering memandang bahwa kebijakan amnesti pajak adalah sesuatu yang mencederai rasa keadilan, dan dapat memotivasi mereka untuk berperilaku kurang atau bahkan tidak patuh di masa yang akan datang.

Hasil penelitian mengenai pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak masih beragam. Gerger (2012) melakukan penelitian mengenai amnesti pajak di Turki dengan hasil penelitian yang menyebutkan pengampunan pajak memiliki pengaruh negatif atas sikap dan perilaku wajib pajak sehingga menyebabkan penurunan kepatuhan perpajakan. Junpath et al. (2016) juga menemukan amnesti pajak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak patuh dan wajib pajak tidak patuh. Sedangkan Huslin dan Ngadiman (2015) menemukan bahwa amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan

Uraian pada bagian pendahuluan menunjukkan bahwa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih menarik perhatian untuk dilakukan penelitian ulang. Fenomena implementasi program amnesti pajak yang masih baru juga menjadi variabel yang menarik untuk diuji. Hasil yang beragam bisa jadi dikarenakan pengukuran variabel yang berbeda-beda. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji relevansi pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

Kajian Pustaka

Theory of Planned Behavior dan Teori Atribusi

Penelitian ini didasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi. *Theory of planned behavior* merupakan perluasan dari *theory of reason action* yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku (Azjen, 1991). Perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku yang disebabkan oleh tiga faktor yakni: (1) *behavioral beliefs* adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut; (2) *normative beliefs* adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut; dan (3) *control beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi mengenai seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku (*perceived power*).

Teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Robbins (2002:47) menguraikan bahwa teori atribusi menyatakan ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar; yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang. Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait

dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan pemberlakuan amnesti pajak. Karena wajib pajak akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan amnesti pajak. Faktor internal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Ananda (2015) menjelaskan kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Sedangkan Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) mengatakan kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Devano dan Rahayu (2006:112) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri atas: faktor ekonomi, faktor non ekonomi, dan faktor lain. Faktor ekonomi adalah *the level of actual income, tax rates, tax benefits, penalties, tax audits, fines, and audit probability*. Faktor non ekonomi adalah *attitude toward taxes, personal, social and national norms, and perceived fairness of tax system*. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *social behaviors, enforcement, confidentiality, dan tax fairness*. Dan Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, antara lain: (a) ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, (b) pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan (c) banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman merupakan suatu aspek yang berasal dari proses kognitif dari dalam diri individu. Wajib pajak akan memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan karena merupakan hasil berpikir (penalaran kognitif) dari dalam diri mereka sendiri, dan bukan karena paksaan dari pihak lain. Pemahaman perpajakan sejalan dengan teori atribusi internal yang menjelaskan bahwa seseorang dalam keputusannya untuk berperilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di bawah kendali pribadi individu. Pemahaman perpajakan berhubungan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh banyak peneliti. Adiasa (2013) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saad (2014) juga menunjukkan pengetahuan perpajakan berkontribusi terhadap perilaku ketidakpatuhan perpajakan. Agustiningsih dan Isroah (2016) serta Nugroho dkk. (2016) juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Sedangkan Andinata (2015) justru menyatakan bahwa pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H1 : terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsekuensi atas kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan memberikan dampak yang nyata terhadap wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Kesadaran akan membuat wajib pajak rela untuk memberikan sebagian dana dari harta yang mereka miliki sebagai kontribusi dalam proses pembangunan negara. Andinata (2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Demikian pula yang disampaikan oleh Fajriyan (2015) serta Agustiningsih dan Isroah (2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Namun temuan lain disampaikan oleh Nugroho dkk. (2016) yang melakukan penelitian dengan hasil bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meski secara simultan bersama pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suyanto dkk. (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan amnesti pajak merupakan salah satu bentuk peraturan perpajakan, yang memberikan pengampunan terhadap sanksi dan denda akibat tindakan pelanggaran dan penghindaran kewajiban perpajakan di masa lalu. Kebijakan amnesti pajak akan membentuk berbagai persepsi yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian Huslin dan Ngadiman (2015) memberikan hasil bahwa amnesti pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Suyanto dkk. (2016) juga melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak amnesti pajak dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa amnesti pajak berpengaruh secara positif. Hasil penelitian Junpath et al. (2016) juga menunjukkan hasil yang serupa dimana persepsi wajib pajak mengenai amnesti pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian Gerger (2012) menunjukkan bahwa dampak negatif dari amnesti pajak terhadap sikap dan perilaku wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian menggunakan penelitian *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* merupakan penelitian yang mengambil data atau menggali data dari peristiwa yang sudah terjadi (Wahyudin, 2015:19). Penelitian ini menguji relevansi pemahaman perpajakan, kesadaran dan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Semarang Timur Semarang Jawa Tengah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur pada tanggal 13 Maret 2017, jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur adalah 42.096 wajib pajak. Peneliti memilih KPP Pratama Semarang Timur sebagai lokasi penelitian karena terjadi fluktuasi penerimaan pajak sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 yang dikarenakan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jumlah anggota objek yang digunakan sebagai sampel adalah 200 objek. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik *convenience sampling* atau teknik penentuan sampel dengan menjadikan unit atau subjek tersedia yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti pada saat proses pengumpulan data. Teknik *convenience sampling* dalam penelitian ini digunakan berdasarkan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak. Definisi operasional variabel penelitian tampak pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak mengarah pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). b) Melakukan pembukuan atau pencatatan. c) Menghitung pajak yang terhutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu. d) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkan dengan tepat waktu. e) Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan. f) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian (SPT).
Pemahaman Perpajakan	Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.	<ul style="list-style-type: none"> a) Kemudahan memperoleh pengetahuan perpajakan b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak c) Pengetahuan dan pemahaman dalam pengisian SPT, pembuatan laporan keuangan, dan cara pembayaran pajak d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan pajak terutang e) Pengetahuan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana f) Pengetahuan dan pemahaman mengenai penenaan sanksi atas pelanggaran pajak g) Pengetahuan dan pemahaman atas hakikat pajak
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.	<ul style="list-style-type: none"> a) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. b) Kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan negara. c) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
Amnesti pajak	Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Amnesti pajak memberikan keuntungan pribadi bagi wajib pajak. b) Amnesti pajak mendistorsi kepatuhan wajib pajak. c) Perbedaan opini wajib pajak tentang amnesti pajak apabila pemeriksaan pajak ditingkatkan setelah amnesti pajak. d) Perbedaan opini wajib pajak apabila hukuman direncanakan untuk menjadi lebih ketat setelah amnesti pajak. e) Amnesti pajak menyebabkan peningkatan pelanggaran. f) Perhitungan wajib pajak akan kerugian dan pendapatan atas sikap untuk menghindari pajak. g) Wajib pajak pernah diaudit selama amnesti pajak. h) Amnesti pajak membahayakan keadilan pajak

Teknik Pengambilan Data dan Teknik Analisis Data

Pengambilan data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dalam tahap ini dapat menentukan baik buruknya hasil suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup.

Analisis data digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh melalui aturan-aturan tertentu yang sesuai dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan bantuan program aplikasi komputer IBM SPSS Statistik versi 21.00.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Jumlah responden yang dijadikan sampel adalah sebanyak 200 Wajib Pajak. Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah sejumlah 200 buah. Jumlah tersebut kembali seluruhnya. Berdasarkan kuesioner penelitian yang telah terkumpul dapat dibuat profil responden Wajib Pajak orang pribadi di KPP Semarang Timur berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan per tahun dan disajikan pada tabel 4. Hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4. Profil Responden Penelitian

	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	1. Laki-Laki	97	48,50%
	2. Perempuan	73	36,50%
	3. Anonim	30	15,00%
Pendidikan Terakhir	1. SD-SMA/ sederajat	101	50,50%
	2. D1-D3	9	4,50%
	2. S1/D4	69	34,50%
	3. Di atas S1	6	3,00%
	4. Anonim	15	7,50%
Pekerjaan	1. Karyawan	19	9,50%
	2. Konsultan Pajak	1	0,50%
	3. Pegawai Swasta	42	21,00%
	4. Pengusaha/ wirausaha/swasta	132	66,00%
	5. Anonim	6	3,00%
Pendapatan (per tahun)	1. Sampai dengan 50 juta	67	33,50%
	2. 50 juta sampai dengan 250 juta	111	55,50%
	3. 250 juta sampai dengan 500 juta	3	1,50%
	4. Diatas 500 juta	2	1,00%
	5. Anonim	19	9,50%

Tabel 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	28	66	49,94	6,138
Pemahaman Perpajakan	20	45	33,56	4,518
Kesadaran Wajib Pajak	12	25	20,04	3,196
Amnesti pajak	29	57	39,34	4,851

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 6. Nilai *Sig.* untuk semua variabel independen (pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan amnesti pajak) adalah kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol tidak dapat diterima dan hipotesis penelitian (H1, H2 dan H3) dinyatakan diterima. Hal ini berarti penelitian ini dapat membuktikan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan amnesti pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,375	4,957		4,715	,000
	pemahaman_perpajakan	,289	,092	,213	3,146	,002
	kesadaran_wp	,312	,131	,162	2,390	,018
	amnesti_pajak	,270	,086	,213	3,139	,002

a. Dependent Variable: kepatuhan_wp

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak saat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Nurhayati dkk. (2015), Redae and Sekhon (2016), Agustiningasih dan Isroah (2016) dan Ilhamsyah dkk. (2016).

Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel pemahaman perpajakan, rata-rata pemahaman perpajakan dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku sudah baik. Dengan baiknya pemahaman perpajakan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.

Pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan indikator menurut pandangan menurut Setyawati (2013) dalam Andinata (2015) karena indikator tersebut sudah mencakup pemahaman wajib pajak terkait dengan sistem perpajakan beserta peraturan yang berlaku. Indikator-indikator tersebut adalah: (1) kemudahan memperoleh pengetahuan perpajakan, (2) pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak, (3) pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan pajak terutang, (4) pengetahuan dan pemahaman mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak, (5) pengetahuan dan pemahaman atas hakikat pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Andinata (2015), Agustiningih dan Isroah (2016), dan Ilhamsyah dkk. (2016).

Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak, rata-rata kesadaran wajib pajak dalam kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur sangat menyadari akan kewajibannya. Dengan baiknya kesadaran wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator menurut Fikrianingrum (2012). Indikator-indikator tersebut adalah: (1) kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (2) kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan negara, dan (3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Pengaruh Amnesti pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Amnesti pajak merupakan kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Hasil penelitian selaras dengan hasil penelitian Rechberger et al. (2010), Junpath et al. (2016), dan Suyanto dkk. (2016).

Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel amnesti pajak, rata-rata persepsi wajib pajak mengenai amnesti pajak masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa persepsi wajib pajak mengenai program amnesti pajak belum sepenuhnya baik. Apabila persepsi wajib pajak mengenai amnesti pajak cukup baik akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Amnesti pajak diukur dengan menggunakan indikator menurut Saracoglu and Caskurlu (2011). Indikator-indikator tersebut adalah : (1) setiap amnesti pajak memberikan keuntungan pribadi bagi wajib pajak, (2) amnesti pajak mendistorsi kepatuhan wajib pajak, (3) perbedaan opini wajib pajak tentang amnesti pajak apabila pemeriksaan pajak ditingkatkan setelah amnesti pajak, (4) perbedaan opini wajib pajak apabila hukuman direncanakan untuk menjadi lebih ketat setelah amnesti pajak, (5) amnesti pajak menyebabkan peningkatan pelanggaran, (6) perhitungan wajib pajak akan kerugian dan pendapatan atas sikap untuk menghindari pajak, (7) wajib pajak pernah diaudit selama amnesti pajak, (8) amnesti pajak membahayakan keadilan pajak.

Penutup

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, simpulan yang dapat ditarik adalah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan amnesti pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur, baik secara simultan maupun parsial. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang mempunyai pengaruh lebih dominan daripada persepsi mengenai program amnestri pajak.

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai sikap sadar membayar pajak, kegunaan pajak bagi kehidupan bernegara, program-program perpajakan seperti amnesti pajak dan juga sosialisasi yang dapat meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak menjadi lebih baik sehingga wajib pajak lebih patuh. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambahkan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya kualitas sistem pelayanan dan religiusitas.

Daftar Pustaka

- Adiasa, N., (2013), “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko”, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 3, Hal 345-352.
- Agustiningsih, W. dan Isroah, (2016), “Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”, *Jurnal Nominal*, Vol. V No. 2, Hal 107-122.
- Ajzen, I., (1991), “The Theory of Planned Behavior”, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50 No. 2, page 179-211.
- Ananda, (2015), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Wajib Pajak di Kota Medan)”, Tesis pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Andinata, M. C., (2015), “Analisis Fakor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayananana Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya”, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4 No. 2, Hal. 1-15.
- Devano, S. dan Kurnia, S., (2006), *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana.
- Febriani, Y. dan Kusmuriyanto, (2015), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4 No. 4, Hal. 1-13.
- Fikriningrum, W. K., (2012), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)”. Skripsi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gerger, G. C., (2012), “Tax Amnesties and Tax Compliance in Turkey”, *International Journal of Multidisciplinary Thought*, Vol. 2 No. 3, Page 107-113.
- Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N., (2011), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, Hal. 126-142.
- Huslin, D. dan Ngadiman, (2015), “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX No. 2, Hal. 225-241.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., dan Dewantara, R. Y., (2016), “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1, Hal. 1-9.
- Junpath, S. V., Kharwa, M. S. E., and Stainbank, L. J., (2016), “Taxpayers’ attitudes Towards Tax Amnesty and Compliance in South Africa: An Exploratory Study”, *South African Journal of Accounting Research*, Vol. 30 Iss. 2, Page 97-119.

- Mangoting, Y. dan Sadjarto, A., (2013), "Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15 No. 2, Hal. 106-116.
- Nugroho, A., Andini, R., dan Raharjo, K., (2016), "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi)", *Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2, Hal. 1-13.
- Nurhayati, N., Halimatusadiah, E., dan Diamonalisa, (2015), "Influence of Tax Officer Service Quality and Knowledge of Tax on Individual Taxpayer Compliance in Tax Office (KPP) Bojonegoro Bandung", *Internasional Journal of Applied Research*, Vol. 1 No. 8, Hal. 805-809.
- Rahayu, S. K., (2013), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rechberger, S., Hartner, M., Kirchler, E., and Hammerle, F., (2010), "Tax amnesties, justice perceptions, and filing behavior: a simulation study", *Law Policy*, Vol. 32 No. 2, Hal. 214-225.
- Redae, R. B. And Sekhon, S., (2016), "Taxpayers' Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State", *International Journal of Management and Commerce Innovations*, Vol. 3 Iss. 2, Hal. 1090-1102.
- Robbins, S. P., (2002), *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi, Edisi Kelima*, Jakarta: Erlangga.
- Saad, N., (2014), "Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View". *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 109 (2014), Page 1069-1075.
- Saracoglu, O. F. And Caskurlu, E., (2011), "Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 7, Pp 95-103.
- Suryarini, T. dan Tarmudji, T., (2009), *Pengetahuan Perpajakan*, Semarang: Unnes Press.
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., dan Endahjati, S., (2016), "Tax Amnesty", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2, Hal. 1-22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Wahyudin, A., (2015), *Metodologi Penelitian*, Semarang: Unnes Press.
- Widodo, W., (2010), *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Alfabeta.

THE EFFECT ACHIEVEMENT MOTIVATION, LEADERSHIP CHARACTER AND INTERNAL CULTURE TOWARDS EMPLOYEE'S PERFORMANCE

Joko Utomo¹⁾, Marthin Nanere²⁾, Sutono¹⁾

Surel:

Joko.utomo@umk.ac.id,
m.nanere@latrobe.edu.au,
sutono_umk@yahoo.com

1) Faculty of Economics, Muria Kudus University, Kudus, 59324. Central Java, Indonesia

2) Faculty of Business, Economics and Law, La Trobe University, Bendigo, Vic. 3550, Australia

ABSTRACT

The research aims to find out the regression of job achievement motivation towards employee's working satisfaction, the regression of characteristic leadership towards employee's working satisfaction, internal culture towards employee's working satisfaction, job achievement motivation towards employee's working performance, the influence of characteristic leadership towards working performance, the regression of internal culture towards employee's working performance, and the regression of working satisfaction towards employee's working performance in PT. Pura Barutama, the company from Indonesia. The sample is 105 employees. Questionnaire is used as the instrument while the data analysis is done by using Structural Equation Modeling program. The research found that there is significant effect of achievement motivation variable towards working satisfaction shown by positive regression. It is also proven by the regression that characteristic leadership is not influential towards employee's working satisfaction; internal culture has positive effect towards working satisfaction. Meanwhile, achievement motivation has positive regression towards working performance. Characteristic leadership towards working performance is also proven to have regression. Internal culture has positive effect towards the working performance and working satisfaction also has positive effect towards working performance.

Keywords: *achievement motivation, characteristic leadership, internal culture, performance*

Background

Organization is system and activity of human in cooperation (Efendy ,1992). In line with it, organization is considered as a rational coordination of activity of a group of people to achieve some common goals through job and function division under a hierarchical authority and responsibility (Mangkunegara, 2001). This statement reflects that organization has certain characteristic whose structure and goal relate to each other and are dependent on human communication to coordinate activities in the organization. It can be said that organization aims to fulfill its need to get power. Therefore, an organization expects that its employees are able to develop their achievement and to create conducive situation and condition so that the employees will not feel bored and lazy which causes weakening working spirit. The weakening working spirit can, in turn, result in the weakening working performance which will give impact of organizational loss.

It is not easy to create working satisfaction since it can only be realized if the effecting variables, such as working motivation, leadership, and organizational culture are well accommodated and accepted by all employees in a company. Gibson (1996) and Brahmasari (2005) point out that working performance of an organization is dependent on individual working performance or in other words individual working performance will contribute organizational working performance which means that the behavior of organization's members, either individually and collectively, can be empowering towards organizational working performance because of the existence of working motivation. Ermayanti and Thoyib (2001) states that the awareness on motivation among employees and their environment will help improving working performance. In this case, a manager needs to direct motivation by conditioning good organization's atmosphere through creating working or organizational culture so as to motivate the employees to work harder to get higher working performance. The given motivation should be well directed by considering priority and be well accepted by the employees because motivation can be given to every employee in different forms.

Considering working culture is very essential for an organization or a company because it is related to the company's life. Internal culture is concerned with philosophy, ideology, values, perceptions, belief, expectation, attitude and norms which are collectively and internally shared in a certain territory of a certain community. Specifically, culture in

an organization will be determined by the condition of team work, leaders and characteristic of organization as well as the running process of administration. Why internal culture is important is because it relates to habits done in organization's hierarchy which represent norms of behavior believed by the members of organization. Productive culture is a culture which can turn an organization into a powerful one and can accommodate the company's goals.

One of the important elements in company's management system, besides achievement motivation for employees, is leadership. Some research's result shows that characteristic leadership is needed to develop the durable competitiveness of a company. Leadership is a process in which someone can be a leader through the continuous activities of promoting his/her followers to achieve the organization or company's goals.

The dissatisfaction of employees in some aspects of human resource's management and the indiscipline of employees cause the degradation of working performance so that it can reduce the employees' achievement motivation to fulfill the intrinsic need of employees, such as the need of personal development, developing achievement, personal expression as well as internal culture and characteristic leadership, another important factor to promote company's continuous competitiveness. Characteristic leadership is a leadership which can encourage employees to be more committed in working. Magdalena and Eleonora (2011) in every company leadership has a very important role in achieving performance. Suggests that a good leadership is part of a working performance. Based on the above mentioned concern, this research proposes the following statement of the problem: Do achievement motivation, characteristic leadership, internal culture, and working satisfaction give effect towards the working performance of the employees.

The aim of the research is to analyze and examine the effect of achievement motivation, characteristic leadership, internal culture, and working satisfaction towards the working performance of the employees of the Corporate in Indonesia

Review Of The Related Literature

Concept of Achievement Motivation

Siagian (2002) states that in organization's life, including working life in business organization, the aspect of achievement motivation is absolutely needed to be considered by managers. It is because of 4 (four) main considerations, those are: (1) Human's philosophy of life is around the principle of "quit pro quo", which is, in a common sense, reflected in an Indonesian proverb saying "ada ubi ada talas, ada budi ada balas", whose meaning is "if you are willing to help someone, somebody else will help you"; (2) Human's life is dynamically complex and it is concerned with not only material but also immaterial (psychology); (3) There is no limit for human satisfaction; (4) Characteristic difference of individual in an organization or company causes a fact that there will never be exactly the same effective technique of motivation for each person in an organization at different situation and time. Antoni (2006) argues that giving encouragement is a form of motivation, which is important to do to improve working performance's spirit so that the management will be able to achieve the organization's expectation. The relationship between motivation, working spirit, and optimal result is linear which means that by giving good working motivation, the employee's working spirit will develop and the working result will be optimal as planned based on the working standard. Working spirit is a form of motivation which can be seen among others from the employee's working attendance and responsibility towards the determined working time.

Characteristic Leadership

Proposes that characteristic leadership is an effort of persuading many people through communication to achieve its goal; a way of influencing people with direction or instruction; a typical action which makes someone else take action or give response for positive change; an important dynamic power to motivate and coordinate an organization to achieve its goals; an ability of bringing about self confidence and support from the subordinates to reach organizational goals. Siagian (2002) believes that leadership is an ability of someone to influence someone else (subordinates) in such a way that someone else is willing to do the leader's instruction (willing) which maybe, he/she personally does not like. Nimran (2004) states that leadership is a process of influencing someone else's

behavior so as to behave as demanded. Robbin (1996) points out that leadership is an ability of influencing a group of people to achieve certain goal. Siagian (2002) argues that the role of characteristic leadership in an organization or company is in three forms, i.e. interpersonal role, informational role, and decision making role. Interpersonal role is that a leader in a company or organization is a symbol of the existence of the organization; a leader who is responsible to motivate and give direction to the subordinates; and a leader who has a role as a connector. Meanwhile, informational role means that a leader in an organization has a role as a giver, receiver and analyst of information. Whereas, decision making role is that a leader plays a role of determining policy in form of strategies of business to develop innovation, take opportunity or chance and negotiate as well as running the business consistently.

Internal Culture

Brahmasari (2004) Like the definition of motivation and leadership, the definition of culture has been revealed by scientists who are expert in the studies of organizational culture, however there are not many common or same perception (understanding) about the definition of internal culture or how internal culture should be observed and assessed. Furthermore, Brahmasari (2004) responds to the different perception and states that it is because of the lack of mutual perception (understanding) about the theory formulation of internal culture, its description and the possibility of its relationship with the impact of working performance. Brahmasari (2004) suggests that corporate culture is an application or internal culture towards corporation or company. Both terms is often used to address the same purpose respectively. Brahmasari (2004) explains that internal culture as a concept can be a medium of measuring the appropriateness of the organization's goal, strategy and work organization as well as its resulting impact. Without a valid and reliable measurement of the critical aspect of corporate culture, the statement of cultural impact towards working performance will always be based on speculation, personal observation, and case study. Koesmono (2005) suggests that organizational culture is frequently described in the sense of collective belonging. Patterns of belief, symbols, rituals, and myths which develop from time to time serve as adhesive which unites organization. Koesmono (2005: 9) states that culture can be defined as any interactions of habit characteristics which influence groups of

people in their environment. Tika (2006) explains about 3 (three) strong points (power) to defend an organizational culture, as follows: (1) Selection Practice; It aims to identify and employ individuals who have knowledge, skill, and capability to work successfully in an organization; (2) Top Management; The action of top management has big impact towards organizational culture. Their words and behavior in performing norms are very influential towards the organization's members. (3) Socialization; It aims to condition that new employees to be adaptable with organizational culture. The process of socialization consists of three stages, i.e. arrival stage, meeting stage and metamorphosis stage.

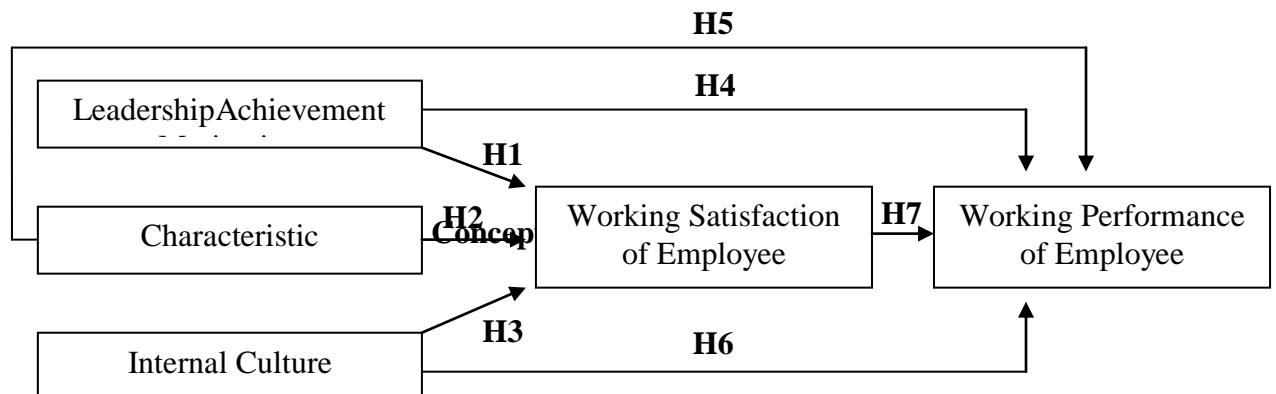
Job Satisfaction and Working Performance

Work satisfaction is individual orientation which is influential towards the role of working and the characteristic of work. Davis (1996) defines that working satisfaction is an emotional state, either being excited or non-excited, of how employees perceive their job. Working satisfaction is the feeling reflection of someone to his/her work. Meanwhile, Robin (1996) defines working satisfaction as a general attitude of an individual towards his/her work. Individuals join a company with their set of willingness, need, and passion which create working expectation. Working satisfaction signifies harmony in someone's working expectation emerging through his/her job, as set of feeling so that, in this case, working satisfaction is dynamic. Davis (1996) argue that working satisfaction is a 'like and dislike' condition in the perspective of employees towards their work. Dole and Schroeder (2001) state that working satisfaction is defined as feeling and individual reaction to the working environment. Koesmono (2005) maintain that working satisfaction is expression of happiness or positive emotional statement of employees as a result of their evaluation of certain task or working experiences. Additionally, Koesmono (2005) suggests that working satisfaction is evaluation, feeling or attitude of someone towards his/her work and is related to working environment, types of work, compensation, relationship with job partner, social relationship in workplace and etc. It can, therefore, be said that working satisfaction is the fulfillment of some wishes and necessities through working activities.

Working Performance

Every human has potential to do various activities. The ability of doing activities or taking actions can be naturally derived from birth or from learning activities. Although human has potential to behave in certain way but it is only actualized in certain moments or occasions. The potential of taking action is called ability, while the expression of this potential is called *performance*. Hasibuan (1996) state that working performance is work result achieved by someone in performing the given tasks based on skill, experience, and seriousness as well as time. In other words, working performance is work result achieved by someone in performing tasks given to him/her based on certain criteria. Furthermore, As'ad (1996) proposes that someone's working performance is the measurement of how successful someone is in doing his/her work duties. There are 3 (three) main factors which are influential to working performances, those are individual (capability of working), working effort (eagerness of working), and organizational support (chance of working). Thoyib (2005) suggest that working performance is what has been resulted by employees individually and is influenced by organizational development, compensation plan, communication system, managerial style, organization structure, policies and procedures. Thoyib (2005) argues mentions that another term for working performance is human output which can be measured by productivity, attendance, turnover, citizenship and satisfaction. Meanwhile, Thoyib (2005) suggests that working performance of individual is also called job performance, work outcomes, and task performance. Brahmasari (2004) states that working performance is achievement on organizational goals which can be in form of quantitative or qualitative output, creativity, flexibility, accountability, or other things demanded by the organization. Emphasis on work can be in short or long term and can also be in the level of individual, group or organization. Working management is a process designed to connect organizational goal and individual goal so that both can be matched. Working performance can be in form of action or task performance having been completed by someone in certain period of time and it is measurable.

Based on the review of the above literature, the model development of this research is as follows



From the above explanation and theoretical conceptual frame, it can be formulated a hypothesis as follows:

- H1 : Achievement motivation has significant effect towards employee's working satisfaction
- H2 : Characteristic Leadership has significant effect towards employee's working satisfaction
- H3 : Internal Culture has significant effect towards employee's working satisfaction
- H4 : Achievement motivation has significant effect towards employee's working performance
- H5 : Characteristic Leadership has significant effect towards employee's working performance
- H6 : Internal Culture has significant effect towards employee's working performance
- H7 : Working Satisfaction has significant effect towards employee's working performance

RESEARCH DESIGN

This research is an explanatory research which is done to prove the causal relationship between the free variable (exogenous variable), i.e. achievement motivation variable, characteristic leadership variable, and internal culture variable; endogenous variable, i.e. working performance variable and working satisfaction as mediation variable (Yasa, 2016) It is also a correlational research, which is a research trying to find out whether there is correlation between two or more variables and to what extent the correlation is and how the tendency of the correlation is.

Population is a group of individual or the research object which has determined qualities or characteristics and be differentiative from other groups or objects of research. Based on the quality and characteristic, population can be perceived as a group of individual or the object of observation which minimally has one equality of characteristic (Cooper and Emory, 1995). Therefore, from this population, it is taken the sample which is expected to represent the the population. Sample is a part of the population which has the same (common) characteristic as the population.

The population of the research is 281 employees of PT. Pura Barutama. The sampling method used in the research is stratified random sampling (Nur Indriantoro, 1999). This type of sampling method is a method of determining sample/respondent randomly in which information is received by using certain balancing strata in accordance with the aims or problems of the research which is meant to elevate the level of the representativeness of the sample. The sample is 105 employees

Achievement motivation is condition which is effective to motivate, direct and maintain behavior related to working environment (Mangkunegara, 2005). The variable of achievement motivation is operationally measured by using 3 (three) indicators, those are need for achievement, psychological need, and safety need.

Characteristic leadership is process of influencing someone else towards the organization goal based on someone's character (Tika, 2006: 63). The variable of characteristic leadership operationally measured by 4 (four) indicators, adopted from theory of situational leadership as suggested by Robins (1996), those are: (1) Telling (ability of telling organizational members about what they must do), 2.) Selling (ability of selling/extending ideas to the members), 3.) Participating (ability of participating with the members), and 4.) Delegating (ability of delegating toward the members).

Internal Culture is a pattern of basic assumption which is created, found and developed by certain group as learning process of solving problem of external adaptation and internal integration officially and well done and therefore it is taught/inherited to new members as a appropriate way to understand, think, and feel anything related to the problem (Tika, 2006).

Employee's working satisfaction is a general attitude (behavior) of an individual toward his/her job (Robbins, 2001). This variable of employee's working satisfaction is

operationally measured by 4 (four) indicators adopted from two factor theory (Mangkunegara, 2005), those are (1) compensation, (2) working condition, (3) administration system and corporate responsibility, and (4) opportunity to develop.

Working performance is a work result which can be quantitatively and qualitatively achieved by an employee in performing task in accordance with the responsibility given to him/her (Koesmono, 2005).

Type of research data is related to data source and selection method which is used to get the research data. Determining method of data collection is influenced by the type and source of the data needed for the research. Research data is basically classified into three types, i.e. subject data, physical data, and documentary data (Nur Indriantoro, 1999). The data used in this research is subject data, which are in form of opinion, attitude, experience or characteristics of someone or a group of people who serve as the research subject (respondent). Meanwhile, the primary data source, i.e. research data which are directly obtained from the data source specifically collected and are directly related to the researched problem by giving questionnaire to the respondents, i.e., in this case, the employees of PT. Pura Barutama.

A research covers data analysis and its interpretation which aims to answer the researcher's questions to reveal certain social phenomena. Data analysis is a process of simplifying data into the more readable and interpretable ones. The selected method of data analysis should be compatible with the pattern and variables of the research.

The model being used in this research is causality model or effect relationship. To examine the proposed hypothesis in the research, the technique of analysis used in the research is SEM or Structural Equation Modelling which is operated by program of AMOS. The research modeling by using SEM will enable a researcher to answer the research questions dimensionally (i.e. measuring what indicators of a concept are) and regressively (i.e. measuring the effect or level of correlation of the factors which is dimensionally identified).

After the evaluation on the assumptions of SEM is done, the further analysis is evaluation on the compatibility of the proposed model in the research by various criteria of *goodness of fit* which has been previously explained. To find out the level of adequate compatibility, the structural equation model in the research has been revised once. The

revision is done because in the compatibility examination of the first model which is in accordance with its criteria of goodness of fit is considered to be not yet adequate. The revision is done after the text output is analyzed on item of modification indices which shows the correlation between variables in the research. The correlation between variables will be shown by the decrease of *Chi-Square* value and the model fit is still below 0,90 (Hair *et. al.* 1998), but it is indicated that it gives influence of getting a good fitness model. Next, the researcher correlates the endogenous variable error of characteristic leadership with the endogenous variable error of working satisfaction (this justification can be seen in Hair *et. al.* 1998, Chapter 11). The result of model revision brings about a good level of model compatibility. Table 1 shows the stages of the model revision with the value of each *goodness of fit* index.

Table 1. Stage of Model Revision

Model	Goodness of Fit Index						
	Chi-Square	Prob.	CMIN/DF	GFI	AGFI	TLI	RMSEA
Initial	197,376	0,003	1,361	0,836	0,785	0,923	0,059
Revision	94,434	0,995	0,710	0,917	0,882	1,062	0,000

Source: Analysis result with Amos

For the criteria evaluation of *goodness of fit index*, Table 2 presents the comparison of criteria of *goodness of fit* index.

Table 2. Criteria Evaluation of *Goodness of Fit*

Criteria	Critical Value	Research Model	Model Evaluation
x^2 (<i>Chi-Square</i>)	Expected to be small	94,434	
Probability	$\geq 0,05$	0,995	Good
RMSEA	$\geq 0,08$	0,000	Good
GFI	$\geq 0,90$	0,917	Good
AGFI	$\geq 0,90$	0,882	Good Enough
CMIN/DF	$\geq 2,00$	0,710	GOOD
TLI	$\geq 0,95$	1,062	Good

Source: SEM in Research Management (Ferdinand, 2000)

From Table 2, it can be seen that all the models show their compatibility at good level. Therefore, it can be stated that the examination (test) of the research model proves a good confirmation on the causality correlation between variables.

The proposed hypothesis testing is done by analyzing *regression weights* on each exogenous construct towards its endogenous construct by seeing the value of C.R identical with t-test in the result of processing with critical value of $\pm 1,96$ at the significance level of 0,05 (5%). Table 3 presents the value of regression coefficient and the t-test.

Table 3. *Regression Weights*

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Satisfaction	<---	Internal Culture	.029	.064	.450	.653	par_13
Satisfaction	<---	Characteristic Leadership	.078	.080	.974	.330	par_16
Satisfaction	<---	Achievement Motivation	.148	.061	2.435	.015	par_17
Kinerja	<---	Satisfaction	.445	.174	2.558	.011	par_12
Kinerja	<---	Internal Culture	.213	.079	2.706	.007	par_14
Kinerja	<---	Characteristic Leadership	.405	.110	3.694	***	par_18
Kinerja	<---	Achievement Motivation	.285	.075	3.790	***	par_21

Source: Analysis result with Amos

Table 4 shows the magnitude of the direct effect between independent variables and the dependent variable based on the results of the analysis with the estimated values of the parameters of direct effect.

Table 4. The Estimation Result of the Parameter of Direct Effect between Variables Based on SEM Model

No.	Influencing Variables	Influenced Variables	Value of Estimation	T-Test /C.R	P (2 tail)
1	Achievement Motivation (X ₁)	Satisfaction (Y ₁)	0,148	2,435	0,015
		Working Performace (Y ₂)	.0,285	3,790	0,000
2	Characteristic Leadership (X ₂)	Satisfaction (Y ₁)	0,078	0,974	0,330
		Working Performace (Y ₂)	0,445	3,694	0,000
3	Internal Culture (X ₃)	Satisfaction (Y ₁)	0,029	0,450	0,653
		Working Performace (Y ₂)	0,213	2,706	0,007
4	Satisfaction (Y ₁)	Working Performace (Y ₂)	0,445	2,558	0,011

Source: Analysis result.

Referring to the test result of the last stage towards the whole models, it can be written the equation of mathematic model in form of *Structural Equation Model* (SEM) as follows:

$$Y_1 = 0,148 X_1 + 0,078 X_2 + 0,029 X_3 + \zeta_1 \quad R^2 = 0,100 \quad (1)$$

$$Y_2 = 0,285 X_1 + 0,445 X_2 + 0,213 X_3 + 0,445 Y_1 + \zeta_1 \quad R^2 = 0,5901 \quad (2)$$

The value of *square multiple correlation* in statistics is known as R, can be explained as follows:

- 1) The value of *square multiple correlation* in the first equation is 0,100. The value indicates that 10% of the variation of the value of working satisfaction is determined by the value variation of achievement motivation, characteristic leadership and internal culture.
- 2) The value of *square multiple correlation* in the second equation is 0,591. The value indicates that 59,1% of the variation of the value of working performance is determined by the value variation of achievement motivation, characteristic leadership, internal culture and working satisfaction.

Based on the used research model, this effect analysis shows that there are two variables which do not give influence (effect) to each other, i.e. internal culture towards satisfaction and characteristic leadership towards satisfaction. The direct and indirect effect can be seen in the following table.

Table 5
Result of Hypothesis Testing (Direct Effect)

	Hypothesis	Conclusion
H1	Achievement motivation has significant effect towards employee's working satisfaction.	accepted
H2	Characteristic leadership has significant effect towards employee's working satisfaction	rejected (not accepted)
H3	Internal culture has significant effect towards employee's working satisfaction	rejected (not accepted)
H4	Achievement motivation has significant effect towards employee's working performance	accepted
H5	Characteristic leadership has significant effect towards employee's working performance	accepted
H6	Internal culture has significant effect towards employee's working performance	accepted
H7	Working satisfaction has significant effect towards employee's working performance	accepted

Source: Analysis result with Amos

Discussion of Hypothesis Testing Result

The research model brings about seven hypothesis testing in which there are two alternative hypotheses that are not accepted, i.e. hypothesis H2 and H3, while the alternative hypothesis of H1, H4, H5, H6 and H7 is accepted. The following is the discussion of the result of hypothesis testing and the effect (influence) analysis.

Table 6. Direct and Indirect Effect

Direct Effect					
	Achievement Motivation	Characteristic Leadership	Internal Culture	Satisfaction	Performance
Satisfaction	.029	.078	.148	.000	.000
Performance	.213	.405	.285	.445	.000
Indirect Effect					
	Achievement Motivation	Characteristic Leadership	Internal Culture	Satisfaction	Performance
Satisfaction	.000	.000	.000	.000	.000
Performance	.013	.035	.066	.000	.000

Source: Analysis result with Amos

The result of recapitulation of the indirect effect is shown in the following table.

Table 7. Result of Hypothesis Testing (Indirect Effect)

Hypothesis		Conclusion
a	Internal culture gives positive and significant effect towards the working performance through working satisfaction	Not significant
b	Characteristic leadership gives positive and significant effect towards the working performance through working satisfaction	Not significant
c	Internal culture gives positive and significant effect towards the working performance of division through working satisfaction	Not significant

Source: Analysis result.

Result And Discussion

The Effect of Achievement Motivation towards the Employee's Working Satisfaction

The research result proves that achievement motivation gives positive and significant effect towards the employee's working satisfaction, which means achievement motivation is really needed by an employee to reach a high working satisfaction though working satisfaction, itself, is characteristically very relative or it is different from each other among the employees. However, it is found that all of the respondents state that during working in their company they say that they feel satisfied on the achievement motivation given by the company's management to them.

The Effect of Characteristic Leadership towards the Employee's Working Satisfaction

The research result reveals that characteristic leadership gives negative and significant effect towards the employee's working satisfaction, which means that the performance of the managerial activities of characteristic leadership has not always necessarily given positive impact towards the organization. It is because the more performance of the managerial activities of leadership is done, the more decrease on corporate working performance is found from time to time. The implementation of characteristic leadership activities which is more towards pressing employees may drive an employee to reach work satisfaction, but it does not always necessarily give positive effect towards the development of the subordinates' personality to sincerely work to reach the organizational goals.

The Effect of Internal Culture towards the Employee's Working Satisfaction

The research result proves that internal culture gives positive and significant effect towards the employee's working satisfaction, which means internal culture is a concept that can be used as media to measure the compatibility of organization's goals, strategy and task organization as well as the resulting impact because without a valid and reliable measurement of the critical aspect of organizational culture, the statement about the cultural impact toward the employee's working satisfaction and the corporate working

performance will continuously be based on speculation, personal observation, personal observation, and case study (Brahmasari, 2004).

The research result supports the research done by Koesmono (2005) who explains that organizational culture gives effect towards working satisfaction as shown by the path coefficient = 2.078 and $p(0,000) < \alpha(0,05)$ which means internal culture positively and linearly gives effect towards the working satisfaction.

The Effect of Achievement Motivation towards the Employee's Working Performance

The research result proves that achievement motivation gives positive and significant effect towards the employee's working performance. It means that achievement motivation gives positive and significant effect towards the work satisfaction which in turn influences the employee's working performance. It can happen this way because the employees feel satisfied of being fulfilled their need by the management so that they can work optimally. The fact that the employees do not yet work optimally is caused by the superior, for example, related to overtime work: an employee who has been satisfied to the management of the fulfilled need will feel that he/she has to work professionally, which means that if there is a certain duty attached to him/her which is not yet completed up to the end of the working time and he/she can do it on that day, he/she intends to finish the duty with dedication and loyalty for the work without considering working overtime. However, the management determines that based on the provisions the employee is not allowed to do that, as a consequence, the duty will be done by the employee on the next day. It is one of the considerations and reasons to say that achievement motivation gives significant effect towards the working experience and working performance of employees.

The Effect of Characteristic Leadership towards the Employee's Working Performance

The research result proves that characteristic leadership gives positive and significant effect towards the employee's working performance. It means that a characteristic leadership is an effort to persuade people through process of communication to reach the organizational goal which is expected to trigger positive change, i.e. in form of

dynamic activities which can coordinate organization in order to reach the goal. If is applied in accordance with the corridor developed by both parties according to their own job.

The Effect of Internal Culture towards the Employee's Working Performance

The research result shows that internal culture has a positive and significant effect towards the employee's working performance. It means that internal culture is as result of typical interaction of internal behavior which influences groups of people in the organization's environment to form all subjective perception about organization based on the factors of risk tolerance, team pressure, and people's support. All the perception will be a culture or organization's personality which is able to support and influence the employee's working satisfaction and organization's working performance as well as to give stronger effect towards the internal culture.

The Effect of Working Satisfaction towards the Employee's Working Performance

The research result explains that the employee's working satisfaction gives positive and significant effect towards the employee's working performance, which means that the high level of employee's working satisfaction will generally improve the working performance. The research result endorses the research done by Koesmono (2005), which can be concluded that working satisfaction gives effect significantly and positively towards the working performance.

Conclusions

Based on the data analysis, the conclusions of the research are as follows:

1. Achievement motivation gives significant effect towards working satisfaction. It is accepted since the analysis shows that the C.R is 2,435, which exceeds the critical value of $\pm 1,96$ and significance level (0,015;p<0,05), there is strong direct effect (0,148). Meanwhile, it is not accepted that characteristic leadership gives effect towards working satisfaction because the C.R is 0,974, which does not exceed the critical value of $\pm 1,96$ and significance level (0,330;p>0,05) and the direct effect is not strong enough (0,078). It is also rejected that internal culture has positive effect

towards working satisfaction since the C. R is 0,450, which does not exceed the critical value of $\pm 1,96$ and level of significance ($0,653;p>0,05$), and the direct effect is not strong (0,029).

2. Achievement motivation gives positive effect towards working performance. It is accepted because the C.R is 3,790, which does not exceed the critical value of $\pm 1,96$ and significance level ($0,000;p<0,05$), there is strong direct effect (0,013). It is also accepted that characteristic leadership gives effect towards working performance since the C.R is 3,694 which exceeds the critical value of $\pm 1,96$ and significance level ($0,000;p<0,05$), there is strong direct effect (0,445) while the indirect effect is not strong enough, i.e. 0,035. It is accepted that internal culture gives positive effect towards working performance because the C.R is 0,213 which exceeds the critical value of $\pm 1,96$ and significance level ($0,007;p<0,05$), there is strong direct effect (0,213), while the indirect effect is not strong, i.e. 0,066. Working satisfaction gives positive effect towards working performance; it is accepted because the C.R is 0,445 which exceeds the critical value of $\pm 1,96$ and significance level ($0,011;p<0,05$).

Related to the research, there are some recommendations, as follows:

1. Referring to the research result, it is found that most of the respondents do not want to move to other division, while a few of them state their eagerness to move to other division. It needs further consideration and attention to improve the working environment and organizational commitment.
2. There needs to be better arrangement of placing employees in the PT. Pura Barutama. The research result shows that there are a few employees who feel they are not compatible in their current position. The placement of employee should be fitted with the talent, interest and capability of the concerned employee. This needs to be overcome in order that every employee can work better and the organizational goals can be achieved.

The research has a shortcoming, i.e. the sample of the research is taken from the employees PT. Pura Barutama so that it cannot be generalized for other company. If the research is done to other objects, it may have different result.

The variable and model used in this research is still limited, further researches, therefore, can include other variables.

References

- As'ad, Moh. 1996. *Psikologi Industri* (Edisi Keempat, Cetakan Kedua), Yogyakarta: Liberty.
- Beach, Lee Roy, 1993, *Making The Right Decision Organizational Culture, Vision and Planning*. United States of America : Prentice-Hall Inc.
- Brahmasari Ida Ayu, 2004. Pengaruh Variabel Budaya Perusahaan terhadap Komitmen Karyawan dan Kinerja Perusahaan Kelompok Penerbitan Pers Jawa Pos, *Disertasi* Universitas Airlangga, Surabaya.
- Cooper, DR., C.W. Emory, 1995. *Business Research Methods* ; Richard D. Irwin Inc
- Dole, Carol and Schroeder, Richard G., 2001, The Impact of Varios Factors on the Personality, Job Satisfaction and Turn Over Intentions of Profesional Accountants. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 16 No.4 pp 234-245
- Effendi, Onong Uchjana. 1992. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Ermayanti Dwi, Thoyib Armanu, 2001. Pengaruh Faktor Motivasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Kantor Perum Perhutani Unit II Surabaya, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*.
- Ferdinand, Augusty, 2002, *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: BP UNDIP.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1997. *Organizations (Terjemahan)*, Cetakan Keempat, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Hair, J.F.Jr; R.E. Anderson, RL. Tatham dan W.C. Black, 1998, *Multivariate Data Analysis With Readings*, Englewoods Cliffs, NJ : Prentice Hall Inc.
- Hasibuan, M.S.P. 1996. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produk*, Bumi Aksara, Jakarta
- Koesmono H. Teman, 2005. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja serta Kinerja Karyawan pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Ekspor di Jawa Timur, *Disertasi* Universitas Airlangga, Surabaya.
- Luthans, Fred, 1998, *Organizational Behavior*, Sixth Edition, Singapore: McGraw Hill Book Co.
- Magdalena Iodarche, Eleonara Gabriela, 2011, Leadership Importance and role in the public sector- features in the contemporary context, *Journal of challengers of the knowledge sosiety economy*, pp 1361-1369
- Mangkunegara Anwar Prabu, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan Keenam, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mangkunegara, A. P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Cetakan Ketiga). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Mc Kenna, Eugene and Beech, Nic, 1995, *The Essence of Human Resources Management*, Prentice Hall International (UK) Limited Printed and Bound in Great Britain by Tj Press, Padstow, Cornwall.
- Nimran Umar, 2004. *Perilaku Organisasi*, Cetakan Ketiga, Citra Media, Surabaya.
- Nur Indriantoro, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis ,Untuk Akuntansi dan Manajemen*. “ BPFE, Yogyakarta
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Analisis Kinerja Organisasi*. Bandung: Rineka Cipta.
- Robbins, Stephen P., 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep-Kontroversi-Aplikaso*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, Prenhalindo.
- Robbins Stephen P., 2001. *Organizational Behavior (Terjemahan) Jilid 1*, Edisi Kedelapan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Robbins Stephen P., 2002. *Essentials of Organizational Behavior (Terjemahan)*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Siagian Sondang P., 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.
- Susilo, Willy. 2002. *Audit Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Vorqistatama Binamega.
- Thoyib Armanu, 2005. Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi dan Kinerja: Pendekatan Konsep, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*.
- Tika H. Moh. Pabundu, 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Cetakan Pertama, Bhumi Aksara, Jakarta.
- Werther, William B Davis Keth, 1996, *Human Resource and Personal Management, Fifth Edition*. Printed in The United States of America : McGraw Hill, Inc.
- Yasa I Gede Adi, 2006. Pengaruh Karakteristik Manajemen Karier terhadap Komitmen Karyawan dan Dampaknya pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Adi Bharata Asty Denpasar, *Tesis Universitas 17 Agustus Surabaya*.

PENGARUH *JOB STRESS* TERHADAP LOYALITAS DAN KINERJA PADA PT. ADIRA FINANCE MEDAN

Kholilul Kholik

Surel: kholilulkholik@dosen.pancabudi.ac.id
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

ABSTRAK

Job stress merupakan masalah yang menjadi perspektif yang menarik bersama. Peningkatan tantangan dan persaingan yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stressor individu, stressor kelompok, stressor organisasi terhadap loyalitas kerja dan kinerja karyawan. Adapun permasalahannya adalah apakah stressor individu, stressor kelompok dan stressor organisasi berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan dan apakah loyalitas kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk menguji hipotesis penelitian karyawan PT. Adira Finance medan diminta untuk menjawab kuesioner tentang bagaimana tanggapan mereka tentang stressor individu, stressor kelompok, stressor organisasi, loyalitas kerja dan kinerja dengan menggunakan sampel sebanyak 77 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Program SPSS Versi 1.6. Hasil analisis regresi dari hipotesis pertama adalah $Y = -1,760 - 0,441 X_1 - 0,283 X_2 - 0,283 X_3 + \epsilon$. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa stressor individu, stressor kelompok dan stressor organisasi berpengaruh terhadap loyalitas kerja dan untuk hipotesis kedua loyalitas kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Kata Kunci: *Job Stress, Loyalitas, Kinerja*

Pendahuluan

Persaingan dan tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi menimbulkan banyaknya yang harus dihadapi karyawan dalam lingkungan kerja selain tekanan yang berasal dari lingkungan kerja lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat potensial menimbulkan kecemasan. Dampak yang sangat merugikan dari adanya gangguan kecemasan yang sering dialami oleh masyarakat dan karyawan khususnya disebut stres.

Menurut Murray dan Forbes dalam Setyono et.al (2007), stress lebih disebabkan oleh meningkatnya tuntutan akan manajemen partisipatori, sistem yang komputervis, dan meningkatnya ketidakpastian. Pada sisi lain seorang pimpinan atau manager dituntut untuk dapat bekerja dan mengelola organisasi di bawah tekanan. Dari waktu ke waktu stress karyawan akan menjadi masalah yang serius bagi organisasi. Muatan tugas yang begitu besar cenderung merupakan penyebab stress yang dominan karena karyawan harus bekerja

lebih banyak dengan kemampuan yang dimiliki. Pada tahapan selanjutnya, stress akan berpengaruh terhadap kinerja.

Menurut Robbins dalam Setyono et.al (2007), menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara stress dengan kinerja. Pada tahapan tertentu stress akan meningkatkan kinerja karyawan, namun dengan semakin tinggi tingkatan stress akan berdampak pada menurunnya kinerja karyawan. Lebih lanjut, Robbins dalam Setyono et.al (2007), mengindikasikan terdapat gejala yang ditimbulkan dengan adanya stress, yaitu gejala *physiological*, *psycological*, dan *behavior*.

Gejala *physiological* dapat dilihat dengan adanya dampak langsung berupa perubahan kesehatan dari orang yang menderita stress. Perubahan yang terjadi misalnya perubahan metabolisme tubuh, meningkatnya tekanan darah, meningkatnya detak jantung, keluhan sakit kepala, dan berdampak pada serangan jantung. Gejala *psycological* muncul dengan adanya ketidakpuasan, ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. Gejala ketiga yang disebabkan oleh stress adalah pada perilaku karyawan. Indikasinya antara lain menurunnya produktivitas, meningkatnya absensi, perputaran tenaga kerja semakin tinggi.

Menurut Istijanto (2006:05) komitmen karyawan terhadap perusahaan ditunjukkan melalui kesetiaan dan loyalitas. Seorang karyawan yang memiliki sikap loyalitas, apapun yang didapat ia akan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Steers & Porter dalam Martiwi (2012: 45) loyalitas kerja karyawan mempunyai beberapa faktor yaitu: karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan, karakteristik desain perusahaan, serta pengalaman yang diperoleh dalam perusahaan. Selain faktor karakteristik individu terdapat juga faktor dari lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi loyalitas kerja.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan, PT. Adira Finance dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada konsumen yang mengajukan permohonan pembiayaan keuangan. Namun pelayanan yang mudah dan cepat saja tidaklah cukup untuk memenangkan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Semakin ketatnya persaingan tersebut memunculkan tuntutan peran masing-masing karyawan PT. Adira Finance baik sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi/ perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil sebuah judul penelitian tentang ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Job Stress* dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada PT. Adira Finance Medan”.

Kajian Pustaka

Job Stress

Secara formal, stress didefinisikan sebagai suatu respons adaptif, dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologis individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis dan atau fisik khusus pada seseorang (Ivancevich dan Matteson dalam Setyono *et.al*, 2007).

Definisi lain tentang stress dikemukakan oleh Schuler dan Kahn dan Byosiere dalam Setyono *et.al*, (2007), bahwa stress adalah kondisi dinamik yang di dalamnya individu menghadapi peluang, kendala (*constraints*), atau tuntutan (*demands*) yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. Beehr dan Newman dalam Setyono.*et.al*, (2007), mengaktegorikan gejala stress kedalam beberapa aspek, yaitu (1) kecemasan dan ketegangan, (2) bingung, marah dan sensitif, (3) menunda atau menghindari pekerjaan, (4) prestasi dan produktivitas menurun, (5) meningkatnya frekuensi absensi, (6) meningkatnya agresifitas, (7) menurunnya kualitas hubungan interpersonal.

Penyebab Stres Kerja

Menurut Gibson dalam Susilawati (2013), penyebab dari terjadinya stres disebut stressor menyatakan bahwa ada empat faktor penyebab terjadinya stress, yaitu :

1. Stressor Lingkungan Fisik

Penyebab stres kerja dari lingkungan fisik berupa sinar, kebisingan, temperatur dan udara yang kotor.

2. Stressor Individu

Penyebab kerja dari individu terdiri dari:

- a. Konflik Peran
Stressor atau penyebab stres yang meningkat ketika seseorang menerima pesan-pesan yang tidak cocok berkenaan dengan perilaku peran yang sesuai. Misalnya adanya tekanan untuk bergaul dengan baik bersama orang-orang yang tidak cocok.
 - b. Peran Ganda
Untuk dapat bekerja dengan baik, para pekerja memerlukan informasi tertentu mengenai apakah mereka diharapkan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Peran ganda adalah tidak adanya pengertian dari seseorang tentang hak, hak khusus dan kewajiban-kewajiban dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
 - c. Beban Kerja Berlebihan
Ada dua tipe beban berlebih yaitu kuantitatif dan kualitatif. Memiliki terlalu banyak sesuatu untuk dikerjakan atau tidak cukup waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan beban berlebih yang bersifat kuantitatif. Beban berlebih kualitatif terjadi jika individu merasa tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka atau standar penampilan yang dituntut terlalu tinggi.
3. Stressor Kelompok
Keefektifan setiap organisasi dipengaruhi oleh sifat hubungan diantara kelompok. Karakteristik kelompok menjadi stresor yang kuat bagi beberapa individu. Ketidakpercayaan dari mitra pekerja secara positif berkaitan dengan peran ganda yang tinggi, yang membawa pada kesenjangan komunikasi diantara orang-orang dan kepuasan kerja yang rendah. Atau dengan kata lain adanya hubungan yang buruk dengan kawan, atasan, dan bawahan.
 4. Stressor Keorganisasian
Adanya desain struktur organisasi yang jelek, politik yang jelek dan tidak adanya kebijakan khusus.

Loyalitas Karyawan

Dalam melaksanakan kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas dari loyalitas dan sikap kerja, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan selalu melaksanakan

pekerjaan dengan baik. Karyawan merasakan adanya kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Utomo dalam Tommy *dkk.*, (2010), Loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan seseorang terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa kesetiaan fisik semata, namun lebih pada kesetiaan non fisik seperti pikiran dan perhatian. Loyalitas para karyawan dalam suatu organisasi itu mutlak diperlukan demi kesuksesan organisasi itu sendiri. Menurut Reichheld, semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi. Begitu pula sebaliknya, bagi organisasi yang loyalitas para karyawannya rendah, maka semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pemilik organisasi.

Loyalitas berasal dari kata loyal yang berarti setia. Loyalitas dalam organisasi dapat diartikan sebagai kesetiaan seorang karyawan terhadap organisasi. Menurut Sudimin (2003), loyalitas berarti Kesediaan karyawan dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran, dan waktu untuk ikut serta mencapai tujuan organisasi dan menyimpan rahasia organisasi serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi selama orang itu masih berstatus sebagai karyawan. Sedangkan loyal menurut Siagian (2005), Suatu kecenderungan karyawan untuk tidak pindah ke perusahaan lain.

Menurut Robbins (2003), Loyalitas adalah keinginan untuk memproteksi dan menyelamatkan wajah bagi orang lain. Fletcher merumuskan loyalitas sebagai kesetiaan kepada seseorang dengan tidak meninggalkan, membelot atau tidak mengkhianati yang lain pada waktu diperlukan.

Menurut Hasibuan (2011), Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Meyer dan Herscovits, loyalitas merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan dan perusahaannya.

Kinerja Karyawan

Menurut Rivai & Basri dalam Harsuko (2011), kinerja apabila dikaitkan dengan *performance* sebagai kata benda (*noun*), maka pengertian *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Sementara itu menurut Bernandi & Russell dalam Riani (2011), performansi adalah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu.

Menurut Sinambela dkk (2012), mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.

Menurut Gomes dalam Ratnasari (2013:44) prestasi kerja karyawan adalah ungkapan seperti output, efisien serta efektifitas yang sering di hubungan dengan produktivitas.

Kinerja perorangan dengan kinerja lembaga atau kinerja organisasi terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. Kinerja seorang karyawan akan baik bila ia mempunyai keahlian yang tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan masa depan lebih baik.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi untuk menilai kinerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dalam upaya memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap karyawan seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan.

Menurut Siagian dalam Ratnasari (2013:90), ada lima alasan kuat untuk menetapkan standar prestasi kerja yaitu :

1. Standar prestasi kerja merupakan tolak ukur yang di gunakan oleh atasan pekerjaan yang bersangkutan.
2. Standar prestasi kerja merupakan alat pengendali perilaku para pekerja, khususnya dalam hal terjadinya kesenjangan antara prestasi nyata dan standar yang telah di tetapkan sebelumnya.

3. Standar prestasi kerja berguna sebagai bahan umpan balik bagi pekerjaan yang bersangkutan karena setiap pekerja memang berhak mengetahui penilaian atasan terhadap prestasinya.
4. Standar prestasi kerja merupakan sasaran yang harus di usahakan pencapaian oleh setiap pekerja.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan bagian integral dari proses penilaian yang meliputi penerapan sasaran kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, adanya pengarahan dan dukungan atasan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja yang harus di capai dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja karyawan perseorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan.

Kerangka Konseptual

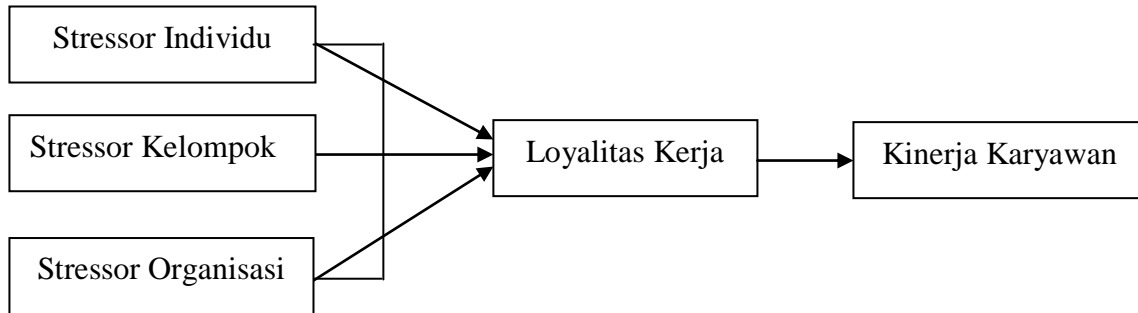
Menurut Robbins (2008:376) stres dapat menyebabkan karyawan tidak loya terhadap pekerjaannya, stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat mengakibatkan ketidakloyalan terkait dengan pekerjaannya. Sejalan dengan pendapat Robbins, Hariandja (2002:303) berpendapat bahwa stres menjadi masalah yang penting karena situasi itu dapat mempengaruhi loyalitas kerja, sehingga perlu penanganan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

Stres kerja dan loyalitas kerja saling berhubungan seperti yang dikemukakan Robbins, bahwa salah satu dampak stres secara psikologis dapat menurunkan loyalitas kerja karyawan. Stres yang dikaitkan dengan pekerjaan menimbulkan ketidak loyalan yang berkaitan dengan pekerjaan dan memang itulah efek psikologis yang paling sederhana dan paling jelas dari stres kerja terhadap loyalitas kerja.

Menurut Fathoni (2006:122) loyalitas adalah usaha karyawan dalam membela perusahaan, dengan ikut menunjukkan bahwa karyawan tersebut berperan aktif terhadap perusahaannya. Sedangkan, menurut Priansa (2014: 269) kinerja merupakan tingkat keberhasilan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keterkaitan loyalitas dengan kinerja karyawan menurut Tohardi (2002) kinerja dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu

kepemimpinan, motivasi, prestasi kerja, loyalitas atau kesetiaan, lingkungan kerja dan kedisiplinan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan stressor individu, stressor kelompok dan stressor organisasi terhadap loyalitas kerja pada PT. Adira Finance Medan.
2. Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial loyalitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Adira Finance Medan.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2013:14), penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya yang ada di lapangan.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Angket Data	Pengukuran
1	Stressor Individu (X1)	Stressor individu adalah tekanan atau ketegangan yang dihadapi seseorang dan mempengaruhi emosi, pikiran, serta kondisi keseluruhan dari orang tersebut. (Wirawan, 2015)	a. Komplik peranan b. Beban kerja c. Pengembangan karir	Skala Likert	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Angket Data	Pengukuran
2	Stressor Kelompok (X ₂)	Stressor kelompok, dapat menjadi stressor yang kuat bagi beberapa individu. Ketidakpercayaan dari mitra pekerja secara positif berkaitan dengan peran ganda yang tinggi, yang mengakibatkan kesenjangan komunikasi dan kepuasan kerja yang rendah (Wirawan, 2015)	a. Hubungan dalam pekerjaan b. Tuntutan hubungan antar pribadi	Skala Likert	Ordinal
3.	Stressor Organisasi (X ₃)	Stressor organisasi, terjadi karena desain struktur organisasi dan politik yang jelek, serta tidak adanya kebijakan yang khusus.	a. Struktur Organisasi b. Kepemimpinan	Skala Likert	Ordinal
4	Loyalitas (Y ₁)	Loyalitas adalah usaha karyawan dalam membela perusahaan, dengan ikut menunjukkan bahwa karyawan tersebut berperan aktif terhadap perusahaannya Fathoni (2006:122)	a. Taat pada peraturan b. Tanggung jawab pada perusahaan c. Kemauan untuk bekerja sama d. Rasa memiliki terhadap perusahaan e. Hubungan antar pribadi f. Kesukaan terhadap pekerjaan	Skala Likert	Ordinal
5	Kinerja Karyawan (Y ₂)	Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan	a. Kuantitas pekerjaan b. Kualitas pekerjaan c. Ketepatan waktu d. Efektivitas e. Kemandirian	Skala Likert	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Angket Data	Pengukuran
		tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013:67)	f. Inisiatif		

Sumber : Penulis 2017

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Adira Finance yang berjumlah 77 orang karyawan.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlahnya lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2012: 107).

Berdasarkan teori di atas maka penulis menggunakan seluruh jumlah populasi yaitu 77 karyawan sebagai sampel penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 100.

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Validitas ini akan menghasilkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran (Umar, 2008). Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis atas pertanyaan, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir (Sugiyono dalam Rusiadi, Subiantoro, Hidayat, 2013).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada (Umar, 2008). Butir kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60 (Sunyoto, 2013).

Uji Asumsi Klasik:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011: 105).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas dengan kriteria (Ghozali, 2011 ; 139):

- 1) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti terjadi Heterokedastisitas.
- 2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti terjadi Homokedastisitas.

Metode Analisis Data

a. Metode Analisis Regresi Linier Berganda Pada Hipotesis Pertama

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh stressor individu, stressor kelompok dan stressor organisasi terhadap loyalitas kerja yang dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution (SPSS* versi 16.00) dengan persamaan (Susanti, 2010: 185) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Loyalitas Kerja (*Dependen Variable*)
X1 = Stressor Individu (*Independent Variable*)
X2 = Stressor Kelompok (*Independent Variable*)
X3 = Stressor Organisasi (*Independent Variable*)
a = Konstanta
b = Koefisien prediktor
 ϵ = Error term/ tingkat kesalahan

b. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*) bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dimaksud sebagai tuntunan dalam penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti adalah benar dan mencari jawaban sesungguhnya (Sugiyono, 2012).

1. Uji F

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel indenpenden terhadap variabel dependen (Santoso dalam Fridayani, 2012:56). Kriteria pengujiannya adalah :

- Terima Ho (tolak H_i), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig F > \alpha 5\%$
- Tolak Ho (terima H_i), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig F < \alpha 5\%$

2. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait dengan taraf signifikan 5%

(Kuncoro dalam Rusiadi, Subiantoro, Hidayat, 2013:279). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak (H_a diterima).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Santosa dan Ashari dalam Sari, 2017).

c. Metode Analisis Regresi Linier Sederhana Pada Hipotesis Kedua

Metode analisis regresi linier sederhana digunakan untuk perumusan masalah kedua dimana variabel penelitian ini terdiri dari variabel independent/loyalitas kerja (X) dan variabel dependent/kinerja karyawan (Y). Maka analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antara X dan Y adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Kinerja Karyawan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Regresi Linier Sederhana.

X = Loyalitas Kerja

ε = Variabel residual (error term) atau pengaruh variabel lain (epsilon)

Uji hipotesis menggunakan uji-t pada regresi linier sederhana dengan kriteria pengujian:

- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak (H_a diterima).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan (angket) yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid (Rusiadi, 2013).

Tabel 2. Uji Validitas (X_1) Stressor Individu

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Stressor Individu 1	15.55	9.514	.759	.	.687
Stressor Individu 2	15.70	11.265	.506	.	.751
Stressor Individu 3	15.66	12.069	.337	.	.783
Stressor Individu 4	15.55	9.514	.759	.	.687
Stressor Individu 5	16.36	10.024	.474	.	.760
Stressor Individu 6	16.44	9.566	.432	.	.784

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 2 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 6 (enam) butir pertanyaan pada variabel stressor individu dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 3 Uji Validitas (X_2) Stressor Kelompok

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Stressor Kelompok 1	15.43	22.090	.777	.656	.853
Stressor Kelompok 2	15.40	20.323	.771	.717	.852
Stressor Kelompok 3	14.96	25.538	.420	.289	.904
Stressor Kelompok 4	14.91	21.268	.779	.659	.851
Stressor Kelompok 5	14.84	22.686	.651	.550	.872
Stressor Kelompok 6	15.23	20.024	.798	.753	.847

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 3 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 6 (enam) butir pertanyaan pada variabel stressor kelompok dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4. Uji Validitas (X_3) Stressor Organisasi

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Stressor Organisasi 1	14.73	23.806	.486	.375	.884
Stressor Organisasi 2	14.74	20.353	.756	.649	.843
Stressor Organisasi 3	14.62	21.264	.673	.571	.857
Stressor Organisasi 4	15.06	18.719	.790	.740	.836
Stressor Organisasi 5	15.12	20.631	.684	.542	.855
Stressor Organisasi 6	15.01	21.145	.705	.571	.852

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 6 (enam) butir pertanyaan pada variabel stressor organisasi dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 5 Uji Validitas (Y) Loyalitas Kerja

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Loyalitas Kerja 1	13.96	17.196	.662	.458	.772
Loyalitas Kerja 2	14.10	18.410	.627	.569	.781
Loyalitas Kerja 3	14.09	16.400	.737	.640	.753
Loyalitas Kerja 4	14.52	18.674	.608	.421	.785
Loyalitas Kerja 5	14.08	19.704	.499	.278	.807
Loyalitas Kerja 6	13.40	22.033	.363	.183	.829

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 5 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 6 (enam) butir pertanyaan pada variabel loyalitas kerja dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6 Uji Reliabilitas Stressor Individu (X_1)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.777	.796	6

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 6 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,777 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 6 butir pernyataan pada variabel stressor individu adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 7 Uji Reliabilitas Stressor Kelompok (X_2)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.885	.882	6

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 7 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,885 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 6 butir pernyataan pada variabel stressor kelompok adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 8 Uji Reliabilitas Stressor Organisasi (X_3)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.877	.875	6

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 8 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,877 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 6 butir pernyataan pada variabel stressor organisasi adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 9. Uji Reliabilitas Loyalitas Kerja (Y)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.819	.812	6

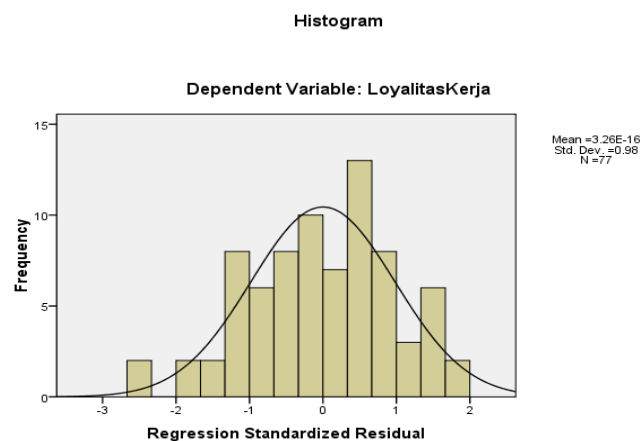
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 9 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,819 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 6 butir pernyataan pada variabel loyalitas kerja adalah reliabel atau dikatakan handal.

Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.

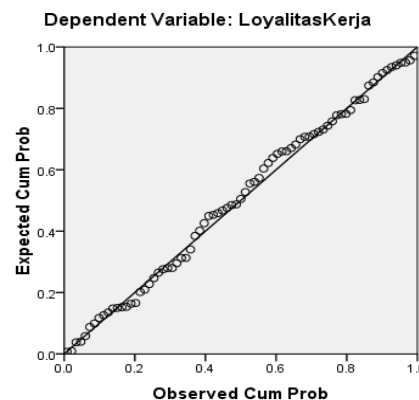


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 2 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 3 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel stressor individu, stressor kelompok, stressor organisasi dan loyalitas kerja berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Uji Multikolinieritas
 Coefficients^a

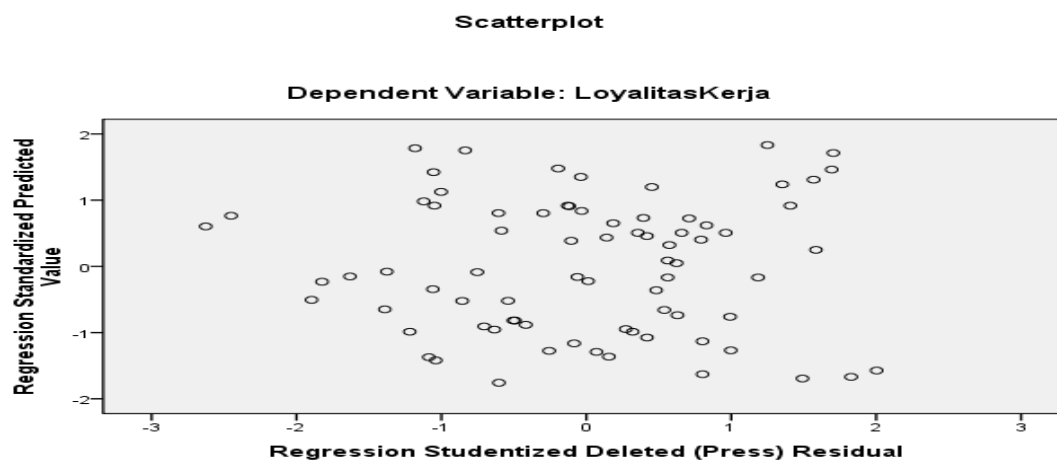
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.760	2.198		-.801	.426		
Stressor Individu	-.441	.154	.326	-2.871	.005	.437	2.290
Stressor Kelompok	-.283	.080	.309	-3.536	.001	.737	1.358
Stressor Organisasi	-.284	.118	.301	-2.400	.019	.358	2.792

a. Dependent Variable: LoyalitasKerja

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah stressor individu $2,290 < 10$, stressor kelompok $1,358 < 10$, stressor organisasi $2,792 < 10$ dan nilai *Tolerance* stressor individu $0,437 > 0,10$, stressor kelompok $0,737 > 0,10$, stressor organisasi $0,358 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

Pengujian Hipotesis Pertama

a. **Regresi Linier Berganda**

Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Tabel 11 Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.760	2.198		-.801	.426		
Stressor Individu	-.441	.154	.326	-2.871	.005	.437	2.290
Stressor Kelompok	-.283	.080	.309	-3.536	.001	.737	1.358
Stressor Organisasi	-.284	.118	.301	-2.400	.019	.358	2.792

a. Dependent Variable: LoyalitasKerja

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.

Berdasarkan tabel 11 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = -1,760 - 0,441 X_1 - 0,283 X_2 - 0,283 X_3 + \varepsilon$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai loyalitas kerja (Y) adalah sebesar -1,760.
- 2) Jika terjadi peningkatan stressor individu sebesar 1, maka loyalitas kerja (Y) akan menurun sebesar 0,441.
- 3) Jika terjadi peningkatan stressor kelompok sebesar 1, maka loyalitas kerja (Y) akan menurun sebesar 0,283.
- 4) Jika terjadi peningkatan stressor organisasi sebesar 1, maka loyalitas kerja (Y) akan menurun sebesar 0,284.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 12 Uji Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1166.132	3	388.711	34.917	.000 ^a
	Residual	812.673	73	11.133		
	Total	1978.805	76			

a. Predictors: (Constant), StressorOrganisasi, StressorKelompok, StressorIndividu

b. Dependent Variable: LoyalitasKerja

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 34,917 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,735. Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini stressor individu, stressor kelompok dan stressor organisasi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja. Maka hipotesis sebelumnya adalah terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

c. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 13. Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.760	2.198		-.801	.426		
Stressor Individu	-.441	.154	.326	-2.871	.005	.437	2.290
Stressor Kelompok	-.283	.080	.309	-3.536	.001	.737	1.358
Stressor Organisasi	-.284	.118	.301	-2.400	.019	.358	2.792

a. Dependent Variable: LoyalitasKerja

Berdasarkan tabel 1.13 diatas dapat dilihat bahwa:

1) Pengaruh stressor individu terhadap loyalitas kerja.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$

t_{hitung} sebesar -2,871 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,666 dan signifikan sebesar 0,005, sehingga $t_{hitung} -2,871 > t_{tabel} 1,666$ dan signifikan $0,005 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan stressor individu berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas kerja.

2) Pengaruh stressor kelompok terhadap loyalitas kerja.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$

t_{hitung} sebesar -3,536 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,666 dan signifikan sebesar 0,001, sehingga $t_{hitung} -3,536 > t_{tabel} 1,666$ dan signifikan $0,001 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan stressor kelompok berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas kerja.

3) Pengaruh stressor organisasi terhadap loyalitas kerja.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$

t_{hitung} sebesar -2,400 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,666 dan signifikan sebesar 0,019, sehingga $t_{hitung} -2,400 > t_{tabel} 1,666$ dan signifikan $0,019 < 0,05$, maka Ha diterima dan

H0 ditolak, yang menyatakan stressor organisasi berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas kerja

d. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 14 Koefisien Determinasi
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.572	3.337

a. Predictors: (Constant), StressorOrganisasi, StressorKelompok, StressorIndividu

b. Dependent Variable: LoyalitasKerja

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,572 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 57,2% loyalitas kerja dapat diperoleh dan dijelaskan oleh stressor individu, stressor kelompok, stressor organisasi. Sedangkan sisanya $100\% - 57,2\% = 42,8\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti gaya kepemimpinan, insentif, kualitas kehidupan kerja, dan lain-lain.

Hasil Regresi Linier Sederhana Pada Hipotesis Kedua

Metode analisis regresi linier sederhana digunakan untuk perumusan masalah kedua dimana variabel penelitian ini terdiri dari variabel *independent*/loyalitas kerja (Y1) dan variabel *dependent*/kinerja karyawan (Y2).

Tabel 15 Regresi Sederhana
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.570	1.709		3.258	.002		
	LoyalitasKerja	.904	.097	.732	9.293	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KinerjaKaryawan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan pada tabel 15 dapat dilihat bahwa loyalitas kerja pada t_{hitung} sebesar 9,293 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05 dengan nilai t tabel sebesar 1,666. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,293 > 1,666$) maka, H_0 di tolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa loyalitas kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel loyalitas kerja terhadap kinerja karyawan adalah positif. Kondisi ini mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai loyalitas karyawan maka mengakibatkan semakin tinggi kinerja karyawan tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Variabel Stressor Individu Terhadap Loyalitas Kerja

Stressor individu secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap loyalitas kerja. Hal ini dapat dilihat t_{hitung} sebesar -2,871 dan t_{tabel} sebesar 1,666 dan signifikan 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} -2,871 > t_{tabel} 1,666$ dan signifikan $0,005 < 0,05$ maka secara parsial stressor individu berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan. Koefisien menunjukkan hasil sebesar -0,441 artinya jika terjadi peningkatan stressor individu maka akan menurunkan loyalitas kerja karyawan.

Pengaruh Variabel Stressor Kelompok Terhadap Loyalitas Kerja

Stressor kelompok secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap loyalitas kerja. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis regresi. Tampak dari uji parsial dengan nilai signifikan = $0,001 > 0,05$ dan t_{hitung} sebesar -3,536 bernilai negatif. Berdasarkan analisis data tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat stressor kelompok yang dirasakan oleh karyawan maka akan menurunkan loyalitas kerja karyawan.

Pengaruh Variabel Stressor Organisasi Terhadap Loyalitas Kerja

Stressor organisasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap loyalitas kerja. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis regresi dengan nilai signifikan = $0,019 > 0,05$ dan t_{hitung} sebesar -2,400 bernilai negatif. Berdasarkan analisis data tersebut

menunjukkan bahwa semakin stress organisasi di suatu perusahaan maka akan memberikan pengaruh terhadap loyalitas kerja.

Pengaruh Variabel Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Loyalitas kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika loyalitas kerja semakin meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang bernilai t_{hitung} sebesar 9,293 > t_{tabel} sebesar 1,666 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Penutup

Dari hasil penelitian yang dilakukan telah menjawab masalah penelitian tersebut secara signifikan yang menghasilkan dua proses dasar untuk meningkatkan loyalitas kerja dan kinerja PT. Adira Finance Medan, yaitu:

1. Menyediakan pelatihan manajemen stress dan program pendampingan karyawan (*Employee Assistance Program / EAP*) untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengatasi situasi kerja yang sulit. Dalam program manajemen stress diajarkan pada karyawan tentang sumber stress yang berasal dari organisasi dan keterampilan individu untuk mengurangi stress, manajemen waktu dan relaksasi.
2. Perusahaan mengurangi sumber stress dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan memberikan tanggung jawab kepada pegawainya yang sesuai dengan pekerjaannya dan melakukan kegiatan rekreasi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Tohardi, (2002), *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung
- Fathoni, Abdurrahmat, (2006), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam, (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)* Semarang : Universitas Diponegoro. 12th edition. Jakarta :Salemba Empat.
- Hariandja, Marihot T.E, (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Harsuko, Riniwati. (2011). *Mendongkrak Motivasi dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM*. UB Press: Malang

- Hasibuan, Malayu S.P., (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Istijanto, (2006), *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Martiwi, Rukmi Tin dkk. (2012). *Faktor-Faktor Penentu Yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja Karyawan*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 13(1). Program Pascasarjana Magister Manajemen. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Priansa, Donni Junni (2014), *Perencanaan & Pengembangan SDM*, Penerbit Bandung: Alfabeta
- Riani, Asri Laksmi. (2011). *Budaya Organisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Robbins, Stephen P (2008) “*Perilaku Organisasi*” , PT. Indeks Gramedia , Jakarta.
- Robbins, Stephen P, (2003). *Perilaku Organisasi*, Jilid 2, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Rusiadi et al. (2013). *Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. Medan : USU Press.
- Sari, Tanti Nanda, (2017). *Motivasi Konsumen Dan Situasi Terhadap Perilaku Pembelian Petani Untuk Produk Benih Buah Dan Sayuran Organik Pada PT. Ashti Cabang Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Medan; Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Setyono, Agus, et.al (2007). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Job Stress Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Salesman (Studi Kasus Pada PT. Adira Finance Cabang Bangkong Semarang)*. Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Volume 4, Nomor 2, Juli, Tahun 2007, Halaman 70.
- Siagian, Sondang. P. (2005). *Manajemen Strategik*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Sinambela. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Stefanus, Tommy dkk. (2010). *Analisis Pemasaran dan Loyalitas Karyawan Bagian Pemasaran PT Palma Abadi Sentosa di Palangka Raya*. Volume 1, No. 2. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Universitas Kristen Petra.
- Sudimin, T, (2003). Whistleblowing: Dilema Loyalitas dan Tanggung Jawab Publik. Jurnal Manajemen dan Usahawan, vol. 12 no. 11. hlm. 3-8.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Susilawati, Endang, (2013). *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada PDAM Kabupaten Buton*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Makassar: Universitas Hasanuddin.

MOTIVASI DAN SITUASI TERHADAP PEMBELIAN BENIH PADA PT. SANG HYANG SERI MEDAN

Kholilul Kholik dan Renny Maisyarah

Surel:

kholilulkholik@dosen.pancabudi.ac.id
rennymaisyarah@dosen.pancabudi.ac.id

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRAK

Benih adalah komoditas strategis dalam pembangunan pertanian Indonesia. Upaya untuk meningkatkan produksi benih nasional adalah dengan peningkatan produktivitas dan perluasan areal. Dari aspek teknis, teknologi yang digunakan adalah penggunaan benih unggul. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh motivasi konsumen dan situasi terhadap perilaku pembelian petani untuk produk benih PT. Sang Hyang Seri Medan. Adapun permasalahannya yang penulis angkat yaitu: apakah motivasi konsumen dan situasi berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap perilaku pembelian petani untuk produk benih pada PT Sang Hyang Seri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan 69 orang responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pembagian kuisioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis regresi berganda dilakukan dengan program SPSS Versi 16. Hasil dari analisis regresi adalah : $Y = 1,597 + 0,414 X_1 + 0,218 X_2 + \varepsilon$. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel motivasi konsumen dan situasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian petani untuk produk benih pada PT. Sang Hyang Seri Medan.

Kata Kunci: *Motivasi, Situasi, Pembelian*

Pendahuluan

Benih adalah komoditas strategis dalam pembangunan pertanian Indonesia. Upaya untuk meningkatkan produksi benih nasional adalah dengan peningkatan produktivitas dan perluasan areal. Dari aspek teknis, teknologi yang digunakan adalah penggunaan benih unggul. Penggunaan benih bermutu merupakan kunci sukses pertama dalam usaha tani. Para produsen benih harus dapat menciptakan varietas yang sesuai kebutuhan dan keinginan petani. Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan varietas unggul benih buah dan sayuran adalah preferensi dan keinginan petani untuk memilih dan menggunakan benih unggul yang sesuai. Namun petani sebagai pengguna, mengalami

berbagai kendala dalam memanfaatkan benih unggul. Rendahnya penggunaan benih ditingkat petani masih menjadi kendala utama dalam peningkatan produksi.

Dewasa ini, perilaku pembelian semakin kompleks dimana seringkali konsumen membeli produk tidak sebagai rutinitas melainkan sebagai pembelian berdasarkan situasi yang terjadi pada saat itu. Banyak perilaku pembeli hanya terjadi dengan kata lain, situasi mempengaruhi pembelian konsumen dari produk atau merek. Situasional pengaruh efek kontekstual pada perilaku pembeli yang independen dari konsumen abadi, produk, atau merek karakteristik (Babin & Harris, 2012).

Menurut Belk (2007) mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara faktor situasional dan nonsituasional yang menentukan perilaku konsumen tertentu. Faktor-faktor tertentu untuk waktu dan tempat observasi yang tidak mengikuti dari pengetahuan pribadi dan stimulus atribut dan yang memiliki efek nyata dan sistematis pada perilaku saat ini. Dalam studinya, faktor situasional diklasifikasikan menjadi lima kelompok: lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif temporal, definisi tugas, dan negara. faktor-faktor nonsituasional, di sisi lain abadi dan karakteristik umum dari seorang individu atau obyek Contoh karakteristik ini adalah kepribadian, kecerdasan, jenis kelamin, dan ras untuk individu dan kualitas, ukuran, dan gambar untuk sebuah objek (Hyun – joo lee , 2016).

Segmen diidentifikasi berdasarkan memotivasi faktor dan situasi, dan menghubungkan mereka dengan motif pilihan produk dan situasi konsumen menyediakan masukan yang dibutuhkan oleh para profesional pemasaran dan pembuat kebijakan untuk mengkalibrasi strategi pemasaran yang lebih efisien untuk lebih fokus dan memosisikan produk mereka dan desain komunikasi mereka strategi untuk target segmen. Kesadaran dan pengetahuan memiliki menjadi faktor penting dalam mengubah sikap dan perilaku konsumen terhadap benih organik (Ravi nandi & Walfgang Bokelmann,2016).

Telah berpendapat konsumen yang kesadaran dan pengetahuan, serta konsumsi makanan organik, secara signifikan lebih tinggi di negara maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang. konsumen memiliki tingkat yang relatif lebih rendah dari kesadaran (Kumar & Ali, 2011, Oswald, 2012).

Meskipun demikian, tidak banyak upaya telah dilakukan untuk profil segmen pasar ini (Menon, 2009). Memang, sebagian besar penelitian konsumen organik pada dasarnya dilakukan di negara maju, dan kesenjangan yang cukup besar dalam bidang studi ini ada

untuk konteks negara-negara berkembang. Industri perbenihan harus selalu dapat mengikuti perkembangan agribisnis hortikultura yang harus berkembang pesat, sehingga perbenihan hortikultura adalah : (i) meningkatkan produksi benih bermutu untuk pemenuhan kebutuhan konsumen, (ii) meningkatkan efektivitas sistem jaminan mutu benih untuk mencapai standar mutu yang berdaya saing, (iii) meningkatkan perdagangan dan penggunaan benih bermutu dan (iv) memberdayakan potensi nasional, baik sumber daya, alami dan manusia (Ditjen Hortikultura, 2007).

Oleh karena itu, penyelidikan motif konsumen, preferensi terhadap makanan organik, dan segmentasi konsumen berdasarkan motif mereka dan situasi dapat membantu konsumen dan pemasar dari produk organik. Hal ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengkalibrasi kebijakan untuk pendidikan konsumen tentang manfaat giliran organik. Selanjutnya, hal itu mungkin juga bermanfaat bagi perusahaan komersial untuk posisi yang lebih baik produk organik mereka dan untuk mengkalibrasi dan berkomunikasi strategi mereka untuk target segmen. Sebagai konsekuensinya, strategi dan kebijakan yang sesuai dapat meningkatkan calon pasar produk organik, menciptakan efek positif bagi pertanian organik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memotivasi konsumen terhadap pembelian produk organik dan situasi mereka terhadap berbagai kategori makanan organik; untuk konsumen segmen atas dasar benih motif pilihan dan situasi, dan untuk membedakan segmen atas dasar faktor demografi sosial.

Kajian Pustaka

Motivasi Konsumen

Motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan atau keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan (Sunyoto 2013:73). Perilaku seseorang dimulai dengan adanya suatu motif yang menggerakkan individu dalam mencapai suatu tujuan.

Tertulis dalam catatan Sunyoto (2013:74) menerangkan beberapa pendapat mengenai teori motivasi yaitu:

1. Teori Herzberg dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan.

2. Teori insting oleh Cortez Darwin menyatakan bahwa motivasi merupakan tindakan *intelephant* yang direfleksikan dan bersifat *instingtif* dan dapat diwariskan sehingga dapat dikontrol oleh pikiran.
3. Teori lapangan oleh Kurt Lewin. Motivasi adalah pendekatan kognitif untuk mempelajari motivasi dan perilaku serta lebih terfokuskan pada pikiran rasional daripada insting atau kebiasaan.
4. Teori drive oleh C.L. Hull menyatakan motivasi seseorang sangat ditentukan oleh kebutuhan dari dalam dirinya dan faktor kebiasaan pengalaman belajar sebelumnya.
5. Teori prestasi dan motif-motif sosial oleh Edward J. Murray, menyatakan bahwa perilaku tidak hanya merupakan proses kognitif saja, tetapi juga merupakan fungsi dari lingkungan sosial.

Situasi

Dalam catatan Sumarwan dalam Babin & Harris (2012), situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Banyak perilaku pembeli hanya terjadi di bawah situasi tertentu, dengan kata lain situasi mempengaruhi pembelian konsumen dari peroduk atau merek, situasional pengaruh efek kontekstual pada perilaku pembeli independen dari konsumen abadi, produk, atau merek karakteristik.

Dalam catatan Belk Babin & Harris (2012), ada faktor perbedaan yang jelas antara faktor situasional dan nonsituasional yang menentukan perilaku konsumen tertentu. Dalam studinya, faktor situasional diklasifikasikan menjadi lima kelompok :

1. Lingkungan fisik
Sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi : lokasi dekorasi, aroma, cahaya, cuaca dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen.
2. Lingkungan Sosial
Kehadiran dan ketidak hadiran orang lain pada situasi tersebut.
3. Waktu

Waktu atau saat perilaku muncul (jam, hari, musim libur, bulan puasa, tahun baru). Waktu mungkin diukur secara subjektif berdasarkan situasi konsumen, misal kapan terakhir kali membeli roti.

4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Misalkan konsumen yang belanja untuk acara keluarga di rumah akan menghadapi situasi berbeda dibandingkan belanja untuk kebutuhan sendiri.

5. Suasana Hati

Suasana hati atau kondisi jiwa yang sesaat (misalnya perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, marah) yang dibawa pada suatu situasi.

Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami “Mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan”. Tertulis dalam catatan Schiffman dan Kanuk (2008:6) mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi). Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Tertulis dalam catatan Kotler dan Keller (2008:214), perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Tertulis dalam catatan Schiffman dan Kanuk (2008:6), perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi.

Dari dua pengertian tentang perilaku konsumen di atas dapat diperoleh dua hal yang penting, yaitu: (1) sebagai kegiatan fisik dan (2) sebagai proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi.

Kerangka Konseptual

Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami “Mengapa konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan”. Perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi). Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut.

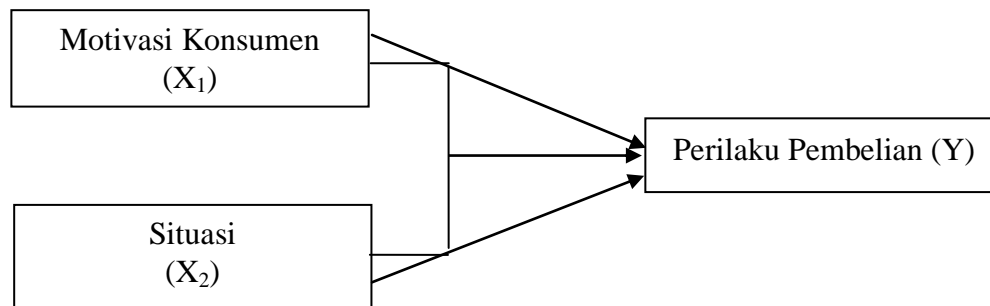
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seperti motivasi dan situasi. Motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan atau keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Perilaku seseorang dimulai dengan adanya suatu motif yang menggerakkan individu dalam mencapai suatu tujuan.

Motivasi yang terdapat pada konsumen akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Kebutuhan menjadi faktor yang tidak cukup kuat untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan dapat timbul karena faktor fisiologis seperti rasa lapar, haus dan sebagainya, sedangkan kebutuhan bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri atau kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan tersebut telah mencapai tingkat tertentu. Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup menekan seseorang untuk mengejar kepuasan.

Situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi dimana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Pemasar dalam mengembangkan strateginya harus berusaha memahami asal usul faktor situasi yang mempengaruhi keputusan pembelian.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Rusiadi, 2013:14).

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya yang ada di lapangan.

Tabel 1 . Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Angket Data	Pengukuran
1	Motivasi Konsumen (X1)	Motivasi konsumen adalah suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan (Handoko, 2007)	d. Harga produk e. Ketersediaan barang f. Kualitas produk	Skala Likert	Ordinal

2	Situasi (X2)	Situasi adalah pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik obyek (Engel, dkk 2009).	c. Pengaturan toko d. Pramuniaga e. Kegiatan promosi f. Display g. Kemasan produk h. Merek	Skala Likert	Ordinal
3.	Perilaku Pembelian (Y)	Perilaku pembelian adalah suatu perilaku terpusat cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu uang, usaha) guna untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi (Shiffman dan Kanuk ,2009:6).	c. Budaya d. Sosial e. Pribadi f. Psikologis	Skala Likert	Ordinal

Sumber : Penulis 2017

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).

Penulis mengambil sampel sebanyak 69 orang (15%) dari populasi 463 konsumen yang membeli produk benih pada PT. Sang Hyang Seri.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Validitas ini akan menghasilkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran (Umar, 2008). Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis atas pertanyaan, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir (Sugiyono dalam Rusiadi, Subiantoro, Hidayat, 2013).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada (Umar, 2008). Butir kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60 (Sunyoto, 2013).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011: 105).

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas dengan kriteria (Ghozali, 2011 ; 139).

Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

Uji F

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Santoso dalam Fridayani, 2012:56). Kriteria pengujiannya adalah :

- Terima H_0 (tolak H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5\%$
- Tolak H_0 (terima H_1), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{sig } F < \alpha 5\%$

Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait dengan taraf signifikan 5% (Kuncoro dalam Rusiadi, Subiantoro, Hidayat, 2013:279). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak (H_a diterima).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Santosa dan Ashari, 2005: 125).

Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi konsumen dan situasi terhadap perilaku pembelian yang dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution (SPSS* versi 16.00) dengan persamaan (Susanti, 2010: 185) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Perilaku Pembelian (*Dependen Variable*)

X₁ = Motivasi Konsumen (*Independent Variable*)

X₂ = Situasi (*Independent Variable*)

a = Konstanta

b = Koefisien prediktor

ε = Error term/ tingkat kesalahan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan (angket) yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar (>) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid (Rusiadi, 2013).

Tabel 2 Uji Validitas (X1)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Motivasi Konsumen 1	16.03	28.382	.666	.490	.828
Motivasi Konsumen 2	16.13	28.880	.685	.599	.826
Motivasi Konsumen 3	16.17	26.910	.782	.687	.810
Motivasi Konsumen 4	16.61	30.065	.653	.469	.831
Motivasi Konsumen 5	15.87	29.233	.526	.327	.853
Motivasi Konsumen 6	16.23	32.122	.600	.367	.840
Motivasi Konsumen 7	15.83	32.175	.467	.274	.855

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 2 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir

pertanyaan pada variabel motivasi konsumen dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 3 Uji Validitas (X2)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Situasi 1	19.91	15.139	.561	.	.912
Situasi 2	19.99	14.514	.797	.	.886
Situasi 3	19.87	13.821	.792	.	.885
Situasi 4	20.01	15.103	.665	.	.899
Situasi 5	20.19	15.126	.673	.	.898
Situasi 6	19.99	14.514	.797	.	.886
Situasi 7	19.87	13.821	.792	.	.885

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 3 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir pertanyaan pada variabel situasi dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4 Uji Validitas (Y)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Perilaku Pembelian Petani 1	11.86	14.449	.745	.651	.826
Perilaku Pembelian Petani 2	11.94	13.291	.736	.671	.827
Perilaku Pembelian Petani 3	11.36	16.264	.521	.353	.876
Perilaku Pembelian Petani 4	11.45	13.780	.747	.617	.823
Perilaku Pembelian Petani 5	11.30	14.244	.705	.580	.835

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel perilaku pembelian petani dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5 Uji Reliabilitas (X_1) Motivasi Konsumen
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.856	.858	7

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 5 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,856 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel motivasi konsumen adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 6 Uji Reliabilitas (X_2) Situasi
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.907	.909	7

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 6 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,907 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel situasi adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 7 Uji Reliabilitas (Y) Perilaku Pembelian Petani
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.867	.866	5

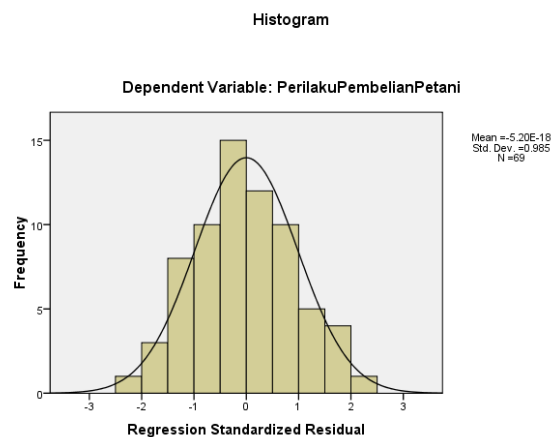
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 7 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,867 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel Perilaku Pembelian Petani adalah reliabel atau dikatakan handal.

Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

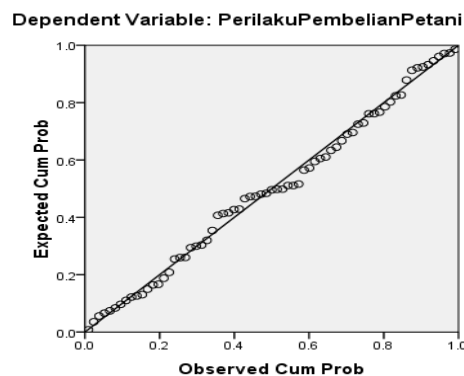
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 2 Histogram Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 3 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Berdasarkan Gambar 3 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel motivasi konsumen, situasi dan perilaku pembelian petani berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Uji Multikolinieritas
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.597	2.357		.677	.501		
	Motivasi Konsumen	.414	.074	.557	5.612	.000	.862	1.160
	Situasi	.218	.105	.207	2.084	.041	.862	1.160

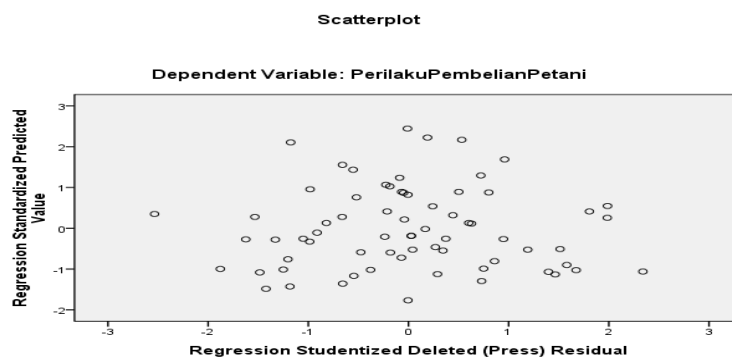
a. Dependent Variable:
 PerilakuPembelianPetani

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah motivasi konsumen $1,160 < 10$, situasi $1,160 < 10$ dan nilai *Tolerance* motivasi konsumen $0,862 > 0,10$, situasi $0.862 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah

heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Regresi Linier Berganda

Tabel 9 Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.597	2.357		.677	.501		
	Motivasi Konsumen	.414	.074	.557	5.612	.000	.862	1.160
	Situasi	.218	.105	.207	2.084	.041	.862	1.160

a. Dependent Variable: PerilakuPembelianPetani

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 1.9 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = 1,597 + 0,414 X_1 + 0,218 X_2 + \varepsilon$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 5) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai perilaku pembelian petani (Y) adalah sebesar 0,1,597.
- 6) Jika terjadi peningkatan motivasi konsumen sebesar 1, maka perilaku pembelian (Y) akan meningkat sebesar 0,414.
- 7) Jika terjadi peningkatan situasi sebesar 1, maka perilaku pembelian (Y) akan meningkat sebesar 0,218.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 10 Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	650.444	2	325.222	25.837	.000 ^a
	Residual	830.773	66	12.587		
	Total	1481.217	68			

a. Predictors: (Constant), Situasi, MotivasiKonsumen

b. Dependent Variable: PerilakuPembelianPetani

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 25.837 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,131 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$. Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini motivasi konsumen dan situasi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 11 Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.597	2.357		.677	.501		
Motivasi Konsumen	.414	.074	.557	5.612	.000	.862	1.160
Situasi	.218	.105	.207	2.084	.041	.862	1.160

a. Dependent Variable: PerilakuPembelianPetani

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 1.11 diatas dapat dilihat bahwa:

1. Pengaruh motivasi konsumen terhadap perilaku pembelian

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H_0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$

Ha ditolak dan H_0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$

t_{hitung} sebesar 5,612 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,669 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga $t_{hitung} 5,612 > t_{tabel} 1,669$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan motivasi konsumen berpengaruh secara parsial terhadap perilaku pembelian.

2. Pengaruh situasi terhadap perilaku pembelian.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H_0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$

Ha ditolak dan H_0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$

t_{hitung} sebesar 2,048 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,669 dan signifikan sebesar 0,041, sehingga $t_{hitung} 2,048 > t_{tabel} 1,669$ dan signifikan $0,041 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan situasi berpengaruh secara parsial terhadap perilaku pembelian.

Koefisien Determinasi

Tabel 12 Koefisien Determinasi
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.663 ^a	.439	.422	3.548

a. Predictors: (Constant), Situasi, MotivasiKonsumen

b. Dependent Variable: PerilakuPembelianPetani

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 12. di atas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,422 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 42,2% perilaku pembelian dapat diperoleh dan dijelaskan oleh motivasi konsumen dan situasi. Sedangkan sisanya $100\% - 42,2\% = 57,8\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti promosi, periklanan, distribusi dan lain-lain.

Pembahasan

Pengaruh variabel Motivasi Konsumen terhadap Perilaku Pembelian

Motivasi konsumen berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap perilaku pembelian petani. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi dapat disimpulkan dengan adanya perilaku yang nampak. Motivasi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun keberadaan motivasi mengacu pada adanya kebutuhan sehingga tanpa adanya kebutuhan tidak akan ada motivasi.

Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai kepuasan. Jadi dengan kata lain setiap perilaku/kegiatan konsumen diarahkan untuk memenuhi tujuan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan dalam memperoleh kepuasan.

Dengan demikian setiap kegiatan yang dilakukan seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan dari dalam diri seseorang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut

dengan motivasi. Sehingga dengan demikian secara definitif dapat dikatakan bahwa motif atau motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai kepuasan (Basu dan Hani dalam Sudaryana, 2010).

Motivasi konsumen memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku pembelian diantara variabel bebas lainnya yang diteliti. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa motivasi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian untuk produk benih pada PT. Sang Hyang Seri terbukti kebenarannya. Hal ini berarti motivasi konsumen merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk benih. Pengaruh positif ini nampak pada sebagian besar pernyataan dari petani yang menyatakan bahwa harga produk yang cukup kompetitif, ketersediaan barang yang memadai dan kualitas produk yang baik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2013), menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian, hal tersebut terjadi karena adanya sifat dinamis pada motivasi konsumen. Hasil penelitian ini juga didukung penelitian oleh Reagi (2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen motivasi konsumen terhadap variabel dependen keputusan pembelian.

Pengaruh Variabel Situasi Terhadap Perilaku Pembelian

Situasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap perilaku pembelian. Situasi merupakan aspek penting bagi konsumen dan pemasar. Situasi dapat mempertemukan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga tujuan dari suatu bisnis organisasi dapat tercapai. Situasi pembelian dipertimbangkan khususnya untuk pemasar. Situasi ini menuntut pemasar untuk lebih kreatif menciptakan strategi dalam menarik dan mempertahankan konsumen.

Situasi merupakan keadaan yang dihadapi oleh konsumen dalam menentukan pilihan produk atau merek sesuai yang diinginkannya, Situasi seringkali dialami sebelum konsumen membeli suatu produk atau merek dan dikonsumsi sesuai dengan situasi yang diinginkannya. Situasi ini dibutuhkan oleh pemasar dalam mengembangkan strateginya sehingga mereka dapat menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target konsumen potensialnya sehingga tercipta kepuasan dan loyalitas konsumen.

Selain itu, situasi oleh pemasar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas dalam melakukan segala aktivitas sehingga mereka dapat bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompleks. Pemasar dapat menciptakan situasi pembelian khususnya di dalam toko dengan memberikan kenyamanan berbelanja bagi konsumen, sehingga pengalaman konsumen dalam membeli produk dapat digunakan kembali untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk dan jasa yang ditawarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nonie Magdalena (2010), dengan judul model stimulus-organism-response: penentu perilaku pembelian konsumen secara situasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa Situasi merupakan aspek yang memiliki perubahan dan tidak untuk meramalkan. Dengan kata lain, situasi akan menentukan pembelian konsumen tingkah laku.

Penutup

Agar PT. Sang Hyang Seri bisa lebih meningkatkan perilaku pembelian maka perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Motivasi konsumen mempunyai pengaruh terbesar terhadap perilaku pembelian. Indikator perusahaan memberikan kualitas produk yang baik, ketersediaan barang yang memadai dan harga produk yang cukup kompetitif. Untuk itu sebaiknya, perusahaan tetap mempertahankan program yang sedang dijalankan. Selain itu perusahaan dapat meningkatkan pelayanan yang baik untuk setiap konsumen baru yang membeli produk sehingga dengan pelayanan yang baik konsumen menjadi loyal dan menjadi pelanggan tetap.
2. Situasi mempunyai pengaruh terbesar kedua terhadap perilaku pembelian petani. Situasi merupakan aspek yang sulit dalam meramalkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Situasi ini khususnya situasi konsumsi seringkali berubah bergantung pada kondisi konsumen potensial. Oleh karena itu, sebaiknya dalam mengembangkan atau merevisi kembali strategi, perusahaan perlu lebih melakukan penelitian di bidang pemasaran sehingga dapat mengamati setiap perubahan perilaku pembelian konsumen, sesuai dengan situasi yang diinginkannya. Pada akhirnya kepuasan serta loyalitas pelanggan dapat tercapai dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Babin, B. J., & Harris, E. G. (2012). *CB3* (3rd ed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
- Belk, R. W. (2007). An exploratory assessment of situational effects in buyer behavior. *Journal of Marketing Research*, 11(2), 156–163.
- Engel, Blackwell, dan Miniard. (2009). *Perilaku Konsumen*, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Ghozali, Imam, (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)* Semarang : Universitas Diponegoro.
- Handoko, T.Hani. (2007). *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. BPFE : Yogyakarta
- Joo, lee Hyun, (2016). *Individual and Situational Determinants of U.S. Consumers' Buying Behavior of Organic Foods*, jurnal of internasional food & agribusiness marketing.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, (2008). *Manajemen Pemasaran. Jilid Satu, Edisi Kedua belas*, Cetakan Ketiga. Penerbit Indeks
- Ravi Nandi & Walfgang Bokelmann, (2016). *Consumer Motives and Purchase Preferences for Organic Food Products: Empirical Evide From a Consumer*, jurnal of internasional food & agribusiness marketing.
- Rusiadi et al. (2013). *Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. Medan : USU Press.
- Santosa, Budi Purbayu dan Ashari. (2005), Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset
- Schiffman & Kanuk. (2009). *Perilaku Konsumen* (edisi 7). Jakarta : Prentice Hal
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto, Danang (2013). *Teori, Kuesioner & Analisis Data*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Susanti, Melia, Nur, Indah. (2010). *Statistik Deskriptif dan Induktif*. Jakarta: Graha Ilmu

BAGAIMANA STRATEGI BISNIS UMKM KOTA SEMARANG DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ?

Indarto, Joko Santosa, Aprih Santosa

E-mail:indartoindarto77@gmail.com
Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

ABSTRAK

Era persaingan MEA sudah dimulai, setiap pelaku bisnis harus memahami situasi persaingan tersebut dan siap dengan strategi-strategi untuk memenangkan persaingan tersebut. Pelaku UMKM di Kota Semarang yang merupakan pelaku bisnis terbanyak harus siap dan penuh strategi untuk bersaing dengan produk-produk dari negara-negara ASEAN lainnya. Penelitian ini mengkaji kesiapan dan strategi bisnis para pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan MEA. Penelitian dilakukan di Kota Semarang dengan mengambil sampel para pelaku UMKM yang produknya termasuk dalam produk unggulan Kota Semarang, yaitu makanan dan minuman, Fesyen dan Batik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif fenomenologis dengan responden para pelaku UMKM yang termasuk produk unggulan dan pejabat di Dinas Koperasi dan UMKM yang menangani sosialisasi MEA kepada UMKM dan pengembangan UMKM dalam menghadapi persaingan MEA. Sebanyak 20 responden yang menghasilkan produk-produk yang diunggulkan di Kota Semarang berhasil diinterview secara mendalam mengenai pemahaman terhadap MEA, konsekuensi MEA, kesiapan menghadapi MEA dan strategi menghadapi persaingan MEA. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar responden tahu dan memahami mengenai MEA, hanya konsekuensi dari MEA yang belum begitu dipahami. Responden menyatakan harus siap dengan persaingan MEA, siap dalam arti mau tidak mau harus siap menghadapi MEA yang sudah berjalan. Persiapan dan strategi bisnis telah dilakukan oleh UMKM dalam menghadapi MEA meskipun masih bersifat generic seperti meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan social media untuk memperluas pasar dan membangun jejaring. Berlakunya MEA setidaknya sudah dijadikan oleh para pelaku UMKM sebagai momentum untuk meningkatkan daya saing produknya.

Kata kunci: *persaingan bebas, daya saing, strategi bisnis, UMKM*

Pendahuluan

Tantangan besar harus dihadapi oleh pelaku ekonomi khususnya pelaku usaha dalam persaingan MEA yang dimulai pada 31 Desember 2015 . Konsekuensi dari MEA adalah masuknya berbagai produk impor dari negara-negara ASEAN secara bebas. Masyarakat bisa memilih mana produk-produk yang berkualitas. Pada kenyataannya, belum semua masyarakat memahami apa itu MEA dengan segala konsekuensinya. Mindset

masyarakat, khususnya pelaku usaha Indonesia belum seluruhnya mampu melihat MEA 2015 sebagai sebuah peluang. Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ASEAN masih sangat terbatas (LIPI, 2015). Hasil survei yang dilakukan Tim Survei ASEAN LIPI terhadap 2.509 responden dari 16 kota di Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap MEA masih berada di kategori rendah. Hasil Survei menunjukkan hanya 25,90 persen responden dari masyarakat umum yang memiliki pemahaman mengenai MEA dan hanya 27,80 persen dari kalangan pengusaha dan pedagang yang telah memahami mengenai tantangan dan peluang MEA. Mengenai hasil survei tersebut, LIPI memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum maupun usaha mengenai MEA agar mereka siap menghadapi pasar bebas ASEAN di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan MEA 2015 hanyalah sebuah awal sebuah proses ke arah pasar bebas ASEAN yang akan diikuti oleh MEA pada 2020 dan 2025.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan ASEAN yang seharusnya mampu memanfaatkan peluang dari MEA. Indonesia adalah negara heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa, dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Jika dilihat dari sisi demografi sumber daya manusia (SDM), Indonesia merupakan salah satu negara yang produktif karena dari faktor usia, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 70% nya merupakan usia produktif. Indonesia diprediksi akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, apalagi dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar. Maka akan sangat tidak masuk akal apabila Indonesia tidak bisa memenangkan persaingan MEA.

Salah satu pilar penting dalam perekonomian ASEAN adalah UMKM. Sekitar 96 persen perusahaan di negara-negara Asean adalah berstatus UMKM (Kontan, Maret 2013). Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM di Asean 50 – 80 persen. Sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Asean antara 30 – 53 persen. Fenomena tersebut juga terjadi Kota Semarang. Jumlah pelaku UMKM di Kota Semarang terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan setiap tahun sekitar 1,97 persen. Total jumlah pelaku UMKM di Kota Semarang yang terdaftar 11.692 UMKM. Setiap tahun jumlah UMKM terus tumbuh. Meskipun jumlah yang terdaftar sekitar 11.692 UMKM, namun kenyataan di lapangan bisa jauh lebih dari angka jumlah itu. Sebagian

besar UMKM di Kota Semarang bergerak di sektor perdagangan dan industri. Hingga akhir 2014, jumlah UMKM yang terdata pada Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM Kota Semarang sebanyak 11.585 unit. Kemudian pada 2015 bertambah sekitar 3%. Dari jumlah tersebut, perannya dinilai sangat luar biasa, karena mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18 ribu orang. Pemerintah Kota Semarang terus memberdayakan eksistensi UMKM melalui pembinaan kegiatan usaha, manajemen, pemasaran, dan juga permodalan agar UMKM tidak hanya berkembang, namun juga mandiri. Pelaku UMKM juga harus bisa memanfaatkan momen untuk menimba ilmu dan terus berinovasi menghadapi persaingan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Beberapa sector yang menjadi unggulan kota Semarang adalah; sector makanan, kerajinan, batik, mebel dan fashion (Bisnis.Com, 2014). Berlakunya pasar bebas dalam kerangka MEA memunculkan pertanyaan apakah para pelaku UMKM di Kota Semarang telah siap dan memiliki strategi bisnis untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat dalam kerangka MEA ?

Permasalahan

Masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya pelaku UMKM mengenai MEA bukan masalah yang sederhana. Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam era MEA sangat besar. UMKM harus siap dan memiliki strategi bisnis untuk menghadapi persaingan MEA. Apakah UMKM telah memiliki strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah para pelaku UMKM telah menyiapkan atau bahkan menjalankan strategi bisnis yang khusus untuk menghadapi persaingan MEA. Pengkajian ini penting dilakukan untuk menemukan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk pengembangan UMKM Kota Semarang dalam menghadapi persaingan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti.

Kajian Pustaka

MEA dan Konsekuensinya

MEA adalah satu dari tiga pilar masyarakat ASEAN, yaitu pilar komunitas ekonomi ASEAN. MEA akan menjadikan ASEAN sebagai sebuah pasar bebas yang sangat

kompetitif dan terintegrasi dalam sebuah pasar tunggal dalam perekonomian dunia. Dengan berlakunya MEA, produk dari negara-negara ASEAN, baik barang maupun jasa, akan bebas untuk masuk ke Indonesia tanpa dikenakan bea masuk. Begitu juga dengan tenaga kerja dari negara ASEAN yang bebas untuk mencari pekerjaan di Indonesia dan sebaliknya. MEA akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Pada saat yang sama, MEA akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa konsekuensi – konsekuensi . Konsekuensi utama adalah terjadinya Pasar Tunggal dan Pusat Produksi Tunggal dimana akan terjadi aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja ahli antar negara-negara anggota ASEAN.

Strategi Bisnis

Strategi bisnis adalah setiap rencana tindakan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi (Yang, 2012) . Usaha-usaha untuk menghasilkan keuntungan ekonomi tersebut dapat dengan meminimumkan biaya, meningkatkan kualitas atau menciptakan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Menurut Porter (1980), perusahaan dapat melakukan strategi bisnis dengan kategori; 1) cost leadership; 2) product differentiation atau fokus pada jenis produk atau layanan tertentu (niche market). Menurut penelitian Yang (2015), strategi bisnis yang sangat populer dilakukan oleh para pengusaha adalah strategi yang mengutamakan peningkatan kualitas. Strategi bisnis menciptakan produk baru adalah strategi bisnis yang paling sedikit dipilih oleh para pengusaha. Sementara strategi yang berorientasi pada biaya minimum berada diantara keduanya. Setiap perusahaan akan memilih strategi bisnis sesuai dengan kondisi sumber daya yang dimilikinya dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai, apakah hanya sekedar bertahan dalam persaingan, ingin memiliki keunggulan di banding para pesaing atau bahkan ingin menjadi yang terdepan. Pasar bebas menuntut setiap perusahaan menentukan tujuan dan memilih strategi bisnis yang tepat. Apakah perusahaan bertujuan cukup

bertahan dalam persaingan bebas atau apakah perusahaan bertujuan untuk unggul di tengah persaingan bebas . Setiap para pelaku UMKM harus memiliki strategi bisnis untuk sekedar bertahan dalam persaingan atau memenangi persaingan MEA.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer . Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sumber data diambil dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Sumber data penelitian adalah pengusaha UMKM di Kota Semarang. Sebagaimana menjadi sumber data primer, para pengusaha UMKM dapat memberikan informasi mengenai kesiapan mereka dalam menghadapi MEA. Penelitian ini juga menetapkan sumber data lain yang mendukung untuk menambah informasi agar data yang diperoleh lebih lengkap. Adapun sumber data lain diperoleh dari pejabat dari Kota Semarang dan pakar ekonomi yang menguasai MEA.

Untuk membatasi kajian permasalahan yang dibahas, penelitian kualitatif lapangan ini difokuskan kesiapan dan strategi pengusaha UMKM dalam menghadapi MEA. Dengan fokus permasalahan tersebut, kajian yang dibahas mencakup pada tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh para pengusaha UMKM di Kota Semarang supaya bisa bersaing dalam era MEA.

Pada penelitian ini digunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu :

- 1.Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat.

Beberapa hal yang terkait dengan sikap dan tindakan pengusaha UMKM dalam menghadapi persaingan MEA.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti akan menggunakan metode ini untuk mencari informasi terkait keterangan dari pengusaha UMKM, aparat pemerintah Kota Semarang yang berkompeten dan pakar ekonomi yang memahami konsekuensi MEA bagi UMKM.

3. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data-data tersebut merupakan data yang bersifat tulisan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi UMKM mencakup kondisi permodalan, daya saing produk, pemasaran dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan uji keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti memakai pedoman instrumen penelitian yang bersumber dari referensi terkait. Selanjutnya mensinkronisasikannya dengan data hasil interview dan hasil observasi di lapangan. Dari hasil observasi nantinya akan diketahui apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan skema/penjelasan yang diatur dalam pedoman instrument dan hasil interview sebelumnya.

Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (data reduction), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (data display), dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (conclusion drawing) atau (verification).

Hasil dan Pembahasan

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Semarang. UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah menjalankan usaha paling tidak 1 tahun. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah pemilik (owner) UMKM itu sendiri. Sebanyak 20 responden berhasil diwawancarai terkait dengan kesiapan mereka dalam menghadapi persaingan MEA. Sebagian besar (65 %) UMKM responden menggeluti usaha yang berkaitan dengan makanan dan minuman, sisanya bergerak di bisnis fashion, batik, handycraft dan perlengkapan rumah tangga . Usaha makanan dan minuman adalah usaha yang relatif mudah untuk dimulai dan dijalankan, menjanjikan keuntungan yang menarik karena kapan pun makanan dan minuman dibutuhkan masyarakat. Bisnis makanan dan minuman juga tidak memerlukan modal dan teknologi yang relative besar dan dimulai dari hobi memasak atau makan. Untuk memulai bisnis makanan dan minuman dengan persaingan yang ada , responden menyatakan mereka harus mempunyai sesuatu yang berbeda dari produk makanan dan minuman yang sudah ada. Hal ini membutuhkan kreatifitas dan ketekunan. Hal yang sama juga dilakukan responden yang menekuni bisnis batik, handycraft, perlengkapan rumah tangga dan fashion. Dibutuhkan kreatifitas yang tinggi untuk bisa masuk dalam persaingan yang ada, dan terus berinovasi untuk dapat bertahan dalam persaingan.

Tingkat pendidikan responden yang berhasil ditemui dalam penelitian ini rata-rata berpendidikan SMA ke atas. Para responden mengakui mereka tidak memiliki dasar pengetahuan bisnis yang cukup untuk menjalankan suatu usaha. Para responden menyatakan bahwa mereka tertarik berwirausaha atau menjalankan suatu bisnis karena tidak betah menjadi karyawan, sebagian menyatakan karena tidak mau mencari pekerjaan tetapi ingin menciptakan pekerjaan. Para responden dalam penelitian ini ternyata sebagian masih berusia muda. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berwirausaha di kalangan kaum muda akhir-akhir ini semakin meningkat. Paradigma kaum muda yang sebelumnya berorientasi untuk menjadi pegawai atau karyawan, terlihat bergeser untuk menjadi wirausahawan. Berdasarkan pengalaman bisnis, sebagian besar responden adalah pelaku usaha yang baru. Pengalaman bisnis sebagian besar responden berkisar 1 -8 tahun . Para responden mengakui bahwa mereka masih baru dalam bisnis yang digeluti sehingga mereka berusaha terus belajar untuk dapat eksis dan mengembangkan usahanya.

Tabel 1. Responden dan Usahanya

NO	RESPONDEN	USAHA
1	Ling-ling	Cara bikang “ Nonik Londo”
2	Endang	Kendi Craft
3	Diah	Gudeg Wijilan
4	Ani	Aneka snack ringan
5	Hartini	Bandeng Presto
6	Trisna	Konveksi
7	Ida	Olahan ikan “Iwakoe”
8	Very	Papa Bear Chocolate
9	Musrifah	Kerupuk “Kriyuk”
10	Atik	Nazwa Bag
11	Aming	Busana Muslim
12	Erna Setyawati	Batik
13	Imel	Imel Collection (Tas, Sandal)
14	Dewi	Batik Ciprat Dewi (Batik)
15	Rini Soelistyawati	Sepatu Bordi “Arini Embroid”
16	Chandra	Pisang Bollen ‘ Dian Mas’
17	Hariyanto	Ken’s lumpia
18	Sarah	“ MAU” Snack
19	Retno	Frozen Food (aneka nugget)
20	Greenesia	Home Made (Sprei, mukena, bed cover, Bantal Cinta)

Sumber; data primer, 2016

Semua responden telah mengurus ijin usahanya dan telah memiliki kartu IUMK. Hal ini merupakan keberhasilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan bagi pelaku UMKM. Semua responden memiliki merek untuk produknya dengan maksud supaya konsumen mudah mengenali produknya. Pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini rata-rata berusia muda sehingga mereka sudah “*aware*” dengan strategi pemasaran dan mencoba menerapkannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku responden yang telah mempromosikan dan menjual produknya secara online. Beberapa memiliki website untuk mengupdate produk-produk terbarunya. Responden juga menyadari bahwa produk mereka harus didaftarkan pada lembaga yang berkompeten untuk memberikan *guarantee* bagi produk mereka aman, halal dan telah memenuhi standard. Sebagian besar responden telah mengurus berbagai pengakuan/label dari lembaga-lembaga seperti Dinas Kesehatan, BPOM dan MUI . Sementara untuk SNI, baru 2 UMK yang telah mengurusnya.

Tabel 2. Usaha Responden

NO	RESPONDEN	USAHA	Merek	Izin Usaha	PIRT/Dinkes/ B POM/ Sertifikasi Halal	SNI
1	Ling-ling	Cara bikang “ Nonik Londo”	√	√		
2	Endang	Kendi Craft	√	√		
3	Diah	Gudeg Wijilan	√	√	√	
4	Ani	Aneka snack ringan	√	√	√	
5	Hartini	Bandeng Presto	√	√	√	√
6	Trisna	“ Mina Makmur “ Konveksi	√	√		
7	Ida	Olahan ikan “Iwakoe”	√	√	√	
8	Very	Papa Bear Chocolate	√	√	√	
9	Musrifah	Kerupuk “Kriyuk”	√	√	√	√
10	Atik	Nazwa Bag	√	√		
11	Aming	Busana Muslim	√	√		
12	Erna Setyawati	Batik	√	√		
13	Imel	Imel Collection (Tas, Sandal)	√	√		
14	Dewi	Batik Ciprat Dewi (Batik)	√	√		
15	Rini Soelistyawati	Sepatu Bordi “Arini Embroid”	√	√		
16	Chandra	Pisang Bollen ‘ Dian Mas’	√	√	√	
17	Hariyanto	Ken’s lumpia	√	√	√	
18	Sarah	“ MAU” Snack	√	√	√	
19	Retno	Frozen Food (aneka nugget)	√	√	√	
20	Greenesia	Home Made (Sprei, mukena, bed cover, Bantal Cinta)	√	√		

Sumber: Data primer, 2016

Jangkauan pemasaran sebagian besar UMKM Kota Semarang masih sekitar Kota Semarang. Namun beberapa UMKM telah berhasil menjangkau pasar yang lebih luas , sebagian sudah menjangkau wilayah Jawa Tengah, Pulau Jawa dan sekitarnya bahkan ada yang pemasarannya telah sampai di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM Kota Semarang memiliki potensi untuk bersaing di tingkat global. Produk yang bagus disertai dengan strategi pemasaran yang tepat memungkinkan beberapa produk UMKM

Kota Semarang dapat menjangkai pasar ASEAN bahkan di luar ASEAN. Produk yang sudah menjangkau ke pasar global adalah produk tas dan produk coklat.

Hasil Analisis

Berlakunya MEA membawa kekhawatiran akan kesiapan UMKM untuk menghadapi persaingan yang lebih luas dan lebih ketat. Berdasarkan indepth interview terhadap UMKM yang menjadi informan utama penelitian ini mengenai pemahaman mengenai MEA, 85 % responden menyatakan tahu dan paham apa itu MEA.

Tabel 3. Kesiapan Pelaku UMKM terhadap MEA dan Konsekuensinya

Pemahaman Terhadap Konsekuensi berlakunya MEA	Prosentase
a. Paham Konsekuensi MEA	65 %
b. Tidak Paham Konsekuensi MEA	3%
Kesiapan Menghadapi MEA	
a. Siap Menghadapi MEA	64 %
b. Tidak siap Menghadapi MEA	36 %

Sumber; Data primer, 2016

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka paham dengan konsekuensi dari MEA. Bahwa MEA membawa konsekuensi bebas bea untuk produk-produk ASEAN ke Indonesia, begitu pula sebaliknya. Responden juga menyadari bahwa berlakunya MEA tersebut membawa konsekuensi akan semakin ketatnya persaingan usaha, namun juga terbukanya peluang pasar ke negara-negara ASEAN. Ketika dihadapkan pada pertanyaan apakah responden siap menghadapi MEA, 64 % menjawab siap.

Tabel 3. Pernyataan Responden mengenai pemahaman dan kesiapan Menghadapi MEA

NO	RESPONDEN	USAHA	Pemahaman MEA
1	Ling-ling	Cara bikang “ Nonik Londo”	“ Ya. Saya tahu MEA, pasar bebas ASEAN. Nanti banyak makanan dari negara-negara ASEAN masuk kesini, mau tidak mau harus siap”
2	Endang	Kendi Craft	“ MEA saya tahu sejak lama, MEA berarti bebasnya produk-produk ASEAN masuk ke Indonesia dan juga sebaliknya, harus siap karena memang sudah berlaku”.
3	Diah	Gudeg Wijilan	“Tahu, tapi saya tidak begitu mengikuti, karena repot kalau harus mengikuti berita terus”.
4	Ani	Aneka snack ringan	“Saya tidak begitu paham, pernah mendengar, tapi saya merasa tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut”.
5	Hartini	Bandeng Presto “ Mina Makmur “	“Saya paham, Masyarakat ASEAN . Perdagangan antar masyarakat ASEAN tidak ada hambatan lagi. Pasar terbuka luas buat kita. Tidak usah takut dengan MEA, pasar local kita sangat besar, asal produk kita berkualitas pasti punya pasar.”
6	Trisna	Konveksi	“Saya tahu, tapi tidak ngeh....sibuk ngurusi usaha..” Yang saya tahu sekarang konveksi dari luar negeri banyak sekali masuk menyaingi produk local, harganya murah-murah. Kita harus bisa bertahan dengan
7	Ida	Olahan ikan “Iwakoe”	“ Paham, tidak terlalu...MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN, kita harus bersaing dengan pengusaha se ASEAN gitu kan”. Saya nggak begitu ngikutin karena begini saja saya sudah kewalahan memenuhi pesanan. Produk saya benar-benar local, bahan bakunya asli dari desa, sulit disaingi oleh produk dari luar
8	Very	Papa Bear Chocolate	“ Paham, Kita sudah dihadapkan pada persaingan pasar bebas se-ASEAN. Tapi saya tidak khawatir . Bila di dalam negeri sudah kuat, merek asing pun tidak akan bisa merebut pasar kita. Hingga akhirnya, kita bisa tenang melakukan ekspansi ke negara tetangga”.

9	Musrifah	Kerupuk "Kriyuk"	" Tahu dan sadar karena mau tidak mau kita sudah ikut MEA. UMKM Indonesia tidak perlu takut karena Indonesia ini luas, demografinya pun sangat beragam, jadi kenapa harus tergiur untuk memasarkan produk ke luar negeri? Kecuali kita sudah mampu menggarap seluruh pasar lokal, baru ekspansi ke luar. Merek luar pun saya rasa sulit melakukan penetrasi di sini"
10	Atik	Nazwa Bag	" Tahu, saya bahkan sudah mencoba peluang pasar ASEAN". Saya titipkan produk tas saya ke teman-teman yang ada di luar negeri. Saya juga sudah jualan online..prospeknya bagus.
11	Aning	Busana Muslim border	"Tidak paham, sudah mendengar , tapi yang banyak ngurusi bisnis ini anak saya. Katanya baju muslim saya sering dipesan oleh orang Malaysia.
12	Erna Setyawati	Batik	"Tahu, MEA berarti barang-barang dari luar negeri akan masuk dengan bebas di Indonesia". Ya kita nggak boleh kalah, khususnya produk khas Indonesia seperti batik ini.
13	Imel	Imel Collection (Tas, Sandal)	" Paham, MEA berarti tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat ASEAN. Produk kita harus dibuat bagus supaya masih ada yang mau beli. Soalnya produk dari luar bagus dan murah.
14	Dewi	Batik Ciprat Dewi (Batik)	"Paham, pernah ikut sosialisasi di Dinas. Untuk tetap bisa bersaing kita harus meningkatkan kualitas produk yang kita buat, apalagi kalau unik dan menarik.

15	Rini Soelistyawati	Sepatu Bordir “Arini Embroid”	“Tahu dan paham, sering menyimak berita di televise. MEA itu artinya pasar yang lebih terbuka untuk produk kita. Kita jadi bisa memasarkan produk kita dengan bebas di negara-negara tetangga. Sekaligus produk-produk dari negara tetangga akan bebas masuk ke pasar kita. Ya mesti kreatif terus supaya produk kita disukai pasar.
16	Chandra	Pisang Bollen ‘ Dian Mas’	“ Tahu, tapi bagi saya tidak terlalu berpengaruh karena jualan saya skala kecil”. Saya hanya setor di beberapa toko. Mau ada MEA atau tidak , rasanya bagi saya sama saja.
17	Hariyanto	Ken’s lumpia	“Tahu dan paham, MEA berarti kuliner Semarang akan bersaing dengan kuliner dari negara-negara ASEAN. Kuliner juga cukup akan semakin ketat persaingannya kalau nanti restoran asing pada masuk ke sini. Kalau saya yang penting focus pada lumpia ini....siapa tahu saya nanti bisa buka cabang di Thailand atau Laos.
18	Sarah	“ MAU” Snack	“ Tahu tapi merasa tidak berkepentingan karena pasar local saja belum optimal. Saya masih baru, masih belajar membuat produk snack yang disukai orang.
19	Retno	Frozen Food (aneka nugget)	“ Paham tapi buat saya tidak ngefek karena saya punya pasar sendiri”. Produk saya kan lauk siap saji yang pasarnya adalah ibu-ibu kalangan menengah ke bawah. Rasanya nggak gampang bagi mereka mengganti produk saya dengan belanja produk lain apalagi asing ya.
20	Greenesia	Home Made (Sprei, mukena, bed cover, Bantal Cinta)	“Tahu, paham karena sering ikut sosialisasi” Akan makin banyak produk murah dari asing yang menjadi pesaing kita. Apalagi seperti produk yang saya buat ini, pasti banyak yang dari luar lebih murah. Saya mencoba terus inovasi, selalu mengikuti trend dan selera konsumen.

Sumber; Data primer, 2016

Diberlakukannya perjanjian MEA menimbulkan pendapat yang berbeda-beda dari para pelaku UKM. Di satu sisi senang, karena mereka akan mudah mengekspor barang ke luar negeri. Di sisi lain, ada pula yang menyayangkan kebijakan tersebut karena pasar

Indonesia sendiri sudah sangat menguntungkan. Tak sedikit anggapan bahwa produk asing akan diuntungkan karena bisa masuk dengan leluasa ke pasar Indonesia. Sementara pebisnis lokal, tidak banyak yang ingin mengeksport barangnya karena Indonesia sendiri pangsa pasarnya sudah sangat besar. Sebagian UMKM mengaku masih akan fokus mengenal pasar lokal dan memperkuatnya. Inilah yang kemudian menjadi strategi mereka untuk menghadapi MEA. Fokus menyerang hanya akan melemahkan sisi pemasaran di dalam negeri, akibatnya pertahanan pun mudah kandas.

Sebagian besar responden memahami bahwa berlakunya MEA berarti bahwa setiap barang dan jasa bebas keluar masuk antar negara di Asean. Secara implicit responden berpendapat bahwa keberadaan MEA tentu menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa yang diberikan. Karena secara langsung akan dihadapkan dengan pasar yang lebih luas dari sebelumnya. Tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan supaya dapat tetap bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar.

Pemahaman yang baik akan MEA dengan segala konsekuensinya membuat UMKM segera membuat strategi bisnis usaha supaya tetap eksis. Secara generik, strategi bisnis yang diterapkan oleh para UMKM adalah memperbaiki kualitas produknya supaya lebih bersaing. Langkah untuk memperbaiki produk mereka yang dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh dinas secara gratis ataupun mereka membayar sendiri. Informasi juga merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan di MEA. Para UMKM berusaha mencari informasi terkait dengan bisnis yang mereka jalani. Misalnya informasi mengenai trend, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Strategi lainnya adalah mengusahakan standarisasi produk dengan mengurus SNI, seperti yang dinyatakan oleh salah satu responden berikut.

Hartini _Bandeng Presto Mina Makmur:

Omzet usaha mikro kecil dan menengah perikanan milik Hartini Darmono mengalami peningkatan setelah menerapkan standar nasional Indonesia dan mencantumkan tanda SNI pada olahan bandeng prestonya. "Yang pasti omzet meningkat setelah saya menerapkan dan mencantumkan tanda SNI pada kemasan olahan bandeng presto,". Ia menjelaskan bahwa menerapkan SNI, jumlah produksi olahan bandeng presto meningkat dari 200 kilogram per hari menjadi 400-500 kg/hari. Ia mengaku harus berjuang dalam mengurus sertifikasi SNI

untuk usaha dagangnya yang akhirnya diterbitkan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan pada Januari 2014 dengan nomor SNI 4106-2009 dan nomor sertifikat 03/BP/LSPPro-HP/I/2014.

"Saya mengurus sertifikasi SNI sejak 2012 dan ada sekitar 30 persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh sertifikat SNI diantaranya adalah perbaikan fisik tempat dan alat produksi, serta standar kebersihan."

Strategi bisnis lainnya yang kebanyakan dilakukan oleh UMKM adalah memperluas pemasaran dengan memanfaatkan social media seperti facebook, BBM, instagram dan blog. Sekaligus dengan menggunakan teknologi informasi, para UMKM dapat memantau selera konsumen, dan membangun networking. Berikut adalah strategi yang dijalankan UMKM dalam menghadapi MEA.

Tabel 4. Strategi Bisnis UMKM Menghadapi MEA

Strategi yang dilakukan	Persentase
• Mengikuti berbagai pelatihan	65.00%
• Mengikuti informasi	90.00%
• Menjaga kualitas produk	100.00%
• Memperluas pemasaran	75.00%
• Memanfaatkan social media	60.00%
• Mengurus standarisasi produk	25.00%
• Membangun networking	75.00%
• Terus mengikuti selera pasar	80.00%
• Berinovasi terus menerus	65.00 %

Sumber :data primer, 2016

Para pelaku UMKM Kota Semarang telah menyadari bahwa bersaing dalam pasar MEA harus lebih keras daripada sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, UMKM telah melakukan strategi-strategi untuk menghadapi MEA. Satu yang dianggap mendesak bagi UMKM adalah meningkatkan kemampuan SDM dan melakukan standarisasi produk. Hal ini dilakukan dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang atau lembaga-lembaga pelatihan lainnya. Bahkan mereka tidak keberatan jika harus membayar, asal mendapat ilmu, seperti dinyatakan salah satu responden berikut.

Greenesia (Produsen bed cover, sprei dan lain-lain)

“ Persaingan MEA tidak harus ditakuti...saya optimis produk kita punya kualitas yang baik. Tapi memang kita harus kreatif....supaya kreatif kita harus trampil dan banyak pengetahuan. Tidak hanya saya sebagai pengusaha..tapi lebih-lebih karyawan saya harus terampil dan semakin kreatif. Makanya saya suka ikut pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan lain-lain.....Ikut pelatihan membuat saya memiliki ide-ide baru, pengetahuan baru dan ketrampilan baru. Saya suka ikut pelatihan yang berkaitan dengan branding, marketing dan lain-lain . Sekarang saya baru berusaha mengurus segala sesuatu , termasuk SNI, supaya produk saya tetap diterima dimanapun .“

Bapak Very, owner Papa Bear

“ Sebagai pelaku usaha yang masih tahap merintis saya dihadapkan pada tantangan yang berat , yaitu MEA ini. Produk saya adalah minuman yang saingannya di tingkat local saja sudah sangat tinggi, apalagi MEA. Tapi saya tahu kalau, pengusaha itu tugasnya adalah berstrategi. Strategi saya sederhana, saya harus mampu membuat minuman coklat yang lain dari pada yang lain. Ya rasanya, kemasannya . Selain meningkatkan kemampuan dan ketrampilan agar bisa meningkatkan produk yang berkualitas , saya berusaha membangun networking yang sebanyak-banyaknya. Menurut saya dengan saya punya networking yang luas, pemasaran produk saya juga semakin luas.”

Rini, sepatu bordir :

“Strategi menghadapi MEA ini ya saya harus lebih kreatif dalam membuat desain sepatu saya. Sekarang ini saingan sepatu dari luar begitu banyak, lucu-lucu..harganya murah. Harga sepatu border saya tidak semurah sepatu-sepatu dari luar karena ada unsure handmade-nya...ada kesan eksklusif...satu sepatu border pasti tidak ada kembarannya. Supaya menarik saya terus berusaha mencoba desain-desain yang kreatif, hanya kadang-kadang terkendala bahan dan peralatan, mesin saya masih sederhana. Saya butuh mesin yang lebih canggih untuk bisa membuat desain sepatu yang lebih menarik. Semoga pemerintah bisa memfasilitasi UMKM yang membutuhkan peralatan untuk produksinya.”

Pernyataan-pernyataan pelaku UMKM di atas mewakili para pelaku UMKM lainnya yang rata-rata menyatakan bahwa mereka harus kreatif agar dapat membuat produk yang berkualitas, menarik dan memenuhi selera pasar. Para pelaku UMKM menyadari juga harus banyak mencari mitra atau partner untuk dapat berkembang lebih maju. Bermitra

sebanyak-banyaknya mereka sadari adalah berarti membangun networking yang akan saling menguntungkan satu sama lain. Networking yang penting adalah juga dengan pihak pemerintah terutama Dinas perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM yang diharapkan mampu memfasilitasi para UMKM dalam akses permodalan, akses pemasaran khususnya fasilitas pameran, dan berbagai pelatihan yang mendukung usaha mereka.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang aktif dalam meningkatkan daya saing UMKM. Berdasarkan indepth interview dengan dinas koperasi dan UMKM Kota Semarang, beberapa langkah strategis telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menyiapkan UMKM menghadapi MEA. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu diperkuat agar tetap mampu bertahan dan bersaing. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building, dan pengembangan information technology (IT).

Berikut pernyataan dari Bapak Yoga dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang:

“ Langkah yang diambil Pemerintah Kota Semarang dalam menyiapkan UMKM menghadapi MEA adalah terus mengadakan sosialisasi MEA kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kami memberi dorongan pada UMKM untuk segera mensertifikasi produk dengan sertifikat halal, HKI, dan standar mutu yang lain. Kami selalu memprovokasi pelaku UMKM bahwa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN harus diantisipasi dengan meningkatkan kualitas produk dan mensertifikasikan dengan standar mutu agar produk yang dihasilkan semakin berdaya saing. Selain itu, dengan membuat produk yang berkualitas serta harga sesuai dengan kualitas, pasti produk akan lebih bisa bersaing dengan produk dari negara ASEAN lainnya. Seluruh Dinas Koperasi dan UMKM se-Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat UMKM melalui cara-cara berikut, diantaranya dengan penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan, meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM, meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM, Meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKM dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN). “

Penutup

Berdasarkan analisis kualitatif atas hasil observasi dan in-depth interview terhadap pelaku UMKM mengenai strategi bisnis dalam menghadapi persaingan MEA dapat disimpulkan bahwa secara fenomenologis sebagian besar UMKM di Kota Semarang telah memahami mengenai berlakunya MEA, hanya konsekuensi dari MEA yang belum begitu dipahami. Para pelaku UMKM sadar dan siap dengan persaingan MEA. Strategi bisnis yang dipilih oleh UMKM adalah strategi bisnis yang memprioritaskan peningkatan kualitas. Meskipun strategi bisnis tersebut masih diimplementasikan secara generik seperti seperti meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan social media untuk memperluas pasar dan membangun networking. Berlakunya MEA setidaknya sudah dijadikan oleh para pelaku UMKM sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas produknya. Berlakunya MEA belum ditangkap sebagai peluang yang besar oleh para UMKM di Kota Semarang, oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM harus diarahkan untuk mendorong para pelaku UMKM dapat mengimplementasikan strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing produk-produknya di persaingan MEA.

Daftar Pustaka

- Arifin, Sjamsul, Rizal A. Djafaara, dan Aida S. Budiman. 2013. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global. Gramedia. Jakarta. Aritonang, Indah.
- Budiman, Aida S, 2008, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global.
- Bisnis.com. 2014. Hadapi MEA, Semarang Jagokan Mebel dan Fesyen.
- Berita Dunia Net, 2015. Pemahaman Masyarakat Soal MEA Masih Rendah.
- Hidayat, Agus Syarif. 2008. AEC: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia
- Humas LIPI. 2015. Masyarakat Belum Siap Menghadapi MEA, Desember 2015
- Sugiyono, 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung
- Suara Merdeka, Syahrul. 2013. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Pasar Potensi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- www.asean.org

- Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif , CV.Alvabeta, Bandung
- Sukardi,2009, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Reemaja Rosdakarya, Bandung
- Porter, Michael, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, 1980.
- Yang, Mu-Jeung, 2014. “Business Strategy, Competition and Aggregate Productivity,” in progress, University of Washington, 2014.
- Yang, Mu-Jeung et.all. 2015. “Business Strategy and Management of Firms Competition and Aggregate Productivity,” in progress, University of Washington.

VOLATILITAS DI PASAR SAHAM DAN PASAR VALUTA

Agung Nusantara dan Sri Nawatmi

Surel: nusantara@edu.unisbank.ac.id, nawatmi@edu.unisbank.ac.id
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas STIKUBANK Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana keterbukaan ekonomi mempengaruhi stabilitas pasar modal dan pasar valas. Alat analisis yang digunakan adalah tehnik GARCH dan EGARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan harga saham dan harga valas terdeteksi memiliki gerakan yang volatile sehingga penerapan mean menjadi tidak relevan. Volatilitas pasar modal cenderung rendah. Informasi pasar valas memiliki peran penting terhadap volatilitas di pasar modal. Volatilitas di pasar modal dan pasar valas cenderung didominasi oleh peran dari bad news.

Kata kunci: *Volatilitas, pasar modal, pasar valuta, GARCH dan EGARCH*

Pendahuluan

Pasar valuta dan pasar saham merupakan lembaga ekonomi yang dapat dianggap sebagai pintu masuk pengaruh perekonomian luar negeri. Keterbukaan ekonomi dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang memaksa pemerintah lebih memilih kebijakan ekonomi luar negeri yang lebih terbuka. Dan kebijakan mengenai sistem nilai tukar yang terbuka terhadap pasar dunia menjadi semakin sulit untuk dihindari. Kebijakan keterbukaan perekonomian tersebut ditempuh seiring dengan argumentasi mendorong minat asing untuk investasi di Indonesia.

Kebutuhan investasi di Indonesia sangat tinggi, mengingat status Indonesia sebagai negara sedang berkembang. Kebutuhan investasi domestik lebih besar daripada kemampuan tabungan nasional. Sehingga pembiayaan pembangunan memerlukan peran dana dari luar negeri. Fenomena Saving-Investment Gap inilah yang membuat argumentasi keterbukaan menjadi relevan. Untuk mendorong partisipasi asing dalam perekonomian Indonesia, maka dibukalah kebijakan yang pro-pasar tentang pasar saham.

Derajat keterbukaan pasar saham dapat diidentifikasi dari persentase kepemilikan saham oleh investor asing. Tercatat kepemilikan investor asing semakin meningkat. Pada tahun 2005 ketika perekonomian global mengalami gejolak, pasar saham Indonesia juga terkena dampaknya. Kinerja emiten yang menurun diduga sebagai faktor penyebab

penting menurunnya peran asing. Namun demikian, secara keseluruhan, kepemilikan investor asing masih mendominasi.

Semakin banyaknya investor asing yang terlibat di pasar saham Indonesia maka pengaruh perekonomian luar negeri akan semakin kuat. Pengaruh dana asing melalui pasar saham dalam rangka menutupi celah tabungan-investasi akan semakin kuat. Dampak lanjutannya adalah pergerakan harga domestik akan sangat sensitive terhadap pergerakan harga internasional.

Tabel 1: Kepemilikan Asing dan Domestik di Pasar Saham Indonesia

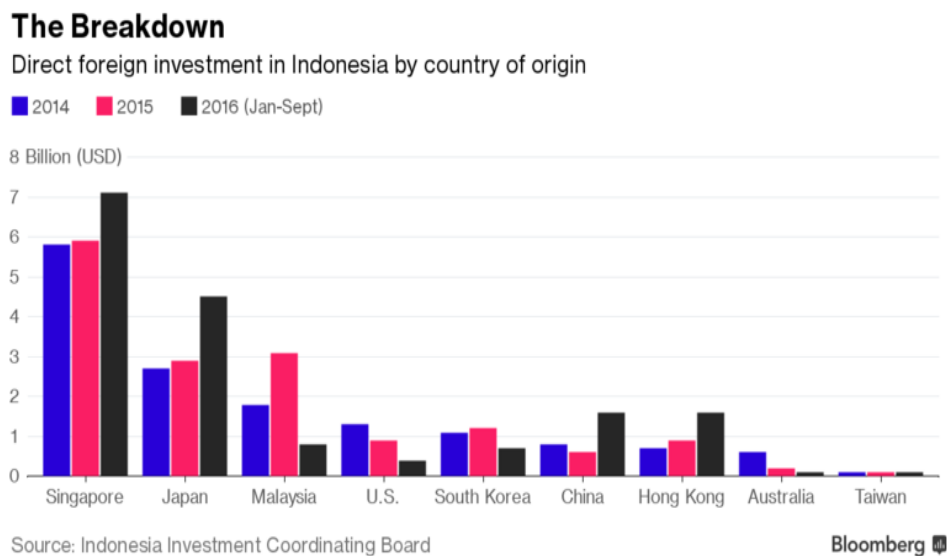
	2011 ¹	Juli-2012 ²	Jul-2013 ²	Des-2014 ³	Des-2015 ¹
Asing	58%	59%	57%	65%	63%
Domestik	36%	41%	43%	35%	36%

Sumber:

1. www.marketbisnis.com
2. www.KSEI.co.id
3. www.indopremier.com

Mendasarkan diri pada kondisi pasar saham yang semakin terintegrasi, peneliti banyak mencurahkan perhatiannya pada interaksi berbagai pasar saham secara internasional (*cross-country*), baik dalam perspektif jangka panjang maupun jangka pendek. Banyak diantara peneliti yang hanya mencermati aspek hubungan kausalitas return saham atau menghubungkannya dengan efek volatilitas harga saham. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan penting yang memperkaya teori-teori sebelumnya. Misalnya, teori tentang *Capital Assets Pricing model* (CAPM) yang menegaskan bahwa risiko pasar dari asset tidak dapat diabaikan sehingga investasi sudah selayaknya didiversifikasi. Kedua, dalam situasi pasar yang turbulenta masih dimungkinkan memperoleh profit. Ketiga, informasi mengenai limpahan volatilitas (*volatility spillover*) dapat membantu memberikan pilihan harga dan mengoptimalkan portofolio. Dan dalam situasi krisis, pemahaman *volatility spillover* mampu menghasilkan berbagai alternative strategi hedging. Dan pada akhirnya, pemahaman mengenai *volatility spillover* dapat membantu memonitor potensi financial contagion dan aliran investasi serta membuat regulasi yang efektif untuk kestabilan sistem keuangan internasional

Pertimbangan lain yang mendorong munculnya ide penelitian ini adalah berangkat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan hubungan ekonomi Indonesia-China yang semakin meningkat. Bappenas (2011) mengidentifikasi bahwa perkembangan ekonomi di China akan lebih kuat pengaruhnya daripada perekonomian di Uni-Eropa maupun Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia. Demikian pula temuan Subagyo and Nusantara (2016) menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia lebih mengarah pergerakannya terhadap pasar saham China daripada beberapa pasar saham kuat dunia (Nikkei, FTSE-100, SGX, maupun NASDAQ). Perlu diketahui bahwa perkembangan hubungan ekonomi Indonesia-China semakin menguat. Secara makro, investasi China ke Indonesia dalam bentuk foreign direct investment meningkat sejak 2015-2016 (*Bloomberg, 2016*).



Gambar 1: Perkembangan FDI di Indonesia berdasarkan negara asal

Terkait dengan fenomena tersebut, maka penelitian ini akan mengamati hubungan antara volatilitas yang terjadi di pasar saham Indonesia (JKSE dan LQ45) dan pasar valuta (Rp/USD dan Rp/CNY) serta mengamati bagaimana pengaruh volatility spillover keduanya. Secara umum pendekatan yang populer digunakan dalam kajian transmisi return saham dan volatility spillover antar pasar adalah: kajian korelasi, *Vector Autoregressive (VAR)*, dan berbagai alternative penerapan *Autoregressive Conditional*

Heteroschedasticity (ARCH). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *General ARCH*, *Exponential GARCH* dan *Johansen's Cointegration*. Penerapan konsep ARCH yang berbeda agar dapat mengidentifikasi perbedaan *volatility spillover* antara bad news dan good news.

Permasalahan

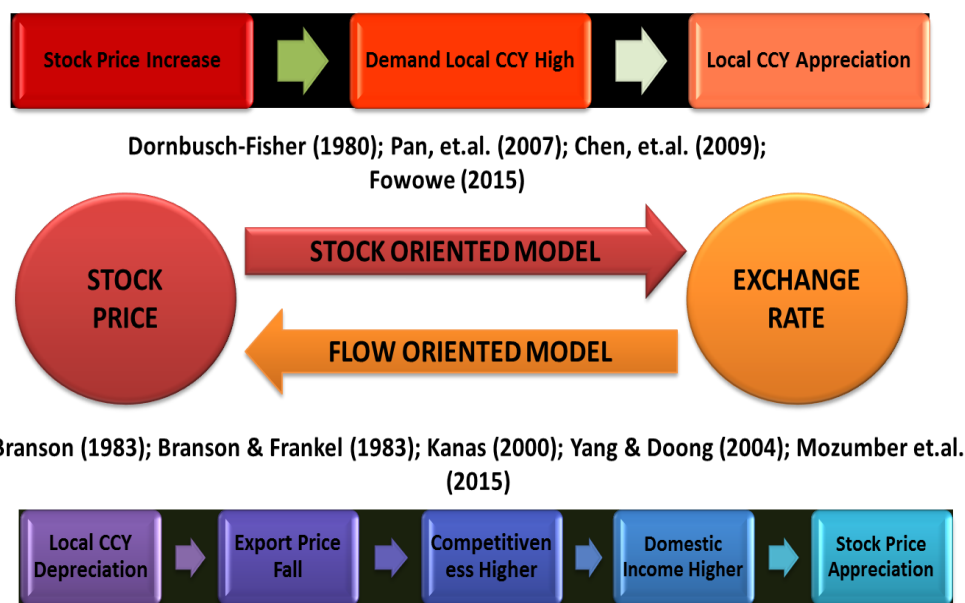
Perekonomian Indonesia yang masuk dalam kategori perekonomian terbuka yang sedang berkembang (*small open economy*), yang salah satu cirinya adalah memiliki keterbukaan dengan ekonomi global, maka pengaruh gejolak harga ekonomi dunia menjadi penting untuk diperhatikan. Adanya fenomena *saving-gap investment*, maka pengembangan pasar saham menjadi sangat penting. Namun demikian, perlu dicermati bagaimana dampak pergerakan harga pada *small open economy* terhadap pergerakan pasar saham. Pergerakan harga pada *small open economy* akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai tukar sebagai refleksi pergerakan perekonomian internasional.

Maka permasalahan penting yang terkait dengan pasar saham sebagai institusi penyedia investasi dan pasar valuta sebagai refleksi pergerakan harga internasional adalah mengidentifikasi fenomena *volatility spillover* di kedua pasar tersebut.

Kajian Pustaka

Basis teori mengenai hubungan antara pasar valuta dengan pasar saham bersumber pada dua teori utama, yaitu *Flow-Oriented Model* yang dikembangkan oleh Dornbusch and Fisher (1980), dan *Stock-Oriented Model* yang dikembangkan oleh Branson (1983), Frankel (1983), serta Branson and Henderson (1985). *Flow-Oriented Model* menyatakan bahwa nilai tukar dapat digunakan untuk mengukur derajat kompetisi perekonomian. Sehingga nilai tukar dapat dianggap sebagai ukuran tingkat kompetisi internasional. Mata uang yang terdepresiasi merupakan indikasi menurunnya tingkat kompetisi negara tersebut. Penurunan tingkat kompetisi negara tersebut akan berakibat pada peningkatan impor. Penurunan tingkat kompetisi ini dapat diatasi dengan peningkatan investasi. Sehingga FOM menyatakan adanya hubungan positif antara nilai tukar dengan, peningkatan nilai tukar dapat dicapai melalui peningkatan investasi, khususnya melalui pasar saham.

Jika konsep FOM mengarah pada nilai tukar, maka konsep Stock-Oriented Model (SOM) mengarah pada peran investasi dari pasar saham. Nilai tukar, mengikuti konsep SOM, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran foreign financial asset). Apabila investasi mengalami peningkatan, maka permintaan domestik akan menguat yang membawa dampak pada penguatan nilai tukar. Kedua model tersebut menyatakan bahwa aliran dana dari luar akan berpotensi menciptakan *shock* dan memungkinkan terjadinya efek limpahan volatilitas antara saham dan nilai tukar.



Gambar 2: Stock-Oriented Model vs Flow-Oriented Model

Bidang kajian financial econometrics merupakan wilayah kajian yang sangat populer, bukan hanya terkait dengan obyek amatan pasar saham dan pasar valuta, namun sudah merambah ke wilayah kajian lain di bidang ekonomika. Secara hampir bersamaan, Engle dan Hansen, pada tahun 1982 mempublikasikan topik serupa, yaitu inflasi di Inggris (Bollerslev, 2000). Engle melakukan kajian inflasi dengan memperkenalkan teknik ARCH, sedangkan Hansen mengkajinya secara teori murni dengan mengandalkan teknik *General Method of Moment* (GMM). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mengestimasi *time varying term premia* dan *asset pricing model* untuk konsumsi.

Jika GMM mengarahkan estimasi pada *the first distribution free estimation framework* untuk tipe data *non-linear moment conditions* yang sering ditemukan pada kondisi keseimbangan parsial, maka ARCH dari Engle menawarkan pendekatan *time-varying varianced and co-variance*. Pendekatan ARCH dari Engle berdasarkan pemahaman tentang *heteroscedasticity* sebagai *unequal variances of a set of random variables*. Popularitas pendekatan ARCH mendorong beberapa penulis menguji dan mengembangkannya untuk pasar saham. Tercatat sebagai pengembang awal teknik ARCH adalah Bollerslev (1986) dan Nelson (1991).

Pada dasarnya volatilitas nilai tukar dipengaruhi oleh hubungan ekonomi antar negara (Morana, 2007). Jika hubungan antar negara bersifat terbuka, terdapat kecenderungan menurunkan volatilitas. Namun volatilitas tidak dapat dihilangkan dengan cara memainkan perekonomian secara terbuka sempurna. Volatilitas tetap ada terutama yang bersifat sistemik. Fakta tersebut dapat ditemui pada perekonomian negara G7 yang tetap menunjukkan volatilitas namun dalam skala yang lebih rendah.

Terkait dengan dampak volatilitas nilai tukar terhadap aktifitas perekonomian, Thorbecke (2008) menyimpulkan bahwa volatilitas nilai tukar mengakibatkan penurunan aktifitas ekonomi di lintas negara melalui menurunnya aliran komponen elektronik di Asia Timur, yang selanjutnya akan mempengaruhi struktur investasi negara-negara tersebut. Kesimpulan serupa ditemui oleh Yoshitomi (2007) yang menyatakan bahwa volatilitas mampu menciptakan fragmentasi perdagangan lintas negara. Kristinsson (2014), memiliki peran penting dalam menggambarkan derajat kompetisi dan investasi suatu negara. Secara spesifik tesis tersebut juga menunjukkan bahwa di Brazil dan Mexico volatility spillover sangat kuat fenomenanya pada hubungan antara pasar saham dengan pasar valuta. Sehingga terdapat kesimpulan bahwa spillover akan berdampak pada risiko diversifikasi portofolio internasional yang dapat menurunkan keuntungan investor asing.

Priyono and Bustaman (2014) dalam risetnya tentang pasar saham di Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap harga saham pada current period, namun pada previous period (lag 2) pengaruh tersebut menghilang. Dalam skala yang lebih luas, Ehrmann, Fratzscher, dan Rigobon (2005) menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara volatility spillover exchange rate dan stock prices melalui terbuktinya secara statistik bahwa harga aset

domestik juga mengalami reaksi yang kuat terhadap harga asset luar negeri. Kekuatan reaksi tersebut akan semakin kuat pada masa resesi.

Metode Penelitian

Penelitian ini meng-investigasi hubungan yang bersifat dinamis antara pasar saham dan pasar valuta di Indonesia dalam rentang waktu 2 Januari 2015 – 30 Desember 2016. Periode sampel ini dipilih dengan tujuan ingin mendapatkan gambaran keterkaitan dua pasar makro tersebut dalam periode yang relatif normal, dalam artian tidak banyak gangguan yang bersifat eksternal.

Metode statistik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: uji unit root, uji co-integration, dan model General ARCH (GARCH) dan Exponential General ARCH (EGARCH). Penerapan uji unit root untuk setiap variabel (JKSE, LQ45, IDR/USD, dan IDR/CNY) didasarkan atas kebutuhan kajian yang bersifat dinamis. Model co-integration akan menguji eksistensi hubungan jangka panjang antara dua variabel pasar makro tersebut, sedangkan GARCH dan E-GARCH akan mengukur volatilitas pasar saham dan pasar saham, serta mengidentifikasi efek bad news maupun good news.

Unit Root dan Co-integration. Stasionaritas data time series seringkali menjadi sasaran yang ditunjuk sebagai penyebab ketidak-akuratan dalam mengestimasi parameter dan model. Data time series seringkali, bukan hanya faktor kondisi data observasi yang sebenarnya (otentik) yang memungkinkan ketidak-akuratan estimasi, namun juga karena faktor lag atau autoregressive dan time trend. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}E[X_t] &= \mu_t = \mu, \\Var(X_t) &= \sigma_t^2 = \sigma^2, \\Cov(X_t, X_{t-s}) &= E[(X_t - \mu_t)(X_{t-s} - \mu_{t-s})] = \sigma_{t,t-s} = \sigma_{|s|}, \\Corr(X_t, X_{t-s}) &= \frac{\sigma_{t,t-s}}{\sigma^2} = \rho_{t,t-s}.\end{aligned}$$

Sepanjang data time series mengandung sifat stochastic atau deterministic trend, atau keduanya, maka diperlukan pengujian stasionaritas (unit root test)

Augmented Dickey-Fuller. Metode unit root ADF memiliki tiga kondisi yang akan diuji, yaitu: kondisi autoregressive saja (None), autoregressive dengan konstanta (Constant), dan autoregressive, konstanta dan tren linier (Trend).

1. None: $\Delta y_t = \varphi^* y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \varphi^* \Delta y_{t-1} + u_t$
2. Constant: $\Delta y_t = \beta_0 + \varphi^* y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \varphi^* \Delta y_{t-1} + u_t$
3. Trend: $\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varphi^* y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \varphi^* \Delta y_{t-1} + u_t$

Pengambilan keputusan didasarkan atas hipotesis:

$$H_0: \varphi^* = 0; \text{ Non-stationary}$$

$$H_a: \varphi^* < 0; \text{ Stationary}$$

Metode ADF merupakan metode yang standar digunakan dalam pengujian stasioneritas variabel. Hasil pengujian ADF sering dikritik memiliki kemampuan pengujian yang rendah. Untuk memperkuat kesimpulan identifikasi stasioner variabel maka pengujian stasioner variabel ADF akan dikombinasikan dengan metode *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin* (KPSS).

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin. Metode KPSS sering diajukan sebagai metode pelengkap bagi ADF. KPSS menggunakan pengujian *Lagrange Multiplier* (LM). Pengujian KPSS dimulai dengan membangun persamaan sebagai berikut:

$$X_t = A'D_t + Y_t + \varepsilon_t$$

$$Y_t = Y_{t-1} + \alpha_t$$

Dimana Y_t merupakan variabel yang bersifat random walk sempurna dengan variansi inovasi σ_α^2 , $\alpha_t \sim WN(0, \sigma_\alpha^2)$ dan ε_t merupakan proses stasioneritas; A' merupakan vektor koefisien yang ditranspose dari faktor trend deterministik D_t yang dihasilkan model. Pengujian LM dilakukan melalui:

$$LM = T^{-2} \sum_{i=1}^T \frac{S_i^2}{\hat{\sigma}_\varepsilon^2};$$

dimana $S_t = \sum_{s=1}^t \varepsilon_s$; dan $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$ merupakan estimasi variansi error dari regresi.

$$y_t = \alpha + \varepsilon_t; \text{ atau } y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$$

Hipotesis nol KPSS didasarkan atas: $H_0: \sigma_\alpha^2 = 0$ yang membawa implikasi Y_t bukan lagi merupakan proses random walk, tapi lebih berupa besaran konstan. Terkait dengan X_t yang menjadi stasioner karena proses stasioner.

Engle-Granger's Co-integration. Pengujian estimasi *Engle-Granger* untuk lag p dibangun atas dasar model sebagai berikut:

$$\Delta \hat{u}_{1t} = (\rho - 1)\hat{u}_{1t-1} + \sum_{j=1}^p \delta_j \Delta \hat{u}_{1t-j} + v_t$$

Mengacu pada dua standar ADF test, satu uji statistik didasarkan atas uji t dengan hipotesis nol nonstationarity ($\rho = 1$) dan di sisi lain menggunakan dasar pengujian normalized autocorrelation coefficient ($\hat{\rho} - 1$).

$$\hat{\tau} = \frac{\hat{\rho} - 1}{se(\hat{\rho})}$$

$$\hat{z} = \frac{T(\hat{\rho} - 1)}{\left(1 - \sum_j \hat{\delta}_j\right)}$$

Dimana $se(\hat{\rho})$ merupakan standard error dari estimasi OLS:

$$se(\hat{\rho}) = \hat{s}_v \left(\sum_t \hat{u}_{1t-1}^2 \right)^{-1/2}$$

Metode GARCH (p,q) dan EGARCH (p,q). Proses *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (ARCH) seringkali digunakan sebagai cara untuk me-modelkan *time varying risk*. Pemodelan tersebut dapat mengidentifikasi faktor risiko yang terkait dengan waktu, yang pada umumnya terjadi di pasar uang maupun pasar saham. Proses ARCH bukan hanya sebuah pendekatan yang mengidentifikasi volatilitas, namun juga mampu mengidentifikasi spillover effect pasar makro maupun mengidentifikasi dampak informasi atau inovasi terhadap volatilitas pasar.

Model dasar ARCH pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu conditional mean equation dan conditional variance equation. Kedua model tersebut harus diestimasi secara simultan. Secara umum proses ARCH(q) dapat dirumuskan:

$$y_t = E\{y_t | I_t\} + \varepsilon_t ; \text{ mean process dimana: } \varepsilon_t \sim D(0, h_t)$$

$$\text{dan } h_t = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 \dots \dots \dots \text{ Proses variansi ARCH(q)}$$

Model ARCH melibatkan proses *autoregressive* (AR) dan *moving average* (MA) yang disatukan menjadi ARMA. Proses ini membawa konsekuensi diperlukannya proses waktu yang panjang. Karena permasalahan tersebut maka dikembangkan model yang lebih ringkas dari sisi penggunaan waktu, yaitu *Generalized ARCH* (GARCH).

Model GARCH(p,q) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-1}^2 + \sum_{i=1}^p \beta_i h_{t-1}$$

Jika tidak terdapat efek ARCH maupun GARCH maka $\alpha_i ; \beta_i = 0$; penjumlahan $[\sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-1}^2 + \sum_{i=1}^p \beta_i h_{t-1}]$ menggambarkan solusi GARCH jangka panjang, dan jika hasil penjumlahan sama dengan 1 maka masuk dalam kategori *Integrated* GARCH (IGARCH) .

Exponential GARCH (EGARCH) merupakan model transformasi logaritmik, memiliki reaksi, yaitu: perbedaan reaksi volatilitas antara negative shocks dan positive shocks. Upaya membandingkan residual individual dengan rata-rata bisa diperoleh indikasi tanda dari shocks, baik negative maupun positive. Implikasi proses EGARCH yang menerapkan bentuk logaritmik, yaitu: parameter memiliki tanda positive. Maka model ini menerapkan dasar informasi variansi agar tanda positive parameter terpenuhi. Implikasi kedua adalah EGARCH memiliki reaksi yang berbeda (*asymmetric effect*) dalam merespon negative shocks dan positive shocks. EGARCH (p,q) dapat dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut:

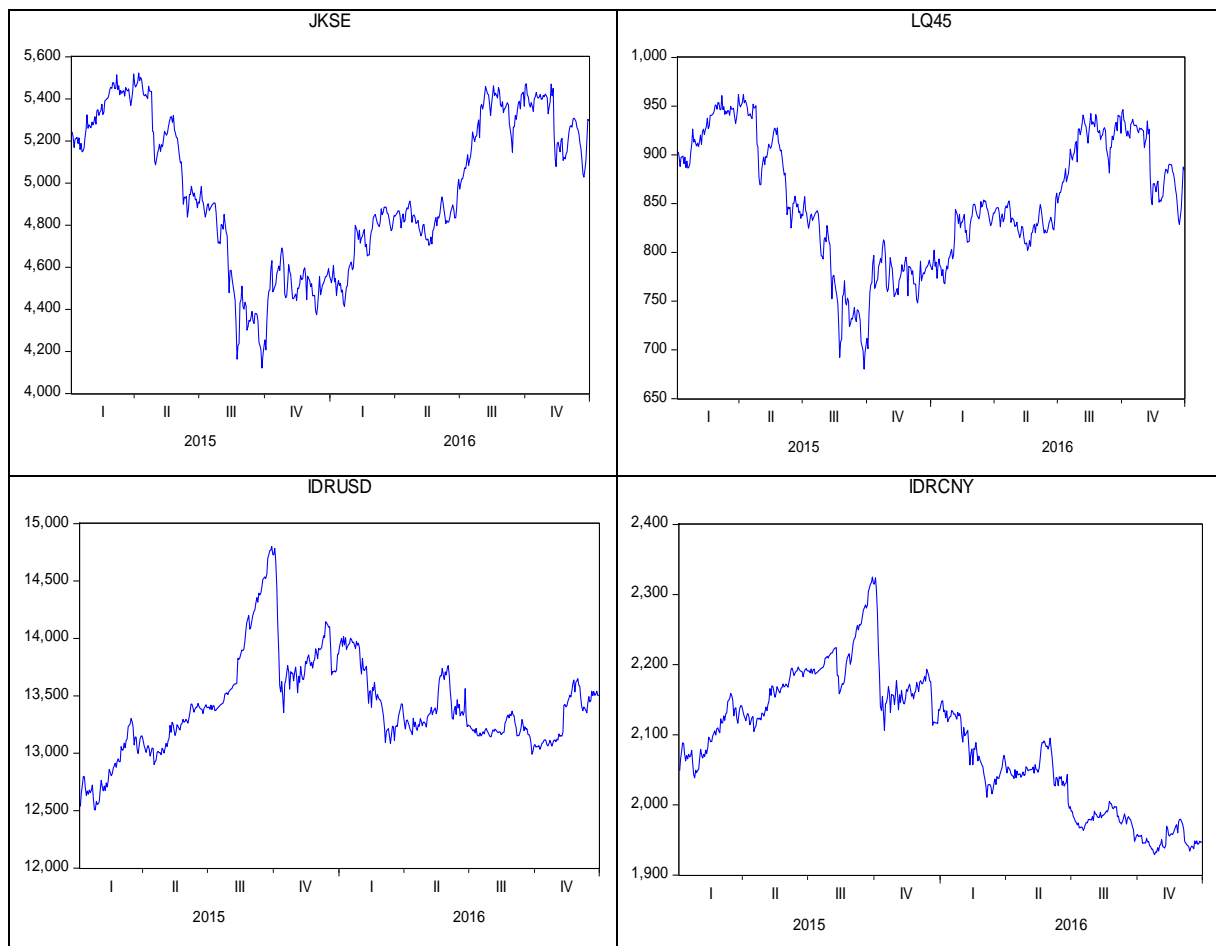
$$\log h_t = \omega + \sum_{i=1}^q [\theta_1 \varepsilon_{t-i} + \theta_2 (|\varepsilon_{t-i}| - E\{|\varepsilon_{t-i}|\})] + \sum_{i=1}^p \beta_i \log h_{t-i}$$

Output yang dihasilkan adalah dua parameter untuk dampak dari residual (ε). Pada model EGARCH (1,1) parameter pertama ($\theta_1 - \theta_2$) mengindikasikan respon positive shocks dalam ε_{t-1} . Dan parameter yang kedua ($\theta_1 + \theta_2$) berkaitan dengan nilai absolut yang mengindikasikan negative shocks ε_{t-1} .

Hasil dan Pembahasan

Alasan utama dibutuhkannya uji stasioneritas variabel adalah untuk mencegah terjadinya spurious regression dan mengidentifikasi fenomena jangka pendek yang

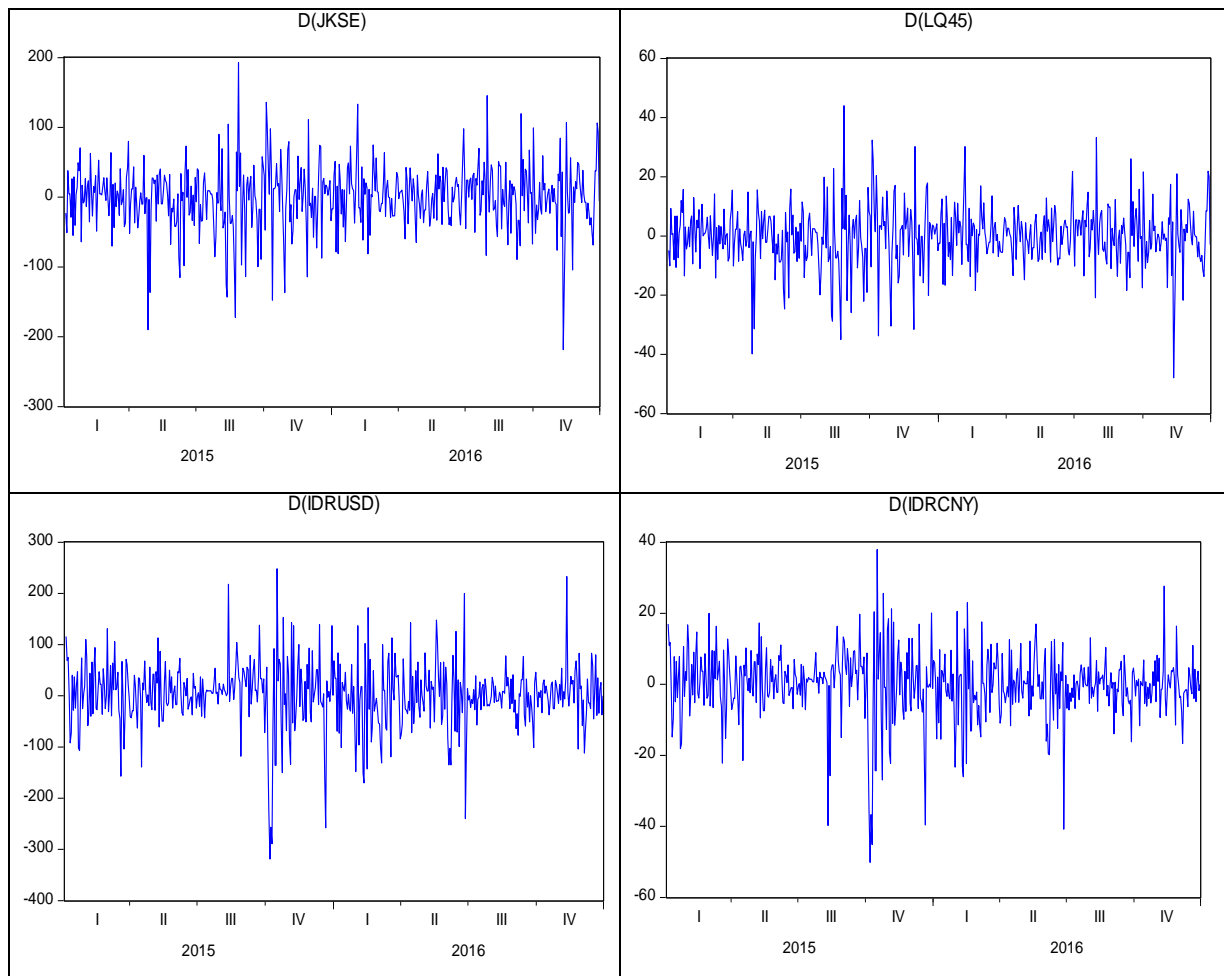
mungkin terjadi. Identifikasi stasioneritas variabel melalui unit root didasarkan atas distribusi data dari variabel yang digunakan, yaitu: JKSE, LQ45, Rp/USD, dan Rp/CNY. Distribusi dari data awal adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://finance.yahoo.com>

Gambar 3: Dinamika Harga Saham dan Harga Valuta

Gambar 3 menunjukkan semua variabel yang diamati memiliki distribusi yang bercirikan autoregressive dan heteroscedastic. Dikatakan autoregressive karena memiliki pola antar waktu dan terindikasi heteroskedastic karena gerakan naik-turunnya data relatif lebar. Jika variabel diubah bentuk menjadi derajat 1 atau perubahan variabel, maka akan terlihat pola seperti pada gambar 4



Sumber: <https://finance.yahoo.com>

Gambar 4: Dinamika Perubahan Harga Saham dan Harga Valuta

Gambar 4. menunjukkan fenomena autoregressive menghilang, namun masih terdapat indikasi heteroscedastic. Fenomena tersebut adalah fenomena yang biasa ditemui pada data keuangan time series.

Agar identifikasi lebih meyakinkan, maka dilakukan uji unit root. Hasilnya dapat dilihat pada table 2. berdasarkan uji unit root, baik dengan menggunakan metode ADF maupun KPSS, terlihat bahwa ada kecenderungan distribusi data untuk ke-empat variabel stasioner pada derajat satu – $I(1)$, yaitu bentuk deferensialnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel yang akan diterapkan dalam model adalah variabel diferensialnya.

Tabel 2: Hasil Pengujian Unit-Root Variabel JKSE, LQ45, IDRUSD, dan IDRCNY

	INDEKS HARGA SAHAM		NILAI TUKAR	
	D(JKSE)	D(LQ45)	D(IDRUSD)	D(IDRCNY)
Augmented Dickey-Fuller (ADF) – t Statistic				
Constant	-21.384	-21.661	-20.741	-20.987
Constant, Linear Trend	-21.399	-21.653	-20.743	-21.027
None	-21.404	-21.682	-20.749	-20.996
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) – LM Statistic				
Constant	0.232*	0.152*	0.137*	0.221*
Constant, Linear Trend	0.074*	0.075*	0.059*	0.058*

Keterangan: Uji Statistik tanpa tanda berarti signifikan
 *) tidak signifikan

Langkah berikutnya adalah menguji apakah pasangan variabel yang akan diestimasi terintegrasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model kointegrasi Engle-Granger. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah pasangan variabel yang akan digunakan, yaitu empat pasangan: $d(JKSE) - d(IDRUSD)$; $d(JKSE) - d(IDRCNY)$; $d(LQ45)-d(IDRUSD)$; $d(LQ45)-d(IDRCNY)$ menunjukkan arah menuju keseimbangan jangka panjang atau tidak. Apabila hubungan antara kedua variabel tersebut terintegrasi maka sekalipun terdapat pergerakan yang kuat dalam jangka pendek, namun tetap menuju pada keseimbangan dalam jangka panjang.

Hasil pengujian kointegrasi terhadap ke-empat pasangan variabel tersebut menunjukkan terkointegrasi pada derajat (1). Dengan demikian, pasangan variabel pada derajat (1) dapat diterapkan pada model analisis.

Tabel 3: Hasil Perhitungan Kointegrasi Pasar Saham dan Pasar Valuta

DEPENDENT	ENGLE-GRANGER'S CO-INTEGRATION	
	τ -STATISTIC	Z-STATISTIC
D(JKSE)	-22.356	-509.721
D(IDRUSD)	-21.687	-492.509
D(JKSE)	-21.796	-496.574
D(IDRCNY)	-21.433	-486.473
D(LQ45)	-22.529	-513.756
D(IDRUSD)	-21.575	-489.826
D(LQ45)	-22.135	-504.609
D(IDRCNY)	-21.447	-486.750

Tahap berikutnya adalah melakukan perhitungan terhadap empat pasang variabel tersebut dengan menggunakan pendekatan GARCH (1,1) dan EGARCH(1,1). Penetapan aspek autoregressive (1,1) semata-mata didasarkan alasan kesederhanaan model. Hasil perhitungan kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Perhitungan GARCH dan EGARCH Pasar Saham terhadap Pasar Valuta

KOEFSIEN	D(JKSE)- D(IDRUSD)		D(JKSE)- D(IDRCNY)		D(LQ45)- D(IDRUSD)		D(LQ45)- D(IDRCNY)	
	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH
C	383.79		381.25		17.287		16.705	
RESID(-1)^2	0.183		0.189		0.186		0.191	
GARCH (1,1)	0.642		0.642		0.655		0.661	
D(IDRUSD)	1.609				0.088			
D(IDRCNY)	-		4.565*				0.291*	
C(2)	-	1.301		1.187		0.673		0.634
C(3)	-	0.320		0.300		0.366		0.351
C(4)	-	-0.054*		-0.076		-0.047		-0.067*
C(5)	-	0.796		0.814		0.792		0.804
C(6)	-	0.001		0.002*		0.001		0.003*
DWR	1.876	1.875	1.876	1.876	1.902	1.902	1.902	1.901
ARCH Test	0.109*	0.010*	0.140*	0.047*	0.370*	0.033*	0.404*	0.064*

Keterangan: Koefisien tanpa tanda berarti signifikan
 *) tidak signifikan

Tabel 5: Perhitungan GARCH dan EGARCH Pasar Valuta terhadap Pasar Saham

KOEFSIEN	D(IDRUSD)- D(JKSE)		D(IDRCNY)- D(JKSE)		D(IDRUSD)- D(LQ45)		D(IDRCNY)- D(LQ45)	
	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH
C	2257.30		37.445		2282.44		37.261	
RESID(-1)^2	0.426		0.479		0.431		0.482	
GARCH (1,1)	0.005*		0.136		-0.006		0.136	
D(JKSE)	-9.735		-0.211					
D(LQ45)					-43.913		-0.924	
C(2)		3.017		1.714		3.175		1.757
C(3)		0.559		0.600		0.570		0.610
C(4)		-0.209		-0.173		-0.211		-0.169
C(5)		0.575		0.499		0.555		0.488
C(6)		-0.004		-0.003		-0.020		-0.016
DWR	1.801	1.804	1.825	1.827	1.801	1.804	1.825	1.827
ARCH Test	0.765*	1.940*	0.001*	0.078*	0.723*	1.772*	0.004*	0.061*

Keterangan: koefisien tanpa tanda berarti signifikan
 *) tidak signifikan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua model yang terbangun dari ke-empat pasang variabel tersebut, baik melalui pendekatan GARCH (1,1) maupun EGARCH (1,1), secara statistik tidak memiliki masalah, dalam pengertian tidak ada indikasi autoregressive dan heteroscedastic.

Dengan mengamati perbandingan dari kedua perhitungan, GARCH(1,1) dan EGARCH(1,1) maka terlihat bahwa kedua hasil perhitungan tersebut relatif serupa. Jika mengacu pada volatilitas yang dapat diidentifikasi dari kedua model tersebut maka dapat dibandingkan sebagai berikut:

Tabel 6: Perbandingan Identifikasi Volatilitas berdasarkan GARCH(1,1) dan EGARCH(1,1)

KOEFSISIEN	D(JKSE)- D(IDRUSD)		D(JKSE)- D(IDRCNY)		D(LQ45)- D(IDRUSD)		D(LQ45)- D(IDRCNY)	
	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH
RESID(-1)^2	0.183		0.189		0.186		0.191	
GARCH (1,1)	0.642		0.642		0.655		0.661	
C(3)	-	0.320		0.300		0.366		0.351
C(5)	-	0.796		0.814		0.792		0.804
KOEFSISIEN	D(IDRUSD)- D(JKSE)		D(IDRCNY)- D(JKSE)		D(IDRUSD)- D(LQ45)		D(IDRCNY)- D(LQ45)	
	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH	GARCH	EGARCH
RESID(-1)^2	0.426		0.479		0.431		0.482	
GARCH (1,1)	0.005*		0.136		-0.006		0.136	
C(3)		0.559		0.600		0.570		0.610
C(5)		0.575		0.499		0.555		0.488

Jika perhitungan didasarkan atas GARCH(1,1) maka volatilitas pasar saham adalah sebesar 0,183 yang masuk dalam kategori volatilitas rendah, sedangkan hasil perhitungan EGARCH(1,1) menunjukkan volatilitas terkategori rendah namun lebih tinggi daripada GARCH(1,1). Demikian pula dengan volatilitas LQ45. Namun jika hasil perhitungan diarahkan pada volatilitas pasar uang, baik IDR/USD maupun IDR/CNY terlihat hasil perhitungan keduanya tidak banyak berbeda, masuk dalam kategori sedang. Dengan kata lain, pasar valuta lebih fluktuatif daripada pasar saham, baik menurut perhitungan GARCH(1,1) maupun EGARCH(1,1). Fenomena tersebut memang serupa dengan kondisi riil yang ada. Dimana pergerakan harga valuta lebih cepat daripada harga saham, khususnya di perekonomian Indonesia. Secara umum, pendekatan EGARCH(1,1) lebih

baik daripada GARCH(1,1) jika dilihat dari sisi *Akaike Information Criterion* (AIC). Oleh sebab itu dalam kajian ini, lebih focus pada model EGARCH(1,1).

Koefisien C(3) pada EGARCH(1,1) menggambarkan tingkat volatilitasnya. Secara umum terlihat bahwa volatilitas pasar valuta lebih tinggi daripada volatilitas pasar saham. Dan antar pasar saham (JKSE dan LQ45) tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Demikian pula dengan pergerakan pasar Rupiah antara Rp/USD dan Rp/CNY. Namun dari sisi arah koefisien ada perbedaan antara pengaruh pasar valuta terhadap pasar saham, dan sebaliknya, terdapat perbedaan arah. Jika mengacu pada pergerakan pasar saham, maka pengaruh pasar valuta negative. Artinya jika terjadi depresiasi rupiah, baik terhadap USD maupun CNY, maka pasar saham, JKSE maupun LQ45, akan meningkat. Sebagai catatan: pengaruh nilai tukar Rp/CNY cenderung tidak signifikan. Diduga hal ini dikarenakan USD-lah yang banyak digunakan dan menjadi acuan resmi Rupiah. Dampak positif depresiasi Rp/USD terhadap volatilitas pasar saham mengindikasikan investor lebih mempertimbangkan aktivitas ekspor yang cenderung meningkat pada saat terjadi depresiasi Rupiah.

Namun yang terjadi di pasar valuta justru sebaliknya. Apabila terdapat peningkatan harga pasar saham maka pasar valuta akan mengalami apresiasi. Yang patut dicatat adalah sensitivitas pasar saham dalam ukuran LQ45 lebih tinggi daripada JKSE. Hal ini mendukung sinyalemen bahwa aktivitas perdagangan saham akan berbanding lurus dengan volatilitas. Jika dianalisis dari sisi respon pasar saham dan pasar valuta terhadap informasi pasar, maka terlihat bahwa semua pasar memiliki keserupaan, yaitu pengaruh berita buruk, bad news, lebih kuat dalam menciptakan volatilitas dibandingkan dengan good news. Fenomena tersebut lazim terjadi di pasar saham maupun pasar valuta.

Penutup

Keterbukaan ekonomi, yang tercermin dari aktivitas di perdagangan saham dan system nilai tukar yang dianut, akan memberikan dampak terhadap stabilitas pasar saham maupun pasar valuta. Dari hasil pengamatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergerakan harga saham dan harga valuta terdeteksi memiliki gerakan yang volatile sehingga penerapan mean menjadi tidak relevan. Dan model yang relevan adalah model variance.

2. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi volatilitas pasar saham dan pasar valuta. Volatilitas pasar saham cenderung kecil pada rentang waktu yang dipilih. Sedangkan volatilitas pasar valuta cenderung sedang. Hasil identifikasi tersebut sangat mungkin terjadi mengingat periode yang digunakan merupakan periode yang tidak memiliki gejolak yang secara ekonomis berarti.
3. Informasi dari pasar valuta (Rp/USD) memiliki peran yang signifikan terhadap volatilitas di pasar saham. Namun pergerakan nilai tukar Rp/CNY tidak berpengaruh positif dalam membentuk volatilitas pasar saham.
4. Volatilitas di pasar saham dan pasar valuta menunjukkan kecenderungan didominasi oleh peran bad news.

Daftar Pustaka

- Ahrens, R., and S. Reitz, (2003). Heterogenous Expectations in the Foreign Exchange Market Evidence from the Daily Dollar/DM Exchange Rate. *Centre for Financial Studies (CFS) Working Paper No. 2003/11*. https://www.ifk-cfs.de/fileadmin/downloads/publications/wp/03_11.pdf.
- Arfaoui, M. and A.B. Rejeb, (2015). Return Dynamics and Volatility Spillovers Between Forex and Stock Markets in MENA Countries: What to Remember for Portfolio Choice?. *International Journal of Management and Economics*, No. 46, April-June, p. 72-100.
- Arifin, J., and N. Syahrudin, (2008). Volatility Spillover between Equity and Currency Markets in ASEAN-5 Countries during Crises. www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2011/pdf/02_Arifin.pdf
- Bollerslev, T. (1986), A Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, *Journal of Econometrics*, 31, pp. 307–327. [http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076\(86\)90063-1](http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1)
- Bollerslev, T., (2000). Financial Econometrics: Past Developments and Future Challenges. *NBER Paper April (12)*. Department of Economics Duke University.
- Branson W. (1983) Macroeconomic Determinants of Real Exchange Rate Risk, in: R. Herring (Ed.), *Managing Foreign Exchange Risk*, MA: Cambridge University Press.
- Branson W.H., and Henderson D.W. (1985) The Specification and Influence of Assets Markets. In *Handbook of International Economics*, 2, Edited by R.W. Jones, P.B. Kenen, Amsterdam (Elsevier), pp. 749–805.
- Dornbusch R., and Fischer S. (1980) Exchange Rates and the Current Account, *American Economic Review*, 12, pp. 7–12. <http://www.jstor.org/stable/1805775>

- Ehrmann, M., M. Fratzscher, and R. Rigobon, (2005). Stocks, Bonds, Money Market and Exchange Rates: Measuring International Financial Transmission. *Working Paper Series* No. 452/ March 2005 European Central Bank.
- Engle R.F. (1982) Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation, *Econometrica*, 50, pp. 987–1008. <http://www.jstor.org/stable/1912773>
- Engle, R.F. and C.W.J. Granger, (1987). Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. *Econometrica*, 55: 251-76.
- Fowowe, B. (2015). The relationship between stock prices and exchange rates in South Africa and Nigeria : structural breaks analysis. *International Review of Applied Economics*, 29(1):1–14.
- Frankel J. (1983) Monetary and Portfolio Balance Models of Exchange Rate Determination, in: J. Bhandari, B.Putman (Eds), *Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates*, MA, MIT Press
- Kalu O., E., (2014). Volatility Transmission between Stock and Foreign Exchange Markets: Evidence from Nigeria. *Journal of Banking Financial Economics* 1(1): 59-72. www.wz.uw.edu.pl/.../3842-journal-of.../06JBFE112014EmenikeKalu.pdf
- Kanas A (2000) ‘Volatility spillovers between stock return and exchange rate changes: International evidence’, *Journal of Business Finance and Accounting*, 27(3-4), 447-467
- Kim, K., (1986). An Exchange Rate Determination by Portfolio Approach in Korea: Empirical Results. *Journal of International Economic Integration*, 1(2), Autumn: 194-208.
- Kristinsson, D., (2014). *Volatility Spillover between Stock Market and Exchange Rates: Evidence for North-and South America*. Theses, School of Economics and Management, Lund University, Sweden.
- Lütkepohl, H., (2007). Econometric Analysis with Vector Autoregressive Models. *EUI Working Paper ECO 2007/11*.
- Morana, C., (2007).Medium Term Macroeconomic Determinants of Exchange Rate Volatility. Paper was presented at the 48th *Riunione della Societa, Italiana degli Economisti*, Turin.
- Mozumder N, De Vita G, Kyaw K S and Larkin C (2015) ‘Exchange rate movements and firm value: Evidence from European firms across the financial crisis period’, *Journal of Economic Studies* [in press, ISSN 0144-3585].
- Nelson D B (1991) ‘Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach’, *Econometrica*, 59(2), 347-370
- Palakkod, S., (2012). Integration of Capital, Commodity and Currency Markets: A Study on Volatility Spillover. *The Romanian Economic Journal*. www.rejournal.eu/sites/rejournal.versatech.ro/files/articole/2012.../6palakkod.pdf

- Pan, M. S., Fok, R. C-W., and Liu, Y. A. (2007). Dynamic linkages between exchange rates and stock prices: Evidence from East Asian markets. *International Review of Economics and Finance*, 16, 503–520.
- Priyono, A.F. and A. Bustaman, (2014). Volatility Transmission between Exchange Rates and Stock Price in Indonesia Post 1997 Asia Crisis. *Working Paper in Economics and Development Studies*, No. 201404.
- Subagyo, H. and A. Nusantara, (2016). Co-Movement of The Indonesia Stock Exchange with The World's Major Stock Exchanges. *IJER*, 13 (8): 3719-3728.
- Thorbecke, W., (2008). The Effect of Exchange Rate Volatility on Fragmentation in East Asia: Evidence from the Electronic Industry. *RIETI Discussion Paper Service* 08-E-016. Tokyo.
- Yang, S. and Doong, S., (2004), 'Price and Volatility Spillovers between Stock Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from the G-7 Countries', *International Journal of Business and Economics*, Vol. 3, pp.139-153.
- Yoshitomi, M., (2007). Global Imbalance and East Asia Cooperation: in Chang and Eichengreen (ed.): *To World and East Asia Exchange Rate Regime*. Washington DC. Brooking Institutional Press: p. 22-48

**PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *ABNORMAL RETURN* DENGAN
EARNING PER SHARE (EPS) SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA
ISLAMIC INDEX PERIODE 2012 – 2016)**

Diana Puspitasari, Herwening Sindu Lestari, Zulaika Putri Rokhimah, dan Ardiani Ika S

dianapuspitasari887@yahoo.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang (USM)

ABSTRAK

Pasar efisien di uji dengan melihat return tidak wajar atau Abnormal Return yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati return tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama (Jogiyanto, 2010:579). Situasi ketidakpastian ini mendorong investor yang rasional untuk selalu mempertimbangkan risiko dan expected return setiap sekuritas yang secara teoritis berbanding lurus. Semakin besar expected return maka tingkat risiko yang melekat juga semakin besar. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan purposive sampling, dengan kriteria tertentu yaitu: 1) Tersedia laporan keuangan lengkap yang dipublikasikan selama periode penelitian; serta 2) Perusahaan yang konsisten berada di dalam daftar Jakarta Islamic Index (JII) dan tidak keluar dan masuk selama periode 2012 - 2016. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh laporan arus kas dan ukuran perusahaan terhadap Abnormal Return dengan Earning Per Share (EPS) sebagai variabel pemoderasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda (multiple linear regression) yang digunakan untuk menganalisis uji hipotesis penelitian dengan perantara uji interaksi MRA (Moderated Regression Analysis). Ditemukan hasil bahwa variabel EPS memoderasi hubungan variabel Arus Kas dari aktivitas investasi terhadap Abnormal Return.

Kata Kunci: *Komponen Arus Kas [arus kas operasi(AO), arus kas invetasi (AI), arus kas pendanaan (AP), Ukuran Perusahaan (SIZE), Earning Per Share (EPS), Abnormal Return, Jakarta Islamic Index*

Pendahuluan

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan oleh para investor yang bermuara pada *return* atau keuntungan yang didapatkan. Salah satu informasi yang diinginkan oleh investor adalah informasi mengenai harga saham, dimana harga suatu saham susah untuk diprediksi atau tidak dapat diperkirakan secara pasti pergerakannya. Semakin banyak orang yang membeli saham,

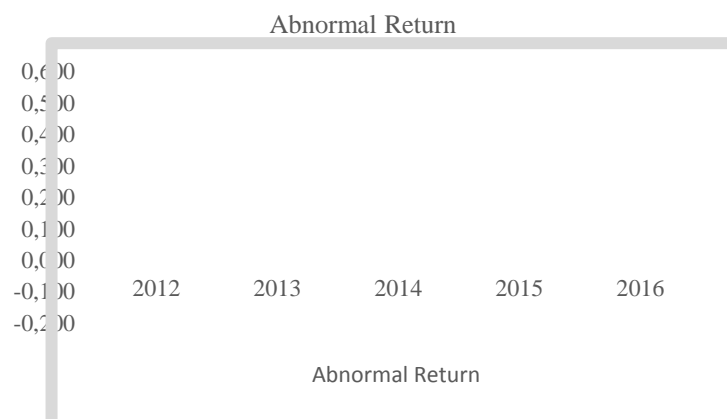
maka harga saham tersebut cenderung akan bergerak naik. Sebaliknya, semakin banyak orang menjual saham maka harga saham tersebut cenderung akan bergerak turun. Pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Investor yang rasional terdorong untuk selalu mempertimbangkan risiko dan *expected return*. Semakin besar *expected return* maka tingkat risiko yang melekat juga semakin besar.

Informasi yang tidak kalah pentingnya bagi investor adalah informasi dalam menganalisis perusahaan dengan melalui laporan arus kas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.2, perusahaan wajib menyertakan laporan arus kas dalam laporan keuangannya yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode akuntansi yang bermuara pada kredibilitas kinerja perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja perusahaan baik maka akan berdampak pada naiknya harga perusahaan pada pasar modal, yang pada akhirnya menghasilkan return yang dapat dinikmati oleh investor. (Kurniawan:2000) dalam Daniati dan Suhairi (2006).

Pasar efisien di uji dengan melihat *return* tidak wajar atau *abnormal return* yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati *return* tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama (Jogiyanto, 2010:579) Situasi ketidakpastian ini mendorong investor yang rasional untuk selalu mempertimbangkan risiko dan *expected return* setiap sekuritas yang secara teoritis berbanding lurus. Semakin besar *expected return* maka tingkat risiko yang melekat juga semakin besar. Gambaran risiko dan *expected return* dari suatu saham dapat dinilai berdasarkan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif (Kurniawan:2000) dalam Daniati dan Suhairi (2006). Umumnya, investor mengharapkan *return* normal yang proporsional dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Namun, investor yang canggih dapat memperoleh *return* aktual melebihi *return* normal. *Return* ini disebut *abnormal return*, yang dihitung dari selisih antara *return* yang sesungguhnya terjadi (*actual return*) dengan *return* yang diharapkan oleh investor (*expected return*). Salah satu informasi dalam laporan keuangan yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan adalah laporan arus kas.

Yang menjadi pertimbangan lainnya bagi investor dalam mengambil keputusan adalah ukuran perusahaan (*firm size*) [Indriani (2005) dalam Daniati dan Suhairi(2006)].

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan melihat besar kecilnya penjualan, jumlah modal atau juga melalui total aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan biasanya berdampak pada peningkatan *return* atau laba yang dihasilkan. Salah satu parameter laba adalah *Earnings per share* (EPS). EPS seringkali dilaporkan dalam setiap penerbitan laporan keuangan sebagai data yang banyak digunakan oleh pemegang saham dan investor yang potensial sebagai alat analisis keuangan dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan, sehingga EPS ini secara ringkas akan menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan return saham.



Sumber : data Sekunder, yang diolah

Gambar 1. Rata-rata Abnormal Return Saham JII periode 2012-2016

Dari gambar di atas diketahui bahwa nilai rata-rata Abnormal Return pada tahun 2012 untuk perusahaan yang tergabung dalam JII adalah 0,486, tahun 2013 sebesar 0,399; tahun 2014 sebesar -0,102, tahun 2015 sebesar -0,045; dan pada tahun 2016 sebesar 0,206. Jika dilihat dari hasil tersebut, perkembangan abnormal return saham untuk perusahaan yang tergabung dalam JII berfluktuatif cenderung naik.

Dengan memperdagangkan sahamnya di pasar modal, maka perusahaan dapat memperoleh dana bagi kelangsungan operasional perusahaan dan berkesempatan untuk mengembangkan perusahaan. Dan bagi investor, pasar modal merupakan salah satu sarana efektif bagi mereka untuk menanamkan modalnya agar dapat memperoleh keuntungan (*return*) dari yang diinvestasikan. *Return* saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi. *Return* dapat berupa *return* realisasi yang sudah terjadi (*actual return*) dan *return*

ekspektasi (*expected return*) yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang Jogiyanto (2010) dalam Nelvianti (2013).

Penelitian ini menggunakan saham *Jakarta Islamic Index (JII)* sebagai objek penelitian, atau biasa juga disebut dengan indeks syariah. *Jakarta Islamic Index* merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau Indeks yang berdasarkan syariah Islam. Nasution mendefinisikan *Jakarta Islamic Indeks (JII)* adalah gabungan 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah yang telah diseleksi setiap enam bulan sekali. Pada setiap periode perusahaan yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari indeks dan diganti dengan perusahaan lain. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil sampel data perusahaan yang masuk dalam Indeks Jakarta Islamic Index (JII) periode 2012 sampai 2016. Beberapa penelitian terdahulu terkait *Abnormal Return* sebagai berikut :

Tabel 1. *Research Gap*

No	Peneliti / Tahun	Variabel				
		SIZE	Arus Kas Operasi	Arus Kas Investasi	Arus Kas Pendanaan	EPS
1.	Hardian (2010)	-	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	-
2.	Nurhidayah (2011)	-	Berpengaruh	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	-
3.	Glorius (2013)	-	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	-
4.	Rianti (2015)	-	-	-	-	Berpengaruh
5.	Bakhtiar (2016)	Berpengaruh	-	-	-	-

Sumber : disarikan dari berbagai sumber

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil dari para peneliti terdahulu, maka mendorong peneliti untuk mengkaji ulang penelitian yang dilakukan oleh Glorius tahun 2013 dengan judul : Pengaruh Komponen Arus Kas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Abnormal Return* Dengan *Earning Per Share (EPS)* Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2012-2016).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu tentang *Abnormal Return* sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Apakah Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap *Abnormal Return* ?
2. Apakah Arus Kas Investasi berpengaruh terhadap *Abnormal Return*?
3. Apakah Arus Kas Pendanaan berpengaruh terhadap *Abnormal Return* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Abnormal Return* ?
5. Apakah *Earning Per Share (EPS)* berpengaruh terhadap hubungan komponen Arus Kas (arus kas dari aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan) dan *Abnormal Return* ?
6. Apakah *Earning Per Share (EPS)* berpengaruh terhadap hubungan Ukuran Perusahaan dan *Abnormal Return* ?

Kajian Pustaka

Signaling Theory

Menurut Jogiyanto (2010:392) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. *Signaling Theory* dikembangkan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa pihak manajemen (insider) atau orang dalam perusahaan pada umumnya memiliki jumlah informasi yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi mutakhir dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor luar. Salah satu informasi yang dimaksud adalah laporan arus kas. Kandungan informasi arus kas yang terdiri dari tiga komponen aktivitas yaitu arus kas operasi, investasi, dan pendanaan dapat memberikan sinyal bagi investor dalam menentukan kinerja perusahaan yang bersangkutan.

Return Saham

Return saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi. *Return* dapat berupa *return* realisasi yang sudah terjadi (*actual return*) dan *return* ekspektasi (*expected return*) yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang Jogiyanto (2010) dalam Nelvianti (2013). *Actual return* menggunakan harga penutupan yang didapat dari selisih harga sekarang terhadap harga sebelumnya. Sedangkan *Return* ekspektasi (*expected return*) adalah *return* yang diharapkan diperoleh oleh investor di masa mendatang (sifatnya belum terjadi).

Abnormal Return

Menurut Jogiyanto (2010:579), *Abnormal return* atau *excess return* merupakan kelebihan dari *return* yang sesungguhnya terjadi terhadap *return* normal. *Return* normal merupakan *return* yang diharapkan oleh investor). Sedangkan menurut Samsul (2006) *Abnormal Return* adalah selisih antara *Actual Return* (keuntungan yang sebenarnya) dan *Expected Return* atau *return* yang diharapkan. Abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian - kejadian tertentu, misalnya hari libur nasional, awal bulan, awal tahun, suasana politik yang tidak menentu, kejadian-kejadian yang luar biasa, stock split, penawaran perdana saham, dan lain-lain. Studi peristiwa menganalisis return tidak normal (abnormal return) dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa.

Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Arus kas dapat diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (AO)

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, dan merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan (Daniati, 2006).

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (AI)

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau pelepasan aktiva tidak lancar dan investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas

meminjamkan uang dan mengumpulkan piutang tersebut serta memperoleh dan menjual investasi dan aktiva jangka panjang produktif (Daniati, 2006).

c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (AP)

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan pengungkapan terpisah karena berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan [(Daniati, (2006)].

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan melihat besar kecilnya penjualan, jumlah modal atau juga melalui total aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Banz (1981) dalam Tandelilin (2001:125) menunjukkan telah menemukan adanya *abnormal return* yang bisa diperoleh investor jika memiliki saham dari perusahaan kecil. Menurut Sawir (2004) dalam Devi (2010) sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor memperoleh hasil yang memberikan *return* yang lebih tinggi secara signifikan. Investor lebih meyakini untuk menanamkan dana atau modalnya ke dalam perusahaan berukuran besar dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil, karena dengan perusahaan yang berukuran besar membuat investor lebih yakin mempercayakan tingkat kelangsungan hidup usahanya agar lebih terjamin dan sangat kecil kemungkinan terjadinya kebangkrutan.

Earning Per Share (EPS)

Earnings per share (EPS) merupakan jumlah laba atau keuntungan per lembar saham yang dibagikan kepada para pemegang saham. EPS merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. EPS yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham, sedangkan *EPS* yang rendah menandakan bahwa perusahaan gagal memberikan kemanfaatan sebagaimana diharapkan oleh pemegang saham. Dengan kata lain *EPS*

mempunyai pengaruh kuat terhadap *return* saham. Jika EPS tinggi (meningkat) mengindikasikan *return* saham juga ikut tinggi (meningkat), demikian pula sebaliknya.

Pengaruh Arus Kas Operasi (AO) terhadap Abnormal Return (AR) :

Seorang investor akan melihat bagaimana kinerja suatu perusahaan. Salah satu yang dijadikan alat ukur oleh investor yaitu arus kas operasional. Semakin tinggi arus kas operasional perusahaan maka semakin tinggi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, sehingga besar pula nilai *return* saham. Arus kas operasi yang meningkat menandakan bahwa kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar (Simamora, 2003:182). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis H_1 : *Arus kas operasi berpengaruh terhadap abnormal return.*

Pengaruh Arus Kas Investasi (AI) Terhadap Abnormal Return (AR)

Informasi arus kas dari aktivitas investasi relevan bagi investor karena informasi perubahan aset-aset jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensial laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan (Martani, 2012:150). Jika perusahaan mengeluarkan banyak dana untuk aktiva produktif, maka perusahaan itu akan mampu tumbuh. Biasanya perusahaan menggunakan kas untuk memperluas atau menambah aktiva jangka panjangnya, sehingga kas dari aktivitas investasi biasanya negatif. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis H_2 : *Arus kas investasi berpengaruh terhadap abnormal return.*

Pengaruh Arus Kas Pendanaan (AP) Terhadap Abnormal Return (AR)

Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi mereka (*expected return*) dan resiko. Pengembalian (*return*) adalah bagian investor ekuitas atas laba perusahaan dalam bentuk distribusi laba. Distribusi laba adalah pembayaran deviden kepada pemegang saham. Pembayaran deviden mengacu pada proporsi laba yang didistribusikan, yang sering dinyatakan dalam rasio atau persentase laba bersih. Sehingga peningkatan arus kas pendanaan ini berarti perusahaan mempunyai banyak dana untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Peningkatan kinerja tersebut berdampak positif terhadap *return* yang diterima oleh investor. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ***H₃ : Arus kas pendanaan berpengaruh terhadap abnormal return***

Pengaruh Ukuran Perusahaan (UP) Terhadap *Abnormal Return* (AR)

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat besar kecilnya penjualan, jumlah ekuitas, atau juga melalui total aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki prospek usaha lebih baik dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan besar mampu menghasilkan produk lebih baik sehingga dapat menguasai pasar dan berdampak pada laba yang semakin tinggi. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal, sekuritasnya kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan harga yang sedemikian rupa agar investor memperoleh *return* yang tinggi. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ***H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap abnormal return.***

Pengaruh *Earning Per Share* (EPS) dan hubungan antara Arus Kas (Arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan) Terhadap *Abnormal Return* (AR)

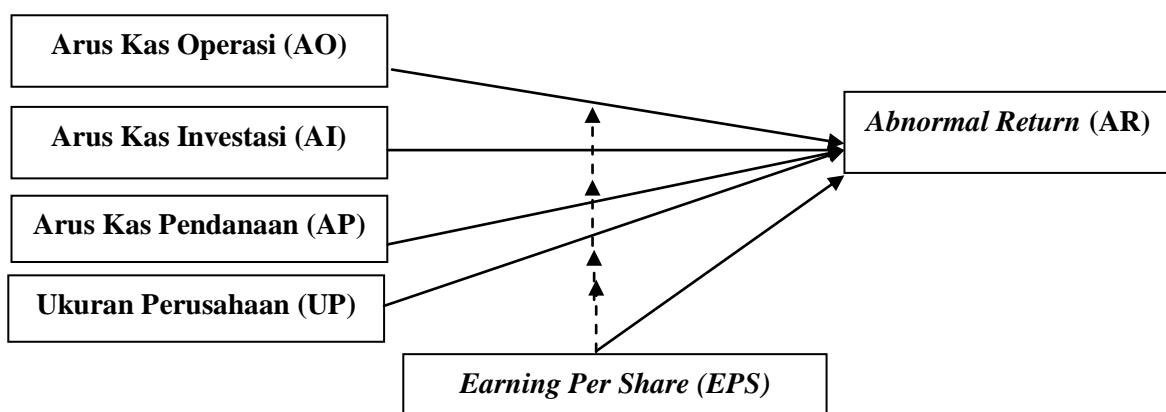
Salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan ditunjukkan oleh besarnya *earnings per share* (EPS) dari perusahaan yang bersangkutan, Jika penerimaan dari arus kas meningkat (tinggi) maka EPS juga ikut meningkat (tinggi). *Earnings per share* (EPS) yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham. Dalam penelitian ini *Earning Per Share* (EPS) memoderasi hubungan antara Arus Kas (Arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan) terhadap *Abnormal Return* sehingga dapat dirumuskan hipotesis ***H₅ : Earning Per Share* (EPS) memperkuat hubungan Arus Kas terhadap *Abnormal Return*.**

Pengaruh *Earning Per Share* (EPS) dan hubungan antara Ukuran Perusahaan Terhadap *Abnormal Return*

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat *return*, Investor lebih yakin pada perusahaan yang berukuran besar untuk menanamkan

modalnya dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan yang besar memiliki prospek usaha yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Karena perusahaan yang berukuran besar akan mampu menghasilkan produk yang lebih baik sehingga dapat menguasai pasar dan berdampak pada laba (*return*) yang besar pula, sehingga bermuara pada jumlah laba yang akan dibagikan kepada investor. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula jumlah laba yang dibagikan dalam bentuk saham atau *Earning Per Share* (EPS), sehingga dapat dirumuskan hipotesis **H₆ : *Earning Per Share* (EPS) memperkuat hubungan Ukuran Perusahaan (UP) dan Abnormal Return**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



Sumber : dikembangkan untuk penelitian
 Gambar 2. Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Tabel 2. Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Variabel Yang Digunakan	Rumus
Variabel Dependen	Abnormal Return	$AR_{i,t} = R_{i,t} - E[R_{i,t}]$ <p>Dimana : $AR_{i,t}$ = <i>abnormal return</i> saham i pada periode peristiwa t $R_{i,t}$ = <i>actual return</i> saham i pada periode peristiwa t $E[R_{i,t}]$ = <i>expected return</i> saham i pada periode peristiwa t</p>
Variabel Independen	Arus Kas dari Aktivitas Operasi (AO)	$PAO_{it} = (AO_{it} - AO_{it-1}) / AO_{it-1}$ <p>Dimana : PAO_{it} = Perubahan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t. AO_{it} = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t AO_{it-1} = Arus kas dari aktivitas operasi i pada periode t-1.</p>

	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	$PAI_{it} = (AI_{it} - AI_{it-1}) / AI_{it-1}$ <p>Dimana : PAI_{it} = Perubahan arus kas dari aktivitas investasi perusahaan i pada periode t. AI_{it} = Arus kas dari aktivitas investasi perusahaan i pada periode t AI_{it-1} = Arus kas dari aktivitas investasi i pada periode t-1.</p>
	Arus Kas dari Aktivitas Pendapatan (AP)	$PAP_{it} = (AP_{it} - AP_{it-1}) / AP_{it-1}$ <p>Dimana : PAP_{it} = Perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan perusahaan i pada periode t. AP_{it} = Arus kas dari aktivitas pendanaan perusahaan i pada periode t. AP_{it-1} = Arus kas dari aktivitas pendanaan i pada periode t-1.</p>
	Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan (SIZE) = log Total Assets
Variabel Moderasi	<i>Earning Per Share (EPS)</i>	<i>Earning Per Share (EPS)</i> = $\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Jumlah saham beredar}}$

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis uji hipotesis penelitian dengan perantara uji interaksi MRA (Moderated Regression Analysis), dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1AO + b_2AI + b_3AP + b_4UP + e \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = a + b_1AO + b_2AI + b_3AP + b_4UP + b_1AO*EPS + b_2AI*EPS + b_3AP*EPS + b_4UP*EPS + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- Y = *Abnormal return* saham,
- a = konstanta
- b₁ - b₅ = koefisien regresi masing-masing variabel
- AO = Arus Kas dari Operasi
- AI = Arus Kas dari Investasi
- AP = Arus Kas dari Pendanaan
- UP = Ukuran Perusahaan
- EPS = *Earning Per Share*
- e = standar error

Hasil dan Pembahasan

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PAOit	90	-.175236	1.4872642	-9.8225	4.6128
PAIit	90	7.645846E0	61.9055634	-2.4381	585.7470
PAPit	90	-1.155138E1	105.6763575	-1.0027E3	7.4864
SIZE	90	8.395137E0	2.3852846	5.0468	14.1360
EPS	90	4.757063E2	453.8008000	-68.6700	1.5904E3
AR	90	.177274	1.2134422	-1.1283	9.2388

Sumber : data sekunder, yang diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variable AR (*Abnormal Return*) memiliki nilai minimum -1,1283 dan nilai maksimum 9,2388 dengan Rata-rata nilai *Abnormal Return* adalah 0,177274 yang artinya rata-rata jumlah *return* saham sebesar 17,72%.

Variable PAOit memiliki nilai minimum -9,8225 dan nilai maksimum 4,6128 dengan Rata-rata nilai PAOit adalah 0,175236 yang artinya rata-rata jumlah PAOit sebesar 17,52%.

Variable PAIit memiliki nilai minimum -2,4382 dan nilai maksimum 585,74 dengan Rata-rata nilai PAIit adalah 7,6458 yang artinya rata-rata jumlah PAIit sebesar 764,5%.

Variable PAPit memiliki nilai minimum 1,002 dan nilai maksimum 7,486 dengan Rata-rata nilai PAPit adalah -1,1551 yang artinya rata-rata jumlah PAPit sebesar -115,51%.

Variable SIZE memiliki nilai minimum 5,9468 dan nilai maksimum 14,130 dengan Rata-rata nilai SIZE adalah 8,395 yang artinya rata-rata jumlah SIZE sebesar 839,5%.

Variable EPS memiliki nilai minimum -68,6700 dan nilai maksimum 1,590 dengan Rata-rata nilai EPS adalah 4,75706 yang artinya rata-rata jumlah EPS sebesar 475,70%.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan *Tolerance* (TOL) dan metode VIF (*Variance Inflation Factor*).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.538	.492		1.094	.277		
PAOit	.023	.091	.028	.252	.801	.938	1.066
PAlit	.000	.002	.006	.050	.960	.895	1.118
PAPit	.000	.001	.011	.103	.918	.990	1.010
SIZE	-.042	.057	-.083	-.740	.461	.919	1.088

a. Dependent Variable: AR

Sumber : Data Sekunder, yang diolah

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian penyimpangan autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test*. Hasil regresi dengan level signifikan 0,05 ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah variabel independen ($k = 4$) dan banyaknya data ($N = 90$), didapat nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,115 sedangkan besarnya dU (batas atas) = 1,751. Oleh Karena DW hitung lebih besar dari batas atas (dU) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson	Di	Dw	Du	Keterangan
1	2.115	1,566	2,115	1,751	tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data Sekunder, yang diolah

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser sebagai berikut :

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	t	Sig.	Keterangan
ABSX1_PAOit	.656	.514	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSX2_PAIit	-1.311	.194	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSX3_PApIT	1.511	.135	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSX4_SIZE	-.196	.845	Tidak terjadi heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: AR

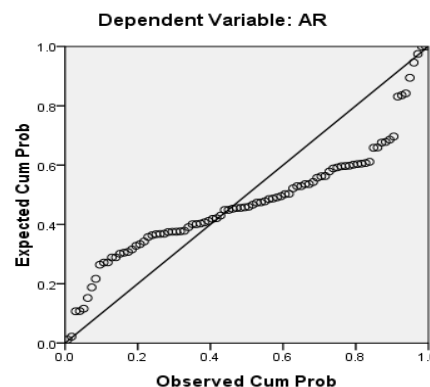
Sumber : data sekunder, yang diolah

Hasil dari tabel 6 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi nilai *residual absolut*. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas nilai *residual* persamaan dengan variabel independen.

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Normal Probability Plot*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data sekunder, yang diolah

Gambar 3. Hasil Uji Dengan *Normal Probability Plot*

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Model Fit

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dengan *goodness of fit* yang dilihat dari nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Berikut ini hasil uji model fit:

Tabel 7. Hasil Uji Model Fit

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.202	9	5.578	5.520	.000 ^a
	Residual	80.845	80	1.011		
	Total	131.047	89			

a. Predictors: (Constant), MODERAT4, PAIit, MODERAT2, MODERAT1, SIZE, PAOit, MODERAT3, EPS, PAPit

b. Dependent Variable: AR

Berdasarkan tabel diatas, tampak nilai sig F sebesar $< 0,05$ artinya model fit digunakan. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen AR atau model regresi dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 ^a	.383	.314	1.0052679	2.009

a. Predictors: (Constant), MODERAT4, PAIit, MODERAT2, MODERAT1, SIZE, PAOit, MODERAT3, EPS, PAPit

b. Dependent Variable: AR

Sumber : data sekunder, yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Adjusted R²* sebesar 0,314 berarti daya penjelas variabel independen terhadap variable dependen adalah sebesar 0,314 atau sebesar 31,4 %, dan sisanya 0,686 atau 68,6 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Berikut hasil uji hipotesis.

Tabel 9. Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.538	.492		1.094	.277		
	PAOit	.023	.091	.028	.252	.801	.938	1.066
	PAIit	.000	.002	.006	.050	.960	.895	1.118
	PAPit	.000	.001	.011	.103	.918	.990	1.010
	SIZE	-.042	.057	-.083	-.740	.461	.919	1.088

a. Dependent Variable: AR

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$AR = 0,538 + 0,023PAOit + 0,0PAIit + 0,0PAPit - 0,042SIZE + e$$

Pada table 9 menunjukkan bahwan Nilai signifikansi variabel PAOit adalah 0,801 dan dapat disimpulkan bahwa PAOit berpengaruh positif terhadap *Abnormal Return*. Sehingga Hipotesis pertama diterima. Hasil uji tersebut sesuai dengan penelitian dari Nurhidayah (2011).

Nilai signifikansi variabel PAIit adalah 0,960 dan dapat disimpulkan bahwa PAIit berpengaruh terhadap *Abnormal Return*. Sehingga Hipotesis kedua diterima. Hasil uji tersebut sesuai dengan penelitian dari Hardian (2010) dan Nurhidayah (2011).

Nilai signifikansi variabel PAPit adalah 0,918 dan dapat disimpulkan bahwa PAPit tidak berpengaruh terhadap *Abnormal Return*. Sehingga Hipotesis ketiga diterima.

Nilai signifikansi variabel SIZE adalah 0.461 dan dapat disimpulkan bahwa SIZE berpengaruh negatif terhadap *Abnormal Return*. Sehingga Hipotesis keempat diterima. Hasil uji tersebut sesuai dengan penelitian dari Bakhtiar (2016).

Tabel 10. Uji Moderasi

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.524	.553		.947	.347		
PAOit	.021	.103	.025	.201	.842	.484	2.065
PAIit	-.029	.005	-1.498	-5.739	.000	.113	8.830
PAPit	.006	.026	.560	.247	.805	.002	663.707
EPS	.000	.001	.062	.111	.912	.025	40.211
SIZE	-.060	.061	-.117	-.969	.336	.528	1.893
MODERAT1	.000	.000	-.035	-.285	.776	.498	2.006
MODERAT2	.001	.000	1.631	6.124	.000	.109	9.198
MODERAT3	-8.332E-6	.000	-.024	-.044	.965	.026	38.340
MODERAT4	-8.332E-6	.000	-.024	-.044	.965	.026	38.340

a. Dependent Variable: AR

Sumber : data sekunder yang diolah

Pada tabel 10 menunjukkan bahwa variabel MODERAT1 (PAOit terhadap AR yang dimoderasi oleh EPS), dan MODERAT3 (PAPit terhadap AR yang dimoderasi oleh EPS), dan MODERAT4 (SIZE terhadap AR yang dimoderasi oleh EPS), bernilai positif dan tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa EPS tidak memoderasi hubungan antara Arus Kas dari Aktivitas Operasional terhadap *Abnormal Return*, EPS tidak

memoderasi hubungan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, EPS tidak memoderasi hubungan antara Ukuran perusahaan terhadap *Abnormal Return*, pada tingkat signifikansi 5%.

Variabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi bernilai positif dan signifikan, dengan nilai positif 6,124 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel EPS merupakan variabel moderasi dan memoderasi hubungan antara Arus Kas dari Aktivitas Investasi terhadap *Abnormal Return* pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya arus kas operasi dari aktivitas investasi maka *Earning Per Share (EPS)* akan meningkat, sebaliknya dengan menurunnya arus kas operasi dari aktivitas investasi maka *Earning Per Share (EPS)* juga akan menurun.

Penutup

Salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan ditunjukkan oleh besarnya *earnings per share (EPS)* dari perusahaan yang bersangkutan, Jika penerimaan dari arus kas meningkat (tinggi) maka *EPS* juga ikut meningkat (tinggi). *Earnings per share (EPS)* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Earning Per Share (EPS)* merupakan variabel mediasi yang dapat memoderasi hubungan antara arus kas yang berasal dari aktivitas Investasi terhadap *abnormal return* saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya arus kas operasi dari aktivitas investasi maka *Earning Per Share (EPS)* akan meningkat, sebaliknya dengan menurunnya arus kas operasi dari aktivitas investasi maka *Earning Per Share (EPS)* juga akan menurun.

Daftar Pustaka

- Hardian, Sinaga Hariono. 2010. Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi Terhadap Return Saham. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Martani, Dwi et all. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Salemba empat
- Ninna, Daniati dan Suhairi. 2006. Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor, dan Size Perusahaan Terhadap *Expected Return* Saham. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang

- Nurhidayah, Djam'an. 2011. Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas, Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Abnormal Return* Saham. Jurnal Riset akuntansi Indonesia.
- Ni Putu Trisna dan I Wayan Putra. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Arus Kas Aktivitas Operasi pada Return Saham, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Simamora, Henry. 2003. Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Edisi II Jilid 2. Jakarta Selatan: UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Syahputri, Rianti. 2015. Pengaruh ROA, NPM, EPS, Terhadap Return Saham Pada Emiten Jakarta Islamic Index Tahun 2010-2013. JESTT Vol. 2 No. 4 April 2015.
- www.idx.co.id, Annual Report Bursa Efek Indonesia.

**AKTIVITAS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN *SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP* (STUDI KASUS PROGRAM DAUR ULANG
LIMBAH KEMASAN PT. MARIMAS PUTERA KENCANA PADA
MITRA BINAAN DI DESA KINIBALU BARAT SEMARANG)**

Hani Sirine dan Barnabas Theodore Pistos Utomo Kaya

Surel: hani.sirine@staff.uksw.edu

Staf Pengajar FEB UKSW, Salatiga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas CSR PT. Marimas Putera Kencana dalam pengembangan kewirausahaan sosial. Adapun aktivitas CSR perusahaan terbagi dalam tahapan CSR yang dilakukan perusahaan, pengukuran konsep CSR, dan keterkaitan CSR perusahaan dalam pengembangan kewirausahaan sosial di Desa Kinibalu Barat Semarang sebagai mitra binaan perusahaan. Tahapan CSR perusahaan akan diuraikan dari tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Pengukuran konsep CSR dilihat dari lima pilar aktivitas CSR yaitu building human capital, strengthening economies, assessing social cohesion, encouraging good governance, protecting the environment. Terakhir, keterkaitan CSR perusahaan dalam pengembangan kewirausahaan sosial dapat diidentifikasi melalui adanya keterampilan kewirausahaan, kepemimpinan bernilai sosial, pengelolaan sumber daya dengan cara baru, transformasi organisasi, dan model bisnis baru untuk mengatasi masalah sosial.

Kata Kunci: *Corporate Social Entrepreneurship, Social Entrepreneurship*

Latar Belakang

Banyak perusahaan belum menyadari dan memahami pentingnya CSR. Mereka lebih berorientasi pada masyarakat dan bisnis, yaitu sektor bisnis swasta yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang mengejar profit atau tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat umum, mengingat pengaruh bisnis ini begitu besar. CSR berarti komitmen industry untuk mempertanggung-jawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Ketika perusahaan melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan (Tanudjaja, 2006).

Social entrepreneurship merupakan konsep baru dari pengembangan lima aspek program CSR yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan dan lainnya (Rahadi & Zaniat, 2014). Dua prinsip utama dalam kewirausahaan sosial adalah (1) inovasi sosial yang bisa mengubah sistem yang ada di masyarakat, (2) individu yang bervisi dan kreatif. Berbeda dengan kewirausahaan bisnis, hasil yang ingin dicapai *social entrepreneurship* adalah profit dan dampak positif bagi masyarakat. Sesuai dengan pilar di bidang ekonomi adalah dengan membangun usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi yang ada di desa sekitar perusahaan. Usaha-usaha pemberdayaan yang dilakukan mencakup serangkaian pelatihan, bimbingan, dan arahan yang mencakup konsep dari *social entrepreneurship*.

Beberapa penelitian tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Maulana (2009) di PT. Rekayasa Industri, dalam upaya pengembangan, pengimplementasian dan pelaksanaan CSR yang dijalankan telah menghasilkan strategi pendekatan dan implementasi CSR pada tahap pelaksanaan program dan tingkat partisipasi *placation*. Masyarakat dapat memberikan sarannya namun kewenangan memberikan keputusan sepenuhnya masih dimiliki perusahaan. Nugroho (2013) melakukan penelitian CSR di PT. Indopherin Jaya di Kota Probolinggo dalam upaya melihat peran CSR untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa yaitu terdapat respon positif mengenai program CSR PT. IPJ dari masyarakat oleh perusahaan.

Agustina (2012) melakukan penelitian tentang CSR di PT. Pertamina Hulu Energy WMO di Kecamatan Gresik. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu kebijakan CSR, perkembangan masyarakat, menganalisis yang menerima bantuan dari program CSR tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aset, perluasan jaringan usaha, serta pengembangan skill bagi pengusaha binaan. Yaumidin (2011) melakukan penelitian CSR di PT. Bank Mandiri Tbk. Penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan kewirausahaan sosial. Hasil penelitian ini yaitu CSR perusahaan dapat secara optimal menggerakkan bisnis perusahaan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas lingkungan dan perkembangan kewirausahaan sosial di tingkat global.

Lesty (2013) melakukan penelitian CSR di PT. Jababeka, Tbk. Cikarang. Penelitian ini mengambil topik tentang kesesuaian penyelenggaraan CSR dengan kebijakan dan pengembangan perekonomian di Kabupaten Bekasi. Hasilnya adalah penyelenggaraan CSR Jababeka belum sesuai dengan arahan pengembangan ekonomi lokal, belum dapat memenuhi pengembangan usaha kecil di bidang usaha agribisnis, pariwisata dan industri, belum dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja usaha kecil, serta belum dapat menyerap tenaga kerja baru, khususnya tenaga kerja yang berasal dari lokal Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini akan mengambil objek amatan yaitu PT. Marimas Putera Kencana. Perusahaan ini sadar akan pentingnya dukungan masyarakat sekitar dalam mengembangkan program CSR yang berbasis komunitas. Hal ini dinyatakan dalam konsep kepedulian masyarakat yang bernama “Tumbuh Bersama Marimas”. Untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, Marimas memprakarsai beberapa program CSR, di antaranya: “Indonesia Cerdas”, “Guyub Bareng”, “Mitra Komunitas”, “Daur Ulang Limbah Kemasan”, “Marimas Peduli”, dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dan yang berkerjasama dengan PT. Marimas Putera Kencana.

Salah satu program CSR PT. Marimas Putera Kencana dalam pengembangan *social enterpreneurship* adalah Daur Ulang Limbah Kemasan yang telah dimulai pada tahun 2007. Program ini bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat binaannya melalui daur ulang limbah kemasan, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai guna seperti tas, jas hujan, tatakan makan, rompi dan dompet.

Persoalan Penelitian

Adapun persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa tahapan CSR yang dilakukan PT. Marimas Putera Kencana?
2. Bagaimana mengukur konsep CSR yang dilakukan PT. Marimas Putera Kencana dalam lima pilar aktivitas CSR?
3. Seperti apa keterkaitan CSR PT. Marimas Putera Kencana dalam pengembangan kewirausahaan sosial pada mitra binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tahapan CSR yang dilakukan PT. Marimas Putera Kencana.
2. Untuk menganalisis pengukuran konsep CSR yang dilakukan PT. Marimas Putera Kencana dalam lima pilar aktivitas CSR.
3. Untuk menganalisis keterkaitan CSR PT. Marimas Putera Kencana dalam pengembangan kewirausahaan sosial pada mitra binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti: untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang CSR suatu perusahaan dalam pengembangan *social entrepreneurship*.
2. Bagi PT. Marimas Putera Kencana: agar dapat memiliki gambaran tentang pengembangan *social entrepreneurship* bagi mitra binaan dan dapat melakukan evaluasi atas program CSR yang dilakukan.
3. Bagi mitra binaan di Desa Kinibalu Barat: untuk mendapatkan gambaran tentang keuntungan yang diperoleh dari aktivitas CSR PT. Marimas Putera Kencana dan mendorong semangat kewirausahaan dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut.

Telaah Teoritis

Teori Stakeholder

Freeman (1984) menyatakan bahwa perusahaan harus menangani kepentingan stakeholder mereka baik level kelompok ataupun individu karena hal ini dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Teori stakeholder mengusulkan fokus manajer bukan hanya pada kepentingan pemegang saham namun juga memahami kebutuhan, harapan, dan nilai pemangku kepentingan yang lain, yang sebelumnya dianggap eksternal bagi perusahaan. Post, et al (2002) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu dan konstituen yang berkontribusi baik secara sukarela atau

tidak sadar sehingga berdampak pada kapasitas dan aktivitas yang memberikan kekayaan bagi perusahaan.

Organisasi secara bertanggung-jawab dapat mengelola pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya seperti masyarakat lokal dan lingkungan dalam bentuk kepedulian terhadap kepentingan mereka (Simmons, 2004). Hal ini sejalan dengan pendapat Freeman (1984) yaitu tentang konseptualisasi sifat perusahaan dalam mendorong pertimbangan pemangku kepentingan di sekelilingnya seperti pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan pemasok. Ini adalah sebuah bentuk legitimasi dari pemahaman dan tindakan manajerial yang dilakukan perusahaan (Jonker & Foster, 2002).

Teori stakeholder menawarkan cara baru untuk mengatur pemikiran tentang tanggung jawab organisasi. Kebutuhan pemegang saham tidak dapat dipenuhi dengan mengabaikan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Ketika perusahaan melayani para pemegang saham dengan memberikan perhatian yang baik maka keberhasilannya dapat mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya (Hawkins, 2006). Jones & Wicks (1999) menyatakan teori stakeholder memiliki implikasi normatif (moral/ etis) dan instrumental (keuntungan/ peningkatan kekayaan) karena berhubungan pemangku kepentingan yang dianggap sebagai tanggung jawab dalam memenuhi klaim sah berbagai kepentingan atau sebagai alat untuk memaksimalkan kekayaan organisasi.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR adalah kontribusi perusahaan bagi pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif) terhadap pemangku kepentingan. CSR merupakan bagian yang menyatu dalam strategi bisnis perusahaan dan implementasinya adalah tanggung jawab bersama (Sukada et. al, 2007). Menurut Kotler & Kotler (2005), CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan bagi masyarakat.

Menurut Wibisono (2007), CSR didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan. Menurut World Business Council on Sustainable Development (2002), CSR adalah komitmen dari bisnis/ perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

CSR merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup – triple bottom line (Ambadar , 2008). Elkington (1998) memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL atau 3BL), dan 3P – *People, Planet and Profit*. Ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jika sebelumnya tanggung jawab perusahaan hanya pada sisi *finansial* saja (*single bottom line*), kini dikenal konsep '*triple bottom line*', yaitu bahwa tanggung jawab perusahaan berpijak pada 3 dasar.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR adalah sebuah bentuk perhatian perusahaan pada lingkungan sekitar dunia perusahaan, baik berupa perhatian pada pembangunan ekonomi lokal maupun kerekatan sosial antara modal sosial yang terbentuk. Salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap sosial/ lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Usaha pemberdayaan yang dilakukan mencakup pelatihan, bimbingan, dan arahan yang mencangkup konsep dari *social entrepreneurship*.

Tahapan Corporate Social Responsibility

Dalam aktivitas CSR terdapat beberapa proses harus diperhatikan. Menurut Wibisono (2007), terdapat empat tahapan CSR, yaitu:

Tahapan Perencanaan. Pada tahapan ini terdiri dari tiga langkah utama *Awareness Building*, *CSR Assessment* dan *CSR Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah utama membangun kesadaran pentingnya CSR dan komitmen manajemen berupa seminar dan lokarya. *CSR Assessment* adalah upaya memetakan kondisi perusahaan, mengidentifikasi aspek yang perlu mendapatkan prioritas, dan langkah langkah yang

tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif. *CSR Manual Building*, dapat melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau meminta bantuan dari tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan tindakan seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

Tahapan Implementasi. Pada tahapan ini terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu pengorganisasian (*organizing*), sumber daya penyusun (*staffing*), penggarapan (*direction*), pengawasan dan koreksi pelaksanaan sesuai rencana (*controlling*), dan penilaian (*evaluation*) tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi.

Tahapan Evaluasi. Tahapan ini dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR.

Pelaporan. Tahapan ini diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan dalam pengambilan keputusan maupun keperluan transparansi informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

Lima Pilar Aktivitas Corporate Social Responsibility

Dalam penelitian kali ini konsep Corporate Social Responsibility akan diukur dengan menggunakan lima pilar aktivitas Corporate Social Responsibility dari Prince of Wales International Business Forum, yaitu (Wibisono, 2007):

1) Building Human Capital

Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui *community development*.

2) Strengthening Economies

Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.

3) Assessing Social Chesion

Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.

4) Encouraging Good Governance

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

5) Protecting The Environment

Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

Pengembangan Social Entrepreneurship

Social entrepreneurship merupakan turunan dari kewirausahaan. Gabungan dari dua kata, *social* yang artinya kemasyarakatan dan *entrepreneurship* artinya kewirausahaan. *Social entrepreneurship* dapat diartikan seseorang atau kelompok yang memahami tentang permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya dan menggunakan keahliannya dalam *entrepreneurship* dalam memecahkan/ menanggulangi masalah sosial yang terjadi guna melakukan perubahan sosial (Raharjo, 2011).

Banyak pihak mencoba mendefinisikan *social entrepreneurship*, kemudian menjadi terminologi yang pernah dipakai oleh pakar ekonomi dari Perancis, Jean-Baptiste di awal abad 19, yang mendefinisikan entrepreneurship “*As a person who creates value by shifting economic recourse out of an area of low and into an area of higher productivity and grater yield* (Drucker, 1993).

Istilah *social entrepreneurship* pertama kali dipergunakan dalam literatur *social charge* 1960-1970 an oleh Rober Owen sebagai pendiri koperasi. *Social entrepreneurship* berbeda dengan kegiatan organisasi sektor nirlaba, seperti kegiatan amal dan pengumpulan dana. Hasil kerja *social entrepreneurship* bukan diukur dari besaran laba yang dihasilkan atau tingkat pengembalian investasi melainkan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan dapat mengatasi problema yang terjadi di masyarakat.

Pada awalnya, *social entrepreneurship* mempunyai inti pemberdayaan dalam bidang kemasyarakatan yang bersifat *voluntary/ charity* (kedermawanan dan sukarela). Beberapa penulis mendefinisikan kewirausahaan sosial berfokus pada tindakan yang timbul dari organisasi dan manajemen. Menurut Austin, et al (2006) berpendapat bahwa kewirausahaan sosial adalah istilah yang terkait dengan kepemimpinan dalam pencarian untuk menentukan lingkup bisnis. Kewirausahaan sosial menekankan kemampuan untuk menyambungkan antara pengusaha sosial dan nilai-nilai sosial (Dees & Anderson, 2003).

Kewirausahaan sosial proses melibatkan beratnya perilaku sosial dan ekonomi yang mengarah ke nilai sosial dan ekonomi.

Menurut Austin & Reficco (2009), *social entrepreneurship* merupakan bagian dari CSR, sebuah proses untuk menyegarkan dan memajukan pengembangan CSR. Jadi dapat disimpulkan kewirausahaan sosial adalah proses yang dapat membuat nilai sosial dengan menggabungkan sumber daya dalam cara baru, dan kombinasi antara sumber daya dan pemanfaatan peluang untuk menciptakan nilai dan merangsang perubahan sosial yang lebih baik.

Kewirausahaan sosial dapat membantu pengusaha dalam mengembangkan dan melaksanakan inisiatif mereka. Kewirausahaan sosial adalah proses melibatkan penggunaan sumber daya secara inovatif guna mengejar peluang untuk mengkatalisasi perubahan sosial atau kebutuhan sosial (atau keduanya) dengan tujuan mendasar yaitu untuk mempercepat perusahaan/ organisasi bertransformasi menjadi lebih kuat untuk perbaikan sosial (Mair dan Marti, 2006).

Grayson dan Hodges (2004) menunjukkan bahwa perusahaan harus melihat masalah sosial sebagai peluang dan mengembangkan model bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Di sini, orang miskin diperlakukan sebagai konsumen perusahaan dan / atau produsernya (Boyle dan Boguslaw, 2007; Prahalad, 2009). Perusahaan-perusahaan komersial harus melayani masyarakat yang berada di sekitar mereka, serta dapat menerima manfaat langsung dari operasi mereka. Freeman (1984) menyatakan bahwa organisasi komersial harus melayani manusia dengan berkontribusi terhadap keadilan ekonomi untuk semua. Dengan menerapkan strategi CSR, perusahaan secara signifikan dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang mereka dan menawarkan manfaat bagi individu dan masyarakat (Kanji dan Chopra, 2010).

Dari definisi *social entrepreneurship* di atas dapat dirangkum ciri-ciri pengembangan social entrepreneurship yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Ciri-ciri Pengembangan Social Entrepreneurship Menurut Para Ahli

Ciri-ciri Social Entrepreneurship	Sumber
Memiliki keterampilan kewirausahaan untuk memecahkan masalah sosial	Raharjo (2011)
Memiliki kepemimpinan dalam pengembangan kewirausahaan perusahaan yang bernilai sosial	Austin, et al (2006) Dees & Anderson (2003)
Memiliki kemampuan memanfaatkan peluang dengan mengelola sumber daya yang ada menggunakan cara yang baru	Austin & Reficco (2009)
Adanya transformasi organisasi dalam usaha perbaikan sosial	Mair dan Marti (2006)
Adanya model bisnis yang baru untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat	Grayson dan Hodges (2004)

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Menurut Kriyantono (2006) menyatakan riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Menurut Sukmadinata (2005), dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002). Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.

Penetapan Sumber Informasi

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data

primer diperoleh dari wawancara langsung kepada Marketing dari PT. Marimas Putera Kencana, Adi Prakosa dan Lantik Waspodo yang menangani CSR kepada Masyarakat Binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur. Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Ismi dan Ibu Agus sebagai perwakilan dari masyarakat binaan dalam pengolahan limbah kemasan dari sisa proses produksi dan warung-warung binaan. Wawancara dilakukan di kantor PT. Marimas dan di rumah Ibu Ismi dan Ibu Agus yang digunakan sebagai tempat produksi olahan limbah kemasan.

Pendekatan dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak menggambarkan dan menguraikan aktivitas CSR pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran proses dan program CSR yang dilakukan oleh PT. Marimas Putera Kencana terhadap masyarakat binaan sebagai mitra kerja perusahaan sehingga dapat mengembangkan kewirausahaan sosial di tempat itu.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Proses wawancara dilakukan untuk memperoleh data utama dari responden yaitu pimpinan PT. Marimas Putera Kencana dan wirausaha pemula (masyarakat binaan) tentang konsep CSR, dan kewirausahaan sosial pada PT. Marimas Putera Kencana. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*) Teknik ini adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai sebagai panduan untuk mendapatkan informasi.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra-survei, wawancara, mengumpulkan dokumentasi CSR perusahaan dan pengembangan kewirausahaan sosial pada masyarakat binaan, serta mensintesis data yang terkumpul. Langkah pertama, pra-survei yaitu melakukan survei atau mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, setelah itu mengirimkan mengajukan surat permohonan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Langkah selanjutnya melakukan

wawancara terhadap PT. Marimas bagian marketing yang menangani CSR perusahaan dan mewawancarai masyarakat binaan sebagai konfirmasi tentang program yang telah dilakukan PT. Marimas.

Selanjutnya melakukan dokumentasi dari setiap rangkaian yang telah dilakukan dalam proses wawancara kepada pihak perusahaan dan masyarakat, yang kemudian menuliskan setian kegiatan yang telah dilakukan menjadi karya tulis sebagai laporan dari kegiatan tersebut

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara dengan bagian marketing PT. Marimas Putera Kencana dan Masyarakat Binaan di Desa Kinibalu Barat di Semarang Timur akan dianalisis. Selanjutnya peneliti akan menyimpulkan data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, keadaan/ fenomena yang terjadi saat penelitian dan disuguhkan apa adanya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Profil PT. Marimas Putera Kencana

PT. Marimas Putera Kencana salah satu dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman (*food and beverage*), produk yang dihasilkan adalah minuman serbuk. PT. Marimas Putera Kencana berlokasi di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Bermula dari usaha *home industry* yang dikelola keluarga. Saat ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan distribusi produk di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Produk utama PT. Marimas Putera Kencana adalah minuman serbuk rasa buah tropis, dengan merk MARIMAS, dengan varian rasa terbanyak di Indonesia. Produksi pertama MARIMAS pada bulan Oktober 1995 di Semarang dengan varian rasa Jeruk Segar. Saat ini telah berkembang menjadi 24 rasa.

Produk lainnya adalah minuman susu dengan merk Milkimas; Es Puter yang tersedia dalam 8 varian rasa; minuman Teh Serbuk dengan merk Teh Arum; Marimas Adem dengan 4 varian rasa; produk Ice Stick dengan merk Marimas Es Lilin; Indosedap

Susu Jahe; produk minuman serbuk buah premium 100% gula asli dengan merk Marimas Fruitz; produk kopi 3 in 1 dengan merk Koko Beluk Icepresso.

Untuk peningkatan dan mengendalikan konsistensi mutu, PT. Marimas Putera Kencana telah menerapkan Quality Management System ISO 9001: 2000 yang telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi dari Australia; sekarang sedang dalam tahap penerapan ISO 22000. Semua produk PT. Marimas Putera Kencana telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Profil Mitra Binaan PT. Marimas Putera Kencana

Masyarakat yang berada di Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur adalah masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai karyawan dan memiliki usaha kelontong di sekitaran perumahan tersebut. Masyarakat yang berada di Desa Kinibalu selain berprofesi sebagai pedagang kelontong, mereka menganggur di rumah sehingga tulang punggung keluarga hanya berpusat pada kepala keluarga saja sehingga perekonomian menjadi kurang stabil. Bermula dari kreatifitas Ibu Ismi dengan keuletannya dalam mengolah limbah kemasan sehingga perusahaan marimas melihat kreatifitas tersebut dan mengajak untuk berkerjasama sejak tahun 2007 dan telah menghasilkan berbagai macam varian kreasi dari olahan limbah kemasan marimas.

Tahapan CSR PT. Marimas Putera Kencana untuk Program Daur Ulang Limbah Kemasan

Tahapan CSR perusahaan meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Program daur ulang limbah kemasan ini bisa dilakukan karena dari warung-warung binaan PT. Marimas mengumpulkan limbah kemasan yang disetorkan ke perusahaan. Kemudian oleh pihak perusahaan dipilah mana kemasan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai. Kemasan yang layak pakai dikumpulkan tersendiri dan oleh perusahaan disetorkan ke mitra binaan ke Desa Kinibalu Barat di daerah Semarang Timur. Adapun detail tahapannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Tahapan CSR PT. Marimas Putera Kencana
 untuk Program Daur Ulang Limbah Kemasan**

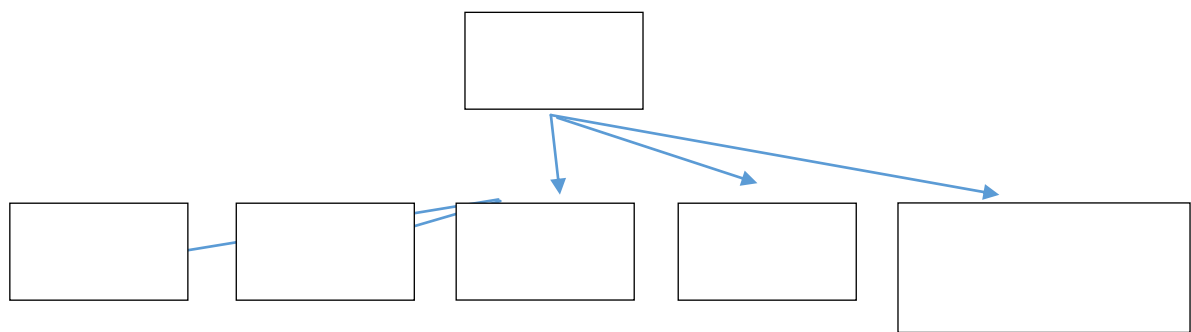
No	Nama kegiatan	Marimas	Warung Binaan	Mitra Binaan di Desa Kinibalu Barat
1	Tahapan Perencanaan	Perusahaan menjadwalkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah kemasan dari warung mana saja yang akan diambil tiap periodenya. 2. Edukasi pengumpulan limbah kemasan dalam hal pemotongan dan kebersihan kemasan kepada warung binaan. 3. Distribusi limbah kemasan ke Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur. 4. Produk apa yang dipertukarkan dengan limbah kemasan untuk diberikan kepada warung binaan. 5. Pelatihan daur ulang limbah kemasan menjadi produk bernilai tambah kepada mitra binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur. 	Warung binaan di area Semarang menjadwalkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi pemotongan dan kebersihan limbah kemasan dari marketing perusahaan. 2. Pengumpulan limbah kemasan kepada sales perusahaan tiap periodenya. 3. Pertukaran limbah kemasan dengan produk bernilai guna dari perusahaan. 	Kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur menjadwalkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan limbah kemasan dari marketing perusahaan. 2. Pelatihan dari tim kreatif perusahaan untuk daur ulang limbah kemasan menjadi produk bernilai tambah. 3. Penyetoran hasil daur ulang limbah kemasan berupa produk ke gerai Marimas. 4. Penyetoran hasil daur ulang limbah kemasan berupa produk ke pemesan individu atau kelompok.
2	Tahapan Implementasi	Perusahaan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan warung dan outlet yang akan diedukasi tentang customer service excellent dan pemanfaatan limbah kemasan melalui tim marketingnya. 2. Pendataan kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang tentang sumber daya apa saja yang berpotensi untuk peningkatan kreativitas dan produktivitas. 3. Penelusuran ke 	Warung binaan di area Semarang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan tim marketing perusahaan tentang pelatihan customer service excellent dan penukaran limbah kemasan dengan produk bernilai guna. 2. Pengumpulan limbah kemasan untuk disetorkan kepada tim marketing perusahaan. 3. Pertemuan dengan tim marketing untuk 	Kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan tim marketing perusahaan tentang sumber daya apa yang dimiliki untuk peningkatan produktivitas dan kreativitas mereka. 2. Kontak dengan tim kreatif perusahaan untuk menentukan pelaksanaan pelatihan daur ulang limbah kemasan. 3. Pelatihan daur ulang

No	Nama kegiatan	Marimas	Warung Binaan	Mitra Binaan di Desa Kinibalu Barat
		<p>warung & outlet untuk menginformasikan adanya pelatihan dan penukaran limbah kemasan dengan produk bernilai guna.</p> <p>4. Penugasan kepada tim marketingnya tentang pelatihan apa saja yang diperlukan bagi warung dan outlet binaan.</p> <p>5. Pelatihan customer service excellent pada warung dan outlet binaannya.</p> <p>6. Penukaran limbah kemasan dengan produk bernilai guna bagi warung dan outlet binaannya.</p> <p>7. Kontak dengan tim kreatif untuk melakukan pelatihan daur ulang limbah kemasan ke kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang.</p> <p>8. Pelatihan daur ulang limbah kemasan bagi kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang.</p> <p>9. Penerimaan hasil daur ulang limbah kemasan berupa produk dan men-display di gerai perusahaan.</p> <p>10. Pendampingan dalam hal penjualan produk hasil daur ulang limbah kemasan kepada pembeli individu atau kelompok.</p>	<p>pelatihan customer service excellent dan penukaran limbah kemasan.</p>	<p>limbah kemasan dengan tim kreatif yang ditunjuk oleh perusahaan.</p>
3	Tahapan Evaluasi	<p>Perusahaan melakukan:</p> <p>1. Evaluasi terhadap program pembinaan kepada warung atau outlet di area</p>	<p>Warung binaan di area Semarang melakukan:</p> <p>1. Pelaporan hasil penjualan dan keluhan konsumen</p>	<p>Kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur melakukan:</p> <p>1. Pelaporan kepada tim</p>

No	Nama kegiatan	Marimas	Warung Binaan	Mitra Binaan di Desa Kinibalu Barat
		<p>Semarang melalui tim marketingnya.</p> <p>2. Evaluasi terhadap program pelatihan daur ulang limbah kemasan pada kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang melalui tim marketingnya.</p> <p>3. Evaluasi terhadap tim kreatif program pembinaan daur ulang limbah kemasan di Desa Kinibalu Barat, Semarang.</p>	<p>atas layanan yang diberikan kepada perusahaan agar menjadi masukan bagi perusahaan untuk pengembangan produknya.</p> <p>2. Pelaporan jumlah limbah kemasan yang dikumpulkan kepada tim marketing perusahaan agar menjadi masukan perusahaan tentang persediaan limbah kemasan yang diperlukan dalam rangka melakukan pelatihan daur ulang limbah kemasan di Desa Kinibalu Barat, Semarang.</p>	<p>marketing perusahaan tentang produktivitas dan kreativitas yang telah dihasilkan dari pelatihan daur ulang limbah kemasan oleh tim kreatif perusahaan.</p> <p>2. Pelaporan kepada tim marketing perusahaan tentang workshop dan pameran apa saja yang sudah mereka ikuti serta pasar mana saja yang sudah dimasuki untuk mendapatkan dan memperkuat produk dan segmen pasar atas produk hasil daur ulang limbah kemasan.</p> <p>3. Pelaporan kepada tim marketing perusahaan tentang kreatifitas jenis lain yang mereka butuhkan untuk meningkatkan perekonomian kelompok binaan.</p>
4	Pelaporan	<p>Perusahaan melakukan:</p> <p>1. Dokumentasi atas perencanaan dan evaluasi dari program pembinaan untuk warung dan outlet serta program pelatihan bagi kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang.</p> <p>2. Dokumentasi atas langkah-langkah strategis yang diperlukan bagi pengembangan social entrepreneurship bagi kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang.</p>	<p>Warung binaan di area Semarang melakukan:</p> <p>1. Dokumentasi atas program pembinaan yang dilakukan oleh tim marketing perusahaan berupa pelatihan customer service excellence.</p> <p>2. Dokumentasi atas program pembinaan yang dilakukan tim marketing perusahaan berupa penukaran limbah kemasan dengan produk bernilai guna.</p>	<p>Kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat, Semarang Timur melakukan:</p> <p>1. Dokumentasi atas program pelatihan daur ulang limbah kemasan yang dilakukan rutin dengan tim kreatif perusahaan.</p> <p>2. Dokumentasi atas berbagai workshop dan pameran yang sudah diikuti mereka untuk pengembangan produk dan pasar.</p>

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Visi dan misi PT. Marimas Putera Kencana selain membuat perusahaan maju, lingkungan di sekitarnya juga maju. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah Rukun Tangga, Rukun Warga, dan karyawan yang berada di sekitar perusahaan. Caranya memajukan adalah dengan pemberdayaan. Untuk itu PT. Marimas Putera Kencana menunjuk tim marketingnya dalam menangani program daur ulang limbah di Desa Kinibalu Barat, Semarang. Adapun struktur organisasi tim marketing PT. Marimas Putera Kencana adalah sebagai berikut:



*CSR bisa masuk tiap divisi dalam marketing perusahaan.
Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Marketing
PT. Marimas Putera Kencana

PT. Marimas Putera Kencana melakukan kerjasama dengan warung-warung di seluruh Indonesia. Warung dan outlet yang diajak kerjasama Marimas di Semarang sekitar 1000 sampai 2000 warung. Perusahaan menyuplai warung-warung dengan produk-produk marimas, kemudian pihak warung menukarkan limbah kemasan kepada Marimas untuk ditukar dengan alat-alat yang mereka butuhkan dalam berbisnis. Istilahnya ‘tukar bungkus kosong’. Contoh: 1000 sachet kosong bisa ditukar dengan kipas angin tornado. Bungkus kosong tersebut juga bisa ditukar dengan kompor, dispenser, dan blender sesuai dengan kebutuhan tiap warungnya. Setiap 3 – 6 bulan sekali akan direview barang pemberian dalam program ‘tukar bungkus kosong’ sehingga tidak monoton.

Perusahaan menunjuk tim kreatif untuk memberikan pelatihan daur ulang kemasan marimas. Tim kreatif tersebut adalah Ibu Ismi dan Ibu Ika. Ibu Ismi berusia 60 tahun dan memiliki keahlian dalam mendaur ulang limbah kemasan sehingga menjadi produk yang

memiliki nilai guna. Limbah kemasan Marimas yang diterima dari warung-warung tersebut disalurkan secara gratis kepada tim kreatif perusahaan yaitu Ibu Ismi dan Ibu Ika.

Ibu Ismi dapat mengembangkan produk dari limbah kemasan Marimas. Ada sekitar 25 jenis produk yang dikembangkan dari bungkus kosong Marimas. Adapun produk tersebut di antaranya: tas, dompet, binder, gantungan kunci, tong sampah, taplak meja, tikar, dan lain-lain. Ibu Ika kerap mengkombinasi bungkus kosong Marimas dengan hidroponik dan kardus.

Ibu Ismi tidak hanya melatih kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat namun juga melatih kelompok binaan di wilayah Jomblang, Jatibarang, Tapak Tugu, dan desa-desa lainnya tentang daur ulang produk limbah menjadi karya seni yang memiliki nilai lebih.

PT. Marimas Putera Kencana sebagai penyalur bahan baku untuk tim kreatif perusahaan dan kelompok binaan, Marimas juga mengajak mereka untuk mengikuti pameran-pameran produk UKM melalui seminar atau workshop kewirausahaan baik yang digagas Pemerintah maupun swasta.

Produk-produk hasil karya Ibu Ismi dan Ibu Ika dibeli PT. Marimas Putera Kencana untuk dipamerkan di *spot display* Marimas sebagai ajang promosi (*branding*) ataupun untuk dijual. Selain menjual produk-produk di *spot display* Marimas dan pameran-pameran produk hasil karya UKM, Ibu Ismi juga bekerjasama dengan BLH, Departemen Perdagangan, Pemerintah Daerah (Walikota) untuk pemasaran produk-produknya, sedangkan Ibu Ika bekerjasama dengan Amarta.

Pengukuran Konsep CSR PT. Marimas Putera Kencana dalam Lima Pilar Aktivitas CSR

Menurut Wibisono (2017), konsep CSR dapat diukur dengan lima pilar aktivitas CSR yaitu *building human capital, strengthening economies, assessing social cohesion, encouraging good governance, protecting the environment*. Penjelasan dari masing masing pilar adalah sebagai berikut:

Building human capital. Perusahaan merancang program CSR berupa pelatihan daur ulang limbah kemasan yang berwujud produk kerajinan sebagai cara perusahaan melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Kinibalu Barat Semarang. Upaya ini diharapkan dapat merangsang kesadaran kelompok binaan ini untuk meningkatkan jiwa

kewirausahaan, keterampilan kewirausahaan, dan kemampuan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai sosial. Hasil dari program ini, kelompok binaan memiliki *mindset* untuk berwirausaha dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga menghasilkan sikap yang baik ketika mereka menjalankan kewirausahaan sosial.

Strengthening economies. Hasil kerajinan dari limbah kemasan Marimas ini memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Ibu-ibu rumah tangga yang mendapat pelatihan daur ulang limbah kemasan di Desa Kinibalu Barat Semarang merasa puas bisa mendapat keterampilan membuat produk kerajinan. Hal ini disebabkan mereka dapat membantu suaminya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Uang hasil penjualan produk kerajinan tersebut digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka, serta sebagian disisihkan untuk kegiatan bersama anggota kelompok yang lain, seperti untuk rekreasi, arisan, dan acara tutup tahun.

Perusahaan melakukan dua hal untuk memperkuat ekonomi kelompok binaan, yaitu *community service* dan *community development*. *Community service* berupa pemberian secara gratis bahan baku pembuatan kerajinan yaitu limbah kemasan Marimas. Limbah kemasan ini diperoleh dari program ‘penukaran bungkus kosong’ Marimas untuk warung dan outlet binaannya di area Semarang. Perusahaan mengganti bungkus kosong Marimas dengan kompor, dispenser, dan blender sesuai dengan kebutuhan tiap warung/ outlet-nya. Hal ini akan menciptakan apa yang disebut dengan *community development*. Dampaknya penguatan ekonomi tidak hanya bagi kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang, namun juga bagi warung dan outlet binaan di area Semarang.

Assessing social cohesion. Dees & Anderson (2003) menyatakan bahwa kewirausahaan sosial menekankan kemampuan untuk menyambungkan pengusaha sosial dengan nilai-nilai sosial. Dalam hal ini manajemen PT. Marimas Putera Kencana telah mempraktikkannya dalam ruang lingkup bisnis mereka. Perusahaan menyadari bahwa profitabilitas dan kelangsungan usaha organisasi tumbuh karena peran serta warga masyarakat. Untuk itu perusahaan berusaha menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, khususnya warung, outlet, dan kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang. Program CSR dimanifestasikan melalui pelatihan customer service excellence dan penukaran bungkus kosong kemasan kepada warung/ outlet binaan serta program daur

ulang limbah kemasan, workshop & pameran, dan pemasaran bagi kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang.

Encouraging good governance. Pelatihan daur ulang limbah kemasan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar operasionalisasi program. Untuk itu Marimas melalui tim kreatif yang ditunjuk perusahaan memberikan fasilitas produksi untuk membuat kerajinan dari limbah kemasan Marimas. Perusahaan meminta Ibu Ismi sebagai tim kreatifnya untuk memberikan pelatihan dan seminar tentang daur ulang limbah kemasan di berbagai tempat yang disponsori oleh Marimas. Ibu Ismi sendiri telah mendapatkan berbagai penghargaan dari Pemerintah dan PT. Marimas Putera Kencana dalam usahanya menyelamatkan lingkungan dengan cara mengembangkan industri kreatif.

Selain itu, Marimas melalui tim marketingnya selalu melakukan monitoring untuk mengevaluasi apakah program pelatihan tersebut mengalami hambatan atau tidak. Perusahaan juga menerima ataupun memberikan masukan tentang manajemen organisasi bagi kelompok binaan agar tercipta kontinuitas dan konsistensi program CSR perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Austin, et al (2006) bahwa kewirausahaan sosial itu terkait dengan pola kepemimpinan untuk mendapatkan lingkup bisnis yang sinergi dengan lingkungan perusahaan, dalam hal ini warung/ outlet binaan di area Semarang dan kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang. Dampak berikutnya adalah terbangunnya reputasi yang positif dari perusahaan dan mitra binaan perusahaan.

Protecting the environment. Program pelatihan daur ulang limbah kemasan adalah salah satu upaya PT. Marimas Putera Kencana untuk melestarikan lingkungan di sekitarnya. Limbah berupa bungkus kosong Marimas sulit terurai secara cepat dan mengakibatkan penumpukan sampah. Perusahaan peduli terhadap hal ini sehingga daripada bungkus kosong Marimas ini menimbulkan pencemaran maka diolah sedemikian rupa menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai guna. Motif dari bungkus kosong Marimas yang beraneka ragam menambah daya tarik produk kerajinan ini.

Dalam usahanya untuk menyelamatkan lingkungan hidup, Marimas bekerjasama dengan Komunitas Alam Pesona Lestari (APL) Jomblang. Komunitas ini juga memanfaatkan daur ulang limbah kemasan Marimas untuk membuat produk-produk kerajinan. Selain itu Marimas juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang

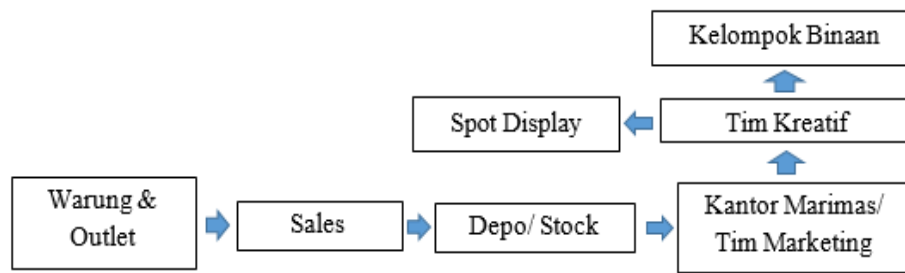
untuk mensosialisasikan pelatihan daur ulang kemasan menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Lima pilar aktivitas CSR di atas menunjukkan bahwa PT. Marimas Putera Kencana telah mempraktikkan konsep CSR secara utuh dan terpadu. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi untuk menjalankan ISO 26000 yaitu terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan bagi lingkungannya sehingga tercipta *win-win solution* yang bertujuan untuk keuntungan bersama.

Aktivitas CSR PT. Marimas Putera Kencana dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial

Berdasarkan Raharjo (2011), salah satu ciri-ciri kewirausahaan sosial adalah perusahaan memiliki orang-orang yang punya keterampilan kewirausahaan untuk memecahkan masalah sosial. Dalam hal ini Marimas menunjuk tim kreatif perusahaan yaitu Ibu Ismi, Ibu Ika, dan tim marketing untuk mengupayakan suatu program bagi pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang berada di Desa Kinibalu Barat Semarang berprofesi sebagai karyawan. Sebagian lain memiliki usaha kelontong. Apabila dagangan sepi, mereka tidak memiliki aktivitas lain untuk menopang kebutuhan keluarga. Marimas melihat hal ini sebagai masalah sosial. Dampak dari hal ini adalah perekonomian keluarga menjadi labil dan adanya efek domino pada penurunan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Sejak tahun 2007, Marimas bekerjasama dengan kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang untuk mengadakan pelatihan daur ulang limbah kemasan dengan menunjuk Ibu Ismi dan Ibu Ika sebagai tim kreatifnya. Untuk *monitoring* program, tim marketing Marimas melakukan perencanaan dan evaluasi, sehingga kekurangan program ini dapat disempurnakan. *Value chain* program daur ulang limbah kemasan untuk Desa Kinibalu Barat Semarang adalah sebagai berikut:



Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Gambar 2. Value Chain Program Daur Ulang Limbah Kemasan

Program CSR perusahaan berupa daur ulang limbah kemasan di Desa Kinibalu Barat Semarang tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada komitmen manajemen PT. Marimas Putera Kencana. Hal ini menguatkan pendapat dari Austin, et al (2006) dan Dees & Anderson (2003) yang menyatakan bahwa faktor kepemimpinan memiliki peran penting dalam pengembangan kewirausahaan perusahaan yang bernilai sosial. Bahkan saat ini perusahaan telah merancang program CSR yaitu GMG (*Go Milky Go*) Café. Perusahaan menawarkan bisnis usaha jenis café kepada internal perusahaan (lebih dari 100 karyawan) dan eksternal perusahaan (publik: 200-300 orang). Fasilitas yang diberikan untuk bisnis café ini adalah: 1 booth, 4 kartoon produk, kaos, blender, cup. Fasilitas tersebut jika dinilai seharga Rp. 4 juta. Namun untuk karyawan Marimas mendapat harga Rp. 1 juta, sedangkan untuk eksternal perusahaan (publik) seharga Rp. 1,5 juta. Dengan adanya bisnis sosial ini diharapkan perusahaan bisa bersinergi dengan lingkungannya, sesuai dengan slogan perusahaan yaitu ‘Tumbuh Bersama Marimas’.

Menurut Austin & Reficco (2009), kewirausahaan sosial juga memiliki ciri perusahaan mampu memanfaatkan peluang dengan mengelola sumber daya yang ada menggunakan cara-cara yang baru. Dalam hal ini akan diwujudkan Marimas dengan cara bekerjasama dengan Bank Sampah Lestari di daerah Tembalang. Nilai lebih dari Bank Sampah Lestari adalah setiap kegiatan yang dilakukan di-*publish* di sosial media. Ada daftar menu sampah, misalnya menu kertas, besi, atau kardus. Sampah-sampah tersebut ditimbang dan diberi harga, kemudian dibuatkan tabungan. Bank Sampah Lestari telah bekerjasama dengan SMA 1 Ungaran dengan cara mewajibkan para murid setiap 2 minggu sekali (hari Jumat) membawa sampah ke sekolah. Marimas akan mengikuti model seperti

itu bekerjasama dengan murid SD. Marimas akan memfasilitasi tas untuk membawa sampahnya. Hal ini juga menjadi *branding* bagi perusahaan.

Menurut Mair dan Marti (2006), ciri-ciri lain kewirausahaan sosial adalah adanya transformasi organisasi dalam usaha perbaikan sosial. PT. Marimas Putera Kencana telah bertransformasi menjadi penjamin kelangsungan usaha warung/ outlet binaannya. Marimas bekerjasama dengan Bank BRI untuk menanggung bunga pinjaman warung/ outlet binaannya tersebut. Program ini dinamakan Marimas sebagai 'Program Warung Cantik'. Harapannya adalah warung/ outlet binaan ini dapat berkembang usahanya dan mampu meningkatkan kesejahteraan pemilik ataupun karyawannya.

Marimas juga mengembangkan model bisnis baru untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan ciri-ciri kewirausahaan sosial menurut pendapat Grayson & Hodges (2004). Saat ini selain mengembangkan program daur ulang limbah, Marimas juga sedang merancang pengembangan Desa Wisata dengan nama Kampung Pelangi, Kampung Batik, dan Kampung Jamu. Kampung Pelangi ada di daerah Kampung Batik di daerah Mbubaan, Kampung Jamu di daerah Mijen, dan Desa Wisata Kandri di daerah Gunung Pati akan dirancang bentuk atau model bisnisnya.

Dalam mengembangkan model bisnis baru ini, Marimas akan bekerjasama dengan penjual-penjual, pembina, atau aparat desa di daerah tersebut. Marimas berencana mengembangkan spot-spot bisnis di daerah wisata. Saat ini sedang dirancang untuk pemetaan atau desain desa wisata di Kampung Pelangi, Kampung Batik, dan Kampung Jamu. Di Kampung Pelangi akan dibuat setiap 200 meter ada spot Marimas. Sebelumnya Marimas akan mempersiapkan pemetaannya dengan titik-titik wisata, seperti: spot untuk menjual GMG Café, spot untuk foto-foto, spot untuk tempat ibadah, dan spot untuk makam juru kunci yang bernama Mbah Brintik.

Kesimpulan

Aktivitas CSR PT. Marimas Putera Kencana terbagi dalam tahapan CSR yang dilakukan perusahaan, pengukuran konsep CSR, dan keterkaitan CSR perusahaan dalam pengembangan kewirausahaan sosial di Desa Kinibalu Barat Semarang sebagai mitra binaan perusahaan.

PT. Marimas Putera Kencana dalam menjalankan aktivitas CSR memiliki beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Untuk pengukuran konsep CSR, perusahaan menggunakan lima pilar aktivitas CSR yaitu *building human capital, strengthening economies, assessing social cohesion, encouraging good governance, protecting the environment*.

Adapun keterkaitan CSR perusahaan dalam pengembangan kewirausahaan sosial dapat diidentifikasi melalui adanya keterampilan kewirausahaan, kepemimpinan bernilai sosial, pengelolaan sumber daya dengan cara baru, transformasi organisasi, dan model bisnis baru untuk mengatasi masalah sosial.

Implikasi Terapan

Kendala yang dihadapi mitra binaan PT. Marimas Putera Kencana baik itu warung/ outlet maupun kelompok masyarakat di Desa Kinibalu Barat Semarang adalah tentang ketidakpastian permintaan pasar. Akhirnya produk kemasan Marimas ataupun produk kerajinannya menumpuk. Hal ini membuat motivasi anggota kelompok menjadi menurun dalam memproduksi produk kerajinan. Untuk itu perusahaan perlu membekali kelompok binaannya dengan kemampuan memasarkan produk dan pengembangan produk baru. Hal ini terkait dengan sosialisasi dan promosi produk kerajinan dari daur ulang limbah kemasan serta menambah variasi produk. Untuk itu, Marimas perlu membenahi spot display nya agar lebih menarik dan menata dengan rapi berbagai produk kerajinan hasil karya dari kelompok binaan, sehingga para pengunjung mendapatkan edukasi serta menumbuhkan minat beli konsumen.

Ke depan, perusahaan dapat melakukan kombinasi program CSR. Misalnya pada saat membangun Desa Wisata, ada spot untuk menjual cinderamata yang dihasilkan dari daur ulang limbah kemasan. Warung/ outlet binaan perusahaan juga dapat dijadikan sarana menjual hasil karya dari kelompok binaan di Desa Kinibalu Barat Semarang. Program Bank Sampah bagi siswa Sekolah Dasar yang akan dikembangkan Marimas juga dapat difasilitasi kelompok binaan dengan membuat tas dari daur ulang limbah yang akan dipergunakan untuk membawa sampah setiap periodik ke sekolah.

Diskusi

Penelitian tentang CSR yang berkaitan dengan *social entrepreneurship* memunculkan konsep baru yang dikenal dengan nama CSE (*Corporate Social Entrepreneurship*). Untuk mempelajari tentang CSE, harus dipahami terlebih dahulu tentang *corporate entrepreneurship* dan penciptaan nilai sosial.

Dimensi yang sebelumnya telah digunakan untuk mengukur *corporate entrepreneurship* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Covin dan Slevin (1986) serta Kearney, et al (2007) memfokuskan orientasi kewirausahaan perusahaan pada inovasi dan proaktif. Sedangkan Brazeal (1993) dan Zahra (1993) memfokuskan kewirausahaan perusahaan pada pengelolaan bisnis baru, inovasi, dan pembaharuan organisasi. Adapun Antoncic dan Hisrich (2001) menunjukkan perspektif yang lebih komprehensif, dimensi *corporate entrepreneurship* adalah bisnis ventura baru, inovasi, pembaruan organisasi, dan proaktif.

Young (2008) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan nilai sosial. Hal ini terkait dengan masalah sosial yaitu kemiskinan. Menurutnya kemiskinan disebabkan oleh infrastruktur yang buruk, kekurangan informasi, kekurangan pengetahuan dan keterampilan, serta buta huruf. Vachani & Smith (2008) menambahkan bahwa penciptaan nilai sosial memiliki empat dimensi, di antaranya yaitu: nilai tambah sosial, pemberdayaan, perubahan sistemik, dan inovasi sosial. Untuk itu penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk menganalisis gambaran CSE perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Agustina, N. (2012). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Hulu Energy WMO dalam Pengembangan Masyarakat Di Kecamatan Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 1, N0. 1.
- Ambadar J. (2008). *Coporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta (ID): Elex Media Komputindo.
- Antoncic, B. & Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation. *Journal of Business Venturing* 16, no. 5: 495–527.
- Austin, J., Leonard, H., Reficco, E. and Wei-Skillern, J. (2006). Corporate Social Entrepreneurship: The New Frontier. *In The Accountable Corporation. Volume 3:*

- Corporate Social Responsibility*, edited by M. Epstein and K. Hanson. Westport, CT: Praeger.
- Austin, J. & Reficco, E. (2009). Corporate Social Entrepreneurship. *Working Paper 09-101 Harvard Business School*, March 3.
- Boyle, M. E., and Boguslaw, J. (2007). Business, Poverty and Corporate Citizenship: Naming the Issues and Framing Solutions. *Journal of Corporate Citizenship* 26: 101–120.
- Brazeal, D.V. (1993). Organizing for Internally Developed Corporate Ventures. *Journal of Business Venturing* 8, no. 1: 75–90.
- Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1986). The Development and Testing of an Organizational-Level Entrepreneurship Scale. In *Frontiers of Entrepreneurship Research*, ed. R. Ronstadt, R. Peterson, and K.H. Vasper, 628–639. Wellesley, MA: Babson College.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dees, J. G. & Anderson, B. B. (2003). *For Profit Social Ventures, in Social Entrepreneurship*, edited by Marilyn L. Kourilsky and William B. Walstad. Senate Hall Academic Publishing.
- Drucker, P. F. (1993). *Innovation and Entrepreneurship*. Harper Business: New York.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business*. BC: New Society Publishers. Gabriola Island.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Perspective*. Boston: Pitman.
- Grayson, D., and A. Hodges. (2004). *Corporate Social Opportunity: Steps to Make Corporate Social Responsibility Work for Your Business*. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing Limited.
- Hawkins, D. (2006). *Corporate Social Responsibility: Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jones T. M. & Wicks A. C. (1999). Convergent Stakeholder Theory. *Academy of Management Review* 24 (2): 206-221.
- Jonker, J. & Foster D., (2002). Stakeholder Excellence: Framing the Evolution and Complexity of a Stakeholder Perspective of the Firm. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 9, 187–195.
- Kanji, G.K., and P.K. Chopra. (2010). Corporate Social Responsibility in a Global Economy. *Total Quality Management and Business Excellence* 21, no. 2: 119–143.
- Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2007). Facilitating Public Sector Corporate Entrepreneurship Process: A Conceptual Model. *Journal of Enterprising Culture* 15, no. 3: 275–299.
- Kotler, P. dan Kotler, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Canada: John Willey & Sons. Inc.

- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Lestya, L. T. (2013). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bekasi (Studi Kasus CSR PT. Jababeka, Tbk Cikarang). *Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB*.
- Mair, J. & Marti, I. (2006). Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight. *Journal of World Business*, Vol. 41, Issue 1, pp. 36-44.
- Maulana, M. R. (2009). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rekayasa Industry Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat. *Skripsi Program Sarjana Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor*.
- Nugroho, D. C. (2013). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Indopherin Jaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pilang Kota Probolinggo. *Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Brawijaya Malang*.
- Post J. E., Preston L. E., Sachs, S. (2002). Managing the extended enterprise: The new stakeholder view. *California Management Review* 45 (1): 6-28.
- Rahadi, D. R. & Zaniat. (2014). Implementasi Konsep Kewirausahaan Sosial sebagai Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Universitas Bina Darma, Palembang. eprints.binadarma.ac.id/.../zaniatlaporan%20artikel%20u%20dikti.d...
- Raharjo, S. T. (2011). Corporate Social Entrepreneurship: Social Entrepreneurship dalam Konteks Corporate Social Responsibility. <http://kesos.unpad.ac.id/2011/09/27/corporate-social-entrepreneurship-social-entrepreneurship-dalam-konteks-corporate-social-responsibility/>
- Simmons, J. (2004). Managing in the Post-Managerialist Era: Towards Socially Responsible Corporate Governance. *Management Decision* 32(3/4), 601–611.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukada, S. (2007). *CSR for Better Life: Indonesian Context, Membumikan Bisnis Berkelanjutan, Memahami Konsep & Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta (ID): Indonesian Business Links.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Tanudjaja, B. B. (2006). Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia, *NIRMANA*, Vol.8, No. 2, Juli, hal. 92-98.
- Vachani, S. and Smith, N.C. (2008). Socially Responsible Distribution: Distribution Strategies for Reaching the Bottom of the Pyramid. *California Management Review* 50, no. 2: 52–84.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- World Business Council for Sustainable Development. (2002). *Corporate Social Responsibility: The WBCSD's Journey*, pp. 1, <http://www.wbcsd.org>

- Yaumidin, U. K. (2011). Kewirausahaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multi Sektor dan Multi Dimensi. <https://media.neliti.com/media/publications/77596-ID-kewirausahaan-sosial-dan-tanggung-jawab.pdf>.
- Young, R. (2008). For What It Is Worth: Social Value and the Future of Social Entrepreneurship. In *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, ed. A. Nicholls, 56–73. Oxford: Oxford University Press.
- Zahra, S. A. (1991). Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study. *Journal of Business Venturing* 6, no. 4: 259–285.

MODEL ICT SEKTOR PERTANIAN: DITINJAU DARI KARAKTER ADOPTER DAN SOCIAL LEARNING

Tutuk Ari Arsanti

Surel: tutuk.arsanti@staff.uksw.edu
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRAK

Peran ICT dalam sharing pengetahuan telah banyak dibuktikan melalui sejumlah penelitian terdahulu. Namun demikian, masih sangat minim kajian terkait bagaimana model ICT dikembangkan dalam konteks sektor pertanian skala kecil. Dalam memahami model ICT yang efektif untuk sektor pertanian skala kecil dengan keterbatasan akses teknologi dan pengetahuan, peneliti meninjau karakteristik adopter dan social learning theory untuk mengembangkan ICT model. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk memahami gambaran mengenai karakteristik adopter dan literature review terkait dalam mengembangkan model ICT untuk sektor pertanian skala kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengembangkan kelompok sebagai pusat informasi dapat menjadi ICT yang mendukung terjadinya sharing pengetahuan diantara kelompok tani dan sub sistem seperti pasar, institusi, distributor dan lainnya dalam sistem pertanian yang ada. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pada sektor pertanian skala kecil dapat meningkatkan kemampuan akses informasi dan pengetahuan.

Kata Kunci: *ICT, Karakteristik Adopter, Knowledge Sharing, Social Learning*

Pendahuluan

Gambaran sektor pertanian Indonesia secara makro menunjukkan bahwa sektor pertanian masih didominasi pada pertanian skala kecil yang pada umumnya menghadapi persoalan minimnya akses informasi dan pengetahuan. Rendahnya akses pendidikan baik secara formal maupun informal serta minimnya sarana untuk peningkatan arus informasi mempersulit akses informasi dan pengetahuan bagi para petani skala kecil. Lemahnya jaringan komunikasi yang dimiliki dan belum optimalnya fungsi aparat dan sub sistem dalam sistem pertanian telah menyebabkan informasi menjadi asimetris. Meski banyak hasil penelitian membuktikan peran Information and Communication Technology (ICT) sangat besar dalam akses informasi dan pengetahuan, namun demikian penguasaan teknologi komunikasi dan informasi berbasis IT yang rendah pada sektor pertanian skala kecil menjadi kendala tersendiri dalam upaya meningkatkan arus informasi dan

pengetahuan pada sektor pertanian skala kecil. Perlunya dikembangkan model ICT yang tepat dalam meningkatkan akses informasi dan pengetahuan diantara petani maupun dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pertanian akan mendorong meningkatnya arus informasi dan pengetahuan yang lebih lanjut dapat menjadi dasar dalam proses kreasi pengetahuan dan adopsi inovasi.

Pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tidak hanya persoalan ICT yang dapat mempengaruhi akses informasi dan pengetahuan yang mendukung proses adopsi inovasi. Namun demikian, faktor karakteristik adopter sendiri menjadi faktor yang menentukan proses adopsi inovasi (Rogers, 1971). Dengan demikian, pengembangan model ICT yang tepat membutuhkan pertimbangan akan perbedaan karakter adopter yang mungkin terjadi. Hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat adanya perbedaan karakter dapat berdampak pada preferensi sumber informasi dan pengetahuan yang digunakan adopter. Sedangkan faktor yang lain seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat kosmopolitan (Prabayanti, 2010; Febriantje, 2012) adopter juga dapat mempengaruhi cepat lambatnya akuisisi informasi dan pengetahuan yang digunakan dalam proses adopsi inovasi. Lebih lanjut dalam penelitian Herman dkk (2006) menjelaskan pentingnya keberadaan kelompok atau komunitas dalam akses informasi dan pengetahuan maupun sebagai media dalam proses *social learning* yang dapat mendorong proses adopsi inovasi.

Pengembangan model ICT pada sektor pertanian skala kecil untuk membantu akses informasi dan pengetahuan sehingga dapat mendorong proses adopsi inovasi masih minim dikaji. Dengan demikian dalam penelitian ini mencoba mengembangkan kerangka model untuk mengembangkan ICT pada sektor pertanian skala kecil dengan memperhatikan karakter adopter dan *social learning* yang ada pada sektor pertanian skala kecil.

Permasalahan

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dalam penelitian ini persoalan yang hendak dikaji adalah bagaimana model ICT dikembangkan pada sektor pertanian skala kecil dengan mempertimbangkan karakter adopter dan *social learning* sehingga dapat membantu akses informasi dan pengetahuan yang lebih baik untuk mendorong proses adopsi inovasi.

Kajian Pustaka

Karakter Adopter

Penguasaan informasi dan pengetahuan tidak hanya akan mempengaruhi proses kreasi pengetahuan dalam diri individu yang mendasari terbangunnya kemampuan berinovasi tetapi juga mempengaruhi proses adopsi inovasi. Namun demikian, tingkat kecepatan individu dalam proses adopsi inovasi berbeda-beda dipengaruhi oleh karakter individu. Menurut Rogers (1971), terdapat 5 macam karakter yang dapat mempengaruhi dalam proses adopsi inovasi baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yaitu *Innovator*, *Early Adopter*, *Early majority*, *Late Majority* dan *Laggard*.

Karakter *Innovator* dicirikan dengan perilaku individu atau kelompok yang bersedia menjadi yang pertama kali dalam menyebarkan, menciptakan dan mempengaruhi sebuah adopsi inovasi. Karakter *innovator* biasanya memiliki banyak ide baru yang akan diimplementasikan karena didukung dengan dimilikinya pengetahuan yang luas (Musyafak dan Ibrahim, 2005).

Early adopter merupakan individu atau kelompok yang pertama kali menerima sebuah informasi inovasi dan kemudian diikuti dengan keinginan untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada individu atau kelompok lain. Karakter ini juga dapat disebut dengan perintis sebuah adopsi inovasi. Karakter ini termasuk dalam kategori karakter yang cepat dalam melakukan adopsi inovasi tetapi dibandingkan dengan karakter *innovator* karakter ini memiliki kecepatan dibawahnya.

Early majority merupakan individu atau kelompok yang mendapat informasi dan pengetahuan cukup banyak tentang inovasi yang disebarkan dan dengan segera bersedia untuk mengadopsi sebuah inovasi. Karakter ini lebih banyak bersosialisasi dengan orang yang ada disekitarnya dengan begitu informasi yang didapat cukup banyak. Dalam proses adopsi inovasi masih dibawah kecepatan yang dimiliki oleh *early adopter* karena membutuhkan pertimbangan-pertimbangan melalui bertanya dan mendengarkan masukan dari orang sekitar. Karakter ini juga termasuk dalam kategori karakter cepat jika dibandingkan dengan karakter *late majority* dan *laggards*.

Late majority adalah individu atau kelompok yang memerlukan waktu lebih lama dalam meninjau dan membentuk persepsi sebelum mengambil keputusan untuk

mengadopsi inovasi (Rogers, 1983). Karakter ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk mempertimbangkan sebuah inovasi yang akan diadopsi. Karakter ini termasuk karakter lamban dalam proses adopsi inovasi.

Karakter *Laggards* adalah individu atau kelompok yang terakhir mengadopsi setelah mengetahui individu lain atau kelompok lain mengadopsi dan berhasil. Karakter *Laggard* dalam proses adopsi inovasi merupakan karakter individu dengan ciri –ciri yang dimiliki seperti berpendidikan rendah dan dengan itu pengetahuan yang dimiliki hanya sedikit. Pendidikan yang rendah dari adopter menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya adopter melakukan adopsi inovasi (Ferdiaz, 2008). Karakter *laggards* mempunyai kecenderungan untuk menolak sebuah inovasi dan paling terakhir melakukan adopsi inovasi.

Sedangkan karakteristik adopter seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat kosmopolitan individu juga dapat mempengaruhi dalam proses adopsi inovasi (Prabayanti, 2010; Febriantje, 2012). Perbedaan usia dapat mempengaruhi kemampuan fisik dan respon individu terhadap inovasi yang ada. Individu yang berusia lanjut akan sulit untuk diberikan pengertian. Sedangkan perbedaan tingkat pendidikan formal maupun non formal yang dimiliki dapat mempengaruhi cara berfikir (Susanto, 2008). Lebih lanjut adanya perbedaan tingkat kosmopolitan individu dapat menunjukkan tingkat keterbukaan terhadap dunia luar yang diukur berdasarkan banyaknya buku yang dibaca, frekuensi menonton televisi, mendengarkan radio dan membaca majalah/ brosur yang berkaitan dengan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan (Serah, 2013). Dengan perbedaan tersebut akan berdampak pada preferensi sumber informasi dan pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa 5 karakteristik adopter menurut Rogers dan karakteristik lain seperti usia, tingkat pendidikan, dan kosmopolitan memungkinkan adanya perbedaan preferensi individu dalam memilih sumber dan saluran informasi dalam mengakses informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam pengembangan model ICT bagi sektor pertanian skala kecil, 5 karakteristik adopter berdasarkan Rogers dan karakteristik lain seperti usia, tingkat pendidikan dan kosmopolitan perlu dipertimbangkan. Hal tersebut dapat mendukung optimalisasi ICT dalam mengakses dan mendistribusikan informasi dan pengetahuan bagi para petani skala kecil.

Social Learning Perspective

Dalam perspektif *social learning* individu dapat belajar melalui observasi terhadap perilaku, sikap, dan *outcome* dari individu yang lain. Karena sebagian besar perilaku manusia dihasilkan melalui hasil observasi atas perilaku individu lain untuk kemudian ditiru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan mengobservasi perilaku orang lain maka akan mendorong munculnya ide untuk menghasilkan perilaku yang baru dalam rangka menghasilkan *outcome* yang lebih baik (Bandura). *Social learning theory* menjelaskan bagaimana perilaku manusia bersifat reciprocal hasil dari penyesuaian terhadap aspek kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan secara terus menerus. Dengan demikian, selain faktor internal seperti karakter adopter yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor eksternal seperti interaksi individu dengan lingkungan sosialnya dapat berpengaruh terhadap proses learning yang mendasari proses adopsi inovasi (Mandasari, 2014). Keberadaan lingkungan sosial dapat berdampak dalam proses *social learning* yang dapat memfasilitasi akuisisi informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses adopsi inovasi. Seperti adanya kelompok tani dapat menjadi media dalam pemberian informasi dan pengetahuan tentang berbagai inovasi baik dari penyuluh atau pihak lain kepada anggota dalam kelompok. Dengan demikian, kelompok tani dapat memberikan informasi kepada anggotanya tentang inovasi yang baru dan dibutuhkan secara berkelanjutan. Mengingat dalam proses adopsi inovasi dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, dengan demikian kelompok berperan juga dapat mempengaruhi individu dalam melakukan adopsi inovasi guna memecahkan permasalahan yang ada.

Kelompok tani yang selama ini berkembang merupakan salah satu sub sistem dalam sistem pertanian yang ada di Indonesia yang berinteraksi dengan sub sistem lain yang berguna dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Setiap anggota dalam kelompok mempunyai intensitas komunikasi dan interaksi yang lebih tinggi dengan anggota internal kelompok dibanding dengan individu di luar sub sistem (Rogers dan Kincaid 1981). Interaksi antar anggota kelompok dengan individu-individu di luar kelompok dapat mempengaruhi bagaimana sharing informasi dan pengetahuan dapat dilakukan. Proses berbagi pengetahuan menurut Yeh et al (2011) dapat terjadi melalui proses observasi, imitasi, praktek, dan partisipasi baik formal dan informal. Berbagi

informasi dan pengetahuan melalui proses interaksi sosial juga dapat mendorong terjadinya kreasi pengetahuan (Nonaka et al, 2000).

Pengetahuan yang dimiliki individu dalam kelompok atau organisasi dapat diperoleh, ditransfer dan diciptakan dalam organisasi (Matthews, 1998) melalui proses *knowledge sharing*. Pengetahuan yang terus berkembang dalam organisasi memiliki pengaruh yang potensial terhadap perilaku (Slater & Narver, 1995) dan produktivitas yang lebih baik (Slater & Narver, 1995; Agryris, 1992). Namun demikian, dibutuhkan pengelolaan informasi dan pengetahuan yang baik untuk memfasilitasi terjadinya sharing informasi dan kreasi pengetahuan baru guna implementasi pengetahuan baru (Davenport and Marchand, 1992; Hibbard and Carrillo, 1998).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian *explanatory research*, karena penelitian mendeskriptifkan dari hasil yang didapat saat melakukan wawancara dan observasi lapangan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh langsung dari partisipan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan observasi.

Teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada partisipan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah di atas berdasarkan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang telah disusun lebih dahulu tetapi peneliti juga menggali informasi lain yang dibutuhkan yang bisa didapatkan dari partisipan. Peneliti terjun langsung melihat keadaan wilayah tersebut. Wawancara dilakukan *face to face* dengan cara peneliti meminta partisipan waktu untuk melakukan wawancara. Beberapa diantaranya melalui perjanjian terlebih dahulu. Wawancara berlangsung selama 30-60 menit untuk setiap partisipan. Observasi juga dilakukan dengan terjun langsung kelapangan melihat dan memahami apa yang ada dan terjadi pada objek penelitian tersebut terkait cara cara petani mengakses informasi dan ketersediaan sarana informasi.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis *mann-whitney* pada SPSS dengan mengkuantitatifkan terlebih dahulu data-data kualitatif yang sudah diperoleh melalui proses wawancara terstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik

analisis *mann –whitney* karena jumlah partisipan yang ditentukan sedikit dan analisis ditujukan untuk mengetahui perbedaan karakteristik yang dimiliki pada masing –masing karakter adopter. Sedangkan hasil wawancara melalui diskusi secara individu maupun kelompok dikelompok-kelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kelompok petani yang diamati dalam penelitian ini berada di wilayah lereng gunung dimana secara geografis akses terhadap informasi dan pengetahuan di bidang pertanian menjadi tidak mudah. Para petani di wilayah tersebut menanam sejumlah komoditas yang dilakukan secara turun temurun. Keengganan petani untuk mencoba menanam sesuatu yang baru atau menanam dengan cara baru sangatlah rendah mengingat sejumlah risiko seperti gagal panen atau tidak laku dijual dapat saja terjadi. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran tentang karakteristik petani seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Karakteristik Petani

Variabel	Rata-rata
Rata-rata umur (tahun)	43,5
Rata-rata tingkat pendidikan formal (tahun)	10,8
Tingkat kosmopolitas (%)	
- Persentase tingkat kosmopolitan tinggi	47,06
- Persentase tingkat kosmopolitan rendah	52,94

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata lamanya pendidikan yang diperoleh oleh para petani kurang dari 12 tahun yang merupakan batas minimal lama pendidikan dasar seseorang seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan demikian rata-rata para petani hanya mengenyam pendidikan setara SD dan SMP. Sedangkan dilihat dari tingkat kosmopolitan, para petani mempunyai tingkat kosmopolitan yang rendah. Hal tersebut dimungkinkan terjadi mengingat secara geografis wilayah pertanian mereka tidaklah dekat dari berbagai sumber informasi dan akses informasi dan

pengetahuan para petani sangatlah minim karena media atau sarana memperoleh informasi terkait dengan pertanian sangatlah minim. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan minimnya fasilitas informasi seperti buku, koran, majalah ataupun televisi menyebabkan akses informasi dan pengetahuan menjadi sangat minim.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara karakter adopter dikaitkan dengan proses penerimaan sebuah inovasi. Hal tersebut seperti yang nampak pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Evaluasi Terhadap Inovasi Pertanian Organik
 Pada Masing-Masing Kategori Adopter

Variabel Evaluasi Teknis dan Non Teknis	Adopter Cepat		Adopter Lambat	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Alasan Penerimaan Inovasi				
a. Produktivitas tanaman lebih tinggi	8	53,34	4	26,67
b. Meningkatkan pendapatan	3	20,00	2	13,33
c. Menghemat biaya produksi	2	13,33	8	53,33
d. Ramah lingkungan	2	13,33	1	6,67
Jumlah	15	100	15	100
Proses Penerimaan Inovasi				
a. Yakin dan langsung menerapkan	5	33,33	2	13,33
b. Dicoba dulu dalam skala kecil	9	60,00	12	80,00
c. Menunggu bukti dari petani lain	1	6,67	1	6,67
Jumlah	15	100	15	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel 3 di atas, alasan petani mengadopsi sebuah inovasi jika ditinjau dari karakter adopter yang berbeda menunjukkan bahwa petani yang tergolong sebagai adopter cepat sebagian besar dapat menerima sebuah inovasi berdasarkan evaluasi mereka terhadap produktivitas atau hasil tanam yang lebih tinggi (53,34%). Hal ini sesuai dengan pendapat Rogers (1995) yang menyatakan bahwa petani yang masuk adopter cepat bersedia mengadopsi suatu inovasi dengan pertimbangan utama berkaitan dengan hal teknis seperti produktivitas atau hasil yang akan diperoleh. Sebaliknya pada kategori adopter lambat aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama seperti adanya penghematan biaya produksi. Sedangkan dilihat dari proses penerimaan sebuah inovasi, para petani baik yang memiliki karakter adopter cepat maupun lambat sama-sama membutuhkan bukti dengan jalan mencoba terlebih dahulu dalam skala kecil sebelum mengadopsi lebih lanjut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan usia, tingkat pendidikan (lamanya pendidikan yang diperoleh) dan tingkat kosmopolitan petani menunjukkan adanya perbedaan karakter adopter yang terbentuk. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Rata-rata dan Hasil Uji Beda Nyata *Mann-Whitney* Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Komunikasi Petani Berdasarkan Kategori Adopter

Karakteristik	Adopter		Probability
	Cepat	Lambat	
Umur (tahun)	35,18	45,2	0,000**
Tingkat pendidikan formal (tahun)	13,81	9,10	0,000**
Tingkat cosmopolitan (skor)	4,71	2,18	0,000**

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan hasil uji beda nyata dengan menggunakan uji statistic *mann whitney* dapat dilihat pada tabel 3 di atas menjelaskan bahwa perbedaan karakter adopter cepat dan lambat didasarkan pada usia, tingkat pendidikan dan tingkat kosmopolitan petani menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan ($p \leq 0,01$). Hal tersebut dapat dipahami bahwa petani dengan usia yang lebih muda mempunyai karakter adopter yang cepat dibandingkan dengan petani dengan usia yang lebih tua. Demikian pula petani dengan tingkat pendidikan dan kosmopolitan yang lebih tinggi cenderung mempunyai karakter adopter cepat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kaitan antara faktor usia, tingkat pendidikan, dan kosmopolitan petani terhadap preferensi sumber informasi. Para petani skala kecil cenderung menyukai mencari atau mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui komunikasi personal daripada non personal. Perbedaan preferensi tersebut adalah signifikan yang ditunjukkan dengan nilai $p \leq 0,01$ yang berarti bahwa variabel umur, tingkat pendidikan formal, serta tingkat cosmopolitan berbeda sangat nyata atas preferensi mereka terhadap sumber informasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Rata-rata dan Hasil Uji Beda Nyata *Mann-Whitney* Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Komunikasi Petani Berdasarkan Preferensi Sumber Informasi

Karakteristik	Preferensi		Probability
	Non Personal	Personal	
Umur (tahun)	32,18	46,2	0,001**
Tingkat pendidikan formal (tahun)	14,81	7,10	0,000**
Tingkat cosmopolitan (skor)	5,71	2,08	0,000**

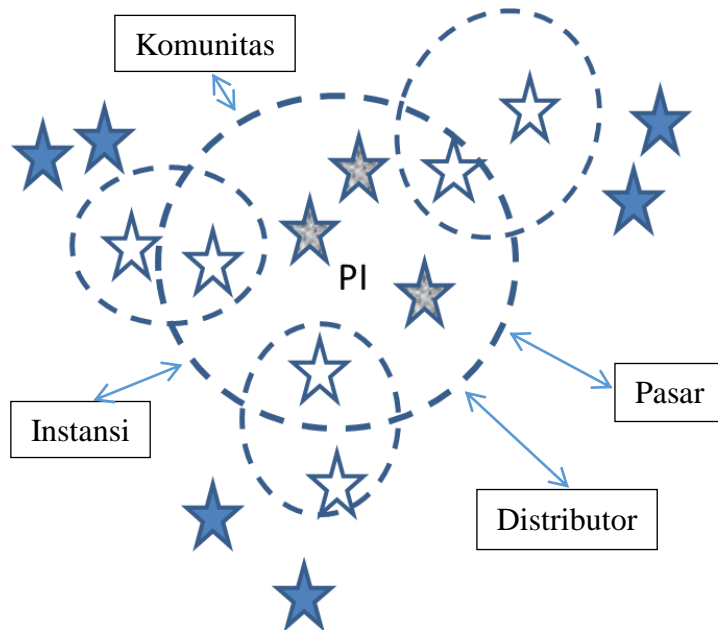
Sumber : Data Primer diolah (2016)

Preferensi petani terhadap sumber informasi baik personal maupun non personal, selain dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi dan perilaku komunikasi juga didasarkan pada karakter adopter yang dimiliki yaitu karakter adopter cepat atau lambat. Hal ini berkaitan dengan kecepatan petani dalam memahami isi atau pesan yang disampaikan oleh sumber informasi. Pratikno dan Priono (1978) dalam Syafrudin (2003) menyatakan bahwa pola komunikasi yang hidup di pedesaan sangat sederhana yaitu *face to face communication and interpersonal communication*. Hal ini disebabkan karena: a) tingkat pendapatan penduduk yang rata-rata masih rendah maka kemungkinan untuk menyediakan alat komunikasi seperti internet, koran, atau majalah pertanian masih kurang, b) tingkat pendidikan yang pada umumnya masih rendah. Tingkat pendidikan yang masih rendah umumnya kurang menyukai mengakses informasi dan pengetahuan melalui media non personal seperti koran, buku atau media massa lainnya.




Model ICT



Berdasarkan pada gambaran dari karakteristik petani skala kecil dapat dipahami bahwa pola komunikasi interpersonal masih mendominasi cara para petani mengakses informasi dan pengetahuan yang ada. Hal tersebut didorong dengan karakter petani yang dominan sebagai adopter lambat dan faktor lain seperti usia, tingkat pendidikan dan kosmopolitan petani. Dengan demikian, pengembangan pusat-pusat informasi yang difasilitasi dengan adanya lahan praktik yang dapat dilihat secara langsung untuk dipelajari dapat menjadi bentuk ICT dengan mengedepankan sarana komunikasi interpersonal untuk menunjang terjadinya proses *share of knowledge*. Adapun model ICT yang dapat dikembangkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Model ICT Pertanian Skala Kecil-Menengah



Keterangan gambar:

-  = Organisasi sebagai Pusat Informasi
-  = Anggota organisasi
-  = Interaksi

-  = Anggota sebagai vocal point
-  = Anggota masyarakat

Gambar di atas menjelaskan bagaimana ICT bagi kelompok petani skala kecil dapat dikembangkan melalui pengembangan kelompok sebagai pusat informasi yang dapat memfasilitasi penyebaran informasi dan pengetahuan baik bagi anggota kelompok sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Kelompok yang dibangun dapat menjadi sarana para petani kecil meningkatkan jaringannya dengan berbagai pihak seperti pasar, instansi, distributor ataupun sub sistem lain dalam sistem pertanian. Adanya jaringan yang terbangun dapat menjadi media dalam meningkatkan arus informasi dan pengetahuan baik diantara petani maupun dengan pihak luar. Keberadaan jaringan dapat menjadi infrastruktur dalam perpindahan informasi dan pengetahuan diantara berbagai pihak yang terlibat. Model ICT berbasis jaringan komunikasi ini dapat lebih efektif mengingat karakteristik petani kecil cenderung memilih sumber informasi dan pengetahuan melalui

komunikasi yang bersifat personal dibandingkan dengan non personal seperti media cetak, media massa, ataupun media non personal lainnya.

Proses pembelajaran yang difasilitasi dengan ketersediaan lahan praktik di kelompok tani dapat dijadikan sebagai sarana belajar dan mengakses informasi dan pengetahuan bersama. Keberadaan lahan praktik tersebut juga dapat mendukung model ICT yang dikembangkan mengingat karakter adopter petani skala kecil yang cenderung lambat sehingga dibutuhkan sarana visual yang secara langsung dapat dilihat dan dipelajari sekaligus memberikan bukti atas hasil sebuah inovasi teknologi pertanian. Dengan demikian kelompok tani dapat dijadikan sebagai pengelola pengetahuan bersama karena berperan sebagai penghasil sekaligus pendistribusi informasi dan pengetahuan di bidang pertanian.

Adanya vocal point yang berasal dari anggota kelompok dapat menjadi sarana penyebaran informasi dan pengetahuan kepada masyarakat di sekitarnya. Keberadaan lahan praktik dan ketersediaan vocal point dapat menunjang model ICT bagi petani skala kecil. Mengingat preferensi dalam memilih sumber informasi yang cenderung personal dan karakter adopter lambat yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menyerap informasi dan pengetahuan baru. Demikian seperti yang dijelaskan dalam peneltia terdahulu yaitu kelompok dapat memfasilitasi dalam memperluas pengetahuan atau pembelajaran yang dimiliki oleh individu (Nuryanti dan Swastika, 2011 dan Ikbal 2014) karena kelompok juga mendorong orang yang ada disekitar calon pengadopsi untuk melakukan adopsi inovasi yang baru melalui menceritakan pengalaman-pengalaman yang dimiliki tentang sebuah adopsi inovasi yang pernah dilakukan (Fardiaz, 2008).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa petani skala kecil didominasi oleh petani dengan karakteristik adopter lambat dan dengan faktor sosial yang mendorong petani untuk lebih menggunakan sarana komunikasi secara personal. Dengan demikian, model ICT yang dikembangkan hendaknya mempertimbangkan karakteristik adopter dan faktor sial yang ada termasuk pola spcial learning yang hidup di masyarakat petani kecil. Dengan demikian model ICT lebih mengedepankan fungsi kelompok sebagai *vocal point* untuk mendorong terjadinya penyebaran informasi dan pengetahuan kepada masyarakat

yang lebih luas. Dengan membangun pusat informasi yang difasilitasi dengan lahan praktik para petani kecil dapat belajar dan mengakses informasi dan pengetahuan secara langsung dengan mengobservasinya dan mempraktikkannya maupun membangun komunikasi secara personal.

Daftar Pustaka

- Boterill, Linda Courlenary.2005. “ *Policy Change and Network Termination: The Role of Farm Groups in Agricultural Policy Making in Australia*”. Australian Journal of Politcal Science. Vol. 40 (2).
- Boza, Gergely, dan Szabolcs Szamado.(2010). “*Beneficial laggards: multilevel selection, cooperative polymorphism and division of labour in Threshold Public Good Games*”. BMC Evolutionary Biology
- De Long, D.W. (2000). Diagnosing Cultural Barriers to Knowledge Management. Academy of Management Executive, 14 (4), 113-27.
- Diederer, Paul, Hans van Meijl, Arjan Wolters, Katarzyna bijak. 2003. Innovation Adoption in Agriculture : *Innovators, Early Adopters and Laggards*. Cahiers d'économie et sociologie rural
- Fardiaz, Mendez. 2008. “*Pengaruh Karakteristik Petani Terhadap Tingkat Pengambilan Keputusan Inovasi dalam Usaha Sayuran Organik*”. Institut Pertanian Bogor.
- Febriantje, Charlina. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Adopsi Tumpangtari Tanaman Salak dengan Cabai di Desa Mranggen Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang*”. Universitas Sebelas Maret.
- Harinta, Yos Wahyu. 2010. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Adopsi Inovasi Pertanian di Kalangan Petani di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*”. Universitas Sebelas Maret.
- Haryadi, F.T. 2002. *Study on The Diffusion Process of Agricultural Technology Innovation*. Discretation. United Graduate School of Agricultural Science, Tokyo University of Agricultural and Technology. Tokyo.
- Herman, dkk. 2006. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi adopsi Teknologi Pengendalian Hama Penggerak Buah Kakao*”. Pelta Perkebunan. Vol.22 (3).
- Ikbal, Mohamad. 2014. “ *Peranan Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali*”. Argolekbis. Vol. 2(5).
- Lu, Shu-Ling dan Sexton, Martin. (2006) Innovation in Small Construction Knowledge-Intensive Profession Service Firm: A Case Study of an Architectural Practice. Construction Management and Economics. Vol 24, p 1269-1282.

- Mandasari, Sutra. 2014. *“Hubungan Peran Kelompok Tani dengan Produktivitas Usaha Tani Benih Padi”*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Musyafak, Ahmad, dan Tatang M. Ibrahim. 2005. *“Strategi Percepatan adopsi dan Difusi Inovasi Pertanian Mendukung Prima Tani”*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat. Vol.3(1).
- Nuryanti, Sri, dan Dewa K.S. Swastika. 2011. *“Role of Farmers’ Group in Agricultural Technology Adoption”*. Pusat Sosal Ekonomi dan kebijakan Pertanian.
- Prabayanti, Herning. 2010. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Biopestisida oleh Petani di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar”*. Universitas Sebelas Maret.
- Putri, Anindyaningrum Zainal. 2014. *“Pengaruh Karakteristik Peternak Terhadap Kecepatan Adopsi Usaha Ayam Boiler di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”*. Universitas Hassanudin Makasar.
- Rahayuningtyas, Essa, dan Sofiah. 2013. *“Difusi Adopsi Inovasi Program Sanitasi total Berbasis Masyarakat”*. Universitas Sebelas Maret.
- Rogers, E.M., and F.F. Shoemaker. 1971. *Communication of Innovation*. The Free Press, New York.
- Rogers, Everett M., Arvin Singhal, dan Margareth M. Quinlan. 2004. *“An Integrated Approach to Communication Theory and Research”*. New York.
- Rogers, Everett M., 1962. *“Diffusion of Innovation. Third Edditon”*. New York.
- Rogers, Everett M., 1971. Diffusion of Innovations. Rev.ed. of : *Communication of Innovations 2nd*.Library of Congres Cataloging in Publication Data.
- Romano, Claudio A. 1990. Identifying Factors Which Influence Product Innovation: A Case Study Approach. *Journal of Management Studies*.
- Sari, Ayu Intan, Suci Paramta Sari, F. Trisakti Haryadi. 2009. *“Adopter Chategory Characteristics on The Adoption Of Herbal Feed Additive Innovation For Broiler “*. Bulet n Peternakan. Vol. 33(3).
- Serah, Tobias. 2013. *“Pengaruh Karakteristik Inovas Satem Sosal dan Saluran Komunkas Terhadap Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian”*. Universitas Atmajaya Jogjakarta.
- Stubbs, Wendy. 2009. *“Innovators to Laggards : How to Work With All Faculty Members”*. Bard of Regents of The University of Wisconsin System.
- Susanti, Lisana Widi. 2008. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani dalam Penerapan Pertanian padi Organik di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen”*. Universtas Sebelas Maret.
- Susanto, Heri. 2015. *“Peran Kelompok Tani “Temor Moleran” dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani”*. Universitas Jember.

- Trwidarti, Titi, Bambang Suyadi, dan Sukidin. 2015. *“The Role of Farmers Group Sampurna in Improving the Knowledge Jenggawah Subdistrict Jember Regency”*. Universitas Jember.
- Warnaen, And, Hasied Cangara, Sitti Bulks. *“Faktor-Faktor yang Menghambat Inovasi pada Komunitas Petani dan Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tahalar”*. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
- Wejnert, Barbara. 2002. *“Integrating Models of Diffusion of Innovations: A Conceptual Framework”*. Cornell University New York.
- Yunasaf, Unang, Basita Ginting, Margono Slamet, dan Prabowo Tjitropranoto. 2008. *“Peran Kelompok Peternakan dalam Mengembangkan Keberdayaan Peternak Sapi Perah”*. Institut Pertanian Bogor.

PENGARUH KEPEMILIKAN MANJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Zulaika Putri R, Nurul Juwariyah, Rosyati

Surel:

zulaika.putri@gmail.com,
nuruljuwariyah86@yahoo.com,
rosyati.usm@gmail.com

Universitas Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Debby dkk (2014) yang meneliti tentang Good Corporate Governance yaitu Kepemilikan Manajerial dan Institusional terhadap Firm's Value. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Laksana (2015) yang meneliti mengenai Corporate Governance dan Kinerja Keuangan. Variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kinerja Perusahaan. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling, dengan kriteria tertentu yaitu Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif selama periode penelitian, menyajikan laporan keuangan lengkap, serta menyajikan rasio secara lengkap yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, selama periode tahun 2014-2016. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 78 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel Kinerja Keuangan yang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan institusional tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan tidak dapat memediasi antara variabel Struktur Kepemilikan dengan Nilai Perusahaan.

Kata Kunci: *Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan Perusahaan dan Nilai Perusahaan*

Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan penggambaran dari kesejahteraan para pemilik perusahaan. Dalam teorinya nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Dalam Debby dkk (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi harga saham berarti makin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan menjadi hal yang sangat penting karena terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan. Barde & Hamidu (2015) menyatakan bahwa nilai perusahaan menjadi salah satu faktor fundamental yang dipertimbangkan oleh sebagian besar investor, karena pentingnya dalam menentukan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Naik turunnya nilai perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh struktur

kepemilikan. Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah (1) konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (*outsider ownership concentration*) dan (2) kepemilikan perusahaan oleh manajemen (*management ownership*).

Umumnya, pada perusahaan yang *go public* terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (lebih-lebih yang terdaftar di pasar modal), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai *agent*) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham, disebut juga sebagai *principal*). Pengelolaan yang terpisah dari pemilik (pemegang saham) memungkinkan terjadi perbedaan kepentingan antara pihak pengelola (manajemen) dan pemilik (pemegang saham tersebut). Perbedaan kepentingan ini sering disebut sebagai *agency problem*. Teori keagenan menyebutkan bahwa ketika perusahaan memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan, maka akan rentan terhadap konflik kepentingan.

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Haruman, 2008). Dengan kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Machmud dan Djakman, 2008). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Shleifer dan Vishny (dalam Haruman, 2008), jumlah pemegang saham yang besar (*large shareholders*) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan

adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti kepemilikan oleh institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya.

Debby dkk (2014) menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan membantu untuk menciptakan hubungan yang kondusif antara unsur-unsur yang bertanggungjawab di perusahaan (dewan komisaris, direksi dan pemegang saham) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Laksana (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan akan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, jika ada perbaikan yang dilaksanakan secara terus menerus. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Mekanisme untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan tersebut adalah penerapan tata kelola yang baik dalam organisasinya.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Debby dkk (2014) yang meneliti tentang *Good Corporate Governance* terhadap *Firm's Value*. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Laksana (2015) yang meneliti mengenai *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel Kinerja Keuangan, yang pada penelitian ini selain sebagai variabel dependen juga sebagai variabel intervening/penghubung antara Struktur Kepemilikan dengan Nilai Perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016. Perusahaan manufaktur dipilih untuk menghindari adanya *industrial effect* serta karena sifat transaksi perusahaan manufaktur relatif lebih kompleks dan lebih bervariasi dibanding sektor lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah struktur kepemilikan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung (melalui kinerja keuangan) terhadap nilai perusahaan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara langsung dan tidak langsung (melalui kinerja keuangan)

Landasan Teori

Agency Theory

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun di sisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan seperti ini, sering kali menimbulkan konflik yang dinamakan konflik keagenan.

Scott (2009) dalam Sukirni (2012) menambahkan bahwa ketika pemilik dan manajer adalah orang yang berbeda, sangat tidak mungkin bagi pemilik perusahaan mengamati secara efektif apakah manajer bekerja keras atau lalai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan perusahaan diperlukan suatu sistem pengawasan terhadap tindakan manajer perusahaan (*agent*) agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (*principal*).

Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham. Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena

itu salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Haruman, 2008).

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009 dalam Laksana 2015). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling (1976) dalam Laksana (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).

Kinerja Keuangan Perusahaan

Laporan keuangan sering digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Semakin kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik .

Nilai Perusahaan

Pengertian nilai perusahaan menurut Martono dan Harjito (2012:13) yaitu nilai perusahaan tercermin dari nilai pasar sahamnya jika perusahaan tersebut sudah go public jika belum go public maka nilai perusahaan adalah nilai yang terjadi apabila perusahaan tersebut dijual. Setiap perusahaan yang sudah go public mempunyai tujuan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dimana hal ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan perusahaan karena dengan adanya peningkatan nilai perusahaan kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan juga akan ikut meningkat. Semua keputusan keuangan yang menyangkut keputusan investasi, pendanaan atau permodalan serta keputusan pengelolaan aset harus diambil dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dengan adanya struktur kepemilikan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya dimiliki oleh satu pihak saja, tetapi beberapa pihak. Struktur kepemilikan sebagai salah satu mekanisme internal *corporate governance* yang dibuat untuk memonitoring tindakan manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Adanya pengawasan ini dapat mendorong manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kinerja keuangan. Teori keagenan menjelaskan bahwa asimetri informasi antara manajer dengan pemilik saham dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi apabila ada pihak-pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan, hal ini dapat menjadi suatu fungsi pengendalian yang efektif.

Herawaty (2008) dalam Noviawan & Septiani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan sarana pengawasan yang efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dari manajer. Syafruddin (2006) dalam Noviawan & Septian (2013) mengungkapkan bahwa harapan dari adanya kepemilikan manajerial adalah bahwa para manajer puncak dapat lebih konsisten dalam menjalankan perusahaan, sehingga tercipta keselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Sesuai dengan *agency theory*, adanya kepemilikan institusional mampu mengatasi konflik keagenan karena kinerja manajer dapat dimonitoring dengan efektif. Kepemilikan institusional memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen khususnya dalam hal penggunaan dana perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka penggunaan dana perusahaan akan semakin efisien dan mencegah terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh manajer.

Sukirni (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Hasil penelitian Sukirni (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Adnantara (2013) dan Sadasiha & Hadiprajitno (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Antari & Dana (2013) menyatakan bahwa semakin bertambahnya saham yang dimiliki manajer melalui kepemilikan manajerial akan memotivasi kinerja manajemen karena mereka merasa memiliki andil dalam perusahaan baik itu dalam pengambilan keputusan dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil karena ikut sebagai pemegang saham perusahaan sehingga kinerja manajemen semakin baik dan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Menurut *agency theory*, *agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajerial atas saham perusahaan kurang dari 100%. Manajer cenderung akan menggunakan dana perusahaan untuk konsumsi dan perilaku oportunistik. Namun akan berbeda jika manajer juga ikut memiliki saham dalam perusahaan. Dengan semakin besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer, maka manajer akan berhati-

hati dalam menentukan kebijakan keuangan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Kaluti dan Purwanto (2014) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Sukirni (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Sesuai dengan *agency theory*, adanya kepemilikan institusional mampu mengatasi konflik keagenan karena kinerja manajer dapat dimonitoring dengan efektif. Kepemilikan institusional memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen khususnya dalam hal penggunaan dana perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka penggunaan dana perusahaan akan semakin efisien dan mencegah terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh manajer. Hal itu berarti bahwa Nilai perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian Sukirni (2012) dan Puteri & Rohman (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Adnantara (2013) dan Sadasiha & Hadiprajitno (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan

Perusahaan yang telah *go public* menerbitkan laporan keuangan yang dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Laporan keuangan ini menunjukkan kinerja perusahaan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi para stakeholdernya. Berdasarkan informasi tersebut, investor dapat melakukan penilaian kinerja perusahaan dan menentukan saham mana yang akan dijadikan pilihan investasi. Perusahaan yang dipilih tentu saja perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja yang baik. Debby dkk (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian Debby dkk(2014), Antari & Dana (2013) dan Mahendra (2011) bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

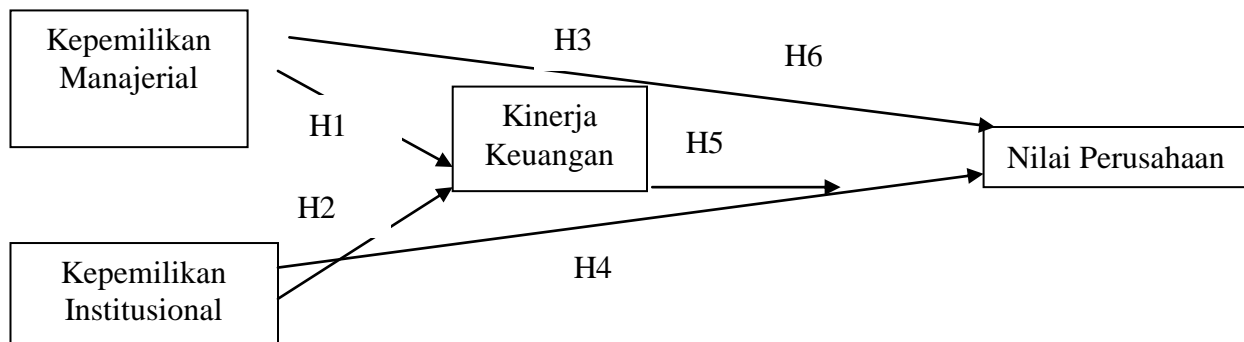
Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan Perusahaan

Laksana (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan akan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, jika ada perbaikan yang dilaksanakan secara terus menerus. Untuk itu, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Mekanisme untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan tersebut adalah penerapan tata kelola yang baik dalam organisasinya. Struktur kepemilikan sebagai salah satu mekanisme internal *corporate governance* yang dapat mendorong manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Mahendra (2011) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai

perusahaan melalui kinerja keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan Perusahaan



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel penelitian yang digunakan adalah yang perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016, dengan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2016 yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) lengkap sesuai dengan pengukuran variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini
2. Perusahaan manufaktur yang konsisten ada di dalam Bursa efek Indonesia dari tahun 2014-2016.
3. Tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2016
4. Terdapat data lengkap mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ROA dan PBV pada tahun 2014-2016.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
1	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan manajerial >50%	$\text{Kepemilikan Manajerial (KM)} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$
2	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan institusional >50%	$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Jumlah saham manajer}}{\text{Jumlah saham beredar}}$
3	Kinerja Keuangan	<i>Return On Assets (ROA)</i>	$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$ <p>(Laksana, 2015)</p>
4	Nilai Perusahaan	<i>Price Book Value (PBV)</i>	$\text{Price Book Value} = \frac{\text{Harga Saham per lembar saham}}{\text{Nilai Buku per lembar saham}}$ <p>(Husnan, 2012)</p>

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, independen dan variabel intervening. Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel penyela yang terletak di antara variabel dependen dan variabel independen. Tujuan dari variabel intervening ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara variabel indepen terhadap variabel dependen.

Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2011). Analisis jalur digunakan

untuk menguji pengaruh variabel *intervening* dalam penelitian ini. Hasil dari uji analisis jalur ini juga akan digunakan untuk membandingkan pengaruh mana yang lebih besar antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, serta menarik suatu kesimpulan apakah dengan adanya variabel *intervening* ini dapat memperkuat atau justru memperlambat pengaruh independen terhadap dependen.

Adapun persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \beta_1 KM + \beta_2 KI + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (1)$$

$$PBV = \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 ROA + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

β = Koefisien parameter

ε = Residual

KM = Kepemilikan Manajerial

KI = Kepemilikan Institusional

ROA = Kinerja keuangan

PBV = Nilai perusahaan.

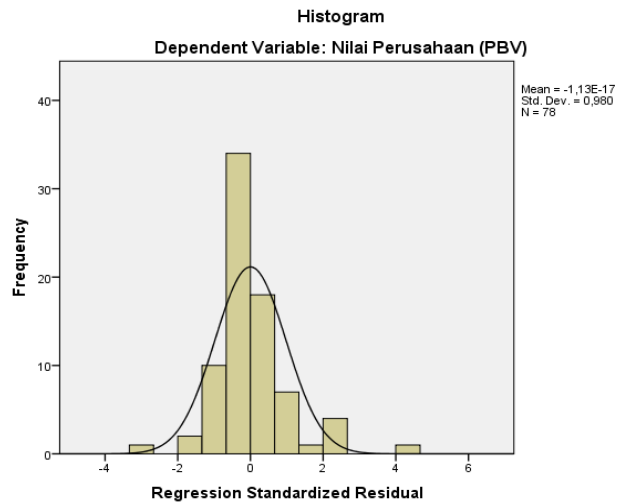
Hasil dan Pembahasan

Deskriptif Variabel Penelitian

Data yang dianalisis sebanyak 78 yang diperoleh dari laporan keuangan 26 perusahaan Manufaktur dengan periode pengamatan selama tahun 2014-2016. Untuk lebih jelasnya uraian tentang data penelitian adalah Kepemilikan Manajerial memiliki nilai terendah 0,00%, nilai tertinggi 27,76% dengan nilai rata-rata 3,2049 serta nilai standar deviasi 2,20517. Kepemilikan Institusional memiliki nilai terendah 22,48%, nilai tertinggi 96,09% dengan nilai rata-rata 67,8169 serta nilai standar deviasi 19,57495. Kinerja Keuangan (ROA) memiliki nilai terendah 0,00%, nilai tertinggi 26,15% dengan nilai rata-rata 6,1811 serta nilai standar deviasi 5,44579. Nilai Perusahaan (ROA) memiliki nilai terendah 0,01%, nilai tertinggi 6,84% dengan nilai rata-rata 1,6876 serta nilai standar deviasi 1,48310.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber : Data Sekunder yang diolah
 Gambar 2. Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 2 di atas terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.381	2.286		2.791	.007
Kepemilikan Manajerial	-.061	.066	-.139	-.919	.361
Kepemilikan Institusional	-.034	.029	-.176	-1.166	.247

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser, diperoleh tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada pengujian ini.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Dapat diketahui pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kinerja Insitusalional (KI) sebagai variabel bebas atau independen terhadap variabel Kinerja Keuangan (ROA) yang dinyatakan dengan nilai *Adjusted R²*, yaitu 0,047 atau 4,7% persen. Hal ini berarti variasi Kinerja Keuangan (ROA) yang bisa dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kinerja Insitusalional (KI) sebesar 4,7% persen sedangkan sisanya 95,3% persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas lain di luar variabel independen. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM), Kinerja Insitusalional (KI) dan Kinerja Keuangan (ROA) sebagai variabel bebas atau independen terhadap variabel Nilai Perusahaan (PBV) yang dinyatakan dengan nilai *Adjusted R²*, yaitu 0,382 atau 38,2% persen. Hal ini berarti variasi Nilai Perusahaan (PBV) yang bisa dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Manajerial (KM), Kinerja Insitusalional (KI) dan Kinerja Keuangan (ROA) sebesar 38,2% persen sedangkan sisanya 67,8% persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas lain di luar variabel independen.

Uji Kelayakan Model (*Uji Goodness of Fit*)

Berdasarkan perhitungan dengan F-test diperoleh nilai F-hitung sebesar 1,829 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,168. Oleh karena nilai signifikansi $0,168 > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan Manajerial (KM), Kinerja Insitusalional (KI) terhadap variabel Kinerja Keuangan (ROA), secara bersama-sama (simultan). Perhitungan dengan F-test diperoleh nilai F-hitung sebesar 16,873 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan Manajerial (KM), Kinerja Insitusalional (KI), Kinerja Keuangan (ROA) terhadap variabel Nilai Perusahaan (PBV), secara bersama-sama (simultan).

Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,806	3,254		3,321	,001
	Kepemilikan Manajerial	-,023	,095	-,037	-,247	,805
	Kepemilikan Institusional	-,066	,041	-,238	-1,596	,115

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (ROA)

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,606	,768		,789	,432
	Kepemilikan Manajerial (KM)	-,016	,021	-,090	-,763	,448
	Kepemilikan Institusional (KI)	,001	,009	,018	,153	,879
	Kinerja Keuangan (ROA)	,179	,025	,644	7,017	,000

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan (PBV)

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Kepemilikan Manajerial sebesar -0,023 dengan nilai signifikansi sebesar 0,805 dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi ($p < 0,05$). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan tidak dapat diterima atau ditolak.

Hal ini disebabkan karena pihak manajemen yang memiliki saham dalam jumlah kecil (minoritas), akan membuat pemegang saham lain berusaha mengawasi dan memengaruhi pengambilan keputusan manajemen sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tidak fleksibel dan lambat. Ini bisa terjadi jika dilihat adanya sistem paternalistik

di Indonesia, dimana para pemegang saham mayoritas/terbesar ingin ikut serta dalam pengambilan keputusan manajerial (Puspitasari dan Ernawati, 2010). Dengan rata-rata kepemilikan perusahaan yang dimiliki pihak manjerial sangat kecil yaitu hanya 5,8% maka dapat dikatakan bahwa sebagai pihak yang minoritas, Kepemilikan Manajerial belum mampu untuk mengendalikan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Noviawan & Aditya (2013) serta Bukhori & Raharja (2012) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Pengujian Hipotesis 2 : Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Kepemilikan Manajerial sebesar -0,066 dengan nilai signifikansi sebesar 0,115 dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi ($p < 0,05$). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan tidak dapat diterima atau ditolak.

Hal ini dilatarbelakangi oleh Kepemilikan Institusional memiliki risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi ini timbul akibat dari penempatan sejumlah dana yang besar pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga pemilik institusi cenderung bertindak demi kepentingannya saja. Jadi dengan kepemilikan Institusi yang tinggi belum menjamin bisa memonitor kinerja perusahaan dengan maksimal. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Bukhari & Raharja (2012) dan Wiranata & Nugrahanti (2013).

Pengujian 3 : Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan.

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Kepemilikan Manajerial sebesar -1,627 dengan nilai signifikansi sebesar 0,427 dimana nilai ini tidak signifikan ($p < 0,05$). Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan tidak dapat diterima atau ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan *agency theory*, yang menyatakan bahwa *agency cost* dapat dikurangi dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Ini bisa disebabkan karena manajemen perusahaan tidak mempunyai kendali terhadap perusahaan. Terlebih rata-rata kepemilikan saham manajemen hanya sebesar 5,8% sehingga kinerja manajer dalam mengelola perusahaan kurang optimal dan manajer sebagai pemegang saham minoritas belum dapat berpartisipasi aktif dalam membuat suatu keputusan di perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi nilai perusahaan (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Manajemen lebih banyak dikendalikan pemilik mayoritas sehingga manajemen hanya sebagai perpanjangan tangan pemilik mayoritas dalam usahanya meningkatkan Nilai Perusahaan.

Pengujian 4 : Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Persahaan

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap terhadap Nilai Perusahaan. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Kepemilikan Institusional bahwa sebesar 0,133 dengan nilai signifikansi sebesar 0,884 dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi ($p < 0,05$). Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan tidak dapat diterima atau ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil temuan dari Adnantara (2013) dan Laksana (2015). Menurut Lee et al., (dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007), investor institusional adalah pemilik sementara (*transfer owner*) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (*current earnings*). Perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini dirasakan tidak menguntungkan oleh investor, maka investor dapat menarik sahamnya. Karena investor institusional memiliki saham dengan jumlah besar, maka jika mereka menarik sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional belum mampu menjadi mekanisme untuk yang meningkatkan nilai perusahaan.

Pengujian 5 : Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Persahaan

Hipotesis kelima yang diajukan menyatakan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap terhadap Nilai Perusahaan. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Kinerja Keuangan bahwa sebesar 17,643 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi ($p < 0,05$). Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap terhadap Nilai Perusahaan dapat diterima.

Para investor melakukan overview suatu perusahaan dengan melihat profitabilitas perusahaan. Karena, profitabilitas dapat mengukur seberapa efektif perusahaan bagi para investor. Dimana, salah satu rasio profitabilitas yang dipakai oleh peneliti adalah Return On Asset (ROA) sebagai alat analisis utama dalam indikator penilaian kinerja. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan sehat tentu akan menjadi pilihan para investor untuk menginvestasikan dananya dimana hal tersebut akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan, yang berarti bahwa penggunaan dana eksternal dapat dikurangi karena perusahaan memiliki dana internal yang tinggi sehingga para pemegang saham memperoleh keuntungan berupa deviden, yang akan berimbas pada naiknya nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung temuan hasil dari Debby dkk (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan meningkatkan nilai perusahaan.

Pengujian 6 : Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan Perusahaan.

Hipotesis keenam yang diajukan menyatakan bahwa Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan sebagai variabel mediasi. Hasil pengujian hipotesis pada path analysis menunjukkan hipotesis struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan ditolak. Berarti bahwa Kinerja Keuangan tidak dapat memediasi antara Struktur Kepemilikan dengan Nilai Perusahaan.

Penutup

Hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
2. Variabel Kepemilikan Insitusional (KI) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
3. Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV).
4. Variabel Kepemilikan Insitusional (KI) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV).
5. Variabel Kinerja Keuangan (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV).
6. Pengaruh Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) melalui Kinerja Keuangan (ROA).
7. Secara tidak langsung Kepemilikan Manajerial melalui Kinerja Keuangan (ROA) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV). Sedangkan secara tidak langsung Kepemilikan Insitusional (KI) melalui Kinerja Keuangan (ROA) mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV).

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam hal sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya untuk memperbaiki model penelitian dengan menambah variabel independen mekanisme corporate governance yang lain yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan , karena nilai adjusted R² mengindikasikan variabel kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen kepemilikan insitusional, dan kepemilikan manajerial hanya sebesar 4,7% sedangkan selebihnya yaitu 95,3 % dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model penelitian ini.

2. Pada penelitian mendatang diharapkan mencari variabel mediasi lain karena variabel Kinerja Keuangan tidak dapat memediasi antara variabel Struktur Kepemilikan dengan Nilai Perusahaan
3. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel dependen lain, atau menggunakan lebih dari satu variabel dependen untuk mewakili proksi dari kinerja perusahaan, tidak hanya menggunakan ROA tetapi juga menggunakan ROE.
4. Pemilihan periode waktu yang relatif pendek mengakibatkan daya uji rendah sehingga tingkat keakurasian informasi masih relatif kecil. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya supaya menggunakan data *annual report* dengan periode yang lebih panjang agar jumlah sampel yang diperoleh lebih banyak sehingga lebih mencerminkan populasi.

Daftar Pustaka

- Adnantara, Komang Fridagustina. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 18 (2): 107-113.
- Antari, Dewa Ayu Prati Praidy & Dana, I Made. 2013. Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *E Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 2 (3): 274-288.
- Barde, Ibrahim Magaji & Hamidu, Ibrahim. 2015. Corporate Governance and Market Value of Firm in the Nigerian Chemical and Paints Industry. *Proceedings of 11th International Business and Social Science Research Conference 8 - 9 January, 2015*, Crowne Plaza Hotel, Dubai, UAE, ISBN: 978-1-922069-70-2: 1-10.
- Bukhori, Iqbal & Raharja. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010). *Diponegoro Journal of Accounting* 1 (2):1-10.
- Debby et al. 2014. Good Corporate Governance, Company's Characteristics and Firm Value: Empirical Study of Listing Banking on Indonesia Stock Exchange. *GSTF Journal on Business Review (GBR)* 3 (4): 81-88.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Cetakan IV)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak.

- Husnan, Suad. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan STIM-YKPN.
- Kaluti, Septiani Novitasari Christianingsih dan Purwanto, Agus. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting* 3 (2):1-12.
- Laksana, Jaya. 2015. Corporate Governance dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2008-2012). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11 (1): 269-288, ISSN: 2302-8556.
- Mahendra, Alfredo. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan (Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderating) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Machmud, Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. “ Pengaruh struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan : Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006”. Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- Martono dan Agus Harjito. 2006. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia.
- Noviawan, Ridho Alief & Septiani, Aditya. 2013. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (3): 1-10, ISSN (Online): 2337-3806.
- Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Tahun 3, No. 2.
- Puteri, Paramitha Anggia & Rohman, Abdul. 2012. Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 1 (2): 1-14.
- Rachmawati, A. dan H. Triatmoko. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 26 – 28 Juli.
- Sadasiha, Yulia Gea & Hadiprajitno, P. Basuki. 2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property, Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting* 3 (3): 1-15, ISSN (Online): 2337-3806.
- Sukirni, Dwi. 2012. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Analisis terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang* 1 (2): 1-12, ISSN 2252-6765.

- Tarjo. 2008 . Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity Capital. *Symposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak.
- Utomo, Arsanto Teguh & Rahardjo. 2014. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting* 3 (3): 1-8, ISSN (Online): 2337-3806.
- Wiranata, Yulius Ardi & Nugrahanti, Yeterina Widi. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, Mei 2013, 15-26, ISSN 1411-0288 print / ISSN 2338-8137 online.
- www.idx.co.id, Annual Report Bursa Efek Indonesia.

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN *CHART PRIORITY*

Mohammad Muktiali

Serel: alimukti890@gmail.com

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan kebijakan sinergitas program penanggulangan kemiskinan yang disebut Gerdu Kempling. Gerdu Kempling adalah sebuah program atau gerakan terpadu yang memprioritaskan penanganan kemiskinan di setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang yang masih terdapat penduduk di bawah garis kemiskinan. Gerdu Kempling merupakan singkatan dari Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, Lingkungan. Penjabarannya adalah gerakan terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam hal ini Pemerintah Kota, Perguruan Tinggi, BUMN, Perusahaan Swasta, Perbankan yang bersama-sama bersinergi mengatasi persoalan kemiskinan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Chart Priority, dapat disimpulkan adanya ketidaksinkronan secara sektoral dan spasial terkait program/kebijakan dan alokasi anggaran dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Geografis, analisis kebijakan, kemiskinan, Analisis Chart Priority*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multikompleks dan multidisplin. Kemiskinan adalah keadaan kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak, karena standar hidup tersebut berbeda-beda, maka tidak ada konsep kemiskinan yang universal Levitan dalam Effendi (1993:12). Permasalahan kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan, umumnya ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses ke prasarana dan sarana dasar. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Tidak adanya akses ke sumber daya tersebut akan mengakibatkan kemiskinan menjadi sulit diatasi dan masyarakat miskin akan terjebak pada budaya kemiskinan yang

berakibat pada sikap perilaku yang cenderung fatalistik, tidak berdaya, tergantung dan tertutup.

Seperti halnya kemiskinan yang ada di Kota Semarang sebagai salah satu kota besar dan kota metropolitan di Indonesia ternyata masih terdapat permasalahan kemiskinan di masyarakatnya. Berdasarkan data Bappeda Kota Semarang, per 30 April 2015, jumlah masyarakat miskin Kota Semarang sementara sebesar 21,52 %. Masyarakat miskin di Kota Semarang dikategorikan menjadi 3, yaitu sangat miskin sebanyak 39 KK/105 jiwa, miskin sebanyak 17.567 KK/ 55.446 jiwa, dan hampir miskin sebanyak 100.327 KK/ 324.085 jiwa.

Kemiskinan di Kota Semarang erat kaitannya dengan masalah pertambahan jumlah penduduk disebabkan adanya urbanisasi dari daerah di luar kota Semarang. Hal tersebut berdampak pada masalah permukiman yang semakin padat. Keterbatasan lahan dan permukiman yang semakin padat berakibat pada munculnya permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi yang tidak layak. Penurunan kualitas lingkungan disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan sangat terbatas serta penataan lingkungan yang tidak terencana dengan baik terkait dengan sanitasi lingkungan.

Penanganan kemiskinan yang ada harus dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan kebijakan sinergitas program penanggulangan kemiskinan yang disebut Gerdu Kempling. Gerdu Kempling adalah sebuah program atau gerakan terpadu yang memprioritaskan penanganan kemiskinan di setiap kelurahan yang masih ada warga di bawah garis kemiskinan. Gerdu Kempling merupakan singkatan dari Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, Lingkungan.

Penjabarannya adalah gerakan terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam hal ini Pemerintah Kota, Perguruan Tinggi, BUMN, Perusahaan Swasta, Perbankan yang bersama-sama bersinergi mengatasi persoalan kemiskinan mencakup segala aspek dan terangkum dalam 5 bidang, yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan. Pelaksanaan program Gerdu Kempling diharapkan juga menciptakan jejaring pengaman antar aspek.

Permasalahan

Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang dengan cara melihat kesesuaian alokasi anggaran dan program Gerdu Kempling dengan karakteristik kemiskinan masing – masing wilayah kecamatan yang ada di Kota Semarang.

Kajian Pustaka

Pengertian dan Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak, karena standar hidup tersebut berbeda-beda, maka tidak ada konsep kemiskinan yang universal (Levitan dalam Effendi, 1993:12). Sedangkan menurut Sumodiningrat, kemiskinan adalah wujud dari kesenjangan antar kelompok sosial, jika ditinjau dalam segi keruangan, kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada beberapa sektor yang menampung tenaga kerja berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada pula kelompok masyarakat yang belum dapat merasakan hasil-hasil pembangunan secara memadai (Sumodiningrat, 1998). Kemiskinan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu angka ketergantungan rumah tangga yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya hak kepemilikan dan keamanan aset, pendapatan yang rendah atau pengangguran (Kedir dan McKay, 2005:49).

Penyebab kemiskinan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan karena sebab-sebab alami (kemiskinan natural), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural (Nugroho dan Dahuri, 2002).

1. *Kemiskinan alami* merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumberdaya manusia. Akibatnya, sistem produksi dalam masyarakat beroperasi tidak optimal dengan tingkat efisiensi yang rendah.
2. *Kemiskinan struktural* merupakan kemiskinan yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan umumnya ditandai dengan adanya ketimpangan antara

lain ketimpangan kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan, dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan juga mengakibatkan ketimpangan struktur sosial.

3. *Kemiskinan kultural* adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan oleh sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan relatif diartikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan pengertian kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Dimensi Kemiskinan (MPI)

MPI (*Multidimensional Poverty Index*) melihat struktur kemiskinan lebih luas bukan sekedar pendapatan atau konsumsi tapi mendefinisikan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. MPI meliputi tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan. Bagi Indonesia, MPI merupakan suatu terobosan baru dalam memotret kondisi kemiskinan. Dengan MPI, pemerintah akan mendapatkan gambaran kemiskinan yang lebih riil dibandingkan pola pendekatan konsumsi yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). MPI juga akan lebih objektif dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, sehingga bisa menjadi indikator bagi penetapan asumsi makro ekonomi Indonesia ke depan.

MPI pertama kali dikembangkan oleh OPHI dengan UNDP pada tahun 2010. Dimana tujuan dari MPI adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistik. Bagi UNDP, MPI merupakan bagian yang terintegrasi dalam kerangka *Millenium Development Goals* (MDGs). Dimana setiap indikator MPI merupakan bagian dari target pencapaian MDGs. Timbulnya kekhawatiran secara global dalam penyelesaian masalah kemiskinan merupakan ide awal dari MPI. UNDP melihat bahwa memperluas indikator

kemiskinan dan melihat kemiskinan secara multidimensi merupakan strategi awal dalam kerangka penanggulangan kemiskinan global. Selama ini persoalan kemiskinan dijawab oleh cakupan indikator yang sempit sehingga strategi penanggulangan kemiskinan menjadi sempit juga. Ada tiga dimensi yang dirujuk oleh UNDP dan OPHI dalam MPI.

a. Dimensi Kesehatan

Untuk dimensi kesehatan, MPI mengukur dengan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Pada konsepnya, dua indikator ini dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Indikator gizi, MPI mengukur pada setiap anggota rumah tangga baik itu anak atau orang dewasa. Untuk anak, pengukuran gizi mengacu pada standard MDGs yaitu melalui pendekatan berat badan berbanding usia anak. Anak dikatakan memiliki gizi kurang ketika berat badan berada pada dua atau lebih di bawah standard deviasi rata-rata populasi yang menjadi acuan. Sedangkan untuk orang dewasa, menggunakan pendekatan *Body Mass Index* (BMI). Dimana seorang dewasa dianggap kurang gizi ketika BMI lebih rendah dari 18.5.

Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak. Secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan. Bisa saja kematian tersebut akibat penyakit atau kekurangan gizi. Penilaian mencakup semua umur anak. Ketika ada rumah tangga yang memiliki kematian anak baik satu, dua atau seterusnya maka rumah tangga tersebut masuk dalam satu poin penilaian dalam MPI.

b. Dimensi Pendidikan

Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Dua indikator ini lebih mencerminkan kepada kemampuan masyarakat terhadap akses dasar kesehatan dan bukan mencerminkan kualitas dari pendidikan yang mereka dapat. Lama pendidikan dalam MPI dihitung minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang akses (hadir) dalam pendidikan.

c. Dimensi Standar Hidup

Standar hidup mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standard dari kehidupan

sesuai dengan MDGs. Indikatornya terdiri dari enam indikator. Pertama, air. Seseorang memiliki akses terhadap air minum bersih jika sumber air salah satu jenis berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dilindungi semi atau air hujan, dan itu dalam jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap kekurangan dalam akses terhadap air. Kedua, sanitasi. Seseorang dianggap memiliki akses ke sanitasi, jika rumah tangga memiliki beberapa jenis toilet atau jamban, atau berventilasi baik atau toilet kompos, asalkan tidak dibagi. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan dalam sanitasi. Ketiga, listrik. Seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki akses listrik. Keempat, lantai rumah. Bahan Lantai terbuat dari tanah, pasir atau kotoran dianggap miskin. Kelima, bahan bakar untuk memasak. Seseorang dianggap miskin bila dalam bahan bakar memasak, rumah tangga tersebut menggunakan arang atau kayu. Keenam, kepemilikan asset. Jika sebuah rumah tangga tidak memiliki lebih dari satu radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, dan tidak memiliki mobil maka dianggap miskin.

Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan digunakan sebagai alat penentu kriteria penduduk miskin atau dengan kata lain untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Indikator kemiskinan atau pendekatan kriteria penduduk miskin dalam kajian ini mengacu pada 2 sumber, yaitu dari Badan Pusat Statistik dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 C Tahun 2009. Berikut ini akan dijelaskan mengenai indikator kemiskinan dari masing-masing sumber/acuan.

Indikator/Kriteria Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik

Kriteria penentuan penduduk miskin secara umum dapat dilihat dari beberapa kategori yang dianggap layak dan operasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik terdapat 8 kategori dan masing-masing kategori berisi variabel-variabel yang mampu mencirikan rumah tangga miskin di lapangan. Kategori yang dapat menentukan suatu rumah tangga dianggap miskin adalah kondisi ekonomi, tempat tinggal, pangan, sandang, kesehatan,

pendidikan dan aset kekayaan. Kriteria penduduk miskin menurut BPS dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penduduk Miskin Menurut BPS

No.	Kategori	Variabel
A.	Kondisi Ekonomi	1. Penghasilan Kepala Keluarga
B.	Kondisi Tempat Tinggal	2. Luas lantai < 8m ² /kapita 3. Jenis lantai (tanah/bambu/kayu murah) 4. Jenis dinding (bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester) 5. Fasilitas buang air besar (jamban) 6. Sumber penerangan rumah
C.	Kondisi Pangan	7. Kemampuan memenuhi kebutuhan makan dalam satu hari 8. Kemampuan konsumsi daging/susu/ayam dalam satu minggu 9. Bahan bakar untuk masak sehari-hari 10. Sumber air minum
D.	Kondisi Sandang	11. Kemampuan membeli pakaian dalam satu tahun
E.	Kondisi Kesehatan	12. Kemampuan membayar pengobatan
F.	Kondisi Pendidikan	13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga
G.	Pemilikan Aset Kekayaan	14. Kepemilikan tabungan atau barang yang mudah dijual

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator/Kriteria Kemiskinan Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 C Tahun 2009

Selain menggunakan indikator BPS, penentuan indikator kemiskinan khususnya di Kota Semarang menggunakan peraturan walikota. Pemerintah kota Semarang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 18 C Tahun 2009 yang merumuskan tentang indikator dan kriteria warga miskin yang dilihat dari indikator pangan, tempat tinggal, sandang, dan pendidikan serta kriteria masing-masing indikator. Penentuan kriteria kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 18 C Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kriteria Kemiskinan Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 18C Tahun 2009

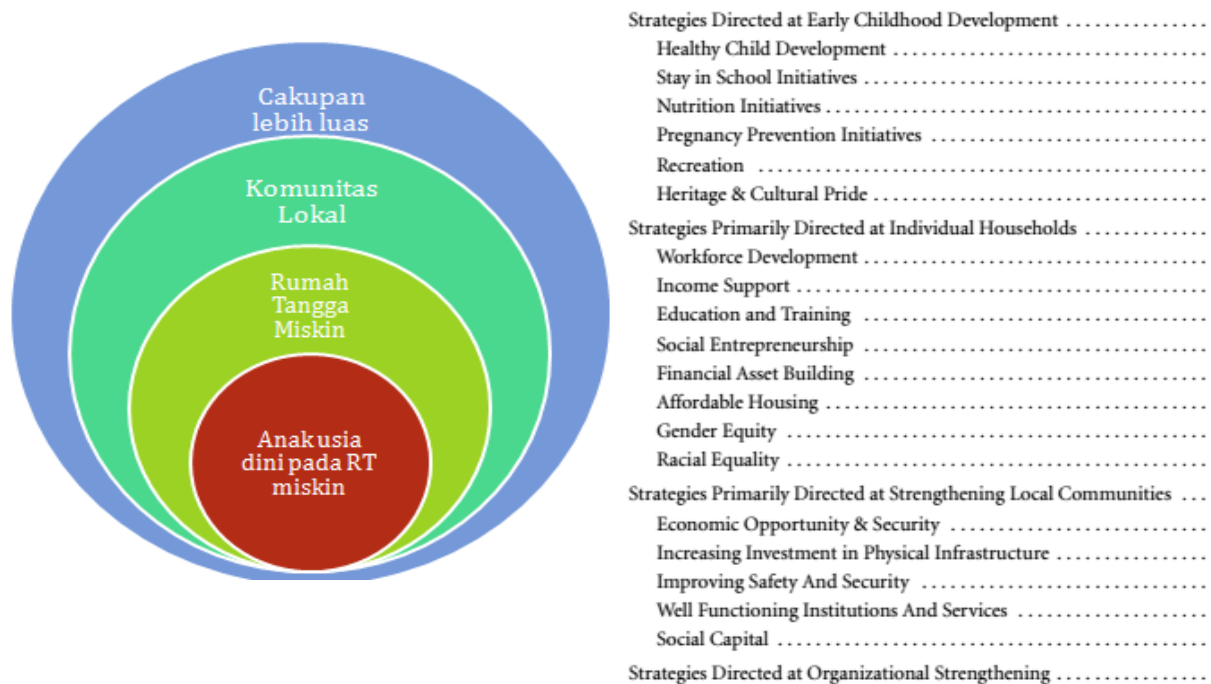
No	Indikator	Kriteria
1.	Pangan	1. Tidak dapat mengkonsumsi makanan pokok dengan menggunakan 3 sehat (nasi,sayur,lauk), 2x sehari
		2. Tidak dapat makan daging/telur/ikan/ayam seminggu 1x
2.	Tempat Tinggal	3. Tidak punya rumah sendiri atau mempunyai/menempati rumah yang luas lantainya kurang dari 8m2 bagi setiap penghuni
		4. Diatas 50% lantai terbuat dari tanah atau u tidak dengan pengerasan (plester/ubin)
		5. Dinding terbuat dari bambu, kayu kualitas rendah.
		6. Listrik Maksimal 450 W
3.	Sandang	7. Tidak mampu membeli pakaian yang baru setiap anggota rumah tangga satu stel tiap setahun
		8. Tidak Mampu mempunyai pakaian yang berbeda untuk keperluan yang berbeda
4.	Pendidikan	9. Tidak mampu membiayai pendidikan anggota keluarganya sampai SLTA/ sederajat
		10. Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan kesehatan dasar dan atau pelayanan keluarga berencana (puskesmas dan jaringannya)
		11. Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayan kesehatan tingkat lanjutan (Rawat Jalan TK Pertama)
		12. Tidak memiliki sarana sanitasi dasar; sarana air bersih; jamban (mck)
		13. Salah satu anggota keluarga berkebutuhan khusus (divable)
		14. Penghasilan keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar (sesuai KHM)
		15. Tidak memiliki aset produktif
		16. Tidak mempunyai aset yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dasar selama 3 tahun.

Sumber: Arsip Data Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kota Semarang, 2009.

Pendekatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan secara umum dalam penanggulangan kemiskinan adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan menurunkan jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan pada berbagai level. Level penanggulangan kemiskinan dimulai dari level yang terendah hingga level yang tertinggi. Kontinum strategi kemiskinan pada berbagai level dapat dilihat pada gambar berikut.

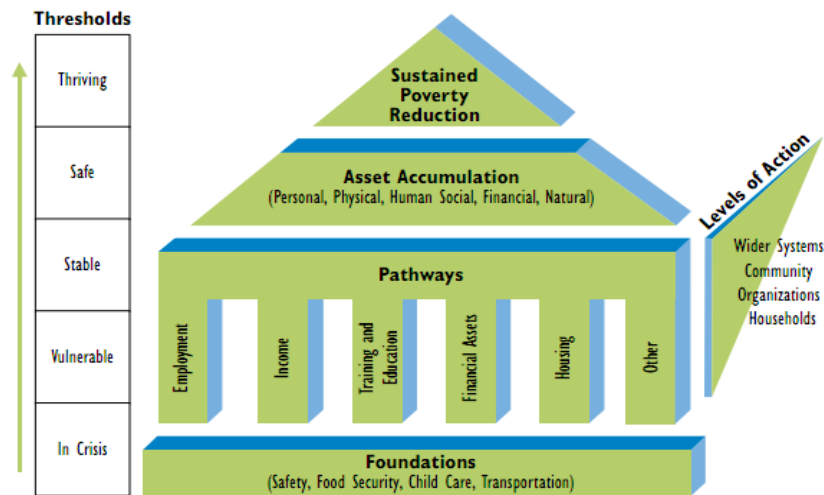


Sumber : Loewen, 2009

Gambar 1. Kontinum Strategi Kemiskinan pada Berbagai Level

Penanganan kemiskinan dilakukan dari level anak usia dini pada rumah tangga miskin hingga pada cakupan yang lebih luas, seperti cakupan kota atau kabupaten. Hal ini dilakukan agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Penanganan kemiskinan dilakukan pada level anak usia dini pada rumah tangga miskin, karena jika anak dari keluarga miskin tidak ditangani, maka 5 hingga 10 tahun kedepan anak tersebut berpotensi untuk menjadi miskin. Sehingga akan menambah jumlah penduduk miskin. Penanganan kemiskinan dilakukan berdasarkan jiwa, bukan berdasarkan rumah tangga. Selain itu, penanganan kemiskinan juga dapat dilakukan pada level rumah tangga miskin dan pada level komunitas lokal. Lebih luas lagi penanganan kemiskinan dapat dilakukan pada level cakupan lebih luas, seperti kota atau kabupaten. Kerangka komprehensif atau *comprehensive framework* penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut.

Comprehensive Framework



Sumber : Loewen, 2009

Gambar 2. Kerangka Komprehensif Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang

Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan (strategi percepatan penanggulangan kemiskinan) yaitu melalui GERDU KEMPLING (Gerakan Terpadu Di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan). Pentingnya program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah karena kemiskinan yang tinggi juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di Kota Semarang. Penjabaran Gerdu Kempling merupakan Gerakan Terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam hal ini Pemkot, Perguruan Tinggi, BUMN, Perusahaan Swasta, Perbankan yang bersama-sama bersinergi mengatasi persoalan kemiskinan mencakup segala aspek dan terangkum dalam 5 bidang, yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan.

Tujuan program Gerdu Kempling antara lain (Bappeda Kota Semarang, 2012):

- a. Sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan mensinergikan program pemerintah kota dengan stakeholder yang ada yaitu PTN dan PTS, LSM, perbankan, BUMN, tokoh masyarakat, dan para konglomerat/pengusaha;

- b. Guna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kota Semarang dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan dan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efisien dan efektif;
- c. Guna meminimalkan hambatan dan permasalahan dalam mempercepat pencapaian program pengentasan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi, sinergi serta, berkelanjutan

Program Gerdu Kempling dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal, bantuan barang, serta pelatihan keterampilan. Selain itu, ada pula program-program penyelamatan, pemberdayaan, dan penguatan yang direalisasikan melalui program bantuan kesehatan, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan lingkungan.

Output Program GERDU KEMPLING ini adalah:

- Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan mensinergikan program pemerintah kota dengan stakeholder yang ada yaitu PTN/PTS, LSM, Perbankan, BUMN, Tokoh Masyarakat, dan para konglomerat/pengusaha. Untuk Bersama sama menurunkan jumlah warga miskin di Kota Semarang Minimal 2 % per tahun.
- Keterpaduan program dan kegiatan pemerintah kota Semarang dengan seluruh stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan di kota Semarang.
- Optimalnya seluruh potensi yang ada di Kota Semarang dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan dan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Program Gerdu Kempling dilaksanakan selama lima tahun dengan capaian 177 kelurahan tertangani semua selama lima tahun tersebut.

Metode Penelitian

Analisis anggaran digunakan untuk melihat seberapa besar anggaran yang diberikan untuk bidang pada masing-masing indikator kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 18C Tahun 2009. Indikator kemiskinan tersebut adalah rawan sandang, rawan pangan, rawan papan, rawan pendidikan, rawan kesehatan, rawan ekonomi, rawan air bersih, rawan sanitasi, dan rawan listrik.. Idealnya semakin tinggi tingkat kerawanan suatu indikator kemiskinan pada suatu wilayah, maka semakin tinggi

pula anggaran yang dialokasikan untuk wilayah tersebut. Hasil analisis selanjutnya digambarkan dalam peta dengan Sistem Informasi Geografis yang dikenal dengan Poverty Mapping (La Ega et.al , 2012).

Analisis tipologi wilayah kecamatan dilakukan dengan Chart Priority yaitu dengan memposisikan suatu kecamatan di dalam garis vertikal dan horisontal. Garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan jumlah penduduk miskin, sedangkan garis horisontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah penduduk yang rawan terhadap bidang-bidang tertentu (bidang kerawanan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya). Selanjutnya, hasil tipologi wilayah kecamatan di Kota Semarang dimasukkan kedalam 4 kuadran sesuai dengan tipologinya. Unit analisis untuk kedua analisis tersebut adalah kecamatan (La Ega et.al , 2012).

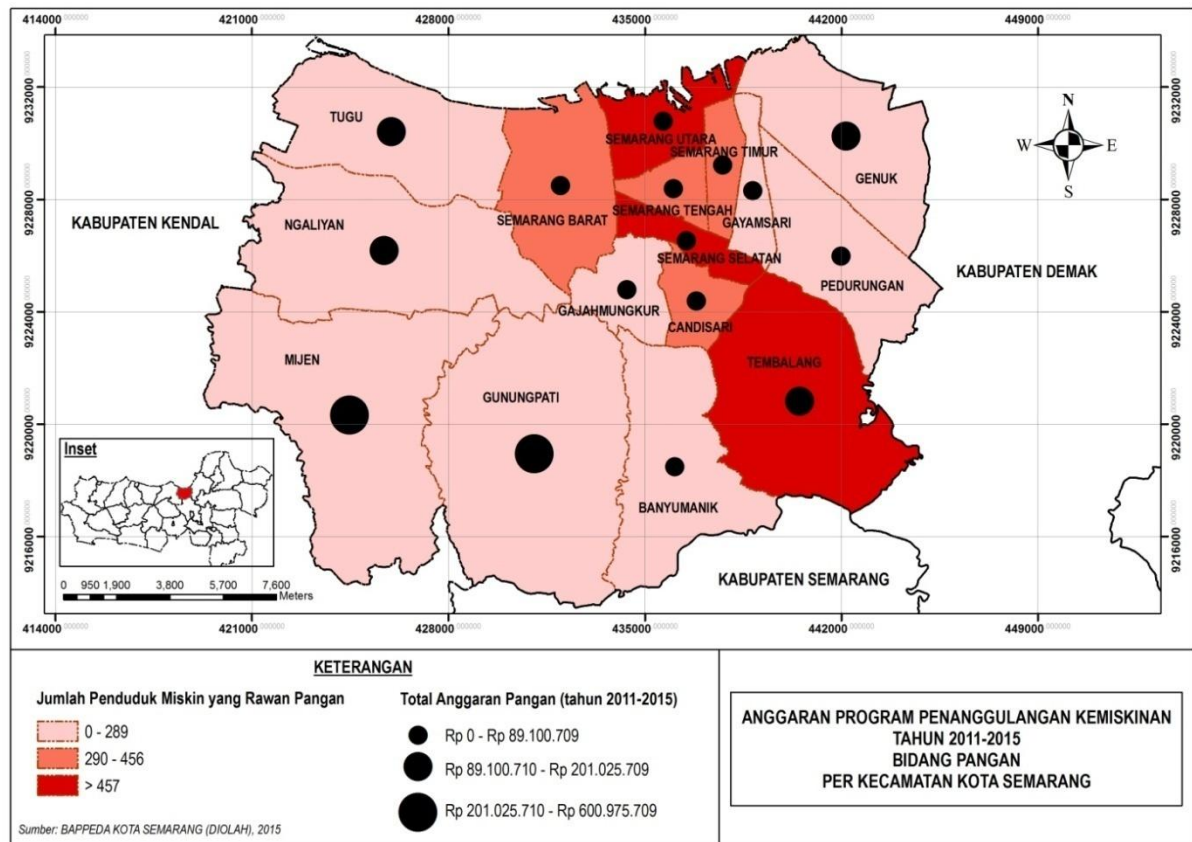
Hasil dan Pembahasan

Analisis Kesesuaian Anggaran dan Indikator Kemiskinan Wilayah Kecamatan

Analisis anggaran ini digunakan untuk melihat seberapa besar anggaran yang diberikan untuk bidang pada masing-masing indikator kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 18C Tahun 2009. Indikator kemiskinan tersebut adalah rawan sandang, rawan pangan, rawan papan, rawan pendidikan, rawan kesehatan, rawan ekonomi, rawan air bersih, rawan sanitasi, dan rawan listrik. Akan tetapi, terdapat dua indikator yang tidak mendapatkan bantuan penanggulangan kemiskinan dari Kota Semarang, yaitu rawan sandang dan rawan listrik. Berikut adalah penjelasan masing-masing anggaran untuk indikator kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 18C Tahun 2009.

Analisis Kesesuaian Anggaran untuk Indikator Rawan Pangan Menurut Kecamatan

Rawan pangan berdasarkan Perwal No 18C Tahun 2009 adalah tidak dapat mengkonsumsi makanan pokok dengan menggunakan 3 sehat (nasi, sayur, lauk) 2 x sehari dan tidak dapat makan daging/telur/ikan/ayam seminggu 1x. Analisis anggaran yang diberikan untuk indikator rawan pangan di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut.

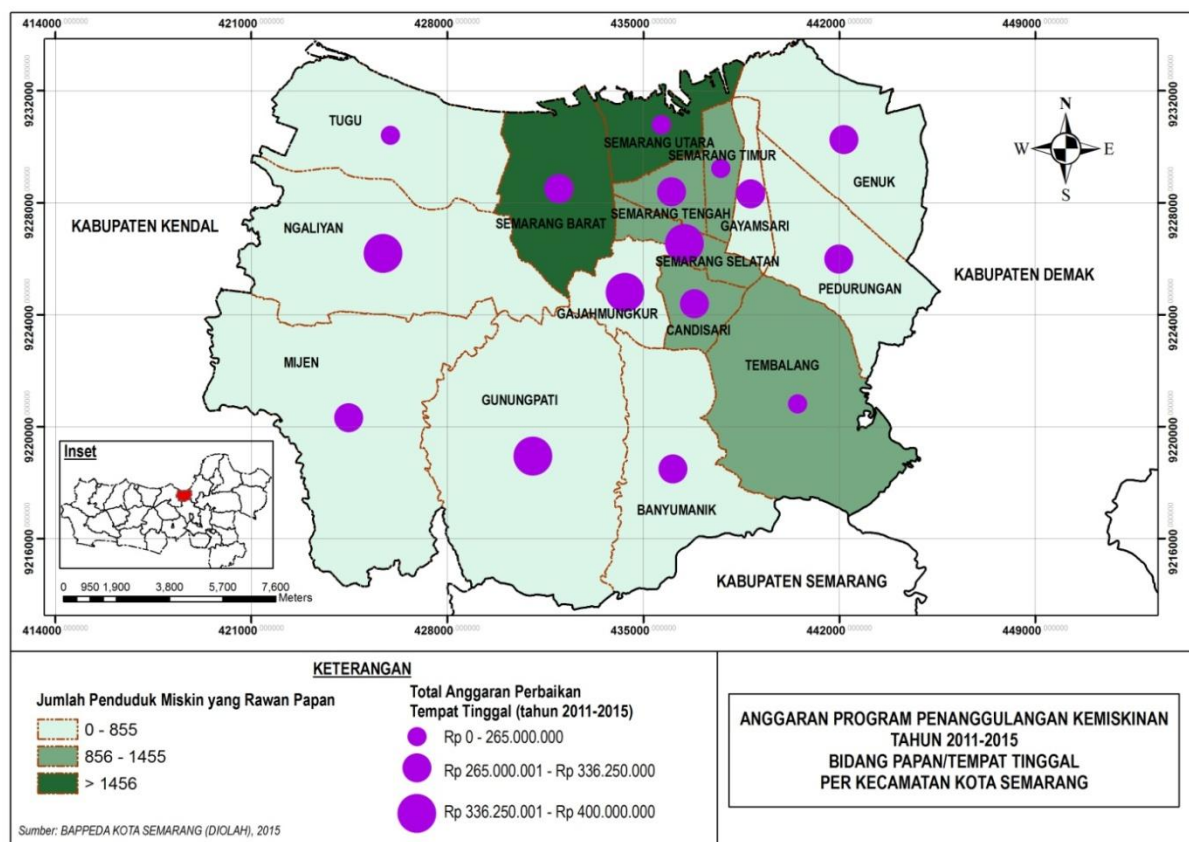


Gambar 3. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2015 Bidang Pangan Kota Semarang

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang rawan pangan adalah Kecamatan Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Tembalang. Anggaran yang digunakan untuk penanggulangan rawan pangan paling banyak di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati. Kecamatan dengan rawan pangan tinggi justru mendapatkan anggaran penanggulangan kemiskinan yang rendah, seperti di Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Selatan. Hal ini berarti bahwa anggaran untuk bantuan rawan pangan kurang tepat sasaran. Kecamatan dengan rawan yang rendah justru mendapatkan anggaran yang tinggi, seperti di Kecamatan Mijen dan Gunungpati. Anggaran yang tepat sasaran diberikan di Kecamatan Tembalang.

Analisis Kesesuaian Anggaran untuk Indikator Rawan Papan Menurut Kecamatan

Berdasarkan Perwal No 18C Tahun 2009 yang dimaksud rawan papan/tempat tinggal adalah tidak punya rumah sendiri atau mempunyai/menempati rumah yang luas lantainya kurang dari 8 m² bagi setiap penghuni; diatas 50% lantai terbuat dari tanah atau tidak dengan pengerasan (plester/ubin); dinding terbuat dari bambu, kayu kualitas rendah. Analisis anggaran yang diberikan untuk indikator rawan papan/tempat tinggal di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut.



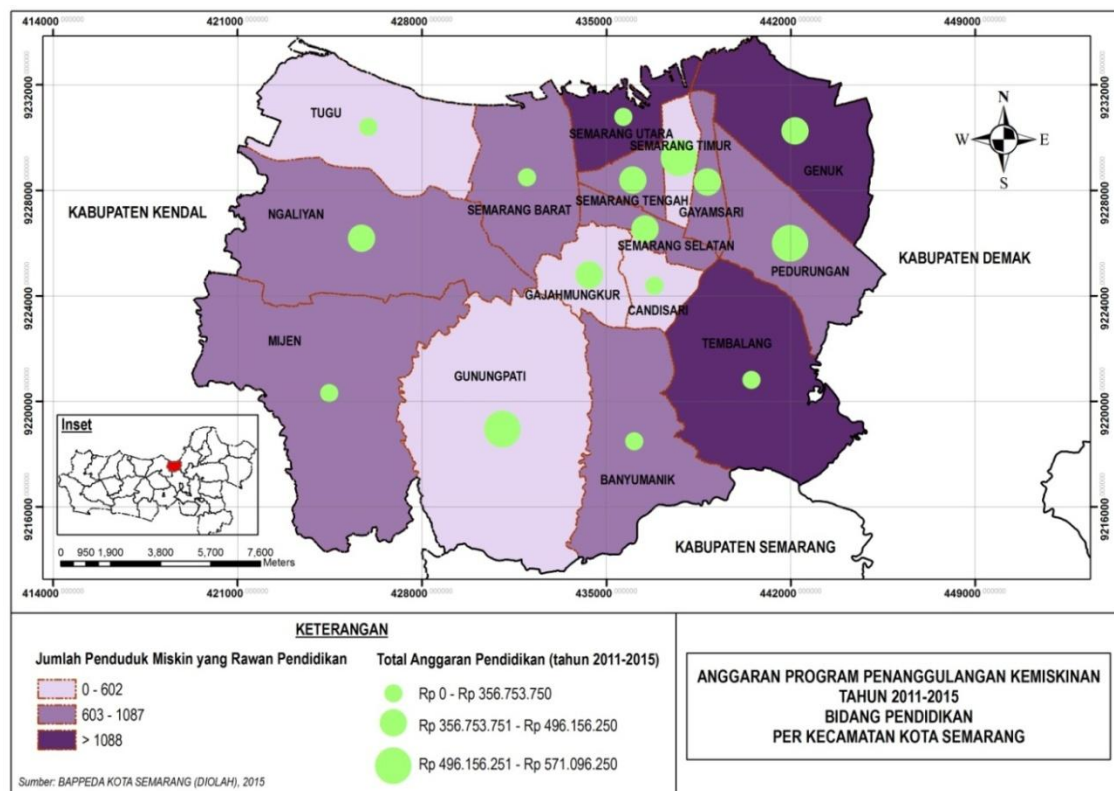
Gambar 4. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2015 Bidang Papan/Tempat Tinggal Kota Semarang

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa anggaran yang tepat sasaran diberikan di Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Tengah. Hal ini terjadi karena Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah merupakan kecamatan yang rawan sedang, dan diberikan anggaran yang sedang. Anggaran yang kurang tepat sasaran diberikan di Kecamatan Semarang Barat, karena Semarang Barat merupakan kecamatan

dengan rawan papan tinggi, namun hanya mendapatkan anggaran yang sedang. Anggaran yang tidak tepat sasaran diberikan di Kecamatan Semarang Utara, Ngaliyan, Gunungpati dan Gajahmungkur. Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan dengan rawan papan yang tinggi, tetapi mendapatkan anggaran yang rendah. Kecamatan Ngaliyan, Gunungpati dan Gajahmungkur merupakan kecamatan dengan rawan yang rendah. Akan tetapi, mendapatkan anggaran bantuan untuk tempat tinggal yang tinggi.

Analisis Kesesuaian Anggaran untuk Indikator Rawan Pendidikan Menurut Kecamatan

Rawan pendidikan berdasarkan Perwal No 18C Tahun 2009 adalah Tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sampai SLTA. Analisis anggaran yang diberikan untuk kecamatan-kecamatan yang rawan pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2015 Bidang Pendidikan Kota Semarang

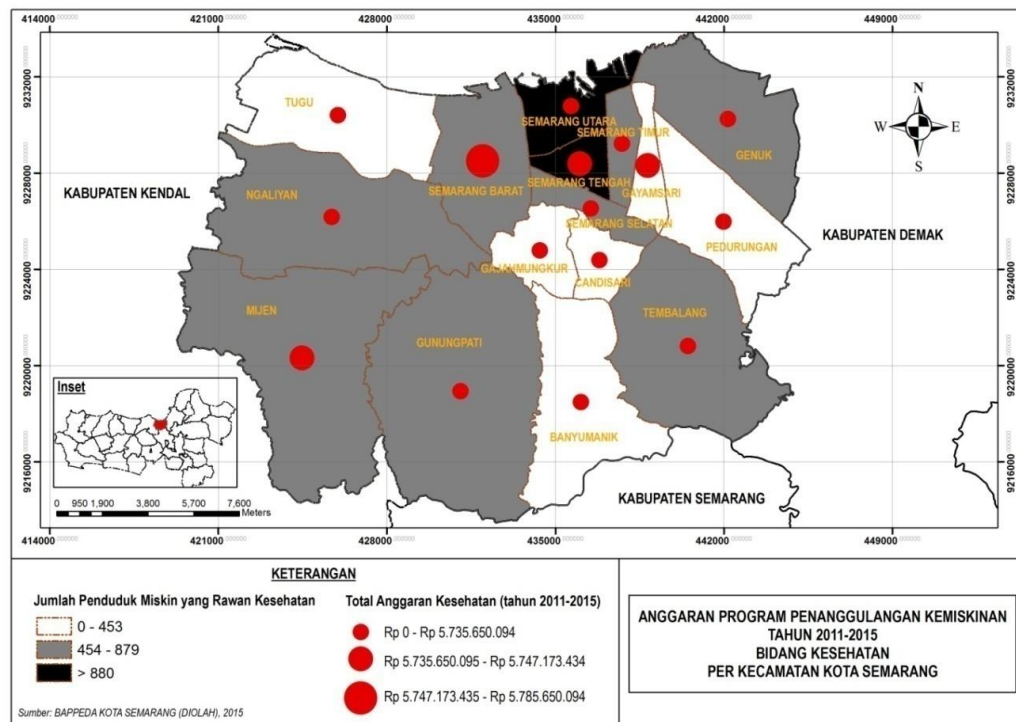
Gambar diatas dapat menunjukkan bahwa terdapat beberapa anggaran yang tidak tepat sasaran di berikan di beberapa kecamatan. Anggaran yang tidak tepat sasaran diberikan di

Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tembalang. Hal ini terjadi karena kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan rawan pendidikan tinggi, namun mendapatkan anggaran yang sedikit. Selain itu, anggaran yang tidak tepat sasaran juga diberikan di Kecamatan Gunungpati dan Semarang Timur. Dikatakan tidak tepat sasaran karena kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan rawan pendidikan rendah, namun justru mendapatkan anggaran bantuan pendidikan yang tinggi. Anggaran yang cukup tepat sasaran diberikan pada Kecamatan Genuk, karena merupakan kecamatan dengan rawan tinggi dan mendapatkan anggaran yang sedang/cukup tinggi. Anggaran yang tepat sasaran diberikan di Kecamatan Ngaliyan, karena merupakan kecamatan dengan rawan pendidikan sedang dan mendapatkan anggaran yang sedang.

Analisis Kesesuaian Anggaran untuk Indikator Rawan Kesehatan

Analisis ini digunakan untuk melihat jumlah anggaran dari tahun 2011 hingga tahun 2015, yang diberikan dalam program penanggulangan kemiskinan pada bidang kesehatan. Analisis ini dapat dilihat dengan menggunakan *overlay* antara jumlah anggaran dengan indikator rawan kesehatan. Rawan kesehatan berdasarkan Perwal No 18C Tahun 2009 adalah tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan kesehatan dasar atau pelayanan keluarga berencana/KB (Puskesmas dan jaringannya), tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Analisis anggaran yang diberikan untuk kecamatan-kecamatan yang rawan kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Berdasarkan gambar di bawah dapat dilihat bahwa rawan kesehatan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kecamatan yang memiliki rawan kesehatan dengan klasifikasi ditandai dengan warna lebih gelap yaitu Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Tengah. Anggaran program penanggulangan kemiskinan yang diberikan untuk bidang kesehatan juga diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Anggaran dengan klasifikasi tinggi ditunjukkan dengan bulatan yang lebih besar, seperti anggaran untuk Kecamatan Semarang Barat. Anggaran yang diberikan untuk rawan kesehatan cukup tepat sasaran.



Gambar 6. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2015 Bidang Kesehatan

Analisis Chart Priority (Prioritas Anggaran dan Program) Menurut Kecamatan

Dengan memadukan data mengenai jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin yang rawan pada bidang tertentu, dan anggaran program bantuan, yang ketiganya dirinci per kecamatan, selanjutnya dapat diketahui wilayah prioritas dengan mengacu pada kondisi riil masing-masing kecamatan untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan perlakuan yang tepat untuk setiap kecamatan. Berikut ini akan disajikan hasil analisis tipologi wilayah kecamatan di Kota Semarang yang terdiri dari 7 bidang, yaitu bidang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sanitasi, dan air bersih.

Pertama, analisis tipologi wilayah bidang pangan. Hasil dari analisis tipologi wilayah pada bidang pangan diperoleh bahwa kecamatan yang termasuk dalam Kuadran I adalah Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, dan Tembalang. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan kategori jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin yang rawan pangan paling besar dibanding kecamatan lainnya. Namun terdapat perbedaan dari ketiga kecamatan tersebut yaitu besarnya anggaran. Diantara ketiga kecamatan yang mendapat bantuan terbesar adalah di Kecamatan Tembalang. Hal tersebut dikarenakan pemberian dana bantuan tidak hanya didasarkan pada jumlah

penduduk miskin yang rawan pangan saja, tetapi juga melihat proporsi penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kecamatan yang termasuk dalam Kuadran II adalah Kecamatan Genuk, Pedurungan, dan Candisari, sedangkan yang termasuk dalam Kuadran III adalah Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Semarang Timur. Kecamatan yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Kecamatan Gayamsari, Ngaliyan, Gunungpati, Gajahmungkur, Mijen, Banyumanik, dan Tugu. Diantara kecamatan tersebut yang memiliki jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin yang rawan pangan paling sedikit adalah Kecamatan Tugu. Sedangkan kecamatan dengan anggaran terbesar untuk bidang rawan pangan pada Kuadran IV adalah Kecamatan Gunungpati dan Ngaliyan. Semestinya besar anggaran bidang pangan lebih diperuntukkan bagi kecamatan dengan kategori jumlah penduduk miskin dan rawan pangan yang lebih besar daripada kecamatan yang jumlah penduduk miskinnya sedikit.

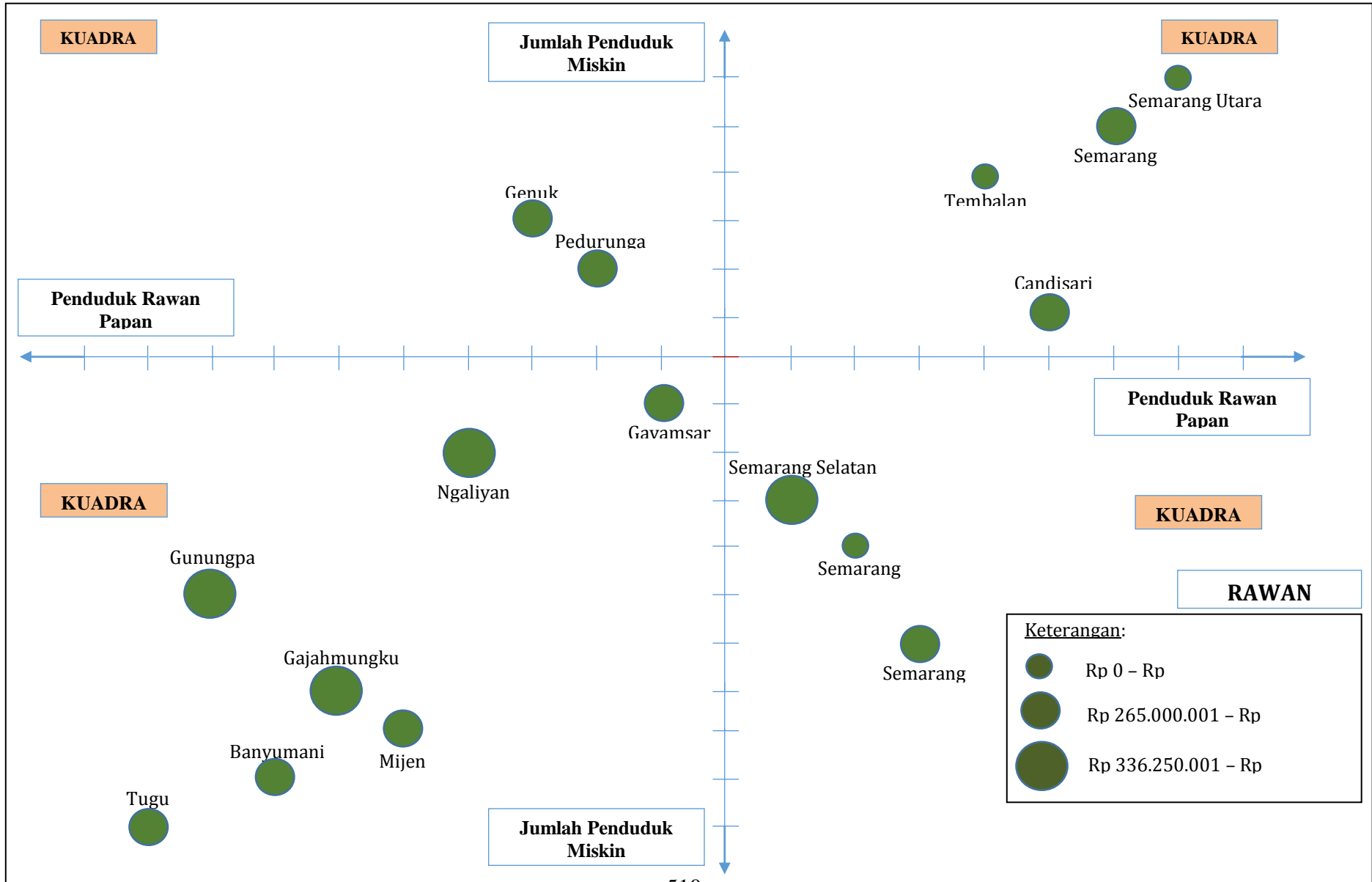
Kedua, analisis tipologi wilayah bidang papan. Tipologi wilayah kecamatan untuk bidang papan diperoleh kecamatan yang termasuk dalam Kuadran I adalah Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Tembalang, dan Candisari. Keempat kecamatan tersebut yang memperoleh bantuan anggaran bidang papan terbesar adalah Kecamatan Semarang Barat dan Candisari. Kecamatan yang termasuk dalam Kuadran II adalah Kecamatan Genuk dan Pedurungan, sedangkan yang termasuk dalam Kuadran III adalah Kecamatan Semarang Tengah, Timur, dan Selatan. Selanjutnya kecamatan yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Kecamatan Gayamsari, Ngaliyan, Gunungpati, Gajahmungkur, Banyumanik, Mijen, dan Tugu. Terdapat 3 kecamatan di Kuadran IV dengan kategori jumlah penduduk miskin dan penduduk miskin rawan pangan rendah memperoleh bantuan anggaran lebih besar daripada kecamatan yang terletak pada Kuadran I. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidaktepatan dalam penentuan sasaran pemberian bantuan anggaran bidang papan.

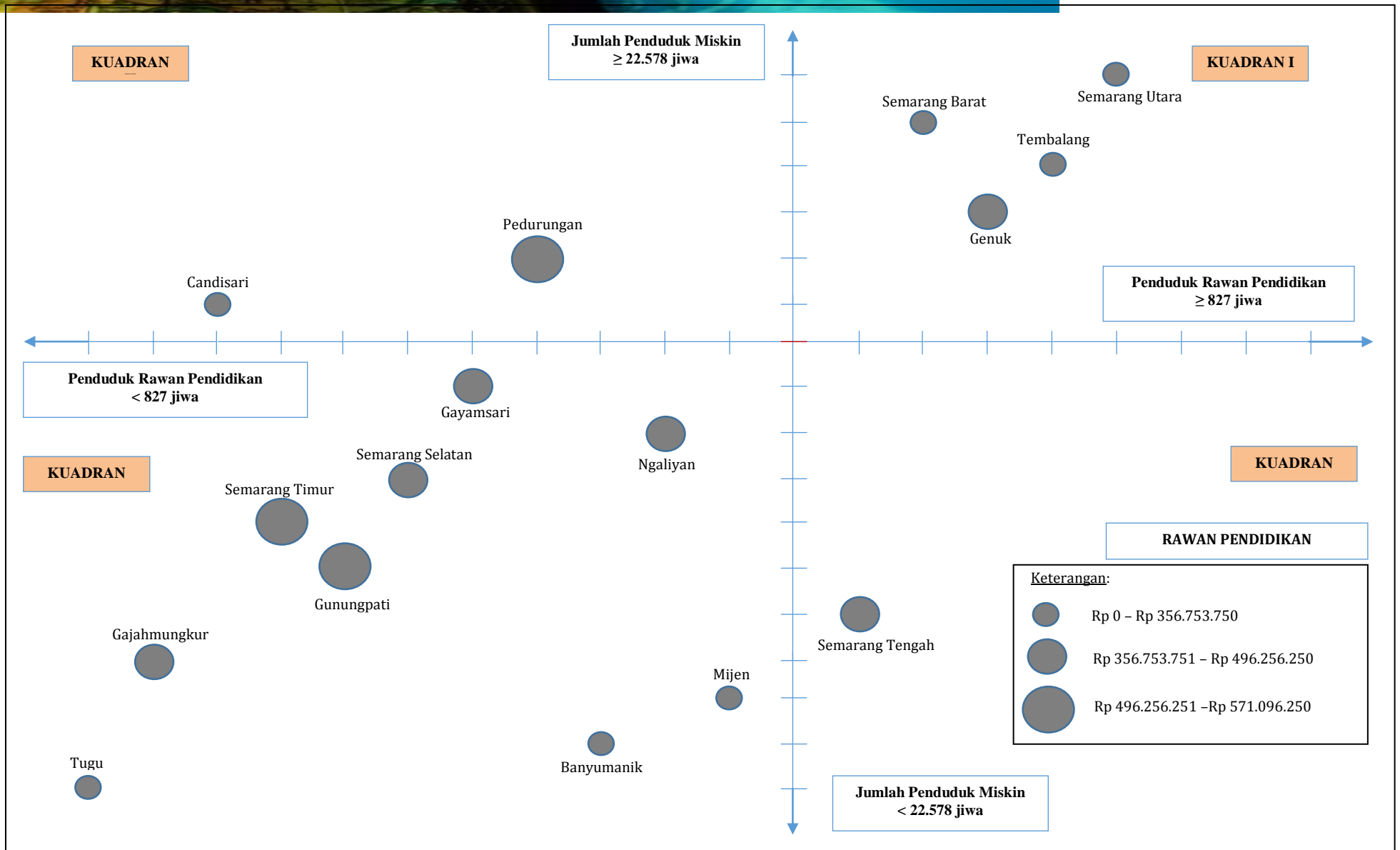
Ketiga, analisis tipologi wilayah bidang pendidikan. Tipologi wilayah kecamatan untuk bidang pendidikan diperoleh kecamatan yang termasuk dalam Kuadran I adalah Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Tembalang, dan Genuk. Kecamatan pada Kuadran I yang memperoleh anggaran pendidikan terbesar adalah Kecamatan Genuk, sementara apabila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kuadran I, Kecamatan Semarang Utara memiliki jumlah penduduk miskin rawan pendidikan lebih besar daripada Kecamatan Genuk.



Kecamatan yang termasuk dalam Kuadran II adalah Kecamatan Genuk dan Pedurungan, sedangkan yang termasuk dalam Kuadran III hanya terdapat 1 kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Tengah. Selanjutnya kecamatan yang termasuk dalam Kuadran IV terdapat 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Gayamsari, Ngaliyan, Semarang Selatan, Semarang Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tugu. Pada analisis tipologi wilayah bidang pendidikan ini diperoleh bahwa mayoritas kecamatan sudah cukup baik dalam bidang pendidikan, karena kecamatan yang masuk dalam tingkat kerawanan rendah lebih banyak daripada kecamatan yang masuk dalam tingkat kerawanan sedang dan tinggi. Sedangkan untuk anggaran pendidikan pada Kuadran IV terbesar adalah diberikan untuk Kecamatan Gunungpati dan Semarang Timur.

Keempat, analisis tipologi wilayah bidang kesehatan . Tipologi wilayah kecamatan untuk bidang kesehatan diperoleh hanya terdapat 1 kecamatan yang termasuk dalam Kuadran I yaitu Kecamatan Semarang Utara. Sama seperti bidang-bidang sebelumnya, Kecamatan Semarang Utara mempunyai jumlah penduduk miskin yang rawan terhadap bidang kesehatan terbesar. Besarnya jumlah penduduk yang rawan tersebut masih kurang sesuai dengan anggaran kesehatan yang diterima oleh Kecamatan Semarang Utara. Selanjutnya kecamatan yang termasuk dalam Kuadran II adalah Kecamatan Semarang Barat, Genuk, Tembalang, Pedurungan, dan Candisari, sementara Kuadran III terdiri dari Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Tengah, Ngaliyan, dan Mijen. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Kecamatan Gayamsari, Gunungpati, Gajahmungkur, Banyumanik, dan Tugu. Apabila diperhatikan anggaran kesehatan yang diterima oleh seluruh kecamatan di Kota Semarang, hanya terdapat 1 kecamatan yang memperoleh anggaran dengan kelas tertinggi (kelas 3) yaitu Kecamatan Semarang Barat. Sementara itu, Kecamatan Semarang Utara memiliki tingkat kerawanan paling besar namun besaran anggaran kesehatan hanya pada kelas 1 (rendah). Hal tersebut terjadi karena, jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat lebih banyak daripada kelurahan di Kecamatan Semarang Utara, atau dengan kata lain, bantuan yang diberikan tentunya juga memperhatikan proporsi penduduk kecamatan.





Kesimpulan

Hasil analisis ksesuaian anggaran untuk masing – masing indikator dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Kecamatan dengan rawan pangan tinggi justru mendapatkan anggaran penanggulangan kemiskinan yang rendah, seperti di Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Selatan. Hal ini berarti bahwa anggaran untuk bantuan rawan pangan kurang tepat sasaran. Kecamatan dengan rawan yang rendah justru mendapatkan anggaran yang tinggi, seperti di Kecamatan Mijen dan Gunungpati.
- b) Anggaran terkait rawan pangan yang kurang tepat sasaran diberikan di Kecamatan Semarang Barat, karena Semarang Barat merupakan kecamatan dengan rawan pangan tinggi, namun hanya mendapatkan anggaran yang sedang. Anggaran yang tidak tepat sasaran diberikan di Kecamatan Semarang Utara, Ngaliyan, Gunungpati dan Gajahmungkur. Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan dengan rawan pangan yang tinggi, tetapi mendapatkan anggaran yang rendah. Kecamatan Ngaliyan, Gunungpati dan Gajahmungkur merupakan kecamatan dengan rawan yang rendah. Akan tetapi, mendapatkan anggaran bantuan untuk tempat tinggal yang tinggi.
- c) Terdapat beberapa anggaran rawan pendidikan yang tidak tepat sasaran di berikan di beberapa kecamatan. Anggaran yang tidak tepat sasaran diberikan di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tembalang. Hal ini terjadi karena kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan rawan pendidikan tinggi, namun mendapatkan anggaran yang sedikit. Selain itu, anggaran yang tidak tepat sasaran juga diberikan di Kecamatan Gunungpati dan Semarang Timur. Dikatakan tidak tepat sasaran karena kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan rawan pendidikan rendah, namun justru mendapatkan anggaran bantuan pendidikan yang tinggi.
- d) Kecamatan yang memiliki rawan kesehatan tinggi yaitu Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Tengah memperoleh alokasi anggaran yang tinggi . Anggaran yang diberikan untuk rawan kesehatan cukup tepat sasaran.

Rekomendasi

Mengacu pada hasil analisis anggaran yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara besarnya alokasi anggaran yang diberikan pada suatu wilayah dengan tingkat kerawanan indikator kemiskinan di wilayah tersebut, maka perlu penyesuaian alokasi anggaran sebagai berikut :

- a) Kecamatan dengan rawan pangan tinggi seharusnya mendapatkan proporsi anggaran yang lebih tinggi untuk bidang tersebut dibandingkan periode sebelumnya, seperti di Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Selatan.
- b) Kecamatan dengan rawan papan tinggi seharusnya mendapatkan proporsi anggaran yang lebih tinggi untuk bidang tersebut dibandingkan periode sebelumnya, seperti di Kecamatan Semarang Utara, Ngaliyan, Gunungpati dan Gajahmungkur.
- c) Kecamatan dengan rawan pendidikan tinggi seharusnya mendapatkan proporsi anggaran yang lebih tinggi untuk bidang tersebut dibandingkan periode sebelumnya, seperti di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tembalang.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2015). Kota Semarang Dalam Angka 2015. Semarang : BPS Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang . (2015). Laporan Pendataan Warga Miskin Semarang 2015. Semarang : Bappeda Kota Semarang.
- Effendi, Tajudin Noor. (1993). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- La Ega. dan Hariyadi Ahmad. (2012). *Alat Analisa Tepat Guna untuk Perencanaan, Penanggaran dan Pemantauan Yang Berpihak Pada Kaum Miskin (edisi 2)*. Jakarta : Bappenas.
- Loewen, Garry. (2009). *A Compendium of Poverty Reduction Strategies and Frameworks*. Ontario: Tamarack – An Institute for Community Engagement.
- McKay, dan Kedir. 2005. “Chronic Poverty in Urban Ethiopia: Panel Data Evidence,” dalam *jurnal Internasional Planning Studies*. Vol. 10, No. 1, Hal 49-67.
- Nugroho dan Dahuri. 2002. *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Peraturan Walikota Semarang No 18 C Tahun 2009 tentang Indikator, Kriteria dan Klasifikasi Warga Miskin Kota Semarang.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

KAUSALITAS KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN: REVIEW LITERATUR DAN STUDI EMPIRIS

Florentinus Nugro Hardianto

Surel: flnugroho@gmail.com
Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

ABSTRAK

Ketahanan pangan mengarah kepada suatu kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan makanannya baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Ketahanan pangan dan kemiskinan merupakan dua hal yang saling berkaitan karena keduanya berkembang beriringan. Perbaikan kondisi ketahanan pangan biasanya juga sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hubungan demikian banyak dijumpai dalam sejumlah kasus riil di banyak lokasi. Hubungan demikian juga telah menjadi bahasan penting di sejumlah literatur terkait yang membahas perihal ketahanan pangan ataupun kemiskinan. Namun demikian, arah hubungan kausalitas antara variabel ketahanan pangan dan kemiskinan belum menjadi fokus analisis utama penelitian. Sejauh kajian pustaka yang telah dilakukan belum ditemukan artikel khusus yang membahasnya secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini bertujuan mengupas secara lebih mendalam arah hubungan kausalitas antara variabel ketahanan pangan dan kemiskinan baik secara teoretis maupun empiris. Artikel ini menggunakan metode review literatur untuk memperoleh hasil analisis yang diharapkan. Hasil analisis menunjukkan adanya perdebatan kausalitas atau gap kausalitas mengenai arah hubungan kausalitas antara variabel ketahanan pangan dan kemiskinan.

Kata kunci: ketahanan pangan, kemiskinan, gap kausalitas

Pendahuluan

Bicara ketahanan pangan sering dikaitkan dengan kemiskinan dan demikian pula sebaliknya. Entah sengaja atau tidak, namun nampaknya itu sudah umum. Masalah kemiskinan memang dekat sekali dengan masalah ketahanan pangan. Realitasnya, masyarakat yang buruk kondisi ketahanan pangannya, biasanya termasuk kepada golongan yang miskin. Alasannya sederhana saja, masyarakat miskin terbatas kepemilikan sumberdaya keuangannya sehingga berpotensi mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya termasuk kebutuhan pangan. Sulit dimengerti jika terdapat anggota masyarakat yang kaya tetapi tingkat ketahanan pangannya buruk. Dengan kepemilikan sumber daya keuangan

yang lebih dari cukup, misalnya, masyarakat yang tergolong kaya akan mudah mengakses dan membeli kebutuhan-kebutuhan pangan sehari-harinya.

Namun demikian, sejumlah literatur menyatakan bahwa tidak selalu masyarakat miskin mengalami masalah ketahanan pangan. Selain itu, masalah ketahanan pangan juga tidak semata berdasarkan karena faktor kemiskinan. Ketidakkonsistenan hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan inilah yang menarik perhatian penulis sehingga menjadi topik utama pembahasan dalam artikel ini.

Berdasarkan fenomena demikian, bagaimana sebenarnya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara ketahanan pangan dan kemiskinan. Apakah masalah ketahanan pangan mengakibatkan masalah kemiskinan, atau sebaliknya, yakni masalah kemiskinan mengakibatkan masalah ketahanan pangan? Apakah masalah kemiskinan dan masalah ketahanan pangan saling mempengaruhi satu dengan lainnya? Apakah masalah kemiskinan bagian dari masalah ketahanan pangan atau sebaliknya masalah ketahanan pangan merupakan bagian dari masalah kemiskinan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas nampaknya menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sehubungan dengan hal itu, artikel ini bertujuan membahas lebih lanjut hubungan kausalitas antara ketahanan pangan dan kemiskinan. Harapannya adalah dapat memberi kontribusi teoretis terkait hubungan kemiskinan dan ketahanan pangan. Dengan begitu, artikel ini diharapkan juga dapat memberi pemahaman lebih banyak tentang hubungan kausalitas antara ketahanan pangan dan kemiskinan.

Kajian Pustaka

Pengurangan kemiskinan adalah tujuan kunci pembangunan di banyak negara sedang berkembang, sedangkan ketahanan pangan menjadi tahap sentral dalam arena kebijakan sejak era krisis pangan global pada tahun 2007/2008 (Mahadevan dan Hoang, 2015). Dalam pelaksanaannya, upaya mengatasi kemiskinan dan masalah ketahanan pangan biasanya menjadi satu paket kebijakan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara langsung atau tidak langsung berkaitan pula dengan kebijakan pencegahan masalah ketahanan pangan.

Menurut Winne (2008), hubungan antara kondisi kelaparan, kerawanan pangan, dan kemiskinan mengantar pada suatu proposisi ayam dan telur sehingga tidak jelas yang mana sebab dan yang mana akibatnya. Lanjutnya, bisakah kita secara signifikan mengurangi atau

bahkan menghilangkan dua yang pertama jika kita membasmi yang terakhir? Atau, jika yang terakhir tidak dapat dibasmi, apakah kita harus memusatkan sumber daya masyarakat pada mitigasi kelaparan sebagai strategi yang paling manusiawi dan praktis?

Hubungan antara kemiskinan dan kerawanan pangan adalah suatu hubungan kompleks dan antara satu dengan lainnya memiliki hubungan sebab-akibat (Mozdalifa, J., 2012). Di satu sisi, penyebab utama kerawanan pangan adalah *ill health, disability, loss of job, lower level of education, employment & higher cost of living*, dan lain-lain. Sementara di sisi lain, resiko kerawanan pangan yang dihadapi keluarga berpendapatan rendah itu terkait dengan *lack of access to land, single-parent families, lack of alternative occupation, unstable income level, dan having a poor family head* yang kesemuanya secara fundamental merupakan efek dari kemiskinan

Hasil studi-studi yang ada menunjukkan bahwa belum ada konsensus tentang hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan karena adanya kesenjangan (gap) antara teori ekonomi yang mendasari ukuran ketahanan pangan dan data yang diamati (Mahadevan dan Hoang, 2015). Kesenjangan juga bisa muncul dalam bentuk lain. Perbedaan definisi tentang kemiskinan dan ketahanan pangan memungkinkan terjadinya perbedaan hasil analisis hubungan kausalitas di antara dua variabel tersebut. Populasi dan sampel penelitian juga bisa menjadi faktor penyebab munculnya perbedaan hasil riset hubungan kausalitas antara kemiskinan dan ketahanan pangan. Potensi kesenjangan juga bisa muncul dari pilihan teori yang digunakan dalam penelitian. Di luar faktor metodologis, masih ada potensi kesenjangan lain yang bisa mendukung belum adanya consensus hubungan kausalitas antara kemiskinan dan ketahanan pangan.

Kondisi rawan pangan (*food insecurity*) dan kelaparan berhubungan dengan sumberdaya rumah tangga yang terbatas yang cenderung mengarah kepada kondisi “*resource-constrained*” atau “*poverty-related*” (Cook dan Frank, 2008). Hal itu secara implisit menunjukkan bahwa antara kerawanan pangan dan kemiskinan seperti yang ditunjukkan dengan kondisi “*poverty-related*” terdapat hubungan saling mempengaruhi. Namun demikian, relatif sulit untuk menentukan apakah kondisi rawan pangan yang menyebabkan kemiskinan atau sebaliknya.

Pihak lain berpendapat bahwa variabel kemiskinan berpotensi menjadi penyebab terjadinya masalah kerawanan pangan. Pendapat ini diungkapkan oleh Anderson dan

Roumasset (1996) yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan adalah merupakan faktor resiko yang bisa menimbulkan *food insecurity*. Senada dengan pendapat ini adalah pendapat dari Misselhorn (2005). Misselhorn (2005) secara eksplisit menyatakan bahwa kemiskinan adalah faktor penyebab terjadinya masalah kerawanan pangan. Tabel 1 di bawah menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor penyebab terjadinya masalah kerawanan pangan dari aspek ekonomis. Meskipun demikian, banyak faktor lain juga mempengaruhi perkembangan kerawanan pangan selain faktor ekonomis yang di dalamnya terdapat faktor kemiskinan. Faktor lain yang juga turut menjadi penyebab kerawanan pangan adalah faktor demografis, sosial-politik, ilmiah & teknologi, agama & budaya, dan kimia-biologis-fisikal.

Tabel 1. *Drivers of Food Insecurity*

Demographic	Population pressure
	In- and out-migration
	Low availability of labour
	Age distribution
	Gender distribution
	Population pressure
Economic	Inflation
	Increase in food prices
	Lack of access to financial capital and credit
	Unavailability of employment
	Poverty
	Poor market access
	Sale of assets
Socio-political	Social and political unrest or war
	Low availability of food imports and food aid
	Formal and informal government policies
	Absence of property rights and/or land access
	Illegal residency status
	Poor social networks
	Lack of education
	Lack of alternative livelihood opportunities
Scientific & technological	Insufficient agricultural expertise
	Poor distribution networks and infrastructure
Cultural and religious	Gender biases
	Age biases
	Traditions & cultural preferences
Physical, biological & chemical	Poor human health
	Prevalence of HIV/ AIDS
	Climate & environmental stressors
	Poor agricultural potential of land
	Insufficient agricultural inputs
	Pests and diseases of crops and livestock
	Other livestock losses
	Low regional availability of cereal

(Sumber: Misselhorn, 2005)

Pihak lain lagi yang berseberangan dengan pendapat Anderson dan Roumasset (1996) merujuk kepada pendapat Rhoe, et.al. (2008). Pendapat ini justru menyatakan bahwa masalah kerawanan pangan merupakan bagian dari masalah kemiskinan. Selengkapnya Rhoe, et.al. (2008) mengemukakan bahwa salah satu indikator utama kemiskinan adalah tingkat status gizi yang diukur dari asupan protein dan energi. Hubungan kausalitas antara kemiskinan dan ketahanan pangan tidak secara tegas dinyatakan oleh Rhoe, et.al. (2008). Bahkan dalam studi empirisnya untuk kasus kemiskinan di Kazakhstan, variabel ketahanan pangan tidak menjadi bagian dari variabel penjelasnya.

Hasil-hasil studi empiris atau penelitian yang dilakukan sejumlah pihak cenderung sejalan dengan apa yang telah dipaparkan secara teoretis sebelumnya. Hasil-hasil studi empiris belum menghasilkan konsensus tunggal tentang hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan. Bukti-bukti empiris demikian menegaskan bahwa hubungan kemiskinan dan ketahanan pangan masih belum pasti sehingga dalam riset-riset terkait dimungkinkan hasilnya berlainan. Hal ini bisa juga diartikan bahwa secara umum belum ada generalisasi kuat untuk menyimpulkan hubungan kuat antara kemiskinan dan ketahanan pangan.

Wight, et.al. (2014) misalnya telah melakukan penelitian hubungan antara kemiskinan dan kerawanan pangan rumah tangga di kalangan anak-anak. Hasilnya menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kita menemukan bukti adanya hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik antara kemiskinan dan kerawanan pangan di kalangan anak-anak. Beban kerawanan pangan meningkat ketika rasio pendapatan terhadap kebutuhan menurun. Kedua, hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa ukuran pendapatan yang lebih inklusif dan sumber daya mengungkapkan hubungan yang lebih kuat antara kemiskinan dan kerawanan pangan di kalangan anak-anak daripada ukuran resmi.

Kemudian Mahadevan dan Hoang (2015) juga telah melakukan penelitian sejenis dengan mengambil sampel negara Vietnam. Unit analisisnya adalah rumah-tangga yang berjumlah sekitar 9.399 rumah-tangga. Penelitiannya dikelompokkan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan di daerah perkotaan. Sementara di daerah pedesaan, hasil penelitiannya mengindikasikan adanya hubungan lemah antara kemiskinan dan ketahanan pangan.

Hasil studi empiris selanjutnya adalah riset yang dilakukan oleh Maharjan dan Joshi (2009). Penelitiannya mengambil sampel daerah-daerah pedesaan di negara Nepal. Hasil penelitiannya mengindikasikan *Income-poverty* (kemiskinan) dan *consumption-poverty* (ketahanan pangan) berkorelasi secara signifikan antara satu dengan lainnya. Hasil penelitiannya juga mengindikasikan bahwa rumah tangga yang semakin kaya akan semakin terhindar dari masalah kerawanan pangan.

Dalam kenyataannya, masyarakat miskin belum tentu menderita kerawanan pangan. Sebaliknya juga bahwa masyarakat yang tidak miskin bisa saja menghadapi resiko masalah pangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Cook dan Frank (2008). Menurut Cook dan Frank (2008), meskipun masyarakat yang menderita kemiskinan dan kerawanan pangan saling tumpang-tindih, namun kedua kondisi tersebut tidaklah identik karena tidak semua masyarakat miskin itu mengalami kerawanan pangan, dan bahkan resiko rawan pangan itu bisa meluas kepada masyarakat yang hidup di atas garis kemiskinan sekalipun.

Metode Penelitian

Pembahasan dalam artikel ini adalah hasil dari menggunakan metode review literatur. Metode review literatur dilakukan melalui beberapa tahap yang mana masing-masing tahapnya saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah mencari artikel yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pencarian ini dilakukan dengan bantuan internet dengan harapan lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan artikel-artikel yang relevan. Tahap pertama ini mendapatkan sejumlah artikel yang sesuai topik bahasan. Tahap kedua adalah membaca, menganalisis, dan mengkaji lebih lanjut isi dari sejumlah artikel yang telah diperoleh pada tahap pertama. Tahap kedua ini menghasilkan bahan-bahan penting yang siap untuk diolah lebih lanjut sebagai bahan pembahasan. Tahap ketiga adalah mengolah bahan-bahan penting yang diperoleh pada tahap kedua menjadi uraian yang sistematis. Hasil tahap ketiga inilah yang akan disajikan dalam bagian penting dalam artikel ini.

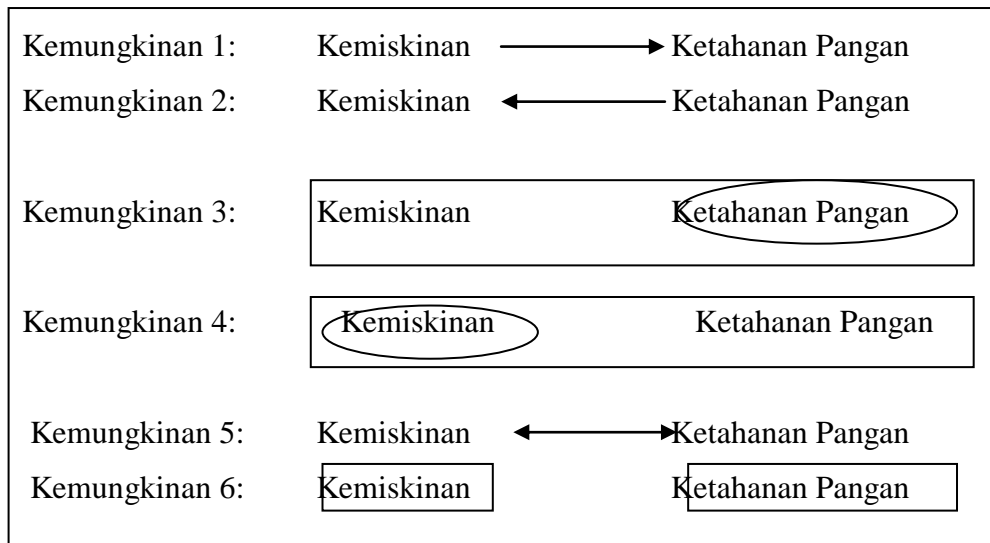
Hasil dan Pembahasan

Hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan masih menjadi perdebatan karena belum ada kesimpulan tunggal. Kesimpulan yang diperoleh masing-masing penelitian sangatlah tergantung dari ruang lingkup dan batasan-batasan dalam penelitian yang dilakukan di

lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh terkait hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan masih banyak kemungkinannya. Perbedaan definisi, ukuran, indikator, unit analisis, lokasi, dan teknik analisis data misalnya berpotensi mengakibatkan hasil penelitian yang juga berbeda dalam menyimpulkan hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil olahan studi literatur, setidaknya ada tujuh kemungkinan hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan. Kemungkinan pertama adalah kemiskinan menjadi variabel penyebab terjadinya masalah ketahanan pangan. Kemungkinan pertama ini jelas memposisikan variabel kemiskinan mempengaruhi perkembangan tingkat ketahanan pangan. Kemungkinan kedua adalah masalah ketahanan pangan menjadi sebab terjadinya kemiskinan. Untuk kemungkinan kedua, masalah ketahanan pangan menjadi penyebab munculnya kemiskinan. Dengan kata lain, variabel ketahanan pangan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, kemungkinan ketiga adalah bahwa masalah ketahanan pangan merupakan salah satu indikator tingkat kemiskinan. Kemungkinan ketiga ini menjelaskan bahwa salah satu indikator tingkat kemiskinan masyarakat itu adalah keberadaan masalah ketahanan pangan di tengah masyarakat. Kemungkinan keempat adalah bahwa kemiskinan adalah salah satu indikator tingkat ketahanan pangan. Kemungkinan keempat ini menjelaskan bahwa salah satu indikator tingkat ketahanan pangan suatu masyarakat adalah kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat tersebut. Kemungkinan kelima adalah bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan saling berpengaruh secara simultan sehingga tidak jelas arah hubungan kausalitasnya. Kemungkinan kelima ini berarti bahwa antara variabel kemiskinan dan ketahanan pangan terjadi saling pengaruh-mempengaruhi secara simultan. Tidak jelas apakah variabel kemiskinan yang mempengaruhi variabel ketahanan pangan, atau sebaliknya. Kemungkinan keenam adalah bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan tidak ada pengaruh atau masing-masing tidak berhubungan. Kemungkinan keenam menjelaskan bahwa variabel kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas dengan variabel ketahanan pangan. Selengkapny alternatif-alternatif kemungkinan hubungan kausalitas antara kemiskinan dan ketahanan pangan dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Alternatif Hubungan Kausalitas Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Penutup

Artikel ini bertujuan mengupas secara lebih mendalam arah hubungan kausalitas antara variabel ketahanan pangan dan kemiskinan baik secara teoretis maupun empiris. Artikel ini menggunakan metode review literatur untuk memperoleh hasil analisis yang diharapkan. Hasil analisis menunjukkan adanya perdebatan kausalitas atau gap kausalitas mengenai arah hubungan kausalitas antara variabel ketahanan pangan dan kemiskinan. Berdasarkan hasil olahan studi literatur, ada setidaknya enam kemungkinan hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan. Keenam kemungkinan tersebut merupakan perkiraan hubungan yang bisa terjadi antara kemiskinan dan ketahanan pangan. Kemungkinan hubungan mana yang paling sesuai dengan kenyataan nampaknya sangat tergantung dari metode penelitian yang dipilih. Namun demikian, dari hasil analisis sejumlah studi literatur, hubungan kausalitas antara variabel kemiskinan dan ketahanan pangan belum mencapai konsensus final. Masih terbuka enam kemungkinan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara kedua variabel. Penelitian-penelitian mendatang terkait dengan hubungan kausalitas antara kemiskinan dan ketahanan pangan masih perlu terus dilakukan. Harapannya, hasil-hasil penelitian mendatang ini dapat semakin mengarahkan dengan lebih jelas dan valid tentang arah hubungan kausalitas yang lebih tepat di antara kedua variabel.

Daftar Pustaka

- Anderson, J., dan Roumasset, J.(1996), “Food Insecurity and Stochastic Aspects of Poverty”, MPRA Paper No. 13323, posted 25. April 2009 02:17 UTC, Online at <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13323/>.
- Cook, J.T., dan Frank, D.A. (2008), “Food Security, Poverty, and Human Development in the United States”, *Annals of the New York Academy of Sciences*, xxxx: 1–16 (2008). doi: 10.1196/annals.1425.001
- Mahadevan, R., dan Hoang, V. (2015), “Is There a Link Between Poverty and Food Security?”, *Social Indicators Research* July, DOI: 10.1007/s11205-015-1025-3.
- Maharjan, K.L., dan Joshi, N. P. (2009), “Relationship between Income-poverty and Food insecurity in Rural Far-western Mid-hills of Nepal”, *Paper presented at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, August 16-22, 2009*.
- Misselhorn, A.A.(2004), “What drives food insecurity in southern Africa? a meta-analysis of household economy studies”, *Global Environmental Change* 15 (2005) 33–43.
- Mozdalifa, J. (2012), “Poverty and Food Security”, *a chapter for a forthcoming book “Elusive Progress: State of Food Security in Bangladesh, 2012”*, edited by Rashed Al Mahmud Titumir, published by Shrabon Prokashani, Dhaka in October 2012.
- Rhoe, V., Babu, S., dan Reidhead, W. (2008), “An Analysis of Food Security and Poverty in Central Asia-Case Study from Kazakhstan”, *Journal of International Development*, 20, 452–465 (2008), Published online in Wiley InterScience, (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/jid.1421.
- Wight, V., Kaushal, N., Waldfogel, J., dan Garfinkel, I.(2014), “Understanding the Link between Poverty and Food Insecurity among Children: Does the Definition of Poverty Matter?”, *Journal of Child Poverty*. 2014 January 2; 20(1): 1–20. doi:10.1080/10796126.2014.891973.
- Winne, Mark (2008), *Closing the Food Gap: Resetting the Table in the Land of Plenty*, Beacon Press, USA.

MODEL TEORETIK KETAHANAN PANGAN: IDENTIFIKASI ANTESEDEN DAN KONSEKUEN

Florentinus Nugro Hardianto

Surel: flnugroho@gmail.com
Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan variabel yang dependen karena keberadaannya tergantung dengan variabel lainnya. Perkembangan ketahanan pangan dapat disebabkan banyak faktor. Di sisi lain, tingkat ketahanan pangan suatu daerah dapat memberi akibat tertentu bagi daerah yang bersangkutan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa ada anteseden yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan juga ada konsekuen sebagai efek atau akibat kondisi tertentu perkembangan ketahanan pangan. Artikel ini bertujuan untuk membangun model teoretik hubungan anteseden dan konsekuen terkait dengan keberadaan variabel ketahanan pangan. Artikel ini menggunakan metode review literatur untuk membangun model ketahanan pangan. Hasil analisis memberi gambaran lebih komprehensif tentang model ketahanan pangan. Model ketahanan pangan ini menjelaskan variabel anteseden, variabel konsekuen, dan arah hubungan yang terjadi antar-variabel di dalam model yang dibangun. Model ketahanan pangan ini menjelaskan pula bahwa masalah ketahanan pangan itu tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan masalah lain yang saling terkait. Model ketahanan pangan ini juga menjelaskan bahwa penanganan permasalahan ketahanan pangan hendaknya dilakukan secara integratif dan komprehensif agar kebijakan ketahanan pangan bisa lebih efektif mengatasi kerawanan pangan dan akibat-akibat negatif yang ditimbulkannya.

Kata kunci: ketahanan pangan, model ketahanan pangan, anteseden ketahanan pangan, konsekuen ketahanan pangan, kebijakan ketahanan pangan

Pendahuluan

Masalah ketahanan pangan tidak muncul secara tiba-tiba. Masalah ketahanan pangan ini bisa dikualifikasikan menjadi tiga masa, yakni masa menuju rawan pangan, masa awal rawan pangan, dan masa parah rawan pangan. Masa menuju rawan pangan adalah kondisi dimana mulai ditandai indikator-indikator pendukung terjadinya rawan pangan. Masa awal rawan pangan diindikasikan mulai munculnya sejumlah efek negatif kepada masyarakat meski belum meluas cakupannya. Masa parah rawan pangan adalah kondisi yang mana efek negatif yang muncul telah meluas menjangkau hampir semua wilayah yang bersangkutan seperti

propinsi atau nasional. Semua kualifikasi masalah ketahanan pangan tersebut muncul karena sejumlah faktor penyebab.

Ada sejumlah faktor penyebab tertentu yang mempengaruhi kondisi ketahanan pangan masyarakat. Faktor-faktor penyebab ini sangat beragam. Faktor penyebabnya bisa mengarah kepada faktor ekonomi seperti kurangnya pendapatan atau bisa juga faktor non-ekonomi seperti buruknya cuaca sehingga terjadi kegagalan panen pada banyak tanaman pangan. Faktor penyebab kerawanan pangan biasanya juga bersifat jamak dalam arti beberapa faktor penyebab secara bersamaan menjadi pemicu terjadinya kerawanan pangan. Jarang sekali kerawanan pangan hanya disebabkan oleh faktor penyebab tunggal. Faktor-faktor penyebab ini dalam sejumlah literatur terkait bisa dimasukkan ke dalam kelompok variabel anteseden.

Masalah ketahanan pangan pada akhirnya memunculkan masalah baru sebagai bentuk akibat lanjutannya. Masalah baru ini merupakan konsekuensi logis dari terjadinya masalah kerawanan pangan. Contoh sederhana masalah kerawanan pangan adalah ketika seseorang katakanlah saja belum makan dari pagi sampai sore, pasti badannya akan terasa lemas. Kondisi badan yang lemas ini bisa dikatakan sebagai efek kekurangan asupan makanan. Dengan demikian efek kerawanan pangan bagi masyarakat jelas sesuatu kondisi yang negatif. Efek-efek negatif sebagai akibat yang ditimbulkan oleh masalah ketahanan pangan atau kerawanan pangan ini dapat disebut sebagai kelompok variabel konsekuennya.

Sehubungan dengan itu, artikel ini akan mencoba untuk membuat suatu model teoretik ketahanan pangan. Model ini akan mengidentifikasi variabel anteseden, variabel konsekuen, dan arah hubungan kausalitas yang terbangun. Model ini bisa dikatakan sebagai model awal ketahanan pangan yang menggambarkan variabel anteseden dan konsekuen di dalamnya. Model ini nantinya bisa digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis permasalahan ketahanan pangan. Harapannya juga bahwa model teoretik ini dapat bermanfaat untuk memahami ketahanan pangan secara lebih komprehensif baik dari sisi anteseden maupun konsekuennya.

Kajian Pustaka

Sejumlah literatur telah menjadi bahan kajian untuk membahas perihal ketahanan pangan. Banyak literatur sudah membahas variabel anteseden yang mengarah kepada penyebab terjadinya masalah terkait ketahanan pangan seperti misalnya kerawanan pangan.

Demikian pula terkait dengan akibat adanya masalah kerawanan pangan, sejumlah artikel telah membahas berbagai konsekuensi munculnya masalah pangan. Bahkan, beberapa artikel juga berusaha untuk menjelaskan sekaligus perihal variabel penyebab dan akibat dari adanya masalah kerawanan pangan.

Selanjutnya, bagian kajian pustaka ini akan menjelaskan lebih dulu variabel penyebab atau anteseden terjadinya masalah kerawanan pangan. Dalam artikelnya, Jyoti et al (2005) menyatakan bahwa penyebab masalah ketahanan pangan adalah adanya kendala sumberdaya (*resource constraint*). Kendala sumberdaya dapat dalam bentuk kendala yang berhubungan dengan masalah keuangan dan juga dengan masalah non-keuangan (*financial and non-financial constraint*). Masalah keuangan antara lain pekerjaan, pendapatan, harga bahan pangan, dan sebagainya. Sementara masalah non-keuangan antara lain ketersediaan bahan pangan, akses sumber bahan pangan, distribusi bahan pangan, dan lain-lain.

Dalam model *multivariate*-nya, Rose (1999) berpendapat bahwa *food insecurity* terkait dengan faktor etnik, dan ukuran rumah-tangga. Semakin besar ukuran rumahtangga, semakin besar pengeluaran untuk membiayai konsumsi kebutuhan pangan. Sebaliknya, semakin kecil ukuran rumahtangga dalam arti semakin sedikit anggota rumahtangga, semakin kecil pula pengeluaran untuk membiayai konsumsi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan pangan. *Ethnicity* juga terkait dengan *food insecurity*. Etnik dengan keterbatasan tertentu seperti bahasa atau gaya hidup dapat membatasi pilihan bahan pangan dan meningkatkan biaya untuk mendapatkan pangan. Namun demikian menurut Rose (1999), pendapatan (*income*) adalah determinan ekonomi paling penting dari kerawanan pangan.

Ilaboya et.al. (2012) mengemukakan dalam tulisannya bahwa ada sejumlah faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan (*food insecurity*). Menurutnya, faktor-faktor penyebabnya adalah lingkungan sosial dan politik yang tidak stabil yang menghalangi pertumbuhan ekonomi; perang dan perjuangan sipil yang berkelanjutan; ketidakseimbangan makroekonomi dalam perdagangan; kendala sumber daya alam; basis sumber daya manusia yang buruk; ketidaksetaraan gender; pendidikan yang tidak memadai; kesehatan yang buruk; bencana alam seperti banjir; dan tidak adanya pemerintahan yang baik. Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional yang tidak mencukupi atau akses makanan yang tidak mencukupi oleh rumah tangga dan individu.

Selanjutnya berdasarkan studi meta analisis yang dilakukannya, Misselhorn (2005) mengungkapkan bahwa dari sekian banyak penyebab terjadinya masalah terkait ketahanan pangan dapat dikategorikan menjadi enam kategori besar. Enam kategori besar penyebab terjadinya masalah ketahanan pangan ini bersifat multidimensi. Selengkapannya, keenam kategori besar penyebab kerawanan pangan adalah penyebab yang bersifat *economic; socio-political; scientific and technological; cultural and religious; physical, biological and chemical; dan demographic*. Penyebab yang bersifat ekonomis misalnya inflasi, peningkatan harga pangan, kurangnya akses keuangan, pengangguran, dan kemiskinan. Penyebab yang bersifat demografis misalnya tekanan kepadatan penduduk, ketidakseimbangan perpindahan penduduk, kesenjangan distribusi umur penduduk, dan keterbatasan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Secara lebih detail, Misselhorn (2005) mengidentifikasi setiap kategori penyebab kerawanan pangan tersebut dengan indikator-indikator yang lebih rinci seperti terlihat pada Tabel 1.

Selanjutnya, bagian ini akan membahas perihal variabel konsekuen akibat munculnya masalah ketahanan pangan dalam hal ini kerawanan pangan. Dalam artikelnya, Rose (1999) mengemukakan pendapatnya bahwa konsekuensi masalah ketahanan pangan dalam hal ini munculnya kerawanan pangan (*food insecurity*) akan menimbulkan perubahan dalam asupan gizi (*nutrient intake*) dan pola makan (*diet/dietary*) individu. Munculnya kerawanan pangan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah asupan gizi yang dikonsumsi. Pola makan individu juga akan terpengaruh ketika terjadi masalah kerawanan pangan. Secara umum, masalah kerawanan pangan dapat mengakibatkan terganggunya asupan gizi dan juga terganggunya pola makan individu.

Lee dan Frongillo (2001) mengemukakan bahwa masalah ketahanan pangan seperti kerawanan pangan dapat menimbulkan *nutritional and health consequences* seperti *lower nutrient intake, skinfold thickness, self-reported health status and higher nutritional risk, decreased dietary intake, decreased household food supply psychosocial dysfunction, increased body weight, health problems, decreased quality of life, dan sociofamilial perturbations*. Lee dan Frongillo (2001) juga mengidentifikasi bahwa *food insecurity* dapat mempengaruhi *health and quality of life* secara langsung atau tidak langsung melalui *nutritional status* yang pada akhirnya juga mempengaruhi *physical, emotional and economic burdens, their formal or informal caregivers, dan the health care system*.

Tabel 1
Drivers of Food Insecurity

Demographic	Population pressure
	In- and out-migration
	Low availability of labour
	Age distribution
	Gender distribution
	Population pressure
Economic	Inflation
	Increase in food prices
	Lack of access to financial capital and credit
	Unavailability of employment
	Poverty
	Poor market access
	Sale of assets
Socio-political	Social and political unrest or war
	Low availability of food imports and food aid
	Formal and informal government policies
	Absence of property rights and/or land access
	Illegal residency status
	Poor social networks
	Lack of education
	Lack of alternative livelihood opportunities
Scientific & technological	Insufficient agricultural expertise
	Poor distribution networks and infrastructure
Cultural and religious	Gender biases
	Age biases
	Traditions & cultural preferences
Physical, biological & chemical	Poor human health
	Prevalence of HIV/ AIDS
	Climate & environmental stressors
	Poor agricultural potential of land
	Insufficient agricultural inputs
	Pests and diseases of crops and livestock
	Other livestock losses
Low regional availability of cereal	

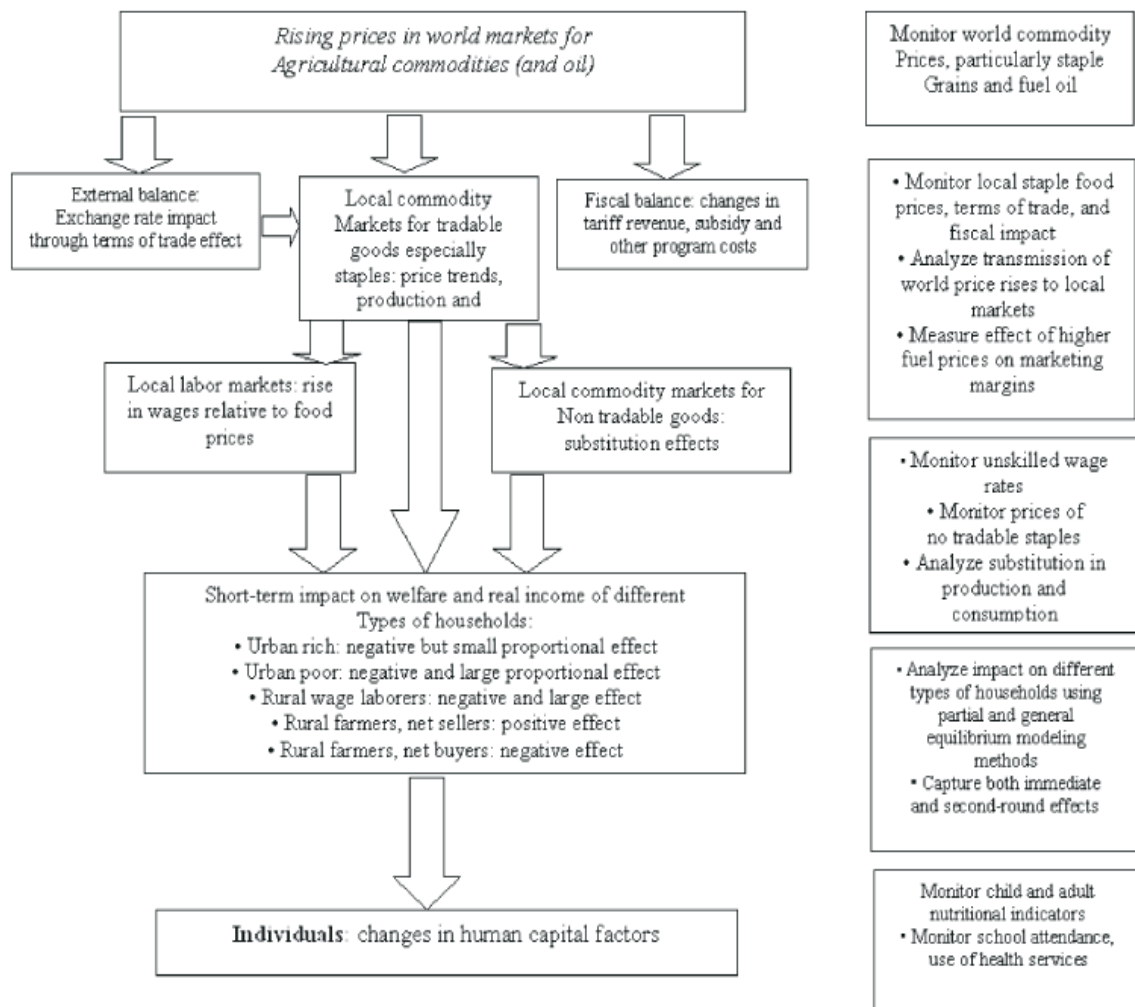
(Sumber: Misselhorn, 2005)

Campbell (1991) mengungkapkan bahwa kerawanan pangan (*food insecurity*) berpotensi menimbulkan konsekuensi kelaparan (*hunger*), kekurangan gizi (*malnutrition*), dan efek negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup individu. Hal itu sejalan dengan pendapat Misselhorn (2005) yang juga mengemukakan

bahwa konsekuensi munculnya masalah ketahanan pangan adalah kelaparan (*hunger*) dan kekurangan gizi (*malnutrition*). Kelaparan bisa terjadi ketika dalam waktu tertentu tidak mendapatkan asupan makanan sama sekali atau relatif sedikit sekali. Kekurangan gizi dalam kondisi yang buruk bisa juga terjadi karena tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Dalam kondisi yang tidak parah, kekurangan gizi bisa terjadi ketika asupan makanan belum mencukupi kualitasnya dari sisi pemenuhan gizi minimal. Kedua kondisi baik kelaparan maupun kekurangan gizi akan mengakibatkan efek negatif selanjutnya bagi tubuh manusia. Efek negatif ini berhubungan dengan buruknya kesehatan tubuh dan juga kurang baiknya kualitas hidup yang dijalani oleh korbannya.

Menurut Jyoti et al (2005), konsekuensi munculnya *food insecurity* adalah buruknya hasil perkembangan dan kesehatan individu (*adverse health and developmental outcomes*). Buruknya hasil perkembangan dan kesehatan individu dapat ditunjukkan oleh sejumlah indikator. Beberapa indikator antara lain gangguan berat badan, buruknya prestasi akademik, kesulitan bersosialisasi, meningkatnya kecemasan-kecemasan pribadi, dan gangguan-gangguan lainnya. Jyoti et al (2005) mencoba mengidentifikasi sejumlah efek negatif akibat masalah pangan seperti *poorer mathematics scores, grade repetition, absenteeism, tardiness, visits to a psychologist, anxiety, aggression, psychosocial dysfunction, difficulty getting along depressive disorders, suicide symptoms, academic performance, social skills, dan weight*.

Selanjutnya dalam kerangka kerja yang lebih kompleks, Ilaboya et.al. (2012) menggambarkan model yang bersumber dari Deperatemen Pertanian Amerika Serikat tentang efek kerawanan pangan yang dipicu oleh kenaikan harga pangan dunia. Model yang dimaksud seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah. Awalnya kenaikan harga pangan dunia akan mengakibatkan perkembangan negatif kondisi ekonomi makro secara suatu perekonomian secara nasional, kemudian efeknya menular memberi efek negatif kepada kondisi keuangan rumahtangga termasuk rumahtangga petani, hingga pada akhirnya memberi efek negatif terhadap kualitas sumber daya manusia setiap individu.



(Sumber: Ilaboya, et.al., 2012)

Gambar 1. Kerangka Konseptual Dampak Krisis Pangan

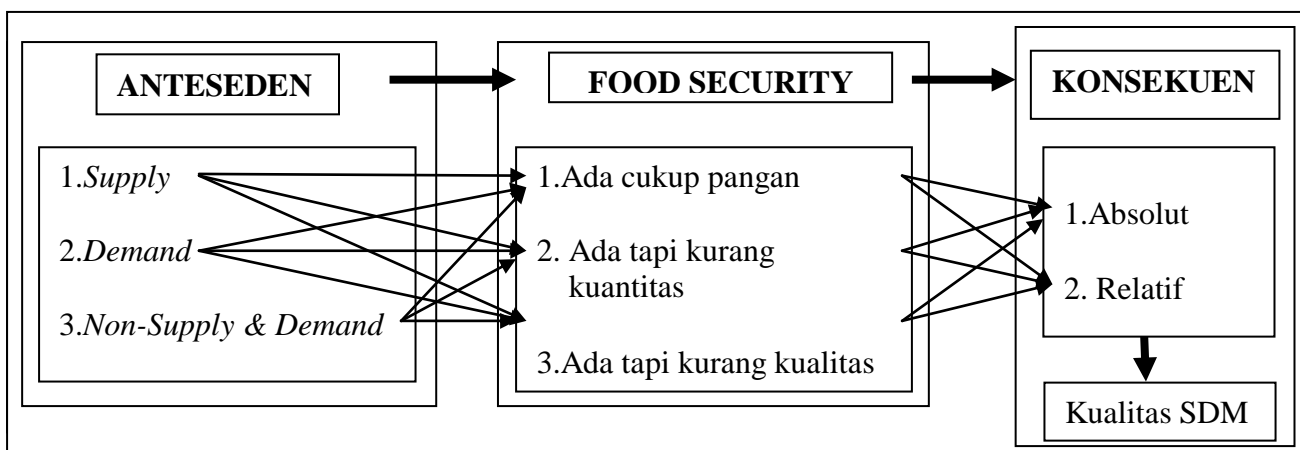
Selanjutnya, masalah rawan pangan seperti munculnya gizi buruk (*malnutrition*) dapat memberi konsekuensi berlanjut dalam rentang siklus hidup manusia (ACC/SCN/IFPRI, 1999). Nutrisi yang buruk sering dimulai di dalam rahim dan meluas, terutama untuk anak perempuan dan wanita, baik pada masa remaja dan dewasa. Kekurangan gizi yang terjadi selama masa kanak-kanak, remaja, dan kehamilan memiliki dampak negatif aditif pada berat lahir bayi. Bayi dengan berat lahir rendah bisa mengalami gangguan pertumbuhan dan berada pada risiko kematian yang jauh lebih tinggi pada masa masa kanak-kanak nanti. Jika mereka bertahan, mereka tidak mungkin secara signifikan mengejar pertumbuhan yang hilang dan cenderung mengalami berbagai defisit perkembangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode review literatur untuk membangun model ketahanan pangan. Metode ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penentuan topik tentang ketahanan pangan dan selanjutnya penelusuran sumber pustaka terkait di internet. Tahap kedua adalah memilih sumber pustaka relevan sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahap ketiga adalah analisis sumber pustaka terpilih untuk mengidentifikasi variabel anteseden dan variabel konsekuen yang terkait dengan ketahanan pangan. Tahap keempat adalah membuat model teoretik ketahanan pangan secara lengkap dengan menentukan variabel-variabel anteseden dan variabel konsekuen, serta menjelaskan arah hubungan kausalitasnya.

Hasil dan Pembahasan

Sejumlah literatur tentang ketahanan pangan menjadi sumber kajian penting dalam membuat model teoretik ketahanan pangan. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis penulis, model teoretis ketahanan pangan yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 2. Pada Gambar 2 terlihat bahwa faktor *supply*, *demand*, dan *non-supply & demand*, merupakan anteseden munculnya ketahanan pangan (*food security*). Ketahanan pangan kemudian mengakibatkan munculnya konsekuen yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).



Gambar 2
Model Teoretik Ketahanan Pangan

Variabel Anteseden

Model ketahanan pangan seperti ditunjukkan di atas memasukkan variabel anteseden dari sisi penawaran/produksi (*supply*), permintaan (*demand*), dan sisi lain yang bisa dikatakan sebagai faktor-faktor lain yang ragu-ragu/sulit secara langsung ditentukan apakah masuk sisi *demand* atau *supply*. Sisi *supply* antara lain kegagalan panen, rendahnya produktivitas tanaman pangan, sempitnya lahan tanaman pangan, rendahnya kualitas manajemen pengelolaan tanaman pangan, rendahnya produktivitas peralatan & perlengkapan pertanian, kurangnya ketersediaan air untuk tanaman pangan, dan masalah lainnya. Sisi *demand* dapat disebutkan misalnya kurangnya pendapatan, selera terhadap makanan, akses untuk mendapat bahan pangan, informasi sumber-sumber bahan pangan, dan lain-lainnya. Kemudian yang terkait dengan sisi *non-demand & supply* lebih mengarah kepada faktor-faktor yang dianggap sebagai faktor-faktor yang secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Faktor-faktor yang dimaksud ini dapat disebutkan seperti kesalahan kebijakan pemerintah, persaingan usaha yang tidak sehat, hambatan perdagangan internasional, kekacauan politik dan keamanan, dan faktor-faktor lain yang sejenis.

Food Security

Model ketahanan pangan memposisikan variabel ketahanan pangan di antara variabel anteseden dan variabel konsekuen seperti tampak dalam gambar di atas. Variabel ketahanan pangan dalam model ini berisi tiga kemungkinan kondisi. Kondisi pertama adalah ketiadaan masalah ketahanan pangan. Kondisi pertama ini menggambarkan bahwa ada cukup pangan bagi individu atau masyarakat. Kondisi kedua adalah adanya masalah ketahanan pangan berupa kurangnya kuantitas bahan pangan yang dibutuhkan individu atau masyarakat. Kondisi ketiga adalah adanya masalah ketahanan pangan yang bersumber dari kurangnya kualitas bahan pangan yang dibutuhkan individu atau masyarakat. Berdasarkan arah panah dalam gambar model ketahanan pangan terlihat bahwa masing-masing kondisi tersebut bisa disebabkan oleh variabel anteseden yang bisa berasal dari sisi penawaran/produksi (*supply*), permintaan (*demand*), dan sisi lain yang bisa dikatakan sebagai faktor-faktor lain yang ragu-ragu/sulit secara langsung ditentukan apakah masuk sisi *demand* atau *supply*.

Variabel Konsekuen

Komponen berikutnya dalam model ketahanan pangan adalah variabel konsekuen. Variabel konsekuen ini mengarah kepada efek atau akibat dari munculnya masalah ketahanan pangan. Dalam gambar model ketahanan pangan, hal ini ditunjukkan oleh garis panah yang mengarah dari variabel *food security* ke variabel anteseden. Variabel anteseden dalam model tersebut dapat bersifat absolut atau relatif. Secara absolut, efek *food insecurity* adalah kematian karena masalah pangan. Secara relatif, efek *food insecurity* adalah sakit atau gangguan fungsi tubuh dengan tingkat yang bervariasi. Efeknya secara absolut maupun relatif pada akhirnya berhubungan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Konsekuensi masalah ketahanan pangan dapat juga dibagi dalam beragam bentuk yang merepresentasikan kondisi awal hingga kondisi terburuk. Bentuk-bentuk konsekuensi masalah ketahanan pangan atau kerawanan pangan telah coba dieksplorasi oleh OECD/FAO/UNCDF (2016). Bentuk-bentuk konsekuensi kerawanan pangan yang terutama banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah. Secara garis besar bentuk-bentuk konsekuensi kerawanan pangan dapat berupa *malnutrition*, *minor hunger*, *severe hunger*, dan *famine*. Secara berurutan bentuk-bentuk konsekuensi kerawanan pangan tersebut menggambarkan dari bentuk kondisi ringan hingga bentuk kondisi yang paling berat konsekuensinya. Tabel 2 juga coba menerangkan bentuk konsekuensi kerawanan pangan berdasarkan kemungkinan daerah-daerah yang mengalaminya. Bentuk konsekuensi kerawanan pangan tertentu berbeda-beda karakteristiknya jika didasarkan pada pembagian jenis daerah. Bentuk konsekuensi kerawanan pangan seperti *malnutrition*, misalnya, mungkin sangat umum sudah terjadi di daerah-daerah yang jauh terpelosok, tetapi mungkin jarang terjadi di daerah-daerah metropolitan.

Tabel 2. *Forms of food insecurity in a low-income developing country*

Forms of food insecurity	Type of region		
	Metropolitan	Adjacent	Remote
Malnutrition	Common among those with lower incomes, whether due to financial constraints, limited choices or bad nutritional choices	Very common – diet can be limited in quality and quantity due to high reliance on locally produced food	Very common – diet can be limited in quality and quantity due to high reliance on locally produced food
Minor hunger	Common among the very poorest – low-income	Common among the very poorest – low-income Farm families of limited resources are regularly exposed	Common among the very poorest – low-income Farm families of limited resources are regularly exposed
Severe hunger	May exist on a seasonal basis or in a period of low income	May exist on a seasonal basis or during periods of low income	May exist on a seasonal basis or during periods of low income Hunger can be exacerbated by weak market connections that limit food imports
Famine	Extremely rare	Rare – mainly due to civil disruption	Less rare, but not common – due to civil disruption or natural disaster that blocks imports

Note: The forms of food insecurity described in the table are qualitative descriptions based on the literature, not statistical ones.

(Sumber: OECD/FAO/UNCDF, 2016)

Penutup

Ketahanan pangan merupakan variabel yang dependen karena keberadaannya dipengaruhi oleh variabel anteseden. Variabel ketahanan pangan juga memberi pengaruh terhadap munculnya variabel lain, yakni variabel konsekuen sebagai efek atau akibat kondisi tertentu perkembangan ketahanan pangan. Dengan menggunakan metode review literature, artikel ini berupaya membangun model ketahanan pangan yang mengidentifikasi variabel anteseden, variabel konsekuen, dan arah hubungan yang terjadi antar-variabel di dalam model yang dibangun. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa model ketahanan pangan yang dibangun memiliki variabel anteseden dari sisi *supply*, *demand*, dan *non-supply & demand*. Model yang dibangun juga mengidentifikasi variabel konsekuennya, yakni konsekuensi absolut dan relatif dan efek lanjutannya berupa memburuknya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan model ketahanan pangan tersebut, penanganan permasalahan ketahanan pangan hendaknya dilakukan secara integratif dan komprehensif mencakup upaya-upaya mengatasi dari sisi anteseden maupun konsekuennya. Hal itu penting dilakukan agar

kebijakan ketahanan pangan bisa lebih efektif mengatasi kerawanan pangan dan akibat-akibat negatif yang ditimbulkannya.

Daftar Pustaka

- ACC/SCN/IFPRI (1999). *Fourth Report on The World Nutrition Situation: Nutrition throughout the Life Cycle*. Geneva, New York.
- Campbell, C.C., (1991), “Food insecurity: a nutritional outcome or a predictor variable?”, *The Journal of Nutrition* [01 Mar 1991, 121(3).
- Ilaboya, I.R., Atikpo, E., Omofuma, F.E, Asekhome, F.F., dan Umukoro, L. (2012)“Causes, Effects and Way Forward to Food Insecurity”, *Iranica Journal of Energy & Environment* 3 (2): 180-188, 2012, ISSN 2079-2115, DOI: 10.5829/idosi.ijee.2012.03.02.1673
- Jyoti, D.F., Frongillo, E.A., and Jones, S.J. (2005), “Food Insecurity Affects School Children’s Academic Performance, Weight Gain, and Social Skills”, *The Journal of Nutrition*.
- Lee, J.S., dan Frongillo, E.A.Jr. (2001), “Nutritional and Health Consequences Are Associated with Food Insecurity among U.S. Elderly Persons”, *The Journal of Nutrition*.
- Misselhorn, A.A. (2005), “What drives food insecurity in southern Africa? a meta-analysis of household economy studies”, *Global Environmental Change* 15 (2005) 33–43.
- OECD/FAO/UNCDF (2016), *Adopting a Territorial Approach to Food Security and Nutrition Policy*, OECD Publishing, Paris.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264257108-en>
- Rose, D. (1999), “Economic Determinants and Dietary Consequences of Food Insecurity in the United States”, *The Journal of Nutrition*.

MODEL TEORETIK DIMENSI KETAHANAN PANGAN

Florentinus Nugro Hardianto

Surel: flnugroho@gmail.com
Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

ABSTRAK

Konsep ketahanan pangan memiliki definisi beragam dalam berbagai literatur. Menurut undang-undang seperti misalnya didefinisikan bahwa Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Satu contoh definisi ketahanan pangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan merupakan konsep yang unidimensi. Hal tersebut juga dijumpai dalam definisi-definisi lain dari sumber yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan lebih komprehensif perihal dimensi-dimensi konsep ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembahasan dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan bantuan studi literatur. Hasil identifikasi terhadap sejumlah literatur menghasilkan pemahaman bahwa dalam perkembangannya konsep ketahanan pangan merupakan konsep yang semakin multidimensi sesuai perkembangan kehidupan masyarakat. Konsep ketahanan pangan tidak lagi terkait dengan perihal dimensi pangan sebagai dimensi yang berdiri sendiri, namun juga terkait erat dengan dimensi-dimensi non-pangan yang berhubungan dengannya.

Kata kunci: ketahanan pangan, dimensi ketahanan pangan, deskriptif-analitik, multidimensi

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan suatu konsep abstrak yang mengarah kepada hubungan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Sifat konsep yang abstrak ini adalah terbukanya interpretasi yang muncul dari berbagai pihak. Beragam definisi ketahanan pangan menunjukkan adanya keterbukaan interpretasi tersebut. Menurut undang-undang, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU 18 th 2012). Definisi lain menyebutkan bahwa ketahanan pangan ada saat semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman

dan bergizi sesuai kebutuhan dan pilihannya untuk kehidupan yang aktif dan sehat (*World Food Summit* (1996) dalam FAO, 2006). Interpretasi lain menyatakan bahwa ketahanan pangan-akses oleh semua orang setiap saat untuk makanan yang cukup untuk hidup sehat dan aktif - adalah salah satu dari beberapa kondisi yang diperlukan agar suatu populasi menjadi sehat dan bergizi baik (Coleman-Jensen, et.al., 2017).

Seandainya diperpanjang lagi deretan definisi ketahanan pangan, definisi-definisi yang muncul akan semakin menegaskan keterbukaan interpretasi terhadap abstraknya konsep ketahanan pangan. Gross, et.al. (2000) menyatakan bahwa konsep ketahanan pangan (*food security*) merupakan konsep yang telah berkembang/berevolusi dari waktu ke waktu. Menurut hasil studinya, IFPRI (1999) telah mencantumkan sekitar 200 definisi dan 450 indikator ketahanan pangan; Maxwell dan Frankenberger (1992) telah mengidentifikasi 194 studi berbeda mengenai konsep dan definisi ketahanan pangan dan 172 studi tentang indikatornya; dan Clay (1997) memperbaruinya dengan memberi tambahan 72 referensi terkait konsep ketahanan pangan. Keterbukaan interpretasi demikian mengesankan tidak ada ujung-pangkalnya yang dikhawatirkan justru berpotensi menjauhkan diri dari substansi yang diharapkan muncul dari konsep ketahanan pangan. Sehubungan dengan itu, artikel ini akan membahas model teoretik dimensi ketahanan pangan sebagai upaya memperjelas substansi inti dari konsep ketahanan pangan. Harapannya, artikel ini dapat memberi pemahaman lebih jelas tentang konsep ketahanan pangan melalui dimensi-dimensi yang membentuknya.

Kajian Pustaka

Suatu konsep ada yang cenderung konkrit dan ada juga yang cenderung abstrak. Konsep yang konkrit seperti misalnya konsep tentang beras, gula, garam, minyak goreng, dan telur adalah contoh konsep konkrit yang mudah dilihat, disentuh, atau diukur sehingga cepat dipahami. Konsep yang abstrak akan relatif sulit untuk dibayangkan seperti apa konkritnya karena sulit dilihat, dikenali, atau disentuh pancaindera. Konsep abstrak juga sulit dalam pengukurannya. Semakin abstrak suatu konsep, semakin sulit untuk diukur sehingga semakin sulit pula untuk dipahami. Sebaliknya semakin konkrit suatu konsep, semakin mudah untuk diukur sehingga semakin mudah juga untuk segera dipahami.

Secara hierarki, konsep merupakan himpunan dari partikular-partikular yang disebut dimensi dan konsep yang berbeda sangat mungkin mempunyai jumlah dimensi yang berbeda pula (Mustafa, 2009). Konsep yang abstrak tentu akan lebih mudah diukur dengan mengidentifikasi terlebih dahulu dimensi-dimensi yang membentuknya. Dimensi-dimensi itu merupakan substansi penting dalam suatu konsep. Keberhasilan mengidentifikasi dimensi-dimensi suatu konsep pada akhirnya dapat memperjelas pemahaman suatu konsep. Karena itu, suatu hal yang penting kiranya mengetahui lebih jelas apa saja dimensi-dimensi suatu konsep termasuk konsep ketahanan pangan.

Konsep ketahanan pangan merupakan salah satu konsep yang abstrak sehingga tidak mudah untuk cepat dimengerti. Upaya memahaminya adalah dengan mencoba mengidentifikasi dimensi-dimensi pembentuknya. Artikel ini bertujuan untuk mencoba mengidentifikasi dimensi-dimensi dalam konsep ketahanan pangan. Hasil identifikasi nantinya akan dibuat dalam bentuk suatu model teoretik ketahanan pangan.

Kajian Pustaka

Beragam dimensi dari konsep ketahanan pangan telah coba dikemukakan sejumlah pihak. Masing-masing pihak mencoba mengupasnya dari sudut pandang masing-masing sesuai dengan interpretasinya tentang konsep ketahanan pangan. *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sangat terkait dengan masalah pangan dunia telah mempublikasikan perihal dimensi ketahanan pangan (*food security*). Tabel 1 merupakan gambar dimensi ketahanan pangan yang terdiri dari empat dimensi seperti dipublikasikan oleh FAO. Empat dimensi yang dimaksud adalah dimensi *availability*, dimensi *access*, dimensi *utilization*, dan dimensi *stability*. Dimensi *availability* berkaitan dengan ketersediaan pangan yang cukup. Dimensi *access* berhubungan dengan kemudahan akses mendapatkan pangan yang tersedia. Dimensi *utilization* berhubungan dengan tingkat kandungan gizi di dalam makanan yang tersedia. Dimensi *stability* berkaitan dengan keberlanjutan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Tabel 1. Dimensi Ketahanan Pangan
 Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO)

Physical AVAILABILITY of food	Food availability addresses the “supply side” of food security and is determined by the level of food production, stock levels and net trade.
Economic and physical ACCESS to food	An adequate supply of food at the national or international level does not in itself guarantee household level food security. Concerns about insufficient food access have resulted in a greater policy focus on incomes, expenditure, markets and prices in achieving food security objectives.
Food UTILIZATION	Utilization is commonly understood as the way the body makes the most of various nutrients in the food. Sufficient energy and nutrient intake by individuals is the result of good care and feeding practices, food preparation, diversity of the diet and intra-household distribution of food. Combined with good biological utilization of food consumed, this determines the <i>nutritional status</i> of individuals.
STABILITY of the other three dimensions over time	Even if your food intake is adequate today, you are still considered to be food insecure if you have inadequate access to food on a periodic basis, risking a deterioration of your nutritional status. Adverse weather conditions, political instability, or economic factors (unemployment, rising food prices) may have an impact on your food security status.

(Sumber: *Food and Agriculture Organization* (FAO), 2008)

Selanjutnya dari perspektif lain, dimensi ketahanan pangan mencakup *categorical dimension*, *socio-organizational dimension*, *managerial dimension*, dan *situation-related dimension* (Gross, et.al., 2000). *Categorical dimension* terdiri dari dimensi *availability*, *accessibility*, *utilization*, *nutritional status*, dan dimensi *stability*. *Socio-organizational dimension* mencakup dimensi level makro (*world, region, nation*); dimensi level meso (*community, province/city, district/town, village*); dan dimensi micro (*household/family, individual*). *Managerial dimension* meliputi aspek-aspek siklus manajemen proyek seperti *assessment, analysis, planning, intervention, monitoring & evaluation (Reassessment)*. *Situation-related dimension* mencakup dimensi situasi ketahanan pangan apakah relatif emergensi atau relatif aman sehingga program-program mengatasi masalah pangan sesuai dengan tingkat ketahanan pangan yang terjadi.

Pendapat lain mengemukakan bahwa ketahanan pangan juga mengandung dimensi perilaku (*behavioral dimension*) seperti diungkapkan oleh Timmer (2012). Beliau berpendapat bahwa landasan perilaku seperti perilaku individu atau rumah tangga dalam menghadapi krisis pangan menjadi perhatian penting dalam dimensi ketahanan pangan.

Perilaku individu seperti lebih memilih stabilitas harga pangan itu lebih diinginkan daripada gejolak harga pangan merupakan contoh dimensi perilaku pangan yang perlu menjadi perhatian.

Berikutnya Timmer (2004) menjelaskan *micro dimension* dan *macro dimension* dalam konsep ketahanan pangan. *Micro dimension* terkait dengan tingkat ketahanan pangan secara individu atau rumah tangga. *Macro dimension* terkait dengan pengelolaan ketahanan pangan secara lebih luas yang mencakup nasional, regional, atau kelompok masyarakat.

Coates, et.al. (2003) memperkenalkan lima kriteria utama yang merefleksikan pemikiran tentang konsep *food insecurity*. Kelima kriteria yang dimaksud adalah kuantitas makanan yang cukup dikonsumsi (*sufficient quantity of food consumed*), kualitas yang memadai untuk makanan yang dikonsumsi (*sufficient quality of food*), keamanan atau prediktabilitas ketersediaan bahan pangan (*security or predictability*), akseptabilitas dalam pemerolehan bahan pangan (*acceptability in acquisition*), dan ketahanan pangan bagi semua orang (*food security for all individuals*).

Selanjutnya sejalan dengan perubahan pemahaman tentang konsep ketahanan pangan, Opara (2013) mempertimbangkan pentingnya pemahaman *the geospatial and temporal dimensions of food security*. Seiring perjalanan waktu, menurutnya, pemahaman masyarakat tentang ketahanan pangan semakin baik mulai dari berbagai faktor yang mempengaruhinya hingga mekanisme penanganannya. Salah satu contoh perkembangan yang dimaksud adalah pemahaman bahwa dimensi geospasial dan temporal menjadi salah satu dimensi penting terkait ketahanan pangan. Dimensi tersebut memberi pemahaman baru bahwa masalah ketahanan pangan itu adalah masalah yang bisa terkait individu (*individual*), rumah tangga (*household*), masyarakat/komunitas (*community*), negara (*country*), dan internasional (*global*).

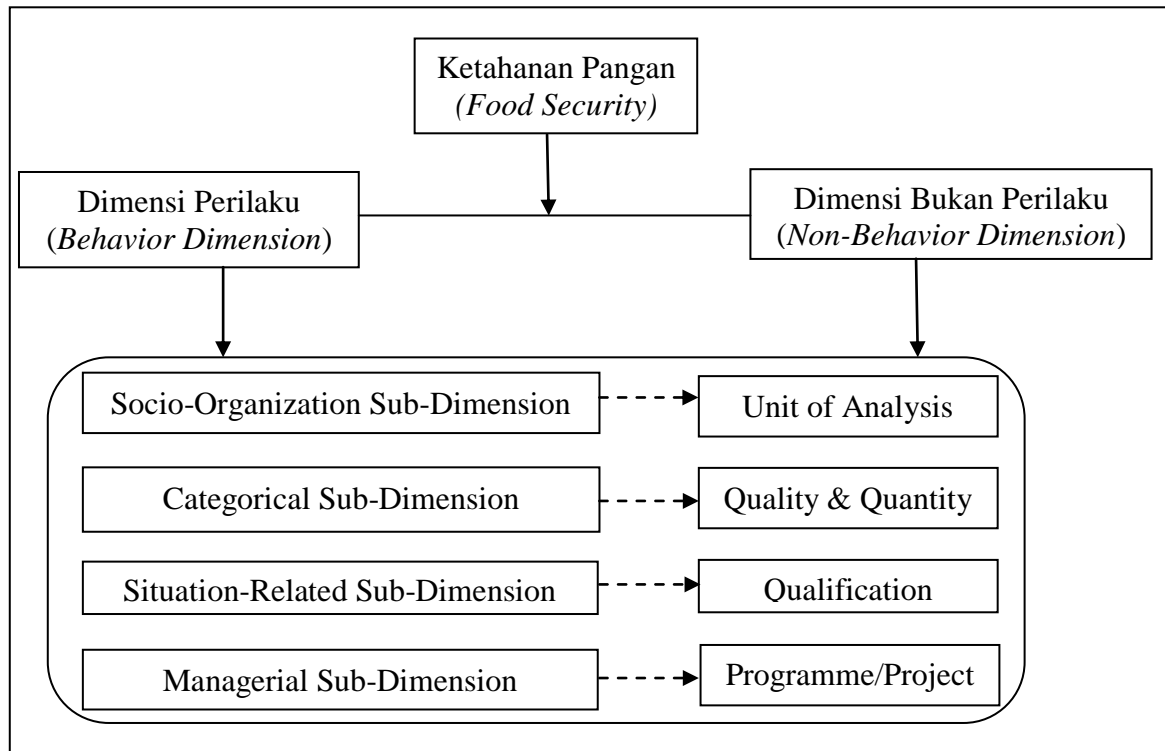
Berdasarkan sejumlah ulasan tentang dimensi-dimensi konsep ketahanan pangan, jelas bahwa konsep ketahanan pangan bukanlah konsep yang unidimensional. Konsep ketahanan pangan sebagai suatu konsep yang abstrak menjadikannya relatif sulit untuk dipahami hanya dengan satu dimensi. Konsep ketahanan pangan lebih cenderung bersifat multidimensional. Bahkan Bertelli dan Macours (2014) telah merumuskan ukuran-ukuran bersifat *multiple dimensions* dalam mengukur konsep ketahanan pangan. Kumpulan dimensi akan lebih jelas menggambarkan konsep ketahanan pangan dengan lebih lengkap.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengarah kepada upaya mengidentifikasi dimensi-dimensi dalam konsep ketahanan pangan. Proses penelitiannya melalui tahap survei literatur terkait, analisa literatur relevan, identifikasi dimensi konsep ketahanan pangan, dan pemodelan dimensi konsep ketahanan pangan. Survei literatur dilakukan dengan cara mencari publikasi artikel/laporan yang sesuai kebutuhan dan yang tersedia secara *online*. Setelah terpilih sejumlah artikel yang relevan, proses selanjutnya adalah menganalisanya terutama terkait konsep ketahanan pangan. Kemudian, proses berikutnya mengidentifikasi dimensi-dimensi konsep ketahanan pangan yang dibahas dalam artikel terkait. Tahap terakhir melakukan pemodelan dimensi konsep ketahanan pangan berdasarkan tinjauan teoretis artikel relevan dan analisa penulis. Proses akhir penelitian menghasilkan model teoretik dimensi konsep ketahanan pangan beserta penjelasannya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian sejumlah literatur, penulis membuat suatu model teoretik dimensi ketahanan pangan. Gambar 1 di bawah merupakan bentuk model teoretik dimensi ketahanan pangan yang dibangun oleh penulis. Secara garis besar, konsep ketahanan pangan memiliki dua dimensi besar, yakni dimensi perilaku dan dimensi non-perilaku. Masing-masing dimensi tersebut berhubungan dengan sub-sub dimensi. Misalnya, dimensi perilaku bisa berkaitan dengan sub-dimensi *socio-organization*, atau sub-sub dimensi lainnya. Demikian pula dimensi non-perilaku bisa berhubungan dengan sub-dimensi *socio-organization*, atau sub-sub dimensi lainnya. Masing-masing dimensi dan subdimensi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.



Gambar 1 Model Teoretik Dimensi Ketahanan Pangan

Dimensi Perilaku dan Dimensi Non-Perilaku

Dimensi perilaku dan non-perilaku merupakan dimensi utama konsep ketahanan pangan. Dimensi perilaku mengarah kepada aspek-aspek perilaku yang berhubungan dengan sub-sub dimensi. Aspek-aspek perilaku ini misalnya perihal preferensi, selera, keinginan (wants), kebutuhan (needs), pengambilan keputusan, kesenangan, kepuasan, dan sejenisnya yang merupakan representasi perilaku manusiawi para pihak yang terkait. Dimensi perilaku ini mengadopsi ide dari Timmer (2012). Dimensi non-perilaku berkaitan dengan aspek-aspek non-perilaku. Aspek-aspek non-perilaku misalnya prosedur teknis, karakteristik bahan pangan, kualitas pangan, kuantitas pangan, kandungan gizi, penyakit, sakit, dan sejenisnya yang merepresentasikan bukan perilaku manusiawi.

Sub-Sub Dimensi

Sub-sub dimensi merupakan turunan dari dimensi. Ada empat sub-dimensi yang ada dalam model. Empat sub-dimensi ini menggunakan ide dimensi dari (Gross, et.al., 2000). Keempat sub-dimensi tersebut adalah *categorical sub-dimension*, *socio-organizational sub-dimension*, *managerial sub-dimension*, dan *situation-related sub-dimension*.

Penjelasan masing-masing sub-dimensi dapat dicermati seperti berikut ini. *Categorical sub-dimension* mencakup komponen *availability*, *accessibility*, *utilization*, *nutritional status*, dan *stability*. Sub-dimensi ini mengarah kepada aspek kualitas dan kuantitas ketahanan pangan. *Socio-organizational sub-dimension* mencakup dimensi level makro (*world, region, nation*); dimensi level meso (*community, province/city, district/town, village*); dan dimensi micro (*household/family, individual*) yang kesemuanya mengarah kepada aspek unit analisis. *Managerial sub-dimension* meliputi aspek-aspek siklus manajemen proyek seperti *assessment, analysis, planning, intervention, monitoring & evaluation (Reassessment)* yang merupakan aspek program atau proyek penanganan masalah ketahanan pangan. *Situation-related sub-dimension* mencakup dimensi situasi ketahanan pangan apakah relatif emergensi atau relatif aman sehingga program-program mengatasi masalah pangan sesuai dengan tingkat ketahanan pangan yang terjadi. *Situation-related sub-dimension* ini mengarah kepada aspek kualifikasi tingkat ketahanan pangan.

Penutup

Hasil identifikasi terhadap sejumlah literatur menghasilkan pemahaman bahwa dalam perkembangannya konsep ketahanan pangan merupakan konsep yang semakin multidimensi sesuai perkembangan kehidupan masyarakat. Konsep ketahanan pangan tidak lagi terkait dengan perihai dimensi pangan sebagai dimensi yang berdiri sendiri, namun juga terkait erat dengan dimensi-dimensi non-pangan yang berhubungan dengannya.

Model teoretik dimensi ketahanan pangan dibangun atas dasar dua dimensi utama, yakni dimensi perilaku dan dimensi non-perilaku. Masing-masing dimensi memiliki hubungan dengan empat sub-dimensi, yakni *categorical sub-dimension*, *socio-organizational sub-dimension*, *managerial sub-dimension*, dan *situation-related sub-dimension*. Model teoretik dimensi ketahanan pangan ini diharapkan dapat memberi informasi baru dalam mengidentifikasi dimensi ketahanan pangan. Pada akhirnya, model teoretik dimensi

ketahanan pangan diharapkan dapat memberi pemahaman lebih baik dalam membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan.

Daftar Pustaka

- Bertelli, Olivia, dan Macours, Karen (2014), “Food Security and Agriculture in Developing Countries: Measurement and hypotheses for impact evaluations”, *FOODSECURE Working paper*, No. 21, June 2014.
- Coates, J., Webb, P., and Houser, R. 2003. Measuring food insecurity: going beyond indicators of income and anthropometry. Technical report, Food and nutritional technical assistance project, Academy for educational development.
- Coleman-Jensen, Alisha, Rabbitt, M.P., Gregory, C.A., dan Singh A. (2017), “Household Food Security in the United States in 2016”, United States Department of Agriculture, *Economic Research Service, Economic Research Report Number 237* September 2017.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2008), “An Introduction to the Basic Concepts of Food Security”, *Food Security Information for Action, Practical Guides*, Published by the EC - FAO Food Security Programme, www.foodsec.org/docs/concepts_guide.pdf.
- FAO, IFAD and WFP. (2013). *The State of Food Insecurity in the World 2013: The multiple dimensions of food security*. Rome, FAO.
- FAO (2006), “Food Security”, *Policy Brief, FAO’s Agriculture and Development Economics Division (ESA) with support from the FAO Netherlands Partnership Programme (FNPP) and the EC-FAO Food Security Programme*, June 2006, Issue 2.
- Gross, Rainer, Schoeneberger, H., Pfeifer, H., dan Preuss, H.A. (2000), “The Four Dimensions of Food and Nutrition Security: Definitions and Concepts”, Version April 2000.
- Mustafa, Zainal (2009), *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Opara, U.L. (2013), “Perspective: The evolving dimensions and perspectives on food security – what are the implications for postharvest technology research, policy and practice?”, *Int. J. Postharvest Technology and Innovation*, Vol. 3, No. 3, 2013.
- Timmer, C.P. (2004), “Food Security and Economic Growth: An Asian Perspective”, Working Paper Number 51 December 2004. www.google.com.
- Timmer, C.P. (2012), “Behavioral dimensions of food security”, *PNAS* | July 31, 2012 | vol. 109 | no. 31 | 12315–12320, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913213107.
- Timmer, C.P. (2014), “Food Security, Market Processes, and the Role of Government Policy”, *Encyclopedia of Agriculture and Food Systems*, Volume 3, doi:10.1016/B978-0-444-52512-3.00033-4.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.18, Tahun 2012, Tentang Pangan, www.google.com.

PENDEKATAN INSTITUSIONAL TERHADAP PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN

Florentinus Nugro Hardianto

Surel: flnugroho@gmail.com
Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

ABSTRAK

Permasalahan ketahanan pangan merupakan permasalahan yang kompleks karena berkaitan dengan banyak faktor baik faktor pangan maupun faktor non-pangan. Diskusi panjang telah dilakukan untuk mencari solusi permasalahan tersebut sehingga muncullah beragam pendekatan. Berbagai upaya nyata juga telah coba dilakukan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan sejenis. Artikel ini bertujuan untuk memberi alternatif solusi mengatasi permasalahan ketahanan pangan dari pendekatan institusional. Artikel ini menggunakan metode survei literatur baik literatur teoretis maupun empiris terkini yang mengupas permasalahan ketahanan pangan. Hasil pembahasan dalam artikel ini mencoba untuk memberi pendekatan baru dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Pendekatan baru yang dimaksud adalah pendekatan institusional. Pendekatan institusional ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung bersifat non-institusional. Harapannya pendekatan institusional ini menjadi alternatif baru yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Selain itu, pendekatan institusional diharapkan juga dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan pendekatan sebelumnya. Pendekatan institusional ini tidak meniadakan pendekatan lainnya tetapi justru menjadi pelengkap pendekatan non-institusional. Sinergi kedua pendekatan diharapkan dapat lebih efektif mengatasi permasalahan ketahanan pangan.

Kata kunci: ketahanan pangan, pendekatan institusional, pendekatan non-institusional, sinergi pendekatan

Pendahuluan

Masalah ketahanan pangan masih menjadi masalah penting yang hingga kini masih belum terselesaikan secara tuntas. Perhatian khusus terutama masalah ketahanan pangan yang terjadi di negara-negara terbelakang seperti banyak negara di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan beberapa Eropa. Di Afrika, negara-negara yang masih menghadapi masalah pangan antara lain Lesotho, Somalia, Etiopia, Uganda, Republik Kongo, dan beberapa negara Afrika lainnya. Sementara di kawasan Asia, negara-negara seperti Irak, Bangladesh, India, Srilangka, Timor Leste, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Indonesia mungkin tidak

separah negara Asia lainnya, namun di beberapa tempat menjadi bermasalah dengan perihalnya pangannya akibat faktor kemarau panjang, daya beli, aksesibilitas, dan faktor lainnya. Kemudian di wilayah Amerika Latin, beberapa negara yang sempat mengalami masalah pangan antara lain Bolivia, Republik Dominika, Ekuador, Haiti, dan Nikaragua. Sementara itu, negara-negara Eropa yang juga sempat mengalami goncangan ketahanan pangannya adalah Moldova dan Chechnya.

Masalah pangan yang dihadapi negara-negara tersebut mencakup sisi kuantitas maupun kualitasnya. Ketersediaan pangan yang ada kadang tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan pangan bagi masyarakat. Di sisi lain, kualitas pangan yang tersedia kadang juga belum memenuhi kandungan gizi yang diharapkan supaya dapat terpenuhi kebutuhan gizi minimal per hari. Situasi lebih parah adalah kondisi dimana benar-benar tidak tersedia bahan pangan bagi masyarakat sehingga mengakibatkan kematian atau kekurangan gizi parah.

Permasalahan ketahanan pangan demikian merupakan permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut berhubungan erat dengan banyak faktor. Faktor-faktor ini bisa termasuk faktor pangan itu sendiri seperti sisi produksi bahan pangan oleh sektor pertanian. Di sisi lain, faktor non-pangan seperti sisi permintaan, penawaran, distribusi, dan kebijakan di bidang yang terkait dengan ketersediaan pangan juga turut andil dalam mempengaruhi perkembangan ketahanan pangan.

Berbagai pihak tentu saja telah berupaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. Pemerintah jelas telah melakukan banyak hal agar masyarakat memiliki ketahanan pangan yang tinggi. Lembaga swadaya masyarakat juga sudah memiliki andil besar memerangi masalah ketahanan pangan. Belum lagi kalangan akademisi yang juga tidak ketinggalan menjadi pejuang sejati mengatasi masalah ketahanan pangan. Organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah gencar memerangi masalah ketahanan pangan di berbagai belahan dunia.

Namun demikian yang menjadi pertanyaan penting adalah mengapa masalah ketahanan pangan masih muncul saja sehingga terkesan menjadi masalah yang berkelanjutan. Artikel ini akan mencoba memberi kontribusi pemikiran dalam rangka mengatasi masalah ketahanan pangan melalui pendekatan institusional. Harapannya adalah bahwa pendekatan institusional ini dapat melengkapi pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam upaya mengatasi masalah terkait ketahanan pangan.

Kajian Pustaka

Pendekatan-pendekatan dalam membahas upaya menangani masalah-masalah perihal ketahanan pangan telah banyak dikemukakan sejumlah pihak. Berbagai pihak baik secara individu maupun institusi telah mempublikasikan desain-desain pengelolaan masalah ketahanan pangan sesuai dengan buah-buah pemikirannya masing-masing. Organisasi atau institusi khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, dan *United Nations Capital Development Fund (UNCDF)* menjadi organisasi internasional utama dalam memelopori upaya-upaya mengidentifikasi, menganalisis, dan mempublikasikan, dan juga mendanai pendekatan-pendekatan dan proyek-proyek penting dalam hubungannya dengan penanganan masalah ketahanan pangan di berbagai belahan dunia terutama negara-negara yang masih mengalami masalah berat dalam hal memenuhi kebutuhan pangan bagi warga masyarakatnya.

Beragam pendekatan yang telah terpublikasi memiliki karakteristik unik yang menjadi ciri khas masing-masing. Masing-masing pendekatan tentu saja mengupas keunggulan atau kehandalannya sesuai dengan perkiraan mekanisme bekerjanya, alur pemikiran, hubungan kausalitas, dan kemungkinan efek positif yang ditimbulkannya. Beberapa pendekatan juga telah memberi contoh klaim keberhasilan pendekatannya dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di sejumlah tempat. Bahkan beberapa pihak secara eksplisit juga menyatakan bahwa pendekatannya merupakan kelanjutan atau perbaikan dari pendekatan lain yang sudah mengalami perbaikan dalam aspek-aspek tertentu.

Banyak literatur yang menjelaskan pendekatan-pendekatan penting terkait ketahanan pangan. Butuh banyak sumberdaya untuk bisa mengumpulkan, meringkas, dan melaporkan banyak pendekatan dalam mengatasi masalah ketahanan pangan tersebut. Dalam artikel ini dipaparkan beberapa pendekatan penting dari banyak pendekatan yang dapat ditemukan di sumber-sumber pustaka konvensional yang bersifat *offline* atau sumber-sumber pustaka yang bersifat *online*. Beberapa pendekatan yang dimaksud akan dijelaskan di bawah ini.

Territorial Approach

Pendekatan territorial dikemukakan oleh OECD/FAO/UNCDF (2016). Pendekatan territorial ini diyakini dapat memberi kerangka kerja yang sesuai untuk mengatasi masalah

food security yang multidimensi, multi-aktor dan multi-level, dan bahkan masalah ketidakadilan dan kesenjangan dalam negara. Pendekatan ini mempertimbangkan keragaman ruang geografis (metropolitan, pedesaan yang berdekatan, daerah pedesaan terpencil) dan kemampuan untuk bereaksi terhadap guncangan (eksternal dan internal). Pendekatan ini juga melibatkan penguatan institusi lokal dan menempatkan mereka di garis depan dalam mengatasi kerawanan pangan dan memastikan pencapaian ketahanan pangan dalam berbagai dimensi (ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas).

Pendekatan ini menyatakan bahwa ketersediaan pangan, akses, pemanfaatan dan stabilitas dapat berbeda secara signifikan di tiga jenis wilayah-daerah metropolitan, pedesaan yang berdekatan dan terpencil pedesaan. Hal ini menyadarkan pentingnya untuk menghubungkan berbagai bentuk kerawanan pangan ke jenis-jenis daerah dan untuk lebih memahami pentingnya kebijakan yang sensitif secara spasial terhadap berbagai dimensi kerawanan pangan di seluruh wilayah. *Regional diversity and territorial characteristics* merupakan faktor-faktor penting terkait ketahanan pangan.

Tabel 1 *The Territorial Approach to Food Security*

No	Aspek	Keterangan
1	Objectives	A sustainable development solution to food insecurity and malnutrition.
2	Key target sector	Various sectors of rural economies (i.e. rural tourism, manufacturing, ICT industry, etc.)
3	Main tools	Investment in development opportunities (knowledge pooling, piloting, policy complementarities between social and competitiveness agenda)
4	Key actors	All levels of government (national, regional and local), various local stakeholders (public, private, non-governmental organisations), international co-operation
5	Target geography	Recognises and capitalises on the benefits of urban-rural linkages

(Sumber: OECD/FAO/UNCDF, 2016)

Pendekatan selanjutnya adalah *food availability approach*, *income-based approach*, *basic needs approach*, *entitlement approach*, dan *sustainable livelihoods approach*. Kelima pendekatan ini disarikan dari Burchi dan De Muro (2012).

Food Availability Approach

Food availability approach berfokus pada keseimbangan antara jumlah populasi dan pangan. Untuk mempertahankan keseimbangan, tingkat pertumbuhan ketersediaan pangan seharusnya tidak lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Stok pangan, produksi pangan, dan perdagangan pangan (*food trade*) berperan penting dalam mempengaruhi ketahanan pangan. Dari sisi *demand side*, kebijakan yang dapat dilakukan adalah mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk seperti menurunkan tingkat fertilitas. Dari sisi *supply side*, kebijakan yang dapat ditempuh adalah mendorong produksi pangan seperti meningkatkan hasil produksi pertanian.

Income-Based Approach

Pendekatan ini menyatakan bahwa masalah ketahanan pangan tidak sekedar terkait sektor pangan/pertanian saja tetapi terkait dengan sektor-sektor ekonomi lain secara keseluruhan. Karena itu, analisa ketahanan pangan hendaknya diarahkan kepada analisa perekonomian nasional secara keseluruhan dengan memperhatikan indikator makro ekonomi seperti GDP. Perekonomian yang lebih kuat dengan tingkat pendapatan yang besar tentunya dapat mengimpor barang termasuk bahan pangan. Sebaliknya penduduk yang miskin karena kecilnya tingkat pendapatan mengakibatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori minimal yang mengindikasikan adanya masalah ketahanan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian tersebut menghadapi masalah ketahanan pangan.

Basic Needs Approach

Pendukung pendekatan kebutuhan dasar memandang pembangunan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk memastikan kepada semua orang kepuasan akan kebutuhan dasar mereka. Pendekatan ini memandang bahwa pembangunan itu bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prasyarat untuk kehidupan yang penuh ("*full-life*"), yang mencakup elemen material dan non-

material. Kehidupan penuh mengarah kepada terpenuhinya sejumlah kebutuhan dasar minimal seperti makanan, tempat berlindung, dan pakaian. Pendekatan ini berfokus langsung pada apakah orang makan makanan secukupnya, dan berkontribusi untuk melakukan langkah lebih lanjut dalam menggeser analisis dari tingkat makro ke tingkat mikro. Makanan dipandang sebagai prioritas (dan mungkin satu-satunya) unsur ketahanan pangan. Pangan adalah kebutuhan paling dasar masyarakat. Pendekatan ini menyatakan pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan minimal agar dapat hidup normal dengan sehat.

Entitlement Approach

Pendekatan ini mengarah kepada akses masyarakat terhadap pangan. Pendekatan ini berkonsentrasi pada hak seseorang (*person's entitlements*) terhadap himpunan komoditas termasuk pangan. Kelaparan adalah hasil kegagalan dalam memenuhi hak tersebut untuk mendapatkan cukup pangan. *Person's entitlements* ini tergantung pada dua elemen: 1) *personal endowments* (kepemilikan sumberdaya: rumah, *livestock*, tanah, atau *tangible goods*); (2) Kelompok komoditas yang dapat diakses seseorang melalui produksi dan perdagangan. Menurut pendekatan ini, informasi tentang total aset yang dimiliki individu menjadi informasi penting terkait dengan ketahanan pangan individu tersebut. Semakin rendah jumlah aset, itu berarti seseorang mungkin memiliki masalah untuk mengakses cukup pangan di masa mendatang.

Sustainable Livelihoods Approach

Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan hidup. Pendekatan ini menyatakan pentingnya kepemilikan aset (*tangible* dan *intangible*) oleh rumah tangga. Konsep inti dari pendekatan ini adalah apa yang disebut sebagai “*pentagon of assets*”, yakni kepemilikan terhadap lima aset penting dalam bentuk *natural capital*, *physical capital*, *human capital*, *financial capital*, dan *social capital*. Matapencarian yang berkelanjutan mampu untuk meningkatkan aset-aset baik sekarang maupun jangka panjang. Matapencarian yang tepat sangat diperlukan sebagai salah satu upaya menghadapi krisis yang berpotensi mengancam ketahanan pangan.

Human Development and Capability Approach

Pendekatan berikutnya dikemukakan sendiri oleh Burchi dan De Muro pada tahun 2012. Pendekatan ini mengarah kepada kemampuan (*capability*) untuk menghindari masalah ketahanan pangan seperti kekurangan gizi dan kelaparan. Pendekatan ini memasukkan tidak hanya dimensi *availability* dan aksesibilitas tapi juga dimensi *utilization* dan *stability* terkait masalah ketahanan pangan. Pendekatan ini juga memperkenalkan pentingnya peran *agency*, yakni kemampuan seseorang untuk mengejar dan merealisasikan tujuannya. *Stability* yang dimaksud tidak sekedar stabilitas harga pangan, namun lebih luas dari itu yakni mengintegrasikan konsep “*human security*”. Ketahanan pangan merupakan salah satu dari tujuh area ketahanan manusia (*human security*).

Tabel 1 *The Capability Approach to Food Security*

Steps	What is measured	Food security dimension	Informational basis	Variable
1	Food Entitlements	Access to food + Stability	Endowments: labour force, productive assets, wealth (non-productive assets, savings,..), non-tangible resources (e.g., memberships)	Employment status, type of employment, large set of assets (mainly livestock, land and house-related assets), right/legal claim to public provision of food or income transfer from the state. For the stability dimension: variation of endowments and strategies (coping strategies, adaptation)
			Exchange conditions: prices of food items, wages, and prices of other non-food goods and services	Wages from primary and secondary income generating activity, price of different food items/groups and prices of other goods and services.
			Production possibilities: skills and technology.	Professional skills
2	Basic Capabilities	Access to food and other food security-related items + Stability	Being free from hunger (meaning, following Sen, having <i>enough</i> calories for survival). This depends on another set of variables:	Quantity of food, food groups, calorie intake Sex, age. Law, rules, norms
			personal conversion factors (age, sex, metabolism,..), Institutional conversion factors , and Environmental conversion factors .	Climate, frequency of natural disasters.
			Being educated (basic education, which depends on availability and accessibility of formal and non-formal training)	School enrolments, educational achievements, literacy, participation to adult literacy courses and other non-formal education programmes.
			Being in a good health (depends among other things on health care)	Access to health services, sanitation, morbidity to main diseases, self-reported health status.
3	Capability To Be Food Secure	Access to food and other food security-related items + Stability + Utilization	Being able to take part in household decision making and community life	Participation in household decision making, participation in community life (questionnaire).
			It is given by the interaction between the capability “being free from hunger” with the capabilities “being in a good health” and “being educated”. In addition, it depends on food <i>utilization</i> and <i>cultural/social acceptability</i>	Diet quality, diet diversification, nutrition knowledge (through questionnaire focusing on micronutrients,..), hygienic practices. Testes, cultural and religious beliefs with respect to food products.

(Sumber: Burchi dan De Muro, 2012)

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian survei literatur. Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei literatur-literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan. Survei literatur dilakukan melalui internet dengan mencari artikel, paper, publikasi, atau literatur lainnya. Sejumlah literatur yang sesuai kebutuhan dikumpulkan dalam jumlah yang cukup. Setelah terkumpul literatur-literatur yang dibutuhkan, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil analisis menjadi bahan penting yang digunakan untuk membahas artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pembahasan dalam artikel ini mencoba untuk memberi pendekatan baru dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Pendekatan baru yang dimaksud adalah pendekatan institusional. Pendekatan institusional ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung bersifat non-institusional.

Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional yang dimaksud di sini mengarah kepada pendekatan ekonomi institusional/kelembagaan. Pendekatan ini memberi perhatian khusus kepada keberadaan institusi. Institusi seperti yang dikemukakan oleh North (1994) dalam Yustika (2013) adalah terkait dengan tiga komponen, yakni aturan formal (*formal institution*), aturan informal (*informal institution*), dan mekanisme penegakan aturan (*enforcement mechanism*). Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia di mana mereka hidup. Terakhir adalah penegakan dalam arti bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakannya. Contohnya, suatu negara bisa saja memiliki undang-undang pangan, namun bila pemerintahannya gagal menegakkan aturan formal tersebut, maka upaya yang diharapkan efektif dapat mencegah kerawanan pangan tidak akan terealisasi karena tidak berjalannya undang-undang tersebut di lapangan. Selanjutnya Yustika (2013) mengemukakan bahwa pendefinisian kelembagaan mencakup

dua klasifikasi. Pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya mendesain pola interaksi antar-pelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antar-pelakunya.

Dalam upaya pencarian penyelesaian atas problem-problem praktis seperti masalah ketahanan pangan, pendekatan ekonomi kelembagaan mencoba untuk memberi pertimbangan terhadap seluruh aspek dari masalah tersebut: ekonomi, sosial, psikologi, sejarah, hukum, politik, administrasi, dan bahkan teknis (Yustika, 2013). Dengan demikian, pendekatan institusional bersifat multidisiplin dalam upaya menangani masalah terkait ketahanan pangan.

Pendekatan institusional yang mengarah kepada prinsip-prinsip ekonomi kelembagaan ini juga bersifat sistemik seperti dikemukakan oleh Samuels (1995). Pendekatan ini memberi perhatian penting kepada setiap komponen yang terkait dan hubungan yang terjalin antar-komponen. Masing-masing komponen hendaknya berfungsi secara optimal sesuai fungsinya masing-masing. Pada sisi lainnya, masing-masing komponen juga penting untuk saling bekerja sama dengan komponen lainnya yang terkait. Kerja sama ini dibutuhkan agar terjalin sinergi dalam sistem. Sinergi dalam sistem inilah yang pada akhirnya menghasilkan hasil kerja optimal sesuai dengan tujuan bersama yang diharapkan setiap komponen.

Selanjutnya pendekatan institusional juga mengadopsi delapan aspek ekonomi kelembagaan seperti yang dikemukakan oleh Samuels (1995) dalam Yustika (2013). Delapan aspek yang dimaksud seperti berikut ini. Pertama, pendekatan institusional cenderung menekankan proses penyesuaian yang tidak otomatis tetapi melalui proses evolusi yang mengarah kepada sesuatu yang terus berproses. Kedua, pendekatan institusional mengutamakan eksistensi kelembagaan yang mengandaikan adanya tindakan kolektif dari individu-individu di dalam masyarakat. Ketiga, pendekatan institusional menekankan pentingnya faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai elemen dinamis proses evolusi sosial dan proses sosial. Keempat, pendekatan institusional menekankan pula bahwa sumber daya hendaknya dialokasikan ke dalam struktur kelembagaan yang bermacam-macam dan dalam beragam hubungan kekuasaan yang hidup di masyarakat. Kelima, pendekatan institusional mengarah kepada pencapaian nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur

sosial, dan perilaku; dan tidak sekedar pada harga-harga relatif. Keenam, pendekatan institusional berpendapat bahwa individu-individu cenderung bertindak secara kolektif untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk kepentingan pribadi karena mereka terikat secara sosial dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial. Ketujuh, pendekatan institusional menganggap bahwa struktur sosial, kekuasaan, dan komponen-komponen sosial lainnya tidaklah *given*. Kedelapan, pendekatan institusional memandang suatu persoalan ekonomi secara menyeluruh (*holistic way*) dan mencoba untuk menjelaskannya dalam perspektif multidisipliner. Fenomena ekonomi tidak bisa ditangani hanya dari perspektif ekonomi tetapi dari perspektif yang lebih luas. Pendekatan ekonomi kelembagaan melihat fenomena transaksi, misalnya, tidak sebatas peristiwa ekonomi saja tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang berdimensi luas.

Penutup

Banyak pendekatan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan ketahanan pangan. Masing-masing pendekatan memberi kontribusi penting untuk semakin mengefektifkan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan. Bersama dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung bersifat non-institusional, pendekatan institusional juga mencoba turut serta memberi kontribusi positif mengatasi masalah ketahanan pangan. Harapannya pendekatan institusional yang menjadi bahasan utama dalam artikel ini bisa menjadi alternatif baru yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Selain itu, pendekatan institusional diharapkan juga dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan pendekatan sebelumnya. Pendekatan institusional ini tidak meniadakan pendekatan lainnya tetapi justru menjadi pelengkap pendekatan non-institusional. Sinergi kedua pendekatan diharapkan dapat lebih efektif mengatasi permasalahan ketahanan pangan di berbagai tempat untuk masa-masa mendatang.

Daftar Pustaka

Burchi, Francesco, dan De Muro, Pasquale (2012), A Human Development and Capability Approach to Food Security: Conceptual Framework and Informational Basis, WP 2012-009: February 2012, United Nations Development Programme (UNDP).

OECD/FAO/UNCDF (2016), *Adopting a Territorial Approach to Food Security and Nutrition Policy*, OECD Publishing, Paris.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264257108-en>

Yustika, Ahmad Erani (2013), *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

PENGARUH KEBIJAKAN PERTANIAN TERPADU TERHADAP PENDAPATAN PETANI LAHAN AGROFORESTRI DI KABUPATEN BOYOLALI

Utami Ari Kusuma W, Darsono, Joko Sutrisno

Surel: utamiarikusumawardhani@yahoo.com

Program Pascasarjana Prodi Agribisnis, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS)

ABSTRAK

Pemanfaatan lahan hutan dan Kebijakan Pertanian Terpadu, yang tertuang dalam program agroforestri merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di sekitar hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Reksowono, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Pemilihan lokasi menggunakan metode purposive random sampling, yaitu dilakukan secara sengaja berdasarkan desa dengan wilayah terluas dengan populasi tertinggi yang bersinggungan dengan hutan. Penelitian ini bertujuan (1) Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi adopsi Kebijakan Pertanian Terpadu di tingkat petani. (2) Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan petani desa hutan. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Logit dan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari enam variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, terdapat empat variabel yang nyata pengaruhnya terhadap adopsi kebijakan, karena memiliki nilai probabilitas (signifikansi) < 0,05. Empat variable tersebut adalah pendapatan petani, pendidikan, hama dan penyakit dan akses penyuluhan. Satu diantaranya, yaitu faktor hama dan penyakit berpengaruh negatif. Sedangkan faktor luas lahan garap dan umur petani tidak berpengaruh nyata terhadap adopsi kebijakan. Hasil analisa regresi linear berganda menunjukkan menunjukkan faktor luas lahan, input bibit dan input pupuk berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani di Kecamatan Juwangi. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung masing – masing variabel lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,604). Sedangkan faktor modal tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani, dapat dilihat dari nilai thitung (3,179) < t_{tabel} (4,604).

Kata kunci: subsidi, ketahanan pangan, adopsi, kebijakan, pendapatan

Pendahuluan

Isu ketahanan pangan menjadi topik penting karena pangan merupakan kebutuhan paling hakiki yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Ketahanan pangan ini menjadi semakin penting karena pangan bukan hanya merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) tetapi juga merupakan hak dasar (*basic right*) bagi setiap umat manusia yang wajib dipenuhi. Oleh

karena pangan merupakan hak dasar itulah, maka negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu warga negara telah mendapatkan haknya atas pangan. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan ketersediaan lahan sebagai sarana penyedia pangan, merupakan masalah yang krusial. Penduduk membutuhkan pangan sementara ketersediaan pangan kurang akibat lahan yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk akan pangan.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Jumlah tersebut 60% berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang padat sebagian berada di daerah yang bersinggungan dengan hutan. Publikasi BPS terbaru (Februari 2016) menyebutkan jumlah desa di dalam dan sekitar hutan di Indonesia meningkat pesat antara tahun 2011 dan 2014 dari 9.937 desa menjadi 21.284 desa. Artinya, terjadi kenaikan kesatuan masyarakat hutan hingga 11.347 desa dalam jangka waktu hanya tiga tahun. Peningkatan tersebut sekaligus mengindikasikan berkembang cepatnya masyarakat di lingkungan hutan di Indonesia. Kemiskinan di sekitar hutan dipandang merupakan masalah multi-dimensional yang terkait erat dengan pembangunan pedesaan secara umum dan pengelolaan hutan secara khusus, proses marjinalisasi di daerah pedalaman, kesenjangan sosial dalam pembangunan pedesaan, dan berbagai proses eksklusi sosial yang terjadi akibat undang-undang kehutanan dan kebijakan pemerintah di sektor kehutanan merupakan dimensi-dimensi kemiskinan di sekitar hutan (Kartodihardjo, 2006). Di Pulau Jawa hutan mengalami tekanan yang sangat kuat dari masyarakat terutama masyarakat desa di sekitar hutan. Penebangan/pencurian kayu, penggembalaan liar di kawasan hutan serta pembukaan lahan pertanian merupakan hal-hal yang sering dihadapi pengelola hutan di Jawa (dalam hal ini Perum PERHUTANI). Hal ini selain menimbulkan kerugian finansial juga menurunkan bahkan rusaknya kualitas hutan, sehingga fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan akan terganggu. Di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Tengah kawasan hutan sudah mencapai ambang batas 30% dari luas daratannya.

Solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pangan dari masyarakat sekitar hutan tanpa harus melakukan pembukaan lahan, adalah peningkatan sumber daya lahan hutan bagi masyarakat sekitar hutan atau yang biasa di sebut Masyarakat Desa Hutan. Salah satu peningkatan sumber daya lahan hutan adalah dengan pelaksanaan sistem tumpang sari di lahan kawasan hutan atau lebih dikenal

dengan sistem *agroforestri*. Agroforestri bertujuan menyelamatkan dan mencegah kerusakan hutan sekaligus memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan yang memiliki lahan pertanian sempit atau bahkan tidak memilikinya, melalui peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatannya.

Agroforestri merupakan bagian dari program pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta kesehatan. Bahkan agroforestri merupakan program yang melibatkan sektor hulu hingga hilir, sehingga terkait pula dengan sektor perindustrian dan perdagangan.

Sebagai suatu sistem pemanfaatan lahan yang telah disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat, agroforestri dapat berkontribusi terhadap strategi pembangunan nasional dengan memberikan peluang kerja (*pro job*), mengentaskan kemiskinan (*pro poor*), meningkatkan ekonomi daerah (*pro growth*), dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan (*pro environment*). Kontribusi agroforestri tersebut diwujudkan di tingkat lokal dalam bentuk kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan ketahanan lingkungan yang selanjutnya dapat diperluas pada tingkat nasional.

Bagi negara dengan penduduk relatif besar seperti Indonesia, strategi ekonomi berbasis masyarakat mempunyai daya dorong yang tinggi pada tingkat nasional. Strategi tersebut juga menarik peran serta masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan serta mempunyai daya tolong terhadap ekonomi lokal. Salah satu strategi pembangunan ekonomi Indonesia adalah melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka sistem agroforestri sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang Integrated Farming System (IFS), atau sistem pertanian terpadu yang diharapkan mampu mendukung kedaulatan pangan nasional. Introduksi atau pengenalan kebijakan ini sudah dan sedang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Pemrov dan Perhutani bekerjasama dalam penerapan kebijakan ini. Hal ini tertuang dalam ***Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 522/36 Tahun 2015, tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pertanian Terpadu Dalam Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah***. Kebijakan tersebut berupa bantuan benih dan pupuk di awal

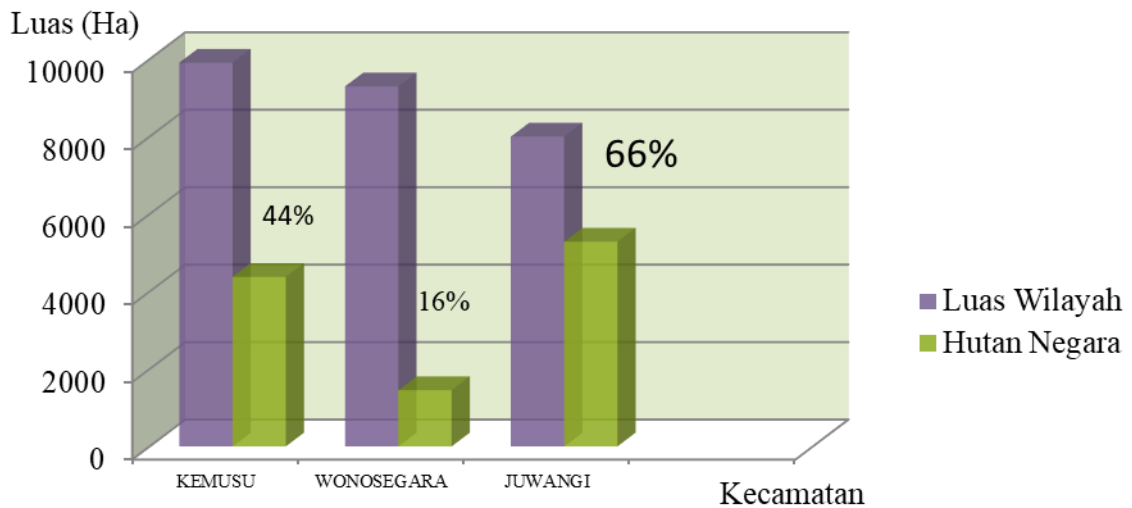
usaha. Sistem pertanian terpadu ini juga sejalan dengan salah satu nawacita Presiden yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Adapun turunannya yakni peningkatan kedaulatan pangan yang dicerminkan pada kekuatan mengatur masalah pangan secara mandiri yakni ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri dan mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.

Program pertanian terpadu/IFS ini mendapat kesempatan untuk diimplementasikan di beberapa unit kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, salah satunya di LMDH Reksowono, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. LMDH ini di bawah ampunan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Telawa, Juwangi. Kecamatan Juwangi berada di Kabupaten Boyolali sebelah utara, tepatnya 66 km dari pusat Kota Boyolali. Wilayah Boyolali sebelah utara merupakan kawasan hutan. Ada tiga kecamatan yang berada di wilayah ini yang bersinggungan dengan kawasan hutan, yaitu Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegara dan Kecamatan Juwangi. Berikut ini data luas wilayah tiga kecamatan tersebut beserta penggunaan lahannya:

Tabel 1. Luas Wilayah Tiga Kecamatan Kawasan Hutan Kabupaten Boyolali dan Penggunaan Lahannya Tahun 2015 (Ha)

No	Keterangan	Kecamatan			
		Kemusu	Wonosegara	Juwangi	
1	Luas Wilayah	9.908,42	9.294,79	7.999,35	
2	Penggunaan Lahan Tanah Kering	Tanah Sawah	652,43	1.883,84	380,70
		Pekarangan/ Bangunan	875,13	1.367,08	1.099,10
		Tegal/Kebun	1.534,72	4.251,80	1.031,20
		Padang Gembala	-	7,10	20,10
		Hutan Negara	4.378,70	1.453,81	5.285,70
		Tambak/ Kolam	774,80	-	-
		Lainnya	1.692,63	331,15	182,55
3	Jumlah	9.255,99	7.410,95	7.618,65	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali Tahun 2015



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2015

Gambar 1. Luas Wilayah Hutan Tiga Kecamatan Di Kabupaten Boyolali Tahun 2015

Dapat dilihat bahwa Kecamatan Juwangi memiliki wilayah kawasan hutan terluas dibandingkan dengan dua kecamatan lain, luas wilayah kawasan hutan di Kecamatan Juwangi sekitar 66% dari keseluruhan luas wilayahnya. Menurut data BPS Kabupaten Boyolali 2015, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Juwangi adalah 450 jiwa/km², hal ini berarti tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi. Sementara mayoritas penduduk mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian dan atau sumber kehidupan. Angka kepadatan penduduk yang sangat tinggi ditambah mayoritas wilayah diperuntukkan sebagai kawasan hutan, maka kurangnya lahan pertanian tanaman pangan menjadi penyebab utama tingkat kemiskinan yang tinggi. Desa Ngaren merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Juwangi, dan merupakan desa yang memiliki lahan Hutan cukup luas. Kondisi umum masyarakatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah, rata-rata pendapatan perkapita rendah, berpendidikan rendah sehingga memiliki tingkat kualitas sumberdaya manusia relatif rendah pula, dan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani subsisten (*berusaha tani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan atas pertimbangan pengembangan bisnis*) dan buruh tani. Sebelum Perhutani mempersilahkan MDH melakukan usahatani di dalam atau di kawasan hutan, mayoritas penduduknya juga bermata pencaharian mencari ranting di hutan yang kemudian diikat dan dijual pada tengkulak, mencari rumput di sela-sela tanaman utama hutan untuk pakan ternak.

Perum PERHUTANI, selaku pengelola mayoritas hutan negara di Indonesia, mempersilahkan petani hutan untuk bercocok tanam di area hutan, di sela – sela tanaman utama kehutanan (mayoritas jati), terutama di 3 tahun pertama penanaman. Jenis tanaman yang diusahakan oleh petani Kecamatan Juwangi, di masa 3 tahun pertama penanaman tanaman utama adalah jagung, sedangkan selanjutnya adalah jenis empon-empon, seperti jahe, kencur dll. Di dalam penelitian ini, alokasi bantuan benih dan pupuk diberikan kepada petani di awal usahatani jagung.

Dengan implementasi kebijakan pertanian terpadu pada program agroforestry yang sudah berjalan, melalui bantuan saprodi, dalam hal ini pupuk dan benih, di awal usahatani tersebut diharapkan mampu menarik keinginan petani sekitar hutan untuk mengolah usahatani di kawasan hutan dengan biaya produksi awal yang relatif lebih rendah, sehingga masalah kurangnya lahan bagi masyarakat sekitar hutan teratasi tanpa harus membuka lahan kawasan hutan, dengan demikian diharapkan proses introduksi, adopsi dan difusi kebijakan pemerintah tentang pertanian terpadu di kawasan hutan berjalan lancar dan sukses, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan se maksimal mungkin melalui peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, dengan tetap menjaga kelestarian dan kualitas fungsi hutan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi Kebijakan Pertanian Terpadu di tingkat petani?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan Petani Desa Hutan?

Kajian Pustaka

a. Analisis Usahatani

Ilmu usahatani pada dasarnya memperhatikan cara-cara petani memperoleh dan memadukan sumberdaya (lahan, kerja, modal, waktu dan pengelolaan) yang terbatas untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan petani dalam berusahatani adalah menggunakan seefisien mungkin sumberdaya yang dimiliki. Prinsip analisis biaya merupakan prinsip terpenting karena petani hanya dapat mengatur biaya produksi dalam usahatani namun

mereka tidak mampu mengatur harga komoditi yang dijualnya atau memberikan nilai kepada komoditi tersebut. Jika tidak ada peningkatan harga komoditi yang dihasilkan maka petani harus mengurangi biaya per satuan komoditi yang dihasilkan bila petani ingin meningkatkan pendapatan bersih usahatannya. Informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan pendapatan usahatani yaitu keadaan penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu yang ditetapkan (Purba, 2005).

Menurut Soekartawi (2006) pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual serta sebagai ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usahatani. Semua komponen produk yang tidak dijual harus dinilai berdasarkan harga pasar dalam menaksir pendapatan kotor. Pendapatan usahatani dibedakan menjadi dua, pertama pendapatan atas seluruh biaya tunai yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani, kedua pendapatan atas biaya total dimana semua input milik petani juga diperhitungkan sebagai biaya dan dihitung dengan analisis rasio penerimaan dan biaya serta analisis rasio pendapatan dan biaya. Penerimaan tunai usahatani didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani, pengeluaran tunai usahatani yaitu jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi usahatani. Secara matematis untuk menghitung pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai berikut:

$$\pi = Y \cdot P_y - \sum X_i \cdot P_{xi} - BTT$$

Keterangan:

π	= Pendapatan (Rp)
Y	= Hasil produksi (Kg)
P_y	= Harga hasil produksi (Rp)
X_i	= Faktor Produksi ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)
P_{xi}	= Harga faktor produksi ke-i (Rp)
BTT	= Biaya tetap total

b. Teori Subsidi

Subsidi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Menurut Handoko dan Patriadi (2005) subsidi merupakan pembayaran yang diberikan pemerintah kepada badan usaha maupun rumah tangga dengan

harapan tercapainya kondisi yang lebih baik. Salahsatu subsidi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga petani adalah subsidi produksi, dimana pemerintah menutup sebagian biaya produksi untuk mendorong peningkatan output produk tertentu dan dimaksudkan untuk menekan harga dan memperluas penggunaan produk tersebut. Di dalam penelitian ini subsidi produksi diwujudkan dalam bentuk bantuan pupuk organik dan benih unggul di awal usahatani. Diharapkan dengan pemberian subsidi ini dapat meningkatkan pendapatan di tingkat petani.

c. Teori Adopsi

Adopsi dalam proses penyuluhan (pertanian), pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh (Suharyanto, 2001). Adopsi teknologi di sektor pertanian merupakan hasil dari kegiatan suatu komunikasi pertanian sehingga terkait dengan pengaruh interaksi antar individu, antar kelompok, anggota masyarakat atau kelompok masyarakat, juga dipengaruhi oleh interaksi antar kelompok dalam masyarakat (Rangkuti, 2007).

Proses adopsi di tingkat petani membutuhkan proses, dan proses adopsi didahului oleh pengenalan (introduksi) kepada masyarakat tani, selanjutnya terjadi proses mental untuk menolak atau menerima teknologi tersebut. Jika hasil dari proses mental tersebut adalah keputusan menerima suatu teknologi, maka terjadilah adopsi. Proses adopsi melalui beberapa tahapan yaitu: kesadaran (awareness), perhatian (interest), penaksiran (evaluation), percobaan (trial), adopsi (adoption), konfirmasi (confirmation) (Mundy, 2000).

Proses adopsi tersebut membutuhkan kondisi tertentu dari elemen – elemen terkait. Menurut Pattanayak (1983) salah satu faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pertanian dan kehutanan, yaitu : Preferensi petani, secara eksplisit efek dari preferensi petani sulit untuk diukur maka digunakan pendekatan berdasarkan faktor sosial demografi seperti umur, jenis kelamin, pendidikan dan status sosial.

Dari penjabaran di atas dan mempelajari dari penelitian - penelitian terdahulu maka di dalam penelitian ini, faktor – faktor yang diduga sebagai penentu petani melakukan adopsi atau tidak adalah pendapatan, luas lahan, umur petani responden, pendidikan petani responden, hama dan penyakit dan akses terhadap penyuluhan.

Metode Penelitian

Metode Penentuan Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini mempelajari kasus pada kegiatan usahatani di lahan Perhutani divisi Regional Jawa Tengah, KPH Telawa (praktek agroforestri) oleh masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH Reksowono. Wilayah hutan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive random sampling*), berdasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Juwangi memiliki wilayah kawasan hutan terluas, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penelitian ini telah dilaksanakan 3 (tiga) bulan mulai dari Bulan Februari sampai dengan April 2017.

Metode Penentuan Responden

Lahan hutan yang diserahkan pihak Perhutani di Desa Ngaren untuk dikelola oleh masyarakat desa sampai dengan saat ini seluas 270 ha, terdiri dari 175 ha dikelola oleh 395 petani adopter (yang mengadopsi kebijakan ifs/pertanian terpadu) dan 95 ha oleh 165 petani non adopter (tidak mengadopsi kebijakan). Pada umumnya 1 Ha lahan dikelola oleh 4 petani, akan tetapi pada prakteknya ada 1 petani yang menggarap lebih dari ¼ Ha lahan dari data terakhir jumlah populasi petani pelaku usahatani pada praktek agroforestri di Desa Ngaren berjumlah 560 petani.

Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil tergantung pada variasi populasinya. Semakin besar dispersi atau variasi suatu populasi maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan agar estimasi terhadap parameter populasi dapat dilakukan dengan akurat dan presisi. Selanjutnya Riduwan (2006) menyebutkan sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pengambilan ukuran sampel dengan menggunakan formula Slovin :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Dimana:

- n = Sampel
- N = Ukuran populasi
- d = Presisi yang ditetapkan

Pada penelitian ini tingkat ketelitian atau keyakinan yang dikehendaki adalah 90 % atau dengan tingkat presisi yang diharapkan 10 % atas dasar pertimbangan bahwa untuk penelitian sosial tingkat kesalahan masih dapat ditolerir sampai dengan 10 %. Sehingga besarnya sampel yang diperoleh dari populasi sebanyak 560 petani (dari 270 hektar) orang adalah sebesar 85 orang. Responden dipilih melalui teknik *simple random sampling* (pemilihan acak sederhana). Data-data kuantitatif primer diolah dengan menggunakan program *Microsoft Excell 2007* dan *SPSS 20 for Windows*.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dihimpun dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari wawancara menggunakan kuesioner dengan responden petani desa hutan, meliputi karakteristik dan faktor pertimbangan petani dalam mengadopsi kebijakan. Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait (Pemerintah Desa Ngaren dan Kecamatan Juwangi, BPS Kecamatan Juwangi, BPS Kabupaten Boyolali, Perhutani divisi Regional Jawa Tengah, KPH Telawa, LMDH Reksowono), dan publikasi yang berkaitan dengan agroforestri jagung dan Kebijakan IFS.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, menggunakan 3 alat analisa untuk masing-masing tujuan dari penelitian. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi kebijakan pertanian terpadu di tingkat petani, digunakan analisa data *Model Logit*. *Independent Sample t-Test* digunakan untuk menganalisa beda pendapatan petani adopsi dan yang tidak adopsi penerapan kebijakan pertanian terpadu oleh pemerintah, sedangkan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan petani desa hutan menggunakan alat analisa *Regresi Linear Berganda*. Berikut pejelasan lebih lanjutnya:

1. Model Logit (Regression Logistic)

Analisis data yang pertama menggunakan adalah model *logit* karena variabel dependen (Y) yang akan diuji merupakan data kualitatif yang mempunyai dua kriteria, yaitu mengadopsi penerapan kebijakan (1) atau tidak mengadopsi (0) . Model logit (*logistik regression*) adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel terikat dengan kemungkinan diantara 0 dan 1 (Winarno, 2011). Menurut Hair, dkk analisis logit merupakan bentuk khusus dari regresi dimana variabel terikatnya non metrik dan terbagi menjadi dua bagian/kelompok, walaupun formulasinya dapat meliputi lebih dari dua kelompok. Dalam menginterpretasikan analisis logit sangat mirip dengan regresi linear. Penggunaan model logit sering digunakan dalam data klasifikasi (Gujarati, 2003). Bentuk dasar probabilitas dalam model logit dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Probabilitas dalam Model Logit

Yi	Probabilitas
0	1 – Pi
1	Pi
Total	1

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa penggunaan model logit seringkali digunakan dalam data kualifikasi. Formulasi model *logit* yang digunakan adalah modifikasi dari model Gujarati (2003):

$$\text{Log} \left(\frac{P_i}{1-P_i} \right) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$$

Dimana,

- Pi = prosentase peluang petani mengadopsi kebijakan
- 1-Pi = prosentase peluang petani tidak mengadopsi kebijakan
- a = intersep
- β = nilai koefisien dari masing – masing variabel independen
- X₁ = Pendapatan (Rp)
- X₂ = Luas lahan garapan (Ha)
- X₃ = Umur petani responden (th)
- X₄ = Pendidikan petani responden (skala ordinal, SMA=3; SMP=2; SD=1; tidak

sekolah = 0)

X_5 = Hama dan penyakit (**dummy, tinggi = 1; rendah = 0**)

X_6 = Akses terhadap penyuluhan (dummy, mendapat=1; tidak mendapat=0)

Persamaan $\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)$ disebut dengan rasio kecenderungan (*Odds Ratio*). Variabel dependen pada persamaan logistik memiliki nilai kategorikal. Dalam model tersebut nilai $\text{Log}\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)$ akan bernilai 0 dan 1, dimana masing-masing nilai tersebut mewakili kategori tidak mengadopsi (tidak menerima) dan mengadopsi (menerima) Kebijakan IFS (Pertanian Terpadu) yang berupa subsidi pupuk dan benih.

Untuk menilai keseluruhan model atau *overall model fit* maka dilihat *Log Likelihood*. Sedangkan untuk menguji koefisien regresi dengan melihat angka probabilitas (signifikansi). Jika signifikansi < 0,05 maka variabel independen tersebut benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 maka variabel independen tersebut benar – benar tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Regresi Linear Berganda

Analisis data ketiga menggunakan model regresi linier berganda double log dengan dummy multivariat dengan regresi linier berganda untuk mencari hubungan sekaligus pengaruh suatu variabel yang bermakna. Untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi, digunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, dengan kata lain merupakan alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan faktor-faktor produksi (X) dengan produksi (Y). Secara matematika bentuk persamaan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = b_0 X_1^{b_1} X_2^{b_2} X_3^{b_3} X_4^{b_4} e_{\mu}$$

Kemudian melakukan penaksiran dengan Mentrasformasikan persamaan tersebut kedalam bentuk Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression).

Secara umum dapat digambarkan dengan persamaan *double logaritma natural (ln)*, dengan model estimasi:

$$\text{Ln}\hat{Y} = \text{Ln}b_0 + b_1\text{Ln}X_1 + b_2\text{Ln}X_2 + b_3\text{Ln}X_3 + b_4\text{Ln}X_4$$

Dimana,

$\ln Y$ = Pendapatan petani

$\ln X_1$ = Luas lahan (Ha)

$\ln X_2$ = Modal (Rp)

$\ln X_3$ = Input bibit (dummy, adopsi = 1; tidak adopsi = 0)

$\ln X_4$ = Input pupuk (dummy, adopsi = 1; tidak adopsi = 0)

b_0 = Nilai konstanta

b_1, b_2, b_3, \dots = Nilai koefisien regresi

Sedangkan uji statistiknya, sebagai berikut

i. *Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji-t)*

Uji-t ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Dengan hipotesis :

1). $H_0 : b_1, b_2, b_3, \dots = 0$

$H_1 : b_1, b_2, b_3, \dots \neq 0$

2). Menentukan $\alpha = 5\%$ (0.05).

3). Daerah kritik, H_0 ditolak jika $t_{hit} > t_{tab}$

4). Statistik uji :

$$t_{hit} = \frac{b_2 - b_3}{Se(b_2 - b_3)}$$

derajat bebas (degree of freedom) = $n-1$, n = jumlah sampel data

dimana,

b_2, b_3 = koefisien masing – masing b

Se = standart deviasi

Kriteria pengujian :

1. H_0 diterima jika $\text{sign. (probabilitas value)} > \alpha$ (0.05), berarti variabel independen secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 95%.

2. H_0 ditolak jika $\text{sign. (probabilitas value)} < \alpha (0.05)$, berarti variabel independen secara individu ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 95%.

Hasil dan Pembahasan

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Kebijakan

Karakteristik petani yang diamati meliputi umur, pendidikan, luas lahan, dan pendapatan. Umur petani desa hutan (responden) rata-rata 40 tahun dengan usia produktif berkisar antara 25 – 60 tahun. Pendidikan formal petani adalah SD, SMP, dan SMA. Sebagian besar petani (60%) lulusan SD dan sedikit sekali (12%) yang lulusan SMA. Dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman berusahatani maka petani responden merupakan petani tradisional dengan pengalaman yang diperoleh secara turun temurun, di samping pelatihan dari kelompok tani dan penyuluh. Kebanyakan petani memiliki lahan sawah garapan seluas 0,25 - 0,5 ha. Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, petani tidak mampu memiliki lahan yang luas. Sebagian besar petani di Kecamatan Juwangi mengandalkan lahan Perhutani dengan status pinjam pakai tanpa sewa (*sanggeman*). Luas lahan yang digarap tentu berpengaruh terhadap biaya produksi dan pendapatan usahatani. Pendapatan petani dari hasil usahatani jagung dan empon – empon berkisar antara Rp. 1 – 1,5 juta/bulan. Pekerjaan sampingan lainnya dari petani responden adalah sebagai pencari ranting di hutan, untuk kemudian dijual kepada pengepul, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adopsi kebijakan oleh petani responden di duga dipengaruhi oleh pendapatan, luas lahan, umur petani, pendidikan, hama dan penyakit dan akses penyuluhan. Dengan menggunakan fungsi logit, peluang petani mengadopsi kebijakan yang berupa subsidi benih dan pupuk, ditampilkan pada Tabel 3. Dari enam variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, terdapat empat variabel yang nyata pengaruhnya terhadap adopsi kebijakan, karena memiliki nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$. Empat variabel yang berpengaruh adalah pendapatan petani, pendidikan, hama dan penyakit, dan akses penyuluhan. Satu diantaranya, yaitu faktor hama dan penyakit berpengaruh negatif.

Faktor pendapatan petani memiliki nilai Odd Rasio 3,518. Artinya, apabila pendapatan petani bertambah satu tingkat, maka peluang mengadopsi kebijakan meningkat menjadi 3,5 kali. Hal tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa petani dengan tingkat

pendapatan yang rendah, perlu lebih diperhatikan dalam sosialisasi kebijakan pertanian terpadu. Pendidikan petani memiliki nilai Odd Rasio 1,498. Artinya, apabila pendidikan petani satu tingkat lebih tinggi, maka peluang mengadopsi kebijakan meningkat menjadi 1,5 kali. Faktor pendidikan secara tidak langsung menentukan penanaman pemahaman akan kebijakan yang ada, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka akan semakin mudah memberikan pemahaman kebijakan pertanian terpadu khususnya di Kecamatan Juwangi.

Faktor hama dan penyakit berpengaruh negatif dengan nilai Odd Rasio 0,143. Tingginya serangan penyakit disebabkan oleh iklim yang tidak menentu dan penggunaan pupuk tidak sesuai anjuran. Serangan hama dan penyakit dapat mengakibatkan gagal panen sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat adopsi teknologi. Mendapat tidaknya penyuluhan tentang pertanian, sangat berpengaruh pada keputusan petani terhadap adopsi kebijakan. Terlihat pada tabel 3, faktor penyuluhan memiliki nilai odd rasio 3,911. Apabila petani mendapatkan penyuluhan, maka memiliki peluang adopsi kebijakan 3,9 kali.

Tabel 3. Hasil Analisa Fungsi Logit Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Kebijakan Oleh Petani Desa Hutan Kecamatan Juwangi Musim Tanam Pertama 2017.

No	Variabel independen	B	SE	Wald	Sig.	Exp (B)
1	Pendapatan (X ₁)	2,162	0,827	6,682	0,011*	3,518
2	Luas lahan (X ₂)	0,136	0,942	0,018	0,876	1,137
3	Umur (X ₃)	0,033	0,023	1,991	0,158	1,033
4	Pendidikan (X ₄)	0,181	0,124	2,147	0,043*	1,498
5	Hama dan penyakit (X ₅)	- 0,932	0,477	3,788	0,017*	0,143
6	Akses penyuluhan (X ₆)	1,366	0,573	5,739	0,019*	3,911
10	Constant	-5,773	2,055	7,513	0,006	0,004

-2 Log likelihood = 113,363

Nagelkerke R Square = 0,689

Keterangan: *) nyata pada 5%

Faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap adopsi Kebijakan Pertanian Terpadu adalah luas lahan garap dan umur petani. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas masing – masing faktor > 0,05. Yaitu 0,876 dan 0,158. Umur berapapun apabila memiliki tingkat pemahaman akan kebijakan rendah, maka akan menghambat pula keputusan adopsi kebijakan. Sementara, tingkat pemahaman sangat tergantung dari tinggi rendahnya pendidikan, maka sasaran paling tepat untuk dilakukan penyuluhan pertanian dan sosialisasi kebijakan adalah petani dengan pendidikan yang relatif rendah, karena pendidikan yang rendah akan membatasi petani dalam mengadopsi kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis fungsi logit, maka model persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi Kebijakan Pertanian Terpadu sebagai berikut:

$$\text{Log} \left(\frac{P_i}{1-P_i} \right) = -5,773 + 2,162X_1 + 0,136X_2 + 0,033X_3 + 0,181X_4 - 0,932X_5 + 1,366X_6$$

Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Desa Hutan

Hasil penelitian berdasarkan output analisa regresi linear berganda menunjukkan faktor luas lahan, input bibit dan input pupuk berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani di Kecamatan Juwangi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} masing – masing variabel lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,604). Sedangkan faktor modal tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani, dapat dilihat dari nilai t_{hitung} (3,179) < t_{tabel} (4,604). Hasil dari persamaan estimasi tersebut, dapat dilihat besarnya pengaruh setiap variabel X yang ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien regresinya.

Tabel 4. Hasil Analisa Regresi Linear Berganda Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Desa Hutan Kecamatan Juwangi Musim Tanam Pertama 2017.

Variabel	B	t _{hitung}	Sig.	Tolerance	VIF
Intersep	3,412		0,000		
Luas lahan	0,496	4,705	0,195	0,215	7,665
Modal	-0,138	3,179	0,249	0,108	5,353
Input bibit	0,357	5,662	0,234	0,103	8,674
Input pupuk	0,361	6,671	0,229	0,112	9,170

t-tabel : α 0,01 = 4,604	
R ²	= 0,973
F-hitung	= 6,715
F-tabel α 0,01	= 3,719
N	= 85

Berikut penjelasan pengaruh dari masing-masing penggunaan input produksi terhadap produksi jagung hibrida adalah sebagai berikut :

Luas Lahan (X_1). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan petani desa hutan, pada taraf kepercayaan 99% , t-hitung (4,705) > t-tabel (4,604) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan luas lahan untuk usahatani, maka semakin meningkat pula produksi dalam hal ini jagung, sehingga pendapatan pun meningkat.

Modal (X_2). Dilihat dari t-hitung (3,179) < t-tabel (4,604), faktor modal tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani desa hutan. Modal yang digunakan oleh petani desa hutan di Kecamatan Juwangi relatif sangat kecil, sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Input Bibit (X_3). Input bibit di dalam penelitian ini maksudnya variabel dummy petani adopsi kebijakan berupa subsidi bibit (adopsi = 1; tidak adopsi = 0). Nilai t-hitung faktor input bibit (5,662) > t-tabel (4,604), faktor input bibit berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani desa hutan. Petani yang mengadopsi kebijakan berupa subsidi bibit, maka akan meningkatkan pendapatannya.

Input pupuk (X_4). Yang dimaksud dengan input pupuk dalam penelitian ini adalah variabel dummy petani adopsi kebijakan berupa subsidi pupuk (adopsi = 1; tidak adopsi = 0). Nilai t-hitung faktor input bibit (6,671) > t-tabel (4,604), faktor input pupuk berpengaruh nyata

terhadap pendapatan petani desa hutan. Petani yang mengadopsi kebijakan berupa subsidi pupuk, maka akan meningkatkan pendapatannya.

Dari hasil analisa regresi di atas di dapat persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = 3,412 + 0,496X_1 - 0,138X_2 + 0,357X_3 + 0,361X_4 + e_{\mu}$$

Penutup

Uraian hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Kebijakan Pertanian Terpadu yang diimplementasikan berupa subsidi bibit dan pupuk kepada petani desa hutan LMDH Reksowono, Kecamatan Juwangi, berpengaruh positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya subsidi saprodi di awal usaha dapat meningkatkan pendapatan petani. Diharapkan kebijakan tersebut terus berlangsung untuk petani – petani pesanggem lain, yang belum mendapat kesempatan memperoleh lahan pinjam pakai tanpa sewa dari pihak PERHUTANI. Diharapkan pula program penyuluhan berjalan secara kontinyu, terutama bagi petani yang berpendidikan relatif rendah, sehingga mempermudah dan memperlancar proses adopsi kebijakan dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Asdi, Agustar. 1996. *Sustainability of Food and Nutrition Diversification Projects in West Sumatra, Indonesia*. Disertasi Doktor. University of The Philippines Los Banos.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Analisis Tematik ST2013 Subsektor Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan*.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Boyolali dalam Angka Tahun 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.
- Bahmanziari. 2003. *Is Trust Important In Technology Adoption? A Policy Capturing Approach*. The journal of Computer Information Systems.
- Center for International Forestry Research (CIFOR) 2007. *Menuju Kesejahteraan Dalam Masyarakat Hutan*: buku panduan untuk pemerintah daerah. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Departemen Kehutanan, 3 September 2005, *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, download situs resmi di Internet.

- Ellis, F. 1992. *Agricultural Policies in Development Countries*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Feder G, Just R, Zilberman D (1985). *Adoption of agricultural innovation in developing countries: A Survey*. *Econ. Dev. Cultural Change*, 33 (2):225-298.
- Gujarati, N.D. 2003. *Basic Econometrics*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hosmer DW, Lemeshow S (2000). *Applied logistic regression* (Vol. 354). Wiley-Interscience.
- Handoko, Rudi dan Patriadi, Pandu. (2005). *Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM (Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9 No. 4, Desember 2005)*.
Tersedia : <http://www.fiskal.depkeu.go.id/eng/kajian%5Crudi&pandu-4.pdf>
- Kartodihardjo, Hariadi. 2006. *Kebijakan Pengelolaan Hutan : Perumusan Kebijakan dan Implementasinya, Bahan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Topik : Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan oleh KLH, Juli 2006.
- Manik, Karden Eddy Sontang, 2004, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit PT. Djambatan, Jakarta.
- Marisa, S. 2011. *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya terhadap Produksi Padi (Studi Kasus : Kabupaten Bogor)*. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Mayrowani Henny, Ashari. 2011. *Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Mundy, Paul. 2000. *Adopsi dan Adaptasi Teknologi Baru*. PAATP3. Bogor.
- Nurjaman, Haris Sahrul Alim 2013. *Permasalahan dan Kebijakan di Bidang Pertanian*. [[http://www.scribd.com/doc/127007692/Permasalahan – Dan – Kebijakan – Di Bidang – Pertanian](http://www.scribd.com/doc/127007692/Permasalahan-Dan-Kebijakan-Di-Bidang-Pertanian)]. Diakses 29 November 2014.
- Pattanayak EM. 1983. *Taking Stuck of Agroforestry Adoption Studies*. *Journal Agroforestry Systems*.
- Purba, MH. 2005. *Analisis Pendapatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Cabang Usahatani*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2006. *Analisis Kebijakan Kapital, Sumberdaya Lahan dan Air : Kebijakan PSO/Subsidi Pupuk dan Sistem Distribusi*. Analisis Kebijakan Vol 3. Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rangkuti, AP. 2007. *Jaringan Komunikasi Petani dalam Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian (Kasus Adopsi Inovasi Traktor Tanang di Desa Neglasari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat)*. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Rohadi D, Herawati T, Firdaus N, Maryani R, Permadi P. 2013. *Strategi Nasional Penelitian Agroforestri 2013-2030*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan

Produktivitas Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, Indonesia.

- Santoso, S. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soekartawi, Soeharjo A, Dillon LJ dan Hardaker BJ. 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Perkembangan Petani Kecil*. UI-Press, Jakarta.
- Soekartawi. 2006. *Analisis Usahatani*. UI-Press. Jakarta.
- Statistik Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 2009. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- Suharyanto. 2001. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adopsi Teknologi Tabela di Provinsi Bali*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suparta. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wulandari, C. 1999. Prediction of Sustainability of Various Homegardens in Lampung Province, Indonesia Using AHP and Logit Models. Disertasi Doktor. University of The Philippines Los Banos.
- Wonnacott, JR and Wonnacott, HT. 1979. *Econometrics* Second Edition. USA.

**STRATEGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
STUDI EMIRIS PADA LIMA KLASTER UNGGULAN
UMKM DI KOTA SEMARANG**

Wyati Saddewisasi

Surel: wyatis@yahoo.com
Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

ABSTRAK

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam stabilitas, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi bangsa. Dengan demikian UMKM perlu mendapat perhatian semua pihak dengan memperhatikan potensi yang ada di masing-masing daerah apalagi dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan: Strategi UMKM dalam menghadapi MEA. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif diskriptif dengan menganalisis strategi UMKM dalam menghadapi MEA. Survei dilakukan pada lima klaster UMKM unggulan di Kota Semarang yaitu klaster batik, klaster pengolahan pangan, klaster handycraft, klaster pariwisata dan klaster bandeng. Populasi penelitian ini terdiri dari para pengusaha UMKM yang tergabung pada klaster UMKM di kota Semarang. Pemilihan kota Semarang sebagai lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek rencana pembangunan ekonomi khususnya bidang perdagangan. Penentuan sampel pengusaha UMKM dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan aspek homogenitas dan kondisi riil klaster UMKM di Kota Semarang. Jumlah sampel pengusaha sebanyak 78 orang. Data yang diperoleh dari lapangan penelitian dianalisis secara diskriptif dengan menggunakan model Internal-Eksternal Matrik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk menghadapi era MEA strategi yang sesuai dengan UMKM di kota Semarang adalah strategi pertumbuhan melalui integrasi horisontal.

Kata kunci: strategi, UMKM, MEA

Latar Belakang dan Permasalahan

Kehadiran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah teruji terutama pada masa krisis tahun 1997. UMKM tersebut tetap mampu menjalankan usahanya dan mampu menyerap pengangguran. Menurut Maria Jose, et al, 2015; Fritsch dan Storey, 2014; dan Mazzarol et al., 1999; antara 90,0 persen sampai dengan 99,0 persen dari perusahaan seluruh dunia adalah usaha kecil menengah yang mayoritas usahanya adalah sangat kecil bahkan mikro. Usaha mikro kecil menengah tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam stabilitas, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi bangsa. Dengan demikian

UMKM perlu mendapat perhatian semua pihak dengan memperhatikan potensi yang ada di masing-masing daerah apalagi dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean.

Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan pada akhir tahun 2015 merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui MEA (Arisandy, 2015) akan terjadi integrasi yang berupa “free trade area” (area perdagangan bebas), penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas, dan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara.

Untuk menghadapi era pasar bebas tersebut UMKM Jawa Tengah khususnya kota Semarang harus memiliki strategi agar dapat bersaing dengan UMKM dari negara ASEAN. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang muncul pada UMKM dapat terselesaikan. Adapun permasalahan mendasar yang dihadapi UMKM di kota Semarang adalah sebagai berikut (hasil rembung klaster 25 Mei 2015): (1) kemampuan untuk mengakses dan mengaplikasikan teknologi tepat guna masih rendah karena tingkat pengetahuan dan pendidikan masih rendah (2) usaha yang dilakukan adalah usaha mikro (skala rumah tangga) (3) keterbatasan sumber modal dan akses pemasaran serta lemah dalam organisasi dan manajemen. Kondisi ini mengakibatkan kinerja yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar bebas. Terutama yang berkaitan dengan kinerja ekspor.

Di kota Semarang terdapat lima klaster UMKM unggulan yaitu klaster Batik, Pengolahan Pangan, Handycraft, Pariwisata, dan Bandeng. Masing-masing klaster memiliki anggota kurang lebih 50 orang. Dengan memahami permasalahan dan akibat yang ditimbulkannya, maka perlu adanya penelitian tentang strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis bagi UMKM.

Selama ini penanganan permasalahan UMKM di Semarang telah ditangani oleh dinas instansi terkait baik dilingkungan pemerintah maupun non pemerintah. Namun demikian belum diketahui dengan pasti bagaiman strategi yang cocok untuk menghadapi MEA. Oleh karena itu muncul pertanyaan penelitian : (1) Faktor-faktor strategis apa saja yang ada pada UMKM? (2) Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi MEA bagi UMKM? (3) Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan strategi UMKM dalam menghadapi MEA. Dengan demikian perumusan masalahnya adalah : Bagaimana strategi yang tepat bagi UMKM di Kota Semarang dalam menghadapi MEA? Berdasarkan rumusan

masalah tersebut, judul artikel yang diajukan adalah “Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” Studi Emiris pada Lima Klaster Unggulan UMKM di Kota Semarang.

Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan : (1) Faktor-faktor strategis apa saja yang ada pada UMKM? (2) Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi MEA bagi UMKM? (3) Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan strategi UMKM dalam menghadapi MEA.

Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Penelitian ini hasilnya dapat diterapkan pada pengusaha secara umum, khususnya pengusaha yang termasuk dalam kategori UMKM dalam menghadapi pasar bebas MEA. Disamping itu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembinaan yang mengarah pada perekonomian pasar bebas MEA. Bagi dunia pendidikan diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dan pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

Kajian Pustaka

UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Rahmana (2008), beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan UMKM dikelompokkan dalam beberapa kriteria (Rahmana,2008), yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Strategi

1). Pengertian Strategi

Menurut Chandler (Rangkuti, 2008) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut Learned, Christensen, Andrews, dan Guth, (Rangkuti, 2008) strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner (Rangkuti, 2008) strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman

eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Menurut Porter (Rangkuti, 2008) strategi adalah alat yang sangat baik untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Andrews, Chaffe (Rangkuti, 2008) strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Hamel dan Prahalad (Rangkuti, 2008) strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Tetapi kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa “Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

a) *Distinctive Competence*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki *Distinctive Competence*. *Distinctive Competence* menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut Day dan Wensley (Rangkuti, 2008) identifikasi *distinctive competence* dalam suatu organisasi meliputi:

- Keahlian tenaga kerja
- Kemampuan sumber daya

Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan ini dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibanding pesaing. Dengan memiliki kemampuan melakukan riset pemasaran yang lebih baik, perusahaan dapat mengetahui secara

tepat semua keinginan konsumen sehingga dapat menyusun strategi-strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Semua kekuatan tersebut dapat diciptakan melalui penggunaan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semua itu merupakan keunggulan-keunggulan yang dapat diciptakan untuk memperoleh keuntungan dari pasar dan mengalahkan pesaing

b) *Competitive Advantage*, adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Menurut Porter, ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing yaitu:

- Cost leadership, perusahaan dapat lebih memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya jika dapat memberikan harga jual yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai/kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produksi, penggunaan teknologi, dan sebagainya.
- Diferensiasi, perusahaan dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya.
- Fokus, strategi fokus juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan.

Tujuan Strategi

Menurut Griffin, 2000; Sule & Saefullah, 2008; bagi organisasi bisnis (perusahaan), strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu bagi perusahaan strategi diperlukan untuk memperoleh profit.

Komponen Strategi

Menurut Sule & Saefullah (2008) ketiga komponen tersebut adalah:

- a) Kompetensi yang berbeda (*distinctive competence*). Misalnya, pemasaran dan pembayaran secara online.

- b) Ruang lingkup (*scope*)
- c) Distribusi Sumber Daya (*resource deployment*)

Tipe-Tipe Strategi

Menurut Rangkuti (2008) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga - tipe strategi yaitu, strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.

a). Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya.

b). Strategi Investasi

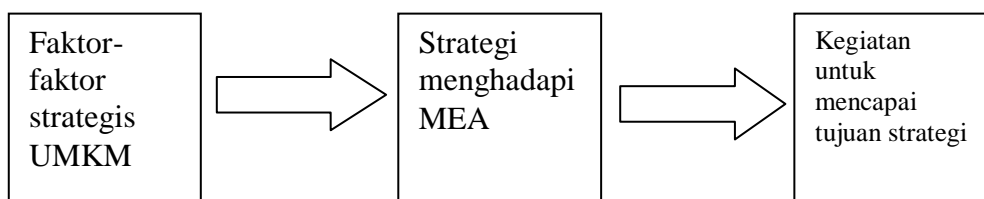
Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.

c). Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi- strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang diajukan adalah :

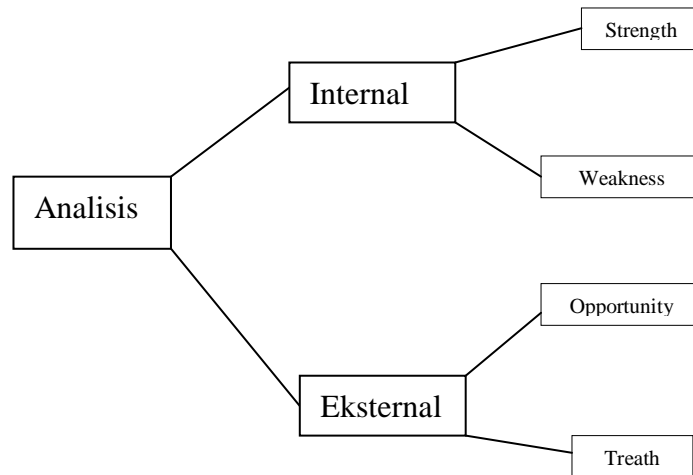


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif diskriptif dengan menganalisis strategi UMKM dalam menghadapi MEA. Penelitian ini merupakan survei pada lima klaster UMKM unggulan di Kota Semarang yaitu klaster batik, klaster pengolahan pangan, klaster *handycraft*, klaster pariwisata dan klaster bandeng. Populasi penelitian ini terdiri dari para pengusaha UMKM yang tergabung pada klaster di kota Semarang. Pemilihan kota Semarang sebagai lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek rencana pembangunan ekonomi khususnya bidang perdagangan. Berdasarkan aspek tersebut, maka diharapkan potensi yang ada mampu ditingkatkan kinerjanya sehingga dapat bersaing di era pasar bebas MEA. Penentuan sampel pengusaha UMKM dilakukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan aspek homogenitas dan kondisi riil klaster UMKM di Kota Semarang. Jumlah sampel pengusaha sebanyak 100 orang dengan tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah sebanyak 78%. Dipilihnya pengusaha tersebut, karena akan dimanfaatkan untuk mengetahui strategi yang tepat bagi para pengusaha yang bersangkutan agar mampu bersaing di era pasar bebas MEA.

Tahapan Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi faktor-faktor strategis dalam menghadapi MEA (2) faktor-faktor tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan total skor faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan model Internal-Eksternal Matrik. Atribut-atribut yang digunakan dalam questioner didapatkan dari persepsi pengusaha UMKM, dimana secara umum meliputi atribut kondisi internal dan eksternal UMKM. Dengan bagan alir, alur analisis dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini

Gambar 1. Analisis Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal dari penelitian ini adalah melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan para pengusaha UMKM untuk mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman mengenai faktor-faktor strategis yang ada pada kluster UMKM. Selanjutnya dengan bantuan kuesioner dikumpulkan data primer melalui wawancara dengan pengusaha UMKM.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan penelitian dianalisis secara diskriptif dengan menggunakan model Internal-Eksternal Matrik. Analisis data secara diskriptif untuk menggambarkan bagaimana strategi UMKM dalam menghadapi pasar bebas MEA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Strategi Internal dan Eksternal

Dari perolehan hasil penelitian faktor strategi internal terdiri dari:

Kekuatan:

1. Sudah terbentuk kluster
2. Mampu menciptakan inovasi produk/ jasa
3. Mudah mendapatkan informasi tentang pasar

4. Mampu menjalin hubungan dengan pemerintah
5. Mampu menyelenggarakan pelatihan
6. Mudah memperoleh ijin usaha
7. Mampu mengikuti pameran yang berskala nasional maupun internasional

Kelemahan:

1. Masa kadaluarsa produk sangat pendek
2. Bahan baku tergantung pihak lain
3. Tenaga kerja belum banyak
4. Tingkat pengetahuan rendah
5. Belum mampu bersaing di pasar global
6. Tenaga kerja belum mampu memanfaatkan teknologi baru
7. Belum ada manajemen usaha yang baik
8. Belum mampu berbahasa asing dengan baik

Sedangkan faktor strategi eksternal terdiri dari:

Peluang:

1. Tersedia teknologi digital
2. Tersedia area perdagangan bebas
3. Tersedia pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha
4. Pemasaran secara online
5. Mudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah
6. Ada kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan rekan bisnis
7. Ada kesempatan memperoleh sertifikasi
8. Tersedia kerjasama dengan CSR

Ancaman:

1. Produk import lebih murah
2. Harga pesaing lebih murah
3. Pasar modal bebas
4. Kualitas produk pesaing lebih bagus

5. Harga bahan baku tidak stabil
6. Upah tenaga kerja mahal

Setelah faktor strategi internal dan eksternal diperoleh, selanjutnya masing-masing faktor diberi bobot mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Setelah pembobotan selesai selanjutnya dilakukan pemberian nilai rating dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi UMKM. Nilai rating untuk kekuatan dan peluang bersifat positif. Semakin besar kekuatan dan peluang diberi rating +4, semakin kecil diberi rating +1. Sedangkan untuk nilai rating kelemahan dan ancaman apabila nilainya sangat besar, ratingnya adalah 1 sebaliknya jika nilai kelemahan dan ancamannya sedikit ratingnya 4. Menurut Rangkuti (2008) pemberian bobot didasarkan pada keunggulan relatif terhadap pesaing utama. Sedangkan rating di dasarkan pada kemampuan UMKM dimasa yang akan datang.

Nilai bobot dan rating dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Internal Strategic Faktor Analysis Summary (IFAS)

Factor Strategik Internal	Bobot	Rating	Skor Pembobotan
Kekuatan:			
1. Sudah terbentuk klaster	0,08	3	0,24
2. Mampu menciptakan inovasi produk/ jasa	0,07	4	0,28
3. Mudah mendapatkan informasi tentang pasar	0,07	3	0,21
4. Mampu menjalin hubungan dengan pemerintah	0,08	3	0,24
5. Mampu menyelenggarakan pelatihan	0,07	3	0,21
6. Mudah memperoleh ijin usaha	0,07	3	0,21
7. Mampu mengikuti pameran yang berskala nasional maupun internasional	0,06	3	0,18
Kelemahan:			
1. Masa kadaluarsa produk sangat pendek	0,06	2	0,12

2. Bahan baku tergantung pihak lain	0,06	2	0,12
3. Tenaga kerja belum banyak	0,06	2	0,12
4. Tingkat pengetahuan rendah	0,07	3	0,21
5. Belum mampu bersaing di pasar global	0,07	2	0,14
6. Tenaga kerja belum mampu memanfaatkan teknologi baru	0,06	2	0,12
7. Belum ada manajemen usaha yang baik	0,06	2	0,12
8. Belum mampu berbahasa asing dengan baik	0,06	2	0,12
Total Skor Pembobotan	1,00		2,64

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel IFAS dapat diketahui bahwa UMKM memiliki keunggulan relatif terhadap pesaingnya terutama dalam hal terbentuknya klaster dan mampu menjalin hubungan dengan pemerintah. Hal ini secara riil memang klaster di kota Semarang telah terbentuk dan menjadi anggota *Forum for Development and Employment Promotion* (FEDEP) yang merupakan organisasi yang di fasilitasi oleh pemerintah kota Semarang.

Setelah faktor-faktor strategis internal kemudian dianalisis faktor-faktor strategis eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Hasilnya tampak pada tabel berikut.

Tabel 3. Eksternal Strategic Faktor Analysis Summary (EFAS)

Factor Strategik Eksternal	Bobot	Rating	Skor Pembobotan
Peluang:			
1. Tersedia teknologi digital	0,06	4	0,24
2. Tersedia area perdagangan bebas	0,07	4	0,28
3. Tersedia pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha	0,06	3	0,18
4. Pemasaran secara online	0,07	3	0,21
5. Mudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah	0,06	3	0,18
6. Ada kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan rekan bisnis	0,06	3	0,18
7. Ada kesempatan memperoleh sertifikasi	0,05	4	0,2
8. Tersedia kerjasama dengan CSR	0,06	3	0,18
Ancaman:			
1. Produk import lebih murah	0,09	2	0,34
2. Harga pesaing lebih murah	0,09	2	0,36
3. Pasar modal bebas	0,09	1	0,17
4. Kualitas produk pesaing lebih bagus	0,08	2	0,32
5. Harga bahan baku tidak stabil	0,08	2	0,32
6. Upah tenaga kerja mahal	0,08	1	0,16
	1,00		
Total Skor Pembobotan			3,32

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel EFAS, area perdagangan bebas dan pemasaran secara *online* merupakan peluang besar dari UMKM dalam era MEA. Disisi lain ancaman terbesar terhadap UMKM adalah kualitas produk pesaing yang lebih bagus, harga bahan baku yang tidak stabil dan

upah tenaga kerja mahal. Untuk menangkap peluang dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki UMKM, maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usaha dan memperluas pangsa pasar. Disisi lain untuk menghindari ancaman dengan kekuatan yang dimiliki UMKM, maka UMKM dapat menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan *business plan* untuk meningkatkan usaha dan kualitas produk serta menekan biaya agar lebih efisien. Selain itu kempuan dalam berbahasa asing khususnya bahasa Inggris perlu ditingkatkan.

Strategi Menghadapi MEA bagi UMKM

Dengan menggunakan model Internal – Eksternal Matrik dapat ditentukan posisi perusahaan dan strategi yang digunakan dalam menghadapi era MEA. Menurut Wheelen, 1995; Rangkuti, 2008 penentuan posisi perusahaan didasarkan pada analisis total skor faktor internal dan faktor eksternal, dengan menggunakan Internal-Eksternal Matrik.

Temuan dilapangan menunjukkan Internal – Eksternal Matrik, dengan nilai total skor IFAS= 2,64 dan EFAS= 3,32. Dengan demikian strategi yang sesuai dengan UMKM di kota Semarang adalah *growth* atau pertumbuhan. Artinya UMKM dapat melakukan pertumbuhan baik dalam penjualan, asset, profit atau kombinasi dari penjualan, asset dan profit. Untuk meningkatkan penjualan UMKM harus dapat mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Disamping itu juga dalam penentuan harga harus dapat bersaing dengan produk luar negeri maupun import. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya sehingga dapat meningkatkan profit. Hal ini merupakan strategi terpenting karena UMKM berada dalam posisi pertumbuhan dan pada kondisi persaingan yang sangat kompetitif. Dengan demikian pangsa pasar diharapkan dapat meningkat. Apabila perusahaan belum mendapatkan profit dari produksi dengan skala besar, maka akan mengalami kekalahan dalam bersaing. Oleh karena itu UMKM dapat memfokuskan diri pada pasar tertentu yang menguntungkan.

Selain strategi pertumbuhan, UMKM dapat melakukan strategi konsentrasi melalui integrasi horisontal. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas pasar, meningkatkan produksi maupun teknologi melalui pengembangan internal maupun eksternal dengan memperkuat sumberdayanya sendiri maupun eksternal melalui kerjasama dengan dengan sesama anggota klaster dan UMKM lainnya yang sejenis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Faktor-faktor strategis yang ada pada UMKM meliputi faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman terhadap UMKM dalam menhadapi era MEA
- 2). Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi MEA bagi UMKM adalah strategi pertumbuhan melalui integrasi horisontal
- 3). Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan strategi UMKM dalam menghadapi MEA adalah:
 - a). Meningkatkan penjualan
 - b). Memperkuat sumber daya
 - c). Menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan *business plan* dan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan penjualan, UMKM harus dapat mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Disamping itu juga dalam penentuan harga harus dapat bersaing dengan produk luar negeri maupun import, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya sehingga dapat meningkatkan profit.
2. Memperkuat sumberdayanya sendiri maupun eksternal melalui kerjasama dengan dengan sesama anggota klastter dan UMKM lainnya yang sejenis.
3. UMKM dapat menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan *business plan* untuk meningkatkan usaha dan kualitas produk serta menekan biaya agar lebih efisien. Selain itu kemampuan dalam berbahasa asing khususnya bahasa Inggris perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Arisandy, Yuni, (2015), Kesiapan Koperasi-UKM Indonesia menatap era MEA, <http://id.stie-stmy.ac.id/berita-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-me>, diakses 16 Juni 2015.
- Argyris, (1985), *Strategy Change and Defensive Routines* Marshfield, MA: Pitman Pub.
- Carole, Maurel, (2016), Determinants of Export Performance French Wine SMEs, Report Information from ProQuest, Proquest Documentlink.
- Fritsch, D.J. and Storey, M, (2014), Entrepreneurship in a Regional Context: Historical Roots, Recent Developments and Future Challenges, *Regional Studies*, Vol. 48 No. 6, pp.939-954.
- Iksan, (2009), *Manajemen Strategis Dalam Kompetisi Pasar Global*. Jakarta: Gaung Persada, Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 Learned, Cristensen. 1965, *Business Policy: Text and Cases*, Homewood: Richard D. Irwin
- Mazzarol,T., Volery, T., Doss, N. And Thein, V, (1999), Factors Influencing Small Business, Start - Ups: A Comparison with Previous Research. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*. Vol. 5 No. 2, pp.48-63.
- Paul, Taylor, (2013), The Effect of Entrepreneurial Orientatin on The Internationalization of SMEs in developing countries, *African Journal of Bussiness Management* 7.9: 1927-1937.
- Paulus Wardoyo, (1998), *Manajemen Strategik: Konsep, Analisis, Formulasi, dan Implementasi*, BP-UNDIP.
- Porter, Michael E, (1985), *Competitive Advantage: Ceating and Sustaining Superior Performance*, New York: The Free Press.
- Rahmana, Arief, (2008), *Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah*, (online), (<http://infoukm.wordpress.com>, diakses 16 Juni 2015).
- Rangkuti, Freddy, (2008), *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta
- Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Sule , Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, (2008), *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Wheelen, (1995), *Strategic Management and Business Policy*, 5 Ed, NY: Addison – Wesley Publishing Company.

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANJERIAL, PROFITABILITAS,
UKURAN PERUSAHAAN DAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Studi pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada Tahun 2012-2015)**

Denny Nor Rohman, Titiek Suwarti

Surel: denny.nurrohman@gmail.com
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan laporan keuangannya secara lengkap pada tahun 2012 -201. Dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 64 perusahaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan, variabel Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan variabel Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Kata kunci: *Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), Nilai Perusahaan*

Pendahuluan

Perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah memperoleh laba secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sementara tujuan utama jangka panjang adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai untuk mengukur tingkat kualitas perusahaan dan sebuah nilai yang menerangkan seberapa besar tingkat kepentingan sebuah perusahaan di mata pelanggannya. Nilai perusahaan dapat tercermin pada nilai pada saham yang dimiliki perusahaan (Rahayu, 2010).

Nilai perusahaan mencerminkan hasil dari kinerja perusahaan tersebut dalam satu periode. Nilai perusahaan merupakan nilai gabungan dari nilai pasar saham yang diterbitkan dan nilai pasar hutang perusahaan, dengan asumsi jika nilai hutang konstan maka secara

langsung peningkatan nilai saham akan meningkatkan nilai perusahaan (Dewi dkk, 2014). Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Price Book Value*. *Price Book Value* (PBV) yaitu rasio perbandingan harga saham dan nilai buku (*book value*) suatu perusahaan yang mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham dan Houston 2013:11).

Faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dapat berupa faktor keuangan maupun non keuangan. Faktor keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Menurut peneliti bahwa faktor keuangan yang mempengaruhi nilai perusahaan yang sudah disebutkan di atas perlu untuk diungkapkan kembali, karena masih banyak ketidakcocokan (Gap) antara hasil suatu penelitian dibanding dengan penelitian lain. Sedangkan faktor non keuangan yang digunakan adalah *corporate social responsibility* (CSR).

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sekaligus menjadi pemegang saham, jika manajer memiliki saham diperusahaan maka dapat mempengaruhi dan mengurangi masalah yang timbul antara manajerial (agen) dan principal (pemegang saham). Jika kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang sama maka dapat diyakini bahwa nilai perusahaan dapat maksimum.

Penelitian Nurlala dan Islahudin (2008) memperoleh hasil yang signifikan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel kepemilikan manajerial. Sementara penelitian yang dilakukan Laster dan Faccio (1999) mendapatkan hasil kepemilikan manajemen memiliki hubungan yang lemah dengan nilai perusahaan dan penelitian yang dilakukan Lemons dan Lins (2001), Lins (2002) dan Siallagan dan Mahfoedz (2006) yang mendapatkan hasil bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dengan arah hubungan yang negatif, artinya semakin meningkatnya persentase kepemilikan manajerial maka nilai perusahaan akan menurun.

Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010:122). Selain itu, Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik

para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan *return on assets* (ROA), karena kemampuan alat analisa tersebut untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan atau disebut juga dengan *earning power* karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih dan Wirajaya (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Maf'ulah (2014) menyatakan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah negatif signifikan.

Ukuran perusahaan juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan untuk dipercaya oleh kreditur dalam memperoleh sumber dana yang besar baik bersifat internal maupun eksternal (Pramana dan Mustanda, 2016). Sumber dana tersebut, nantinya akan digunakan untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan. Selain itu dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka akan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil dalam hal pengembalian dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Mustada (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Languju, Mangatar, dan Tasik (2016) yang menyatakan, bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor non keuangan juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor sosial juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu *corporate social responsibility*. Dalam era globalisasi ini, suatu perusahaan dituntut untuk sadar dengan *sustainability* perusahaan dalam jangka panjang selain mengutamakan pencapaian *profitability*. Dimana perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemangku kepentingan perusahaan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Untuk menyikapi hal tersebut, maka

program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan mampu menjadi strategi perusahaan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*.

Pelaksanaan masalah CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 pasal 74 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang mengatur pelaksanaan CSR adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai tata kelola perusahaan dimana di dalamnya juga termasuk uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan (Kusumayanti dan Astika, 2016). Namun, tidak ada pasal yang mengatur tentang luas pengungkapan yang menjelaskan mengenai item CSR yang seharusnya dilaporkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan 79 item yang diungkapkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai pedoman pengungkapan tanggung jawab sosial yang wajib dipenuhi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana, Juliarsa dan Sari (2013) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Sudarma dan Purnomosidhi (2015) menyatakan bahwa pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan adalah negatif signifikan.

Hasil penelitian tersebut menimbulkan ketidakcocokan (GAP), untuk itu penulis ingin membuktikan kembali variabel Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Alasan digunakannya variabel ini karena masih .

Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang peneliti angkat adalah

1. Bagaimanakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

2. Bagaimanakah profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
3. Bagaimanakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
4. Bagaimanakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Kajian Pustaka

Teori Agensi

Agency Theory mendeskripsikan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan semua tugas yang telah diberikan kepada pemegang saham.

Dalam hubungan keagenan dimungkinkan terjadinya konflik antara prinsipal dan agen. Konflik dapat disebabkan karena agen tidak bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal sehingga hal ini dapat memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan, yang mana pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya menjalankan perusahaan (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Siagian, 2011).

Signalling Theory

Teori sinyal merupakan suatu pengumuman yang dipublikasikan agar memberikan sinyal bagi penanam modal untuk mengambil keputusan berinvestasi (Jogiyanto, 2013). Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan akan menjadi berita baik dan buruk di pasar modal, dimana keuntungan akan memberikan sinyal positif yang akan menarik

investor begitu pula sebaliknya. Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang mempunyai nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah. Perusahaan yang *profitable* memberikan sinyal tentang perusahaannya yang relatif tidak mudah mengalami kebangkrutan. Optimisme perusahaan akan prospek yang lebih baik dimasa depan ini akan ditunjukkan dengan peningkatan harga saham.

Teori sinyal mengemukakan tentang dorongan perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal (Hassan, 2008). Asimetri informasi yang dimiliki oleh pihak internal dan eksternal perusahaan mendorong perusahaan untuk mempublikasikan informasi yang dimiliki. Teori sinyal juga memberikan pengaruh keputusan terhadap para investor untuk mengetahui perbedaan perusahaan yang berkualitas baik atau berkualitas buruk. Dengan perusahaan yang berkualitas baik, maka investor tidak akan segan menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut.

Legitimacy Theory

Dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan perusahaan dimasa yang akan datang (*going concern*), faktor lingkungan masyarakat dimana perusahaan tersebut didirikan merupakan elemen penting bagi perusahaan. Sebuah tata kelola perusahaan sangat membutuhkan dukungan masyarakat yang terjalin kondusif supaya perusahaan dapat beroperasi dengan tenang. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan memiliki perjanjian dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan dengan batas dan nilai keseimbangan (Deegan, 2012).

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi hanya bisa bertahan apabila masyarakat dimana organisasi tersebut berada, merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sama dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila

perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. (Kusumadilaga, 2010).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan suatu keadaan dimana manajemen perusahaan juga menjadi pemilik dari perusahaan dengan kata lain manajemen mempunyai kepemilikan terhadap saham perusahaan. Terjadinya peningkatan persentase kepemilikan manajerial dalam perusahaan menjadikan manajemen akan mengambil kebijakan yang akan menguntungkan perusahaan dalam segi meningkatkan *image* perusahaan (Apriwenni, 2009). Menurut teori keagenan, dalam menjalankan perusahaan akan muncul permasalahan keagenan karena adanya proses pengelolaan dan pemisahan kepemilikan. Konflik ini terjadi akibat dari perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Kepemilikan saham oleh manajer dapat dijadikan solusi dari masalah keagenan yang terjadi sehingga kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham dapat menjadi sejajar. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan mengambil keputusan maupun kebijakan yang akan meningkatkan nilai perusahaan karena kesejahteraan dari pemegang saham diperoleh pada saat nilai perusahaan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih dan Dhamayanti (2016) yang menunjukkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu diatas, maka diajukan hipotesis mengenai pengaruh profitabilitas:

H₁ :Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Manajemen perusahaan akan selalu berupaya meningkatkan profitabilitas demi kesejahteraan pemegang saham dan para pemilik perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan deviden, sehingga akan membuat investor

tertarik untuk menanamkan modalnya. Kondisi ini akan membuat investor menjadikan tolak ukur nilai perusahaan sebagai dasar untuk berinvestasi.

Investor yang jeli akan menanamkan saham pada sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat kinerja keuangan yang baik. Berdasarkan teori sinyal, tingkat profitabilitas menunjukkan tingkat kualitas perusahaan. Kualitas dari perusahaan inilah yang akan menjadikan sinyal positif bagi para investor untuk menanamkan sahamnya. Sehingga semakin tinggi profitabilitas akan semakin tinggi pula respon sinyal positif dari pasar, dan nilai perusahaan akan meningkat pula.

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aktiva perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik (Prasetyorini, 2013).

Dengan pertumbuhan perusahaan yang baik, maka akan mempermudah perusahaan untuk masuk ke pasar modal, sehingga nantinya akan memberikan sinyal yang positif bagi para investor. Sesuai dengan teori sinyal, suatu pengumuman atau informasi yang positif akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Dengan ukuran perusahaan (pertumbuhan) yang besar maka akan memberikan sinyal positif bagi para investor sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya praktik *corporate social responsibility* yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Rika dan Islahuddin, 2008). Legitimacy theory mengatakan bahwa perusahaan juga memiliki perjanjian dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan

operasi berdasarkan batas dan nilai keseimbangan yang ada dimasyarakat maupun perusahaan.

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk pertanggungjawaban yang berupa informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan mengenai tanggung jawab perusahaan atas kegiatan operasi perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tanggung jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen perusahaan atau duniabisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Priyanto, 2008). Teori sinyal juga mengemukakan bahwa perusahaan memberikan informasi kepada masyarakat, informasi tersebut akan mempengaruhi para investor untuk bisa menilai perusahaan yang baik dan buruk.

Pendapat ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosiana, Juliarsa dan Sari (2013) yang menunjukkan *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu diatas, maka diajukan hipotesis mengenai pengaruh *corporate social responsibility*:

H4: *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

Metode Penelitian

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria: menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah selama periode tahun 2012-2015. Memiliki data lengkap mengenai kepemilikan manjerial profitabilitas, ukuran perusahaan, *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan selama data pengamatan. Perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian ini sebanyak 64 perusahaan.

Teknik Analisis

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Adapun bentuk persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$PBV = \beta_0 + \beta_1 KM + \beta_2 ROA + \beta_3 UP + \beta_4 CSR + \varepsilon$$

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2016).

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
KM	62	.00	.72	.0757	.16001
ROA	62	.01	.32	.0778	.06467
UP	62	20.24	30.83	28.1570	2.30644
CSR	62	.01	.27	.0998	.05817
NP	62	.00	5.73	1.6464	1.53163
Valid N	62				

Sumber : Data skundair yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dengan jumlah sampel 62 perusahaann, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,72, nilai mean sebesar 0,0757 dan standar deviasi sebesar 0,16001.. Variabel profitabilitas : nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 0,32, nilai mean sebesar0,0778 dan standar deviasi sebesar 0,06467. Variabel ukuran perusahaan : nilai minimum sebesar 20,24, nilai maksimum sebesar 30,83, nilai mean sebesar28,1570 dan standar deviasi sebesar 2,30644.. sedangkan variabel *corporate social responsibility* nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 0,27, nilai mean sebesar 0,998 dan standart deviasi 0,5817. Dan variabel nilai perusahaannilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 5,73, nilai mean sebesar1.6464 dan standart deviasi 1,53163.

Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Tabel 2 Output uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Normalitas	Skewnes = .377 Z Skewnes = 1.212	Kurtosis = .427 Z Kurtosis = .686
Multikolonieritas		Heterokedastisitas
	Tolerance	VIF
KM	.916	1.091
ROA	.968	1.033
UP	.915	1.093
CSR	.878	1.139
Autokorelasi	Durbin Watson	
		2.092

Sumber : Data skundair yang diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, hal itu dilihat dari nilai skewnes 1.212 dan kurtosis 0.686. Disamping itu dari uji asumsi klasik terlihat bahwa data

bebas dari multikol karena nilai Tolerance dibawah 1 dan nilai VIF diatas 1 dibawah 10. Data juga bebas dari autokorelasi yang ditunjukkan dari nilai Durbin Watson 2.092 dan juga terhindar dari hetero karena nilai si masing-masing variabel diatas 0.05.

Uji Model Penelitian dan Hipotesis

Tabel 3 Ouput Regresi

Koefisien Determinasi	Adjusted R Square = .160	
Anova	F = 3.894	Sig .007
	B	Sig
Contant	6.251	.008
KM	-3.422	.005
ROA	6.129	.034
UP	-.170	.042
CSR	-.396	.905

Sumber : data skundair yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemampuan menjelaskan variabel Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan CSR terhadap nilai perusahaan kecil, hal tersebut terlihat dari nilai *Adjusted R²* sebesar 0,160 . Namun demikian model penelitian ini fit, hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 3,894 dengan nilai probabilitas sebesar 0,007 angka tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* yaitu secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Uji Regresi Linier Berganda

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan matematis regresi linear berganda yaitu:

$$PBV = 6,251 - 3,422 KM + 6,129 ROA - 0,170 UP - 0,396 CSR + \varepsilon$$

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manjerial dalam penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini tidak menerima hipotesis 1 yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusaha.

Pada penelitian ini, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.. Hal ini dikarenakan belum banyak pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang cukup signifikan. Jumlah kepemilikan manajerial yang

rendah menyebabkan pihak manajemen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan perusahaan. Jumlah kepemilikan saham yang belum signifikan tersebut menyebabkan manajer lebih mementingkan tujuannya sebagai seorang manajer daripada sebagai pemegang saham.

Rendahnya saham yang dimiliki oleh manajemen mengakibatkan pihak manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan, karena tidak semua keuntungan yang di dapat perusahaan dapat dinikmati oleh manajemen, yang menyebabkan pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan utilitasnya sehingga merugikan pemegang saham. Selain itu dengan rendahnya kepemilikan saham oleh manajemen membuat kinerja manajemen juga cenderung rendah sehingga tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan manajerial belum mampu menjadi mekanisme untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa semakin tinggi struktur kepemilikan oleh pihak manajemen maka semakin berkurang *agency problem* karena semakin selarasnya kepentingan antara manajer dan pemilik yang sebagian besar adalah manajemen sendiri sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. tetapi Ross et al (1999) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Pawestri (2006) yang menunjukkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Sukirni (2012) menemukan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas dalam penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menerima hipotesis H₂ yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Profitabilitas yang tinggi dapat mengakibatkan nilai perusahaan menjadi naik, karena profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan memberikan sinyal positif, Sinyal positif nantinya akan diterima oleh para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pramana dan Mustada (2016) dan Purwaningsih dan Wirajaya (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan dan Maf'ulah (2014) dan Ratih dan Damayanthi (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini tidak menerima hipotesis H_3 yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Bertumbuhnya perusahaan tidak selalu membuat nilai perusahaan menjadi naik, karena didalam perusahaan akan terjadi depresiasi terhadap aktiva perusahaan seiring penggunaannya secara terus menerus yang berakibat menurunnya aktiva perusahaan, para investor melihat terjadinya depresiasi tersebut membuat mereka berfikir kembali untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut karena hal itu dapat menyebabkan jaminan para investor dalam menanamkan modalnya sangat kecil , sehingga hal tersebut mempengaruhi turunnya nilai perusahaan. Alasan ini juga sesuai dengan teori sinyal yang memberikan informasi kepada investor melalui laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan, investor tidak hanya melihat dari pertumbuhan perusahaan tersebut, mereka juga melihat dari aspek depresiasi yang terjadi di perusahaan tersebut, sehingga bertumbuhnya perusahaan tidak selalu meningkatkan nilai perusahaan tetapi juga bisa menurunkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak konsistendengan penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Mustada (2016) dan Prasetyorini (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati, Nurdin dan Bidin (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh CSRTerhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini tidak menerima hipotesis H₄ yang menyebutkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan mempunyai perjanjian dengan masyarakat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, pernyataan ini sesuai dengan teori legitimacy, masih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dan walaupun perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya yang diberikan kepada masyarakat luas itu hanya kecil sekali, sehingga tidak mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat, karena kebanyakan perusahaan tidak mau mengeluarkan uang hanya untuk keperluan yang tidak perlu seperti pengungkapan CSR. Di ungkapkan maupun tidak diungkapkan CSR tidak akan mempunyai pengaruh besar terhadap nilai perusahaan, belum tentu perusahaan mau mengungkapkan CSR terhadap masyarakat, para investor dalam menanamkan modalnya tidak begitu memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena investor hanya melihat perusahaan itu bisa menguntungkan dia pribadi atau tidak. Menurut Descriptive Statistic diperoleh hasil mean 0,0998 berarti dapat disimpulkan bahwa rata rata yang mengungkapkan CSR masih sangat kecil sekali yaitu 9% jadi tidak ada pengaruh lebih terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana, Juliarsa dan Sari (2013) yang menunjukkan corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan putri, sudarma dan purnomosidhi (2015) yang menunjukkan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- b. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- c. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- d. *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. .

Keterbatasan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini dihasilkan nilai Adjusted R square menunjukkan perolehan sebesar 0,160 ini berarti variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 16,00 %. Hal ini menunjukkan masih ada banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
- b. Perilaku data yang cenderung tidak normal sehingga banyak data yang terbuang dan daya prediksi yang kurang maksimal.

Implikasi

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan pertimbangan yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, antara lain:

- a. Menambah variabel bebas lain, karena masih banyak variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi Nilai perusahaan dan agar mendapatkan hasil yang lebih dalam mengenai pengaruh Nilai Perusahaan.
- b. Bagi perusahaan yang bersangkutan sebaiknya mentaati peraturan pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah diatur pada Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan cara melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan memenuhi item – item yang telah dipaparkan secara resmi dalam *Global Reporting Inovation (GRI)*.

Daftar Pustaka

- Agnes, Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (2004).
- Agustina, Silvia, (2013), “Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).*Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Apriada dan Suardhika, (2016), “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Struktur Modal dan Profitabilitas pada Nilai Perusahaan” *E-Journal Ekonomi* ISSN: 2337-3067.

Apriwenni, Prima, (2009), "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Laporan Tahunan Perusahaan Untuk Industri Manufaktur Tahun 2008", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 6 (1), April (2009).

Boediono, Gideon, (2005), "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur", *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII*, Solo, (2005)

Brigham, Eugene dan Houston Joel. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga (2007)

Brine, Matthew, et al., (2008), "Corporate social responsibility and financial performance in the Australian context", n.p, <http://www.treasury.gov.au>.

Bulan dan Astika. (2014). "Moderasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Nilai Perusahaan". *Jurnal. E-Journal Akuntansi* ISSN: 2302-8556.

Cheng, Ming Chang. & Tzeng, Zuwei Ching. (2011). "The Effect of Leverage on Firm Value and How The Firm Financial Quality Influence on This Effect". *World Journal of Management*. 3(2): 30-53

Deegan, Bahtiar., Uzliawati, Lia., Yulianto, Agus Sholikhhan. (2012). "Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Listing Di BEI Tahun 2008-2011". *Simposium nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin. 20-23 September (2012)

Dewi dan Wirajaya, (2013). "Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan pada Nilai Perusahaan. *Jurnal. E-Journal Akuntansi*, ISSN: 2302-8556.

Dewi, Inggı Rovita, Siti Ragil Handayani dan Nila Firdausi Nuzula, (2014), "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2009 - 2012)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol.17, No.1 Desember 2014.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, (2016)

Hassan, M. Che Haat, et al., (2008), "Corporate governance, transparency and performance of Malaysian companies", *Managerial Auditing Journal*, 23(8), pp: 744-778

Hermawan dan Maf'ulah, (.2014). "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Pemoderasi", *Jurnal. E-Journal Akuntansi* ISSN: 2085-4227.

Hermuningsih, Sri, (2013). "Profitability, Growth Opportunity, Capital Structure and The Firm Value". *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*.

Indriantoro, Nur dan B. Supomo. (1999). *Metode Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.

Jensen and Meckling. (1976). "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Finance Economics*. Vol. 3, October, pp. 30-60

Jogiyanto,. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi ketujuh .Yogyakarta : BPFE, (2013)

Kodongo, Odongo. Maina, Leonard. and Mokoteli, Mokoaleli Thabang, (2014), "Capital structure, profitability and Firm Value: panel evidence of listed firms in Kenya", *Munich Personal RePEc Archive*. No 57116

Kusumadilaga, Rimba, (2010). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”, *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*

Kusumayanti dan Astika, (2016), “*Corporate Social Responsibility* sebagai Pemediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage pada Nilai Perusahaan”, *E-Jurnal Akuntansi* ISSN: 2302-8556.

Moniaga, Fernandes, (2013), “Struktur Modal, Profitabilitas dan Struktur Biaya Terhadap Nilai Perusahaan Industri Keramik, Porcelen dan Kaca Periode 2007-2011”, *Jurnal Emba* ISSN: 2303-1174 Fernandes

Muliani, Yuniarta, dan Sinarwati, (2014), “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi”, *E-Journal Akuntansi* Universitas Pendidikan Ganesha.

Muryati dan Suardhika, (2014), “Pengaruh *Corporate Governance* Pada Nilai Perusahaan”, *E-Journal Akuntansi* ISSN: 2302-8556.

Naceur, Samy Ben, and Goaid, Mohamed, (2002), “The relationship between dividend policy, financial structure, profitability and firm value”, *Applied Financial Economics*. 12: 843-849

Languju, Mangatar, dan Tasik, (2016), “Pengaruh *Return On Equity*, Ukuran Perusahaan, *Price Earning Ratio* Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Berkalla Ilmiah Efisiensi*.

Permatasari, H.D, (2014), “Pengaruh *Leverage*, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)”, Studi pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2010-2012. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pramana dan Mustada, (2016), “Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel pemoderasi”, *Jurnal Ekonomi*. ISSN: 2302-8912

Prasetya, Tommy, dan Saerang, (2014), “Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Terdaftar di BEI”, *Jurnal. Ekonomi* ISSN: 2303-1174

Prasetyorini, Bektif, (2013), “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, *Price Earning Ratio* dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*.

Prastuti dan Budiasih, (2015), “Pengaruh *Good Corporate Governance* Pada Nilai Perusahaan Dengan Moderasi *Corporate Social Responsibility*”, *E-Journal Akuntansi* ISSN: 2303-1018.

Purwaningsih dan Wirajaya, (2014), “Pengaruh Kinerja Pada Nilai Perusahaan Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Pemoderasi”, *E-Journal Akuntansi* ISSN: 2302-8556.

Rahayu, Sri, (2010), *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Rahmawati, Nurdin dan Bidin, (2015), “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, *ISSNONLINE*: 2443-3578

Ratih dan Damayanthi, (2016), “Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas Pada Nilai Profitabilitas Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Sebagai Variabel Pemoderasi”, *E-Journal Akuntansi* ISSN: 2302-8556.

Retno, Reny, Dyah dan Denies Priantinah, (2012), “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Ekonomi*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Saidi, (2004), “Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur go public di BEJ tahun 1997-2002”, Dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 11(1):h: 44-58.

Sari dan Adriana, (2014), “Pengaruh Broad Size Terhadap Nilai Perusahaan”, *E-Journal Akuntansi* ISSN: 2302.8556

Sartono, Agus, (2010), *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi ke 4. Yogyakarta: BPFE.

Solihin, Ismail, (2008},” *Corporate Social Responsibility, From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudana, I Made, (2009), *Manajemen Keuangan : Teori dan Praktek*, Surabaya: Airlangga University Press

Sukma Mindra dan Teguh Erawati, (2014), “Pengaruh Earning Per Share (EPS), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 2.

Sukirni Dwi, (2012), “Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden dan Kebijakan Hutang Aalisis Terhadap Nilai Perusahaan”, Universitas Negeri Semarang.

Warapsari, A.A.A.U, Suaryana, I G.N.A, (2016), “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.3. ISSN:2302-8556

Wedayanthi dan Darmayanti, (2016) “Pengaruh Economic Value Added, Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Return on Assets Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal.E-Jurnal.ISSN : 2302-8912*

Wiagustini, Ni Luh Putu. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Denpasar: Udayana University Press, (2010)” ; *The WBCSD’s Journey*, (2002)

www.csr-indonesia.com

www.eco-business.com.

www.idx.co.id.

www.hukumonline.com

www.sindonews.com

www.wri.org

www.globalreporting.org

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI [PERIODE 2012-2015]

Anggana Lisiantara

Surel: anggalis@yahoo.co.id
Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang

ABSTRACT

The study examines the effect Profitability, Liquidity, Leverage, Company Size, Secure, Mature, and Auditor Reputation on Bond Rating. The population in this research is financing companies that issued the bond and listed in Indonesian Stock Exchange period 2012-2015. The sampling method used purposive sampling with the observation period from 2012 to 2015. Relationship and [or] influence between variable is described by using multiple regression analysis. The result of this study indicate that Liquidity and Company Size has negative effect on Bond Rating. Whereas Leverage, Mature, and Auditor Reputation has positive effect on Bond Rating, also Profitability and Secure has no effect on Bond Rating.

Keyword: *Bond Rating, Profitability, Liquidity, Leverage, Company Size, Secure, Mature, and Auditor Reputation*

Latar Belakang

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman [investor] dengan yang diberi pinjaman [emiten] dimana emiten memiliki kewajiban kepada investor untuk membayar bunga secara berkala dan kewajiban melunasi pokok hutang pada waktu yang ditentukan [Dewi, 2013]. Obligasi merupakan investasi yang sangat disukai oleh para investor karena memiliki pendapatan yang bersifat tetap dari pokok obligasi dan bunga yang diterima pada saat jatuh tempo. Obligasi lebih disukai perusahaan yang membutuhkan tambahan dana karena lebih mudah didapatkan. Investasi pada obligasi relatif lebih aman jika dibandingkan dengan investasi pada saham, karena pemegang obligasi memiliki hak pertama

atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan telah memiliki kontrak perjanjian untuk melunasi obligasi yang telah dibeli oleh pemegang obligasi [Sucipta dan Rahyuda, 2015].

Walaupun investasi obligasi relatif aman, obligasi merupakan suatu jenis investasi yang juga memiliki beberapa risiko bagi investor. Salah satu risiko yang dapat muncul adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi obligasi kepada investor atau dapat disebut dengan obligasi macet [Pandutama, 2012]. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk membeli obligasi, investor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang obligasi yang akan dibeli. Seorang pemilik modal yang berminat membeli obligasi, sudah seharusnya memperhatikan peringkat obligasi karena peringkat tersebut memberikan informasi dan memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan [Almilia dan Devi, 2007].

Dengan dilakukannya pemeringkatan oleh agen pemeringkat sekuritas utang yang independen maka akan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan penerbit obligasi [emiten] dengan investor. Selain itu *rating* dapat menjadi sumber informasi yang praktis, murah, dan mudah didapatkan daripada informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan emiten, pemeringkatan yang dilakukan oleh agen pemeringkat sekuritas utang yang independen dapat menjadi nilai tambah perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan investor [Setyawati, 2011].

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang sudah diinvestasikan. Investasi dalam bentuk obligasi secara langsung sebenarnya tidak terpengaruh oleh profitabilitas perusahaan, karena berapapun besarnya profit yang mampu dihasilkan oleh perusahaan, pemegang obligasi tetap menerima sebesar tingkat bunga yang telah ditentukan [Almilia dan Devi, 2007]. Akan tetapi dalam hubungannya dengan peringkat obligasi, profitabilitas merupakan variabel yang penting. Karena jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi, kemungkinan resiko perusahaan untuk tidak bisa membayar kewajibannya menjadi kecil yang artinya peringkat obligasi dari perusahaan tersebut akan menjadi tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widowati, dkk [2013] serta Dali, dkk [2015] yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Rachmawati [2015] dan Surya [2015] yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Salah satu alat yang dipakai untuk mengukur likuiditas adalah dengan menggunakan rasio lancar [*current ratio*]. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancarnya [Almilia dan Devi, 2007]. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga secara finansial akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucipta dan Rahyuda [2015] menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini bertentangan dengan Sari dan Badjra [2016] yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut Estiyanti dan Yasa [2012] likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukkan seberapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Jika rasio ini cukup tinggi, maka hal tersebut menunjukkan tingginya penggunaan utang, sehingga hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan biasanya memiliki risiko kebangkrutan yang cukup besar [Estiyanti dan Yasa, 2012].

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya [2015] yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Namun menurut Fauziah [2014], *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut Winardi [2013], *leverage* tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, penjualan dan ekuitas

[Dewi, 2013]. Semakin besar perusahaan maka kemungkinan semakin besar pula total aset yang dimiliki, artinya perusahaan yang besar cenderung bisa membayar kewajibannya dengan lancar dan akan meningkatkan peringkat obligasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfiani [2013] dan Surya [2015] dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Nurhidayati [2013] menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut Wijayanti dan Priyadi [2014] menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi.

Jaminan [*secure*] pada obligasi dibagi menjadi dua, yaitu *secured bond* dan *unsecured bond*. Jika obligasi dijamin dengan aset yang bernilai tinggi, akan memberikan rasa aman kepada para investor karena perusahaan dapat menyakinkan investor bahwa perusahaan dapat memenuhi pembayaran bunga dan pokok pinjaman dengan baik melalui aset yang dijamin tersebut, sehingga risiko gagal bayar yang akan dihadapi oleh investor akan berkurang [Widowati, dkk, 2013].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pandutama [2012] menyatakan bahwa jaminan [*secure*] berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut Verawaty, dkk [2015], jaminan [*secure*] tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat obligasi.

Umur obligasi [*maturity*] adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok pinjaman atau nilai nominal obligasi dan bunga periodik yang dimilikinya [Widowati, dkk, 2013]. Periode jatuh tempo umur obligasi sangat bervariasi dari 365 hari sampai dengan di atas lima tahun. Investor lebih suka dengan obligasi yang berumur pendek karena lebih mudah diprediksi, sedang obligasi yang berumur panjang akan meningkatkan resiko menjadi lebih tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Priyadi [2014] umur obligasi berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Menurut Setyawati [2011] umur obligasi berpengaruh

negatif sedangkan menurut Fauziah [2014], umur obligasi tidak memiliki pengaruh dalam peringkat obligasi.

Reputasi auditor menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan. Dengan reputasi auditor yang baik maka akan memberikan hasil audit yang dapat dipercaya [Alwi dan Nurhidayati, 2013].

Penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Nurhidayati [2013] serta Thamida dan Lukman [2013] secara kompak menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Devi [2007] serta Wijayanti dan Priyadi [2014] yang juga menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap reputasi auditor.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel independen yang mempengaruhi peringkat obligasi sangat bervariasi. Untuk itu penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi dengan menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, jaminan, umur obligasi, dan reputasi auditor. Populasi yang digunakan adalah perusahaan keuangan yang menerbitkan obligasi dan terdaftar di BEI periode 2012-2015 serta diperingkat oleh PEFINDO.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Sinyal

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi pada pihak eksternal [investor dan kreditor]. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antarperusahaan dan pihak eksternal [Dali, dkk, 2015]. Asimetri informasi muncul karena adanya salah satu pihak yang mempunyai informasi lebih baik, misalnya seorang manajer yang mengetahui informasi mengenai prospek perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan para investornya. Berkaitan dengan asimetri informasi, sangat sulit bagi para investor dan kreditor untuk membedakan antara perusahaan yang berkualitas tinggi dan rendah. Teori sinyal

mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal pada pengguna laporan keuangan [Wijayanti dan Priyadi, 2014].

2. Obligasi

Obligasi adalah surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Pihak peminjam menerbitkan [menjual] obligasi kepada pihak pemilik dana dengan imbalan sejumlah uang [bunga], jadi obligasi tersebut merupakan surat pernyataan utang dari pihak peminjam. Perjanjian tersebut mewajibkan penerbit obligasi untuk melakukan pembayaran tertentu kepada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan [Alwi dan Nurhidayati, 2013].

3. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun laba bagi modal sendiri. Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA [*return on asset*]. Profitabilitas ini dapat memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi juga dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk *going concern* dan memenuhi kewajiban [Mahfudhoh, 2014].

4. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas diukur dengan menggunakan CR [*current ratio*]. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aset lancar, yaitu aset yang mudah untuk diubah menjadi kas yang, meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan [Mahfudhoh, 2014].

5. Leverage

Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100% [Adrian, 2011]. Leverage diukur dengan menggunakan DER [*debt to equity ratio*].

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki total aset, penjualan, dan ekuitas yang besar. Sehingga perusahaan yang besar memiliki risiko kebangkrutan atau kegagalan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan yang kecil [Winardi, 2013].

7. Jaminan

Berdasarkan jaminan, obligasi dapat diklasifikasikan menjadi obligasi dengan jaminan [*secure*] dan obligasi tanpa jaminan [*debenture*]. Obligasi dengan jaminan merupakan obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya. Investor lebih menyukai obligasi yang aman dibanding *debenture*. Investor lebih menyukai obligasi dengan jaminan dikarenakan untuk mengurangi risiko *default* obligasi [Maharti, 2011]. Tingkat risiko yang terkandung dalam obligasi dipengaruhi oleh jaminan.

8. Umur Obligasi

Umur obligasi [*maturity*] merupakan jatuh tempo yang berarti tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali atas pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya [Mahfudhoh, 2014].

9. Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan pandangan atas nama baik, prestasi, dan kepercayaan publik yang disandang auditor dan KAP dimana auditor bekerja [Aulia, 2014]. Semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi tingkat kepastian dari hasil auditnya. Karena semakin pasti hasil auditnya maka akan menurunkan tingkat kegagalan suatu perusahaan dan akan meningkatkan peringkat obligasi. Menurut Wijayanti dan Priyadi [2014] di Indonesia emiten yang diaudit oleh auditor yang berafiliasi dengan *big 4* akan mempunyai obligasi yang *investment grade* karena semakin baik reputasi auditor maka akan mempengaruhi peringkat obligasi.

Penelitian Terdahulu

Menurut Widowati, dkk [2013] profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dali, dkk [2015] yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Menurut Sihombing dan Rachmawati [2015] menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal ini didukung oleh Surya [2015] yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Menurut Sucipta dan Rahyuda [2015] menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut Sari dan Badjra [2016] menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Kedua penelitian diatas juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Estiyanti dan Yasa [2012] yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Menurut Surya [2015] *leverage* berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Berbeda dengan penelitian diatas, menurut Fauziah [2014] *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Winardi [2013] menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Menurut Alfiani [2013] ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar probabilitas peringkat obligasi perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh Surya [2015] yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Nurhidayati [2013] menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Menurut Wijayanti dan Priyadi [2014] ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Menurut penelitian yang dilakukan Pandutama [2012] menyatakan bahwa jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut Verawaty, dkk [2015] menyatakan bahwa jaminan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat obligasi.

Menurut Wijayanti dan Priyadi [2014] menyatakan umur obligasi berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Menurut penelitian yang dilakukan Setyawati [2011] menyatakan bahwa umur obligasi berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Fauziah [2014] menyatakan umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Nurhidayati [2013] menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini didukung oleh Thamida dan Lukman [2013] yang juga menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Menurut Almilia dan Devi [2007] menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Wijayanti dan Priyadi [2014] yang juga menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Peringkat Obligasi

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun laba bagi modal sendiri. Profitabilitas ini

memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah risiko ketidakmampuan membayar [*default*], sehingga semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan Widowati, dkk [2013] serta Dali, dkk [2015] sepakat dalam penelitiannya menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.
 H_1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi

Pengaruh Likuiditas terhadap Peringkat Obligasi

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Salah satu alat yang dipakai untuk mengukur likuiditas adalah dengan menggunakan rasio lancar [*current ratio*]. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utang-utang jangka pendeknya.

Menurut Sucipta dan Rahyuda [2015] menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan. Semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi pula peringkat obligasi yang diberikan kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut.

H_2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi

Pengaruh Leverage terhadap Peringkat Obligasi

Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai investasinya. Salah satu alat yang dipakai untuk mengukur *leverage* adalah dengan menggunakan *debt to equity ratio*. Semakin besar *leverage* perusahaan, semakin besar risiko kegagalan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Surya [2015] sesuai dengan teori diatas yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan semakin rendah peringkat obligasi yang akan diberikan.

H₃ : Leverage berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi

Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, penjualan dan ekuitas. Semakin besar ukuran suatu perusahaan semakin besar potensi atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfiani [2013] ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi juga peringkat obligasi yang akan diberikan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Surya [2015] yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi

Pengaruh Jaminan terhadap Peringkat Obligasi

Tingkat risiko yang terkandung dalam sebuah obligasi dipengaruhi oleh jaminan. Jaminan yang ada pada obligasi dapat menarik investor untuk memiliki obligasi. Hal tersebut dapat meyakinkan investor jika perusahaan mengalami gagal bayar obligasi. Aset perusahaandijaminakan untuk obligasi, maka *rating* obligasi pun akan membaik sehinggaobligasi tersebut dapat dikategorikan aman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pandutama [2012] bahwa jaminan berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jaminan obligasi berpengaruh positif secara signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan.

H₅ : Jaminan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi

Pengaruh Umur Obligasi terhadap Peringkat Obligasi

Umur obligasi [*maturity*] adalah jangka waktu sejak diterbitkannya obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Periode jatuh tempo umur obligasi sangat bervariasi dari 365 hari sampai dengan di atas lima tahun. Apabila umur obligasi lebih pendek maka kemungkinan perusahaan tersebut memiliki peringkat obligasi yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati [2011] bahwa umur obligasi berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.

H₆ : Umur obligasi berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi

Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Peringkat Obligasi

Dengan reputasi auditor yang baik maka akan memberikan hasil audit yang dapat dipercaya. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar berupa kualitas informasi yang di ungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Salah satu informasi tersebut adalah opini auditor dinilai sangat penting bagi para pembaca laporan keuangan karena laporan auditor memberi gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan.

Menurut Alwi dan Nurhidayati [2013] menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Thamida dan Lukman [2013] yang juga menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

H₇ : Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi

Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dengan

kriteria: perusahaan keuangan yang menerbitkan obligasi, obligasi perusahaan keuangan yang diperingkat PT PEFINDO, laporan keuangan tahunan yang laba, menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan. Perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian ini sebanyak 86 perusahaan.

2. Definisi Operasional

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Variabel profitabilitas bisa diukur dengan ROA [*return on asset*] [Maharti, 2011].

$$ROA = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total aset}}$$

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap hutang jangka pendek. Likuiditas diukur dengan menggunakan CR [*current ratio*] [Dali, dkk, 2015].

$$CR = \frac{\text{aset lancar}}{\text{hutang lancar}}$$

Leverage

Leverage menunjukkan seberapa besar hutang yang digunakan untuk membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Leverage* diukur dengan menggunakan DER [*debt to equity ratio*] [Aulia, 2014].

$$DER = \frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan tingkat besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini dinyatakan dengan total aset [Setyawati, 2011]. Oleh karena itu *size* diukur dengan log natural dari total aset.

$$Size = \text{Ln total aset}$$

Jaminan

Tingkat risiko yang terkandung dalam sebuah obligasi dipengaruhi oleh jaminan. Obligasi atas dasar jaminan dibagi menjadi dua, yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan [Setyawati, 2011].

1 = obligasi yang dijamin

0 = obligasi yang tidak dijamin

Umur Obligasi

Umur obligasi merupakan batas jatuh tempo obligasi tersebut. Investor cenderung lebih suka dengan obligasi yang berumur pendek karena lebih mudah diprediksi dan mempunyai risiko yang lebih rendah [Winardi, 2013]. Untuk mengukur variabel ini digunakan skala nominal.

1 = umur obligasi antara 1 sampai 5 tahun

0 = umur obligasi yang lebih dari 5 tahun

Reputasi Auditor

Reputasi auditor memberikan kualitas dalam audit laporan keuangan yang dikeluarkan oleh auditor tersebut. Semakin bagus reputasi auditor maka semakin meningkatkan kepercayaan investor dan dapat meningkatkan peringkat obligasi [Verawaty, dkk, 2015]. Untuk mengukur variabel ini digunakan skala nominal.

1 = obligasi diaudit oleh *big 4*

0 = obligasi diaudit oleh selain *big 4*

Peringkat Obligasi

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO. Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal atau dilakukan secara langsung berdasarkan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Bandi [2010].

Tabel 1 Kategori Peringkat Obligasi

Id AAA	19
Id AA+	18
Id AA	17
Id AA-	16
Id A +	15
Id A	14
Id A-	13
Id BBB+	12
Id BBB	11
Id BBB-	10
Id BB+	9
Id BB	8
Id BB-	7
Id B+	6
Id B	5
Id B-	4
Id CCC+	3
Id CCC	2
Id CCC-	1

3. Teknik Analisis

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur obligasi, jaminan obligasi, dan reputasi auditor terhadap peringkat obligasi. Adapun model regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PO_{[t+1]} = a + b_1ROA + b_2CR + b_3DER + b_4SIZE + b_5JAM + b_6UO + b_7RA + e$$

Hasil Dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum, nilai rata-rata [*mean*], dan standar deviasi [Ghozali, 2016].

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ROA	60	,00	,07	,0239	,01849
CR	60	,97	3,20	1,3685	,54139
DER	60	,48	11,68	6,3706	2,95459
SIZE	60	15,19	30,04	20,1650	3,30076
JAMINAN	60	0	1	,58	,497
UMUR	60	0	1	,68	,469
OBLIGASI					
REPUTASI	60	0	1	,83	,376
AUDITOR					
PERINGKAT	60	11	19	16,63	2,456
OBLIGASI					
Valid N [listwise]	60				

Variabel profitabilitas dalam hal ini diukur dengan menggunakan ROA. Hasil analisis statistika deskriptif terhadap profitabilitas [ROA] menunjukkan bahwa nilai terendah adalah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi adalah sebesar 0,07. Rata-rata dari profitabilitas yang dijadikan sampel adalah 0,0239. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,01849.

Variabel likuiditas dalam hal ini diukur dengan menggunakan CR. Hasil analisis statistika deskriptif terhadap likuiditas [CR] menunjukkan bahwa nilai terendah adalah sebesar 0,97 dan nilai tertinggi adalah sebesar 3,20. Rata-rata dari likuiditas yang dijadikan sampel adalah 1,3685. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,54139.

Variabel *leverage* dalam hal ini diukur dengan menggunakan DER. Hasil analisis statistika deskriptif terhadap leverage [DER] menunjukkan bahwa nilai terendah adalah sebesar 0,48 dan nilai tertinggi adalah sebesar 11,68. Rata-rata dari leverage dari leverage yang dijadikan sampel adalah 6,3706. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 2,95459.

Variabel ukuran perusahaan [*size*] diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset. Hasil analisis statistika deskriptif terhadap ukuran perusahaan [*size*] menunjukkan bahwa nilai terendah adalah sebesar 15,19 dan nilai tertinggi adalah sebesar 30,04. Rata-rata dari ukuran perusahaan yang dijadikan sampel adalah 20,1650. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 3,30076.

Variabel jaminan obligasi diukur dengan menilai apakah obligasi tersebut dijamin oleh perusahaan atau tidak. Hasil analisis statistika deskriptif untuk jaminan obligasi menunjukkan nilai rata-rata 58% atau sebanyak 34 sampel dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 60. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar obligasi dijamin oleh perusahaan penerbitnya. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,497.

Variabel umur obligasi diukur dengan menilai apakah obligasi tersebut memiliki jangka waktu kurang dari lima tahun atau lebih dari lima tahun. Hasil analisis statistika deskriptif untuk umur obligasi menunjukkan nilai rata-rata 68% atau 40 sampel dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 60. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar obligasi yang diterbitkan berumur kurang dari 5 tahun. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,469.

Variabel reputasi auditor diukur dengan menilai apakah laporan keuangan dari perusahaan penerbit obligasi diaudit oleh *big 4* atau selain *big 4*. Hasil analisis statistika deskriptif untuk reputasi auditor menunjukkan nilai rata-rata 83% atau 49 sampel dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 60. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan perusahaan yang menerbitkan obligasi lebih memilih auditor *big 4* untuk mengaudit laporan keuangannya. Standar deviasi dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,376.

2. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Normalitas	Skewness	Kurtosis
	0,003	-1,018
Multikolonieritas	Tolerance	VIF
ROA	,418	2,391
CR	,466	2,144
DER	,309	3,234
SIZE	,781	1,280
JAMINAN	,837	1,194
UMUR OBLIGASI	,652	1,533
REPUTASI AUDITOR	,867	1,153
Autokorelasi	Durbin Watson	
	2,375	
Run Test	Asymp. Sig. [2-tailed]	
	,193	
Heteroskedastisitas	T	Sig
ROA	-,781	,438
CR	1,054	,297
DER	-1,244	,219
SIZE	1,916	,061
JAMINAN	,106	,916
UMUR OBLIGASI	,284	,778
REPUTASI AUDITOR	-,065	,948

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mengetahui model regresi berdistribusi normal adalah dengan uji analisis statistik dengan melihat nilai skewness dan kurtosis dari residual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai rasio skewness dan kurtosis lebih kecil dari Z table yaitu <1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah menunjukkan titik residual yang berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas [independen] yang satu dengan yang lainnya. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Nilai *Variance Inflation Factor* [VIF] juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ [sebelumnya]. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson [*DW test*].

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil *DW test* sebesar 2,375. Dengan signifikansi 5% jumlah observasi 60 [n] dengan variabel independen 7 [$k=7$] didapat nilai $d_l = 1,3349$ dan $d_u = 1,8505$. Nilai DW adalah 2,375 artinya artinya kemungkinan terjadi autokorelasi dengan demikian untuk memastikan tidak adanya autokorelasi maka dilakukan uji *run test*.

Dari tabel diatas dapat kita lihat nilai signifikansi sebesar 0,193 yang berarti nilai signifikansinya diatas 0.05. Dari hal tersebut dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas yang digunakan adalah dengan uji glejser.

Dari tabel diatas dapat kita lihat, nilai signifikani menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Berdasarkan tabel hasil output SPSS menunjukkan hasil dari analisis regresi berganda, dengan demikian dapat ditulis persamaan regresinya yaitu:

$$PO_{[t+1]} = 17,711 + 4,115ROA - 0,946CR + 0,180DER - 0,284SIZE - 0,305JAM + 1,867UO + 4,311RA + e$$

5. Pengujian Model Penelitian

6.

Koefisien Determinasi	Adjusted R	
		,890
Uji Statistik F	F	Sig
	69,090	,000
Uji t		
ROA	,464	,645
CR	-3,295	,002
DER	2,789	,007
SIZE	-7,795	,000
JAMINAN	-1,309	,196
UMUR	6,665	,000
OBLIGASI		
REPUTASI	14,218	,000
AUDITOR		

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi [*Adjusted R Square*] sebesar 0,890. Hal ini berarti 89% variabel peringkat obligasi dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tujuh variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, jaminan obligasi, umur obligasi dan reputasi auditor. Sedangkan sisanya [100%-89%] 11% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel di atas menunjukkan nilai F hitung dari model regresi sebesar 69,090 yang lebih besar dari 4 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi atau dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, jaminan obligasi, umur obligasi dan reputasi auditor bersama-sama berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Uji Statistik t

Uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa Likuiditas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Peringkat Obligasi. Sedangkan *Leverage*, Umur Obligasi, dan Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap Peringkat Obligasi, serta Profitabilitas dan Jaminan tidak berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi.

Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak berhasil didukung karena profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini berarti bahwa profit yang tinggi maka *rating* obligasi tidak secara signifikan menjadi lebih tinggi dan hasil ini tidak mendukung hipotesis. Menurut Surya [2015] penyebab hasil yang tidak signifikan mungkin disebabkan oleh laba yang ada pada data sekunder tidak mencerminkan laba yang sebenarnya dan laba tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang terkait dengan obligasi. Meskipun kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tergolong tinggi tetapi laba tersebut digunakan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widowati dkk [2013] dan Dali dkk [2015] yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan Surya [2015] yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Peringkat Obligasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua tidak berhasil didukung karena likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Hal ini berarti bahwa nilai likuiditas yang tinggi maka belum tentu pula mampu menaikkan peringkat obligasi menjadi lebih tinggi dan hasil ini tidak mendukung hipotesis. Menurut Sari dan Badjra [2016] nilai likuiditas yang negatif mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi kemungkinan besar tidak berada dalam kondisi yang efisien misalnya perusahaan tidak menggunakan pembiayaan melalui obligasi karena perusahaan memiliki dana internal yang besar dan cenderung memilih menggunakan dana internal terlebih dahulu dibandingkan sumber pembiayaan eksternal seperti penerbitan obligasi sehingga mengakibatkan nilai perusahaan menjadi turun dan berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sucipta dan Rahyuda [2015] yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan Sari dan Badjra [2016] yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Peringkat Obligasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak berhasil didukung karena *leverage* berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka akan meningkatkan peringkat obligasi dan hasil ini tidak mendukung hipotesis. Menurut Fauziah [2014] tingginya DER perusahaan penerbit obligasi mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal yaitu berupa utang. Perusahaan keuangan memiliki DER yang lebih tinggi karena sumber pendanaan perusahaan keuangan seperti bank sebagian besar bersumber dari utang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Surya [2015] yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fauziah [2014] yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis keempat tidak berhasil didukung karena ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Hal ini berarti bahwa semakin besar perusahaan, peringkat obligasi menjadi semakin turun dan hasil ini tidak mendukung hipotesis. Menurut Alwi dan Nurhidayati [2013] penyebab ukuran perusahaan berpengaruh negatif bisa jadi karena perusahaan dengan aset yang besar sebagian besar berasal dari hutang sehingga kondisi demikian akan memberatkan perusahaan dengan meningkatnya beban pembiayaan perusahaan terhadap hutang tersebut. Dengan demikian hal ini akan menurunkan peringkat obligasi perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Alfiani [2013] dan Surya [2015] yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Alwi dan Nurhidayati [2013] yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.

5. Pengaruh Jaminan Terhadap Peringkat Obligasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kelima tidak berhasil didukung karena jaminan tidak terhadap peringkat obligasi. Hal ini berarti bahwa obligasi yang dijamin atau tidak dijamin tidak akan mempengaruhi peringkat obligasi dan hasil ini tidak mendukung hipotesis.

Ini mengindikasikan bahwa obligasi yang dijamin dengan aset khusus maupun obligasi yang tidak dijamin dengan aset khusus tidak terlalu diperhitungkan dalam menentukan peringkat obligasi. Selain itu dimungkinkan obligasi tidak dijamin akan tetapi perusahaan memberikan kupon atau imbal hasil yang tinggi pada investor sehingga ada atau tidaknya jaminan tidak terlalu menjadi masalah bagi para investor.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandutama [2012] yang menyatakan bahwa jaminan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, dkk [2015] yang menyatakan bahwa jaminan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

6. Pengaruh Umur Obligasi Terhadap Peringkat Obligasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis keenam tidak berhasil didukung karena umur obligasi berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Bentuk pengaruh yang ditimbulkan adalah positif yang berarti semakin besarnya umur obligasi akan berpengaruh terhadap semakin tingginya peringkat obligasi, begitu pula dengan semakin kecilnya umur

obligasi akan berpengaruh pada rendahnya peringkat obligasi [Wijayanti dan Priyadi, 2014] dan hasil ini tidak mendukung hipotesis.

Kemungkinan hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki umur obligasi yang panjang dalam penelitian ini seperti PT Bank Tabungan Negara dan PT Bank OCBC NISP memiliki keuangan yang relatif stabil sehingga kemungkinan besar mereka bisa memenuhi kewajibannya. Hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki obligasi tersebut karena akan mendapatkan pendapatan yang tetap dalam bentuk kupon atau bunga yang harus dibayar hingga tanggal jatuh tempo yang panjang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setyawati [2011] yang menyatakan bahwa umur obligasi berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Priyadi [2014] yang menyatakan bahwa umur obligasi berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

7. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Obligasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh terdukung yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat reputasi auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang menerbitkan obligasi maka semakin tinggi pula peringkat obligasinya dan hasil ini mendukung hipotesis. Sejalan dengan teori sinyal bahwa reputasi auditor mampu memberikan kenyamanan bagi investor yang melihat laporan keuangan perusahaan penerbit obligasi yang diperingkat oleh *big 4*.

Menurut Alwi dan Nurhidayati [2013] keberadaan KAP *big 4* sebagai pengaudit laporan dinilai memiliki profesionalisme yang tinggi dalam melakukan audit sehingga KAP dapat menekan manajemen perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pihak ketiga agar dapat memperoleh opini yang wajar. Auditor *big 4* juga dinilai lebih independen dan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. KAP *big 4* dapat

menjadikan perusahaan akan lebih baik dalam memenuhi kewajiban perusahaan sehingga rating obligasi akan lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Nurhidayati [2013] serta Thamida dan Lukman [2013] yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wijayanti dan Priyadi [2014] yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, jaminan, umur obligasi, dan reputasi auditor dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015 dengan menggunakan regresi linier berganda dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.
2. Hasil pengujian membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.
3. Hasil pengujian membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.
4. Hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.
5. Hasil pengujian membuktikan bahwa jaminan berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.
6. Hasil pengujian membuktikan bahwa umur obligasi berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.
7. Hasil pengujian membuktikan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dari variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, jaminan, umur obligasi, dan reputasi auditor hanya satu variabel independen yang diterima yaitu reputasi auditor.
2. Data tidak normal sehingga diharuskan melakukan *outlier* dan pada uji Durbin Watson hasilnya ragu-ragu sehingga dilakukan uji *runs test*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk penelitian-penelitian selanjutnya, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah atau mengganti variabel independen agar variabel independen yang diterima lebih banyak dan memperbarui tahun penelitian sehingga hasilnya lebih relevan
2. Mengganti proksi yang digunakan, contohnya seperti pada *leverage* penelitian ini menggunakan DER [*debt to equity ratio*] dan hasilnya hipotesis ditolak, mungkin pada penelitian selanjutnya bisa diganti menggunakan *current liabilities*.

Daftar Pustaka

- Adrian, Nicko. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Alfiani, Ayu Putri. 2013. "Pengaruh Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan". *Jp Akuntansi* 2013. Hal. 1-24.
- Almilia, Luciana Spica dan Vieka Devi. 2007. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Proceeding Seminar Nasional Manajemen SMART*. Hal. 1-23.
- Alwi, Abdullah dan Nurhidayati. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi". *Jurnal Ilmiah USM Vol. 2, No. 7*. Hal. 145-160.
- Aulia, Nisa. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Fakultas EkonomidanBisnis. UniversitasMuhammadiyah Surakarta.
- Dali, Chandra Ly, SautmaRonni, dan Mariana IngMalelak. 2015. “PengaruhMekanismeCorporate GovernancedanRasioKeuanganTerhadapPeringkatObligasi”. *FINESTA Vol. 3, No.1, 2015*. Hal. 30-35.
- Dewi, Sofia Prima. 2013. “PengaruhUkuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditasdan ProduktivitasTerhadapPeringkatObligasi Perusahaan”. *JurnalEkonomi, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2013*.
- Estiyanti, Ni Made danGeriantaWirawanYasa. 2012. “PengaruhFaktorKeuangedan Non KeuanganPadaPeringkatObligasi di Bursa Efek Indonesia”. UniversitasUdayana. Hal. 1-23.
- Fauziah, Yossie. 2014. “PengaruhLikuiditas, Leverage, danUmurObligasiTerhadapPrediksiPeringkatObligasi. *JurnalAkuntansi Vol. 2, No. 1, 2014*. Hal. 1-24.
- Ghozali, Imam. 2016. *AplikasiAnalisisMultivariatdengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. PenerbitUniversitasDiponegoro, Semarang.
- Kurniawan, Adeka Titis. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Produktivitas Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universtitas Stikubank Semarang.
- Maharti, EnnyDwi. 2011. “AnalisisFaktor-Faktor Yang MempengaruhiPeringkatObligasi”. *Skripsi*. FakultasEkonomi. UniversitasDiponegoro.
- Mahfudhoh, RatihUmroh. 2014. “AnalisisFaktor-Faktor Yang MempengaruhiPeringkatObligasi”. *Skripsi*. FakultasEkonomikadanBisnis. UniversitasDiponegoro.
- Pandutama, Arvian. 2012. “Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPrediksiPeringkatObligasiPada Perusahaan Manufaktur di BEI”. *JurnalIlmiahMahasiswaAkuntansi-Vol. 1, No. 4, Juli 2012*. Hal. 82-87.
- Sari, Ni Made Sri Kristina dan Ida Bagus Badjra. 2016. “Pengruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Jaminan Terhadap Peringkat Obligasi Pada Sektor Keuangan”. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 5, No. 8, 2016: 5041-5069*.
- Sari, SyarifahRatihKartikadanBandi, 2010. “PraktikManajemenLabaTerkaitPeringkatObligasi” SimposiumNasionalAkuntansi XIII. Purwokerto.
- Setyawati, Nova Anggraheni. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.

- Sihombing, HengkiJuniusdanEkaNurainiRachmawati. 2015. “Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPeringkatObligasiPada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *JurnalEkonomi, ManajemendanAkuntansi I Vol. 24, No. 1, Juni 2015*. Hal. 95-118.
- Sucipta, Ni KadekSirmaNiladanHennyRahyuda. 2015. “PengaruhPertumbuhan Perusahaan, Likuiditas, danMaturityTerhadapPeringkatObligasi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. *JpManajemendd 2015*. Hal. 626-642.
- Surya, Erny Indah. 2015. “PengaruhUkuran Perusahaan [*Firm Size*], Profitabilitas, Likuiditas, Produktivitas, danLeverageTerhadapPeringkatObligasi”. UniversitasNegeri Surabaya.
- Thamida, Nelly danHendroLukman. 2013. “AnalisisFaktor-Faktor Yang MempengaruhiPeringkatObligasiPadaIndustriPerbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *JurnalAkuntansi Vol. XVII, No. 2, Mei 2013*. Hal. 198-211.
- Verawaty, AndrianNoviardy, danRozalina. 2015. “Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPeringkatObligasiPadaIndustriPerbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.
- Widowati, Dewi, YeterinaNugrahanti, dan Ari Budi Kristanto. 2013. “AnalisisFaktor Keuangandan Non Keuangan Yang BerpengaruhPadaPrediksiPeringkatObligasi di Indonesia”. *JurnalManajemen, Vol. 13, No. 1, November 2013*. Hal. 35-53.
- Wijayanti, Indah danMaswarPatuhPriyadi. 2014. “Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPeringkatObligasi”. *JurnalIlmudanRisetAkuntansi Vol. 3, No. 3, 2014*. Hal 1-15.
- Winardi, RachmatDwi. 2013. “FaktorAkuntansidan Non Akuntansi Yang MempengaruhiPrediksiPeringkatObligasi”. *Skripsi*. FakultasEkonomidanBisnis. Universitas Islam NegeriSyarifHidayatullah.
- www.pefindo.com

KEPUASAN PELANGGAN DAN DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN LISTRIK PRA BAYAR

Rully Fatmawati¹⁾, Euis Soliha²⁾

Surel:
rullyutamiputri@gmail.com
soliha.euis@gmail.com

- 1) Pascasarjana Universitas Stikubank Semarang. 2) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai mediasi. Populasi yang digunakan adalah semua pelanggan yang masih aktif menggunakan listrik pra bayar hingga Desember 2016 di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah sebanyak 29.621 pelanggan. Sampel yang diambil 155 pelanggan. Jenis data yang digunakan data primer dan metode pengumpulan datanya kuesioner. Teknik analisis yang digunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Kualitas layanan terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 2. Kualitas produk terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 3. Kualitas layanan terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 4. Kualitas produk terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 5. Kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 6. Kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai mediasi. 7. Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai mediasi

Kata kunci: Kualitas layanan, Kualitas Produk, Kepuasan, Loyalitas Pelanggan

Pendahuluan

Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan

manusia. Kebutuhan listrik yang makin berkembang mejadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan untuk menggantikan UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, dikarenakan penyedia tenaga listrik merupakan kegiatan padat modal dan teknologi, sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini di wakili oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero secara berkelanjutan terus melakukan peningkatan pelayanan secara optimal, melalui peningkatan kemampuan dalam memahami perubahan kepuasan pelanggan dan menciptakan keunggulan-keunggulan produk dengan strategi pemasaran yang efektif juga efisien. Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:176) menyatakan bahwa yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kepuasan merupakan suatu bukti dari bentuk pelayanan (Tjptono, 2006:59). Salah satu inovasi yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah mengembangkan suatu produk layanan berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan Listrik Prabayar.

Penggunaan listrik dari tahun ke tahun terus meningkat tak terkecuali di Kota Semarang pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Rayon Semarang Tengah. Peningkatan jumlah pelanggan listrik pra bayar tersebut juga masih banyak kendala karena beberapa pelanggan menyatakan keluhannya.

Berdasarkan data, rata-rata peningkatan keluhan sebesar 3,97% dengan jumlah terbanyak pada bulan Oktober 2016 yaitu 2.235 keluhan. Dengan banyaknya keluhan pelanggan yang tidak puas dapat berdampak pada loyalitas pelanggan yang menurun, sehingga dimungkinkan pelanggan akan beralih ke pembayaran listrik pascabayar.

Loyalitas konsumen merupakan kesediaan konsumen untuk menggunakan produk perusahaan dalam jangka panjang (Lovelock, et al, 2010:76). Banyak faktor dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. Menurut Rahyuda dan Atmaja (2011), Markoni (2011), Suwarni dan Mayasari (2011), Awaluddin dan Setiawan (2012), Faizah, dkk (2013), Hidajahningtyas, dkk (2013), Ikasari, dkk (2013), Normasari, dkk (2013), Rinala, dkk (2013), Saputra (2013), Sawitri, dkk (2013), Basith, dkk (2014), Hidayat dan Firdaus (2014), Lenzun, dkk (2014), Ismail (2014), Sondakh (2014), Handayani dan Soliha (2015), Manus dan Lumanauw (2015), Munisih dan Soliha (2015), Pangandaheng (2015), Sulistiyanto dan Soliha (2015), Suwandi, dkk (2015) serta Tombokan, dkk (2015), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen adalah kualitas layanan, kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan

Kajian Pustaka

Kualitas Layanan

Kualitas layanan adalah evaluasi pengamatan jangka panjang konsumen terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan (Lovelock dan Wright, 2007:96). Definisi kualitas layanan adalah besarnya perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka (Laksana, 2008:88). Menurut Kotler dan Keller (2009:50), kualitas layanan adalah suatu pernyataan tentang sikap terhadap perbandingan antara harapan dengan kinerja. Sedangkan menurut Lovelock, et al (2010:154), kualitas layanan adalah sesuatu yang secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Juga menurut Ratnasari dan Aksa (2011:107), kualitas layanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan yang diterima/diperoleh.

Pada umumnya harapan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik barang maupun jasa. Sedangkan kinerja atau hasil yang diterima setelah mengkonsumsi

produk yang dibeli. Untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang sama dengan konsumen agar supaya diperoleh hasil yang melebihi atau paling tidak sama dengan harapan konsumen (Laksana, 2008:96).

Kualitas Produk

Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen (Cannon, dkk,2008:286). Definisi lain kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau diimplikasikan (Kotler dan Amstrong,2008:272). Menurut Kotler dan Keller (2009:143), kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Kualitas produk juga harus dapat ditentukan oleh cara konsumen memandang produk tersebut. Dari suatu pandang pemasaran, kualitas adalah kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Definisi ini berfokus pada konsumen dan bagaimana konsumen berpikir suatu produk akan memenuhi tujuan tertentu (Cannon,dkk, 2008:286).

Penyediaan produk yang tepat di saat, di tempat dan dengan cara yang diinginkan konsumen merupakan suatu tantangan. Hal ini benar, entah produk tersebut merupakan jasa utama, barang utama, atau seperti biasanya, perpaduan antara keduanya. Manajer pemasaran harus memikirkan tentang keseluruhan produk. Produk yang disediakan serta memastikan bahwa seluruh elemen telah selaras dan dapat bekerja bersama dalam strategi pemasaran. Terkadang, suatu produk tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen target. Oleh karena itu, diperlukan adanya bauran dengan produk lainnya (Cannon, dkk, 2005:289).

Kepuasan Pelanggan

Kepuasan konsumen adalah reaksi emosional jangka pendek konsumen terhadap kinerja jasa tertentu (Lovelock dan Wright,2007: 96). Definisi lain kepuasan konsumen adalah

perbedaan antara harapan dan kinerja atau jasa yang dirasakan (Tjiptono,2008:24). Menurut Kotler dan Keller (2009:138), kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Menurut Laksana (2008:10), kepuasan konsumen adalah keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Juga menurut Daryanto (2013:9), kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan, dibandingkan dengan harapan.

Konsumen mengalami berbagai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan setelah mengalami masing-masing jasa sesuai dengan sejauh mana harapan konsumen terpenuhi atau terlampaui. Hal ini karena kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca-pembelian konsumen dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, atau kesenangan. Konsumen yang marah atau tidak puas akan menimbulkan masalah karena dapat berpindah ke perusahaan lain dan menyebarkan berita negatif dari mulut ke mulut (Lovelock dan Wright,2007:102).

Puas tidaknya konsumen diketahui setelah melakukan pembelian, tergantung pada kinerja tawaran dalam pemenuhan harapan pembeli. Jika kinerja berada di bawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas. Jika kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau senang (Kotler dan Keller,2009: 139).

Loyalitas Konsumen

Loyalitas konsumen merupakan keputusan konsumen untuk suka rela terus berlangganan dengan perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama (Lovelock dan Wright,2007:133). Menurut Lovelock, et al, (2010:76), loyalitas konsumen adalah kesediaan konsumen untuk menggunakan produk perusahaan dalam jangka panjang. Juga menurut Tjiptono (2011:485), loyalitas konsumen adalah pembelian ulang suatu merek secara konsisten oleh konsumen.

Loyalitas merupakan kesetiaan konsumen terhadap suatu produk atau merek tertentu. Dalam konteks bisnis, loyalitas merupakan kesediaan konsumen untuk terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang, dengan membeli dan menggunakan barang dan jasanya secara berulang-ulang dan lebih baik lagi secara eksklusif, dan dengan suka rela merekomendasikan produk perusahaan tersebut kepada teman-teman dan rekan-rekannya (Lovelock dan Wright,2007: 133).

Loyalitas konsumen akan berlanjut hanya sepanjang konsumen merasakan bahwa ia menerima nilai yang lebih baik (termasuk kualitas yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan harga) dibandingkan dengan dapat diperoleh dengan beralih ke penyedia jasa lain. Jika perusahaan pertama tersebut melakukan sesuatu yang mengecewakan konsumen atau jika pesaing mulai menawarkan nilai yang jauh lebih baik, risikonya adalah bahwa konsumen tersebut akan berpindah ke merek lain (Lovelock dan Wright,2007:134).

Loyalitas konsumen akan berlanjut hanya sepanjang konsumen merasakan bahwa ia menerima nilai yang lebih baik (termasuk kualitas yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan harga) dibandingkan dengan dapat diperoleh dengan beralih ke penyedia jasa lain. Jika perusahaan pertama tersebut melakukan sesuatu yang mengecewakan konsumen atau jika pesaing mulai menawarkan nilai yang jauh lebih baik, risikonya adalah bahwa konsumen tersebut akan berpindah ke merek lain (Lovelock dan Wright,2007:134).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan

Kualitas layanan merupakan pernyataan tentang sikap terhadap perbandingan antara harapan dengan kinerja (Kotler dan Keller, 2009:50). Kualitas layanan sangat tergantung dari kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan, hal ini memberikan gambaran bahwa kualitas layanan meliputi pegawai yang memberikan layanan kepada pelanggan. Hubungan internal antara pegawai dengan pelanggan akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap persepsi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pegawai sangat mempengaruhi terhadap persepsi pelanggan dalam menilai kualitas layanan (Laksana,

2008:95). Pelanggan ingin agar harapannya sama dengan layanan seperti apakah seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Harapan para pelanggan ini didasarkan pada informasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi perusahaan lainnya) (Ratnasari dan Aksa, 2011:107). Konsumen akan merasakan bagaimana perusahaan memberikan kualitas layanan yang terbaik, semakin tinggi kualitas layanannya, maka semakin puas konsumen. Hasil penelitian Awalyudin dan Setiawan (2012), Faizah, dkk (2013), Hidajahningtyas, dkk (2013), Normasari, dkk (2013), Rinala, dkk (2013), Saputra (2013), Sawitri, dkk (2013), Basith, dkk (2014), Ismail (2014), Lenzun, dkk (2014), Sondakh (2014), Manus dan Lumanauw (2015), Suwandi, dkk (2015) serta Tombokan, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan.

Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan

Kualitas produk merupakan kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen (Cannon, dkk,2008:286). Konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung pada perspektif atau ciri-ciri yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Jika dianalisis lebih jauh, kualitas akan menguntungkan dalam jangka panjang karena keuntungan eksternal yang diperoleh dari kepuasan konsumen dan keuntungan internal yang diperoleh dari adanya perbaikan efisiensi produk (Ratnasari dan Aksa, 2011:104). Perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan konsumennya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas, tetapi harus dibedakan antara kesesuaian kualitas, dan kinerja (tingkat) kualitas (Kotler dan Keller,2009:143). Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, yang memenuhi keinginan konsumen, dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas selalu berfokus pada konsumen. Produk dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi keinginan konsumen, sehingga suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan konsumen (Laksana,2008:89). Bila suatu produk

sudah dapat memenuhi keinginan, maka konsumen akan puas. Hasil penelitian Suwarni dan Mayasari (2011), Basith, dkk (2014) serta Ismail (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan.

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan

Kualitas layanan merupakan perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan yang diterima/diperoleh (Ratnasari dan Aksa, 2011:107). Pada umumnya harapan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik barang maupun jasa. Sedangkan kinerja atau hasil yang diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang sama dengan konsumen agar supaya diperoleh hasil yang melebihi atau paling tidak sama dengan harapan konsumen (Laksana, 2008:96). Konsumen ingin agar harapannya sama dengan layanan seperti apakah seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Harapan para konsumen ini didasarkan pada informasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi perusahaan lainnya) (Ratnasari dan Aksa, 2011:107). Hasil penelitian Rinala, dkk (2013), Sawitri, dkk (2013), Ismail (2014) serta Suwandi, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan.

Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan

Kualitas produk merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler dan Keller, 2009:143). Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain

merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan (Tjiptono,2006:59). Kualitas produk juga dapat ditentukan oleh cara konsumen memandang produk tersebut. Dari suatu pandang pemasaran, kualitas adalah kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Definisi ini berfokus pada konsumen dan bagaimana konsumen berpikir suatu produk akan memenuhi tujuan tertentu (Cannon,dkk, 2008:286). Bila suatu produk sudah dapat memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen, maka konsumen akan loyal. Hasil penelitian Markoni (2011), Suwarni dan Mayasari (2012) serta Ismail (2014) menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan

Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan

Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan, dibandingkan dengan harapan (Daryanto,2013:9). Konsumen mengalami berbagai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan setelah mengalami masing-masing jasa sesuai dengan sejauh mana harapan konsumen terpenuhi atau terlampaui. Hal ini karena kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca-pembelian konsumen dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, atau kesenangan. Konsumen yang marah atau tidak puas akan menimbulkan masalah karena dapat berpindah ke perusahaan lain dan menyebarkan berita negatif dari mulut ke mulut (Lovelock dan Wright,2007:102). Hal ini dapat mempengaruhi loyalitas konsumen yang berangkat. Hasil penelitian Rahyuda dan Atmaja (2011), Suwarni dan Mayasari (2011), Hidajahningtyas, dkk (2013), Normasari, dkk (2013), Rinala, dkk (2013), Saputra (2013), Sawitri, dkk (2013), Hidayat dan Firdaus (2014), Ismail (2014), Sondakh (2014), Pangandaheng (2015) serta Suwandi, dkk (2015) menyatakan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Kepuasan Konsumen berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan.

Metode Penelitian

Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua pelanggan yang masih aktif menggunakan listrik pra bayar hingga Desember 2016 di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah sebanyak 29.621 pelanggan.

Sampel penelitian ini adalah sebagian pelanggan yang masih aktif menggunakan listrik pra bayar hingga Desember 2016 di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah yang berjumlah 155 pelanggan.

Jenis pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non acak yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2012:121). Sedangkan teknik pengambilan sampel non acak tersebut menggunakan *insidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono,2012:122). Namun demikian, pengambilan tersebut mempertimbangkan kriteria meliputi :

1. Pengguna Listrik Pra Bayar Rayon Semarang Tengah.
2. Konsumen yang berumur minimal 17 tahun berdasarkan KTP atau sudah menikah karena dianggap mampu mengambil keputusan yang tepat dalam suatu tindakan.
3. Rumah sebagai tempat penempatan Listrik Pra Bayar milik sendiri.

Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Definisi konsep dan operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional
Kualitas Layanan (X ₁)	Kualitas layanan adalah suatu pernyataan tentang sikap terhadap perbandingan antara harapan dengan kinerja (Kotler dan Keller, 2009:50)	<p>Keandalan</p> <ol style="list-style-type: none"> Jasa sesuai janji Penanganan handal Benar saat pertama Tepat waktu Bebas kesalahan Pengetahuan <p>Daya Tanggap</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Layanan tepat Bersedia membantu Siap merespon <p>Jaminan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menanamkan keyakinan Pelanggan aman Karyawan sopan <p>Empati</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhatian pelanggan Penuh perhatian Kepentingan pelanggan Memahami pelanggan Jam bisnis nyaman <p>Wujud</p> <ol style="list-style-type: none"> Peralatan modern Fasilitas menarik Penampilan rapi Tempat bersih <p>(Kotler dan Keller, 2009: 52)</p>
Kualitas Produk (X ₂)	Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau diimplikasikan (Kotler dan Amstrong, 2008: 272)	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Fitur Kehandalan Mutu kerja Daya tahan Pelayanan Keindahan <p>(Kotler dan Amstrong, 2008: 272)</p>
Kepuasan Pelanggan	Kepuasan pelanggan adalah	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggan senang melakukan

(Y1)	perasaan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau kekecewaan yang timbul dari membandingkan penampilan sebuah produk dihubungkan dengan harapan konsumen atas produk tersebut (Oliver 1980; Taylor and Beker 1994).	<p>pembelian</p> <p>b. Berdasarkan pengalaman, pelanggan puas melakukan pembelian</p> <p>c. Produk sudah memenuhi harapan pelanggan</p> <p>d. Secara keseluruhan, pelanggan percaya bahwa Produk tidak mengecewakan pelanggan</p> <p>e. Pelanggan tidak complain terhadap produk</p> <p>(Kotler dan Keller,2009: 138)</p>
Loyalitas Pelanggan (Y2)	Loyalitas adalah komitmen yang dipegang kuat oleh pelanggan untuk melakukan pembelian, menggunakan produk dari perusahaan dalam jangka panjang (berulang-ulang), merekomendasikan produk perusahaan tersebut kepada rekannya meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi merubah perilaku pelanggan (Oliver, Richard L (1999); Lovelock C, Wirtz J, Mussry J, (2010); Zeithaml, Valarie A, Berry Leonard L; Parasuraman, A, (1996); Gremler and Brown (1996)	<p>a. Pilihan pertama saat akan melakukan pembelian dengan harapan memperoleh harga terendah</p> <p>b. Pelanggan akan melakukan pembelian terus menerus</p> <p>c. Pelanggan akan melakukan pembelian di masa yang akan datang</p> <p>d. Merekomendasikan kepada teman</p> <p>e. Membicarakan hal-hal baik mengenai produk</p> <p>(Kotler dan Keller,2009:153-155)</p>

Hasil Analisis Dan Pembahasan

Analisis Regresi

Hasil regresi citra merek dan per Hasil regresi kualitas layanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi

	Adjusted R^2	Uji F		Uji t			Ketera- ngan
		F	Sig	B	T	Sig	
Persamaan I							
Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan	0,865	494,237	0,000				
Kualitas Layanan terhadap Kepuasan				0,471	5,833	0,000	H1 diterima
Kualitas Produk terhadap Kepuasan				0,477	5,193	0,000	H2 diterima
Persamaan II							
Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, dan Kepuasan terhadap Loyalitas	0,898	454,650	0,000				
Kualitas Layanan terhadap Kepuasan				0,176	2,267	0,025	H3 diterima
Kualitas Produk terhadap Kepuasan				0,245	3,160	0,002	H4 diterima
Kepuasan terhadap Loyalitas				0,552	7,840	0,000	H5 diterima

Sumber : data primer yang diolah 2017

Berdasarkan dari hasil regresi I maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda dari nilai *standardized coefficients* sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,471 X_1 + 0,477 X_2$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien kualitas layanan (b_1) = 0,471, nilai positif yang didapat memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan kualitas layanan maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan.

- b. Nilai koefisien kualitas produk (b_2) = 0,477, nilai positif yang didapat memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan kualitas produk maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan dari hasil regresi II maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda dari nilai *standardized coefficients* sebagai berikut.

$$Y_2 = 0,176 X_1 + 0,245 X_2 + 0,552 Y_1$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Kualitas layanan (b_1) = 0,176, nilai positif yang didapat memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan kualitas layanan maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan.
- b. Kualitas produk (b_2) = 0,245, nilai positif yang didapat memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan kualitas produk maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan.
- c. Kepuasan pelanggan (b_3) = 0,552, nilai positif yang didapat memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan kepuasan pelanggan maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan.

Uji Efek Mediasi

Uji efek mediasi digunakan untuk membuktikan kepuasan pelanggan sebagai variabel yang memediasi antara kualitas layanan dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan.

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Mediasi

Agar dapat membuktikan kepuasan pelanggan sebagai variabel yang memediasi antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan maka dilakukan analisa jalur. Dalam melakukan analisis jalur menggunakan *standardized coefficients* untuk dilihat pengaruh langsung atau tidak langsungnya. Adanya pengaruh secara tidak langsung kualitas layanan terhadap loyalitas

pelanggan melalui kepuasan pelanggan yang lebih besar dibanding pengaruh langsung kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan menjadi variabel mediasi (intervening). Agar dapat menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan maka dapat digambarkan seperti pada gambar Perhitungan uji efek mediasi sebagai berikut :

- a. Pengaruh langsung kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,176.
- b. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,471 dan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,552, dengan demikian pengaruh tidak langsung kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebesar $0,471 \times 0,552 = 0,260$.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan lebih besar dibanding pengaruh langsung kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian maka kepuasan pelanggan menjadi variabel mediasi antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan.

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan pelanggan Sebagai Mediasi

Agar dapat membuktikan kepuasan pelanggan sebagai variabel yang memediasi antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan maka dilakukan analisa jalur. Dalam melakukan analisis jalur menggunakan *standardized coefficients* untuk dilihat pengaruh langsung atau tidak langsungnya. Adanya pengaruh secara tidak langsung kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan yang lebih besar dibanding pengaruh langsung kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan menjadi variabel mediasi (intervening).

Perhitungan uji efek mediasi sebagai berikut :

- a. Pengaruh langsung kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,245.

- b. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,477 dan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,552, dengan demikian pengaruh tidak langsung kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebesar $0,477 \times 0,552 = 0,263$.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan lebih besar dibanding pengaruh langsung kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian maka kepuasan pelanggan menjadi variabel mediasi antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dengan didapat hasil uji – t sebesar 5,833 dan sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan semakin baik kualitas layanan listrik pra bayar dari PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller (2009:50), kualitas layanan adalah suatu pernyataan tentang sikap terhadap perbandingan antara harapan dengan kinerja. Kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu. Apabila kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Sedangkan jika kenyataan sama dengan harapan, maka layanan tersebut memuaskan (Ratnasari dan Aksa, 2011:107).

Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif juga memperlihatkan adanya penilaian yang cenderung agak setuju terhadap beberapa indikator dari dimensi kualitas layanan, terutama yaitu pada dimensi keandalan mengenai karyawan PLN memberikan pelayanan dengan benar saat pertama melayani pelanggan yang mendapatkan penilaian tertinggi. Para karyawan tepat mencatat nama pelanggan yang pertama kali pasang baru untuk listrik pra bayar dan juga jumlah daya yang digunakan. Penilaian agak setuju juga diberikan terhadap beberapa indikator dimensi kualitas layanan, yaitu pada dimensi keandalan diberikan mengenai karyawan PLN

handal dalam menangani masalah listrik pra bayar dan karyawan PLN memiliki pengetahuan yang luas tentang listrik pra bayar. Pada dimensi daya tanggap mengenai karyawan PLN mampu memberikan pelayanan secara tepat dan karyawan PLN bersedia membantu pelanggan yang belum mengetahui tata cara berlangganan listrik pra bayar. Pada dimensi jaminan diberikan mengenai pelanggan merasa aman berlangganan listrik pra bayar. Pada dimensi empati diberikan terhadap karyawan PLN memperhatikan pelanggan secara penuh tanpa membedakan dengan pelanggan lain dan karyawan PLN selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Pada dimensi wujud diberikan terhadap peralatan yang digunakan oleh PLN dalam melayani pelanggan listrik pra bayar modern, fasilitas yang disediakan oleh PLN lengkap dan menarik, dan penampilan karyawan PLN rapi dan menarik.

Hasil penelitian yang didapat mendukung penelitian Awalyudin dan Setiawan (2012), Faizah, dkk (2013), Hidajahningtyas, dkk (2013), Normasari, dkk (2013), Rinala, dkk (2013), Saputra (2013), Sawitri, dkk (2013), Basith, dkk (2014), Ismail (2014), Lenzun, dkk (2014), Sondakh (2014), Manus dan Lumanauw (2015), Suwandi, dkk (2015) serta Tombokan, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dengan didapat hasil uji – t sebesar 5,913 dan sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan semakin baik kualitas produk listrik pra bayar PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen (Cannon, dkk,2008:286). Produk yang mampu memberikan nilai manfaat sesuai kebutuhan konsumen maka hal ini yang membuat konsumen puas mengkonsumsi produk tersebut.

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa para pelanggan memberi penilaian agak setuju terhadap kualitas produk, yang menunjukkan bahwa produk listrik pra bayar sudah cukup baik didalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini didasari oleh beberapa hal seperti pemakaian token telah sesuai dengan penggunaan listrik, yaitu penggunaan listrik

sesuai dengan jumlah isi pulsa yang dibeli pelanggan. Kotak meter listrik pra bayar terdapat lampu indicator yang dapat mengindikasikan bahwa kotak meter berjalan dengan baik dengan menyalanya lampu indikator. Meteran listrik pra bayar telah sesuai dengan kegunaan yaitu mampu menyalurkan listrik ke rumah pelanggan untuk menghidupkan berbagai peralatan elektronik. Bentuk fisik kotak meter listrik pra bayar dapat bertahan lama, yaitu bahannya kuat sehingga tidak mudah rusak dalam jangka waktu lama.

Hasil penelitian yang didapat mendukung penelitian Suwarni dan Mayasari (2011), Basith, dkk (2014) serta Ismail (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, dengan didapat hasil uji – t sebesar 2,267 dan sig. $0,025 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan adanya kualitas layanan yang lebih baik dari listrik pra bayar di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Menurut Ratnasari dan Aksa (2011:107), kualitas layanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan yang diterima/diperoleh. Pelayanan yang memenuhi harapan konsumen yaitu dapat memenuhi harapan konsumen maka akan membuat konsumen akan terus menggunakan jasa yang ditawarkan.

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa para pelanggan memberi penilaian netral terhadap kualitas layanan, yang menunjukkan bahwa dari kinerja pelayanan yang diperlihatkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah dalam pemberian layanan listrik pra bayar ada yang sudah sesuai keinginan dan kebutuhan tetapi ada juga yang belum sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertanyaan netral terhadap indikator dari dimensi kualitas layanan, terutama yaitu pada indikator dimensi keandalan mengenai karyawan PLN mampu melayani tepat waktu, yang mendapatkan penilaian terendah dan terarah pada pernyataan netral. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang waktu pelayanan kurang sesuai dengan yang dijanjikan seperti beberapa pemasangan meteran

baru atau meteran dari pelanggan yang berpindah ke sistem pra bayar mundur dari waktu yang dijanjikan. Penilaian netral lainnya diberikan terhadap beberapa indikator dari dimensi kualitas layanan. Pada indikator keandalan memberikan penilaian netral mengenai karyawan PLN memberikan layanan seperti yang dijanjikan, dan karyawan PLN melakukan transaksi tanpa melakukan kesalahan. Sementara untuk dimensi daya tanggap memberikan penilaian netral mengenai karyawan PLN memberitahukan kepada pelanggan mengenai perubahan pelayanan sewaktu-waktu kepada pelanggan listrik pra bayar, dan karyawan PLN siap merespon pelanggan yang mengeluh tentang kelemahan listrik pra bayar. Pada dimensi jaminan memberikan penilaian netral mengenai Karyawan PLN mampu menanamkan keyakinan kepada pelanggan listrik pra bayar mengenai keuntungan berlangganan listrik pra bayar dan karyawan PLN bersikap ramah dan sopan kepada pelanggan. Pada dimensi empati memberikan penilaian netral mengenai karyawan PLN memperhatikan setiap keluhan pelanggan secara individu, Karyawan PLN memahami pelanggan dengan seksama, dan karyawan PLN melayani pelanggan tepat waktu sesuai jam pelayanan. Pada dimensi wujud memberikan penilaian netral mengenai ruang pelayanan di PLN bersih.

Hasil penelitian yang didapat mendukung penelitian Rinala, dkk (2013), Sawitri, dkk (2013), Ismail (2014) serta Suwandi, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, dengan didapat hasil uji – t sebesar 3,160 dan sig. $0,002 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan semakin baik kualitas produk listrik pra bayar PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau diimplikasikan (Kotler dan Amstrong, 2008:272). Produk yang mampu memberi nilai manfaat sesuai kebutuhan konsumen maka akan membuat konsumen akan terus mengkonsumsi produk yang sama.

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa para pelanggan memberi penilaian agak setuju terhadap kualitas produk, yang menunjukkan bahwa dari produk listrik pra bayar sudah cukup baik didalam memberikan nilai manfaat kepada pelanggan. Hal ini didasari oleh beberapa hal seperti pemakaian token telah sesuai dengan penggunaan listrik, yaitu daya listrik akan terisi sesuai dengan jumlah daya listrik yang dibeli pelanggan secara pra bayar. Kotak meter listrik pra bayar terdapat lampu indicator, yang menunjukkan bahwa apabila indikator menyala menunjukkan bahwa meteran listrik berjalan dengan baik. Meteran listrik pra bayar telah sesuai dengan kegunaan yaitu menyalurkan kebutuhan listrik kepada para pelanggan. Bentuk fisik kotak meter listrik pra bayar dapat bertahan lama, yaitu bentuknya terkesan kokoh sehingga tidak mudah rusak dalam jangka waktu lama.

Hasil penelitian yang didapat mendukung penelitian Markoni (2011), Suwarni dan Mayasari (2012) serta Ismail (2014) yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.

Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, dengan didapat hasil uji – t sebesar 7,840 dan sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan semakin meningkat kepuasan pelanggan didalam menggunakan listrik pra bayar di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kepuasan konsumen adalah perbedaan antara harapan dan kinerja atau jasa yang dirasakan (Tjiptono,2008:24). Produk atau jasa yang mampu memberi nilai kegunaan yang memuaskan konsumen maka untuk mempertahankan kepuasan tersebut konsumen akan terus menggunakan produk atau jasa yang sama.

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa para pelanggan memberi penilaian netral terhadap kepuasan, yang menunjukkan bahwa dari beberapa segi ada yang membuat pelanggan merasa puas tetapi juga kurang puas didalam menggunakan produk listrik pra bayar. Hal ini dapat dilihat dari penilaian netral mengenai puas berlangganan listrik pra bayar, yaitu disisi lain puas karena karena dapat membeli pulsa sesuai kebutuhan tetapi terkadang

pada saat proses input terjadi masalah (*error*) sehingga menghambat pelanggan untuk mendapatkan listrik secara cepat. Penilaian netral juga diberikan mengenai secara keseluruhan, listrik pra bayar tidak mengecewakan pelanggan, yaitu penyediaan listrik lancar seperti listrik pasca bayar tetapi belum memberi jaminan tidak terjadi listrik sering padam yang dapat mengganggu aktivitas pelanggan. Penilaian netral juga diberikan mengenai tidak pernah mengklaim listrik pra bayar. Pelanggan tidak melakukan klaim apabila tidak ada permasalahan tetapi apabila ada permasalahan seperti pulsa yang hilang padahal listrik belum terisi dan sering terjadi pemadaman listrik maka akan mengajukan klaim. Sementara itu pelanggan memberi penilaian agak setuju mengenai senang berlangganan listrik pra bayar, yaitu dapat memilih jumlah pulsa yang digunakan sesuai kebutuhan dan harga yang sesuai kemampuan untuk melakukan pembelian, serta terdapat banyak tempat untuk melakukan pembelian isi ulang pulsa atau token listrik. Pelanggan juga menyatakan agak setuju mengenai produk listrik pra bayar sudah memenuhi harapan pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan listrik yang dapat diatur sendiri sesuai kebutuhan para pelanggan.

Hasil penelitian yang didapat mendukung penelitian Rahyuda dan Atmaja (2011), Suwarni dan Mayasari (2011), Hidajahningtyas, dkk (2013), Normasari, dkk (2013), Rinala, dkk (2013), Saputra (2013), Sawitri, dkk (2013), Hidayat dan Firdaus (2014), Ismail (2014), Sondakh (2014), Pangandaheng (2015) serta Suwandi, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan

Uji efek mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan menjadi variabel yang memediasi antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan hasil ini dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kualitas layanan kartu pra bayar listrik dari PT. PLN. (Persero) akan membuat pelanggan merasa puas. Dengan rasa puas karena kualitas layanan yang baik kemudian berpengaruh pada peningkatan loyalitas didalam menggunakan kartu pra bayar listrik dari PT. PLN. (Persero).

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas layanan masih perlu ditingkatkan terutama yaitu pelayanan yang lebih tepat waktu dimana sebaiknya para karyawan PLN apabila ada komplain yang disampaikan pelanggan harus datang tepat waktu, yaitu seandainya menjanjikan ada karyawan datang dalam waktu satu jam maka dalam waktu satu jam harus ada karyawan yang datang untuk menangani komplain pelanggan. Hal lain lebih berhati-hati dalam menulis transaksi penggunaan meteran, dan aktif menyampaikan perubahan kebijakan seperti perubahan tarif dan siap merespon setiap keluhan dari pelanggan dan sering menjalin komunikasi untuk meyakinkan pelanggan tentang keuntungan menggunakan kartu pra bayar listrik yang dapat mengontrol penggunaan listrik. Para karyawan juga lebih ramah dan sopan dengan menggunakan tata bahasa yang baik ketika berkomunikasi dengan pelanggan.

Karyawan juga memperhatikan setiap keluhan individu, yaitu ketika ada pelanggan yang menyampaikan keluhan maka harus ada segera yang merespon dengan mendatangi tempat pelanggan. Sementara untuk pelayanan di kantor dapat dilakukan dengan pelayanan yang konsisten sesuai jam pelayanan serta ruang pelayanan selalu dibersihkan agar terlihat bersih. Dengan meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik maka akan membuat pelanggan puas dalam menggunakan jasa pelayanan listrik pra bayar dari PLN Semarang Tengah. Rasa puas ini kemudian berdampak pada keinginan untuk terus menggunakan kartu listrik pra bayar.

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan

Uji efek mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan menjadi variabel yang memediasi antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Dengan hasil ini dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kualitas produk kartu pra bayar listrik dari PT. PLN. (Persero) akan membuat pelanggan merasa puas. Dengan kepuasan karena kualitas produk yang baik kemudian berpengaruh pada peningkatan loyalitas didalam menggunakan kartu pra bayar listrik dari PT. PLN. (Persero).

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai produk yang diberikan masih ada yang perlu ditingkatkan seperti menggunakan gear yang lebih berkualitas baik sehingga tidak mudah rusak ketika memutar alat meter. Proses perbaikan juga sebaiknya harus menyeluruh sehingga tidak mudah rusak lagi, dimana hal ini dapat mengganggu kenyamanan pelanggan. Bentuk fisik kotak meter juga dapat lebih menarik seperti membuat model yang terkesan ramping sehingga menarik untuk dilihat. Dengan lebih meningkatkan kualitas produk dari pelayanan pra bayar kartu listrik maka hal ini yang akan membuat konsumen puas menggunakan kartu pra bayar listrik. Rasa puas ini kemudian berpengaruh pada keinginan untuk loyal didalam menggunakan kartu listrik pra bayar.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya pada loyalitas pelanggan (studi pada kasus pada pelanggan listrik pra bayar di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas layanan terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan.
2. Kualitas produk terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan.
3. Kualitas layanan terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.
4. Kualitas produk terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.
5. Kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan
6. Uji analisis jalur menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai mediasi
7. Uji analisis jalur menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai mediasi

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian adalah pelanggan listrik prabayar PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah sehingga tidak dapat digeneralisasikan ke ruang lingkup penelitian lebih luas.
2. Penelitian ini membatasi pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai mediasi.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan berbagai implikasi baik secara teoritis maupun praktis.

Implikasi Teoritis

- a. Hasil penelitian yang diperoleh dapat menambah teori mengenai pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai mediasi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel independen seperti harga yang diangkat oleh Suwandi, dkk (2015), sehingga dapat diketahui variabel lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.

Implikasi Manajerial

- a. Kualitas layanan kartu pra bayar listrik perlu untuk ditingkatkan terutama pelayanan yang lebih tepat waktu, yaitu para karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah harus datang ke tempat pelanggan yang mengajukan komplain sesuai waktu yang ditentukan, yaitu apabila menjanjikan waktu satu jam maka dalam waktu satu jam harus ada karyawan yang datang ke tempat pelanggan sehingga proses penanganan keluhan bisa diselesaikan secara lebih cepat. Dengan pelayanan tepat

waktu maka hal ini yang akan membuat pelanggan akan terus menggunakan layanan kartu pra bayar.

- b. Kualitas produk kartu pra bayar listrik perlu untuk ditingkatkan dengan menggunakan kotak meteran yang tidak mudah rusak seperti gear yang lebih berkualitas sehingga perputaran meteran tidak mengalami gangguan. Selain itu apabila ada penanganan kerusakan harus dilakukan secara lebih detail yaitu melihat satu per satu tingkat kerusakan untuk kemudian dilakukan perbaikan secara menyeluruh, sehingga tidak lagi terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau kotak meter. Bentuk fisik kotak meter juga dapat dibuat lebih menarik seperti dibuat dengan menggunakan kotak lebih kecil agar terlihat lebih simpel dan tidak memakan tempat. Dengan peningkatan kualitas produk kartu pra bayar listrik maka akan membuat pelanggan loyal didalam menggunakan kartu pra bayar listrik.
- c. Kepuasan pelanggan pengguna kartu pra bayar listrik juga perlu ditingkatkan yaitu dengan pelayanan yang tidak mengecewakan seperti memperbaiki sistem pengisian pulsa listrik agar tidak terjadi gangguan (*error*) yang membuat pelanggan akan menunggu lebih lama untuk mendapatkan listrik yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan kapasitas server. Pelayanan yang diberikan juga harus lebih baik agar menghindari klaim pelanggan seperti mengurangi seringnya terjadinya pemadaman listrik dengan penambahan daya listrik. Dengan upaya meningkatkan kepuasan pelanggan maka mereka akan lebih loyal menggunakan kartu pra bayar pulsa listrik.

Rekomendasi Penelitian Yang Akan Datang

Bagi peneliti mendatang peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel independen seperti kualitas pelayanan sehingga dapat diketahui variabel lain yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen Toyota Innova.

2. Menggunakan analisa *Structural Equation Modelling* (SEM) karena dapat digunakan untuk melakukan pengujian hubungan yang lebih rumit seperti penggunaan variabel intervening, dengan hanya satu tahapan proses sekaligus sehingga lebih praktis.

Daftar Pustaka

- Awaluddin, Ishak dan Margono Setiawan. 2012. “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan, Nilai, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan Rumah Tangga (Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kendari)”. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 10. No. 4. Desember 2012. Hal. 733 – 740. Malang: Universitas Brawijaya.
- Basith, Abdul, Sriyadi Kumadji dan Kadarisman Hidayat. (2014). “Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei Pada Pelanggan De’pans *Pancake And Waffle* Di Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 11. No. 1. Hal. 1-8. Malang: Universitas Malang.
- Cannon, Joseph P., William D. Perreault Jr. dan Jerome McCarthy. (2008). Alih Bahasa : Diana Angelica dan Ria Cahyani. *Pemasaran Dasar-Dasar : Pendekatan Manajerial Global*. Buku 2. Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.
- Daryanto. (2013). *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*. Cetakan II. Januari 2013, Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Faizah, Nadia Rizqiyatul, Sri Suryoko dan Saryadi. (2013). “Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran O-Mama Steak and Ice Cream Cabang Jati Semarang”. *Diponegoro Journal of Social And Politic*. Hal. 1 – 8. Semarang: FISIP UNDIP Semarang.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Nembah F. Hartimbul. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Cetakan 2. Bandung: Yrama Widya.
- Handayani, Wilujeng dan Euis Soliha. 2015. “Citra Dan Persepsi Harga Dalam Mempengaruhi Kepuasan Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Pelanggan *Bussines Centre Smk Negeri 2 Semarang*)”. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U)*. Hal. 1-17. Semarang : UNISBANK.
- Hidajahningtyas, Nurullah, Andi Sularso dan Imam Suroso. (2013). “Pengaruh Citra, Kualitas Layanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pasien Di Poliklinik Eksekutif Rumah

- Sakit Daerah Dr. Soebandi Kabupaten Jember”. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (JEAM)*. Vol. 12. No. 1. Hal. 39 – 53. Jember: Universitas Jember.
- Hidayat, Deddy Rakhmad dan Muhammad Riza Firdaus. (2014). “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan : (Studi Pada Pelanggan Telkom Speedy Di Palangka Raya)”. *Jurnal Wawasan Manajemen*. Vol. 2. Nomor 3. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Ikasari, Ajeng Utami, Sri Suryoko dan Sendhang Nurseto. (2013). “Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Penumpang KA Kaligung Mas di Stasiun Poncol Semarang)”. *Diponegoro Journal Of Social and Politic*. Tahun 2013. Hal. 1 – 8. Semarang: UNDIP.
- Ismail, Riswandhi. (2014). “Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk Dan Kepuasan Nasabah Sebagai Prediktor Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Vol. 10. No. 2. September 2014. Hal. 1 – 18.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Keduabelas. Jilid 1 dan 2. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Indeks.
- Laksana, Fajar. (2008). *Manajemen Pemasaran : Pendekatan Praktis*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lenzun, Jessica J., James D.D. Massie dan Decky Adare. (2014). “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Prabayar Telkomsel”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*. Vol. 2. No. 3. Hal. 1237-1245. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Lovelock, Christopher H. Dan Lauren K. Wright. (2007). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Cetakan II. Jakarta : Indeks.
- Lovelock, Christopher, Joachen Wirtz dan Jacky Mussry. (2010). *Pemasaran Jasa : Manusia, Teknologi, Strategi. Perspektif Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Manus, Fanly dan Bade Lumanauw. (2015). “Kualitas Produk, Harga, Dan Kualitas Layanan, Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Prabayar Tri Di Kelurahan Wawalintouan Tondano Barat”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*. Vol. 3. No. 2. Hal. 695-705. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Markoni. (2011). “Pengaruh Dimensi Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan”. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*. ISSN: 2085-1375. Hal 59 – 70. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya. Sumatera Selatan.
- Munisih, Siti dan Euis Soliha. 2015. “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Nilai Pelanggan dan Kepuasan Pelanggan dan Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan Apotek Dela Semarang”. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers*. Hal. 1-16. Semarang : UNISBANK.

- Normasari, Selvy, Srikandi Kumadji dan Andriani Kusumawati. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan, Citra Perusahaan dan Loyalitas Pelanggan". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 6. No. 2. Desember 2013. Hal. 1. – 9. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Pangandaheng, Fony. (2015). "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Hadji Kalla Palu". *e-Jurnal Katalogis*. Volume 3. Nomor 2. Pebruari 2015. Hal. 51-67. Palu: Universitas Tadulako. Sulawesi.
- Rahyuda, I Ketut dan Ni Putu Cempaka Dharmadewi Atmaja. (2011). "Pengaruh Kewajaran Harga, Citra Perusahaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Penerbangan Domestik GIA di Denpasar". *Jurnal EKUITAS*. Vol. 15. No. 3. September 2011. Hal. 370 – 395. Bali: Universitas Udayana.
- Ratnasari, Ririn Tri dan Mastuti Aksa. (2011). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rinala, I Nyoman, I Made Yudana dan I Nyoman Natajaya. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Mahasiswa Pada Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali". *Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 4. Hal. 1 – 12. Denpasar: Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. Bali.
- Saputra, Falla Ilhami. (2013). "Kualitas Layanan, Citra dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Pada PT Bank BNI 46 Sentra Kredit Kecil Surabaya)". *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 11. No. 3. September. Hal. 445 – 457. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sawitri, Ni Putu, Ni Nyoman Kerti Yasa dan Abdulah Jawas. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Tegal Sari *Accommodation* Di Ubud". *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*. Vol. 7. No. 1. Februari 2013. Hal. 40 – 47. Denpasar: Universitas Udayana. Bali.
- Schiffman, Leon dan Leslie Lazar Kanuk. (2008). *Perilaku Konsumen*. Edisi Ketujuh. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Indeks.
- Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Perhitungan Manual & SPSS*. Edisi Pertama. Cetakan ke 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sondakh, Conny. (2014). "Kualitas Layanan, Citra Merek Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah Dan Loyalitas Nasabah Tabungan (Studi Pada Nasabah Taplus BNI Cabang Manado)". *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. Vol.3. No.1. 2014. Hal. 19-32. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-16. Bandung: Alfabeta.

- Sulistiyanto dan Euis Soliha. 2015. “Pengaruh Persepsi Harga, Citra Perusahaan Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Pada Apotek “Dela” Di Semarang”. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS*. Hal. 1-16. Semarang : UNISBANK.
- Suryani, Tatik. (2013). *Perilaku Konsumen di Era Internet. Implikasinya pada Strategi Pemasaran*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwandi, Andi Sularso & Imam Suroso. 2015. “Pengaruh Kualitas Layanan, Harga Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Pos Ekspres Di Kantor Pos Bondowoso Dan Situbondo”. *Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen (JEAM)*. Vol. XIV. April 2015. Hal.68 – 88. Jember: Universitas Jember.
- Suwarni dan Septina Dwi Mayasari. (2011). “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Konsumen”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*,.Th. 16. No. 1. Maret 2011. Hal. 76 – 84. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*. Edisi III. Yogyakarta: Andi.
- Tjiptono, Fandy. (2011). *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta : Bayumedia Publishing.
- Tombokan, Feiby, Lotje Kawet dan Yantje Uhing. (2015). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Taplus BNI Kantor Cabang Utama Manado”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*. Vol. 3. No. 3. Hal. 552-561. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Cetakan 12. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI KREDIT USAHA PRODUKTIF (SISTEM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KUDUS)

Musthofa¹⁾, Alimuddin Rizal Riva'i²⁾, Teguh Hadi Prayitno³⁾

Email: Musthofa_forpresident@yahoo.com,
ariri@edu.unisbank.ac.id, teguh_lips6@yahoo.com

- 1) Bupati, Pemkab Kudus
- 2) FEB Unisbank, Semarang
- 3) Jurnalis SCTV, Semarang

ABSTRACT

This study focuses on understanding the conditions of small medium enterprises in the district of Kudus, and then evaluating the pattern of productive credit distribution that has been applied. Information obtained in the analysis by SWOT method. The sample in this study is the business people of UMKM in Kudus, amounting to 250 respondents. Based on the results of the study, Micro Business is the weakest business, lack of market access, technology and capital. The Government of Kudus Regency implements the Loan Distribution Pattern in terms of Productive Business Loan. It is proven that this KUP can increase income, reduce unemployment and in the long run eradicate poverty. Business financing using this KUP is needed Commitment from all stakeholders, both businessmen, government, financial institutions and credit guarantee institutions.

Keywords: KUP, SWOT and UMKM

Pendahuluan

Kemandirian dan ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis ekonomi menjadi bukti begitu potensialnya UMKM sebagai fondasi perekonomian nasional. Belum lagi kemampuan UMKM dalam menyerap banyak tenaga kerja, suatu hal yang sulit dicapai oleh jenis usaha yang lain. Kontribusi UMKM amat signifikan terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Karena itu, meningkatkan keunggulan dan kontribusi UMKM merupakan bagian penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menuju terwujudnya pembangunan yang inklusif.

Masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya produktivitas (Susilo, 2005), hal tersebut terkait dengan berbagai sumberdaya dan kapabilitas di UMKM, yaitu : 1) Faktor Pendidikan dan Kompetensi Sumberdaya Manusia; 2)Kemampuan Manajerial; 3) teknologi, ases pasar; 4) dan kemampuan sumber pembiayaan (modal) (Susilo, 2010; Hafisah, 2004). Kendala lain bagi tumbuh-kembangnya UMKM adalah: 1) Iklim Usaha yang tidak kondusif; 2)Terbatasnya sarana dan prasarana usaha, 3) implikasi otonomi daerah dan peran pemerintah daerah, 4) terbatasnya akses pasar, 5) dan pengaruh pasar/perdagangan bebas.

Oleh karena itu, pemberdayaan usaha ini baik yang tergabung dalam berbagai bentuk koperasi maupun secara individual perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sektor usaha kecil menengah daerah disasar sebagai andalan penopang perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, terlebih kelompok ini disinyalir tetap bertahan ketika krisis ekonomi terjadi. Usaha Kecil Mikro dan Menengah ini tersebar diseluruh Kabupaten Kota di Indonesia termasuk di Kudus Jawa Tengah.

Kudus, salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang luasnya paling kecil dari 29 kabupaten dan 6 Kota di Jateng. Kabupaten ini terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, 123 Desa, 9 Kelurahan (Kudus dalam Angka, 2016). Kudus terkenal sebagai Kota Kretek, dan masyarakatnya dikenal pula sebagai masyarakat pedagang yang juga religious, sehingga istilah JIGANG (Ngaji dan Dagang) menjadi Jargon mendasar bagi masyarakat Kudus. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Industri yang terdapat di Kabupaten Kudus beragam macamnya. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jigang (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter dimana disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. Dengan kondisi geografis terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Saat ini data UMKM Kabupaten Kudus yang memasukkan usulan ke desa/Kelurahan sebanyak 10.048 UMKM, sementara jumlah yang telah dibina oleh Dinas Perindustrian,

Koperasi dan UMKM sebanyak 13.200 UMKM (Bappeda Kudus, 2016). Nah, dari sejumlah ini, perlu dikaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi UMKM di wilayah Kudus, sehingga Skim Penyaluran bantuan maupun pinjaman modalnya dapat tepat sasaran dan dapat menjadi kredit yang produktif bagi para pelaku usaha tersebut.

Metoda Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kudus diberbagai sentra UMKM. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana Moleong (2005), yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk rangkaian kata-kata, kalimat dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data yang digunakan dalam studi ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber asli (Kuncoro, 2009). Teknik pengumpulan data berikutnya yang dilakukan adalah melalui wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010). Padahal kegiatan wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau temayang diangkat

dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali, dan wawancara terarah (*guided interview*) dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam (*in-*

depth interview).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, serta menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Hasan, 2002). Metode ini juga merupakan metode analisis yang mengidentifikasi karakteristik dari fenomena yang diamati atau melakukan eksplorasi kemungkinan hubungan dua atau lebih fenomena (Leedy & Ormrod, 2005).

Teknik analisis dalam penelitian UMKM ini adalah dengan menggunakan Swot Analysis, yang berupaya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman UMKM di Kudus dan kemudian menyusun pola pembiayaan yang disesuaikan dengan hasil analisis SWOT tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum, Kudus dan Jawa Tengah pada umumnya ditopang oleh aktivitas UMKM yang bergerak di bidang perdagangan baik besar maupun ritail, Industri Pengolahan, jasa-jasa dan pertanian dalam arti luas. Disamping kontribusi pada pendapatan daerah, kondisi tercermin pula pada tingginya pembiayaan yang terserap oleh UMKM pada sektor-sektor tersebut. Sektor UMKM Jawa Tengah memiliki *comparative* dan *competitive advantages* sebagai modal daya saing dalam menghadapi segala bentuk persaingan.

Berdasarkan jumlah responden yang diteliti untuk mengamati Kondisi dan situasi organisasi UMKM sebanyak 250 responden, maka di peroleh peta Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KeKePAN), dan implikasinya sebagai berikut.

Berdasarkan hasil studi dan kajian yang dilaksanakan oleh Bank Jateng terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk usaha UMKM ini, termasuk implementasinya pada sekroe perbankan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT/KEKEPAN UMKM Di Kudus

Strenght / KEKUATAN	Weaknesses/KELEMAHAN
Pelaku UMKM relatif banyak, terbesar dan beragam usahanya	Mayoritas pelaku UMKM berpendidikan rendah
Bahan baku berasal dari lokal/nasional (Dalam Negeri) sehingga tidak begitu terguncang jika terjadi perubahan kurs mata uang	Lokasi produksi relatif jauh dari dari pusat perdagangan.
UMKM lebih Fleksibel	Kreativitas terbatas .
Memiliki keahlian yang spesifik (seperti mengukir, membatik, membordir dan kerajinan lainnya).	Keterbatasan pembinaan UMKM
Lebih faham dengan lingkungan sekitar usahanya.	Keterbatasan penggunaan teknologi informasi (tingkat efisiensi rendah)
1. Situasi bisnis di Kudus sangat Kondusif dan Aman	1. Liberalisasi perdagangan
2. Letak wilayah yang strategis.	2. Banyaknya produk-produk impor yang masuk
3. Biaya investasi relatif murah dibanding daerah lain.	3. Masih Rendahnya komitmen mutu dari pelaku UMKM
4. Tersedianya tenaga kerja yang relatif banyak dan murah serta tidak terlalu sensitif terhadap issue	4. Tuntutan investor asing dan domestik makin tinggi; dan Konsumen yang semakin kritis dan memiliki preferensi
5. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kudus sangat Tinggi terhadap UMKM.	5. Pebisnis asing lebih inovatif yang didukung modal, teknologi dan jaringan usaha yang luas
6. Dibangunnya sejumlah infrastruktur baik di Kudus maupun di Jawa Tengah	6. Pebisnis asing lebih inovatif yang didukung modal, teknologi dan jaringan

sebagai kelanjutan Program MP3EI. (Jalan Tol, Jalan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Sarana-sarana lainnya).	usaha yang lua
---	----------------

Sumber : Dielaborasi untuk Studi ini, 2017.

Pada dasarnya UMKM di wilayah Kabupaten Kudus ini sudah mulai tertata dengan baik dan sudah semakin tumbuh dan berkembang, namun masih saja masih banyak kelemahan dalam konteks kompetensi dan Pengetahuan para pelaku usaha, sehingga kreativitas mereka masih terbatas dan perlu selalu diberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajerial.

Selanjutnya, dari kondisi dan situasi yang sedemikian rupa ini, maka dengan posisi Kekuatan,Kelemahan, Peluang dan Ancaman bagi UMKM maka terdapat beberapa Implikasi manajerialnya baik secara umum maupun bagi lembaga keuangan khususnya perbankan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Implikasi Manajerial

Implikasi Secara Umum	Implikasi Ke perbankan
<ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya ketersediaan barang dan jasa untuk perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi penyaluran kredit pada sektor perdagangan dan sektor konsumtif • Tingkat perputaran uang yang tinggi.
<ul style="list-style-type: none"> • UMKM dapat Menggerakkan perekonomian daerah, Meningkatkan pendapatan pajak / PAD (Pendapatan Asli Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari risiko bisnis • Menjaga repayment capacity debitur
<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan UMKM mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan <i>repayment capacity</i> dan kapasitas usaha. • Mengurangi <i>loss default loan</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing • Kualitas produk yang sulit ditiru 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas dan kemampuan debitur.
<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan yang dimiliki berdampak menurunkan daya saing UMKM terhadap pasar. Menurunkan kualitas produk dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat akseibilitas pelaku UMKM terhadap produk dan jasa bank.

jasa yang dihasilkan.	
<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya produktivitas barang dan jasa Meningkatkan biaya produksi Mengurangi pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya penggunaan produk dan jasa bank
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kuantitas produk yang berkualitas. Rendahnya kompetensi UMKM Keterbatasan <i>access to market</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran kredit terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu sehingga dapat menimbulkan potensi risiko konsentrasi kredit. Berpotensi menimbulkan Risiko bisnis. Mungurangi kemampuan UMKM untuk membayar kredit kaena turunnya pendapatan
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan arus distribusi barang dan jasa Meningkatkan aktivitas transaksi luar negeri dan penghimpunan devisa. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penggunaan produk dan jasa perbankan dan layanan transaksi luar negeri.
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kelangsungan produksi dan aktivitas usaha.
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan daya tarik investor 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatan minat UMKM untuk mengembangkan usaha dengan fasilitas produk dan jasa bank.
<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin sustainability usaha.
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan iklim usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai wujud Mitigasi risiko dan second way out
<ul style="list-style-type: none"> Mengancam produk dan jasa Mengancam upaya pengembangan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan aktivitas transaksi luar negeri.
<ul style="list-style-type: none"> Melemahkan daya saing UMKM Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan potensi risiko bisnis bank.
<ul style="list-style-type: none"> Turunnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kemampuan UMKM dalam mengakses bank.
<ul style="list-style-type: none"> Biaya produksi meningkat Mengurangi pendapatan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan potensi risiko bisnis bank.

Sumber : Dielaborasi untuk Studi ini, 2017.

Oleh karena kajian ini fokus pada pembiayaan UMKM, maka implikasi manajerial yang dijadikan pijakan adalah Implikasi manajerial bagi perbankan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa UMKM ini perlu disediakan pembiayaan yang lebih memudahkan akses bagi mereka, dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan dana tersebut bagi usahanya.

Berdasarkan kajian KEKEPAN ini, level usaha yang paling memiliki kelemahan dan keterbatasan dari sisi modal dan ases pasar adalah Usaha Mikro. Usaha mikro ini perlu diberdayakan secara financial untuk pengembangan usahanya, namun skema pembiayaannya tidak boleh rumit dan beban yang tinggi, sehingga kredit tersebut mampu dijangkau dan diminati oleh para pelaku usaha. Terkait dengan permodalan, kebanyakan UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan permodalan dari perbankan. Sampai saat ini masih ada perbedaan persepsi antara UMKM dengan bank, khususnya mengenai kelayakan kredit. UMK Memiliki usaha yang prospektif dan menguntungkan (*feasible*) namun demikian belum layak dari kacamata bank (*bankable*) karena minimnya agunan, atau agunan yang dimiliki kurang mencukupi dalam mengcover risiko kredit. Menurut Bharti dan Shylendra (2011) dikutip oleh Emmanuel (2012), akses terhadap modal sangat penting dalam pengembangan usaha khususnya usaha mikro. Demikian pula, Simtowe dan Phiri (2007) dan Muktar (2009) dikutip oleh Emmanuel (2012), menyatakan kredit sebagai prasyarat untuk pertumbuhan perusahaan.

Berbasis fenomena empiris, maka Pemerintah Kabupaten Kudus membuat Kebijakan peluncuran Kredit Usaha Produktif (KUP) yang bekerjasama dengan Bank Jateng. Kredit Usaha Produktif ini (KUP) adalah Kredit Usaha bagi Usaha Mikro yang memiliki usaha produktif dengan skema penjaminan yang selanjutnya disebut Kartu UKM KUP. Di bawah ini adalah rincian jenis program Kredit Usaha Produktif yang menjadi fokus kajian studi ini, sebagai berikut:

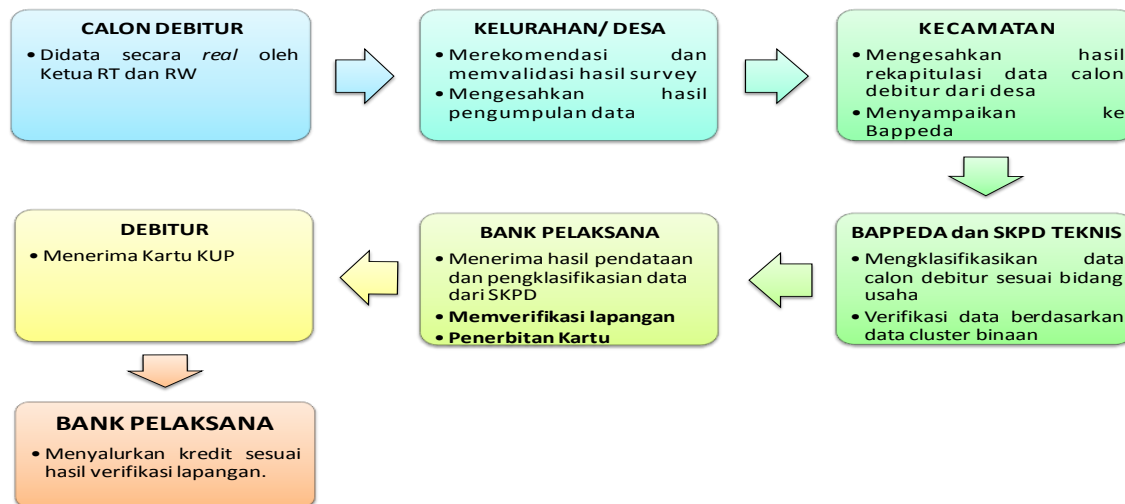
Jenis Program	: Kredit Usaha Produktif (KUP) dengan skema penjaminan, murni menggunakan dana perbankan
Cakupan Wilayah	: Seluruh wilayah Indonesia
Bentuk Program	: Kartu UKM KUP sebagai sertifikat Kredit dan Penjaminan
Nilai Kredit Maksimum	: Sesuai klasifikasi kartu

Suku Bunga Kredit	: 0,9% per bulan flat (Include adm, provisi dan materai)
Jangka Waktu Kredit	: Maksimal selama 3 (tiga) tahun
Coverage Penjaminan	: Max 85% dari Kredit yang disalurkan
Imbal Jasa Penjaminan	: 2,85% per tahun x sisa kredit (regresif)
Syarat Kebersertaan	: WNI yang berada di wilayah RI berusia 18 tahun atau sudah sampai dengan 65 tahun

Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan KUP ini dimaksudkan untuk: 1) Mendukung penguatan modal para pelaku usaha mikro kecil 2) Meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha; 3) Memberikan pembinaan administrasi, penagihan dan monitoring; 4) Menyediakan data hasil survey (Pemkab Kudus, 2016). Sementara itu tujuan utama diselenggarakannya KUP ini adalah: Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan Mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

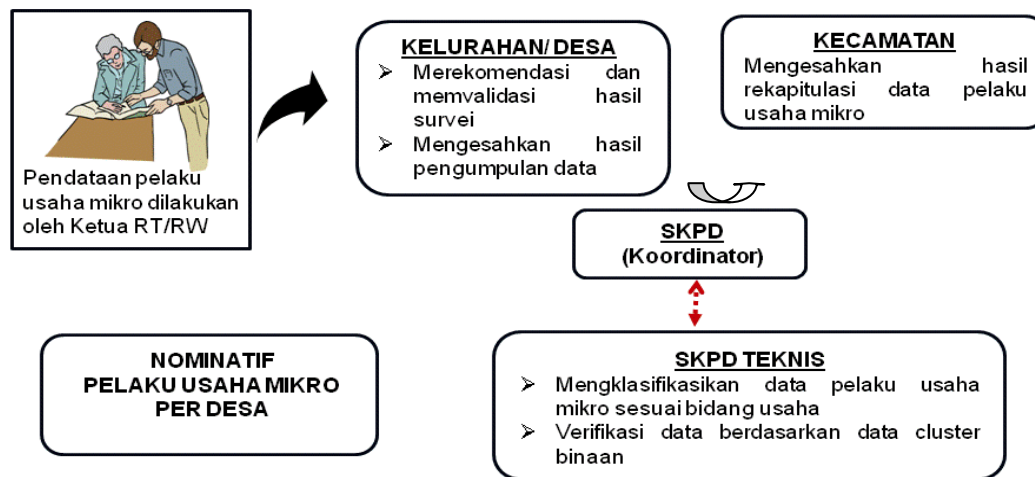
- Perbedaan antara KUR konvensional dengan KUP ini adalah sebagai berikut, Untuk KUR kondisinya sebagai berikut : Penerima UKM yg Bankable/ masih menggunakan agunan, Bunga 12 % per tahun (semula 22 %), Coverage penjaminan kepada sektor mikro sebesar 80% dari nilai pinjaman dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 3,25 % pertahun, Sebagian besar dana tersalurkan sektor perdagangan dan jasa, Kredit Konvensional dikenakan biaya administrasi, provisi dan materai.
- KUP, bercirikan sebagai berikut: Penerima Sasaran kepada sektor usaha mikro produktif tanpa agunan, Bunga 0,9 % per bulan, Maksimal kredit sesuai dg kriteria mulai dari maksimal Rp. 5 juta, Rp. 10 juta, Rp. 15 juta dan Rp. 20 juta, Coverage penjaminan kepada sektor mikro sebesar 85 % dari nilai pinjaman dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 2,85 %. Validasi data berdasarkan data dari dinas Dukcapil Kab/ Kota koordinasi dengan BPS melalui petugas pencacah yg terdiri dari BPS, SKPD terkait dan RT/RW setempat. Tidak ada biaya adm, provisi dan materai saat pengajuan KUP. Selanjutnya untuk proses pencairan dana kredit ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dimulai dari pendataan tingkat RT sampai ke BAPPEDA dan SKPD Teknis untuk memverifikasi calon debitur, kemudian setelah itu barulah diserahkan ke Bank pelaksana, kemudian setelah verifikasi bank selesai barulah bank menerbitkan kartu untuk diserahkan

ke Debitur. Langkah terakhirnya para debitur yang telah menerima Kartu KUP untuk mencairkan kreditnya ke Bank yang ditunjuk.



Gambar 1. SOP PENGAJUAN KUP

Pada proses awal Pengajuan KUP ini terdapat serangkaian kegiatan yang perlu dan wajib dilakukan oleh pihak Pemerintahan dengan melibatkan unsur RT dan RW yang mendata pelaku usaha mikro, kemudian pihak Kelurahan melakukan verifikasi ependudukan dan usaha serta mengesahkan hasil survey level RT/RW. Setelah selesai level Kelurahan, kemudian di rekapitulasi dan disahkan oleh Pihak Kecamatan. Jadi proses ini sudah cukup untuk menyeleksi keabsahan seorang pengusaha mikro yang akan diajukan untuk penerima KUP, sebelum selanjutnya diserahkan kepada SKPD terkait yang menangani KUP ini.



Gambar.2. Skema Pendataan Peserta KUP

Lembaga-lembaga yang terlibat secara langsung pada program Kredit Usaha Produktif ini setidaknya ada 4 (empat) unsur utama, yaitu Lurah/Kades dan Camat, SKPD/BAPPEDA, Bank Jateng, dan JAMKRINDO/ASKRINDO. Keempat lembaga tersebut memiliki perannya masing-masing dalam implementasi program KUP ini, sehingga jika peran ini dijalankan dengan profesional, sesuai dengan SOP dan berintegritas maka sangat mungkin para pengusaha mikro di daerah-daerah di Kudus bahkan di wilayah Indonesia lainnya akan menjadi lebih sejahtera dan makmur. Peran-peran tersebut sebagaimana tertera pada Tabel 3,

Tabel 3. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga

LURAH/KADES & CAMAT	SKPD/ BAPPEDA	BANK JATENG	JAMKRINDO/ ASKRINDO
<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi ke pelaku usaha mikro Menghimpun data Mengidentifikasi kelayakan usaha Monitoring usaha di tingkat desa/kelurahan/kecamatan Menyerahkan data ke Bappeda 	<ol style="list-style-type: none"> Menghimpun data pelaku usaha mikro Memverifikasi data dari Bappeda Memberi rekomendasi calon penerima KUP Monitoring dan Pembinaan kepada pelaku usaha mikro Menyerahkan data yang sudah diverifikasi kepada Bank Jateng 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisa (layak/tidak layak) Menetapkan penerima dan plafond kredit Melakukan perjanjian kredit Menerbitkan Kartu KUP Mengeluarkan peringatan, penagihan pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin KUP Mikro sesuai PKS

Sumber : Pemkab Kudus, 2017

Melalui peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan tersebut, maka jumlah penerima kredit KUP ini semakin meningkat.

Tabel 4. Perkembangan Kredit Usaha Produktif di Kudus
Tahun 2016

Bulan	Plafond (Rp.)	Debitur	Pertumb Plafond (%)
Maret	35.000.000	3	-
April	616.000.000	59	1660,00
Mei	1.395.000.000	126	126,46
Juni	1.722.000.000	159	23,44
Juli	2.084.000.000	204	21,02
Agustus	2.690.000.000	272	29,08
September	4.228.000.000	457	57,17
Oktober	5.079.000.000	547	20,13
Nopember	6.046.000.000	657	19,04
Desember	6.694.000.000	720	10,72

Sumber : Data diolah, 2017

Sejak bulan Maret 2016, jumlah debitur baru 3 (tiga) orang dengan plafond kredit mencapai 35 juta rupiah saja, kemudian berkembang pesat di akhir tahun 2016 Plafond mencapai Rp 6,7 milyar dengan jumlah 720 pengusaha.

Sementara itu, jumlah debitur, penyerapan tenaga kerja pada masing-masing level Plafond kredit yang diberikan pada usaha mikro ini adalah sebagai berikut, Tabel 5.

Tabel 5. Plafond Kredit, dan Prediksi Penyerapan Tenaga Kerja

Plafond	Debitur	Tenaga Kerja (orang)	Penyerapan naker (orang)
Rp. 1.000.000 s.d . Rp. 5.000.000	255	1 - 2	382
> Rp. 5.000.000 s.d . Rp. 10.000.000	287	3 - 4	1.004
> Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 15.000.000	88	5 - 7	528
> Rp. 15.000.000	90	8 - 10	810
Jumlah	720		2.724

Sumber : Data diolah, 2017

Jika, 720 debitur usaha mikro berjalan sesuai dengan rencana maka setidaknya akan terserap sebanyak 2.724 tenaga kerja untuk usaha mikro tersebut. Tentu, upaya pemerintah untuk membantu usaha mikro ini menjadi salah sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan bahkan dapat memperkecil angka kemiskinan. Oleh karenanya program penyaluran kredit usaha produktif ke para pengusaha mikro kecil ini sangatlah efektif untuk menyelesaikan berbagai problem pemberantasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.

Sementara itu, Portofolio KUP tahun 2017 pesektor di Kabupaen Kudus menunjukkan informasi telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari pertumbuhan KUP baik jumlah debitur maupun jumlah kreditnya. Sampai dengan Agustus 2017, jumlah debitur sebanyak 1.378 dengan plafond kredit sebanyak Rp 12,99 milyar dan sebanyak Rp 5,7 milyar kredit outstanding. Sektor yang paling banyak menyerap kredit ini adalah perdagangan eceran, Industri pengolahan, dilanjutkan Komunikasi dan Jasa serta Restoran dilanjutkan dengan sektor Perikanan dan Peternakan.

Tabel 6. Portofolio Kup Mikro Bank Jateng Cabang Kudus Per Sektor

NO	SEKTOR EKONOMI	JML DEB	PLAFOND	OUTSTANDING
1	Industri : (pengrajin logam, tahu,tempe)	361	3.597.200.000	1.998.952.881
2	Perdagangan Eceran : (sembako, sangkar burung, pakan ternak, kue kering dll)	467	4.941.200.000	2.530.447.534
3	Perikanan, Peternakan : (kambing, ikan, ayam)	100	892.200.000	98.655.610
4	Komunikasi&Jasa : (penjahit, bubut kayu, bengkel, catering,salon)	231	1.946.800.000	700.451.067
5	Restoran : (warung makan)	219	1.612.600.000	468.256.154
	TOTAL	1.378	12.990.000.000	5.796.763.246

Sumber: Bank Jateng, 2017

Selanjutnya, informasi pelaksanaan KUP ini dapat diketahui bahwa untuk plafond kredit yang telah disalurkan tersebar di plafond kredit s.d Rp 5 juta sebesar 35,42%, 5 sampai dengan Rp 10 juta 39,8% sementara untuk di 10 juta sebanyak 24,72 %.

Tabel 7. Kinerja Kredit Usaha Produktif 2016

Plafond	Debitur	Share (%)
Rp. 1.000.000 s.d . Rp. 5.000.000	255	35,42
> Rp. 5.000.000 s.d . Rp. 10.000.000	287	39,86
> Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 15.000.000	88	12,22
> Rp. 15.000.000	90	12,50
Jumlah	720	100,00

Sumber : Pemkab Kudus, 2017.

Kredit usaha Produktif ini sudah banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha mikro, jumlah pengusaha yang mengambil sudah mencapai 1.378 nasabah dengan plafond kredit sejumlah Rp 12. 990.000.000,-. Dengan jumlah debitur sebanyak ini, diharapkan jumlah tenaga kerja yang terserap akan menjadi lebih banyak lagi, diperkirakan jumlahnya mencapai 3.167. kredit ini juga akan berjalan aman, karena ada lembaga penjamin Jaskrindo/ASKRINDO. Berjalannya program ini sangat bergantung dari komitmen para pelaku organisasi yang terlibat dalam program ini, yaitu pengusaha itu sendiri, perbankan yang berkomitmen untuk tetap membrikan kredit dengan plafon tertentu, bunga rendah dan tanpa persyaratan pembayaran bea adm, materai yang memberatkan.

Diharapkan KUP ini dapat mencapai tujuan berupa: peningkatan pendapatan, memperluas lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Kesimpulan

UMK merupakan sektor usaha yang terbukti berperan strategis dalam mengatasi akibat dari dampak krisis ekonomi. Meskipun UMKM mampu bertahandalammasa

krisisnamuntidakserta merta menjadikannya berkembang dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi lambannya perkembangan usaha tersebut, antara lain akses terhadap sumber-sumber permodalan. Terkait dengan permodalan, kebanyakan UMKM mengeluhkan ulitnyamendapatkan permodalan dari perbankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukan peningkatan akses kepada sumber daya produktif melalui dukungan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan.

1. Usaha mikro memiliki akses yang rendah terhadap perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Namun demikian, dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya. Usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, tidak sensitive terhadap suku bunga dan valas, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.
2. Kredit Usaha Produktif merupakan salah satu upaya untuk membantu usaha mikro menjadi lebih berdaya dan memiliki daya saing tinggi.
3. Perlu ada komitmen pemerintahan bekerjasama dengan lembaga keuangan dan penjaminan agar kredit yang disalurkan oleh perbankan dapat berjalan secara terarah, efektif dan efisien.
4. Badan pengawas pemberian kredit harus selalu mendampingi pengusaha mikro yang telah mengambil KUP, agar uang yang terserap digunakan sesuai dengan peruntukannya.
5. Pelaksanakan KUP di Kabupaten Kudus ini patut dijadikan contoh untuk wilayah lain karena program ini berjalan lancar dan sangat bermanfaat baik bagi pengusaha maupun

perbankan dan masyarakat luas.

Saran

Untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM maka selayaknya setiap pemerintahan daerah memiliki program yang dapat mengangkat martabat para pengusaha UMKM, khususnya mikro yang relatif tidak memiliki akses kelembaga-lembaga keuangan. Mencontoh atau mengadopsi pola pemberian kredit yang dilaksanakan di Kudus adalah salah satu pilihan bagi setiap daerah tentu dengan berbagai modifikasi sesuai kebutuhan dan analisis SWOT/KEKEPAN dari masing-masing lingkungan UMKM.

Daftar pustaka

- Anonim. 2004. Pengkajian Usaha Mikro di Indonesia. Himpunan Abstrak Hasil Penelitian Koperasi dan UKM. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Januari 2008.
- Bastian, B.e.a., 2007. *Mari Membangun Usaha Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bank Jateng, Laporan Perkembangan KUP, 2017.
- Emmanuel, O.I.I. & O.K., 2012. Assessment of the Contribution of Micro Finance Institutions (MFIs) to Sustainable Growth of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Nigeria. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 3(9), pp.1099-1110.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, i. M., 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Hubeis, M., 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Galia Indonesia.
- Moleong, L., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemkab Kudus, Materi Seminar Kredit untuk UMKM, Semarang 2017.
- Robinson, M.S., 2001. *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance for the poor*, Washington, D.C: The World Bank.
- Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan, Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia. *Artikel Th*, II (1).
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistyo-Basuki, 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Sumaryanto, 2010. *Mengenal Kewirausahaan*. Semarang: PT. Sindur Press.
- Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan UKM. Infokop. Nomor 25 Tahun 2004, 40 – 44. Diakses dari <http://www.depkop.go.id> pada tanggal 8 September 2010.
- Idris, I. 2006. Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Untuk Pemberdayaan UKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, No.2 Tahun I, hlm.99-105. Kantor Bank Indonesia Yogyakarta. 2010.
- Kuncoro, M. 2008. Write Off Kredit UMKM. Kedaulatan Rakyat. 10 Desember 2008. Diakses dari <http://www.mudrajad.com> pada tanggal 30 Oktober 2010.
- Leedy, P.D. & Ormrod, J.E. 2005. *Practical Research: Planning and Design*, 8th Edition, Pearson Education Pte., Singapore.
- Sekaran, U. & Bougie, R. 2010. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*, 5th Edition, John Wiley and Sons Inc., USA.
- Setyari, N.P.W. 2005. *Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia*. Working Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sri Susilo, Y. 2005. Strategi Survival Usaha Mikro Kecil (Studi Empiris Pedagang Warung Angkringan di Yogyakarta). Telaah Bisnis, Vol.6, No.2, hlm.161–178.
- Sri Susilo, Y. & Sutarta, A.E. 2004. Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, hlm.65–78.
- Subandi, S. 2007. Potensi Pengembangan Permodalan UMKM Dari Pinjaman Perbankan. Artikel. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Agustus 2010.
- Tambunan, T.T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Cetakan I. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, H.M.Y., Fattah, S., Djauhariah, L., Siswadharna, B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 23 Agustus 2010.

ANALISIS KESIAPAN DESA TERHADAP PERMENDES NO 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA

Penta Widyartati

Surel: pentawidyartati@gmail.com
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

ABSTRAK

Sejak dana desa diwujudkan sebagai usaha untuk membangun wilayah perdesaan, terjadi beberapa kali perubahan. Perubahan yang terbaru adalah perubahan aturan penggunaan dana desa yang semula diatur dalam UU no. 6 tahun 2014 menjadi Permentdes No. 4 tahun 2017. Dalam UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan desa baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan dalam permentdes No. 4 tahun 2017 pasal 4 ayat 1 penggunaan dana desa tersebut diubah dengan prioritas penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan tersebut menuntut desa untuk siap menjalankan dan mengubah alokasi penggunaan dana apabila penggunaannya tidak sesuai dengan yang termaktub dalam permentdes no. 4 tahun 2017. Dari analisis penelitian yang mengambil sampel pada lima desa di kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini menunjukkan kesiapan desa-desa yang menjadi sampel untuk menggunakan dana desa sesuai dengan permentdes no. 4 tahun 2017 tersebut. Kesiapan desa-desa tersebut ditunjukkan dengan pendanaan bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pembinaan masyarakat desa yang tidak melebihi pendapatan desa yang bersumber selain dari APBN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 desa-desa sampel dapat mendanai bidang-bidang tersebut tanpa menggunakan dana desa.

Kata kunci: Dana Desa

Pendahuluan

Menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri

tersebut juga termasuk kewenangan desa dalam mengatur keuangannya sendiri baik mengatur pendapatan maupun pengeluarannya.

Pendapatan yang diterima oleh desa berasal dari beberapa sumber yaitu dari pendapatan transfer, pendapatan asli daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan transfer dapat berasal dari APBN yang kemudian dikenal dengan Dana Desa (DD) dan yang berasal dari APBD yang dikenal Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan pendapatan asli daerah bersumber dari swadaya hasil usaha dan sumber lain. Untuk pendapatan lain-lain diperoleh desa dari hasil pembagian pajak dan retribusi, bantuan dari propinsi, bantuan dari kabupaten maupun dari hibah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada awalnya munculnya dana desa, penggunaan Dana Desa itu diatur dalam Undang-Undang Desa (UU No. 6 tahun 2014). Dari undang-undang yang mengatur tentang penggunaan dana desa tersebut dikatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, atau dengan kata lain semua pengeluaran desa dapat didanai dengan dana desa tersebut. Pengeluaran dana anggaran desa tersebut dibagi dalam beberapa bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan dana tak terduga.

Pada tanggal 5 April 2017 terbit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Dalam aturan tersebut diatur tentang prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan

program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa. Adanya perubahan aturan yang mengatur perubahan penggunaan dana desa, maka dari bidang-bidang belanja desa tersebut, hanya bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dibiayai dari dana desa tersebut. Sehingga bidang-bidang yang lain hanya boleh dibiayai dari sumber selain dari dana desa.

Permasalahan

Permasalahan yang timbul dari adanya perubahan aturan penggunaan anggaran desa yang bersumber dari APBN adalah kesiapan desa dalam menyikapi perubahan penggunaan dana desa ini. Perubahan penggunaan dana desa yang semula dapat digunakan untuk mendanai semua bidang kegiatan desa, maka setelah berlaku Permendes no. 4 tahun 2017 ini maka penggunaan dana desa selain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah tidak dibenarkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendanaan bidang-bidang selain bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa telah didanai oleh dana yang bersumber selain dari APBN.

Untuk mengetahui dapat menjawab permasalahan di atas maka perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Dari mana sajakah sumber-sumber pendapatan desa?
2. Seberapa besar pendapatan desa yang bersumber dari APBN?
3. Bidang-bidang apa sajakah yang dibiayai dari sumber-sumber pendapatan desa?
4. Bidang-bidang apa sajakah yang dapat dibiayai dari pendapatan yang bersumber dari APBN dan yang tidak dapat dibiayai oleh dana dari APBN
5. Menganalisis apakah ada biaya dana desa yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat

Kajian Pustaka

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri tersebut juga termasuk kewenangan desa dalam mengatur keuangannya sendiri baik mengatur pendapatan maupun pengeluarannya.

Sebagai organisasi non profit, desa memperoleh pendapatan dari beberapa sumber yaitu antara lain dari APBN, APBD, Hasil Usaha, dan lain-lain. Dana yang berasal dari APBN disebut sebagai Dana Desa. Sedangkan dana yang bersumber dari APBD disebut sebagai Alokasi Dana Desa.

Proses penyaluran dana desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung melalui pemerintah daerah (pemda). Penyaluran dana dilakukan setelah mendapatkan data jumlah desa yang diperoleh dari Kemendagri, kemudian dana desa disalurkan dari KPKN ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) setelah 7 hari disalurkan ke RKU Desa.

Untuk penyalurannya pemerintah memperhatikan laporan desa. Sedangkan terkait penggunaan dana desa, hanya diperuntukkan bagi empat bidang. Keempatnya meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk penggunaannya diatur oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sedangkan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan diatur oleh Kemendagri. Untuk pengawasan pemerintah telah membuat aturan berjenjang di berbagai tingkatan.

Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi penyelewengan dana desa dimulai dari tingkat pusat yaitu BPK, Itjen Kemendagri, BPKP, kemudian Bawasda di daerah. Untuk tingkat desa sendiri ada BPD (Badan Pengawas Desa) masyarakat dan musyawarah desa) serta teknologi informasi seperti Sikeudes (aplikasi keuangan desa).

Bidang-bidang yang menjadi sasaran pendanaan desa adalah:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, dan kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ada pada Bab V mulai dari pasal 23-66. Bab ini sangat krusial dan banyak menguras perdebatan publik pada masa penyusunannya.

Bab tentang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari 8 bagian, yaitu (1) pemerintah desa; (2) kepala desa; (3) pemilihan kepala desa; (4) pemberhentian kepala desa; (5) perangkat desa; (6) musyawarah desa; (7) Badan Permusyawaratan Desa; dan (8) penghasilan pemerintahan desa.

Pemerintah desa sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pada Pasal 25 disebutkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. Menetapkan Peraturan Desa;
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 7. Membina ketenteraman masyarakat Desa;
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang berorientasi pada upaya peningkatan standar hidup yang lebih baik. Hal tersebut disebabkan karena kenyataan menunjukkan bahwa standar hidup di pedesaan terbukti masih lebih rendah dibanding dengan standar hidup di perkotaan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (2009 –

20014) telah memetakan dan menetapkan berbagai hal berkenaan dengan pembangunan pedesaan.

Berkaitan dengan permasalahan yang pada umumnya dihadapi masyarakat pedesaan adalah

- 1) Terbatasnya alternatif lapangan kerja. Mayoritas kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat desa adalah di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung menurun.
- 2) Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi secara struktural maupun spasial. Hal tersebut tampak dengan kondisi lemahnya keterkaitan antara sektor pertanian (produk) dengan sektor industri (pengolahan) dan sektor jasa
- 3) Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan.
- 4) Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat desa
- 5) Rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana
- 6) Rendahnya kualitas SDM masyarakat pedesaan
- 7) Meningkatnya konversi lahan pertanian subur bagi peruntukan lain
- 8) Lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat desa
- 9) Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.

Selanjutnya Pemerintah SBY (2009 – 2014) telah menetapkan sasaran pembangunan pedesaan yakni:

- 1) Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan khususnya lapangan kerja non-pertanian yang ditandai dengan pengurangan angka pengangguran terbuka
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan terutama perempuan dan anak
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman
- 5) Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan.

Bertitik tolak dari permasalahan dan sasaran program pembangunan pedesaan tersebut, program pembangunan pemerintah SBY (2009 – 2014) terkait dengan pembangunan pedesaan menetapkan kebijakan sebagai berikut

- a. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non-pertanian (industri pedesaan dan jasa penunjang), diversifikasi usaha pertanian.
- b. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan guna meningkatkan kontinuitas pasokan
- c. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan ke sumber- sumber daya produktif
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitas baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memenuhi hak- hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan reesiko kerentanan
- f. Mengembangkan praktek- praktek budidaya pertanian dan usaha non- pertanian.

Selanjutnya ditetapkan program pembangunan pedesaan mencakup :

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan 12 kegiatan pokok.
- b. Program pengembangan ekonomi lokal dengan 13 kegiatan pokok
- c. Program terkait dengan peningkatan infrastruktur pedesaan dengan empat (4) kegiatan pokok
- d. Program terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di pedesaan dengan 7 kegiatan pokok dan
- e. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam pedesaan dengan lima (5) kegiatan pokok.

3. Bidang pembinaan masyarakat desa

Pembinaan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, meliputi pembinaan pendidikan, ketenteraman dan ketertiban, olah raga dan kesenian, keagamaan dan kesehatan.

Pembinaan masyarakat desa dalam pendidikan ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi sekolah sekolah mulai dari tingkat PAU sampai dengan perguruan tinggi. Sedangkan upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di Desa dilakukan melalui pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta pembudayaan sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) dengan melaksanakan ronda malam di lingkungan pemukiman masing-masing.

LINMAS terdiri dari LINMAS inti atau LINMAS Desa dan LINMAS RW. LINMAS DESA merupakan LINMAS inti yang mewakili Desa dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh tingkat Kecamatan atau Kabupaten, sedangkan LINMAS RW merupakan Linmas lokal yang bertugas menjaga keamanan di tingkat RW masing-masing. Selain itu, Pemerintah Desa juga melakukan pembinaan keamanan melalui berbagai anjuran agar adanya SISKAMLING Ronda Malam di masing-masing RW, yang mana teknik pengaturannya diserahkan kepada para ketua RW dan RT masing-masing.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Sasaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan adalah terfasilitasinya masyarakat perdesaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJP) Desa/Kelurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.

Nilai strategis program ini adalah :

Dalam proses penyusunan melalui mekanisme partisipatif diharapkan keterlibatan aktif para elit desa/kel untuk turut serta menentukan arah pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah desa/kelurahan dalam suatu dokumen.

Terdapat proses pembelajaran dalam memahami potensi dan pemanfaatan wilayah desa/kelurahan setempat.

Masyarakat mempunyai "*bargaining position*" yang relatif kuat dalam pengusulan program dan kegiatan dalam berbagai tahapan mekanisme perencanaan.

Metode penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa yang mengacu pada Permendes no. 4 tahun 2017. Adapun data yang dianalisis adalah data yang ada di dalam APBDes pada desa-desa di wilayah kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2016

Hasil dan pembahasan

Penelitian berjudul Analisis Kesiapan Desa Terhadap Permendes No 4 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Dana Desa analisis pelaksanaan anggaran belanja desa ini dilakukan di wilayah kecamatan Gemuh kabupaten Kendal. Pengumpulan data dilakukan secara acak mulai dari tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017.

Adapun proses pengumpulan data diawali dengan mengajukan ijin penelitian ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal. Dari Baperlitbang ijin penelitian diserahkan ke Kecamatan-kecamatan yang ditunjuk untuk berkoordinasi, mengajukan ijin dan menentukan desa-desa yang akan dijadikan objek penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak lima desa yaitu desa Poncorejo, Pucangrejo, Cepokomulyo, Krompaan dan Triharjo.

Dari data-data yang didapat maka dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul yaitu mengenai apakah pendanaan bidang-bidang selain bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa telah didanai oleh dana selain dana desa

Untuk menjawab permasalahan di atas maka perlu diketahui:

1. Dari mana sajakah sumber-sumber pendapatan desa?

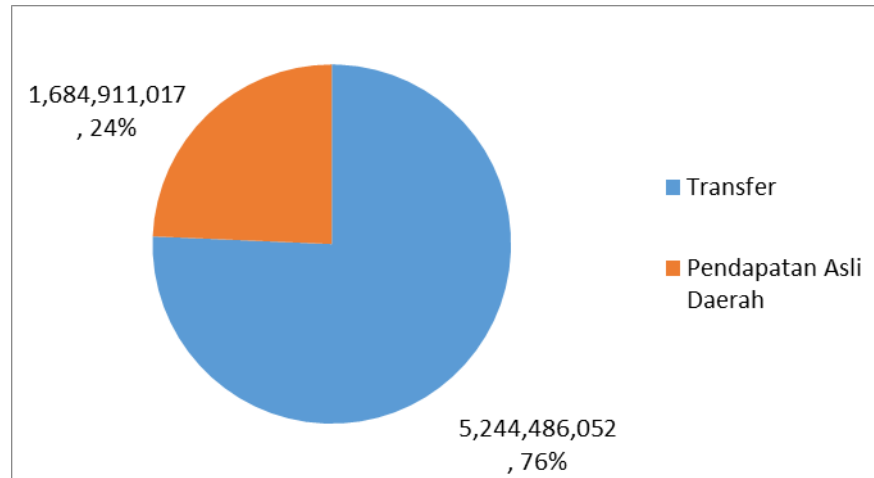
Berdasarkan data yang dikumpulkan diketahui bahwa sumber pendapatan suatu desa terdiri pendapatan transfer, pendapatan asli daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan transfer dapat berasal dari APBN yang kemudian dikenal dengan Dana Desa (DD) dan yang berasal dari APBD yang dikenal Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan pendapatan asli daerah bersumber dari swadaya hasil usaha dan sumber lain. Untuk pendapatan lain-lain diperoleh desa dari hasil pembagian pajak dan retribusi, bantuan dari propinsi, bantuan dari kabupaten maupun dari hibah.

Adapun besaran pendapatan desa berdasarkan sumbernya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Tabel sumber pendapatan desa

No	Desa	Transfer	Pendapatan Asli Daerah	Total
1	Poncorejo	1.071.736.911	355.004.900	1.426.741.811
2	Pucangrejo	1.122.037.094	572.965.000	1.695.002.094
3	Cepokomulyo	951.756.516	274.980.000	1.226.736.516
4	Krompaan	987.164.990	201.260.000	1.188.424.990
5	Triharjo	1.111.790.541	280.701.117	1.392.491.658
	Total	5.244.486.052	1.684.911.017	6.929.397.069

Untuk mengetahui presentasi pendapatan desa tersebut maka dapat dilihat gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Sumber pendapatan desa

2. Seberapa besar pendapatan desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa)?

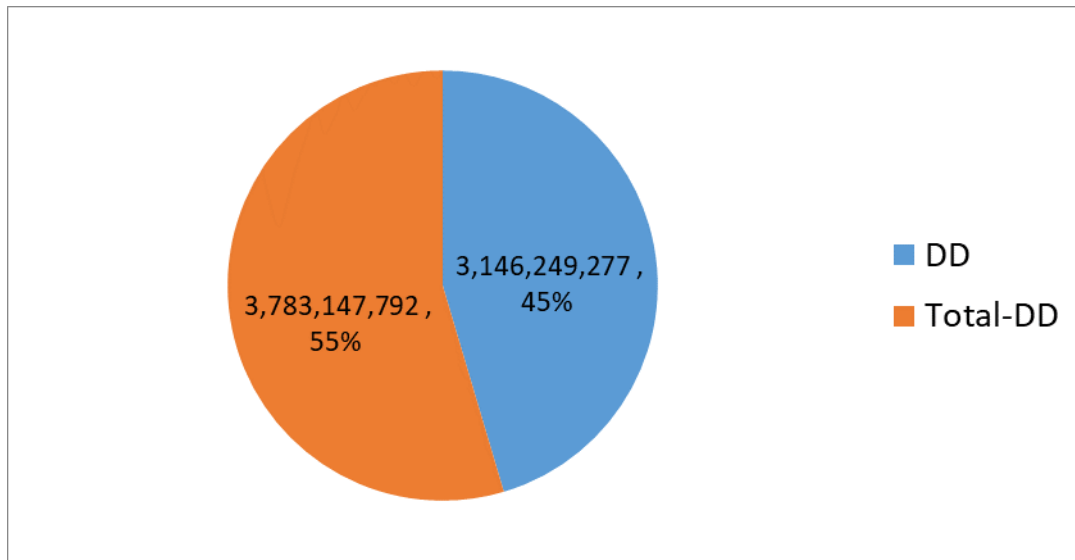
Dana yang bersumber dari APBN (Dana Desa) adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perbandingan dana yang bersumber dari APBN dengan dana yang bersumber dari APBD

No	Desa	DD	Total-DD
1	Poncorejo	622.083.211	804.658.600
2	Pucangrejo	611.072.388	1.083.929.706
3	Cepokomulyo	620.234.154	606.502.362
4	Krompaan	608.950.677	579.474.313
5	Triharjo	683.908.847	708.582.811
Total		3.146.249.277	3.783.147.792

Dari tabel di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Perbandingan Dana Desa dengan Pendapatan Selain Dana Desa

3. Bidang-bidang apa sajakah yang dibiayai dari sumber-sumber pendapatan desa?

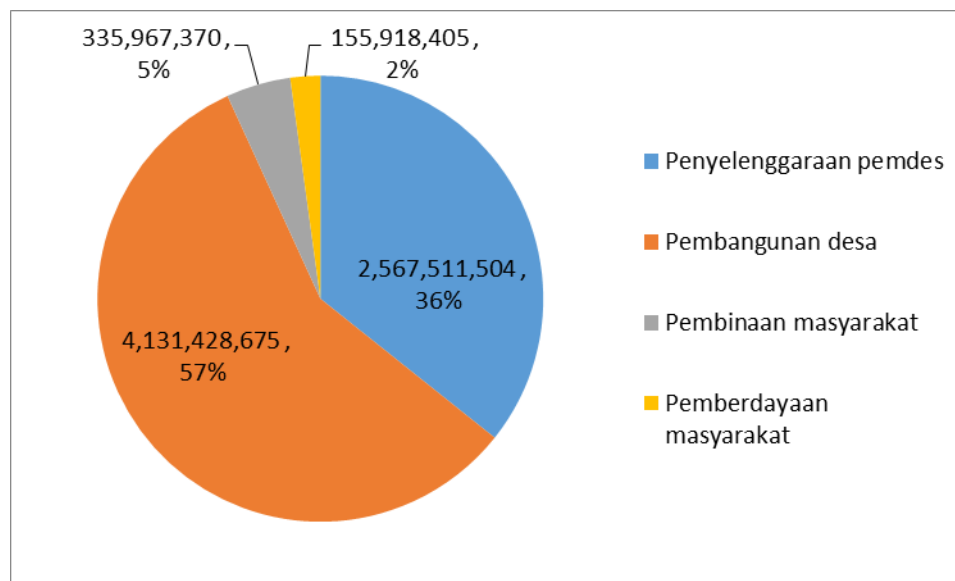
Pengeluaran dana anggaran desa tersebut dibagi dalam beberapa bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan dana tak terduga.

Besarnya alokasi untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pengeluaran untuk masing-masing bidang

No	Desa	Penyelenggaraan pemdes	Pembangunan desa	Pembinaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat	Total
1	Poncorejo	618.900.604	823.463.534	43.882.296	17.500.000	1.503.746.434
2	Pucangrejo	721.304.560	993.947.141	65.030.000	39.360.000	1.819.641.701
3	Cepokomulyo	437.262.973	688.901.000	71.595.705	37.954.405	1.235.714.083
4	Krompaan	281.618.161	820.602.829	78.934.000	7.270.000	1.188.424.990
5	Triharjo	508.425.206	804.514.171	76.525.369	53.834.000	1.443.298.746
	Total	2.567.511.504	4.131.428.675	335.967.370	155.918.405	7.190.825.954

Dari tabel di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 3. Penggunaan Dana Untuk Masing-Masing Bidang

4. Bidang-bidang apa sajakah yang dapat dibiayai dari pendapatan yang bersumber dari dana desa dan yang tidak dapat dibiayai oleh dana desa

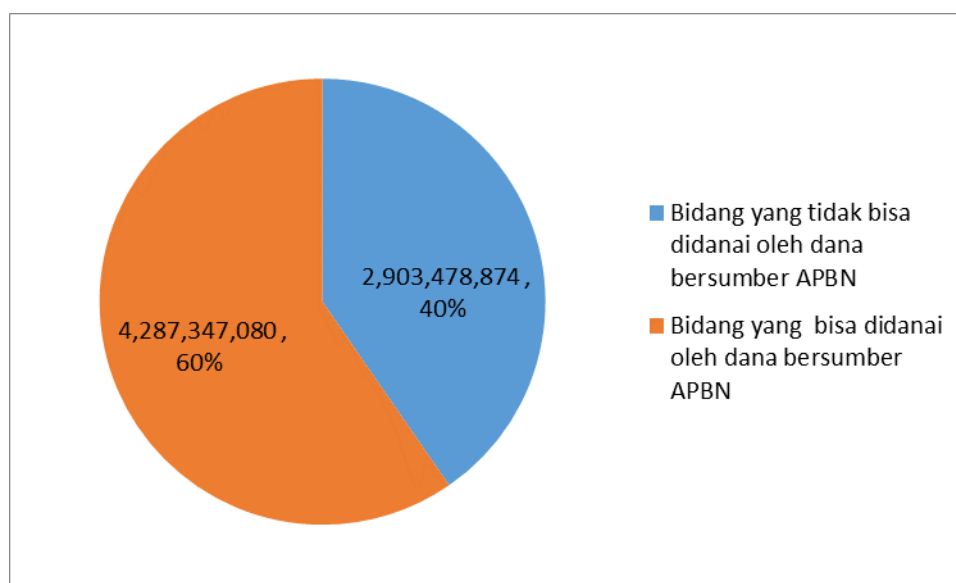
Bidang-bidang yang dapat dibiayai oleh dana desa adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan bidang-bidang yang tidak dapat dibiayai dari dana desa adalah bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembinaan pemerintah.

Adapun besaran dana yang terserap untuk bidang yang dapat dan tidak dapat dibiayai oleh dana desa disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Bidang yang dapat dan tidak dapat dibiayai dari dana desa

No	Desa	Bidang yang tidak bisa didanai oleh dana desa	Bidang yang bisa didanai oleh dana desa
1	Poncorejo	662.782.900	840.963.534
2	Pucangrejo	786.334.560	1.033.307.141
3	Cepokomulyo	508.858.678	726.855.405
4	Krompaan	360.552.161	827.872.829
5	Triharjo	584.950.575	858.348.171
Total		2.903.478.874	4.287.347.080

Dari tabel di atas maka dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 4. Perbandingan Penggunaan Dana Untuk Bidang Yang Bisa Dan Tidak Bisa Didanai Dengan Dana Desa

- Menganalisis adakah dana desa yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat

Untuk menganalisis bahwa biaya dari Dana Desa tidak digunakan untuk bidang-bidang selain pembangunan dan pemberdayaan, digunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis penggunaan dana

No	Desa	Bidang yang tidak bisa dibiayai oleh DD	Total pendapatan	DD	Total pendapatan - DD	6-3
1	2	3	4	5	6	7
1	Poncorejo	662.782.900	1.426.741.811	622.083.211	804.658.600	141.875.700
2	Pucangrejo	786.334.560	1.695.002.094	611.072.388	1.083.929.706	297.595.146
3	Cepokomulyo	508.858.678	1.226.734.516	620.234.154	606.500.362	97.641.684
4	Krompaan	360.552.161	1.188.424.990	608.950.677	579.474.313	218.922.152
5	Triharjo	584.950.575	1.392.491.658	683.908.847	708.582.811	123.632.236

Indikator adanya penggunaan dana desa untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan masyarakat adalah apabila nilai pada kolom 7 bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa total pendapatan selain dana desa tidak mencukupi untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan masyarakat.

Dari tabel di atas kolom pada angka 7 semuanya bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada DD yang digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan masyarakat untuk tahun anggaran 2016.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa-desa sudah siap menerapkan permendes tanpa kesulitan yang berarti, karena sebelum berlakunya permendes desa-desa sudah bisa memenuhi kebutuhan dananya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat desa tanpa penggunaan dana desa.

Penutup

Dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa desa-desa yang dijadikan sampel sudah siap untuk melaksanakan Permendes. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penggunaan dana untuk membiayai bidang-bidang yang bukan menjadi prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No. 4 tahun 2017 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat desa. Sehingga harapan pemerintah menggunakan

dana desa untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak akan menemui kendala yang berarti dari kesiapan desa-desa.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSI, *BOARD INDEPENDENT*, *BOARD SIZE* DAN NILAI PERUSAHAAN DI INDONESIA

Eka Handriani

Email: ekahandriani@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Ungaran Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRACT

This research examines the effect of board of institutional, board independend and board size to firm performance. Using fixed effects data panel regression, this research investigates 293 firms listed on the Indonesian Stock Exchange during 2010-2015. Firm performance is proxied by market measure (Tobin's Q). The findings of this research suggest that the board of institutional, board of Independence has positive impact only to Tobin's Q value, while the board size can increase both Tobin's Q. On the other hand, this research finds that the debt, and impact to firm performance. This research also finds that the board size has non-linear relationship with invesment as proxied by IOS. While the IOS variables are able to mediate the effect of board size to firm performance.

Keywords: *Board of Institutional, Board Independend, Board Size, and Firm Performance*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 6,1 persen di tahun 2017. Untuk mencapai angka tersebut, tentu saja bukan pekerjaan mudah karena kondisi perekonomian saat ini. Upaya mencapai tingkat pertumbuhan perekonomian telah banyak dilakukan pemerintah. Indonesia selama ini masih mengandalkan ekspor komoditas harus segera melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengatasi semakin terpuruknya harga komoditas dunia. Industri manufaktur memiliki ciri kas yaitu mampu memperoleh pendapatan yang tinggi dan banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Budiyaniti (2016) menghasilkan informasi bahwa Industri manufaktur di Indonesia tumbuh sangat baik pada awal tahun 1990-an. Pertumbuhannya selalu di atas 9 persen tiap tahunnya. Namun pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1998, industri manufaktur langsung merosot tajam ke angka

minus 11,4 persen. Setelah pulih dari krisis, industri manufaktur akhirnya meningkat kembali, akan tetapi peningkatannya masih tidak sebesar pada awal tahun 1990-an. Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang cukup stabil dan menjadi salah satu sektor penopang perekonomian negara di tengah ketidakpastian perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 1999 sampai sekarang selalu positif.

Paper ini menguji pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan manufaktur. Khususnya, menguji pengaruh langsung hutang terhadap kinerja perusahaan, mengikuti teori *agency* yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan teori *free cash-flow* Jensen (1986). Teori-teori tersebut memprediksi bahwa pilihan struktur modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Corporate governance merupakan mekanisme yang memiliki tujuan untuk meyakinkan investor telah melakukan aktivitas pengelolaan perusahaan yang selaras dengan kepentingan investor. Sebagai suatu mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa investor akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan. *Corporate governance* didasarkan pada teori keagenan berkaitan dengan upaya untuk meyakinkan investor bahwa manajer akan memberikan keuntungan dengan menginvestasikan uang investor dalam proyek-proyek yang menguntungkan serta bagaimana mekanisme investor untuk melakukan fungsi kontrol para manajer, (Shleifer dan Vishny, 1997). Monks dan Minow, (2001) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Survei yang dilakukan oleh Mc Kinsey dan Co (2002) menunjukkan bahwa *corporate governance* telah menjadi perhatian utama investor, khususnya pada pasar-pasar yang sedang berkembang.

Penerapan *corporate governance* dapat dicerminkan dalam nilai perusahaan yang dilihat dari harga saham perusahaan yang bersangkutan. Menurut Black *et al*, (2002) alternative penjelasan atas hubungan antara praktek *corporate governance* dengan nilai perusahaan menurut penelitian tersebut adalah *signaling* dan *endogeneity*.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris namun masih terhadap nilai perusahaan. Namun, hasilnya tidak meyakinkan dan tergantung pada kondisi spesifik masing-masing perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi *corporate governance mechanism* terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Berle dan Means (1932) dalam karya penelitiannya yang tidak dipublikasikan secara eksplisit menyatakan tentang pemisahan kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) perusahaan, sehingga distribusi kepemilikan saham dalam perusahaan menjadi suatu hal yang penting. Ketika pengendalian perusahaan tidak lagi dilakukan oleh pemilik tetapi diserahkan kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya perusahaan, maka permasalahan yang muncul adalah potensi konflik dalam hubungan antara pemilik (*principals*) dengan pengelola (*agent*) yang sering disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Hubungan keagenan digambarkan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan agen untuk memberikan jasanya bagi kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor. Sebagaimana telah dikemukakan Teori keagenan lebih menyoroti aspek mekanisme *internal corporate governance*. Kathleen M. Eisenhardt, (1989).

Dengan demikian struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur *corporate governance* internal yang diproksi dengan Kepemilikan Institusi, Dewan Independen, Ukuran Dewan. Sedangkan variabel yang merupakan variabel dependen

dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, yang di proksi *Tobin's q* dan variabel keputusan investasi di proksi *investment opportunity set* (IOS). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Firm size, Debt, Age, Risk. Sedangkan variabel independen yang menggambarkan kebijakan tata kelola perusahaan adalah struktur *Good corporate governance* perusahaan, yang terdiri dari **pertama**, kepemilikan institusional yang di proksi dengan menggunakan indicator persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi **kedua** komposisi dewan komisaris independen yang di proksi dengan menggunakan indicator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan, **ketiga** ukuran dewan komisaris yang di proksi dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi model yang bersifat simultan, yaitu suatu model yang dibentuk melalui satu variabel dependen yang dijelaskan oleh satu atau beberapa variabel independen, dimana sebuah variabel dependen pada saat yang sama akan berperan sebagai variabel independen bagi hubungan berjenjang lainnya (Ferdinand, 2005). Struktur *corporate governance*, ukuran perusahaan, hutang, usia perusahaan, dalam penelitian ini adalah merupakan variabel independen.

***Corporate governance* dan Nilai Perusahaan**

Corporate governance telah dikenal luas di masyarakat. Secara umum adalah struktur dan sistem yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Konsep ini dengan cepat diterima oleh masyarakat luas bahkan kinerja saham suatu perusahaan kini ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *corporate governance* (Utama and Cynthia, 2005). Tetapi, sebagian penelitian yang bersifat akademis telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur dan mekanisme *corporate governance* dan nilai perusahaan (Yermack, 1996; Black *et al.* 2002 ; La Porta, *et al.*, 2002 ; Gompers, Ishii, and Metrick, 2003 ; Young, 2003 ; Bebchuk,

et al. 2004 ; Black, Kim, Jang, and Park, 2005 ; Cremers and Nair, 2005 ; Black, Jang and Kim, 2006 ; Chhaochharia and Grinstein, 2006 ; Black and Khanna, 2007 ; Silveira and Barros, 2007 ; Garay and González, 2008 ; Dharmapala and Khanna, 2008 ;).

Kepemilikan Institutional dan Nilai Perusahaan

Penelitian ini di dasarkan pada teori keagenan. Konsep *agency problem* dalam penelitian yang telah dilakukan Jensen dan Mackling (1976) menyatakan bahwa *agency problem* akan terjadi bila proporsi *institutional ownership* atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk kepentingan dirinya dan tidak berdasar pada pemaksimalan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan investasinya. Pada level kepemilikan yang sangat tinggi terdapat kecenderungan kepemilikan *institutional* untuk memaksakan kebijakan tertentu yang tidak optimal, dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas melalui kekuatan voting yang dimiliki. Shleifer & Vishny. R, (1997) berpendapat bahwa tingkat kepemilikan *institutional* dalam proporsi yang cukup besar akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Dasar argumentasi ini adalah semakin besar *institutional ownership*, maka akan semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen.

Kepemilikan *Institutional* sebagai salah satu variabel yang menjadi proksi dari struktur *corporate governance* sebagai suatu mekanisme kontrol bagi penentu investasi perusahaan dimasa yang akan datang. Investasi perusahaan membutuhkan kesempatan, suatu rencana atau proyek yang bisa dipilih untuk mewujudkan tujuannya, yaitu profitabilitas. Perusahaan dengan kesempatan investasi yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek ke depan yang cerah, sehingga akan berdampak positif pada nilai perusahaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Modigliani dan Miller, (1958b) bahwa nilai perusahaan lebih ditentukan oleh kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas dan kesempatan investasi yang tinggi. Karenanya Pada *level* kepemilikan yang sangat tinggi terdapat kecenderungan investor *institutional* untuk memaksakan kebijakan tertentu yang tidak optimal, dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas melalui kekuatan voting yang dimiliki

Konsisten dengan konsep bahwa *corporate governance* adalah sebagai mekanisme kontrol terhadap nilai perusahaan jika semakin meningkat mekanisme kontrol kepemilikan institutional maka makin meningkat nilai perusahaan. Pada penelitian ini nilai perusahaan di proksi oleh $Tobinsq = \text{Market Value of Equity (MVE)} + \text{Debt} / \text{Total Asset}$. *Institutional ownership* di proksi oleh Persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari jumlah seluruh saham yang beredar, dan Investasi, diproksi oleh *Investment opportunity set (IOS)* mengikuti Chen, dan Chung, (2001), (MacKie-Mason dan Jeffrey, (1990) serta Skinner and Soltes, (2011) menggunakan proksi *investment based proxies, research and development expense to book value of total assets* merupakan proksi yang dipercaya pada gagasan suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif dengan nilai IOS suatu perusahaan. berdasarkan uraian tersebut maka 1a, 1b dan 1c dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1a diajukan dalam studi ini adalah kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hipotesis 1b kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap investasi dan hipotesis 1c investasi memediasi pengaruh antara kepemilikan institutional dan nilai perusahaan. Persamaan regresi kepemilikan institutional dan investasi:

$$Np = \beta_0 + \beta_1 IO + \beta_2 BI + \beta_3 BS + \beta_7 Inv + \epsilon_1$$

$$Inv = \beta_0 + \beta_1 IO + \beta_2 BI + \beta_3 BS + \beta_4 Size + \beta_5 Debt + \beta_6 Age + \epsilon_1$$

Board independent dan Nilai Perusahaan

Studi terdahulu telah dilakukan oleh Beiner. *et al.* (2003) pada sekumpulan perusahaan yang terdaftar di *Swiss Stock Exchange*, dengan tujuan untuk menguji dampak dari *board size* terhadap kinerja perusahaan. Hasil studi tersebut menyarankan bahwa *board size* adalah suatu mekanisme pengendalian yang independen. Hipotesis 2 dalam penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen (1986) menjelaskan bahwa konflik kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham terjadi dengan asumsi pemilik (*shareholders*) dan agen (*manager*) masing-masing menginginkan *return* yang tinggi terhadap proyek-proyek investasi tetapi dengan kepentingan yang berbeda terhadap risiko.

Corporate governance merupakan struktur dan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* O'Connell dan Cramer, (2010). *Board independent* merupakan salah satu variabel dari struktur *corporate governance* internal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap Investasi. *Board independent* dalam studi ini diproksi oleh Persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dari keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa apabila diasumsikan *board size* perusahaan tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan investasi perusahaan. Maka hipotesis 2a, 2b dan 2c dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 2a diajukan dalam studi ini adalah *boards independent* berpengaruh positif terhadap firm performance, hipotesis 2b *boards independent* berpengaruh positif terhadap investasi dan hipotesis 2c investasi memediasi pengaruh antara *boards independent* dan nilai perusahaan.

Board size dan Nilai Perusahaan

Penelitian tentang dampak dari *Board size* terhadap nilai perusahaan memiliki hasil positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki Board size yang besar mampu melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kinerja untuk pencapaian nilai perusahaan. (Jensen, 1994; Lipton and Lorsch, 1992; Yermarck, 1996; Eisenberg. et al. 1998). Penelitian berikutnya yang sejalan dengan hasil di atas diantaranya adalah: Garg, (2007) menemukan bukti *board size* dan independensi anggota dewan komisaris baik untuk perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan keluarga maupun kepemilikan non-keluarga mempunyai suatu pengaruh positif yang kuat dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Studi Mayur dan Saravanam, (2006) di India menemukan bukti bahwa ada pengaruh dari *boards size* terhadap nilai perusahaan perbankan. Penelitian pendukung tentang hubungan antara *boards size* terhadap nilai perusahaan. *Board size* dalam studi ini diproksi oleh Jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Sebagai salah satu

variabel dari struktur *corporate governance internal* diperkirakan akan berpengaruh secara signifikan terhadap investasi dan nilai perusahaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa apabila diasumsikan bila *board size* perusahaan tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap *firm performance* dan investasi, maka hipotesis ke 3a, 3b dan 3c yang dapat diajukan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 3a diajukan dalam studi ini adalah *board size* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hipotesis 3b *board size* berpengaruh positif terhadap investasi dan hipotesis 3c investasi memediasi pengaruh antara *board size* dan nilai perusahaan.

Ukuran Perusahaan dan Investasi

Masalah ukuran perusahaan adalah faktor penting dalam persepektif struktur modal. ukuran dari suatu perusahaan adalah suatu indikator yang penting dalam suatu sistem ekonomi yang telah menimbulkan ketertarikan di antara para peneliti. Penelitian empiris sebelumnya mengeksplorasi mengenai ukuran perusahaan dan telah memberikan banyak bukti bahwa ukuran perusahaan secara berpengaruh signifikan terhadap investasi. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah (Axtell, 2001; Kaizoji, *et al* , 2006; Stanley, *et al*, 1995 ; Coad, 2009 , de Wit, 2005 ; Sutton, 1997). Secara umum, hasil dari penelitian sebelumnya memungkinkan kita menarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam kebijakan investasi perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki ukuran yang besar berpotensi untuk memilih peluang investasi yang berbeda untuk memperoleh NPV positif dari sejumlah investasi yang telah dilakukannya. NPV positif itu akan memberikan kontribusi terhadap arus kas masuk, dan kemudian terakumulasi dalam meningkatnya profitabilitas. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa apabila diasumsikan bila ukuran perusahaan tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap investasi, maka hipotesis ke 4 yang dapat diajukan dalam studi ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap investasi.

Kebijakan hutang dan Investasi

Kebijakan hutang merupakan keputusan besarnya tingkat penggunaan hutang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan dengan menggunakan *debt to equity ratio*, dapat diperoleh dengan membagi total kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dengan modal sendiri. Pihak manajemen perusahaan harus memperhatikan besarnya pinjaman mengingat adanya pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar bunga serta pinjaman pokoknya. Pengukuran tingkat hutang perusahaan didasarkan pada data yang berasal dari neraca perusahaan dan rasio yang biasanya digunakan dalam finansial leverage, karena semakin tingginya tingkat hutang maka semakin banyak dana yang tersedia untuk membayar dividen. Pembayaran dividen yang meningkat dapat memberikan sinyal positif yang dapat menyebabkan nilai perusahaan naik. Untuk mengukur besarnya *financial leverage* yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.

Kebijakan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa apabila diasumsikan bila hutang perusahaan tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap Investment, maka hipotesis ke 5 yang dapat diajukan dalam studi ini adalah hutang perusahaan berpengaruh positif terhadap Investasi.

Usia perusahaan (Age) dan Investasi

Secara teoritis perusahaan yang telah lama berdiri akan dipercaya oleh penanam modal (investor) daripada perusahaan yang baru berdiri, karena perusahaan yang telah lama berdiri diasumsikan akan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada perusahaan baru berdiri. Akibatnya perusahaan yang baru berdiri akan kesulitan dalam memperoleh dana di pasar modal sehingga lebih mengandalkan modal sendiri. Umur perusahaan diperkirakan mempengaruhi hasrat investasinya karena perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang baik terhadap aktivitas investasinya.

Perusahaan yang telah lama berdiri akan meningkatkan labanya karena adanya pengalaman dari manajemen sebelumnya dalam mengelola bisnisnya, sehingga perusahaan

yang telah lama berdiri memiliki dorongan untuk melakukan investasi yang menguntungkan, dengan kemampuan investasi yang baik ini, perusahaan tentunya juga baik dalam mengelola risiko. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa apabila diasumsikan bila usia perusahaan yang tua maka akan berpengaruh positif terhadap perilaku investasi, maka hipotesis ke 6 yang dapat diajukan dalam studi ini adalah usia perusahaan berpengaruh positif terhadap investasi.

Investasi dan Nilai Perusahaan

Keputusan investasi merupakan keputusan menanamkan modal dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Pemegang saham selalu menghendaki manajer mampu memilih dan menciptakan keputusan investasi yang mampu meningkatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Keuntungan tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan dari sudut pandang investor sehingga dapat memberikan sinyal positif kepada investor yang akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila diasumsikan bila investasi tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis ke 8 yang dapat diajukan dalam studi ini adalah investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Populasi dan Sampel

Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur populasi "go public" yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai 2015. Populasi adalah kriteria sampel tertentu yang digunakan oleh peneliti dengan kriteria memilih beberapa sampel yang relevan dengan rancangan studi pada penelitian sebelumnya, Perusahaan sampel harus memiliki kriteria: **pertama**, Perusahaan harus terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2010-2015, **kedua**, memiliki pertumbuhan aset positif setiap tahun mulai 2010-2015, dan memiliki laporan keuangan dan data selama lima tahun dimulai dari 2010 sampai 2015. Periode pelaporan keuangan perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember di masing-masing. Saham ini memiliki ukuran dan *rasio book to market value* pada bulan Desember tahun. Data tersedia

di neraca tahunan masing-masing perusahaan yang diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan oleh BEI.

Hasil Pengujian

Pengujian data dalam penelitian ini adalah model fit dengan menggunakan: chi-square and probability, goodness of fit indices (GFI), adjusted goodness of fit index (AGFI), root mean square error of approximation (RMSEA), expected cross validation index (ECVI), akaike's information criterion (AIC) dan CAIC, juga fit index. Hasil pengujian goodness of fit model dengan menggunakan indikator dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Table 1 The Test Results of Goodness of Fit Model

Model Fit Indicators	Value	Cutt of Value	Conclusion
Chi-Square dan Probabilitas :	P = 0.37	P > 0,005	Model fit
1. Minimum Fit Function Chi Square			
2. Normal Theory Weighted Least Square Chi Square	P = 0.37	P > 0,005	Model fit
Goodness of Fit Indices (GFI)	1.00	P ≥ 0,90	Model fit
1. Adjusted Goodnes of Fit Index (AGFI)	0.92	P ≥ 0,90	Model fit
2. Parsimony Goodnes of Fit Index (PGFI)	0.69	P > 0,05	Model fit
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	0.00	< 0,050	Model fit
2. P-Value for Test of Close Fit (RMSEA)	0.081	< 0,050	Model fit
1. Expected Cross Validation Index (ECVI)	0.22	1. ECVI (0,22) < ECVI for Saturated(0,28) Model	Model fit
2. ECVI for Saturated Model	0.28	2. ECVI (0,22) < ECVI for Independence Model (2,38)	Model fit
3. ECVI for Independence Model	2,38		Model fit
Akaike's Information Criterion (AIC) dan CAIC :		1. Model AIC (66.99) < Independence AIC (984.11) dan Model AIC (293,59) < Saturated AIC (300,35)	Model fit
1. Model AIC	66.99		
2. Independence AIC	964.10		
3. Saturated AIC	90,00	2. Model CAIC (293,59) < Independence (964,10) and	
4. Model CAIC	293.59	Model CAIC (293,59)<	Model fit
5. Independence CAIC	984.11		

6. Saturated AIC	300.35	Saturated AIC (311,35)	
Fit Index : Normed Fit Index (NFI)	P > 0,70	0,95	Model fit
Comparative Fit Index (CFI)	P > 0,80	0,97	Model fit
Incremental Fit Index (IFI) Relative	P > 0,80	0,97	Model fit
Fit Index (RFI)	P > 0,80	0,92	Model fit

Sumber : Hasil pengolahan data oleh LISREL

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa semua *indeks goodness of fit* model terstruktur sesuai. Hal ini terlihat dari nilai hasil model, yang sesuai dengan *cut off value description*.

Uji Hipotesis

Berdasarkan perhitungan melalui analisis jalur meliputi nilai perusahaan, ukuran perusahaan, hutang, dan variabel peluang investasi. Langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis yang diajukan. Hasil hipotesis dapat dilihat berdasarkan besarnya nilai *t* pada tabel 3 seperti di bawah ini. Tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Pengaruh langsung *Corporate Governance*; Hutang; Ukuran Perusahaan; Usia Perusahaan; Nilai Perusahaan dan Investasi

Variables	Unstandard Estimate	Coefficient Standardized	t Value
IO → NP	0.12	0.06	2.74*
BI → NP	0.04	0.01	1.74
BS → NP	0.11	0.81	4.66*
INV → NP	0.71	0.48	2.25*
IO → INV	0.30	0.34	3.37*
BI → INV	0.39	4.01	2.39*
BS → INV	0.48	0.12	2.44*
Ukuran → INV	0.20	0.14	1.68**
Hutang → INV	0.06	0.25	4.87*
Usia → INV	0.00	0.02	0.53

Source: The result of data processing by LISREL

Description: *) significant on $\alpha = 5\%$

**) significant on $\alpha = 10\%$

Dalam penelitian ini juga akan melihat pengaruh tidak langsung. Pertama adalah pengaruh tidak langsung *Institutional ownership* terhadap nilai perusahaan melalui variabel investasi. Kedua, pengaruh tidak *board independen* terhadap nilai perusahaan melalui investasi dan Ketiga, pengaruh tidak langsung *board size* terhadap nilai perusahaan melalui investasi yang diukur dengan uji sobel dapat di lihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Table 4. Pengaruh Tidak Langsung *Corporate Governance*; Hutang; SIZE; AGE; NP dan INV

Variable	Statistical Test	p value	Error Standard		Result
IO →INV → NP	0.75	0.6461	0.3436	$p\ value > 0,05$	rejected
BI →INV → NP	0.14	0.0109	0.3557	$p\ value < 0,05$	accepted
BS →INV → NP	0.45	0.3267	0.3449	$p\ value > 0,05$	rejected

sumber: pengujian data menggunakan Sobel Test

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good governance* terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian pada hipotesis pertama bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, didukung secara empiris. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t sebesar 2.74. Sedangkan hipotesis 2 ditunjukkan dengan nilai t 1.74 dan hipotesis 3 ditunjukkan dengan nilai t 4.66. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kepemilikan institusional merupakan penentu positif bagi nilai perusahaan. Namun *Board independen* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan *board size* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa *corporate governance* sebagai variabel yang mempengaruhi Nilai perusahaan yang akan berdampak pada reputasi perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan tidak berdasar pada pemaksimalan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan pendanaan. Manajemen tidak menanggung risiko atas kesalahan pengambilan keputusan, risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham. Penyebab lain konflik ini adalah para pemegang saham hanya peduli pada risiko sistematis dari saham perusahaan, karena mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Namun manajer sebaliknya lebih

peduli pada risiko perusahaan secara keseluruhan.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini memperoleh dukungan empiris. Karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu pengaruh *good governance* terhadap investasi meliputi hipotesis kepemilikan Institusional terhadap investasi ditunjukkan dengan nilai t 3.37, sedangkan hipotesis *board independen* terhadap investasi ditunjukkan dengan nilai t 2.39 dan hipotesis *Board Size* ditunjukkan dengan nilai 2.44. Hasil pengujian hipotesis kedua ini *corporate governance* berpengaruh terhadap aktivitas investasi perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang melakukan investasi tentunya akan menarik investor. Sejalan dengan teori signaling, Bahwa tingkat investasi yang dipilih adalah salah satu yang memaksimalkan *net present value*. Keuntungan dimasa yang datang itu dibiayai dari sumber pendanaan eksternal dan internal. Oleh karena itu pemanfaatannya perlu fungsi monitoring yang baik dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan Institusional, *Board independen* dan *board size*.

Hasil pengujian hipotesis keempat ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap investasi mendapat dukungan empiris, ditunjukkan dengan t 1.68. dengan demikian penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yaitu Kester (1984), Jensen (1986) ; Siegel (1986); Lewellen et al. (1987); Collins dan Kothari (1989), Sharpie (1991); Chung Chaeonwong (1991), Smith & Watts (1992); McDonald & Pindyck (1993), Voght (1997), Saputro & Hartono (2002), Kallapur, Trombley, dan Mark (2001). Perusahaan manufaktur di Indonesia telah mulai melakukan investasi dan difersifikasi sejak perusahaan masih baru berdiri. Manajer perusahaan akan selalu pada posisi tahu lebih banyak tentang nilai aset dan peluang daripada investor hal ini akan menunjukkan segala hal secara mendasar sebagai manajer investasi dalam setiap proyek mereka tahu memiliki bahwa suatu proyek memiliki NPV positif.

Pengujian hutang berpengaruh positif terhadap investasi mendapat dukungan empiris, ditunjukkan dengan t 4.87. Dengan demikian penelitian ini mendukung Fama (1978) mengenai Keputusan investasi. Fama (1978) menyatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa keputusan

investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai perusahaan, yang berarti menaikkan kemakmuran pemegang saham. Penggunaan sumber pendanaan untuk investasi sesuai dengan Teori pecking order diperkenalkan pertamakali oleh Donaldson (1961). Teori ini menunjukkan sebuah hierarki dalam pencarian dana perusahaan dimana perusahaan memiliki urutan preferensi tertentu terhadap modal yang digunakan untuk membiayai bisnis mereka, Myers dan Majluf (1983). Karena asimetri informasi antara perusahaan dan calon investor, perusahaan akan lebih memilih laba ditahan terlebih dahulu untuk membayar dividend dan berbagai peluang investasinya. Apabila perusahaan membutuhkan dana eksternal, maka akan mendahulukan memilih hutang sebelum *eksternal equity*. *Internal equity* diperoleh dari laba ditahan dan depresiasi. Hutang diperoleh dari pinjaman kreditur, sedangkan *external equity* diperoleh karena perusahaan menerbitkan saham baru. secara singkat teori ini lebih menyukai *internal financing* (pendanaan yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan berwujud laba ditahan).

Pengujian hipotesis keenam, usia perusahaan berpengaruh terhadap Investasi, tidak mendapat dukungan empiris dalam penelitian ini. Terbukti dengan nilai t 0.53. Hipotesis ini menunjukkan bahwa usia perusahaan age berpengaruh positif tidak signifikan terhadap investasi. Perusahaan yang berusia *relative* tua memiliki akses pasar yang lebih baik dan akan dapat meningkatkan aktivitas investment. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Pervan dan Visic, 2012; Yildiz et al., 2013; Chen, 2013; Humphery-Jenner dan Powell, 2014; Srivastava and Laplume, 2014).

Pengujian hipotesis ketujuh, Investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tidak mendapat dukungan empiris dalam penelitian ini. Terbukti dengan nilai t 2.25.

Penutup

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pelaksanaan tatakelola perusahaan di Indonesia memang benar di perlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Untuk penelitian mendatang masih diperlukan pengujian mengenai usia perusahaan berpengaruh terhadap Investasi. Karena dalam penelitian tidak terbukti berpengaruh antara keduanya. Kemungkinan proksi usia perusahaan yang dipergunakan untuk mengukur kurang tepat, sehingga perlu di cari proksi yang lebih akurat untuk menilai usia perusahaan.

Daftar Pustaka

- Axtell, R. L. (2001). U . S . Firm Sizes are Zipf Distributed. *Science*, pp.1818–1820.
- Balasubramanian, B. N., Black, B. S., & Khanna, V. S. (2008). Firm-level corporate governance in emerging markets: A case study of India.
- Barros, L. A. B. D. C., & Da Silveira, A. D. M. (2007). Overconfidence, managerial optimism and the determinants of capital structure.
- Bebchuk, L. A., & Cohen, A. (2005). The costs of entrenched boards. *Journal of Financial Economics*, 78(2), 409-433.
- Beiner., S., Drobetz, W., F. Schmid, & H. Zimmermann. (2003). Is Board zise An Independent Corporate Governance Mechanism. *ECGI Finance Working Paper*, N
- Berle, A., & Gardiner, Means. (1932). *The Modern Corporation and Private property*. Mac-Millan, New York.
- Black, B. S., & Khanna, V. S. (2007). Can corporate governance reforms increase firm market values? Event study evidence from India. *Journal of Empirical Legal Studies*, 4(4), 749-796.
- Black, B. S., Balasubramanian, B. N., & Khanna, V. (2008). Firm Level Corporate Governance in Emerging Markets (87).
- Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Predicting firms' corporate governance choices: Evidence from Korea. *Journal of corporate finance*, 12(3), 660-691.
- Black, B., & Kim, W. (2012). The effect of board structure on firm value: A multiple identification strategies approach using Korean data. *Journal of Financial Economics*, 104(1), pp.203–226
- Blacka, B. S., Kimb, W., Jangb, H., & Park, K.-S. (2015). How corporate governance affect firm value? Evidence on a self-dealing channel from a natural experiment in Korea. *Journal of Banking & Finance*, 51, 131–150.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Finance Manajemen*, 628.
- Budiyanti, H. (2016). The Theory of Planned Behavior, Past Behavior, Situational Factors, and Self-Identity Factors Drive Indonesian Entrepreneurs to Be Indebtedness. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 11(1), 46-66.

- Chen, M. Y. (2013). Adjustments in managerial ownership and changes in firm value. *International Review of Economics and Finance*, 25, pp.1–12.
- Chen, S., Chung, T., & Chung, L. (2001). Investment opportunities, free cash flow and stock valuation effects of corporate investments: the case of Taiwanese investments in China. *Review of Quantitative Finance* pp. 299–310.
- Chhaochharia V., & Grinstein, Y. (2009). CEO compensation and board structure. *The Journal of Finance*, 64(1), 231-261.
- Chung, K. H., & Charoenwong, C. (1991). Investment Options, Assets in Place, and the Risk of Stocks. *Financial Management, Autumn Edition*, pp.21–33.
- Coad, A. (2009). *The Growth of Firms: A Survey of Theories and Empirical Evidence*. Edward Elgar: Cheltenham, UK.
- Collins, D., & Kothari, S. P. (1989). An Analysis of Intertemporal and Cross-Sectional Determinants of Earnings Response Coefficients. *Journal of Accounting and Economics*, 11, pp.143–181.
- Cremers, K. J., & Nair, V. B. (2005). Governance mechanisms and equity prices. *The Journal of Finance*, 60(6), 2859-2894.
- De Wit, G. (2005). Firm size distributions an overview of steady-state distributions resulting from firm dynamics models. *International Journal of Industrial Organization*, 23(5-6), pp.423–450.
- Donaldson, G. (1961). *Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity*. Boston, Division of Research, Harvard Graduate School of Business Administration.
- Eisenberg, T., Sundgren, S., & Wells, M. T. (1998). Larger board size and decreasing firm value in small firms. *Journal of Financial Economics*, 48(1), pp.35–54.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of management review*, 14(1), 57-74.
- Fama, E. F. (1978). Effects a Firm's Investment and Financing Decisions on the Welfare of Its Security Holders. *The American Economic Review*, 63(3), 2pp.72–284.
- Fama, E. F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. *Journal of political economy*, 88(2), 288-307.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency problems and residual claims. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 327-349.
- Ferdinand, A. (2005). Structural Equation Modeling In Management Research. Management, Agency Publisher Diponegoro University of Semarang.
- Garay, U., & González, M. (2008). Corporate governance and firm value: The case of Venezuela. *Corporate Governance: An International Review*, 16(3), 194-209.
- Garg, A. K. (2007). Influence of Board Size and Independence on Firm Performance: A Study of Indian Companies. *The Journal for Decision Makers*, 32, pp.39–60.
- Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. *The quarterly journal of economics*, 118(1), 107-156.

- Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1982). Corporate financial structure and managerial incentives. In *The economics of information and uncertainty* (pp. 107-140). University of Chicago Press.
- Humphery-Jenner, M., & Powell, R. (2014). Firm size, sovereign governance, and value creation: Evidence from the acquirer size effect. *Journal of Corporate Finance*, 26, pp.57–77.
- Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *American Economic Review*. 76: Pp. 223-329.
- Jensen, M. C. (1994). *The Modern Theory of Corporate Finance*. Mc Graw – Hill Book Company.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, pp.305– 360.
- Kaizoji, T., Iyetomi, H., & Ikeda, Y. (2006). Re-examination of the Size Distribution of Firms. *Evolutionary and Institutional Economics Review*, 2, pp.183–198.
- Kallapur, S., & Trombley, M. a. (2001). The investment opportunity set: determinants, consequences and measurement. *Managerial Finance*, 27(3), pp.3–15.
- Kast, Freeman and Rosenzweig, 1985, Organizations and Management, A System and Contingency Approach, *Mc Graw Hill Book company*, New York, USA
- Kathleen M. Eisenhardt. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), pp.57–74.
- Kester, W. C. (1984). Today's Option For Tommorrow's Growth. *Havard Bussiness Review*, pp.153–160.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). Government ownership of banks. *The Journal of Finance*, 57(1), 265-301.
- Lewellen, W. G., Claudio, L., & Kenneth, M. (1987). Executive Compensation and Incentive Problems: Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Economic*, 9, pp.287–310.
- Lipton, M., & Lorsch, J. W. (1992). A modest proposal for improved corporate governance. *The Business Lawyer*, 59–77.
- MacKie-Mason, J. K. (1990). Do firms care who provides their financing?. In *Asymmetric information, corporate finance, and investment* (pp. 63-104). University of Chicago Press.
- Mayur, M., & Saravanan, P. (2006). *Does the Board Size Really Matter? An Empirical Investigation on the Indian Banking Sector*. Working Paper Series N. 16.
- Modigliani, F. & Miller, M. H. 1958b. The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. *American Economic Review*, 48, 261-297.
- Monks, R. A. ., & Minow, N. (2001). Corporate Governance, 2nd ed. Blackwell Publishing. Mc Kinsey dan Co
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1983). September 1981 Latest Revision December 1983. *ReVision*, (December).
- Pervan, M., & Visic, J. (2012). Influence of firm size on its business success. *Croatian Operational Research Review*, 3, pp.213–223.

- Pindyck, R. S. (1993). Investments of uncertain cost. *Journal of financial Economics*, 34(1), 53-76.
- Vogt, S. (1994). The Cash Flow/Investment Relationship: Evidence from U.S. Manufacturing Firms. *Financial Management*, 23(2), pp.3-20.
- Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). Legal determinants of external finance. *The journal of finance*, 52(3), 1131-1150.
- Saputro, J. A. (2003). Analysis of Relationship between Joint Proxy Investment Opportunity Set and Real Growth by Using Confirmatory Factor Analysis Approach. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 6(1), pp.1-32.
- Sharpie, A. (1991). *Modern Corporate Finance*.
- Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52, pp.737-783
- Siegel, R., Siegel, E., & MacMillan, I. C. (1988). Corporate venture capitalists: Autonomy, obstacles, and performance. *Journal of Business Venturing*, 3(3), 233-247.
- Skinner, D. J., & Soltes, E. (2011). What do dividends tell us about earnings quality?. *Review of Accounting Studies*, 16(1), 1-28.
- Smith, Jr. Clifford, W., & Watts, R. L. (1992). The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend and Compensation Policies. *Journal of Financial Economics*. 32, pp.263-292.
- Srivastava, M. K., & Laplume, A. O. (2014). Matching technology strategy with knowledge structure: Impact on firm's Tobin's q in the semiconductor industry. *Journal of Engineering and Technology Management*, 33, pp.93-112).
- Stanley, M., Buldyrev, S., & Havlin, S. (1995). Zipf plots and the Size Distribution of Firms. *Economics Letters*, 49, pp.453-457.
- Sutton, J. (1997). Gibrat's Legacy. *Journal of Economic Literature*, 35(1), pp.40-59.
- Utama, S., & Utama, C. A. (2005). Corporate Governance Practice and Firm Value Creation: Empirical Study in Jakarta Stock Exchange.
- Walsh, J. P., & Seward, J. K. (1990). On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms. *Academy of management review*, 15(3), 421-458.
- Yermarck, D. (1996). Higher Market Valuation of a Company with a small board of Directors. *Journal of Financial Economics*, 40, pp.185-211.
- Yildiz, O., Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., & Ayci, A. (2013). The Relationships between Technological Investment, Firm Size, Firm Age and the Growth Rate of Innovational Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, pp.590-599.

PERAN KEWIRAUSAHAAN *CHAMPION* DALAM PENGEMBANGAN KLASTER PERTANIAN

Sri Sulandjari

Surel: sri.sulandjari@staff.uksw.edu
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

ABSTRAK

Sektor pertanian memberi sumbangan terbesar pada kondisi kemiskinan di Indonesia; baik secara langsung melalui kuantitas dan kualitas petani, maupun tidak langsung melalui posisi pasar produk pertanian. Upaya pengembangan sumber daya pertanian diselenggarakan sejak negara ini berdiri, namun para petani yang terbelit kemiskinan belum juga beranjak. Beberapa upaya pengembangan pertanian dalam satu dekade belakangan ini dilaksanakan dengan pendekatan klaster. Tokoh klaster yang disebut champion memiliki peran sentral dalam proses pengembangan klaster, terutama dalam menempatkan posisi produk pertanian. Keberhasilan champion dalam menempatkan posisi pasar produk pertanian merupakan outcome peran kewirausahaan. Peran seperti itu belum banyak dijelaskan oleh peneliti terdahulu, oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peran kewirausahaan Champion dalam pengembangan klaster pertanian. Data dikumpulkan dari beberapa klaster pertanian dengan teknik wawancara mendalam dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klaster pertanian yang “menggantungkan kehidupannya” pada peran kewirausahaan champion, maka kelangsungan proses pengembangannya kurang terjamin. Sementara itu, pada klaster yang champion-nya menjalankan peran kewirausahaan (komersial) yang implementasinya mengandung bobot sosial tinggi, maka kelangsungan proses pengembangannya terjamin. Proses pengembangan klaster seperti itu mampu menguatkan posisi produk pertanian dan mengarah pada kemandirian klaster. Temuan tersebut lebih mendukung pendapat Porter, dan mematahkan pendapat para ahli yang meyakini bahwa peran kewirausahaan tidak mungkin berlangsung bersama dengan kewirausahaan sosial.

Kata kunci: Pengembangan klaster pertanian, Champion, Peran Kewirausahaan

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Beberapa negara maju, seperti

Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru dan Australia dengan berhati-hati telah menghapus kebijakan-kebijakan yang mengambat pertumbuhannya, sedang Canada merencanakan akan melakukannya pada tahun 2017 ini (Advisory Council on Economic Growth, 2017)ⁱ. Sektor yang paling potensial untuk dikembangkan di Kanada adalah sektor pertanian dan makanan (*agriculture and food*), karena selain didukung oleh sumberdaya alam sektor itu juga memiliki daya saing yang tinggi di pasar ekspor. Berbeda dengan negara maju, di negara sedang berkembang dan negara miskin, seperti Afrika dan Indonesia, sector pertaniannya didukung oleh sumber daya alam dan manusia namun kurang memiliki daya saing di kancah pasar global. Namun, di negara sedang berkembang atau negara miskin pengembangan sektor pertanian dan pangan merupakan cara yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan (Webber & Labaste, 2010)ⁱⁱ karena sektor tersebut banyak digeluti oleh orang miskin.

Kebijakan umum di bidang pertanian (dalam arti luas) yang dianut banyak negara, termasuk Uni Eropa, memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat baik sebagai produsen maupun konsumen, melalui harga, kualitas, keamanan dan ketersediaan pangan (Hyytiä & Kola, 2005)ⁱⁱⁱ. Indonesia mengucurkan banyak subsidi untuk pertanian tanaman pangan di hulu, terutama berupa benih, pupuk dan obat-obatan. Di hulu sektor peternakan besar dan kecil, Pemerintah memberikan bibit secara bergulir dan obat-obatan kepada peternak. Pada tahap budidaya, petani tanaman pangan diberi bantuan alat terutama traktor tangan, dan kepada peternak besar dan kecil diberi bantuan obat-obatan dan pelayanan kesehatan hewan. Sedangkan di hilir disediakan Bulog untuk menyerap, menyimpan dan menyalurkan produk pertanian serta pengaturan dan pengawasan pagu harga (terutama beras dan gula) untuk menjamin ketersediaan pangan murah. Namun demikian, produk subsidi tidak semuanya terserap Bulog tetapi beredar dan didistribusikan di pasar bebas dengan harga beli di bawah pagu harga yang ditentukan pemerintah, diberi perlakuan tertentu untuk dijual dengan harga tinggi. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan-perusahaan bermodal besar yang menguasai rantai distribusilah yang akan menikmati manfaat subsidi. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Koperasi Unit Desa (KUD) dan

instrument kelembagaan lain tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan ataupun penguatan daya tawar anggotanya. Pemerintah tentu mengalami kesulitan untuk melacak rantai supply produk subsidi karena jumlah petani sangat banyak, berskala kecil dan tersebar luas. Apabila intervensi dan regulasi pasar yang dimaksudkan untuk melindungi petani ternyata salah sasaran, lalu apa atau siapa yang dibutuhkan petani untuk melindungi diri dan menguatkan daya tawarnya?

Daerah bentangan lahan pertanian secara otomatis merupakan konsentrasi geografis atau sentra usaha tani, yang sangat potensial dikembangkan menjadi klaster pertanian. Klaster adalah konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan yang saling terkait, pemasok, penyedia jasa, perusahaan-perusahaan dalam industri terkait, dan asosiasi perusahaan-perusahaan yang bersaing satu sama lain namun juga saling bekerjasama (Porter, 1998)^{iv}. Mengubah sentra menjadi klaster, dibutuhkan *cluster initiatives* yaitu, upaya penguatan daya saing klaster, dengan melibatkan petani, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau lembaga pendidikan (Ketels at al. 2008), yang dikenal dengan istilah *triple helix*.

Kebijakan pengembangan klaster makin populer digunakan dalam dua dekade terakhir. Klaster dapat menggerakkan lingkungan bisnis yang kondusif bagi peningkatan daya saing dan kemampuan inovasi dari pelaku-pelaku klaster (Delgado at al. 2012). Pendekatan klaster (*cluster-based policy*) ditujukan untuk mengatasi sistem inovasi yang tidak sempurna dengan jalan memberdayakannya agar berfungsi lebih efisien dan menghindari kegagalan koordinasi (Theus & Zeng, 2017)^v. Pada umumnya, sasaran pengembangan klaster di Eropa adalah pada penguatan kapasitas manajemen organisasi (Kergel at al. 2014)^{vi} yang juga diaplikasikan secara intensif di Indonesia, antara lain oleh GIZ dan Bank Indonesia. Sedikit-dikitnya dibutuhkan satu pelaku klaster yang aktif dan inovatif untuk menggerakkan organisasi dan memainkan peran mememanajementi aktivitas klaster. Pelaku klaster yang berhasil melakukannya disebut *Champion*, sedangkan yang hanya mampu menggerakkan organisasi klaster disebut penggerak klaster.

Peran *Champion* dalam pengembangan klaster keberlanjutan sangat penting untuk membawa embrio klaster menjadi pemenang nasional dan kemudian secara mandiri mampu

menempatkan klaster kelas dunia (Kergel et al. 2014)^{vii}. Untuk itu, *Champion* harus memainkan peran kewirausahaannya dalam mengembangkan inovasi klaster dan mendongkrak *cluster management excellent* yang berbasis kerjasama namun berorientasi laba. Seperti apakah peran kewirausahaan *Champion* dalam menghela perkembangan klaster pertanian di Indonesia? Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam tulisan ini melalui beberapa contoh kasus dari hasil penelitian deskriptif.

Makna Teoretis Peran Champion dalam Pengembangan Klaster

Pada umumnya bentangan lahan di wilayah tertentu yang oleh para petani atau pengusaha dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau kehutanan, maka terciptalah klaster secara geografis dan sectoral (Schmitz, 1992)^{viii}. Secara sederhana, klaster pertanian dapat digambarkan sebagai konsentrasi produsen, agro-industri, dan pedagang (sebagai pelaku klaster) dan actor-aktor swasta dan pemerintah lainnya (sebagai lembaga pendukung) yang terlibat dalam industri yang sama, saling terhubung dan membangun jejaring, baik secara formal maupun informal, untuk menghadapi tantangan bersama maupun untuk memanfaatkan peluang bersama (Gálvez-Nogales, 2010)^{ix}. Klaster yang paling dinamis bertumbuh dengan sendirinya, tanpa intervensi dari aktor luar, karena itu pendekatan klaster lebih menekankan pada jejaring produksi dan rantai nilai daripada inisiatif untuk mendorong inovasi secara nasional (Theus & Zeng, 2017)^x. Pihak yang menggerakkan dinamika klaster dan yang mendorong pertumbuhan klaster berasal dari anggota klaster atau pelaku rantai di dalam jejaring klaster, yang disebut *champion*.

Pengembangan klaster di negara sedang berkembang bertujuan untuk meningkatkan daya saing berbasis inovasi, yang harus didukung oleh rantai nilai untuk menemukan masalah dan hambatan koordinasi dan kerjasama antar segmen pelaku dan *stakeholders*, untuk menemukan solusi masalah dan kebutuhan pengembangan klaster (USAID, 2008). *Champion* harus menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama di dalam (internal) klaster dan juga dengan segmen pelaku rantai (mitra eksternal) dan *stakeholders*, untuk mengembangkan klaster secara berkelanjutan. *Champion* bertanggungjawab untuk mengembangkan klaster

menuju pemenang nasional dan kemudian menjadi pemenang global atau klaster kelas dunia, sehingga mencapai *cluster management excellent* (Kergel et al. 2014)^{xi}. Kergel et al. memetakan pentingnya perbedaan skema bantuan menurut tingkat kematangan klaster, sebagai berikut.

Tabel 1. Pentingnya perbedaan skema dukungan dengan siklus hidup klaster (Kergel et al. 2014)

Siklus hidup klaster	Pentingnya dukungan R&D	Pentingnya Cluster Management Excellence	Pentingnya internasioalisasi
Embrio klaster	0	+	-
Pemenang nasional	+	++	++
Klaster kelas dunia	++	0	+

Beberapa produk klaster negara sedang berkembang diperdagangkan dipasar global dan makin terkonsentrasi (tunduk) dengan pasar global dan diecerkan oleh perusahaan transnasional (Schmitz, 1992). Bagaimana produsen-produsen lokal di klaster negara sedang berkembang berkoordinasi dengan pasar di negara maju, oleh Humphrey & Schmitz (2000)^{xii} dijelaskan dengan dua konsep utama, yaitu *governance* dan *upgrading*. Konsep *governance* (tata kelola) dimaknai sebagai koordinasi aktivitas ekonomi melalui hubungan nir-pasar, dan dibedakan dalam tiga jenis yaitu: jejaring, quasi hirarki, dan hirarki. *Champion* bertanggungjawab atas tata kelola klaster, berperan sebagai koordinator aktivitas ekonomi melalui hubungan sosial (nir-pasar). *Champion* dituntut memiliki kapabilitas manajerial, komunikasi, negosiasi dan networking yang tidak hanya didasarkan pada hubungan pasar dan professional, namun juga hubungan sosial. *Champion* harus mampu membangkitkan rasa percaya diri para anggota klaster dan rasa saling percaya satu sama lain termasuk terhadap tim

manajemen klaster, karena hal ini menjadi syarat untuk membangun modal sosial klaster (Gálvez-Nogales, 2010)^{xiii}.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *upgrading* oleh Humphrey & Schmitz (2000)^{xiv} menunjuk pada tiga tahap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau sekelompok perusahaan, yaitu: (1) *upgrading* proses (transformasi) agar lebih efisien dengan cara mereorganisir sistem produksi atau mengadopsi teknologi yang lebih canggih, (2) *upgrading* produk: dengan jalan mengembangkan lini produk menjadi lebih rumit, dan (3) *upgrading* fungsional: dengan jalan menciptakan fungsi baru dalam rantai seperti desain atau pemasaran. Menurut Humphrey & Schmitz (2000), *upgrading* proses ditujukan untuk efisiensi, dan Kaplinsky & Morris (2002)^{xv} menegaskan bahwa efisiensi produksi ini menjadi satu-satunya kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan penetrasi pasar global. Sedang *upgrading* produk dan fungsi akan menghasilkan reposisi klaster dalam pasar global (Humphrey & Smith, 2000)^{xvi} yang memungkinkan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan asalkan faktor dinamis di sepanjang rantai nilai dipahami oleh *Champion* (Kaplinsky & Morris, 2002).

Upgrading klaster juga menjadi tanggungjawab *Champion* dituntut menjalankan peran kewisausahaannya, untuk membaca tantangan dan peluang inovasi untuk pengembangan proses, produk dan fungsi ekonomi. Peran tersebut tidak hanya dikerjakan sendiri, namun dilakukan dengan melibatkan anggota klaster dalam pengambilan keputusan secara kolektif (dari – oleh – untuk mereka). Chakrabakti (1974)^{xvii} mengidentifikasi lima tahap proses pengambilan keputusan kolektif yang harus dilakukan : (1) stimulasi, untuk membangkitkan kesadaran akan kebutuhan inovasi, (2) inisiasi, memunculkan dan menyampaikannya gagasan baru agar diperhatikan. (3) legitimasi, dapat diterima dan didukung dengan menyatakannya sebagai norma dan nilai organisasi, (4) pengambilan keputusan, untuk mendapatkan komitmen alokasi sumberdaya atas gagasan pengembangan klaster yang telah diusulkan, dan (5) eksekusi, sebagai proses actual menerapkan hasil keputusan.

Rantai nilai merupakan kunci kerangka kerja untuk memahami bagaimana input dan jasa dibawa bersama-sama dan kemudian digunakan untuk dibudidayakan, ditransformasi, atau

diolah menjadi produk; lalu bagaimana produk dikirim secara fisik dari produsen ke konsumen; dan bagaimana nilai meningkat sepanjang rantai (Webber & Labaste, 2010)^{xviii}. Kemampuan kluster untuk meningkatkan kinerja ekonomi yang tinggi sering disebut *cluster excellence* (pwc, 2011)^{xix}. Kinerja ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan kluster, nilai tambah, produktivitas dan *innovativeness*. Variabel-variabel kinerja tersebut dapat dimanfaatkan sebagai *Key Performance Indikator* untuk mengukur keberhasilan *Champion*.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Chakrabakti (1974)^{xx} mengidentifikasi kualitas yang seharusnya dikuasai *Champion* adalah: (1) kemampuan teknis, (2) pengetahuan tentang perusahaan, (3) pengetahuan tentang pasar, (4) pengarah dan agresifitas, (5) ketajaman politis. Kualitas yang dituntut dari *Champion* tersebut searah dengan karakteristik pekerjaan yang dihadapinya. Apabila kita perhatikan dengan cermat tentang kualitas *Champion* yang dibutuhkan tersebut mencerminkan bahwa karakteristik pekerjaannya menuntut peran kewirausahaan yang sifatnya campuran antara ekonomis/komersial dengan sosial.

Metode Penelitian

Paper ini merupakan studi kasus dua kluster untuk menggambarkan peran kewirausahaan *Champion* dalam pengembangan kluster pertanian. Kasus pertama menggambarkan pengembangan embrio kluster menjadi kluster lokal, kasus kedua menggambarkan perkembangan kluster yang mengakses pasar global. Jenis datanya kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan. Sampel diambil dengan teknik *snowball* untuk menelusur pelaku kluster dengan pendekatan rantai nilai. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memetakan rantai nilai dan dinarasikan untuk menjelaskan peran *Champion*.

Pengembangan Klaster Pertanian

Pentingnya Pengembangan Klaster Pertanian^{xxi}

Hasil olahan data statistik tenaga kerja dan ekonomi dari BPS (2016)^{xxii} menunjukkan Indonesia mengalami pergeseran kontribusi sektor pertanian pada PDRB dan serapan tenaga kerja yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, sedang kontribusi sektor industri relatif stabil dan sektor jasa transportasi dan komunikasi yang meningkat (lihat Gambar 1 – 3, terlampir). Jika dilihat dari produktivitas tenaga kerjanya, sektor industri dan jasa tinggi dan cenderung meningkat, sedang sector pertanian rendah namun juga cenderung meningkat. Penelitian disertasi Sulandjari (2008)^{xxiii} membuktikan bahwa di sektor industri skala kecil, peningkatan produktivitas tenaga kerja berasal dari meningkatnya kontribusi teknologi. Diduga, hal yang sama terjadi pada sektor pertanian dan jasa transportasi dan komunikasi.

Pada sektor ekonomi yang produktivitas tenaga kerjanya rendah karena padat tenaga kerja pada umumnya menggunakan teknologi sederhana, sehingga cenderung dihindari oleh tenaga terdidik. Dalam kondisi trend tingkat pendidikan penduduk usia produktif yang meningkat, maka sektor pertanian yang produktivitasnya rendah cenderung dihindari oleh tenaga kerja muda. Kondisi tersebut tampak dari semakin sulitnya petani memperoleh tenaga penggarap lahannya karena angkatan kerja usia muda yang terdidik memilih bekerja di sektor lain, terutama sektor industri.

Pada dasarnya sektor pertanian merupakan sektor yang beresiko tinggi karena sangat tergantung ada kondisi alam, baik struktur tanah, cuaca, air, hama dan penyakit tanaman. Aktivitas produksi di sektor seperti itu sebetulnya sangat padat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik yang bersifat *tacit* maupun yang telah terkodifikasi. IPTEK yang bersifat *tacit* dikuasai oleh petani generasi tua, sayangnya tidak banyak generasi muda yang tertarik mewarisinya. Generasi muda lebih memilih cara produksi yang berbasis IPTEK terkodifikasi, sebagian yang merasa jera terbentur risiko alam bertubi-tubi, maka akan berpindah ke sektor lain. Namun, bagi yang memiliki kemampuan inovatif akan mencari tambahan IPTEK untuk menemukan solusi dalam mengatasi risiko alam yang datang bertubi-tubi tersebut.

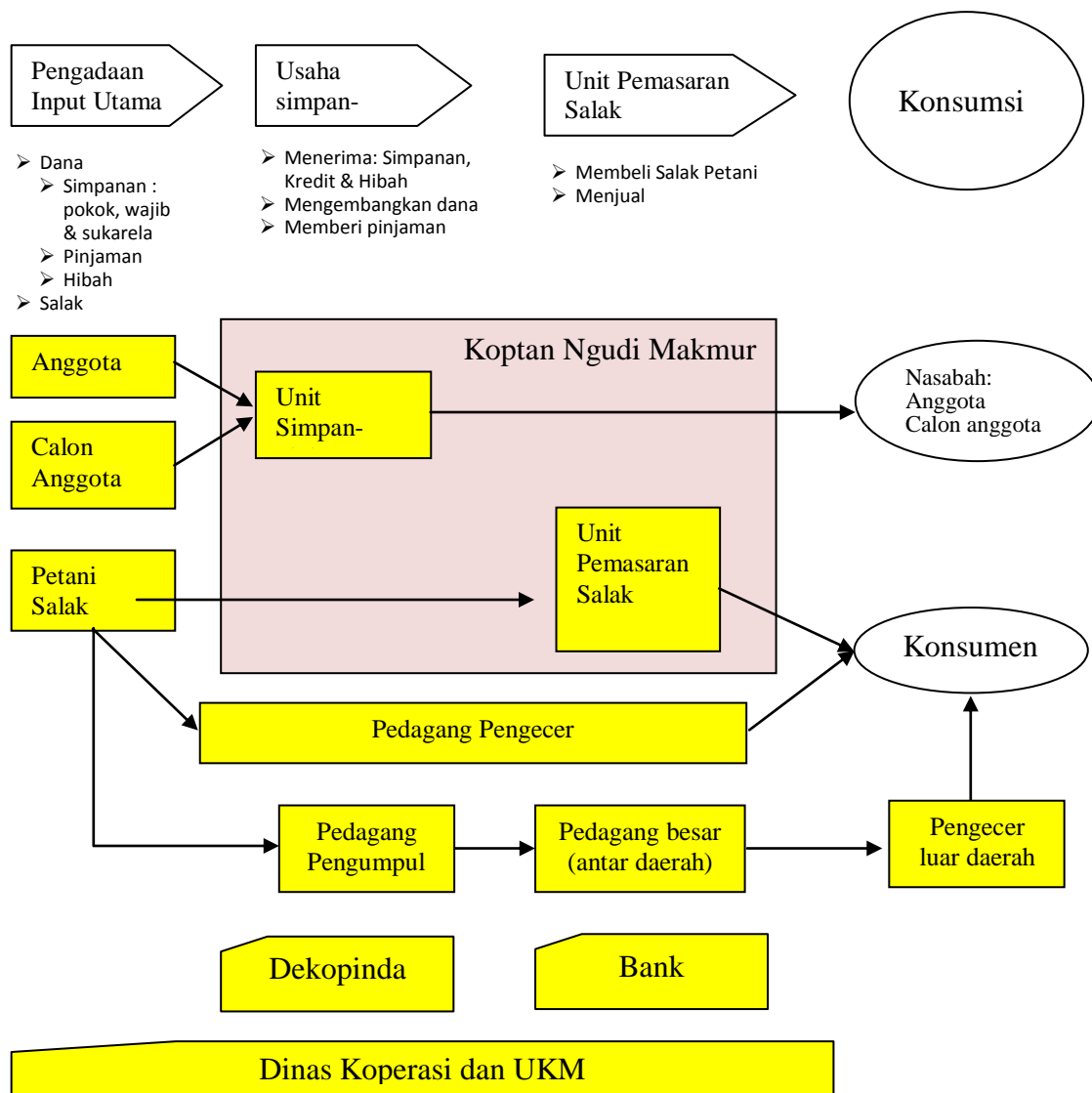
Selain faktor teknologi, produktivitas sektor pertanian yang rendah juga disumbang oleh corak pasar input dan produk pertanian yang diatur (*regulated*), terutama komoditas tanaman pangan. Para petani yang telah lama dimanjakan oleh subsidi input: benih, pupuk dan obat-obatan cenderung menolak membayar input pada harga pasar dan memilih “menunggu” bantuan untuk menggarap lahannya. Hal itu dilakukan karena jika petani membayar input dengan harga pasar, maka akan merugi ketika pagu harga jual produk yang ditentukan pemerintah rendah. Sikap dan perilaku seperti itu merupakan respon terhadap kebijakan subsidi yang berkontribusi pada rendahnya produktivitas pertanian. Di pihak lain, petani yang memiliki kemampuan teknologi penangkaran benih juga enggan melakukannya karena ditolak pasar. Dalam kondisi seperti itu, dibutuhkan petani yang memahami lingkungan makro dalam bisnis pertanian untuk mewakili kelompoknya melakukan advokasi kebijakan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan sektor pertanian.

Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas, namun belum mampu mencapai swa sembada pangan karena pemanfaatan lahan yang belum ekstensif ataupun intensif. Sebagian kebutuhan pangan penduduk Indonesia dipenuhi dari impor, baik impor bahan mentahnya seperti gandum dan kedelai maupun produk jadi yang siap pakai/saji. Beberapa jenis produk pangan siap pakai/saji menggunakan bahan mentah yang berasal dari Indonesia, seperti biji coklat, rumput laut, crude palm oil, dan sebagainya. Permasalahan penguasaan teknologi, ketersediaan modal, dan penguasaan pasar seringkali menjadi hambatan utama bagi pengusaha yang akan berinvestasi untuk mengolah produk tersebut. Produk yang proses pengolahan dapat dipecah-pecah (*division of labor*) maka pengembangan klaster dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan penguasaan teknologi, modal dan penguasaan pasar, dengan jalan melakukan *join action and production*. Untuk itu dibutuhkan pelaku yang memiliki kemampuan inovasi dan mendongkrak *cluster management excellence* berbasis kerjasama.

Peran Kewirausahaan dalam Pengembangan Klaster Salak, Pemenang Pasar Lokal^{xxiv}

Banjarnegara menjadi sentra penghasil salak yang terkenal setelah berhasil menyalurkan salak pondoh dari Sleman DIY dengan salak Nglumut dari Magelang, menjadi varietas salak baru yang khas. Masyarakat menanam kombinasi salak silang 50% dan 50% salak lokal. Tanaman salak mencakup 18 Kecamatan, tertinggi di Kec. Madukarsa (\pm 136.000 ton setahun) dan terendah di Kec. Sigaluh (\pm 6.000 ton pertahun), rata-rata total Kabupaten \pm 194.000 ton per tahun dari tanaman produktif sekitar 13.000 batang. Petani salak Banjarnegara tidak tahu sejak kapan tanaman salak dibudidayakan, karena sejak orang tuanya kecilpun sudah ada. Kondisi tanah yang subur, di lereng pegunungan dengan hawa sejuk cocok untuk tanaman salak.

Petani penghasil salak mengorganisir diri dalam Keoperasian Ngudi Makmur yang bidang usahanya simpan – pinjam dan jual-beli salak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pameran. Petani bebas menjual salak kepada pedagang pengumpul dan pedagang besar (tengkulak) serta pedagang pengecer. Rantai Nilai salak Banjarnegara sebagai berikut (lihat Gambar 1). Peta Rantai Nilai tersebut telah dicek ulang ke lapangan, dan kondisinya masih relative sama.



Gambar 1. Peta Rantai Nilai Salak Banjarnegara

(Sumber: Dinas Koperasi Jeteng – Cemsed FEB UKSW, 2013, diperbaharui)

Tokoh sentral yang dianggap sebagai *Champion* adalah yang dipilih menjadi Pengurus Koperasi Ngudi Makmur, terutama ketua. Koperasi diharapkan dapat mengendalikan jadwal panen dan mengendalikan harga salak ketika panen raya, melalui bisnis candak kulak salak. Namun demikian *Champion* yang ditempatkan sebagai pengurus Koperasi kurang mampu memainkan peran kewirausahaannya. Yang dikerjakan sampai sekarang adalah *business as usual*.

Dibutuhkan daya inovatif, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan politis yang tajam untuk membuat perubahan. Akibatnya, klaster salak Bojonegoro mengalami stagnasi dan bergerak di pasar lokal (provinsi).

Peran Kewirausahaan dalam Pengembangan Klaster Gula Semut, Pemenang Pasar Global^{xxv}

Kondisi geografis, curah hujan, kelembaban, struktur tanah dan ketinggian lokasi Kabupaten Banyumas sangat cocok untuk tanaman kelapa, sehingga Banyumas merupakan penghasil gula kelapa yang potensial dan terbesar di Indonesia. Kegiatan budidaya kelapa untuk disadap niranya dan diolah menjadi gula kelapa telah dilakukan oleh penduduk Banyumas sejak lama dan selalu diwariskan pada keturunannya, kapan waktu pastinya tidak diketahui oleh generasi yang ada. Budidaya tanaman kelapa dilakukan dilahan pekarangan dan tegalan atau perkebunan skala kecil. Industri pengolahan gula kelapa dilakukan oleh generasi tua masyarakat Banyumas dalam skala mikro (rumah tangga) hingga kecil. Generasi muda yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, lebih suka bekerja di kota dan pada industri besar. Menyadari kondisi itu, pemerintah Kab. Banyumas bekerjasama dengan Universitas Jendral Sudirman, menerjunkan Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL) yang telah dibekali pemahaman tentang poses bisnis gula kelapa secara mendalam.

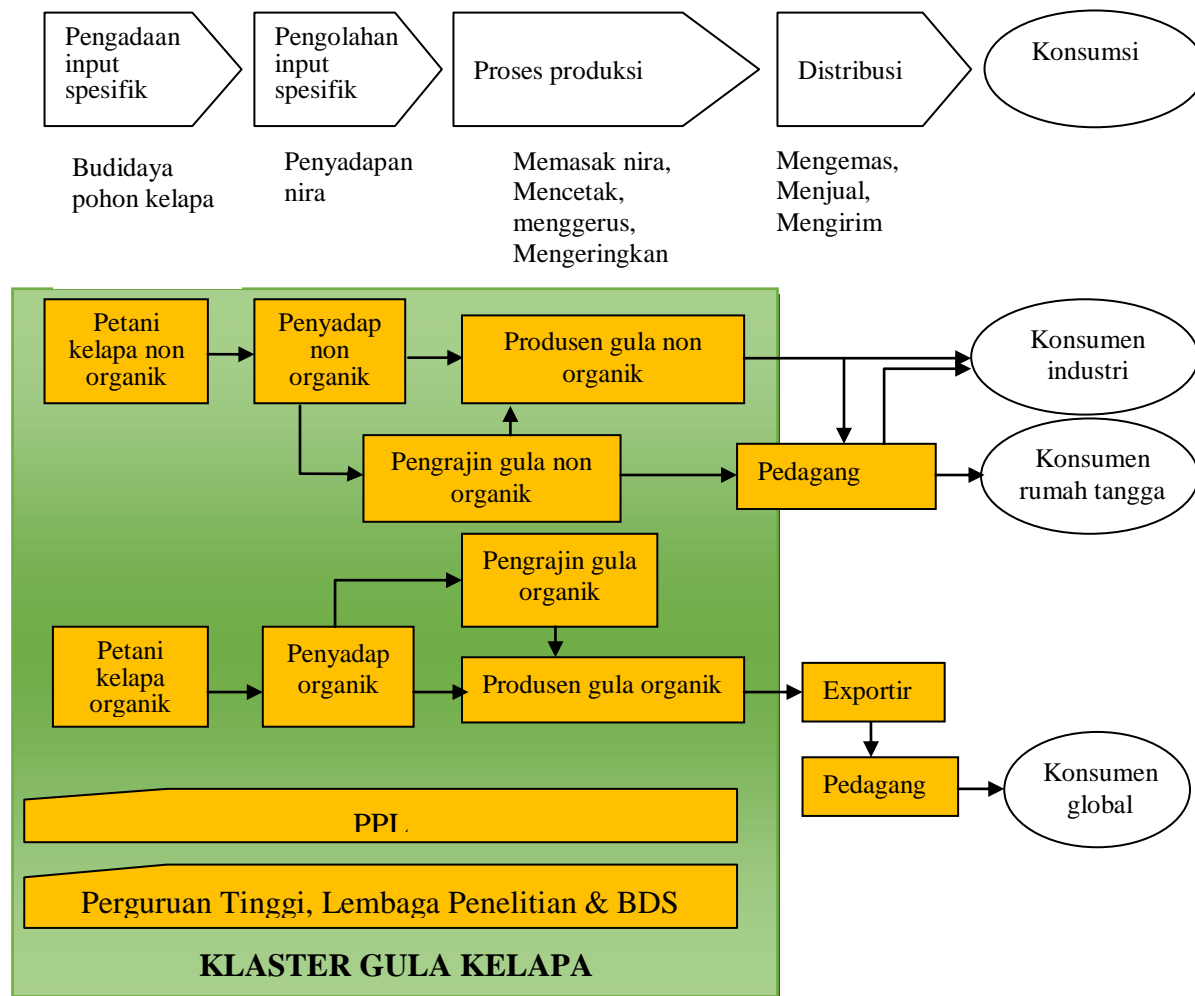
Luas lahan yang ditanami kelapa di Kab. Banyumas mencapai \pm 19 hektar, dengan jumlah tanaman \pm 2,5 juta pohon, dimana 1,8 pohon diantaranya (72%) masih produktif, namun yang disadap niranya hanya 0,65 juta pohon (26% dari total pohon). Penyadapan nira tersebut melibatkan 25.700 orang tenaga penyadap dan 30.027 unit pengolah yang menyerap 94.280 orang tenaga kerja. Para pengrajin gula kelapa mengorganisir diri dalam 217 kelompok yang tersebar di 27 Kecamatan. Produksi gula kelapa mencapai \pm 59 ton dengan kisaran harga Rp.6.000,- - Rp.10.000,- per kg; sementara itu, harga eceran di kota mencapai Rp.15.000,- per kg. Omset gula kelapa di Kab. Banyumas mencapai Rp.400 milyar per tahun (Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2010).

Beberapa perusahaan gula kelapa pernah menjadi pemasok eksportir gula kelapa ke Jepang, Korea, Belanda, Arab Saudi dan Australia. Mereka adalah para pengurus kelompok yang mampu menggerakkan anggota untuk bekerjasama secara kuantitatif memenuhi permintaan eksportir. Di sini, para pengurus kelompok sebagai *Champion* berhasil memainkan peran kewirausahaannya dalam melakukan *upgrading* fungsi pemasaran. Permintaan gula kelapa dari manca negara cukup besar, sehingga banyak penyadap yang mengambil nira dari kabupaten sekitar, seperti Cilacap, Kebumen, Purbalingga dan Purworejo. Pasokan ke pasar ekspor berhenti karena tidak mampu memenuhi tuntutan kualitas produk gula organik dari konsumen global. Para *Champion* yang menjadi pengurus kelompok tidak mampu melakukan *upgrading* proses maupun produk dan fungsi lanjutannya.

Sejak tahun 2000an, PPL budidaya kelapa di Kab. Banyumas telah membimbing petani kelapa, penyadap nira dan pengrajin gula kelapa untuk menerapkan sistem organik, namun hingga tahun 2010 belum berhasil. Seorang PPL yang inovatif dan memiliki kemampuan manajerial tinggi, tidak tahan melihat peluang bisnis yang besar tersebut. Dia keluar dari pekerjaan sebagai PPL, mengambil risiko berinvestasi untuk membiayai proses sertifikasi tanaman kelapa bekerjasama dengan petani kelapa dan membiayai pembelian mesin produksi gula semut yang memenuhi *Good Manufacture Process* (GMP). Dia menggandeng para penyadap nira dan pengrajin gula yang bersedia mengadopsi GMP Organik untuk bergabung memproduksi gula semut organik untuk memenuhi permintaan pasar ekspor, dan untuk itu dia memberikan insentif dalam bentuk kenaikan harga dan upah. Pada tahun 2011 Dia memulai persiapan investasi dan pada tahun 2012 telah terealisasi bekerjasama dengan eksportir untuk mengirim 2 kontainer per bulan ke pasar global. Kini dia telah menambah satu unit pabrik lagi dan dapat memenuhi permintaan pasar hampir tiga kali lipat.

Mantan PPL tersebut merupakan *Champion* yang telah mampu melakukan *upgrading* proses, produk dan juga fungsi, melalui proses berbagi ilmu dan investasi (lihat Gambar 5). Bukan hanya untuk keuntungan pribadi namun mendistribusikan keuntungan lebihnya kepada para petani, penyadap dan pengrajin gula yang menjadi mitranya. Dia memenuhi kualitas *Champion*: (1) kemampuan teknis, (2) pengetahuan tentang perusahaan, (3) pengetahuan

tentang pasar, (4) pengarah dan agresifitas, (5) ketajaman politis, sebagaimana diungkapkan Chakrabakti.



Gambar 2. Peta Rantai Nilai Salak Banjarnegara

(Sumber: Dinas Koperasi Jeteng – Cemsed FEB UKSW, 2013, diperbaharui)

Kesimpulan

Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat potensial untuk dimanfaatkan secara intensif maupun ekstensif untuk memenuhi permintaan kualitas produk di pasar global. Konsumen pasar domestikpun juga sudah mulai bergeser tuntutannya sejalan dengan

meningkatnya kesadaran akan kesehatan diri dan lingkungan. Di tengah-tengah kluster pertanian juga terdapat orang-orang terdidik yang memiliki kualitas *Champion*, yang dibutuhkan adalah bagaimana menemukan orang tersebut dan mendorong agar bersedia memainkan peran kewirausahaannya secara komersial/profesional dan sosial sekaligus. Contoh kasus *Champion* yang muncul dari kalangan *stakeholders* sangat menginspirasi para pengembang kluster dan bisa menjadi *lesson learnt*.

Daftar Pustaka

ⁱ Advisory Council on Economic Growth, 2017, Unleashing The Growth Potential of Key Sectors, Canada, February 6, <http://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/pdf/key-sectors-secteurs-cles-eng.pdf>, diunduh pada tanggal 9/25/2017.

ⁱⁱ Webber, C. Martin and Patric I. Labeste, 2010, Building Competitiveness in Africa's Agriculture, A Guide to Value Chain Concepts and Applications, IBRD and World Bank siteresources.worldbank.org/INTARD/.../Building_Competitiveness_in_Africa_Ag.pdf, diunduh pada tanggal 9/12/2017.

ⁱⁱⁱ Hyytiä, Nina and Jukka Kola, Citizen' Attitudes towards Multifunctional Agriculture, *Agricultural Policy*, Discussion Papers no: 8, Department of Economics and Management, University of Helsinki, Helsinki, 2015.

^{iv} Porter, Michael, Clusters and The New Economics of Competition, *Harvard Business Review*, Vol. 76, Issue 6.

^v Theus, Florian & Zeng, Agricultural Clusters, Module 5: *Thematic Note 4*, https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/rdf_imported_documents/Agricultural_Clusters.pdf

^{vi} Kergel, Helmut, Gerd Meier zu Köcker, Michael Nerger, New Approaches to Improve The Performance of Cluster Management Organisations in Europe, European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Berlin, 2014, <https://www.cluster-analysis.org/downloads/Newapproachestoimprove.pdf>

^{vii} Ibid – 8

^{viii} Schmitz, Hubert, On the Clustering of Small Firms, *IDS Bulletin*, 1992, Vol. 23, 3, p.64-69,
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1759-5436.1992.mp23003012.x>

^{ix} Gálvez-Nogales, Agro-based Clusters in Developing Countries: Staying Competitive in A Globalized Economy, *Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper*, FAO Fiat Panis, 2010, <http://www.fao.org/docrep/012/i1560e/i1560e.pdf>.

^x Ibid - 5

^{xi} Ibid – 8

^{xii} Humphrey, John & Hubert Schmitz, Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and Global Value Chain Research, *IDS Working Paper 120*,
<https://www.ids.ac.uk/files/Wp120.pdf>

^{xiii} Ibid – 11

^{xiv} Ibid - 13

^{xv} Kaplinsky, Raphael and Mike Morris, *A Handbook for Value Chain research*, Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex, 2002.

^{xvi} Ibid - 13

^{xvii} Chakrabarti, Alok K., The Role of Champion in Product Innovation, *California Management Review*, Winter, 1974, VolXVII, No. 2,
<https://web.njit.edu/~chakraba/champion-cmr.pdf>

^{xviii} Ibid – 2

^{xix} PWC, *Uncovering Excellence in Cluster Management*, PricewaterhouseCoopers,
www.pwc.com

^{xx} Chakrabarti, Alok K., The Role of Champion in Product Innovation, *California Management Review*, Winter, 1974, VolXVII, No. 2,
<https://web.njit.edu/~chakraba/champion-cmr.pdf>

^{xxi} Sulandjari, Sri, Bambang Ismanto, Sri Muryani, Linda Aryani, *Replikasi Perencanaan, Koordinasi dan Sinergitas Model/Sistem Penguatan Koperasi dan UMKM*, Dinas Koperasi

Jawa Tengah dan Pusat Studi Dinamika dan Promosi Usaha Kecil Fakultas Ekonomika dan Bissnis UKSW, Salatiga, 2012.

^{xxii} BPS, Statistik Indonesia 2016, Jakarta, 2016

^{xxiii} Sulandjari, Sri, Pola Perilaku Perusahaan-Perusahaan Kecil dan Pengaruhnya pada Industri Kecil di Klaster Industri dalam Konteks Desentralisasi dan Globalisasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2008.

^{xxiv} Ibid – 23

^{xxv} Ibid – 23.

Lampiran

